RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2027



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2025 Nomor 361);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2026 Nomor 395);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
11. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA Tahun 2027, PPAS Tahun 2027 serta Rancangan RAPBD Kabupaten Bengkalis.

(2) Tujuan Penetapan RKPD Tahun 2027 untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten yang selaras dengan perencanaan Provinsi Riau dan Nasional.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2027 meliputi:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
g. BAB VII : Penutup.

(2) Sistematika RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 19

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ini. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen RKPD tahun 2027 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD. Selain itu, penyelarasan dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam rancangan RKP serta program strategis nasional maupun Provinsi Riau.

Dalam proses penyusunannya, Bappeda Kabupaten Bengkalis melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Kabupaten Bengkalis yang kita cintai bersama ini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3 Maksud dan Tujuan I-5
1.4 Sistematika Dokumen RKPD I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Daerah II-1
2.1.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II-1
2.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) II-12
2.2 Evaluasi Hasil RKPD 2025 ..... II-42
2.3 Evaluasi Capaian SPM II-215
2.3.1 Evaluasi SPM Bidang Pendidikan II-215
2.3.2 Evaluasi SPM Bidang Kesehatan II-216
2.3.3 Evaluasi SPM Bidang Pekerjaan Umum II-220
2.3.4 Evaluasi SPM Bidang Perumahan Rakyat II-222
2.3.5 Evaluasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban II-223
2.3.6 Evaluasi SPM Bidang Sosial II-227
2.4 Rumusan Masalah dan Isu Strategis II-229
2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-229
2.4.2 Permasalahan Dominan II-242
2.4.3 Isu Strategis Daerah II-243
2.5 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD II-261
2.6 Inovasi Daerah II-263
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Fiskal, Target Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan III-2
3.1.1 Arah Kebijakan Fiskal III-2
3.1.2 Target Ekonomi Makro III-6
3.1.3 Pokok-Pokok Kebijakan III-23

3.2 Realisasi Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025 ..... III-25
3.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025 ... III-25
3.2.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025 ..... III-28
3.2.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025 ... III-2
3.3 Proyeksi Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ..... III-4
3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 2027 ..... III-4
3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis 2027 ..... III-5
3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis 2027 ..... III-7
3.4 Pendanaan Non APBD III-8
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran RKPD IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2027 .... IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ..... IV-3
4.2 Tema dan Fokus Pembangunan IV-13
4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ..... IV-14
4.4 Arah Kebijakan IV-60
4.5 Program Prioritas RKPD 2027 ..... IV-68
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2 Indikator Kinerja Daerah VI-4
BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ....II-1
Tabel II-2 Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.....II-6
Tabel II-3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 . II-12
Tabel II-4 Rata-Rata Capaian Program Unggulan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 .....II-43
Tabel II-5 Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 .....II-45
Tabel II-6 Evaluasi Capaian Program, Kegiatan, Subkegiatan RKPD Tahun 2025 .....II-56
Tabel II-7 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023-2025.....II-215
Tabel II-8 Pencapaian SPM Urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025 .. II-217
Tabel II-9 Realisasi Capaian Urusan pekerjaan Umum Tahun 2023-2025 .....II-220
Tabel II-10 Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023-2025.....II-222
Tabel II-11 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023-2025 .....II-224
Tabel II-12 Capaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.....II-224
Tabel II-13 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bengkalis Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Tahun 2023-2025 .....II-226
Tabel II-14 Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023-2025 .....II-227
Tabel II-15 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bengkalis II-251
Tabel II-16 Konsistensi Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 .....II-262
Tabel II-17 Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis.....II-263
Tabel III-1 Penurunan Intensitas emisi GRK (%) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.....III-17
Tabel III-2 Proyeksi Perkenomian Kabupaten Bengkalis 2027 .....III-23
Tabel III-3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 – 2025 .....III-26
Tabel III-4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Sumber Pengeluaran Tahun 2023-2025.....III-30
Tabel III-5 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025.....III-2
Tabel III-6 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027.....III-4
Tabel III-7 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 .....III-6
Tabel III-8 Proyeksi Pembiyaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027.....III-7
Tabel IV-1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 ..... IV-4
Tabel IV-2 Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2027..... IV-8
Tabel IV-3 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi IV-10
Tabel IV-4 Sinkroninasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ..... IV-16
Tabel IV-5 Keselarasan Pro-SN/Tematik Pembangunan Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 ..... IV-18
Tabel IV-6 Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan IV-57
Tabel IV-7 Penyelarasan Arah Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ..... IV-61
Tabel IV-8 Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ..... IV-69
Tabel IV-9 Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2027..... IV-71
Tabel VI-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis tahun 2027..... VI-1
Tabel VI-2 Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Kabupaten Bengkalis tahun 2027 ..... VI-2

Tabel VI-3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2027..... VI-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan dan Keterkaitan Penyusunan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Prioritas Program serta Kegiatan Pembangunan Daerah.I-2
Gambar I-2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis I-4
Gambar III-1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Termasuk Minyak Bumi Dan Gas dengan Provinsi Riau Tahun 2021-2025..... III-7
Gambar III-2 PDRB per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2025 (Juta Rupiah) III-9
Gambar III-3 Kontribusi PDRB Kab. Bengkalis Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2021-2025..... III-10
Gambar III-4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2021-2025..... III-11
Gambar III-5 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2025.. III-12
Gambar III-6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024..... III-14
Gambar III-7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau 2021-2025 .. III-16
Gambar III-8 Tren Konsentrasi Gas Rumah Kaca CO_2 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014– November 2025 ..... III-18
Gambar III-9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025 ..... III-19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen RKPD ini juga memperhatikan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2045 yang sekaligus menjadi instrumen utama dalam menentukan arah implementasi berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada visi pembangunan daerah, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia", yang dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah. Misi tersebut menitikberatkan pada pengelolaan potensi daerah secara optimal, penguatan reformasi birokrasi yang berlandaskan nilai agama dan budaya Melayu, serta penyediaan infrastruktur berkualitas guna mendorong kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah perbatasan.

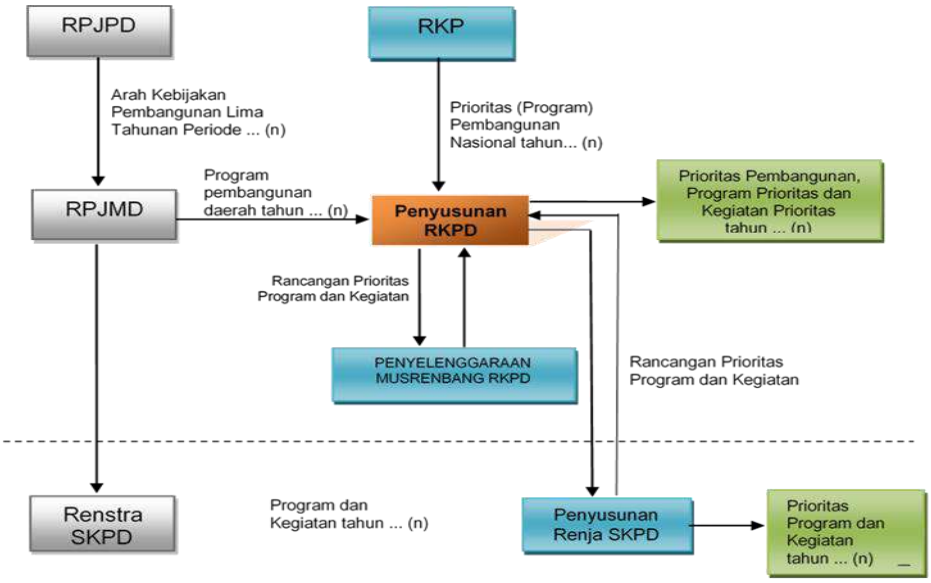
Secara umum, Pembangunan Kabupaten Bengkalis pada tahun kedua ini merupakan kelanjutan dari fondasi yang telah dibangun pada tahun pertama, dengan penekanan pada penguatan hasil dan percepatan capaian pembangunan. Fokus pembangunan diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan reformasi birokrasi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Pendekatan ini menempatkan pembangunan tidak hanya sebagai proses pertumbuhan, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menciptakan keseimbangan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam konteks global, arah pembangunan tersebut juga selaras dengan komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan global seperti penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang lebih baik, kesetaraan gender, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi SDGs dalam dokumen RKPD ini menjadi wujud nyata peran daerah dalam mendukung agenda pembangunan global sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan tersebut, penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, *top-down, bottom-up*, serta pendekatan politik yang terintegrasi secara tematik, holistik, dan spasial. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data dan kebijakan, tetapi juga mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan regulasi terkait lainnya. Hal ini memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta menjadi dasar dalam perumusan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas serta pagu anggaran. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga capaian pembangunan dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan.



Gambar I-1 Hubungan dan Keterkaitan Penyusunan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Prioritas Program serta Kegiatan Pembangunan Daerah

Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Bengkalis disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan sinergi antara perencanaan pembangunan pusat, provinsi, dan daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan

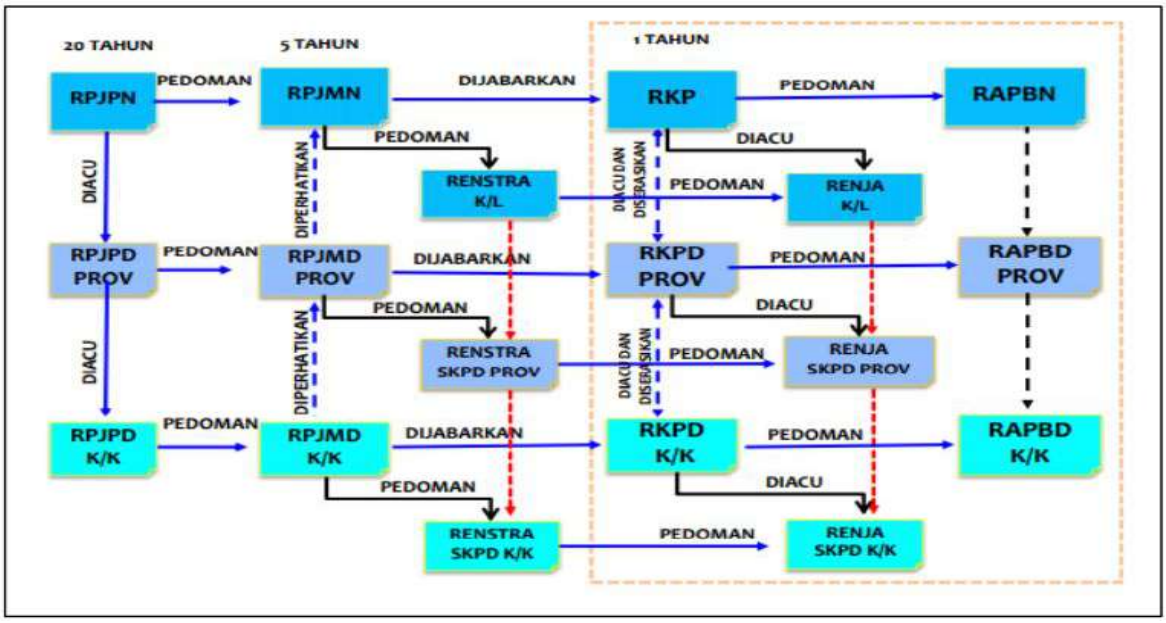
memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional dan agenda global.

RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2027 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045; RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2045. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten BengkalisTahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN.
2. RKPD dengan RPJMD 2025-2029; RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD tahun 2025-2029, sehingga RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ini mengacu pada dokumen RPJMD yang yang disusun secara simultan terkoordinasi. RKPD berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.
3. RKPD dan Renja PD; RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.
4. RKPD dan APBD; RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.
5. RKPD dan RTRW; Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Bengkalis sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
6. RKPD dan RPKD; Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.
7. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan); Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD
8. RKPD dan SPM; Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

9. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi ; Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ini juga mensinergikan/ mensinkronisasikan sasaran dan program prioritas pembangunan dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 yang mengusung tema "*Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah*" sebagaimana dijelaskan pada Bab IV dalam dokumen ini.



Gambar I-2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kabupaten Bengkalis 2027 didasari oleh landasan-landasan hukum terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2027;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 -2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 adalah sebagai dokumen perencanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis yang nanti nya

menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Bengkalis yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029. Secara khusus tujuan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ini dijabarkan sebagai berikut :

1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027;
2) Memberikan landasan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis kedalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah Riau;
3) Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2027 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan;
4) Mengarahkan secara umum kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Tahun 2027;
5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten BengkalisTahun Anggaran 2027;
6) Mempersiapkan koordinasi tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
7) Mempersiapkan langkah penetapan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Organisasi penyusunan (sistematika) dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedomen Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Daerah

2.2 Evaluasi Hasil RKPD 2025

2.3 Evaluasi Capaian SPM

2.4 Rumusan Masalah dan Isu Strategis

2.5 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD

2.6 Inovasi Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Fiskal, Target Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan

3.2 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025

3.3 Proyeksi Keuangan Daerah

3.4 Pendanaan non-APBD

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran RKPD

4.2 Tema dan Fokus Pembangunan

4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

4.4 Program Prioritas RKPD Tahun 2027

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Daerah

2.1.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran pembangunan daerah pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029. Evaluasi ini menjadi penting karena capaian tahun pertama merupakan dasar untuk melihat efektivitas awal pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program prioritas, dan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. IKU digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pembangunan daerah secara makro, antara lain pada aspek pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, pengangguran, ketimpangan, pendapatan per kapita, pembangunan manusia, kemiskinan, reformasi birokrasi, pelestarian kebudayaan, konektivitas antarwilayah, serta kepuasan layanan infrastruktur. Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mengetahui capaian aktual terhadap target tahun 2025, mengidentifikasi indikator yang telah menunjukkan kinerja positif, serta menentukan indikator yang masih menjadi perhatian dan memerlukan penguatan kebijakan pada tahun berikutnya. Adapun evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2025		KET
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	1,59 - 2,83	2,93	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,04	3,5	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,54 - 5,72	5,32	
4	Rasio Gini	Indeks	0,259 - 0,262	0,265	
5	Pendapatan Perkapita	Rp. Juta Per Tahun	297,96 - 298,95	292,06	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,65 - 76,73	77,02	
7	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,27 - 6,33	6,08	
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,53	72,02	
9	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	10,39	42,05	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2025		KET
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
10	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	100,00	75.00	
11	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	65,00	82,00	
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	73,11	N/A	PUPR tidak menghitung indikator ini pada tahun 2025
13	Penurunan intensitas emisi GRK	%	13,95	16,67	

Sumber: e-walidata SIPD dan BPS, 2026

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Dari 13 indikator yang ditetapkan, sebanyak 9 indikator menunjukkan realisasi yang lebih baik dari target, 3 indikator masih memerlukan penguatan, dan 1 indikator belum dapat diukur pada tahun 2025. Capaian yang lebih baik dari target terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Daya Saing Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, Indeks Reformasi Birokrasi, penetapan cagar budaya, konektivitas antarwilayah, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Sementara itu, Rasio Gini, pendapatan per kapita, dan pencatatan warisan budaya takbenda masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,59%–2,83% dan terealisasi sebesar 2,93%. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berada pada tingkat yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Secara struktural, perekonomian Kabupaten Bengkalis masih ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan perekonomian nonmigas didukung terutama oleh sektor industri pengolahan dan pertanian. Dari sisi pengeluaran, aktivitas ekonomi daerah ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan perdagangan antardaerah. Kondisi ini menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melanjutkan transformasi ekonomi secara bertahap melalui penguatan sektor produktif nonmigas, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan nilai tambah industri, penguatan perdagangan, peningkatan investasi, serta pemeliharaan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan kinerja ekonomi tersebut sejalan dengan menguatnya daya saing daerah. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,04 dan terealisasi sebesar 3,50. Capaian ini menunjukkan bahwa daya saing daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut didukung oleh capaian pada

aspek adopsi teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, sistem keuangan, dinamika bisnis, dan kapabilitas inovasi. Namun demikian, aspek institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, dan pasar tenaga kerja tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar peningkatan daya saing daerah dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Perkembangan aktivitas ekonomi dan daya saing daerah turut berkaitan dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,54%–5,72% dan terealisasi sebesar 5,32%. Karena indikator ini semakin baik apabila nilainya semakin rendah, realisasi tersebut menunjukkan capaian yang lebih baik dari target. Meskipun demikian, keterbatasan lapangan kerja, kesenjangan keterampilan, tingkat pendidikan tenaga kerja, dan belum meratanya sertifikasi kompetensi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penguatan ketenagakerjaan menjadi fokus pemerintah daerah melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, penyelenggaraan bursa kerja, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.

Di tengah pertumbuhan ekonomi dan membaiknya ketenagakerjaan, aspek pemerataan pendapatan masih memerlukan penguatan. Rasio Gini Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,259–0,262 dan terealisasi sebesar 0,265. Karena nilai Rasio Gini yang lebih rendah menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih baik, realisasi tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat. Pemerataan hasil pembangunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui penguatan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan berusaha, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar.

Sejalan dengan tantangan pemerataan tersebut, pendapatan per kapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp297,96 juta–Rp298,95 juta per tahun dan terealisasi sebesar Rp292,06 juta per tahun. Realisasi tersebut masih berada di bawah target, sehingga peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat menjadi fokus pemerintah daerah. Upaya tersebut diarahkan melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan usaha lokal, pengembangan ekonomi kreatif, hilirisasi produk daerah, dan perluasan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan.

Di sisi lain, pembangunan manusia menunjukkan capaian yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 76,65–76,73 dan terealisasi sebesar 77,02. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan IPM mencerminkan perkembangan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kondisi ini menjadi modal penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat

kualitas tenaga kerja, serta memperluas kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi dan pelayanan publik.

Perbaikan pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan perekonomian turut mendukung penurunan kemiskinan daerah. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,27%–6,33% dan terealisasi sebesar 6,08%. Karena tingkat kemiskinan semakin baik apabila nilainya semakin rendah, capaian tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik dari target. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah berjalan positif melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pelayanan dasar, perluasan kesempatan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal. Ke depan, akurasi data sasaran dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan tetap menjadi perhatian agar intervensi pemerintah semakin tepat sasaran.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 66,53 dan terealisasi sebesar 72,02. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penguatan kelembagaan. Capaian ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus memperkuat birokrasi yang efektif, profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil serta kebutuhan masyarakat.

Pada bidang kebudayaan, persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan ditargetkan sebesar 10,39% dan terealisasi sebesar 42,05%. Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan kemajuan dalam proses identifikasi, pendataan, perlindungan, serta penetapan objek cagar budaya. Kondisi ini menjadi capaian positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjaga kekayaan sejarah dan budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan potensi pembangunan daerah.

Namun demikian, persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan ditargetkan sebesar 100% dan baru terealisasi sebesar 75%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat warisan budaya takbenda yang belum menyelesaikan proses penetapan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah melalui penguatan inventarisasi, dokumentasi, penyusunan dokumen pendukung, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar warisan budaya daerah dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan secara lebih optimal.

Pada aspek konektivitas wilayah, Rasio Konektivitas Antarwilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65,00 dan terealisasi sebesar 82,00. Capaian ini menunjukkan hasil yang lebih baik dari target dan mencerminkan meningkatnya keterhubungan antarwilayah dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap pusat pelayanan. Keberlanjutan capaian ini menjadi fokus

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui peningkatan kualitas jaringan transportasi, penguatan konektivitas wilayah kepulauan dan daratan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penghubung antarwilayah.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ditargetkan sebesar 73,11, namun belum tersedia realisasi pada tahun 2025 karena perangkat daerah terkait belum melakukan penghitungan indikator tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memastikan tersedianya metode pengukuran, instrumen survei, data pendukung, dan jadwal pelaksanaan pengukuran agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur dapat dievaluasi pada periode berikutnya.

Pada aspek lingkungan hidup, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan sebesar 13,95% dan terealisasi sebesar 16,67%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penurunan intensitas emisi telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan perkembangan positif dalam mendukung pembangunan rendah karbon. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap perlu memperkuat pengendalian emisi, perlindungan ekosistem, pengelolaan lahan dan hutan secara berkelanjutan, efisiensi energi, serta integrasi prinsip pembangunan rendah karbon dalam program pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, capaian IKU Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 telah menunjukkan hasil yang positif, terutama pada aspek pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, penurunan kemiskinan, reformasi birokrasi, pelestarian cagar budaya, konektivitas antarwilayah, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Namun demikian, pemerataan pendapatan, peningkatan pendapatan per kapita, penetapan warisan budaya takbenda, serta ketersediaan pengukuran kepuasan layanan infrastruktur masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan pada periode berikutnya difokuskan pada penguatan kualitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas sektor nonmigas, perluasan kesempatan kerja, penguatan pelayanan publik, pelestarian kebudayaan, peningkatan konektivitas wilayah, serta pembangunan rendah karbon agar target RPJMD dapat dicapai secara bertahap, merata, dan berkelanjutan.

Setelah menggambarkan capaian Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah secara makro, evaluasi selanjutnya diarahkan pada Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan untuk melihat tingkat pencapaian sasaran RPJMD secara lebih rinci. Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, dari 53 indikator yang dievaluasi, sebanyak 31 indikator telah memenuhi atau melampaui target, 15 indikator masih berada di bawah target, dan 7 indikator belum dapat dinilai karena data realisasi belum tersedia atau pengukurannya belum dilaksanakan. Capaian tersebut memberikan gambaran mengenai kemajuan sekaligus aspek

pembangunan yang masih memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-2 Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	1,59–2,83	2,93	
2	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,04	3,5	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,54–5,72	5,32	
4	Rasio Gini	angka	0,259–0,262	0,265	
5	Pendapatan Perkapita (Juta)	juta	297,96–298,95	292,06	
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	76,65–76,73	77,02	
7	Tingkat Kemiskinan	%	6,27–6,33	6,08	
8	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	16,18	17,5	
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,37	67,77	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	20,34	21,2	
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,31	0,33	
12	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	angka	3.417	5.487	
13	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	4,36	6,21	
14	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	angka	66,01	79,83	
15	Nilai Tukar Petani	angka	168,96	188	
16	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	12,82	12,9	
17	Usia Harapan Hidup	usia	74,43	74,68	
18	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	13,62	13,47	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
19	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,75	9,93	
20	Jumlah Prestasi Olahraga (cabang)	cabang	13	5	
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	90,48	89,91	
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,4	0,4	
23	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	63,35	73,54	
24	Indeks Kesejahteraan Sosial	angka	58	52,17	
25	Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%	4,89–5,62		
26	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	66,53	77,52	
27	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	10,39	42,05	
28	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	%	100	75	
29	Indeks Pemerintah Digital	angka	1,5	N/A	Indikator ini baru akan digunakan mulai tahun 2026, nilai 1,5 adalah target untuk tahun 2026
30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	95	92,96	
31	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	angka	97,76	N/A	Ombudsmen tidak mellakukan penilaan pd tahun 2025 krn kab. Bengkalis tidak termasuk dlm 5 kab/kota terendah nilainya pada tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
32	Persetase Peningkatan PAD	%	5,23%	4,60%	
33	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	
34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	predikat	B	B	
35	Indeks Profesionalis ASN	angka	80,63	80,48	
36	Indeks Sistem Merit	angka	261,5	258,5	
37	Indeks Inovasi Daerah	angka	40,85	46,55 (Inovatif)	
38	Persentase penyelesaian konflik SARA	%	60	100	
39	Indeks Pelestarian Budaya Melayu	angka	3	1	
40	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	%	65	82	
41	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	angka	73,11	N/A	
42	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	angka	13,95	16,67	
43	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	%	65	82	
44	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	52,18	52,33	
45	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	77,58	76,57	
46	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%)	%	95,83	95,82	
47	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%)	%	93,09	94,13	
48	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	1,15	N/A	
49	Rasio pemukiman layak huni	%	99,52	99,85	
50	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	%	74,78	65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
51	Persentase ketersediaan infrastruktur dasar wilayah perbatasan	%	62,47%	N/A	
52	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	73,5	77,09	
53	Indeks Risiko Bencana	angka	126,68	85,76	

Sumber: e-walidata SIPD dan BPS, 2026

Kinerja perekonomian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 memperlihatkan hasil yang cukup baik. Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 1,59%–2,83% dan terealisasi sebesar 2,93%, sedangkan Indeks Daya Saing Daerah mencapai 3,50 dari target 3,04. Perkembangan aktivitas ekonomi tersebut turut memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan, yang tergambarkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,32%, lebih rendah dari target 5,54%–5,72%, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang mencapai 67,77% dari target 66,37%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah diikuti oleh meningkatnya partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi dan terbukanya kesempatan kerja di daerah.

Penguatan struktur ekonomi tercermin pada meningkatnya kontribusi sejumlah sektor produktif. Rasio PDRB Industri Pengolahan terealisasi sebesar 17,50% dari target 16,18%, Pembentukan Modal Tetap Bruto mencapai 21,20% dari target 20,34%, sedangkan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum mencapai 0,33% dari target 0,31%. Perkembangan sektor pariwisata juga terlihat dari jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 5.487 orang, melampaui target 3.417 orang, sementara Rasio Kewirausahaan Daerah mencapai 6,21% dari target 4,36%. Hasil tersebut menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan investasi, pengembangan usaha, dan peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, sektor pangan dan pertanian tetap memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Ketahanan Pangan Daerah mencapai 79,83 dari target 66,01, Nilai Tukar Petani terealisasi sebesar 188 dari target 168,96, serta kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 12,90% dari target 12,82%. Capaian tersebut menggambarkan terjaganya ketahanan pangan, daya beli petani, serta peranan sektor berbasis potensi wilayah. Ke depan, peningkatan produktivitas, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan kelembagaan usaha, dan perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah daerah agar kontribusi sektor tersebut semakin optimal.

Meskipun indikator pertumbuhan dan struktur ekonomi menunjukkan perkembangan yang positif, pemerataan hasil pembangunan masih menjadi perhatian. Rasio Gini ditargetkan sebesar 0,259–0,262 dan terealisasi sebesar 0,265, sedangkan pendapatan per kapita yang ditargetkan sebesar Rp297,96 juta–Rp298,95 juta per tahun baru terealisasi sebesar Rp292,06 juta per tahun. Realisasi tersebut menandakan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata dan belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai target. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, perluasan kesempatan berusaha, serta peningkatan produktivitas sektor unggulan agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif.

Pada aspek pembangunan manusia, sejumlah indikator telah menunjukkan hasil yang lebih baik dari target. Indeks Pembangunan Manusia terealisasi sebesar 77,02 dari target 76,65–76,73, Usia Harapan Hidup mencapai 74,68 tahun dari target 74,43 tahun, dan Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 9,93 tahun dari target 9,75 tahun. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 6,08%, lebih rendah dari target 6,27%–6,33%. Perkembangan tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan standar hidup masyarakat.

Namun demikian, beberapa indikator pembangunan manusia masih perlu diperkuat. Angka Harapan Lama Sekolah baru mencapai 13,47 tahun dari target 13,62 tahun, sedangkan jumlah prestasi olahraga terealisasi sebanyak 5 cabang olahraga dari target 13 cabang. Indeks Pembangunan Gender sebesar 89,91 juga masih berada di bawah target 90,48, sementara Indeks Ketimpangan Gender mencapai 0,40 sesuai target. Pada aspek perlindungan, Indeks Perlindungan Anak mencapai 73,54 dari target 63,35, tetapi Indeks Kesejahteraan Sosial baru terealisasi sebesar 52,17 dari target 58. Adapun data penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal belum tersedia. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan, pembinaan olahraga, kesetaraan gender, pelayanan sosial, perlindungan anak, dan perluasan kesempatan kerja yang inklusif.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 77,52 dari target 66,53, sedangkan Indeks Inovasi Daerah terealisasi sebesar 46,55 dari target 40,85 dengan kategori Inovatif. Persentase penyelesaian konflik SARA juga mencapai 100% dari target 60%. Selain itu, opini BPK berhasil dipertahankan pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian, sementara Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh predikat B sesuai target. Hasil tersebut menunjukkan adanya penguatan pada akuntabilitas pemerintahan, kapasitas inovasi, pengelolaan keuangan daerah, serta pemeliharaan stabilitas sosial.

Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas aparatur masih memerlukan perhatian. Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 92,96 dari target 95, persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah mencapai 4,60% dari target 5,23%, Indeks

Profesionalitas ASN sebesar 80,48 dari target 80,63, dan Indeks Sistem Merit mencapai 258,5 dari target 261,5. Indeks Pemerintah Digital belum dapat dievaluasi karena indikator tersebut baru mulai digunakan pada tahun 2026, sedangkan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik belum memiliki realisasi karena Ombudsman tidak melakukan penilaian terhadap Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025. Keadaan ini mengindikasikan perlunya penguatan kualitas pelayanan publik, kompetensi aparatur, penerapan sistem merit, transformasi digital pemerintahan, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Pada bidang kebudayaan, persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan mencapai 42,05%, jauh melampaui target 10,39%. Namun demikian, persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan baru mencapai 75% dari target 100%, sedangkan Indeks Pelestarian Budaya Melayu terealisasi sebesar 1 dari target 3. Perkembangan ini menggambarkan bahwa kemajuan dalam penetapan cagar budaya perlu diikuti dengan penguatan inventarisasi, dokumentasi, perlindungan, penetapan, serta pemanfaatan warisan budaya takbenda dan kebudayaan Melayu secara berkelanjutan.

Pada aspek konektivitas dan infrastruktur wilayah, Rasio Konektivitas Antarwilayah terealisasi sebesar 82% dari target 65%. Persentase jalan dalam kondisi mantap mencapai 52,33% dari target 52,18%, sedangkan rasio permukiman layak huni mencapai 99,85% dari target 99,52%. Capaian tersebut memperlihatkan semakin baiknya dukungan infrastruktur terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, keterhubungan antarwilayah, serta akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Meskipun demikian, pemerataan kualitas infrastruktur dan pemenuhan pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 76,57% dari target 77,58%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mencapai 95,82% dari target 95,83%, sedangkan pengelolaan wilayah perbatasan terealisasi sebesar 65% dari target 74,78%. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur belum dapat dievaluasi karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak melakukan penghitungan indikator tersebut pada tahun 2025. Data luas lingkungan permukiman kumuh, dan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah perbatasan juga belum tersedia. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan, serta memperkuat ketersediaan data pembangunan.

Pada aspek lingkungan hidup dan kebencanaan, capaian pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca terealisasi sebesar 16,67% dari target 13,95%, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 77,09 dari target 73,50. Indeks Risiko Bencana terealisasi sebesar 85,76, lebih baik dari target 126,68, karena semakin rendah nilai indeks menunjukkan semakin rendah tingkat risiko bencana. Capaian tersebut memberikan indikasi bahwa upaya pembangunan rendah karbon,

perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana telah memberikan hasil yang baik.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 telah memberikan fondasi yang cukup baik bagi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029. Perkembangan positif terutama terlihat pada pertumbuhan ekonomi, daya saing, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, inovasi, konektivitas wilayah, kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana. Namun demikian, pemerataan pendapatan, peningkatan pendapatan per kapita, kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, pelestarian kebudayaan, kapasitas aparatur, pelayanan infrastruktur, akses air minum layak, kondisi irigasi, dan pengelolaan wilayah perbatasan masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pada periode berikutnya diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan hasil pembangunan, percepatan pemenuhan pelayanan dasar, optimalisasi kinerja perangkat daerah, serta penyediaan data indikator yang akurat dan tepat waktu agar pencapaian target RPJMD dapat dikendalikan dan dievaluasi secara berkelanjutan.

2.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dilakukan untuk menilai perkembangan pencapaian indikator pembangunan daerah pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029. IKD merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan daerah secara lebih luas berdasarkan aspek-aspek pembangunan, antara lain geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta aspek kinerja kunci. Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mengetahui tingkat capaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi indikator yang telah menunjukkan kinerja positif, serta menentukan indikator yang masih memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan pada periode berikutnya. Adapun evaluasi capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	11,51	9,82	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
2	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih	%	73,54	70,31	
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	5,28	12,24	
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	27,00	51,63	
5	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	35	30	
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,79	3,15	
7	Rasio Penduduk	%	104,68	104,8	
8	Kepadatan Penduduk	Orang/ km2	78,50	80,47	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,31	N/A	Aplikasi Keluarga Sehat sebagai Aplikasi keluarnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) tidak bisa di akses sejak Awal Tahun 2025 sehingga hasil pengukurannya tidak ada
2	Angka Literasi/Numerasi				
a	Skor Literasi SD/SMP	angka	62,38	72,48	
b	Skor Numerasi SD	angka	55,86	69,76	
c	Skor Literasi SMP	angka	71,78	77,9	
d	Skor Numerasi SMP	angka	64,05	73,29	
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	44,39	5,3	
4	Indeks Masyarakat Digital	Angka	47,98	51,21	
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	58,53	51,33	
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	66,50	69,8	
7	Indeks Pembangunan Pemuda				
a	Jumlah Prestasi Olahraga (cabang)	Cabang Olahraga (Cabor)	13,00	5	
b	Persentase Wirausaha Muda	%	0,06	0,04	
8	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,63	0,61	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
1	Angka Ketergantungan	%	44,24	49,09	
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,81	0,61	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	47,96	46,35	
4	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	59,86	N/A	Perhitungan indikator hanya sampai pada level provinsi
5	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	27,85	N/A	Perhitungan indikator hanya sampai pada level provinsi
6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	6,10	N/A	Perhitungan indikator hanya sampai pada level provinsi
7	Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	% PDRB	55,84	52,67	
8	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persentase	81,79	88,5	
9	Persentase Desa Mandiri	%	73,94	100	
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,07	0,126	
11	Tingkat Inflasi	%	2.9-3.50	4,24	
12	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Nilai	8,27	7,02	Menggunakan inflasi sebagai indikator proksi untuk menggambarkan variasi perubahan harga antarwilayah.
13	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,89	N/A	Belum Ada rillis dari OJK capaian IKAD untuk Kab. Bengkalis tahun 2025
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Hukum	angka	50,13	77,52	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	2,88	3,01	
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,41	N/A	Ombudsmen tidak melakukan penilaan pd tahun 2025 krn kab. Bengkalis tidak termasuk dlm 5 kab/kota terendah nilainya pada tahun 2024
4	Indeks Integritas Nasional	Persentase	72,25	72,32	
5	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	65,00	84,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
7	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	%	70	74,17	
8	Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk	Angka	21,95	23,25	Data jumlah kriminalitas dalam dokumen Bengkalis dalam angka 2026 masih menggunakan data tahun 2024
9	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	73,00	3	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
A	**Pendidikan**				
1	Skor Literasi/Numerasi				
a	Skor Literasi SD/SMP	angka	62,38	72,48	
b	Skor Numerasi SD	angka	55,86	69,76	
c	Skor Literasi SMP	angka	71,78	77,9	
d	Skor Numerasi SMP	angka	64,05	73,29	
2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,75	9,93	
3	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,62	13,47	
B	**Kesehatan**				
1	Prevalensi Balita Stunting	%	18,8	5,16	
2	Jumlah kematian ibu	angka	15	9	
3	Jumlah kematian balita	angka	90	100	
4	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	36	14,23	
5	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	80	68	
6	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,6	98,88	
7	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	90	90	
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	5	100	
9	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	65	61,2	
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	59,32	69	
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	angka	73,11		PUPR tidak menghitung indikator ini pada tahun 2025
2	Persentase Gedung Pelayanan Layak	%	100	75%	
3	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	52,18	52,33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
D	**Perumahan dan Kawasan Pemukiman**				
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81,79	88,5	
2	Rasio pemukiman layak huni	%	99,52	99,85	
E	**Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat**				
1	Persentase Penanggulangan Bencana Banjir	%	95	95	
2	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	%	100	100	
3	Persentase Penanggulangan Bencana Lainnya (Amukan Gajah. Korban Tenggelam, Angin Putting Beliung, Penggerakan Tanah)	%	100	100	
3	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU)	angka	73	2,86	
4	Indeks Manajemen Satlinmas	angka	70	71,85	
5	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Kebakaran	%	100	100	
6	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	97,5	
F	**Sosial**				
1	Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	
4	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	
5	Persentas Korban Bencana korban Alam, Sosial dan/atau NonAlam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	
G	**Tenaga Kerja**				
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,5	94,68	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	67	-2,7	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
3	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	%	47,96	46,35	
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	90,48	89,91	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,4	0,4	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	63,35	73,54	
I	**Pangan**				
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	66,01	79,83	
2	Persentase desa bebas dari status rawan pangan	%	98,84	99,35	
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,78	93,51	
J	**Pertanahan**				
1	Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi	angka	5	3	
K	**Lingkungan Hidup**				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	73,5	77,09	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	64,26	78,93	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	81,52	76,83	
4	Indeks Kualitas Lahan	Angka	74,52	74,41	
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,39		
I	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan	%	99,54	98,87	
2	Rasio pasangan berakte nikah	%	83,28	82,81	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	62,93	72,61	
J	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	0,92	0,839	
K	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) per wanita usia subur (15-49 tahun)	angka	2,4	2,5	
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	66,5	69,8	
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	77,2	70,1	
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB	%	96,8	79,4	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
	Modern (Demand Satisfied of Modern Contraception)				
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	%	13,5	19,7	
6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	angka	14,8	23,4	
7	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	angka	85,9		Belum Rillis menunggu hasil pendataan Keluarga (PK) 2025
8	Indeks Lansia Berdaya	angka	62,2	69,8	
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	55,2	56,8	
L	**Perhubungan**				
1	Rasio konektivitas antar wilayah	%	65	82	
M	**Komunikasi dan Informatika**				
1	Indeks SPBE	angka	2,88	3,01	
2	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	angka	2	2	
N	**Koperasi Usaha Kecil Menengah**				
1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	5	16	
2	Jumlah UKM menjalin kemitraan	Unit Usaha	25	28	
O	**Penanaman Modal**				
1	Persentase peningkatan investasi	%	5,7	-0,28	
P	**Kepemudaan dan Olahraga**				
1	Indeks Partisipasi Olahraga	angka	0,084	12	
Q	**Statistik**				
1	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,26	2,26	
R	**Persandian**				
1	Tingkat Kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	30,02	33,08	
S	**Kebudayaan**				
1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	8	10,12	
2	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	%	100	75	
T	**Perpustakaan**				
1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	angka	44,39	5,3	
2	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	angka	76	88	
U	**Kearsipan**				
1	Indeks Pengelolaan Kearsipan	angka	30	52,83	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	20	36,27	
3	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	30,02	N/A	
V	**Kelautan dan Perikanan**				
1	Jumlah produksi perikanan (Ton)	ton	9.327	11.517	
2	Jumlah produksi olahan perikanan (ton)	ton	100	110	
W	**Pariwisata**				
1	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,31	0,33	
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	jiwa	3.417	5.487	
3	Jumlah Wisatawan Nusantara	jiwa	246.151	312.998	
X	**Pertanian**				
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	12,82	12,9	
Y	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				
1	Rasio Elektrifikasi	%	92,22	100	
Z	**Perdagangan**				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	6,46	7,52	
AA	**Perindustrian**				
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,18	17,5	
AB	**Transmigrasi**				
1	Tingkat Kesempatan Kerja di Wilayah Transmigrasi	%	94,5	65	
AC	**Sekretariat Daerah**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	66,53	72,02	
AD	**Sekretariat DPRD**				
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	91,66	92,1	
AE	**Perencananaan**				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	80		
AF	**Keuangan**				
1	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	
AG	**Kepegawaian**				
1	Indeks Profesionalitas ASN	angka	80,625	80,41	
AH	**Pendidikan dan Pelatihan**				
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	angka	26,76	27,91	
AI	**Penelitian dan Pengembangan**				

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH TAHUN 2025		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
1	Indeks Inovasi Daerah	angka	40,85	46,55 (Inovatif)	
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	40	40	
3	Indeks Kapabilitas Inovasi	angka	2,01	2,4	
AJ	**Pengawasan**				
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	Level 3	Level 3	
AK	**Kesatuan Bangsa dan Poliktik**				
1	Indeks Harmoni Sosial	angka	6,5	6,67	
AL	**Pengelola Perbatasan**				
1	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	%	74,78	65	
AM	**Kecamatan Bengkalis**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94	94,09	
AN	**Kecamatan Bandar Laksamana**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	81,77	88,45	
AO	**Kecamatan Pinggir**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	96,5	85	
AP	**Kecamatan Siak Kecil**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90	94,78	
AQ	**Kecamatan Rupat Utara**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95	90,89	
AR	**Kecamatan Rupat**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	91	98,49	
AS	**Kecamatan Talang Muandau**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95	97,07	
AT	**Kecamatan Bantan**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80	94,83	
AU	**Kecamatan Bathin Solapan**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94	96,36	
AV	**Kecamatan Mandau**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95	98,35	
AW	**Kecamatan Bukit Batu**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95	94,65	

Sumber: e-walidata SIPD dan BPS

A. Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan Tabel di atas, capaian IKD pada Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian indikator telah memperlihatkan perkembangan yang positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi

Pangan Tahun 2025 ditargetkan sebesar 11,51% dan terealisasi sebesar 9,82%. Capaian ini menunjukkan kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan, karena semakin rendah prevalensi menggambarkan semakin membaiknya kecukupan konsumsi pangan masyarakat. Namun demikian, pada indikator Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih, target sebesar 73,54% baru terealisasi sebesar 70,31%, sehingga capaian ini belum memenuhi target dan masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka peningkatan akses layanan dasar, kualitas lingkungan permukiman, dan kesehatan masyarakat.

Perkembangan positif juga terlihat pada indikator pengelolaan persampahan. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,28% dan terealisasi sebesar 12,24%, sedangkan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ditargetkan sebesar 27,00% dan terealisasi sebesar 51,63%. Kedua indikator tersebut menunjukkan capaian yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan adanya peningkatan dalam pengelolaan sampah, baik dari sisi kapasitas pengolahan maupun perluasan cakupan layanan pengumpulan sampah rumah tangga. Di sisi lain, Indeks Ketahanan Daerah ditargetkan sebesar 35 dan terealisasi sebesar 30, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ketahanan daerah masih perlu diperkuat, terutama dalam meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, tantangan, maupun kerentanan wilayah.

Sejalan dengan capaian layanan dasar dan lingkungan, dinamika kependudukan juga menjadi faktor penting yang perlu dikelola secara cermat. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,79% dan terealisasi sebesar 3,15%, sedangkan Rasio Penduduk ditargetkan sebesar 104,68 dan terealisasi sebesar 104,8. Adapun Kepadatan Penduduk ditargetkan sebesar 78,50 orang/km² dan terealisasi sebesar 80,47 orang/km². Realisasi yang lebih tinggi dari target pada indikator laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk menunjukkan bahwa dinamika demografi masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengingat kondisi tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap penyediaan layanan dasar, infrastruktur, permukiman, air minum, persampahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara itu, rasio penduduk menunjukkan capaian yang relatif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian IKD pada Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada indikator kecukupan konsumsi pangan dan pengelolaan persampahan. Namun demikian, akses rumah tangga terhadap sumber air minum bersih, penguatan indeks ketahanan daerah, serta pengendalian dinamika pertumbuhan dan kepadatan penduduk masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ditangani melalui penguatan kebijakan dan intervensi pembangunan pada periode berikutnya.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel di atas, capaian IKD pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah indikator telah melampaui target, terutama pada kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, Indeks Masyarakat Digital, serta Indeks Pembangunan Keluarga. Sementara itu, pembangunan literasi masyarakat, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, prestasi olahraga, kewirausahaan pemuda, dan pengelolaan zakat masih memerlukan penguatan. Adapun realisasi Indeks Keluarga Sehat belum dapat diperoleh karena aplikasi yang digunakan sebagai sumber pengukuran tidak dapat diakses sejak awal tahun 2025.

Pada bidang pendidikan, capaian indikator literasi dan numerasi menunjukkan perkembangan yang positif. Skor Literasi SD ditargetkan sebesar 62,38 dan terealisasi sebesar 72,48, sedangkan Skor Numerasi SD ditargetkan sebesar 55,86 dan terealisasi sebesar 69,76. Pada jenjang SMP, Skor Literasi ditargetkan sebesar 71,78 dan terealisasi sebesar 77,90, sementara Skor Numerasi ditargetkan sebesar 64,05 dan terealisasi sebesar 73,29. Seluruh indikator tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dasar peserta didik dalam memahami informasi, berpikir logis, dan menyelesaikan permasalahan berbasis numerasi.

Namun demikian, peningkatan literasi pada satuan pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan budaya literasi masyarakat secara luas. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025 ditargetkan sebesar 44,39 dan terealisasi sebesar 5,30, sehingga masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperluas akses masyarakat terhadap sumber bacaan, meningkatkan pemanfaatan perpustakaan, mengembangkan kegiatan literasi berbasis komunitas, serta memperkuat layanan perpustakaan hingga tingkat kecamatan dan desa. Di sisi lain, Indeks Masyarakat Digital ditargetkan sebesar 47,98 dan terealisasi sebesar 51,21. Capaian tersebut telah melampaui target dan menunjukkan perkembangan positif dalam kemampuan masyarakat mengakses, memanfaatkan, dan berpartisipasi dalam ekosistem digital.

Pada aspek perlindungan dan pembangunan keluarga, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditargetkan sebesar 58,53% dan terealisasi sebesar 51,33%. Capaian tersebut belum memenuhi target, sehingga perluasan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja, terutama pekerja informal, pekerja rentan, dan pelaku usaha mandiri, masih menjadi fokus pemerintah daerah. Sementara itu, Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga ditargetkan sebesar 66,50 dan terealisasi sebesar 69,80. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan perkembangan positif pada kualitas keluarga, baik dari aspek ketenteraman, kemandirian, maupun kebahagiaan keluarga. Adapun Indeks Keluarga Sehat yang ditargetkan sebesar 0,31 belum dapat diukur karena aplikasi Keluarga Sehat tidak dapat diakses sejak awal tahun 2025, sehingga hasil pengukurannya tidak tersedia.

Pada aspek kepemudaan dan olahraga, jumlah prestasi olahraga ditargetkan sebanyak 13 cabang olahraga dan terealisasi sebanyak 5 cabang olahraga. Sementara itu, persentase

wirausaha muda ditargetkan sebesar 0,06% dan terealisasi sebesar 0,04%. Kedua indikator tersebut belum mencapai target dan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan pembinaan atlet, penguatan kompetisi olahraga, penyediaan sarana pendukung, serta pengembangan kapasitas, akses permodalan, dan pendampingan usaha bagi pemuda.

Selanjutnya, Indeks Zakat Nasional Tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,63 poin dan terealisasi sebesar 0,61 poin. Meskipun selisihnya relatif kecil, capaian tersebut masih berada di bawah target. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dunia usaha, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian IKD pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif pada kualitas literasi dan numerasi peserta didik, kapasitas masyarakat digital, serta pembangunan keluarga. Namun demikian, pembangunan literasi masyarakat, perluasan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan prestasi olahraga, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengelolaan zakat, serta ketersediaan data Indeks Keluarga Sehat masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pada aspek-aspek tersebut menjadi fokus pemerintah daerah agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan..

C. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan Tabel di atas, capaian IKD pada Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa indikator telah melampaui target, terutama akses rumah tangga terhadap hunian layak, persentase desa mandiri, dan rasio pajak daerah terhadap PDRB. Sementara itu, angka ketergantungan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, rasio ekspor barang dan jasa terhadap PDRB, serta tingkat inflasi masih memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan.

Angka Ketergantungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 44,24% dan terealisasi sebesar 49,09%. Realisasi yang lebih tinggi dari target menunjukkan bahwa beban penduduk usia produktif dalam menopang penduduk usia nonproduktif masih relatif tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, penguatan produktivitas penduduk usia produktif, serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ditargetkan sebesar 47,96% dan terealisasi sebesar 46,35%. Capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pasar kerja masih perlu ditingkatkan. Penguatan kebijakan diarahkan pada peningkatan kompetensi, pengembangan kewirausahaan perempuan, perluasan kesempatan kerja yang inklusif, serta penguatan dukungan terhadap perempuan pelaku usaha.

Dari sisi aktivitas ekonomi daerah, Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB ditargetkan sebesar 55,84% dan terealisasi sebesar 52,67%. Capaian tersebut masih berada di bawah target, sehingga kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah perlu terus diperkuat. Kondisi ini menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan, hilirisasi produk daerah, perluasan akses pasar, serta penguatan daya saing produk lokal.

Perkembangan positif terlihat pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang ditargetkan sebesar 81,79% dan terealisasi sebesar 88,50%. Capaian yang melampaui target menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pemenuhan kebutuhan dasar perumahan masyarakat. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas rumah, dukungan prasarana dan sarana permukiman, serta penanganan kawasan yang masih belum memenuhi standar kelayakan.

Persentase Desa Mandiri juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu terealisasi sebesar 100% dari target 73,94%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kapasitas desa dalam mengelola potensi, pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan kelembagaan masyarakat. Keberlanjutan capaian tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan, dan optimalisasi potensi unggulan desa.

Pada aspek kapasitas fiskal, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ditargetkan sebesar 0,07% dan terealisasi sebesar 0,126%. Capaian yang melampaui target menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kondisi ini menjadi modal dalam memperkuat kemandirian fiskal, yang perlu dilanjutkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran basis data wajib pajak, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

Namun demikian, stabilitas harga masih menjadi perhatian. Tingkat Inflasi Tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran 2,90%–3,50% dan terealisasi sebesar 4,24%. Realisasi tersebut berada di atas batas atas target, sehingga tekanan harga masih perlu dikendalikan agar tidak mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi. Pengendalian inflasi menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui penguatan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi kebijakan, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Sementara itu, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,89. Namun, realisasi indikator tersebut belum dapat disajikan karena Otoritas Jasa Keuangan belum merilis capaian IKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Secara keseluruhan, capaian IKD pada Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif pada akses hunian layak, kemandirian desa, dan kapasitas penerimaan pajak daerah. Namun demikian, angka ketergantungan, partisipasi angkatan kerja perempuan, kontribusi ekspor terhadap PDRB, dan tingkat

inflasi masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, capaian Indeks Akses Keuangan Daerah belum dapat dievaluasi karena data resmi dari Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pada periode berikutnya diarahkan pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia, perluasan partisipasi ekonomi perempuan, penguatan daya saing produk daerah, pengendalian inflasi, peningkatan kemandirian fiskal, serta penguatan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan.

D. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan Tabel di atas, capaian IKD pada Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 secara umum menunjukkan penguatan pada tata kelola pemerintahan, reformasi hukum, integritas, penegakan peraturan daerah, pelaksanaan aksi HAM, serta kapasitas kelembagaan demokrasi. Indeks Reformasi Hukum yang ditargetkan sebesar 50,13 terealisasi sebesar 77,52, sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meningkat dari target 2,88 menjadi 3,01. Capaian tersebut mencerminkan perkembangan positif dalam pembenahan regulasi, penguatan tata kelola pemerintahan digital, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Penguatan tata kelola juga tercermin dari Indeks Integritas Nasional yang terealisasi sebesar 72,32, sedikit melampaui target sebesar 72,25. Selanjutnya, Persentase Penegakan Perda mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan, Persentase Capaian Aksi HAM terealisasi sebesar 84,00% dari target 65,00%, serta Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi mencapai 74,17 dari target 70,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan peraturan daerah, pemajuan dan pemenuhan HAM, penguatan integritas, serta dukungan terhadap kelembagaan demokrasi telah berjalan lebih baik dari target tahun 2025. Capaian ini menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus memperkuat pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Rasio Kriminalitas per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditargetkan sebesar 21,95 dan terealisasi sebesar 23,25. Karena indikator ini semakin baik apabila nilainya semakin rendah, realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat upaya pencegahan kriminalitas, deteksi dini gangguan keamanan, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang semakin kondusif.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan sebesar 4,41 belum memiliki nilai realisasi. Hal ini disebabkan Ombudsman tidak melakukan penilaian terhadap Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 karena Kabupaten Bengkalis tidak termasuk dalam lima kabupaten/kota dengan nilai terendah berdasarkan hasil penilaian tahun 2024. Meskipun tidak tersedia nilai pengukuran, peningkatan kualitas pelayanan publik tetap menjadi

perhatian pemerintah daerah melalui penguatan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyederhanaan dan digitalisasi proses pelayanan.

Adapun Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) ditargetkan sebesar 73,00 dan terealisasi sebesar 3. Perbedaan capaian tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memperkuat validitas pengukuran, efektivitas program, serta koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum agar capaiannya dapat meningkat pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif pada reformasi hukum, pemerintahan berbasis elektronik, integritas, penegakan Perda, pelaksanaan aksi HAM, dan kapasitas lembaga demokrasi. Namun demikian, ketersediaan data pelayanan publik dan validitas pengukuran IPKKU masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu, fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan kualitas dan integrasi data, konsistensi metode pengukuran, penguatan pelayanan publik, serta optimalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum agar evaluasi kinerja pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih akurat dan berkelanjutan.

E. Indeks Kinerja Kunci

1. Pendidikan

   Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci pada bidang Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah berada pada capaian yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Pada indikator Skor Literasi/Numerasi, Skor Literasi SD/SMP ditargetkan sebesar 62,38 dan terealisasi sebesar 72,48, Skor Numerasi SD ditargetkan sebesar 55,86 dan terealisasi sebesar 69,76, Skor Literasi SMP ditargetkan sebesar 71,78 dan terealisasi sebesar 77,9, serta Skor Numerasi SMP ditargetkan sebesar 64,05 dan terealisasi sebesar 73,29. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran, terutama dalam penguatan kemampuan dasar peserta didik pada aspek literasi dan numerasi.

   Perbaikan capaian literasi dan numerasi tersebut juga sejalan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah yang ditargetkan sebesar 9,75 tahun dan terealisasi sebesar 9,93 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan penduduk telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga menggambarkan adanya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan masyarakat. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, karena semakin baiknya lama sekolah penduduk akan mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses peluang sosial dan ekonomi.

Namun demikian, indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 ditargetkan sebesar 13,62 tahun dan terealisasi sebesar 13,47 tahun, sehingga capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih perlu diperkuat agar keberlanjutan pendidikan masyarakat dapat semakin meningkat. Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Pendidikan menunjukkan perbaikan pada kemampuan literasi dan numerasi serta rata-rata lama sekolah, namun masih memerlukan penguatan pada harapan lama sekolah agar kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

2. Kesehatan

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa indikator telah berada pada capaian yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Prevalensi Balita Stunting ditargetkan sebesar 18,8% dan terealisasi sebesar 5,16%, sehingga capaian ini menunjukkan kondisi yang lebih baik karena semakin rendah prevalensi stunting menggambarkan perbaikan status gizi balita. Hal yang sama juga terlihat pada indikator Jumlah Kematian Ibu yang ditargetkan sebesar 15 kasus dan terealisasi sebanyak 9 kasus, sehingga menunjukkan perbaikan pada aspek kesehatan ibu. Namun, Jumlah Kematian Balita yang ditargetkan sebanyak 90 kasus dan terealisasi sebanyak 100 kasus masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga kesehatan balita masih perlu menjadi perhatian.

Pada aspek akses dan cakupan layanan kesehatan, Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis ditargetkan sebesar 36% dan terealisasi sebesar 14,23%, sedangkan Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 68%. Kedua indikator tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga perluasan akses pemeriksaan kesehatan dan penguatan imunisasi dasar masih perlu diperkuat. Di sisi lain, Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan sebesar 98,6% dan terealisasi sebesar 98,88%, sehingga telah melampaui target. Capaian ini menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat melalui kepesertaan JKN sudah berjalan baik.

Sejalan dengan penguatan layanan kesehatan tersebut, Angka Keberhasilan Pengobatan TB ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 90%, sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ditargetkan sebesar 59,32% dan terealisasi sebesar 69%, sehingga menunjukkan capaian yang lebih baik dari target. Selain itu, Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga menunjukkan capaian yang sangat baik dalam pelayanan penyakit tidak menular. Namun demikian, Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup ditargetkan sebesar 65% dan terealisasi sebesar 61,2%, sehingga belum memenuhi target. Secara keseluruhan, capaian bidang kesehatan menunjukkan perbaikan pada penurunan stunting, penurunan kematian ibu, kepesertaan JKN, pelayanan hipertensi, dan pengendalian TB, namun masih memerlukan penguatan pada kesehatan balita, pemeriksaan kesehatan gratis, imunisasi bayi lengkap, dan aktivitas fisik masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Persentase jalan dalam kondisi mantap ditargetkan sebesar 52,18% dan terealisasi sebesar 52,33%. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas antarwilayah, mobilitas masyarakat, pelayanan publik, serta aktivitas perekonomian daerah.

   Sementara itu, persentase gedung pelayanan layak ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 75%. Capaian ini masih berada di bawah target, sehingga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kelayakan, keamanan, dan kenyamanan gedung pelayanan publik. Adapun Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang ditargetkan sebesar 73,11 belum memiliki nilai realisasi karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak melakukan penghitungan indikator tersebut pada tahun 2025. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar pengukuran IKLI dapat dilaksanakan pada periode berikutnya sebagai dasar evaluasi kualitas layanan infrastruktur dari perspektif masyarakat.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

   Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak ditargetkan sebesar 81,79% dan terealisasi sebesar 88,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap hunian layak berada pada capaian yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, Rasio Permukiman Layak Huni ditargetkan sebesar 99,52% dan terealisasi sebesar 99,85%, sehingga juga telah melampaui target. Kondisi ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas lingkungan permukiman dan pemenuhan hunian layak sebagai bagian dari peningkatan layanan dasar masyarakat.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik, terutama pada penanggulangan bencana dan pelayanan pencegahan kebakaran. Persentase Penanggulangan Bencana Banjir terealisasi sebesar 95% sesuai target 95%, sedangkan Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penanggulangan Bencana Lainnya masing-masing terealisasi sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan bencana telah berjalan optimal sesuai dengan sasaran kinerja tahun 2025.

Pada aspek perlindungan masyarakat, Indeks Manajemen Satlinmas terealisasi sebesar 71,85, melampaui target sebesar 70. Capaian ini menunjukkan adanya penguatan dalam pengelolaan dan kapasitas satuan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Kebakaran mencapai 100% sesuai target, sedangkan Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran terealisasi sebesar 97,5% dari target 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kebakaran telah berjalan sangat baik, meskipun layanan penyelamatan dan evakuasi masih perlu dioptimalkan agar mencapai target secara penuh.

Adapun Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) ditargetkan sebesar 73 dan terealisasi sebesar 2,86. Perbedaan capaian tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat validitas pengukuran, efektivitas program, dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, capaian bidang ini menunjukkan kinerja positif pada penanggulangan bencana, manajemen Satlinmas, dan pencegahan kebakaran. Ke depan, fokus pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan capaian IPKKU serta optimalisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran agar seluruh indikator dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

6. Sosial

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif karena seluruh indikator yang telah memiliki data realisasi telah memenuhi target yang ditetapkan. Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, serta Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan

pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sejalan dengan itu, Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Demikian pula, Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Nonalam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memberikan layanan sosial dasar kepada kelompok rentan dan korban bencana sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Dalam memperkuat pengentasan dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan menyinergikan program perlindungan sosial terintegrasi, termasuk Program Keluarga Harapan, dengan pemberdayaan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan sebagai salah satu indikator outcome Asta Cita. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga perlu memperkuat ketersediaan data keluarga yang telah tergraduasi serta memberikan pendampingan, peningkatan keterampilan, akses usaha, dan fasilitasi kesempatan kerja agar keluarga tersebut mampu mempertahankan kemandiriannya dan tidak kembali berada di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga akan meningkatkan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dengan menetapkan target kelembagaan PSKS yang diberdayakan serta mendorong keluarga penerima manfaat yang telah tergraduasi menjadi PSKS Keluarga Pionir. Selain itu, pengelolaan data Indeks Kesejahteraan Sosial dan data kemiskinan akan diperkuat melalui koordinasi lintas perangkat daerah sebagai dasar penetapan sasaran, perumusan kebijakan, dan evaluasi program kesejahteraan sosial.

7. Tenaga Kerja

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam. Tingkat Kesempatan Kerja ditargetkan sebesar 94,5% dan terealisasi sebesar 94,68%. Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan kesempatan kerja relatif terjaga dan mampu mendukung penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Bengkalis.

Namun demikian, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yang ditargetkan sebesar 67% terealisasi sebesar -2,7%, sehingga masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja

melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

Selanjutnya, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ditargetkan sebesar 47,96% dan terealisasi sebesar 46,35%. Capaian tersebut belum memenuhi target, sehingga penguatan penciptaan lapangan kerja formal menjadi fokus pemerintah daerah melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor-sektor produktif, perluasan kesempatan berusaha, dan penguatan perlindungan tenaga kerja. Secara keseluruhan, capaian bidang tenaga kerja menunjukkan kondisi positif pada kesempatan kerja, namun peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja formal masih perlu diperkuat agar struktur ketenagakerjaan daerah semakin berkualitas dan berkelanjutan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat indikator yang perlu diperkuat. Indeks Pembangunan Gender ditargetkan sebesar 90,48 dan terealisasi sebesar 89,91, sehingga capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun, Indeks Ketimpangan Gender ditargetkan sebesar 0,4 dan terealisasi sebesar 0,4, sehingga telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, Indeks Perlindungan Anak ditargetkan sebesar 63,35 dan terealisasi sebesar 73,54, sehingga capaian ini berada pada kondisi yang lebih baik dari target. Secara keseluruhan, capaian bidang ini menunjukkan perbaikan pada perlindungan anak dan pengendalian ketimpangan gender, namun masih memerlukan penguatan pada pembangunan gender agar kesetaraan akses, peran, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat semakin meningkat.

9. Pangan

   Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif karena seluruh indikator yang telah memiliki data realisasi berada pada capaian yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Indeks Ketahanan Pangan ditargetkan sebesar 66,01 dan terealisasi sebesar 79,83, Persentase Desa Bebas dari Status Rawan Pangan ditargetkan sebesar 98,84% dan terealisasi sebesar 99,35%, serta Skor Pola Pangan Harapan ditargetkan sebesar 92,78% dan terealisasi sebesar 93,51%. Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan pada ketahanan pangan daerah, pengurangan wilayah rawan pangan, serta kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dengan demikian, bidang pangan menjadi salah satu aspek yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan secara berkelanjutan.

10. Pertanahan

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 masih memerlukan penguatan. Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan sebanyak 5 kasus dan terealisasi sebanyak 3 kasus, sehingga capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi masih perlu dioptimalkan agar konflik lahan dapat ditangani secara lebih efektif, tertib, dan mendukung kepastian pemanfaatan ruang serta pembangunan daerah.

11. Lingkungan Hidup

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama pada peningkatan kualitas lingkungan secara umum. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 73,5 dan terealisasi sebesar 77,09, sehingga capaian ini berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Perbaikan tersebut terutama didukung oleh Indeks Kualitas Air yang ditargetkan sebesar 64,26 dan terealisasi sebesar 78,93, sehingga menunjukkan peningkatan kualitas air yang cukup signifikan.

    Namun demikian, beberapa komponen lingkungan masih perlu diperkuat agar kualitas lingkungan hidup dapat terjaga secara menyeluruh. Indeks Kualitas Udara ditargetkan sebesar 81,52 dan terealisasi sebesar 76,83, sedangkan Indeks Kualitas Lahan ditargetkan sebesar 74,52 dan terealisasi sebesar 74,41. Kedua indikator tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga pengendalian kualitas udara dan perlindungan kualitas lahan masih perlu menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup daerah.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam. Rasio Penduduk ber-KTP per satuan ditargetkan sebesar 99,54% dan terealisasi sebesar 98,87%, sedangkan Rasio Pasangan Berakte Nikah ditargetkan sebesar 83,28% dan terealisasi sebesar 82,81%. Kedua indikator tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga layanan administrasi kependudukan, khususnya kepemilikan KTP dan pencatatan perkawinan, masih perlu diperkuat.

    Di sisi lain, Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak ditargetkan sebesar 62,93% dan terealisasi sebesar 72,61%. Capaian ini menunjukkan hasil yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan adanya perbaikan dalam pemenuhan dokumen identitas anak, sehingga dapat

mendukung akses anak terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditunjukkan melalui Indeks Desa Membangun. Indikator tersebut ditargetkan sebesar 0,92 dan terealisasi sebesar 0,839. Capaian yang masih berada di bawah target tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kemandirian desa melalui penguatan pelayanan dasar, ketahanan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, dan kualitas lingkungan desa.

    Dalam memperkuat pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melanjutkan pengembangan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan serta penetapan target keluaran dan hasil yang terukur. Pengembangan kawasan tersebut akan didukung melalui peningkatan kerja sama antardesa, pembinaan dan penguatan BUM Desa, serta pengembangan BUM Desa Bersama berbasis potensi unggulan kawasan.

    Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga akan meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan desa. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan kegiatan ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa indikator telah melampaui target, terutama Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Lansia Berdaya, dan Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri. Namun demikian, pengendalian kelahiran, pemenuhan kebutuhan keluarga berencana, pembangunan berwawasan kependudukan, serta kesehatan reproduksi remaja masih memerlukan penguatan.

    Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate ditargetkan sebesar 2,4 dan terealisasi sebesar 2,5. Karena indikator ini semakin baik apabila nilainya semakin rendah, realisasi tersebut belum memenuhi target. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat pelayanan keluarga

berencana, meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, serta mendorong perencanaan keluarga yang berkualitas.

Pada aspek pembangunan keluarga, Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga ditargetkan sebesar 66,5 dan terealisasi sebesar 69,8. Capaian tersebut telah melampaui target dan menunjukkan perkembangan positif pada kualitas keluarga. Sementara itu, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan ditargetkan sebesar 77,2 dan terealisasi sebesar 70,1, sehingga integrasi perspektif kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah masih perlu diperkuat.

Proporsi kebutuhan keluarga berencana yang terpenuhi menurut alat atau cara kontrasepsi modern ditargetkan sebesar 96,8% dan terealisasi sebesar 79,4%. Capaian ini masih berada di bawah target, sehingga peningkatan akses, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan kontrasepsi modern menjadi fokus pemerintah daerah. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan Angka Kelahiran Remaja Usia 15–19 Tahun yang ditargetkan sebesar 13,5 dan terealisasi sebesar 19,7, serta kehamilan tidak direncanakan yang ditargetkan sebesar 14,8 dan terealisasi sebesar 23,4. Realisasi yang lebih tinggi dari target menunjukkan perlunya penguatan edukasi kesehatan reproduksi, pendampingan remaja, serta peningkatan peran keluarga dan kelembagaan masyarakat.

Pada kelompok lanjut usia, Indeks Lansia Berdaya ditargetkan sebesar 62,2 dan terealisasi sebesar 69,8, sehingga menunjukkan capaian yang lebih baik dari target. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri juga terealisasi sebesar 56,8%, melampaui target sebesar 55,2%. Capaian ini mencerminkan perkembangan positif dalam pemberdayaan lanjut usia dan penguatan kelembagaan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai basis pelaksanaan pembangunan keluarga di tingkat masyarakat.

Adapun Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja yang ditargetkan sebesar 85,9 belum memiliki nilai realisasi karena hasil Pendataan Keluarga Tahun 2025 belum dirilis. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memastikan ketersediaan data sebagai dasar evaluasi dan penyusunan intervensi pengasuhan keluarga remaja.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif pada pembangunan keluarga, pemberdayaan lanjut usia, dan kemandirian Kampung Keluarga Berkualitas. Namun demikian, pengendalian kelahiran, pemenuhan kebutuhan kontrasepsi modern, pencegahan kelahiran remaja dan kehamilan tidak direncanakan, serta penguatan pembangunan berwawasan kependudukan masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada periode berikutnya.

15. Perhubungan

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Rasio Konektivitas Antarwilayah ditargetkan sebesar 65% dan terealisasi sebesar 82%. Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan meningkatnya keterhubungan antarwilayah dalam mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi. Kondisi ini menjadi capaian positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi serta penguatan konektivitas antara wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan.

16. Komunikasi dan Informatika

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditargetkan sebesar 2,88 dan terealisasi sebesar 3,01, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE terealisasi sebesar 2, sesuai dengan target sebesar 2.

    Capaian tersebut menunjukkan adanya penguatan dalam tata kelola pemerintahan digital dan penerapan arsitektur SPBE sebagai dasar integrasi proses bisnis, data, aplikasi, dan layanan pemerintahan. Ke depan, kondisi ini menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas, keterpaduan, dan keberlanjutan transformasi digital pemerintahan daerah..

17. Koperasi Usaha Kecil Menengah

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan perbaikan. Indikator Koperasi Usaha Kecil Menengah ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi sebesar 16%, sehingga capaian ini berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, Jumlah UKM Menjalin Kemitraan ditargetkan sebanyak 25 unit usaha dan terealisasi sebanyak 28 unit usaha. Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan dalam penguatan kelembagaan koperasi dan perluasan kemitraan UKM sebagai bagian dari peningkatan daya saing usaha masyarakat.

18. Penanaman Modal

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 masih memerlukan penguatan. Persentase Peningkatan Investasi ditargetkan sebesar 5,7% dan terealisasi sebesar

-0,28%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian peningkatan investasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga penguatan iklim investasi, kemudahan perizinan, promosi potensi daerah, serta kepastian layanan penanaman modal masih perlu menjadi perhatian.

19. Kepemudaan dan Olahraga

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Indeks Partisipasi Olahraga ditargetkan sebesar 0,084 dan terealisasi sebesar 12. Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan dalam partisipasi masyarakat pada kegiatan olahraga, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan pembinaan keolahragaan daerah.

20. Statistik

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Indeks Pembangunan Statistik ditargetkan sebesar 2,26 dan terealisasi sebesar 2,26. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral daerah telah berjalan sesuai target, sehingga dapat mendukung ketersediaan data pembangunan yang lebih terarah dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

21. Persandian

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Persandian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ditargetkan sebesar 30,02% dan terealisasi sebesar 33,08%. Capaian ini berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan, sehingga menggambarkan adanya perbaikan dalam kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan digital.

22. Kebudayaan

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam. Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan ditargetkan sebesar 8% dan terealisasi sebesar 10,12%. Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam proses inventarisasi, perlindungan, dan penetapan cagar budaya daerah.

    Sementara itu, persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 75%. Capaian ini masih berada di bawah target, sehingga menjadi perhatian

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat pendataan, dokumentasi, pemenuhan dokumen pendukung, serta koordinasi proses pengusulan dan penetapan warisan budaya takbenda. Secara keseluruhan, capaian urusan kebudayaan menunjukkan kemajuan pada penetapan cagar budaya, namun pelindungan dan pengakuan terhadap warisan budaya takbenda masih perlu dioptimalkan pada periode berikutnya..

23. Perpustakaan

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Perpustakaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkalis ditargetkan sebesar 44,39 dan terealisasi sebesar 5,3. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan literasi masyarakat belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga penguatan budaya baca, akses layanan perpustakaan, dan literasi masyarakat masih perlu menjadi perhatian.

Namun demikian, indikator Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial menunjukkan capaian yang lebih baik dari target. Indikator ini ditargetkan sebesar 76 dan terealisasi sebesar 88. Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan dalam pengembangan perpustakaan sebagai ruang pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses informasi, dan penguatan literasi berbasis kebutuhan sosial masyarakat.

24. Kearsipan

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Indeks Pengelolaan Kearsipan ditargetkan sebesar 30 dan terealisasi sebesar 52,83, sedangkan Tingkat Digitalisasi Arsip ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 36,27%. Kedua indikator tersebut berada pada capaian yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan dalam tata kelola arsip daerah, baik dari sisi pengelolaan kearsipan maupun digitalisasi arsip. Dengan demikian, penguatan kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan, akuntabilitas dokumen, serta peningkatan kualitas layanan administrasi publik.

25. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Jumlah produksi perikanan ditargetkan sebesar 9.327 ton dan terealisasi sebesar 11.517 ton, sedangkan jumlah produksi olahan perikanan ditargetkan sebesar 100 ton dan terealisasi sebesar 110 ton. Kedua indikator tersebut telah melampaui

target yang ditetapkan, sehingga mencerminkan peningkatan produktivitas sektor perikanan serta berkembangnya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang memberikan nilai tambah terhadap komoditas daerah. Kondisi ini menjadi capaian positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang perlu dipertahankan melalui penguatan sarana produksi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan pengolahan hasil perikanan, serta perluasan akses pemasaran agar kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah semakin optimal.

26. Pariwisata

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Pariwisata Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum ditargetkan sebesar 0,31% dan terealisasi sebesar 0,33%, sehingga capaian ini berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kontribusi aktivitas akomodasi serta makan dan minum dalam mendukung perekonomian daerah.

    Sejalan dengan itu, Jumlah Wisatawan Mancanegara ditargetkan sebanyak 3.417 jiwa dan terealisasi sebanyak 5.487 jiwa, sedangkan Jumlah Wisatawan Nusantara ditargetkan sebanyak 246.151 jiwa dan terealisasi sebanyak 312.998 jiwa. Kedua indikator tersebut menunjukkan capaian yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian urusan pariwisata menunjukkan perbaikan pada kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pendukung pariwisata terhadap perekonomian daerah.

27. Pertanian

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ditargetkan sebesar 12,82% dan terealisasi sebesar 12,9%. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersebut berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan, sehingga sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi salah satu penopang penting dalam struktur ekonomi daerah.

28. Energi dan Sumber Daya Mineral

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 92,22% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan ketenagalistrikan telah terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menjadi capaian positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang perlu dipertahankan melalui peningkatan keandalan jaringan, pemerataan kualitas

layanan, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan agar ketersediaan energi listrik dapat mendukung pelayanan dasar dan aktivitas perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

29. Perdagangan

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan perbaikan terhadap target yang telah ditetapkan. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ditargetkan sebesar 6,46% dan terealisasi sebesar 7,52%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memberikan kontribusi yang lebih baik dari target, sekaligus menggambarkan peran perdagangan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan perputaran barang serta jasa di daerah.

30. Perindustrian

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Rasio PDRB Industri Pengolahan ditargetkan sebesar 16,18% dan terealisasi sebesar 17,5%. Capaian ini berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya perbaikan kontribusi industri pengolahan dalam struktur perekonomian daerah, terutama dalam mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi.

31. Transmigrasi

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 masih memerlukan penguatan. Tingkat Kesempatan Kerja di Wilayah Transmigrasi ditargetkan sebesar 94,5% dan terealisasi sebesar 65%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian kesempatan kerja di wilayah transmigrasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga penguatan aktivitas ekonomi, akses kerja, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi masih perlu menjadi perhatian.

32. Sekretariat Daerah

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 66,53 dan terealisasi sebesar 72,02. Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas kelembagaan. Kondisi ini menjadi capaian positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang perlu dipertahankan melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas aparatur, penyederhanaan proses pemerintahan,

serta optimalisasi pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyaraka

33. Sekretariat DPRD

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ditargetkan sebesar 91,66% dan terealisasi sebesar 92,1%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Sekretariat DPRD berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan, sehingga mendukung kelancaran fungsi pelayanan administrasi dan fasilitasi kelembagaan DPRD.

34. Keuangan

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Opini BPK ditargetkan pada kategori WTP dan terealisasi WTP. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi target yang ditetapkan, sekaligus menggambarkan bahwa tata kelola, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan daerah tetap terjaga.

35. Kepegawaian

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Kepegawaian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 masih memerlukan penguatan. Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan sebesar 80,625 dan terealisasi sebesar 80,41. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian profesionalitas ASN belum memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun selisihnya relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan profesionalitas aparatur tetap perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi, kinerja, disiplin, dan kualitas layanan ASN.

36. Pendidikan dan Pelatihan

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi ditargetkan sebesar 26,76 dan terealisasi sebesar 27,91. Capaian ini berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya perbaikan pada aspek pengembangan kompetensi aparatur sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintahan.

37. Penelitian dan Pengembangan

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif.

Indeks Inovasi Daerah ditargetkan sebesar 40,85 dan terealisasi sebesar 46,55 dengan kategori "Inovatif", sedangkan Indeks Kapabilitas Inovasi ditargetkan sebesar 2,01 dan terealisasi sebesar 2,40. Kedua indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya penguatan kapasitas serta ekosistem inovasi daerah.

Sementara itu, Persentase Kebijakan Berbasis Bukti terealisasi sebesar 40%, sesuai dengan target sebesar 40%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil penelitian, data, dan kajian dalam perumusan kebijakan daerah telah berjalan sesuai sasaran. Kondisi ini menjadi capaian positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang perlu dipertahankan melalui penguatan riset dan inovasi, peningkatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

38. Pengawasan

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditargetkan pada Level 3 dan terealisasi pada Level 3. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah daerah telah berjalan sesuai target, sehingga mendukung penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

39. Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Indeks Harmoni Sosial ditargetkan sebesar 6,5 dan terealisasi sebesar 6,67. Capaian ini berada pada kondisi yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan, sehingga menggambarkan terjaganya kondisi sosial masyarakat yang kondusif sebagai bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah dan keberlanjutan pembangunan.

40. Pengelola Perbatasan

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan bahwa Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan ditargetkan sebesar 74,78% dan terealisasi sebesar 65%. Capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan. Ke depan, penguatan diarahkan melalui peningkatan koordinasi lintas pemerintahan dan perangkat daerah, pemutakhiran data wilayah perbatasan, peningkatan pelayanan dasar dan

infrastruktur, serta optimalisasi program pembangunan agar pengelolaan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih terpadu dan efektif.

41. Kecamatan

    Berdasarkan Tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Kunci pada Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Dari 11 kecamatan yang dievaluasi, sebanyak 8 kecamatan telah memenuhi atau melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu Kecamatan Bengkalis, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Rupat, Talang Muandau, Bantan, Bathin Solapan, dan Mandau. Capaian tertinggi terdapat pada Kecamatan Rupat sebesar 98,49, diikuti Kecamatan Mandau sebesar 98,35 dan Kecamatan Talang Muandau sebesar 97,07. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pinggir terealisasi sebesar 85,00 dari target 96,50, Kecamatan Rupat Utara sebesar 90,89 dari target 95,00, dan Kecamatan Bukit Batu sebesar 94,65 dari target 95,00. Capaian tersebut masih berada di bawah target, sehingga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas, kecepatan, kemudahan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, penguatan diarahkan pada penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pengelolaan pengaduan, serta pengembangan inovasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing kecamatan.

2.2 Evaluasi Hasil RKPD 2025

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis. Melalui pengendalian dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun berpotensi muncul, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pelaksanaan pembangunan.

Evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dilakukan untuk menilai kemajuan, pencapaian hasil, daya serap anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap aspek masukan, keluaran, dan hasil, baik dari sisi capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan kegiatan, percepatan terhadap kegiatan yang mengalami keterlambatan, klarifikasi terhadap ketidakjelasan pelaksanaan rencana, serta penyempurnaan kebijakan dan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja Program Unggulan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 mencapai 85,72%, sedangkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 76,12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah telah berjalan dengan baik, dengan sebagian besar target kinerja dapat dicapai. Bahkan, terdapat perangkat daerah yang mampu mencapai kinerja 100% atau melebihi target yang telah ditetapkan, seperti Dinas Kesehatan dengan capaian kinerja sebesar 103,98%.

Meskipun demikian, realisasi anggaran masih berada di bawah capaian kinerja. Kondisi tersebut tidak semata-mata menunjukkan rendahnya pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dipengaruhi oleh penerapan kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penghematan pada beberapa komponen belanja. Hal ini terlihat dari sejumlah perangkat daerah yang tetap mampu mencapai kinerja tinggi meskipun tingkat penyerapan anggarannya relatif lebih rendah. Dengan demikian, hasil evaluasi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan program unggulan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memastikan agar pencapaian kinerja perangkat daerah semakin selaras dengan realisasi anggaran dan target pembangunan daerah. Berikut adalah rata-rata capaian kinerja Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.:

Tabel II-4 Rata-Rata Capaian Program Unggulan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Perangkat Daerah (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	100,00	98,77
2	Dinas Perhubungan	100,00	75,87
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92,50	89,95
4	Dinas Kesehatan	103,98	99,99
5	Dinas Sosial	100,00	99,28
6	Sekretariat Daerah	50,00	59,64
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	100,00	99,99
8	Kecamatan Bengkalis	100,00	99,86
9	Kecamatan Bantan	90,32	81,61
10	Kecamatan Bukit Batu	95,99	95,99

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Perangkat Daerah (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
11	Kecamatan Siak Kecil	26,32	9,02
12	Kecamatan Bandar laksamana	85,94	17,64
13	Kecamatan Rupat	95,49	95,49
14	Kecamatan Rupat Utara	100,00	100,00
15	Kecamatan Mandau	77,55	76,60
16	Kecamatan Pinggir	87,50	95,73
17	Kecamatan Bathin Solapan	100,00	44,93
18	Kecamatan Talang Muandau	37,50	29,88
Predikat Kinerja		**85,72**	**76,12**

Terdapat beberapa perangkat daerah yang menunjukkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang sama-sama tinggi, seperti Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bengkalis, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Di sisi lain, terdapat pula perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja tinggi tetapi realisasi anggaran relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan anggaran secara lebih efisien.

Namun demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang menunjukkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang relatif rendah, seperti Sekretariat Daerah, Kecamatan Siak Kecil, dan Kecamatan Talang Muandau. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pencapaian target sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah telah berjalan cukup efektif. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan mampu mendorong perangkat daerah untuk lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan perlu terus dilakukan agar capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat semakin meningkat dan seimbang

Selain evaluasi terhadap capaian Program Unggulan Perangkat Daerah, evaluasi pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 juga dilakukan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan. Evaluasi ini penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap triwulan, baik dari aspek capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya menggambarkan pencapaian program unggulan, tetapi juga menunjukkan efektivitas pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah secara menyeluruh dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Secara umum, hingga Triwulan IV Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan dari triwulan ke triwulan. Pada Triwulan I, rata-rata capaian kinerja tercatat sebesar 11,91% dengan realisasi anggaran sebesar 12,29%. Selanjutnya, pada Triwulan II capaian kinerja meningkat menjadi 27,49% dengan realisasi anggaran sebesar 19,64%. Pada Triwulan III, capaian kinerja kembali meningkat menjadi 50,35% dengan realisasi anggaran sebesar 26,33%. Hingga Triwulan IV, rata-rata capaian kinerja Kabupaten Bengkalis mencapai 80,36% dengan predikat kinerja tinggi, sedangkan realisasi anggaran mencapai 33,56% dengan predikat sangat rendah.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah secara umum mengalami perkembangan positif, terutama pada Triwulan IV. Namun demikian, realisasi anggaran masih belum seimbang dengan capaian kinerja yang telah dicapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dari sisi kinerja telah berjalan lebih cepat dibandingkan dengan realisasi keuangan. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat pengendalian pelaksanaan program, percepatan proses administrasi keuangan, peningkatan kualitas perencanaan kas, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat berjalan lebih selaras. Berikut adalah rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025:

Tabel II-5 Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan	1.059.200.237.496	26,38	100,00	961.932.872.171	90,82
2	Dinas Kesehatan	788.781.710.334	53,85	59,82	374.317.017.816	47,46

No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	3	4	5	6	7	8
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	488.688.054.015	61,11	100,00	385.367.994.276	78,86
4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	284.892.483.889	100,00	100,00	169.711.901.088	59,57
5	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.592.230.833	47,91	74,11	15.546.058.139	93,69
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	21.434.353.485	0,00	73,56	18.578.293.271	86,68
7	Satuan Polisi Pamong Praja	30.167.201.068	92,81	93,19	27.850.616.932	92,32
8	Dinas Sosial	45.241.078.797	86,71	67,62	43.460.258.862	96,06
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.071.883.376	100,00	100,00	17.481.638.703	75,77
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.326.562.993	100,00	82,21	10.913.774.127	88,54
11	Dinas Ketahanan Pangan	11.059.063.062	100,00	86,92	9.096.566.343	82,25
12	Dinas Lingkungan Hidup	47.291.224.582	100,00	87,37	44.511.313.422	94,12
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.986.422.899	0,00	96,21	19.193.194.419	91,46
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.097.067.623	91,67	78,32	29.734.675.213	87,21
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.829.375.225	100,00	57,36	39.409.654.678	98,74
16	Dinas Perhubungan	148.453.252.183	100,00	100,00	114.326.197.042	77,01
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	26.051.419.236	100,00	94,49	23.567.295.362	90,46
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.289.367.947	10,99	72,40	9.375.911.259	83,05
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.756.065.222	100,00	100,00	18.250.816.652	80,20
20	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	50.786.766.229	88,89	100,00	31.199.677.285	61,43
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.528.325.509	0,00	89,43	10.997.369.811	81,29
22	Dinas Perikanan	17.935.289.324	42,36	100,00	13.501.466.816	75,28
23	Dinas Perkebunan	35.625.056.754	100,00	82,82	22.395.717.732	62,87
24	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	47.335.723.298	92,90	95,20	36.401.903.419	76,90
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	29.017.228.203	39,57	54,98	18.463.337.169	63,63
26	Sekretariat Daerah	180.091.396.806	86,49	92,98	199.712.957.568	110,90
27	Sekretariat DPRD	120.941.193.382	91,50	96,88	111.886.395.994	92,51
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.616.473.205	100,00	92,16	19.519.226.058	94,68
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	763.109.540.480	60,66	100,00	426.328.093.752	55,87
30	Badan Pendapatan Daerah	47.117.757.078	100,00	100,00	38.207.007.619	81,09
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	17.528.584.272	100,00	100,00	14.859.523.958	84,77
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.952.554.211	50,00	100,00	6.526.191.689	82,06
33	Inspektorat Daerah	16.540.904.111	93,92	89,76	13.878.733.490	83,91
34	Kecamatan Bengkalis	16.654.866.974	97,50	84,62	15.602.990.491	93,68
35	Kecamatan Bantan	7.274.816.355	100,00	77,98	6.740.721.239	92,66
36	Kecamatan Bukit Batu	10.619.547.581	71,94	45,48	14.190.690.956	133,63
37	Kecamatan Siak Kecil	8.138.434.718	28,37	67,59	6.531.863.348	80,26
38	Kecamatan Bandar Laksamana	6.975.010.854	98,83	91,68	6.005.500.147	86,10
39	Kecamatan Rupat	18.023.686.553	100,00	85,05	16.276.968.187	90,31
40	Kecamatan Rupat Utara	8.547.720.080	62,90	91,18	7.350.707.541	86,00
41	Kecamatan Mandau	52.315.814.427	99,05	95,55	49.753.038.883	95,10
42	Kecamatan Pinggir	15.092.717.511	84,87	100,00	14.335.848.975	94,99
43	Kecamatan Bathin Solapan	9.624.165.553	0,00	84,29	7.878.386.442	81,86
44	Kecamatan Talang Muandau	8.381.155.843	100,00	100,00	7.160.825.544	85,44
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.387.578.855	99,04	67,78	18.405.674.796	90,28
JUMLAH		**4.662.371.362.430**	**76,37**	**86,87**	**3.466.736.868.684**	**74,36**

1. Capaian Dinas Pendidikan pada Triwulan I tercatat sebesar 4,97% dengan realisasi anggaran 9,29%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 17,05% dengan realisasi anggaran 18,37%. Pada Triwulan III, capaian kinerja kembali meningkat menjadi 32,54% dengan realisasi anggaran 25,55%. Namun, pada Triwulan IV capaian kinerja tercatat 100% dengan realisasi anggaran 90,82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan mengalami peningkatan pada Triwulan IV, sementara realisasi anggaran belum terpenuhi.
2. Capaian Dinas Kesehatan pada Triwulan I tercatat sebesar 8,20% dengan realisasi anggaran 11,87%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 35,39% dengan realisasi anggaran 21,29%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 57,38% dengan realisasi anggaran 25,55%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 59,82% dengan realisasi anggaran 47,46%. Kondisi ini menunjukkan rendahnya capaian kinerja dari awal sampai akhir tahun.
3. Capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Triwulan I tercatat sebesar 3,65% dengan realisasi anggaran 16,45%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 4,23% dengan realisasi anggaran 26,22%. Pada Triwulan III, capaian kinerja tercatat 0,00% dengan realisasi anggaran 25,26%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja meningkat signifikan menjadi 100,00% dengan realisasi anggaran 78,86%. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan capaian kinerja pada akhir tahun, sedangkan realisasi anggaran masih perlu terus ditingkatkan.
4. Capaian Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan pada Triwulan I tercatat sebesar 3,70% dengan realisasi anggaran 11,80%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 18,13% dengan realisasi anggaran 16,23%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 34,16% dengan realisasi anggaran 16,51%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja meningkat menjadi 100,00% dengan realisasi anggaran 59,57%. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, meskipun realisasi anggaran masih sangat rendah.
5. Capaian Dinas Pemadam Kebakaran pada Triwulan I tercatat sebesar 17,64% dengan realisasi anggaran 17,25%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 18,88% dengan realisasi anggaran 23,65%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 73,26% dengan realisasi anggaran 18,79%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 73,56% dengan realisasi anggaran 86,68%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang terus meningkat, meskipun realisasi anggaran masih perlu dioptimalkan.
6. Capaian Satuan Polisi Pamong Praja pada Triwulan I tercatat sebesar 11,01% dengan realisasi anggaran 16,23%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 38,43% dengan realisasi anggaran 26,11%. Pada Triwulan III, capaian kinerja menurun menjadi 31,56% dengan realisasi anggaran 21,72%. Hingga

Triwulan IV, capaian kinerja meningkat menjadi 93,19% dengan realisasi anggaran 92,32%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat menurun pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat signifikan pada Triwulan IV.

7. Capaian Dinas Sosial pada Triwulan I tercatat sebesar 0,09% dengan realisasi anggaran 6,25%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 0,19% dengan realisasi anggaran 8,69%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 0,20% dengan realisasi anggaran 10,81%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja hanya mencapai 86,71% dengan realisasi anggaran 96,06%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial cukup baik, sementara realisasi anggaran mengalami peningkatan cukup besar pada akhir tahun.
8. Capaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Triwulan I tercatat sebesar 14,69% dengan realisasi anggaran 8,80%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 15,59% dengan realisasi anggaran 14,09%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 32,92% dengan realisasi anggaran 11,79%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 75,77%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja sangat baik, meskipun realisasi anggaran belum optimal.
9. Capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan I tercatat sebesar 6,90% dengan realisasi anggaran 12,95%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 18,56% dengan realisasi anggaran 21,02%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 63,71% dengan realisasi anggaran 24,09%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 88,54%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada akhir tahun, meskipun realisasi anggaran masih perlu dioptimalkan.
10. Capaian Dinas Ketahanan Pangan pada Triwulan I tercatat sebesar 6,55% dengan realisasi anggaran 10,53%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 34,41% dengan realisasi anggaran 24,38%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 63,40% dengan realisasi anggaran 20,14%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 82,25%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang meningkat sangat baik, sedangkan realisasi anggaran masih perlu diperkuat.
11. Capaian Dinas Lingkungan Hidup pada Triwulan I tercatat sebesar 17,96% dengan realisasi anggaran 16,92%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 36,41% dengan realisasi anggaran 24,13%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 48,64% dengan realisasi anggaran 17,92%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 94,12%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan pada akhir tahun.
12. Capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Triwulan I tercatat sebesar 8,75% dengan realisasi anggaran 15,64%. Pada Triwulan II, capaian kinerja

meningkat menjadi 21,62% dengan realisasi anggaran 27,54%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 60,11% dengan realisasi anggaran 20,24%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja tercatat sebesar 96,21% dengan realisasi anggaran 91,46%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat sampai Triwulan III dan relatif stagnan pada Triwulan IV.

13. Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan I tercatat sebesar 18,00% dengan realisasi anggaran 18,04%. Pada Triwulan II, capaian kinerja tercatat 0,00% dengan realisasi anggaran 26,10%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 93,00% dengan realisasi anggaran 34,86%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 87,21%. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan kinerja yang sangat signifikan pada Triwulan III dan IV, meskipun realisasi anggaran pada akhir tahun masih sangat rendah.
14. Capaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Triwulan I tercatat sebesar 7,04% dengan realisasi anggaran 11,91%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 31,34% dengan realisasi anggaran 36,54%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 65,48% dengan realisasi anggaran 70,84%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 98,74%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah mencapai penuh, sementara capaian anggaran masih perlu ditingkatkan agar lebih seimbang.
15. Capaian Dinas Perhubungan pada Triwulan I tercatat sebesar 19,67% dengan realisasi anggaran 11,73%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 43,00% dengan realisasi anggaran 18,98%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 66,00% dengan realisasi anggaran 22,88%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 77,01%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada akhir tahun, meskipun realisasi anggaran masih rendah.
16. Capaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Triwulan I tercatat sebesar 23,47% dengan realisasi anggaran 6,77%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 63,86% dengan realisasi anggaran 15,41%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 65,69% dengan realisasi anggaran 33,12%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 90,46%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang meningkat sangat baik, sementara realisasi anggaran masih perlu dioptimalkan.
17. Capaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Triwulan I tercatat sebesar 2,03% dengan realisasi anggaran 13,75%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 4,15% dengan realisasi anggaran 20,43%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 6,61% dengan realisasi anggaran 24,05%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 72,40% dengan realisasi anggaran

83,05%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja, namun capaian akhir masih relatif rendah.

18. Capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Triwulan I tercatat sebesar 12,73% dengan realisasi anggaran 10,52%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 23,76% dengan realisasi anggaran 16,71%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 49,92% dengan realisasi anggaran 16,79%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 80,20%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan pada akhir tahun, sedangkan realisasi anggaran masih perlu ditingkatkan.
19. Capaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada Triwulan I tercatat sebesar 11,50% dengan realisasi anggaran 14,26%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 26,84% dengan realisasi anggaran 16,45%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 46,59% dengan realisasi anggaran 18,27%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 61,43%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja, meskipun realisasi anggaran pada akhir tahun masih sangat rendah.
20. Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Triwulan I tercatat sebesar 3,92% dengan realisasi anggaran 16,07%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 50,16% dengan realisasi anggaran 25,31%. Pada Triwulan III, capaian kinerja menurun menjadi 30,84% dengan realisasi anggaran 19,01%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja meningkat menjadi 89,43% dengan realisasi anggaran 81,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat menurun pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat sangat signifikan pada Triwulan IV.
21. Capaian Dinas Perikanan pada Triwulan I tercatat sebesar 13,40% dengan realisasi anggaran 10,73%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 50,00% dengan realisasi anggaran 20,80%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 71,40% dengan realisasi anggaran 19,74%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 75,28%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada akhir tahun, meskipun realisasi anggaran masih relatif rendah.
22. Capaian Dinas Perkebunan pada Triwulan I tercatat sebesar 6,83% dengan realisasi anggaran 7,71%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 15,88% dengan realisasi anggaran 9,47%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 33,45% dengan realisasi anggaran 25,11%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 62,87%. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan capaian kinerja dan realisasi anggaran masih perlu ditingkatkan.
23. Capaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Triwulan I tercatat sebesar 25,19% dengan realisasi anggaran 13,95%. Pada Triwulan II,

capaian kinerja meningkat menjadi 40,58% dengan realisasi anggaran 14,08%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 64,53% dengan realisasi anggaran 23,28%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 95,20% dengan realisasi anggaran 76,90%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada akhir tahun, meskipun realisasi anggaran masih perlu dioptimalkan.

24. Capaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Triwulan I tercatat sebesar 11,44% dengan realisasi anggaran 10,91%. Pada Triwulan II, capaian kinerja tercatat 0,00% dengan realisasi anggaran 0,00%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 44,44% dengan realisasi anggaran 22,50%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 54,98% dengan realisasi anggaran 63,63%. Kondisi ini menunjukkan percepatan capaian kinerja pada akhir tahun, meskipun realisasi anggaran masih perlu ditingkatkan.
25. Capaian Inspektorat pada Triwulan I tercatat sebesar 14,04% dengan realisasi anggaran 10,30%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 21,01% dengan realisasi anggaran 15,90%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 68,33% dengan realisasi anggaran 25,80%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 93,92% dengan realisasi anggaran 83,91%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kinerja pengawasan yang cukup baik sampai akhir tahun meskipun realisasi anggaran belum memuaskan.
26. Capaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Triwulan I tercatat sebesar 17,90% dengan realisasi anggaran 12,25%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 41,48% dengan realisasi anggaran 16,59%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 76,33% dengan realisasi anggaran 24,10%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 94,68%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang mencapai penuh pada akhir tahun, meskipun realisasi anggaran masih perlu diperkuat.
27. Capaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Triwulan I tercatat sebesar 16,36% dengan realisasi anggaran 8,71%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 29,09% dengan realisasi anggaran 3,18%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 52,92% dengan realisasi anggaran 21,43%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 55,87%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang meningkat baik, sedangkan realisasi anggaran masih relatif rendah.
28. Capaian Badan Pendapatan Daerah pada Triwulan I tercatat sebesar 25,00% dengan realisasi anggaran 16,73%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 50,00% dengan realisasi anggaran 41,73%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 75,00% dengan realisasi anggaran 100,00%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100,00% dan realisasi anggaran 81,09%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah telah mencapai capaian kinerja secara penuh pada akhir tahun meskipun dan realisasi anggaran belum optimal.

29. Capaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada Triwulan I tercatat sebesar 11,32% dengan realisasi anggaran 12,00%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 43,63% dengan realisasi anggaran 22,76%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 69,26% dengan realisasi anggaran 21,05%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 84,77%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi pada akhir tahun, meskipun realisasi anggaran masih perlu dioptimalkan.
30. Capaian Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Triwulan I tercatat sebesar 17,18% dengan realisasi anggaran 11,71%. Pada Triwulan II, capaian kinerja tercatat 0,00% dengan realisasi anggaran 0,00%. Pada Triwulan III, capaian kinerja tercatat 0,50% dengan realisasi anggaran 31,75%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja meningkat signifikan menjadi 100,00% dengan realisasi anggaran 82,06%. Kondisi ini menunjukkan percepatan capaian kinerja pada akhir tahun, namun realisasi anggaran masih sangat rendah.
31. Capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Triwulan I tercatat sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran 12,68%. Pada Triwulan II, capaian kinerja masih tercatat 0,00% dengan realisasi anggaran 35,76%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 40,39% dengan realisasi anggaran 21,28%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 74,11% dengan realisasi anggaran 93,69%. Kondisi ini menunjukkan percepatan capaian kinerja pada Triwulan III dan IV, meskipun realisasi anggaran masih perlu dioptimalkan.
32. Capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Triwulan I tercatat sebesar 23,61% dengan realisasi anggaran 6,47%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 57,70% dengan realisasi anggaran 13,85%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 69,44% dengan realisasi anggaran 30,42%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 99,04% dengan realisasi anggaran 90,28%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kinerja yang baik sampai akhir tahun.
33. Capaian Sekretariat DPRD pada Triwulan I tercatat sebesar 7,40% dengan realisasi anggaran 5,11%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 46,76% dengan realisasi anggaran 28,13%. Pada Triwulan III, capaian kinerja tetap sebesar 46,76% dengan realisasi anggaran 26,70%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja masih tetap sebesar 91,50% dengan realisasi anggaran 92,51%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD mengalami peningkatan pada Triwulan IV.
34. Capaian Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Triwulan I tercatat sebesar 12,67% dengan realisasi anggaran 8,43%. Pada Triwulan II, capaian

kinerja meningkat menjadi 38,38% dengan realisasi anggaran 19,94%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 60,60% dengan realisasi anggaran 35,76%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 92,98% dengan realisasi anggaran 100%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada akhir tahun.

35. Capaian Kecamatan Bengkalis pada Triwulan I tercatat sebesar 25,00% dengan realisasi anggaran 29,54%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 50,00% dengan realisasi anggaran 19,13%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 75,00% dengan realisasi anggaran 37,67%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 97,50% dengan realisasi anggaran 93,68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bengkalis telah mencapai kinerja penuh pada akhir tahun dengan realisasi anggaran yang relatif lebih baik dibandingkan sebagian perangkat daerah lainnya.
36. Capaian Kecamatan Bukit Batu pada Triwulan I tercatat sebesar 8,34% dengan realisasi anggaran 12,58%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 20,38% dengan realisasi anggaran 22,09%. Pada Triwulan III, capaian kinerja menurun menjadi 18,56% dengan realisasi anggaran 18,03%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 71,94% dengan realisasi anggaran 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Bukit Batu masih rendah dan perlu terus ditingkatkan.
37. Capaian Kecamatan Mandau pada Triwulan I tercatat sebesar 10,96% dengan realisasi anggaran 12,54%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 19,80% dengan realisasi anggaran 20,14%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 48,33% dengan realisasi anggaran 32,11%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 99,05% dengan realisasi anggaran 95,10%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang meningkat secara bertahap, namun masih perlu dioptimalkan.
38. Capaian Kecamatan Bantan pada Triwulan I tercatat sebesar 2,66% dengan realisasi anggaran 10,14%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 15,49% dengan realisasi anggaran 24,92%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 34,33% dengan realisasi anggaran 18,07%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 92,66%. Kondisi ini menunjukkan percepatan capaian kinerja yang baik pada akhir tahun.
39. Capaian Kecamatan Pinggir pada Triwulan I tercatat sebesar 9,82% dengan realisasi anggaran 15,34%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 29,41% dengan realisasi anggaran 14,36%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 54,20% dengan realisasi anggaran 24,41%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 94,99%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada akhir tahun.

40. Capaian Kecamatan Siak Kecil pada Triwulan I tercatat sebesar 6,83% dengan realisasi anggaran 14,61%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 15,43% dengan realisasi anggaran 20,54%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 40,74% dengan realisasi anggaran 23,29%. Namun, pada Triwulan IV capaian kinerja tercatat 67,59% dengan realisasi anggaran 80,26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kurang baik hingga pada Triwulan IV, sehingga perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja.
41. Capaian Kecamatan Rupat pada Triwulan I tercatat sebesar 8,70% dengan realisasi anggaran 8,72%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 25,92% dengan realisasi anggaran 15,44%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 39,02% dengan realisasi anggaran 34,90%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 90,31%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada akhir tahun.
42. Capaian Kecamatan Rupat Utara pada Triwulan I tercatat sebesar 22,08% dengan realisasi anggaran 9,54%. Pada Triwulan II, capaian kinerja menurun menjadi 18,86% dengan realisasi anggaran 19,77%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 54,21% dengan realisasi anggaran 20,67%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 91,18% dengan realisasi anggaran 86%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun belum baik pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat signifikan sampai Triwulan IV.
43. Capaian Kecamatan Bandar Laksamana pada Triwulan I tercatat sebesar 9,33% dengan realisasi anggaran 13,25%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 25,33% dengan realisasi anggaran 17,26%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 51,17% dengan realisasi anggaran 18,87%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 98,83% dengan realisasi anggaran 86,10%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang baik dan meningkat sampai akhir tahun.
44. Capaian Kecamatan Bathin Solapan pada Triwulan I tercatat sebesar 8,58% dengan realisasi anggaran 7,26%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 28,47% dengan realisasi anggaran 15,49%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 48,74% dengan realisasi anggaran 23,44%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 84,29% dengan realisasi anggaran 81,86%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang meningkat cukup baik sampai akhir tahun.
45. Capaian Kecamatan Talang Muandau pada Triwulan I tercatat sebesar 5,74% dengan realisasi anggaran 11,45%. Pada Triwulan II, capaian kinerja meningkat menjadi 16,86% dengan realisasi anggaran 16,57%. Pada Triwulan III, capaian kinerja meningkat menjadi 38,48% dengan realisasi anggaran 19,80%. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran 85,44%.

Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Talang Muandau meningkat cukup baik sampai akhir tahun.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, evaluasi tidak hanya dilakukan pada tingkat Perangkat Daerah, tetapi juga pada level program, kegiatan, dan subkegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah, baik dari aspek capaian kinerja maupun realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian pada level program menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 140,69% dan memperoleh predikat "Sangat Tinggi". Pada level subkegiatan, rata-rata capaian kinerja bahkan mencapai 391,98% dengan predikat "Sangat Tinggi", sedangkan realisasi anggaran berada pada angka 74,36% dengan predikat "Sedang". Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kinerja, pelaksanaan program dan subkegiatan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 telah berjalan sangat optimal, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, realisasi anggaran yang belum sepenuhnya sebanding dengan capaian kinerja tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, hasil evaluasi capaian program, kegiatan, dan subkegiatan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus memperkuat pengendalian pelaksanaan program, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, mempercepat proses administrasi keuangan, serta memastikan keterpaduan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran. Adapun hasil evaluasi capaian program, kegiatan, dan subkegiatan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-6 Evaluasi Capaian Program, Kegiatan, Subkegiatan RKPD Tahun 2025

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.059.200.237.496**	**120.834.964.754**	**254.983.364.994**	**257.032.133.129**	**329.082.409.294**	961.932.872.171	**119,72**	**90,82**		
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**743.302.009.279**	**104.641.318.896**	**194.635.462.615**	**191.580.061.973**	**236.747.392.876**	727.604.236.360	**330,19**	**97,89**	Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	812.383.000	252.510.000	97.320.000	120.062.400	324.130.800	794.023.200	150	97,74		
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	519.299.000	252.510.000	97.320.000	43.320.000	124.330.800	517.480.800	200	99,65		
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	293.084.000	-	-	76.742.400	199.800.000	276.542.400	100	94,36		
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	730.126.616.782	103.523.327.114	192.342.033.081	188.475.713.035	231.805.423.872	716.146.497.102	50	98,09		
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	730.076.483.304	103.523.327.114	192.342.033.081	188.467.089.435	231.792.423.872	716.124.873.502	0	98,09		
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.133.478	-	-	8.623.600	13.000.000	21.623.600	50	43,13		
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	804.600.000	118.400.000	176.000.000	172.800.000	228.800.000	696.000.000	66,67	86,5		
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	804.600.000	118.400.000	176.000.000	172.800.000	228.800.000	696.000.000	66,67	86,5		
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.385.945.460	-	142.060.000	223.370.600	804.056.600	1.169.487.200	46,73	84,38		
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	295.380.000	-	94.500.000	68.245.000	132.635.000	295.380.000	100	100		
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	206.262.000	-	-	-	6.340.000	6.340.000	40	3,07		
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	884.303.460	-	47.560.000	155.125.600	665.081.600	867.767.200	0,2	98,13		
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.956.756.755	80.400.000	681.014.180	1.064.004.482	1.637.618.996	3.463.037.658	782,29	87,52		
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	177.300.000	-	43.500.000	43.500.000	84.300.000	171.300.000	2000	96,62		
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	63.877.295	-	-	-	63.625.295	63.625.295	100	99,61		
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	657.733.393	-	-	261.002.223	272.880.638	533.882.861	100	81,17		
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.932.000	-	372.117.095	442.374.290	684.546.571	1.499.037.956	1200	99,87		
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	413.200.000	-	-	118.360.000	194.385.000	312.745.000	100	75,69		
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	115.830.853	-	55.581.116	38.319.136	9.995.180	103.895.432	225	89,7		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	399.183.214	-	81.900.969	70.698.833	199.566.312	352.166.114	2400	88,22		
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	628.700.000	80.400.000	127.915.000	89.750.000	128.320.000	426.385.000	133,33	67,82		
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.061.782	123.061.782	-	-	49.624.000	172.685.782	125	89,45		
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	-	-	-	49.624.000	49.624.000	150	70,89		
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.061.782	123.061.782	-	-	-	123.061.782	100	100		
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.645.955.500	529.000.000	1.021.548.788	1.031.003.569	1.430.897.856	4.012.450.213	177,78	86,36		
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.008.317.000	-	162.248.788	139.167.969	200.025.296	501.442.053	100	49,73		
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.070.056.000	104.000.000	224.100.000	251.845.600	400.482.560	980.428.160	100	91,62		
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.567.582.500	425.000.000	635.200.000	639.990.000	830.390.000	2.530.580.000	333,33	98,56		
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.376.690.000	14.620.000	175.486.566	493.107.887	466.840.752	1.150.055.205	81,52	83,54		
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	14.620.000	-	59.339.060	110.643.629	184.602.689	0	0		
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	649.990.000	-	143.836.566	252.371.327	218.930.123	615.138.016	100	94,64		
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.700.000	-	31.650.000	59.900.000	59.050.000	150.600.000	26,09	99,93		
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	376.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	-	-	121.497.500	78.217.000	199.714.500	200	99,86		
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**315.898.228.217**	**16.193.645.858**	**60.347.902.379**	**65.452.071.156**	**92.335.016.418**	234.328.635.811	**60,29**	**74,18**	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	172.874.461.812	7.780.400.000	40.927.472.914	41.171.833.841	56.760.813.702	146.640.520.457	86,49	84,82		
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	315.740.532	-	-	-	8.960.000	8.960.000	100	2,84		
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.746.790.770	-	13.920.000	1.095.799.408	5.829.500	1.115.548.908	40	63,86		
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	15.490.000	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	459.605.462	-	-	231.023.600	1.530.000	232.553.600	71,43	50,6		
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.059.905.583	-	1.212.832.914	3.462.949.832	-	4.675.782.746	0	58,01		
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.117.072.972	-	-	540.239.248	-	540.239.248	0	48,36		
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	310.241.862	-	-	10.850.000	-	10.850.000	0	3,5		
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	444.841.862	-	-	13.810.000	13.810.000	27.620.000	100	6,21		
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	740.541.549	-	-	14.792.000	-	14.792.000	0	2		
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	16.664.583.142	-	415.048.500	639.646.780	6.998.671.430	8.053.366.710	33,33	48,33		
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.956.875.084	-	1.722.984.960	6.133.205.485	34.910.000	7.891.100.445	900	99,17		
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	690.247.665	-	-	-	614.000	614.000	100	0,09		
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	566.190.960	-	-	147.080.000	307.348.336	454.428.336	100	80,26		
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	36.069.934.856	7.780.400.000	8.371.330.000	8.858.892.500	10.791.691.675	35.802.314.175	100	99,26		
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.237.088.453	-	-	464.904.626	536.554.525	1.001.459.151	100	80,95		
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	67.819.748.000	-	27.127.899.200	6.781.974.800	33.909.874.000	67.819.748.000	100	100		
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	207.923.748	-	-	70.021.300	106.780.000	176.801.300	50	85,03		
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	333.415.586	-	-	-	19.560.000	19.560.000	20	5,87		
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	68.302.382	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	184.283.095	-	12.961.200	-	49.839.000	62.800.200	80	34,08		
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	911.358.000	-	-	-	643.279.654	643.279.654	100	70,58		
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	206.746.569	-	-	-	148.874.087	148.874.087	100	72,01		
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1.960.000.000	-	-	1.499.373.600	-	1.499.373.600	0	76,5		
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.529.519.143	-	508.780.000	5.120.000	1.009.656.400	1.523.556.400	100	99,61		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.073.584.480	-	694.534.806	1.244.613.562	-	1.939.148.368	0	63,09		
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	687.368.138	-	-	-	8.880.000	8.880.000	100	1,29		
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	192.843.578	-	24.850.000	-	138.107.357	162.957.357	100	84,5		
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.829.496.842	-	822.331.334	1.619.678.840	-	2.442.010.174	0	41,89		
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	831.369.102	-	-	-	827.735	827.735	100	0,1		
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12.643.352.397	-	-	8.337.858.260	2.025.216.003	10.363.074.263	100	81,96		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	106.348.669.009	4.698.050.000	14.521.872.876	18.248.551.114	24.689.497.837	62.157.971.827	29,15	58,45		
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	294.880.000	-	7.320.000	-	-	7.320.000	0	2,48		
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.505.370.000	-	24.590.000	-	-	24.590.000	0	1,63		
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	21.680.000	-	6.960.000	-	-	6.960.000	0	32,1		
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	70.020.000	-	14.670.000	-	-	14.670.000	0	20,95		
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.470.298.809	-	980.121.653	978.091.058	61.345.137	2.019.557.848	33,33	36,92		
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.475.823.026	-	323.414.926	39.638.100	31.520.000	394.573.026	10	15,94		
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	27.050.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	543.497.968	-	-	523.497.968	-	523.497.968	0	96,32		
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	13.522.577.700	-	-	3.418.221.500	-	3.418.221.500	0	25,28		
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.027.695.250	-	6.827.695.250	199.467.000	-	7.027.162.250	0	99,99		
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	809.336.060	-	289.319.000	-	62.768.060	352.087.060	50	43,5		
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	984.722.722	-	220.417.777	201.746.904	48.588.000	470.752.681	21,05	47,81		
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.502.044.217	4.698.050.000	4.952.338.125	5.286.071.875	6.609.329.564	21.545.789.564	100	100,2		
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	426.702.663	-	-	151.350.457	22.927.515	174.277.972	100	40,84		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	550.988.335	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31.025.874.000	-	-	-	15.512.947.000	15.512.947.000	100	50		
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	214.229.378	-	-	60.670.068	117.522.924	178.192.992	100	83,18		
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	386.291.637	-	-	-	185.483.637	185.483.637	100	48,02		
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.609.058.245	-	757.697.145	259.281.100	26.500.000	1.043.478.245	14,29	39,99		
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1.600.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	234.100.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15.046.429.000	-	117.329.000	7.130.515.084	2.010.566.000	9.258.410.084	100	61,53		
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	31.966.234.715	3.644.076.708	2.979.080.589	5.778.091.071	9.469.750.981	21.870.999.349	58,31	68,42		
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.647.210.625	-	-	149.781.660	54.992.654	204.774.314	7,69	12,43		
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	230.403.020	-	-	30.335.154	30.335.154	60.670.308	100	26,33		
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	530.403.020	298.095.154	-	-	-	298.095.154	100	56,2		
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	278.161.528	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	13.588.048.657	3.209.600.000	2.273.750.000	3.975.780.000	4.101.964.655	13.561.094.655	100	99,8		
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	552.002.221	-	-	-	49.134.800	49.134.800	100	8,9		
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	913.450.250	16.882.400	164.390.514	410.630.496	90.276.120	682.179.530	100	74,68		
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.646.111.000	-	-	636.921.046	3.823.055.500	4.459.976.546	0	58,33		
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	257.794.142	-	85.826.973	30.341.030	98.212.400	214.380.403	100	83,16		
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	129.993.020	29.835.154	-	-	-	29.835.154	0	22,95		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	236.900.118	63.524.000	39.779.000	19.552.400	78.117.600	200.973.000	50	84,83		
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	249.599.355	-	-	-	14.260.383	14.260.383	100	5,71		
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	696.167.564	-	-	-	11.105.154	11.105.154	100	1,6		
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	401.741.070	-	-	19.260.000	-	19.260.000	0	4,79		
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	196.420.715	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	505.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	38.106.413	-	-	-	22.853.077	22.853.077	100	59,97		
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	224.627.795	-	-	24.585.385	-	24.585.385	100	10,94		
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	226.140.000	26.140.000	-	-	199.953.119	226.093.119	100	99,98		
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	126.516.567	-	-	-	6.405.231	6.405.231	100	5,06		
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.523.125.500	-	203.867.500	154.352.000	850.740.400	1.208.959.900	100	79,37		
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	548.638.367	-	11.651.200	126.693.534	38.344.734	176.689.468	100	32,21		
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.119.673.768	-	199.815.402	199.858.366	-	399.673.768	0	35,7		
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.708.862.681	71.119.150	1.919.476.000	253.595.130	1.414.953.898	3.659.144.178	68,75	77,71		
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.849.754.000	-	1.652.676.000	-	-	1.652.676.000	0	89,35		
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	756.188.287	-	266.800.000	30.511.200	438.860.298	736.171.498	110,43	97,35		
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.832.100.000	-	-	152.613.930	916.050.000	1.068.663.930	100	58,33		
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	74.722.530	32.420.000	-	-	35.080.000	67.500.000	100	90,33		
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	196.097.864	38.699.150	-	70.470.000	24.963.600	134.132.750	33,33	68,4		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**788.781.710.334**	**93.283.524.201**	**94.540.152.167**	**93.246.670.724**	**93.246.670.724**	374.317.017.816	**59,82**	**47,46**		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**465.511.862.298**	**41.978.035.413**	**41.941.181.936**	**41.941.181.936**	**41.941.181.936**	167.801.581.221	**39,67**	**36,05**	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	432.538.198	86.916.697	87.093.220	87.093.220	87.093.220	348.196.357	32,63	80,5		
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.411.788	38.352.947	38.529.470	38.529.470	38.529.470	153.941.357	76,47	100,35		
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.269.410	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	275.857.000	48.563.750	48.563.750	48.563.750	48.563.750	194.255.000	21,43	70,42		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	267.687.554.120	30.914.021.010	30.914.021.010	30.914.021.010	30.914.021.010	123.656.084.040	0	46,19		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	267.687.554.120	30.914.021.010	30.914.021.010	30.914.021.010	30.914.021.010	123.656.084.040	0	46,19		
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.244.085.000	544.967.000	544.967.000	544.967.000	544.967.000	2.179.868.000	42,86	67,2		
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.049.025.000	544.967.000	544.967.000	544.967.000	544.967.000	2.179.868.000	85,71	71,49		
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	195.060.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.303.000	37.030.000	-	-	-	37.030.000	2	99,27		
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.303.000	37.030.000	-	-	-	37.030.000	4	99,27		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.383.221.093	610.271.060	610.271.060	610.271.060	610.271.060	2.441.084.240	51,58	102,43		
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.370.354	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.054.161.239	285.149.560	285.149.560	285.149.560	285.149.560	1.140.598.240	33,33	108,2		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.158.000	39.840.000	39.840.000	39.840.000	39.840.000	159.360.000	100	100,76		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	158.008.500	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	150.000.000	100	94,93		
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.400.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000	51,43	99,6		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	907.123.000	222.781.500	222.781.500	222.781.500	222.781.500	891.126.000	24,69	98,24		
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.300.886.266	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.260.886.266	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.647.707.298	587.020.116	587.020.116	587.020.116	587.020.116	2.348.080.464	71,11	24,34		
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.692.757.647	114.264.411	114.264.411	114.264.411	114.264.411	457.057.644	80	27		
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.808.624.651	195.755.705	195.755.705	195.755.705	195.755.705	783.022.820	66,67	13,48		
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.146.325.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000	1.108.000.000	66,67	51,62		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.566.408.596	801.967.336	801.967.336	801.967.336	801.967.336	3.207.869.344	44,22	57,63		
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	640.638.061	160.160.684	160.160.684	160.160.684	160.160.684	640.642.736	71,11	100		
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.778.845	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.740.080	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.430.225.000	540.800.000	540.800.000	540.800.000	540.800.000	2.163.200.000	50	48,83		
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	456.026.610	101.006.652	101.006.652	101.006.652	101.006.652	404.026.608	100	88,6		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	175.212.158.727	8.395.842.194	8.395.842.194	8.395.842.194	8.395.842.194	33.583.368.776	100	19,17		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	175.212.158.727	8.395.842.194	8.395.842.194	8.395.842.194	8.395.842.194	33.583.368.776	100	19,17		
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**282.065.312.841**	**47.886.586.288**	**48.881.319.493**	**47.886.586.288**	**47.886.586.288**	192.541.078.357	**69,59**	**68,26**	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	149.755.247.581	23.623.301.886	23.623.301.886	23.623.301.886	23.623.301.886	94.493.207.544	52,9	63,1		
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.518.487.593	364.383.398	364.383.398	364.383.398	364.383.398	1.457.533.592	72,73	32,26		
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	846.323.375	211.580.843	211.580.843	211.580.843	211.580.843	846.323.372	33,33	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	3.579.591.964	894.897.991	894.897.991	894.897.991	894.897.991	3.579.591.964	100	100		
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.274.753.703	318.688.425	318.688.425	318.688.425	318.688.425	1.274.753.700	100	100		
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	39.200.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.173.175.736	490.793.993	490.793.993	490.793.993	490.793.993	1.963.175.972	74,07	61,87		
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	21.600.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	84.306.985.365	9.315.595.607	9.315.595.607	9.315.595.607	9.315.595.607	37.262.382.428	6,56	44,2		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	268.996.305	67.249.076	67.249.076	67.249.076	67.249.076	268.996.304	120	100		
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	17.800.295.917	10.500.836.083	10.500.836.083	10.500.836.083	10.500.836.083	42.003.344.332	50	235,97		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	33.825.837.623	1.459.276.470	1.459.276.470	1.459.276.470	1.459.276.470	5.837.105.880	78,13	17,26		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.553.281.246	24.185.653.902	25.057.252.972	24.185.653.902	24.185.653.902	97.614.214.678	74,42	74,2		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.489.195.584	49.875.000	49.875.000	49.875.000	49.875.000	199.500.000	104,2	13,4		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	49.980.000	-	49.980.000	-	-	49.980.000	99,97	100		
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	37.417.200	-	37.417.200	-	-	37.417.200	100	100		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	37.097.000	-	37.097.000	-	-	37.097.000	100	100		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.002.474.576	-	16.752.580	-	-	16.752.580	100	1,67		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.508.920	-	32.508.920	-	-	32.508.920	100	100		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	102.929.000	-	32.809.000	-	-	32.809.000	99,99	31,88		
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	31.564.660	-	31.564.660	-	-	31.564.660	76,6	100		
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18.739.720	-	18.739.720	-	-	18.739.720	100	100		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	225.965.820	-	39.715.820	-	-	39.715.820	4,95	17,58		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	438.260.300	-	58.003.000	-	-	58.003.000	99,97	13,23		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	350.472.496	87.618.124	87.618.124	87.618.124	87.618.124	350.472.496	90,23	100		
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	40.408.160	-	40.408.160	-	-	40.408.160	100	100		
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	25.345.100	-	25.345.100	-	-	25.345.100	50	100		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.149.818.232	-	87.874.000	-	-	87.874.000	100	2,12		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	166.464.000	-	53.834.000	-	-	53.834.000	100	32,34		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	492.635.981	62.113.210	62.113.210	62.113.210	62.113.210	248.452.840	100	50,43		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	245.470.068	-	23.418.000	-	-	23.418.000	80	9,54		
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.910.000	-	8.910.000	-	-	8.910.000	100	100		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	621.242.843	82.945.110	82.945.110	82.945.110	82.945.110	331.780.440	100	53,41		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	114.030.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	24.378.020	-	24.378.020	-	-	24.378.020	0,3	100		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.580.372.501	52.666.250	52.666.250	52.666.250	52.666.250	210.665.000	40	8,16		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	97.195.721.501	19.692.541.628	19.692.541.628	19.692.541.628	19.692.541.628	78.770.166.512	100	81,04		
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	49.942.000	-	49.942.000	-	-	49.942.000	100	100		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.725.558.890	1.656.573.673	1.656.573.673	1.656.573.673	1.656.573.673	6.626.294.692	100	115,73		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	12.772.651.253	2.039.066.218	2.039.066.218	2.039.066.218	2.039.066.218	8.156.264.872	100	63,86		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.380.864.758	462.254.689	462.254.689	462.254.689	462.254.689	1.849.018.756	100	77,66		
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	36.623.740	-	30.163.740	-	-	30.163.740	66,67	82,36		
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	39.167.000	-	30.613.740	-	-	30.613.740	102,79	78,16		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	84.025.150	-	84.025.150	-	-	84.025.150	97,96	100		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	45.189.955	-	35.673.000	-	-	35.673.000	40	78,94		
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	22.426.260	-	22.426.260	-	-	22.426.260	100	100		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	301.265.506	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	272.690.696	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	341.474.356	-	-	-	-	-	0	0		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	633.649.879	77.630.500	77.630.500	77.630.500	77.630.500	310.522.000	0,02	49,01		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	633.649.879	77.630.500	77.630.500	77.630.500	77.630.500	310.522.000	0,02	49,01		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.134.135	-	123.134.135	-	-	123.134.135	100	100		
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	40.408.962	-	40.408.962	-	-	40.408.962	100	100		
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	47.715.789	-	47.715.789	-	-	47.715.789	100	100		
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	35.009.384	-	35.009.384	-	-	35.009.384	100	100		
	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**39.888.623.485**	**3.383.900.000**	**3.546.678.000**	**3.383.900.000**	**3.383.900.000**	13.698.378.000	**35,85**	**34,34**	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	23.140.000	-	23.140.000	-	-	23.140.000	54,27	100		
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.180.000	-	10.180.000	-	-	10.180.000	100	100		
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12.960.000	-	12.960.000	-	-	12.960.000	8,55	100		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	38.709.336.845	3.383.900.000	3.494.778.000	3.383.900.000	3.383.900.000	13.646.478.000	34,44	35,25		
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.986.000	-	24.986.000	-	-	24.986.000	50	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	38.598.459.040	3.383.900.000	3.383.900.000	3.383.900.000	3.383.900.000	13.535.600.000	0	35,07		
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	85.891.805	-	85.892.000	-	-	85.892.000	53,33	100		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.156.146.640	-	28.760.000	-	-	28.760.000	3,22	2,49		
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.156.146.640	-	28.760.000	-	-	28.760.000	3,22	2,49		
	1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**751.434.238**	**-**	**100.970.238**	**-**	**-**	100.970.238	**94,44**	**13,44**	Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	688.960.000	-	38.496.000	-	-	38.496.000	88,89	5,59		
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	688.960.000	-	38.496.000	-	-	38.496.000	88,89	5,59		
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	62.474.238	-	62.474.238	-	-	62.474.238	100	100		
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	62.474.238	-	62.474.238	-	-	62.474.238	100	100		
	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**564.477.472**	**35.002.500**	**70.002.500**	**35.002.500**	**35.002.500**	175.010.000	**80**	**31**	Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	-	25.000.000	-	-	25.000.000	100	100		
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000	-	25.000.000	-	-	25.000.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.664.000	19.391.000	29.391.000	19.391.000	19.391.000	87.564.000	50	99,89		
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	50.100.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000	100	99,8		
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	37.564.000	9.391.000	9.391.000	9.391.000	9.391.000	37.564.000	0,01	100		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	451.813.472	15.611.500	15.611.500	15.611.500	15.611.500	62.446.000	120	13,82		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	451.813.472	15.611.500	15.611.500	15.611.500	15.611.500	62.446.000	120	13,82		
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**488.688.054.015**	**49.502.007.287**	**49.092.617.975**	**156.619.951.670**	**130.153.417.344**	385.367.994.276	**8757,19**	**78,86**		
	1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**24.686.122.977**	**3.691.504.065**	**5.886.670.103**	**5.947.375.946**	**7.741.980.797**	23.267.530.911	**53,99**	**94,25**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	799.514.687	2.350.000	63.670.400	137.089.200	596.246.629	799.356.229	100	99,98		
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	799.514.687	2.350.000	63.670.400	137.089.200	596.246.629	799.356.229	100	99,98		
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.666.262.481	2.104.838.735	3.191.749.002	3.102.827.884	3.567.400.274	11.966.815.895	85,56	94,48		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.666.262.481	2.104.838.735	3.191.749.002	3.102.827.884	3.567.400.274	11.966.815.895	85,56	94,48		
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.608.834.400	158.400.000	213.316.800	147.665.400	1.070.183.000	1.589.565.200	30	98,8		
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.608.834.400	158.400.000	213.316.800	147.665.400	1.070.183.000	1.589.565.200	30	98,8		
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.306.267.645	171.854.220	383.469.469	474.301.008	273.833.159	1.303.457.856	45,19	99,78		
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.794.298	-	6.180.742	-	18.613.556	24.794.298	100	100		
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.715.928	-	73.239.354	74.950.200	153.526.374	301.715.928	8,57	100		
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.885.000	9.400.000	-	13.160.000	22.325.000	44.885.000	59,38	100		
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.007.884	-	28.513.573	17.725.482	13.768.829	60.007.884	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	-	-	2.500.000	-	2.500.000	0	100		
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	872.364.535	162.454.220	275.535.800	365.965.326	65.599.400	869.554.746	3,22	99,68		
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167.043.165	-	15.300.000	49.400.000	34.900.000	99.600.000	19,67	59,63		
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.043.165	-	15.300.000	49.400.000	34.900.000	99.600.000	19,67	59,63		
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.880.471.630	995.365.823	1.275.063.235	844.774.679	1.410.171.341	4.525.375.078	33,33	92,72		
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.175.275.000	466.400.000	619.600.000	310.000.000	612.270.000	2.008.270.000	25	92,32		
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	573.070.750	90.065.823	52.263.235	226.993.171	193.455.521	562.777.750	50	98,2		
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.132.125.880	438.900.000	603.200.000	307.781.508	604.445.820	1.954.327.328	25	91,66		
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.257.728.969	258.695.287	744.101.197	1.191.317.775	789.246.394	2.983.360.653	85,83	91,58		
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.980.000	19.382.116	13.542.656	14.580.430	69.927.798	117.433.000	57,5	94,72		
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.737.785.374	107.508.171	304.985.548	768.514.243	524.464.096	1.705.472.058	200	98,14		
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.395.963.595	131.805.000	425.572.993	408.223.102	194.854.500	1.160.455.595	0	83,13		
	1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**95.580.921.944**	**21.644.965.068**	**4.903.419.935**	**11.060.537.749**	**7.938.733.582**	45.547.656.334	**137,09**	**47,65**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.326.534.944	21.611.265.068	4.827.109.093	10.378.242.918	7.131.299.125	43.947.916.204	130,11	47,09		
	1.03.02.2.01.0071	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	102.243.020	4.587.540	6.730.560	9.074.580	81.850.340	102.243.020	200	100		
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	143.396.674	-	3.577.100	5.136.000	131.878.274	140.591.374	8,33	98,04		
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	81.918.542.417	19.949.489.837	3.674.981.522	7.538.790.948	4.573.191.670	35.736.453.977	368,67	43,62		
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	599.086.980	-	-	599.086.980	-	599.086.980	138,89	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.03.02.2.01.0108	Rehabilitasi Unit Air Baku	9.773.550	-	9.773.550	-	-	9.773.550	100	100		
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	8.664.122.652	1.408.177.924	703.812.501	1.457.426.086	2.184.651.141	5.754.067.652	158,97	66,41		
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	380.960.940	-	-	370.910.940	10.050.000	380.960.940	125	100		
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	269.319.300	69.807.900	119.513.700	-	79.997.700	269.319.300	0	100		
	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	755.777.384	-	9.180.000	397.817.384	65.230.000	472.227.384	1,22	62,48		
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	179.201.867	179.201.867	-	-	-	179.201.867	200	100		
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	304.110.160	-	299.540.160	-	4.450.000	303.990.160	0	99,96		
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.254.387.000	33.700.000	76.310.842	682.294.831	807.434.457	1.599.740.130	172	70,96		
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1.467.433.000	-	7.078.642	418.197.600	390.617.400	815.893.642	44	55,6		
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	449.200.000	33.700.000	62.195.000	62.545.163	290.759.837	449.200.000	0	100		
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	337.754.000	-	7.037.200	201.552.068	126.057.220	334.646.488	300	99,08		
	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**45.531.661.711**	**7.912.852.422**	**14.366.088.448**	**8.850.623.357**	**7.375.582.240**	38.505.146.467	**86**	**84,57**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	45.531.661.711	7.912.852.422	14.366.088.448	8.850.623.357	7.375.582.240	38.505.146.467	86	84,57		
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	0	100		
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	835.624.400	499.588.800	11.192.400	19.982.400	74.078.400	604.842.000	150	72,38		
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	20.191.263.044	7.000.819.522	5.023.002.400	3.708.170.058	4.380.401.063	20.112.393.043	100	99,61		
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.699.610.000	-	260.091.761	157.722.892	767.315.569	1.185.130.222	80	43,9		
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	21.793.164.267	412.444.100	9.071.801.887	4.964.748.007	2.141.787.208	16.590.781.202	100	76,13		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**6.433.581.291**	**598.522.200**	**2.134.574.000**	**1.117.167.205**	**651.466.286**	4.501.729.691	**50**	**69,97**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	6.433.581.291	598.522.200	2.134.574.000	1.117.167.205	651.466.286	4.501.729.691	50	69,97		
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.756.092.491	239.715.600	-	1.117.167.205	299.209.686	1.656.092.491	0	94,31		
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	2.764.846.800	358.806.600	1.250.757.000	-	107.831.600	1.717.395.200	0	62,12		
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.912.642.000	-	883.817.000	-	244.425.000	1.128.242.000	100	58,99		
	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**9.566.897.776**	**597.912.600**	**1.093.899.251**	**1.994.988.561**	**5.405.334.764**	9.092.135.176	**108,33**	**95,04**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.566.897.776	597.912.600	1.093.899.251	1.994.988.561	5.405.334.764	9.092.135.176	108,33	95,04		
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.089.299.010	-	680.926.000	274.717.710	133.655.300	1.089.299.010	0	100		
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.284.401.766	-	401.539.651	1.712.029.651	5.167.571.464	7.281.140.766	116,67	99,96		
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.193.197.000	597.912.600	11.433.600	8.241.200	104.108.000	721.695.400	100	60,48		
	1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**22.144.236.663**	**1.206.261.410**	**543.570.819**	**13.090.733.911**	**1.445.124.840**	16.285.690.980	**104080,4**	**73,54**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.144.236.663	1.206.261.410	543.570.819	13.090.733.911	1.445.124.840	16.285.690.980	104080,4	73,54		
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	5.897.393.552	737.399.870	333.976.269	299.505.542	845.397.548	2.216.279.229	102	37,58		
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	630.328.522	-	-	606.914.922	23.413.600	630.328.522	0	100		
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	728.640.000	-	10.160.000	-	307.505.762	317.665.762	170000	43,6		
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	14.650.555.589	468.861.540	199.434.550	11.984.568.947	247.327.930	12.900.192.967	350200	88,05		
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	237.319.000	-	-	199.744.500	21.480.000	221.224.500	100	93,22		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**40.392.925.459**	**4.875.214.422**	**4.949.446.494**	**18.892.680.108**	**7.061.112.674**	35.778.453.698	**257,5**	**88,58**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	40.392.925.459	4.875.214.422	4.949.446.494	18.892.680.108	7.061.112.674	35.778.453.698	257,5	88,58		
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.467.098.000	-	876.348.000	-	473.330.000	1.349.678.000	180	54,71		
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	133.726.000	-	12.282.400	11.362.400	62.048.400	85.693.200	100	64,08		
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	37.198.878.259	4.875.214.422	4.034.066.094	18.849.817.708	6.348.989.874	34.108.088.098	100	91,69		
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	593.223.200	-	26.750.000	31.500.000	176.744.400	234.994.400	650	39,61		
	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**242.493.046.394**	**8.843.710.300**	**15.016.138.491**	**95.509.110.092**	**91.366.099.470**	210.735.058.353	**42,33**	**86,9**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	242.493.046.394	8.843.710.300	15.016.138.491	95.509.110.092	91.366.099.470	210.735.058.353	42,33	86,9		
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.811.909.387	939.043.627	669.771.689	104.429.148	137.465.903	1.850.710.367	85,71	38,46		
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	3.804.105.133	-	-	-	3.804.105.133	3.804.105.133	0	100		
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	25.622.000	-	13.552.760	8.251.200	2.951.200	24.755.160	0	96,62		
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	185.406.627.998	5.701.460.362	11.026.866.618	73.797.867.404	82.247.269.286	172.773.463.670	100	93,19		
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	983.629.315	-	56.205.000	508.319.730	176.723.729	741.248.459	0	75,36		
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	16.127.438.537	2.203.206.311	2.376.979.662	6.827.316.542	2.924.449.125	14.331.951.640	50	88,87		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2.074.877.762	-	684.197.762	-	382.820.000	1.067.017.762	0,1	51,43		
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	29.258.836.262	-	188.565.000	14.262.926.068	1.690.315.094	16.141.806.162	102,79	55,17		
	1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**598.838.200**	**59.644.800**	**80.368.800**	**70.108.400**	**343.227.180**	553.349.180	**79,17**	**92,4**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	598.838.200	59.644.800	80.368.800	70.108.400	343.227.180	553.349.180	79,17	92,4		
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	37.220.000	-	-	-	37.070.000	37.070.000	0	99,6		
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	561.618.200	59.644.800	80.368.800	70.108.400	306.157.180	516.279.180	158,33	91,93		
	1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.259.821.600**	**71.420.000**	**118.441.634**	**86.626.341**	**824.755.511**	1.101.243.486	**61,75**	**87,41**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	740.568.400	18.000.000	67.528.034	41.711.541	524.159.511	651.399.086	25	87,96		
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	740.568.400	18.000.000	67.528.034	41.711.541	524.159.511	651.399.086	25	87,96		
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	431.610.000	53.420.000	42.510.000	36.990.000	239.629.600	372.549.600	86	86,32		
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	431.610.000	53.420.000	42.510.000	36.990.000	239.629.600	372.549.600	172	86,32		
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	87.643.200	-	8.403.600	7.924.800	60.966.400	77.294.800	50	88,19		
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	87.643.200	-	8.403.600	7.924.800	60.966.400	77.294.800	50	88,19		
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**284.581.258.342**	**33.620.602.335**	**46.187.485.652**	**47.012.429.545**	**42.684.222.156**	169.504.739.688	**82,67**	**59,56**		
	1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.045.969.706**	**2.424.571.745**	**3.495.281.085**	**3.144.428.907**	**4.503.352.658**	13.567.634.395	**82,08**	**84,55**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	364.133.441	-	101.485.733	68.850.427	113.356.165	283.692.325	100	77,91		
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.991.030	-	66.368.218	39.514.800	46.145.626	152.028.644	100	74,89		
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.142.411	-	35.117.515	29.335.627	67.210.539	131.663.681	100	81,71		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.325.136.449	1.364.865.481	2.087.522.062	2.055.086.934	2.305.055.842	7.812.530.319	100	83,78		
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.325.136.449	1.364.865.481	2.087.522.062	2.055.086.934	2.305.055.842	7.812.530.319	100	83,78		
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	678.440.000	86.400.000	179.620.000	131.568.000	210.315.000	607.903.000	100	89,6		
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	432.000.000	86.400.000	113.600.000	81.600.000	81.600.000	363.200.000	100	84,07		
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	246.440.000	-	66.020.000	49.968.000	128.715.000	244.703.000	100	99,3		
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.241.609.588	127.199.570	569.631.577	511.282.836	568.654.910	1.776.768.893	64,4	79,26		
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.728.663	-	15.014.000	23.042.000	-	38.056.000	100	79,73		
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.390.633	15.845.644	25.551.303	32.772.273	126.232.101	200.401.321	100	92,18		
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.920.000	-	-	-	30.390.000	30.390.000	0	38,03		
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	186.523.068	7.393.895	27.142.296	57.907.730	60.748.701	153.192.622	100	82,13		
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	310.550.000	11.000.000	25.500.000	44.750.000	23.200.000	104.450.000	100	33,63		
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.332.197.224	83.360.031	457.223.978	343.210.833	299.184.108	1.182.978.950	50,8	88,8		
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	67.300.000	9.600.000	19.200.000	9.600.000	28.900.000	67.300.000	0	100		
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.125.000	184.125.000	-	-	-	184.125.000	0	100		
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.125.000	184.125.000	-	-	-	184.125.000	0	100		
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.520.570	82.204.751	105.400.062	71.419.991	108.677.197	367.702.001	100	72,59		
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	187.729.650	25.790.500	37.603.125	17.136.750	47.165.125	127.695.500	100	68,02		
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.198.700	46.408.171	52.679.257	46.564.561	47.393.392	193.045.381	100	71,45		
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.592.220	10.006.080	15.117.680	7.718.680	14.118.680	46.961.120	100	96,64		
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.746.004.658	579.776.943	451.621.651	306.220.719	1.197.293.544	2.534.912.857	78,14	92,31		
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	207.118.625	14.620.000	-	59.339.060	110.643.629	184.602.689	80	89,13		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.621.675	23.085.000	-	65.411.179	199.171.221	287.667.400	85,71	89,72		
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	677.069.558	141.205.943	183.712.851	130.779.855	208.887.270	664.585.919	100	98,16		
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.463.524.800	388.796.000	249.528.800	46.905.000	654.091.424	1.339.321.224	25	91,51		
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.670.000	12.070.000	18.380.000	3.785.625	24.500.000	58.735.625	100	75,62		
	1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.048.938.015**	**-**	**50.643.600**	**182.784.800**	**808.895.600**	1.042.324.000	**100**	**99,37**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	706.430.033	-	3.450.000	23.780.000	677.643.800	704.873.800	100	99,78		
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	706.430.033	-	3.450.000	23.780.000	677.643.800	704.873.800	100	99,78		
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	342.507.982	-	47.193.600	159.004.800	131.251.800	337.450.200	100	98,52		
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	342.507.982	-	47.193.600	159.004.800	131.251.800	337.450.200	100	98,52		
	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**591.471.873**	**-**	**205.693.600**	**208.121.200**	**9.603.600**	423.418.400	**50**	**71,59**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	149.983.873	-	-	-	-	-	0	0		
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	149.983.873	-	-	-	-	-	0	0		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	441.488.000	-	205.693.600	208.121.200	9.603.600	423.418.400	100	95,91		
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	41.938.000	-	5.943.600	8.321.200	9.603.600	23.868.400	100	56,91		
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	399.550.000	-	199.750.000	199.800.000	-	399.550.000	0	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**9.484.681.629**	**-**	**47.792.600**	**954.069.600**	**7.629.352.163**	8.631.214.363	**77,95**	**91**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	9.484.681.629	-	47.792.600	954.069.600	7.629.352.163	8.631.214.363	77,95	91		
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.264.617.586	-	13.766.000	954.069.600	6.990.468.800	7.958.304.400	97,56	96,29		
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.220.064.043	-	34.026.600	-	638.883.363	672.909.963	58,33	55,15		
	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**257.410.197.119**	**31.196.030.590**	**42.388.074.767**	**42.523.025.038**	**29.733.018.135**	145.840.148.530	**100**	**56,66**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	257.410.197.119	31.196.030.590	42.388.074.767	42.523.025.038	29.733.018.135	145.840.148.530	100	56,66		
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	369.690.600	-	80.189.000	90.812.600	73.350.000	244.351.600	100	66,1		
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	256.775.416.519	31.196.030.590	42.275.422.517	42.379.966.788	29.502.228.135	145.353.648.030	100	56,61		
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	265.090.000	-	32.463.250	52.245.650	157.440.000	242.148.900	100	91,35		
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**68.193.785.386**	**10.364.203.707**	**17.951.696.884**	**14.062.268.729**	**19.596.799.022**	61.974.968.342	**79,88**	**90,88**		
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.186.069.281**	**647.340.481**	**2.319.341.886**	**1.944.911.479**	**3.124.515.011**	8.036.108.857	**73,45**	**98,17**	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.609.628	4.061.000	3.981.000	14.106.100	28.220.000	50.368.100	100	99,52		
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.152.174	4.061.000	3.089.000	-	-	7.150.000	100	99,97		
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.742.298	-	892.000	4.880.400	-	5.772.400	100	100,52		
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.715.156	-	-	9.225.700	28.220.000	37.445.700	100	99,29		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.425.627.129	299.010.595	1.842.946.303	1.200.720.694	1.598.180.036	4.940.857.628	49,17	91,07		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.418.717.437	299.010.595	1.842.946.303	1.196.521.694	1.595.480.036	4.933.958.628	96,67	91,05		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.909.692	-	-	4.199.000	2.700.000	6.899.000	100	99,85		
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	301.805.382	32.000.000	72.000.000	55.076.300	115.348.800	274.425.100	100	90,93		
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	301.805.382	32.000.000	72.000.000	55.076.300	115.348.800	274.425.100	100	90,93		
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	891.673.965	126.305.731	146.557.200	151.473.400	459.945.700	884.282.031	100	99,17		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.434.263	17.996.700	-	33.983.000	5.453.000	57.432.700	100	100		
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.284.374	20.993.000	-	26.042.000	48.179.000	95.214.000	100	99,93		
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.795.000	-	20.900.000	-	24.890.000	45.790.000	100	99,99		
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.445.180	7.760.000	24.820.000	4.322.500	41.400.000	78.302.500	100	99,82		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	527.148.834	70.956.031	80.323.600	75.204.100	300.624.300	527.108.031	100	99,99		
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	87.566.314	8.600.000	20.513.600	11.921.800	39.399.400	80.434.800	100	91,86		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.302.585	81.647.460	178.852.510	95.733.280	554.928.000	911.161.250	77,78	169,27		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.663.295	2.640.000	-	3.579.000	10.428.000	16.647.000	100	99,9		
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.050.000	14.949.200	18.739.800	28.161.900	422.435.800	484.286.700	33,33	461,01		
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.589.290	64.058.260	160.112.710	63.992.380	122.064.200	410.227.550	100	98,47		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.050.592	104.315.695	75.004.873	427.801.705	367.892.475	975.014.748	83,18	99,69		
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	392.450.000	39.904.460	40.677.873	177.925.003	123.102.975	381.610.311	100	97,24		
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425.040.000	43.931.235	27.740.000	180.408.402	181.913.500	433.993.137	72,73	102,11		
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.335.430	10.480.000	-	27.472.700	58.242.000	96.194.700	60	98,83		
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.225.162	10.000.000	6.587.000	41.995.600	4.634.000	63.216.600	100	99,99		
	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**8.406.161.552**	**1.125.631.900**	**2.686.613.500**	**1.537.299.621**	**2.160.404.261**	7.509.949.282	**75**	**89,34**	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	650.178.061	-	16.530.000	108.011.803	46.066.191	170.607.994	100	26,24		
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	59.584.001	-	16.530.000	42.979.883	-	59.509.883	100	99,88		
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	590.594.060	-	-	65.031.920	46.066.191	111.098.111	100	18,81		
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	321.661.642	17.800.000	25.347.900	66.952.700	33.826.600	143.927.200	56,25	44,74		
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	38.753.806	-	10.940.500	27.517.700	-	38.458.200	100	99,24		
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	28.560.579	17.800.000	6.600.000	-	-	24.400.000	85	85,43		
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	45.714.434	-	-	-	6.542.400	6.542.400	65	14,31		
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	53.688.345	-	-	38.555.000	3.720.000	42.275.000	100	78,74		
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	71.395.732	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-	-	-	18.296.200	18.296.200	0	0		
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	14.937.758	-	7.807.400	880.000	5.268.000	13.955.400	100	93,42		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.423	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	43.610.565	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	7.254.799.564	1.088.528.500	2.613.754.900	1.285.159.918	2.070.323.470	7.057.766.788	100	97,28		
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	74.195.082	-	-	42.985.000	10.815.000	53.800.000	100	72,51		
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7.086.677.800	1.088.116.500	2.607.702.300	1.195.211.500	2.031.994.470	6.923.024.770	100	97,69		
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	59.365.762	412.000	-	25.767.218	25.054.000	51.233.218	100	86,3		
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	34.560.920	-	6.052.600	21.196.200	2.460.000	29.708.800	100	85,96		
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	179.522.285	19.303.400	30.980.700	77.175.200	10.188.000	137.647.300	75	76,67		
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	35.918.690	6.482.400	10.141.000	11.247.000	6.136.000	34.006.400	100	94,68		
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	38.655.895	4.002.400	3.278.000	25.738.000	4.052.000	37.070.400	100	95,9		
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	66.789.121	8.818.600	17.561.700	40.190.200	-	66.570.500	100	99,67		
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	38.158.579	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.066.810.682**	**2.072.478.530**	**2.862.622.425**	**2.848.173.034**	**3.518.428.248**	11.301.702.237	**80,95**	**86,49**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.618.032	10.440.000	9.717.827	17.647.400	19.680.357	57.485.584	50	94,83		
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.535.705	6.480.000	7.737.827	5.075.000	16.277.200	35.570.027	100	94,76		
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.082.327	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.960.000	1.980.000	12.572.400	3.403.157	21.915.557	0	0		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.613.879.133	1.694.958.449	2.355.133.056	2.325.136.529	2.649.189.258	9.024.417.292	50	85,02		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.583.707.685	1.690.758.449	2.348.303.056	2.314.406.529	2.641.019.258	8.994.487.292	0	84,98		
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.171.448	4.200.000	6.830.000	10.730.000	8.170.000	29.930.000	100	99,2		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	214.800.000	43.120.000	58.560.000	31.080.000	62.840.000	195.600.000	100	91,06		
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	214.800.000	43.120.000	58.560.000	31.080.000	62.840.000	195.600.000	100	91,06		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.453.258	140.199.068	156.571.166	134.666.444	202.390.979	633.827.657	92,86	98,66		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.995.234	-	5.756.000	6.710.000	11.895.000	24.361.000	100	97,46		
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.491.457	9.133.500	8.517.500	6.426.500	8.237.000	32.314.500	100	99,46		
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.500.000	3.400.000	14.775.000	16.225.000	12.750.000	47.150.000	100	99,26		
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.589.567	5.325.500	15.958.400	10.500.000	23.851.500	55.635.400	100	90,33		
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.200.000	-	22.400.000	11.200.000	600.000	34.200.000	100	100		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.677.000	122.340.068	89.164.266	80.804.944	130.857.479	423.166.757	100	99,64		
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.000.000	-	-	2.800.000	14.200.000	17.000.000	50	100		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.974.324	-	-	3.935.000	68.200.000	72.135.000	100	94,95		
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.974.324	-	-	3.935.000	68.200.000	72.135.000	100	94,95		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.502.435	49.595.258	60.176.827	52.936.612	89.144.746	251.853.443	66,67	94,86		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.988.875	-	1.200.000	720.000	4.200.000	6.120.000	100	61,27		
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.136.400	38.723.498	40.445.187	42.968.612	67.299.246	189.436.543	100	98,59		
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.377.160	10.871.760	18.531.640	9.248.000	17.645.500	56.296.900	0	88,83		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.193.583.500	134.165.755	222.463.549	282.771.049	426.982.908	1.066.383.261	90	89,34		
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.770.000	13.660.000	30.621.549	44.261.549	56.877.544	145.420.642	100	95,82		
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	665.383.500	77.305.755	134.242.000	145.995.500	286.180.364	643.723.619	100	96,74		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.430.000	-	-	23.914.000	26.325.000	50.239.000	100	99,62		
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.200.000	43.200.000	57.600.000	28.800.000	57.600.000	187.200.000	100	100		
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.800.000	-	-	39.800.000	-	39.800.000	50	28,67		
	1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**8.367.542.803**	**1.624.439.000**	**2.206.681.034**	**1.180.136.000**	**2.265.335.000**	7.276.591.034	**54,17**	**86,96**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.186.488.583	1.624.439.000	2.173.173.200	1.156.309.600	2.198.248.600	7.152.170.400	58,33	87,37		
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	1.624.439.000	2.147.506.000	1.115.468.200	2.092.596.800	6.980.010.000	0	0		
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.774.003.889	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	95.893.761	-	8.236.000	23.858.400	46.633.200	78.727.600	200	82,1		
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	84.977.123	-	-	-	30.956.200	30.956.200	0	36,43		
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	231.613.810	-	17.431.200	16.983.000	28.062.400	62.476.600	33,33	26,97		
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	30.048.000	-	17.359.200	2.400.000	3.180.000	22.939.200	0	76,34		
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	17.359.200	2.400.000	3.180.000	22.939.200	0	0		
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30.048.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	151.006.220	-	16.148.634	21.426.400	63.906.400	101.481.434	66,67	67,2		
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	68.418.000	-	12.100.000	3.962.400	49.286.400	65.348.800	100	95,51		
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	59.675.586	-	-	-	14.620.000	14.620.000	0	24,5		
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	22.912.634	-	4.048.634	17.464.000	-	21.512.634	100	93,89		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**27.069.406.891**	**4.894.313.796**	**6.499.271.415**	**5.528.196.314**	**8.035.014.934**	24.956.796.459	**99,86**	**92,2**	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.247.777	-	53.342.510	54.918.600	17.905.200	126.166.310	100	98,38		
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.881.078	-	38.243.000	47.576.200	5.247.200	91.066.400	100	98,05		
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.485.769	-	12.627.269	7.342.400	8.410.000	28.379.669	100	99,63		
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.390.000	-	-	-	4.248.000	4.248.000	100	96,77		
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.490.930	-	2.472.241	-	-	2.472.241	100	99,25		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.155.926.805	1.948.049.070	3.015.834.761	2.919.057.822	3.358.590.110	11.241.531.763	97,56	85,45		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.155.926.805	1.948.049.070	3.015.834.761	2.919.057.822	3.358.590.110	11.241.531.763	97,56	85,45		
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.612.193	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.612.193	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	879.483.852	-	271.496.128	248.657.695	346.340.348	866.494.171	100	98,52		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.705.320	-	6.061.704	5.102.506	535.586	11.699.796	100	99,95		
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.832.720	-	25.139.271	11.539.767	22.113.863	58.792.901	100	99,93		
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.673.000	-	7.695.000	52.360.000	101.855.000	161.910.000	100	93,77		
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.034.445	-	20.600.162	18.330.136	20.103.773	59.034.071	100	100		
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	-	9.300.000	3.100.000	3.600.000	16.000.000	100	100		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561.238.367	-	202.699.991	158.225.286	198.132.126	559.057.403	100	99,61		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.581.000	-	-	187.581.000	-	187.581.000	100	100		
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.581.000	-	-	187.581.000	-	187.581.000	100	100		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.010.911.370	2.946.264.726	3.013.928.766	1.988.403.947	3.884.893.645	11.833.491.084	100	98,52		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.995.550	-	3.500.000	490.000	-	3.990.000	100	99,86		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.065.500	19.464.726	17.585.046	29.072.827	25.540.605	91.663.204	100	87,24		
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.901.850.320	2.926.800.000	2.992.843.720	1.958.841.120	3.859.353.040	11.737.837.880	100	98,62		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.643.894	-	144.669.250	129.577.250	427.285.631	701.532.131	100	99,56		
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.645.804	-	125.629.250	75.877.250	298.520.631	500.027.131	100	99,68		
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.998.090	-	19.040.000	53.700.000	128.765.000	201.505.000	100	99,26		
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.097.794.177**	**-**	**1.377.166.624**	**1.023.552.281**	**493.101.568**	2.893.820.473	**85,63**	**93,42**	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.566.188.994	-	1.251.440.118	843.534.351	352.489.018	2.447.463.487	88,44	95,37		
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	188.662.724	-	-	188.379.000	-	188.379.000	100	99,85		
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	149.999.318	-	-	70.000.000	79.999.318	149.999.318	100	100		
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.628.311	-	-	-	10.296.000	10.296.000	100	70,38		
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	11.980.818	-	9.120.368	-	-	9.120.368	100	76,12		
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	1.315.727.600	-	986.074.000	306.214.000	23.129.800	1.315.417.800	100	99,98		
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	1.017.737	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	51.300.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000	0,43	4,68		
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	496.441.386	-	219.507.750	224.097.750	52.005.000	495.610.500	84	99,83		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan										
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30.250.000	-	-	30.000.000	-	30.000.000	100	99,17		
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2.000.000	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100	75		
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	304.181.100	-	36.738.000	24.843.601	183.158.900	244.740.501	100	80,46		
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	487.627.182	-	122.716.506	180.017.930	110.752.550	413.486.986	75	84,8		
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	85.616.542	-	50.217.505	-	26.138.550	76.356.055	100	89,18		
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.070.383	-	-	-	-	-	0	0		
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	247.536.928	-	50.038.998	180.017.930	9.340.000	239.396.928	100	96,71		
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	135.403.329	-	22.460.003	-	75.274.000	97.734.003	100	72,18		
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	43.978.001	-	3.010.000	-	29.860.000	32.870.000	100	74,74		
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	43.978.001	-	3.010.000	-	29.860.000	32.870.000	100	74,74		
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**45.241.078.797**	**2.828.577.846**	**3.931.435.506**	**4.888.309.496**	**31.811.936.014**	43.460.258.862	**67,62**	**96,06**		
	1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.129.580.548**	**1.867.511.780**	**2.754.487.013**	**3.285.944.567**	**3.501.837.706**	11.409.781.066	**38,01**	**94,07**	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.121.000	17.540.248	16.477.600	20.507.723	60.881.000	115.406.571	10	95,28		
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.015.000	16.118.248	16.477.600	3.600.000	31.512.400	67.708.248	0	96,71		
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.106.000	1.422.000	-	16.907.723	29.368.600	47.698.323	20	93,33		
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.189.448.103	1.329.641.599	2.050.452.111	2.004.710.013	2.327.571.360	7.712.375.083	11,41	94,17		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.189.448.103	1.329.641.599	2.050.452.111	2.004.710.013	2.327.571.360	7.712.375.083	11,41	94,17		
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	270.400.000	62.400.000	78.400.000	38.400.000	76.800.000	256.000.000	25	94,67		
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	270.400.000	62.400.000	78.400.000	38.400.000	76.800.000	256.000.000	25	94,67		
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.325.278.849	207.302.490	236.139.049	239.395.538	566.067.615	1.248.904.692	47,62	94,24		
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.893.677	-	3.920.000	11.400.000	16.535.000	31.855.000	100	99,88		
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.621.296	44.975.500	41.232.000	50.453.500	73.714.500	210.375.500	25	90,83		
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.322.006	9.350.000	20.775.000	43.230.000	43.935.000	117.290.000	25	89,31		
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.952.870	15.883.000	4.460.000	37.719.000	32.653.000	90.715.000	25	81,76		
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.940.000	10.500.000	-	12.000.000	12.900.000	35.400.000	30	66,87		
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	688.749.000	114.593.990	148.952.049	76.593.038	345.330.115	685.469.192	28,33	99,52		
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	77.800.000	12.000.000	16.800.000	8.000.000	41.000.000	77.800.000	100	100		
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355.461.586	-	-	286.740.000	37.583.490	324.323.490	60	91,24		
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	355.461.586	-	-	286.740.000	37.583.490	324.323.490	60	91,24		
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.813.525	125.526.534	153.451.453	115.103.580	155.736.514	549.818.081	25	90,46		
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	206.813.525	47.360.000	63.200.000	34.800.000	54.200.000	199.560.000	25	96,49		
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.000.000	39.766.534	37.451.453	43.067.120	46.716.374	167.001.481	25	77,32		
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.000.000	38.400.000	52.800.000	37.236.460	54.820.140	183.256.600	25	99,06		
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.260.057.485	125.100.909	219.566.800	581.087.713	277.197.727	1.202.953.149	53,13	95,47		
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435.934.500	27.950.909	93.821.800	191.964.728	114.526.027	428.263.464	40,82	98,24		
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	356.800.000	81.600.000	110.400.000	54.400.000	108.800.000	355.200.000	100	99,55		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	467.322.985	15.550.000	15.345.000	334.722.985	53.871.700	419.489.685	18,57	89,76		
	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**3.272.851.003**	**386.895.311**	**416.335.853**	**461.797.500**	**1.690.250.965**	2.955.279.629	**83,06**	**90,3**	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.375.053.840	-	474.750	47.660.000	1.314.901.700	1.363.036.450	49,17	99,13		
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	1.360.789.090	-	-	43.900.000	1.307.181.700	1.351.081.700	73,33	99,29		
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	14.264.750	-	474.750	3.760.000	7.720.000	11.954.750	25	83,81		
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.897.797.163	386.895.311	415.861.103	414.137.500	375.349.265	1.592.243.179	100	83,9		
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	216.116.467	58.980.000	61.600.000	30.800.000	19.600.000	170.980.000	100	79,11		
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.049.059.312	268.800.000	297.400.000	179.200.000	219.379.593	964.779.593	100	91,97		
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	497.169.243	44.102.624	42.361.103	187.817.500	108.860.400	383.141.627	100	77,06		
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	135.452.141	15.012.687	14.500.000	16.320.000	27.509.272	73.341.959	100	54,15		
	1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**3.225.000**	**-**	**1.725.000**	**-**	**-**	1.725.000	**120**	**53,49**	Dinas Sosial	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.225.000	-	1.725.000	-	-	1.725.000	120	53,49		
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.225.000	-	1.725.000	-	-	1.725.000	120	53,49		
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.637.491.292**	**58.780.755**	**63.074.060**	**292.244.525**	**866.274.580**	1.280.373.920	**97,87**	**78,19**	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	1.046.539.202	12.112.400	29.064.060	184.864.525	562.899.010	788.939.995	123,61	75,39		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	24.142.000	-	700.000	6.000.000	9.482.000	16.182.000	62,5	67,03		
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	140.489.125	-	3.034.050	2.900.000	34.465.367	40.399.417	63,91	28,76		
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	142.623.412	-	-	37.175.000	71.932.400	109.107.400	100	76,5		
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	56.510.100	940.000	4.951.200	7.120.000	43.106.900	56.118.100	60	99,31		
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	439.119.794	2.700.000	17.536.060	84.258.525	284.944.013	389.438.598	42,86	88,69		
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	7.785.500	-	-	-	3.360.000	3.360.000	53,33	43,16		
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	100	100		
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	83.543.500	-	-	-	42.736.730	42.736.730	100	51,16		
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.434.021	-	-	-	1.016.000	1.016.000	98,6	70,85		
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	26.592.750	-	2.842.750	4.220.000	9.690.000	16.752.750	645	63		
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8.560.000	810.000	-	-	4.280.000	5.090.000	57,14	59,46		
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	114.739.000	7.662.400	-	43.191.000	56.885.600	107.739.000	100	93,9		
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	590.952.090	46.668.355	34.010.000	107.380.000	303.375.570	491.433.925	63,54	83,16		
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	45.948.355	33.268.355	-	-	10.670.000	43.938.355	100	95,63		
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	9.800.000	-	-	-	9.800.000	9.800.000	100	100		
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	84.893.440	-	-	-	62.309.120	62.309.120	100	73,4		
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	44.360.000	-	1.750.000	3.500.000	32.750.000	38.000.000	39,47	85,66		
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	6.090.000	-	-	-	1.290.000	1.290.000	50	21,18		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	33.000.000	-	1.500.000	-	31.500.000	33.000.000	95,45	100		
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.633.845	1.050.000	-	-	-	1.050.000	0	8,31		
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	353.226.450	12.350.000	30.760.000	103.880.000	155.056.450	302.046.450	86,96	85,51		
	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**27.019.583.654**	**337.210.000**	**485.166.000**	**361.310.592**	**25.494.650.181**	26.678.336.773	**83,63**	**98,74**	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	642.590.860	-	-	38.115.000	579.505.000	617.620.000	100	96,11		
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	642.590.860	-	-	38.115.000	579.505.000	617.620.000	100	96,11		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	26.376.992.794	337.210.000	485.166.000	323.195.592	24.915.145.181	26.060.716.773	79,53	98,8		
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	145.993.756	-	-	3.010.000	100.209.400	103.219.400	20	70,7		
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	146.082.928	29.400.000	39.700.000	19.600.000	39.200.000	127.900.000	100	87,55		
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	23.893.325.192	186.300.000	313.421.000	160.986.800	23.059.951.600	23.720.659.400	100	99,28		
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.191.590.918	121.510.000	132.045.000	139.598.792	1.715.784.181	2.108.937.973	98,13	96,23		
	1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**649.302.581**	**108.580.000**	**119.425.000**	**294.135.000**	**87.673.500**	609.813.500	**20**	**93,92**	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	498.502.581	74.680.000	73.925.000	271.535.000	42.473.500	462.613.500	0	92,8		
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	387.472.000	38.440.000	54.075.000	245.280.000	42.473.500	380.268.500	0	98,14		
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	104.491.581	36.240.000	19.850.000	26.255.000	-	82.345.000	0	78,81		
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.789.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	2.750.000	-	-	-	-	-	0	0		
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	150.800.000	33.900.000	45.500.000	22.600.000	45.200.000	147.200.000	100	97,61		
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	150.800.000	33.900.000	45.500.000	22.600.000	45.200.000	147.200.000	100	97,61		
	1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**529.044.719**	**69.600.000**	**91.222.580**	**192.877.312**	**171.249.082**	524.948.974	**23,21**	**99,23**	Dinas Sosial	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	529.044.719	69.600.000	91.222.580	192.877.312	171.249.082	524.948.974	23,21	99,23		
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	324.166.719	33.600.000	50.722.580	149.207.312	86.759.082	320.288.974	25	98,8		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	204.878.000	36.000.000	40.500.000	43.670.000	84.490.000	204.660.000	21,43	99,89		
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**22.977.371.557**	**2.001.126.261**	**3.240.561.757**	**6.306.456.140**	**5.842.032.106**	17.390.176.264	**111,89**	**75,68**		
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.386.677.670**	**1.832.133.401**	**3.119.599.687**	**2.503.067.934**	**2.953.296.851**	10.408.097.873	**106,3**	**67,64**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.155.445	21.147.010	36.900.435	6.865.700	31.892.000	96.805.145	100	98,62		
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.648.435	8.730.000	29.500.435	6.865.700	26.342.000	71.438.135	100	98,33		
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.507.010	12.417.010	7.400.000	-	5.550.000	25.367.010	100	99,45		
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.484.569.376	1.187.174.028	1.843.994.150	1.779.614.553	2.031.732.848	6.842.515.579	59,09	59,58		
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.484.569.376	1.187.174.028	1.843.994.150	1.779.614.553	2.031.732.848	6.842.515.579	59,09	59,58		
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	728.000.000	168.000.000	224.000.000	105.600.000	204.800.000	702.400.000	100	96,48		
	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	728.000.000	168.000.000	224.000.000	105.600.000	204.800.000	702.400.000	100	96,48		
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.092.054.837	191.099.286	280.967.677	330.087.219	280.095.241	1.082.249.423	95,29	99,1		
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.363.946	3.165.900	7.090.330	4.021.480	11.086.236	25.363.946	100	100		
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.880.345	13.949.533	24.597.720	27.724.226	24.608.866	90.880.345	100	100		
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.940.000	3.500.000	-	10.500.000	9.500.000	23.500.000	100	94,23		
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.328.846	16.229.753	22.538.078	15.042.313	7.741.639	61.551.783	100	94,22		
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.950.000	-	450.000	2.400.000	4.200.000	7.050.000	100	64,38		
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.991.700	78.654.100	125.491.549	219.999.200	122.158.500	546.303.349	67	99,87		
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	327.600.000	75.600.000	100.800.000	50.400.000	100.800.000	327.600.000	100	100		
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.783.000	-	84.051.000	-	-	84.051.000	175	50,7		
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	84.051.000	-	84.051.000	-	-	84.051.000	350	100		
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.732.000	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.560.965	96.604.714	122.357.076	80.190.313	125.135.384	424.287.487	100	94,59		
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	246.349.825	56.760.000	77.120.000	37.664.000	74.800.000	246.344.000	100	100		
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.411.140	35.044.714	33.033.156	37.692.273	40.751.544	146.521.687	100	85,98		
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.800.000	4.800.000	12.203.920	4.834.040	9.583.840	31.421.800	100	98,81		
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.369.554.047	168.108.363	527.329.349	200.710.149	279.641.378	1.175.789.239	112,5	85,85		
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.892.000	9.511.898	38.540.976	88.103.512	37.490.752	173.647.138	100	88,64		
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.300.000	10.500.000	-	13.205.000	17.270.000	40.975.000	100	99,21		
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	666.560.915	148.096.465	205.557.243	99.401.637	203.881.076	656.936.421	100	98,56		
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	465.801.132	-	283.231.130	-	20.999.550	304.230.680	150	65,31		
	2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**83.152.534**	**-**	**-**	**22.739.180**	**-**	22.739.180	**50**	**27,35**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	83.152.534	-	-	22.739.180	-	22.739.180	50	27,35		
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	67.202.954	-	-	7.462.400	-	7.462.400	0	11,1		
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	15.949.580	-	-	15.276.780	-	15.276.780	100	95,78		
	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**839.125.487**	**51.101.900**	**10.980.000**	**37.020.600**	**643.752.200**	742.854.700	**218,75**	**88,53**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	766.693.816	27.916.300	-	24.775.800	634.400.400	687.092.500	162,5	89,62		
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	728.720.125	27.916.300	-	-	621.395.400	649.311.700	75	89,1		
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	37.973.691	-	-	24.775.800	13.005.000	37.780.800	250	99,49		
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	31.830.279	15.592.400	9.100.000	-	5.241.200	29.933.600	550	94,04		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	31.830.279	15.592.400	9.100.000	-	5.241.200	29.933.600	550	94,04		
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	40.601.392	7.593.200	1.880.000	12.244.800	4.110.600	25.828.600	0	63,62		
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	40.601.392	7.593.200	1.880.000	12.244.800	4.110.600	25.828.600	0	63,62		
	2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**168.718.924**	**43.583.269**	**1.980.000**	**-**	**121.599.055**	167.162.324	**72,72**	**99,08**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	168.718.924	43.583.269	1.980.000	-	121.599.055	167.162.324	72,72	99,08		
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	32.558.450	22.062.069	1.980.000	-	7.975.381	32.017.450	45,45	98,34		
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	136.160.474	21.521.200	-	-	113.623.674	135.144.874	100	99,25		
	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**6.499.696.942**	**74.307.691**	**108.002.070**	**3.743.628.426**	**2.123.384.000**	6.049.322.187	**95,64**	**93,07**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	276.343.734	30.600.000	40.800.000	104.897.477	96.258.138	272.555.615	78,33	98,63		
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	70.391.556	15.600.000	20.800.000	13.067.750	20.800.000	70.267.750	95	99,82		
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	67.233.704	15.000.000	20.000.000	11.312.010	20.800.000	67.112.010	40	99,82		
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	138.718.474	-	-	80.517.717	54.658.138	135.175.855	100	97,45		
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	6.223.353.208	43.707.691	67.202.070	3.638.730.949	2.027.125.862	5.776.766.572	108,62	92,82		
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.529.871	8.095.840	7.070.261	15.598.170	600.000	31.364.271	150	99,47		
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.326.707	19.794.382	15.187.460	15.385.101	14.409.694	64.776.637	92	99,16		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	104.213.277	-	37.544.349	60.217.528	600.000	98.361.877	100	94,39		
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6.022.283.353	15.817.469	7.400.000	3.547.530.150	2.011.516.168	5.582.263.787	92,5	92,69		
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**12.326.562.993**	**1.570.458.847**	**2.548.424.102**	**2.785.697.743**	**4.009.193.435**	10.913.774.127	**82,21**	**88,54**		
	2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.793.965.022**	**1.519.310.619**	**2.237.353.067**	**2.207.106.687**	**2.825.894.073**	8.789.664.446	**88,89**	**89,75**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.262.346	4.500.000	21.277.000	69.713.600	104.687.880	200.178.480	100	85,09		
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.557.320	4.500.000	1.981.200	37.378.000	78.436.980	122.296.180	100	90,89		
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.914.942	-	2.841.500	17.496.400	18.799.900	39.137.800	100	72,59		
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.790.084	-	16.454.300	14.839.200	7.451.000	38.744.500	100	82,8		
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.770.178.496	1.100.517.391	1.649.134.480	1.612.858.762	1.819.970.329	6.182.480.962	100	91,32		
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.770.178.496	1.100.517.391	1.649.134.480	1.612.858.762	1.819.970.329	6.182.480.962	100	91,32		
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	499.200.000	115.200.000	115.200.000	115.200.000	153.600.000	499.200.000	100	100		
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	499.200.000	115.200.000	115.200.000	115.200.000	153.600.000	499.200.000	100	100		
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.042.786.480	102.060.700	166.902.904	233.613.850	391.870.800	894.448.254	85,71	85,77		
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.706.744	5.751.000	12.617.000	9.803.000	5.535.000	33.706.000	100	100		
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.701.407	17.743.500	35.800.200	44.567.400	91.349.300	189.460.400	100	99,87		
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.200.000	14.320.000	21.220.000	17.700.000	25.780.000	79.020.000	100	84,79		
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.998.695	5.650.000	13.010.000	29.651.400	22.930.000	71.241.400	100	92,52		
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.899.000	-	10.080.000	1.720.000	32.779.000	44.579.000	100	93,07		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.280.634	58.596.200	74.175.704	130.172.050	213.497.500	476.441.454	100	79,24		
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.107.100	54.937.850	67.319.409	57.666.445	70.243.844	250.167.548	100	71,05		
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.689.400	13.800.000	22.000.000	15.116.000	23.764.000	74.680.000	100	99,99		
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.024.500	31.537.850	30.795.729	33.736.645	32.231.564	128.301.788	100	55,78		
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.393.200	9.600.000	14.523.680	8.813.800	14.248.280	47.185.760	100	99,56		
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.430.600	142.094.678	217.519.274	118.054.030	285.521.220	763.189.202	100	85,33		
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.000.600	21.044.678	54.801.274	39.269.030	88.761.220	203.876.202	100	75,79		
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	625.430.000	121.050.000	162.718.000	78.785.000	196.760.000	559.313.000	100	89,43		
	2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**1.285.596.928**	**33.600.000**	**33.600.000**	**253.576.921**	**771.885.498**	1.092.662.419	**66,67**	**84,99**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1.151.769.075	33.600.000	33.600.000	253.576.921	771.885.498	1.092.662.419	100	94,87		
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1.118.677.388	33.600.000	33.600.000	220.537.421	771.885.498	1.059.622.919	100	94,72		
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	33.091.687	-	-	33.039.500	-	33.039.500	100	99,84		
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.827.853	-	-	-	-	-	0	0		
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.827.853	-	-	-	-	-	0	0		
	2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**374.451.767**	**3.148.228**	**229.901.537**	**81.531.605**	**54.504.835**	369.086.205	**100**	**98,57**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.410.000	-	-	-	1.410.000	1.410.000	100	100		
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.410.000	-	-	-	1.410.000	1.410.000	100	100		
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	373.041.767	3.148.228	229.901.537	81.531.605	53.094.835	367.676.205	100	98,56		
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	327.041.767	3.148.228	229.901.537	51.381.605	37.409.835	321.841.205	100	98,41		
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.000.000	-	-	30.150.000	15.685.000	45.835.000	100	99,64		
	2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**31.676.695**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.676.695	-	-	-	-	-	0	0		
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.676.695	-	-	-	-	-	0	0		
	2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**53.091.018**	**-**	**-**	**51.586.330**	**-**	51.586.330	**100**	**97,17**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.091.018	-	-	51.586.330	-	51.586.330	100	97,17		
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	53.091.018	-	-	51.586.330	-	51.586.330	100	97,17		
	2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**87.833.919**	**-**	**33.046.600**	**14.266.800**	**28.440.000**	75.753.400	**100**	**86,25**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	38.983.519	-	33.046.600	-	4.800.000	37.846.600	100	97,08		
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	38.983.519	-	33.046.600	-	4.800.000	37.846.600	100	97,08		
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	48.850.400	-	-	14.266.800	23.640.000	37.906.800	100	77,6		
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.850.400	-	-	14.266.800	23.640.000	37.906.800	100	77,6		
	2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**699.947.644**	**14.400.000**	**14.522.898**	**177.629.400**	**328.469.029**	535.021.327	**62,55**	**76,44**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	148.727.629	-	-	3.000.000	145.591.429	148.591.429	12,77	99,91		
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	148.727.629	-	-	3.000.000	145.591.429	148.591.429	12,77	99,91		
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	430.453.815	14.400.000	14.522.898	174.629.400	115.921.200	319.473.498	100	74,22		
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	246.313.815	14.400.000	14.522.898	65.524.400	48.182.000	142.629.298	100	57,91		
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	184.140.000	-	-	109.105.000	67.739.200	176.844.200	100	96,04		
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.766.200	-	-	-	66.956.400	66.956.400	50	55,44		
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	51.746.200	-	-	-	-	-	0	0		
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	69.020.000	-	-	-	66.956.400	66.956.400	100	97,01		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**11.242.852.062**	**1.121.175.142**	**2.628.999.988**	**2.132.174.516**	**3.297.391.697**	9.179.741.343	**87,28**	**81,65**		
	2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.397.301.989**	**1.101.735.142**	**1.793.540.543**	**1.868.983.469**	**1.931.387.524**	6.695.646.678	**100,46**	**79,74**	Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.711.620	7.100.000	9.050.000	32.174.800	9.121.200	57.446.000	100	99,54		
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.711.620	7.100.000	9.050.000	32.174.800	9.121.200	57.446.000	100	99,54		
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.467.419.996	815.122.493	1.352.502.499	1.214.106.501	1.394.594.008	4.776.325.501	100	73,85		
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.467.419.996	815.122.493	1.352.502.499	1.214.106.501	1.394.594.008	4.776.325.501	100	73,85		
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	167.596.000	38.400.000	51.200.000	25.600.000	52.029.440	167.229.440	100	99,78		
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	167.596.000	38.400.000	51.200.000	25.600.000	52.029.440	167.229.440	100	99,78		
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	860.778.171	113.899.459	93.652.438	430.042.735	218.299.950	855.894.582	72,68	99,43		
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.510.292	7.520.046	2.478.000	49.597.080	9.908.350	69.503.476	100	99,99		
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.214.646	14.468.549	15.079.900	107.140.059	33.185.300	169.873.808	100	99,8		
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.880.000	19.320.000	22.080.000	54.880.000	13.500.000	109.780.000	100	99,91		
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	155.646.327	16.623.564	11.991.000	104.636.038	22.030.000	155.280.602	100	99,77		
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	9,38	83,33		
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.526.906	55.967.300	42.023.538	113.789.558	119.676.300	331.456.696	99,39	99,98		
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.119.200	56.753.319	124.162.573	59.806.804	79.498.011	320.220.707	233,33	111,92		
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	119.522.500	27.600.000	33.600.000	21.792.000	36.304.320	119.296.320	500	99,81		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.647.200	24.353.319	26.562.573	34.814.804	36.690.011	122.420.707	100	84,05		
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.949.500	4.800.000	64.000.000	3.200.000	6.503.680	78.503.680	100	374,73		
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.677.002	70.459.871	162.973.033	107.252.629	177.844.915	518.530.448	100	92,98		
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.767.800	-	66.572.183	2.318.469	72.550.721	141.441.373	100	82,34		
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.365.000	-	-	33.482.536	-	33.482.536	100	82,95		
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	272.343.500	62.400.000	83.200.000	41.600.000	84.547.640	271.747.640	100	99,78		
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.200.702	8.059.871	13.200.850	29.851.624	20.746.554	71.858.899	100	98,17		
	2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**0**	**0**	Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**2.246.234.093**	**2.460.000**	**785.369.445**	**168.859.847**	**1.170.312.673**	2.127.001.965	**80**	**94,69**	Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	466.501.567	2.460.000	84.455.000	37.145.947	324.451.180	448.512.127	100	96,14		
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	75.993.107	-	21.251.300	14.247.547	37.953.400	73.452.247	100	96,66		
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	125.867.500	2.460.000	38.014.000	-	83.086.500	123.560.500	100	98,17		
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	35.035.600	-	9.729.700	12.723.600	11.263.800	33.717.100	100	96,24		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	152.718.360	-	-	-	151.355.680	151.355.680	100	99,11		
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	56.996.000	-	15.460.000	8.193.600	24.030.000	47.683.600	100	83,66		
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	19.891.000	-	-	1.981.200	16.761.800	18.743.000	100	94,23		
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	41.668.960	-	-	10.863.600	25.060.500	35.924.100	0	86,21		
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	41.668.960	-	-	10.863.600	25.060.500	35.924.100	0	86,21		
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.738.063.566	-	700.914.445	120.850.300	820.800.993	1.642.565.738	66,67	94,51		
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	30.539.650	-	-	-	19.871.850	19.871.850	100	65,07		
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.707.523.916	-	700.914.445	120.850.300	800.929.143	1.622.693.888	100	95,03		
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**271.236.100**	**7.200.000**	**15.050.000**	**29.360.800**	**86.526.100**	138.136.900	**58,33**	**50,93**	Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	23.389.100	-	-	-	22.460.300	22.460.300	100	96,03		
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	23.389.100	-	-	-	22.460.300	22.460.300	100	96,03		
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	247.847.000	7.200.000	15.050.000	29.360.800	64.065.800	115.676.600	44,44	46,67		
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	75.995.000	-	7.200.000	23.588.400	35.896.600	66.685.000	100	87,75		
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	129.496.000	7.200.000	-	-	-	7.200.000	0	5,56		
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	42.356.000	-	7.850.000	5.772.400	28.169.200	41.791.600	33,33	98,67		
	2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**144.290.880**	**1.300.000**	**16.300.000**	**47.410.400**	**70.770.400**	135.780.800	**100**	**94,1**	Dinas Ketahanan Pangan	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	144.290.880	1.300.000	16.300.000	47.410.400	70.770.400	135.780.800	100	94,1		
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar	144.290.880	1.300.000	16.300.000	47.410.400	70.770.400	135.780.800	100	94,1		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**183.789.000**	**8.480.000**	**18.740.000**	**17.560.000**	**38.395.000**	83.175.000	**100**	**45,26**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	183.789.000	8.480.000	18.740.000	17.560.000	38.395.000	83.175.000	100	45,26		
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	183.789.000	8.480.000	18.740.000	17.560.000	38.395.000	83.175.000	100	45,26		
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**311.225.547**	**-**	**60.492.400**	**35.963.600**	**110.705.400**	207.161.400	**3000**	**66,56**		
	2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**213.828.389**	**-**	**60.492.400**	**15.711.200**	**46.179.200**	122.382.800	**150**	**57,23**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	213.828.389	-	60.492.400	15.711.200	46.179.200	122.382.800	150	57,23		
	2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	113.853.598	-	32.382.400	8.681.200	27.588.000	68.651.600	150	60,3		
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.974.791	-	28.110.000	7.030.000	18.591.200	53.731.200	150	53,74		
	2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**97.397.158**	**-**	**-**	**20.252.400**	**64.526.200**	84.778.600	**8700**	**87,04**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.397.158	-	-	20.252.400	64.526.200	84.778.600	8700	87,04		
	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97.397.158	-	-	20.252.400	64.526.200	84.778.600	8700	87,04		
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**47.291.224.582**	**8.066.268.647**	**11.381.617.403**	**8.513.318.335**	**16.550.109.037**	44.511.313.422	**87,37**	**94,12**		
	2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.570.644.966**	**2.259.535.537**	**3.720.142.879**	**4.267.129.499**	**7.236.644.176**	17.483.452.091	**80,73**	**94,15**	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291.669.687	44.009.489	34.664.900	26.560.700	172.310.892	277.545.981	100	95,16		
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.087.245	9.599.297	24.920.000	20.510.000	91.866.438	146.895.735	100	92,34		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.142.795	22.390.192	-	-	30.469.148	52.859.340	100	97,63		
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.439.647	12.020.000	9.744.900	6.050.700	49.975.306	77.790.906	100	99,17		
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.554.088.549	1.480.168.782	2.233.941.202	2.176.225.902	2.511.895.926	8.402.231.812	0,42	87,94		
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.554.088.549	1.480.168.782	2.233.941.202	2.176.225.902	2.511.895.926	8.402.231.812	0,42	87,94		
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	563.200.000	129.600.000	174.400.000	86.400.000	172.800.000	563.200.000	100	100		
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	563.200.000	129.600.000	174.400.000	86.400.000	172.800.000	563.200.000	100	100		
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.326.040	-	1.256.040	-	8.060.000	9.316.040	100	90,22		
	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	10.326.040	-	1.256.040	-	8.060.000	9.316.040	100	90,22		
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.201.229.574	140.538.813	166.113.240	159.047.680	746.041.549	1.211.741.282	100	100,88		
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.311.753	7.481.942	6.385.269	62.446.690	13.188.354	89.502.255	100	268,68		
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.768.849	14.837.112	12.696.116	11.569.009	31.213.806	70.316.043	100	97,98		
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.170.000	23.370.000	4.840.000	9.630.000	108.614.378	146.454.378	100	88,67		
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.993.677	11.535.837	19.911.289	18.812.501	53.415.853	103.675.480	100	98,74		
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	-	-	-	75.000.000	75.000.000	100	100		
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	693.138.963	83.313.922	122.280.566	56.589.480	406.762.826	668.946.794	100	96,51		
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.846.332	-	-	-	57.846.332	57.846.332	100	100		
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.352.000	-	-	-	-	-	0	0		
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.352.000	-	-	-	-	-	0	0		
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.050.042	131.211.046	125.848.085	123.987.232	550.919.936	931.966.299	100	151,04		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	260.714.000	58.800.000	76.800.000	39.200.000	258.312.000	433.112.000	100	166,13		
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.736.042	62.811.046	36.248.085	78.387.232	251.007.936	428.454.299	100	136,13		
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.600.000	9.600.000	12.800.000	6.400.000	41.600.000	70.400.000	100	169,23		
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.309.729.074	334.007.407	983.919.412	1.694.907.985	3.074.615.873	6.087.450.677	71,3	96,48		
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.730.000	54.002.175	13.719.000	23.526.499	117.201.573	208.449.247	27,27	91,53		
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.715.712.112	228.740.232	901.560.462	1.639.381.486	2.753.055.800	5.522.737.980	57,78	96,62		
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.158.962	3.265.000	2.694.950	-	23.180.500	29.140.450	71,43	99,94		
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.368.000	48.000.000	64.000.000	32.000.000	173.368.000	317.368.000	100	100		
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.760.000	-	1.945.000	-	7.810.000	9.755.000	100	49,37		
	2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**347.885.180**	**-**	**13.280.200**	**-**	**334.256.695**	347.536.895	**100**	**99,9**	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	347.885.180	-	13.280.200	-	334.256.695	347.536.895	100	99,9		
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	347.885.180	-	13.280.200	-	334.256.695	347.536.895	100	99,9		
	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.166.472.761**	**35.400.000**	**70.437.000**	**282.000.690**	**345.053.060**	732.890.750	**100**	**62,83**	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	966.649.118	35.400.000	70.437.000	184.464.990	330.083.060	620.385.050	100	64,18		
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	185.573.108	-	-	-	66.560.000	66.560.000	100	35,87		
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	151.637.844	4.800.000	6.400.000	3.600.400	13.410.084	28.210.484	100	18,6		
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	83.814.972	5.400.000	14.461.000	3.600.000	55.041.478	78.502.478	100	93,66		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	142.432.820	-	-	83.761.500	58.645.370	142.406.870	100	99,98		
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	403.190.374	25.200.000	49.576.000	93.503.090	136.426.128	304.705.218	100	75,57		
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	199.823.643	-	-	97.535.700	14.970.000	112.505.700	100	56,3		
	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	199.823.643	-	-	97.535.700	14.970.000	112.505.700	100	56,3		
	2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**5.939.661.792**	**1.259.523.030**	**1.607.273.833**	**840.948.840**	**1.796.511.712**	5.504.257.415	**100**	**92,67**	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.939.661.792	1.259.523.030	1.607.273.833	840.948.840	1.796.511.712	5.504.257.415	100	92,67		
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.939.661.792	1.259.523.030	1.607.273.833	840.948.840	1.796.511.712	5.504.257.415	100	92,67		
	2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**257.274.118**	**58.125.300**	**43.952.471**	**18.914.000**	**135.379.140**	256.370.911	**66,67**	**99,65**	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	257.274.118	58.125.300	43.952.471	18.914.000	135.379.140	256.370.911	66,67	99,65		
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	142.571.736	37.345.300	26.350.000	7.860.000	70.348.140	141.903.440	100	99,53		
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	114.702.382	20.780.000	17.602.471	11.054.000	65.031.000	114.467.471	100	99,8		
	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**69.561.090**	**-**	**-**	**4.544.660**	**64.970.172**	69.514.832	**100**	**99,93**	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.561.090	-	-	4.544.660	64.970.172	69.514.832	100	99,93		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	69.561.090	-	-	4.544.660	64.970.172	69.514.832	100	99,93		
	2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**324.991.013**	**44.184.780**	**22.835.020**	**10.620.000**	**175.577.220**	253.217.020	**100**	**77,92**	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	324.991.013	44.184.780	22.835.020	10.620.000	175.577.220	253.217.020	100	77,92		
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	220.138.586	31.465.000	12.090.000	10.620.000	95.302.100	149.477.100	100	67,9		
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	94.626.428	12.719.780	6.001.021	-	74.955.120	93.675.921	100	99		
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10.225.999	-	4.743.999	-	5.320.000	10.063.999	100	98,42		
	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**20.614.733.662**	**4.409.500.000**	**5.903.696.000**	**3.089.160.646**	**6.461.716.862**	19.864.073.508	**100**	**96,36**	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	20.614.733.662	4.409.500.000	5.903.696.000	3.089.160.646	6.461.716.862	19.864.073.508	100	96,36		
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	222.693.392	-	8.520.000	-	201.006.750	209.526.750	100	94,09		
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	20.266.327	-	-	-	17.424.000	17.424.000	100	85,98		
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	682.636.746	7.520.000	3.800.000	184.215.646	47.874.512	243.410.158	100	35,66		
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	84.872.033	7.230.000	7.786.000	-	44.485.000	59.501.000	100	70,11		
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	19.604.265.164	4.394.750.000	5.883.590.000	2.904.945.000	6.150.926.600	19.334.211.600	100	98,62		
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**20.986.422.899**	**3.009.916.098**	**5.609.024.740**	**4.185.425.247**	**6.388.828.334**	19.193.194.419	**96,21**	**91,46**		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.917.962.902**	**1.935.916.098**	**4.167.214.940**	**3.424.280.247**	**4.804.674.854**	14.332.086.139	**95,61**	**90,04**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.203.030	-	-	68.321.500	26.068.400	94.389.900	100	99,15		
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.803.030	-	-	54.921.500	26.068.400	80.989.900	100	99,01		
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.400.000	-	-	13.400.000	-	13.400.000	100	100		
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.519.707.224	1.485.164.207	2.228.230.320	2.104.607.757	2.401.140.037	8.219.142.321	100	86,34		
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.519.707.224	1.485.164.207	2.228.230.320	2.104.607.757	2.401.140.037	8.219.142.321	100	86,34		
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.035.200.000	236.800.000	310.400.000	156.800.000	307.200.000	1.011.200.000	100	97,68		
	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.035.200.000	236.800.000	310.400.000	156.800.000	307.200.000	1.011.200.000	100	97,68		
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.707.430.013	-	673.398.243	568.529.571	1.414.097.662	2.656.025.476	100	98,1		
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.852.841	-	-	-	4.852.841	4.852.841	100	100		
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.936.003.440	-	350.215.120	303.377.039	1.236.436.281	1.890.028.440	100	97,63		
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.100.000	-	36.220.000	27.720.000	17.160.000	81.100.000	100	101,25		
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.431.732	-	18.430.000	-	55.202.240	73.632.240	100	93,88		
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	-	10.800.000	-	-	10.800.000	100	100		
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	597.242.000	-	257.733.123	237.432.532	100.446.300	595.611.955	100	99,73		
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	654.871.735	-	362.666.550	113.904.500	141.153.150	617.724.200	100	94,33		
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	32.190.000	-	-	32.190.000	-	32.190.000	0	100		
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	622.681.735	-	362.666.550	81.714.500	141.153.150	585.534.200	100	94,03		
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681.885.900	45.951.891	285.781.723	122.727.919	169.533.358	623.994.891	72,22	91,51		
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.985.900	-	-	-	4.980.000	4.980.000	100	99,88		
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	552.100.000	17.151.891	247.381.723	103.527.919	126.153.358	494.214.891	50	89,52		
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.800.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	38.400.000	124.800.000	66,67	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.223.665.000	168.000.000	306.738.104	289.389.000	345.482.247	1.109.609.351	100	90,68		
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.160.000	-	33.560.000	58.272.000	38.604.066	130.436.066	100	94,41		
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.680.000	-	38.640.604	78.104.500	46.213.181	162.958.285	100	98,95		
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.400.000	14.400.000	19.200.000	9.600.000	19.200.000	62.400.000	100	100		
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	740.800.000	153.600.000	198.400.000	96.000.000	192.000.000	640.000.000	100	86,39		
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.625.000	-	16.937.500	47.412.500	49.465.000	113.815.000	100	96,76		
	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**192.377.380**	**-**	**-**	**22.774.000**	**169.332.000**	192.106.000	**100**	**99,86**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	192.377.380	-	-	22.774.000	169.332.000	192.106.000	100	99,86		
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	192.377.380	-	-	22.774.000	169.332.000	192.106.000	100	99,86		
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**73.021.737**	**-**	**-**	**28.371.000**	**-**	28.371.000	**100**	**38,85**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	73.021.737	-	-	28.371.000	-	28.371.000	100	38,85		
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	73.021.737	-	-	28.371.000	-	28.371.000	100	38,85		
	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**4.803.060.880**	**1.074.000.000**	**1.441.809.800**	**710.000.000**	**1.414.821.480**	4.640.631.280	**100**	**96,62**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.803.060.880	1.074.000.000	1.441.809.800	710.000.000	1.414.821.480	4.640.631.280	100	96,62		
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.803.060.880	1.074.000.000	1.441.809.800	710.000.000	1.414.821.480	4.640.631.280	100	96,62		
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**34.097.067.623**	**6.012.031.800**	**8.316.867.661**	**12.245.125.339**	**3.160.650.413**	29.734.675.213	**78,32**	**87,21**		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.967.624.169**	**2.088.059.304**	**3.080.062.032**	**6.160.698.654**	**865.094.826**	12.193.914.816	**91,67**	**81,47**	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.259.000	29.502.400	36.007.200	43.888.400	34.626.000	144.024.000	100	96,49		
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.963.000	29.502.400	30.397.200	34.678.400	18.383.600	112.961.600	100	98,26		
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.296.000	-	5.610.000	9.210.000	16.242.400	31.062.400	100	90,57		
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.674.443.023	1.394.229.620	2.464.233.829	3.390.350.347	321.183.846	7.569.997.642	100	78,25		
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.581.931.023	1.375.839.620	2.445.843.829	3.349.789.147	321.092.846	7.492.565.442	100	78,19		
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.452.000	-	-	8.121.200	91.000	8.212.200	100	47,06		
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.060.000	18.390.000	18.390.000	32.440.000	-	69.220.000	100	92,22		
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	166.400.000	38.400.000	51.200.000	64.000.000	12.800.000	166.400.000	100	100		
	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	166.400.000	38.400.000	51.200.000	64.000.000	12.800.000	166.400.000	100	100		
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.126.556.197	351.649.340	238.850.637	907.786.268	268.567.900	1.766.854.145	100	83,09		
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	87.389.933	41.111.000	31.353.000	14.883.000	-	87.347.000	100	99,95		
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.014.006	80.291.000	21.589.500	123.490.500	35.135.500	260.506.500	100	96,12		
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	268.030.000	36.450.000	38.250.000	70.800.000	37.925.000	183.425.000	100	68,43		
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	149.984.484	71.882.000	14.024.000	44.786.000	17.782.000	148.474.000	100	98,99		
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	89.221.365	9.000.000	9.000.000	31.500.000	4.500.000	54.000.000	100	60,52		
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	716.351.411	93.115.340	75.734.137	315.726.768	123.025.400	607.601.645	100	84,82		
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	544.564.998	19.800.000	48.900.000	306.600.000	50.200.000	425.500.000	100	78,14		
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.261.706.189	-	-	1.248.661.675	-	1.248.661.675	100	98,97		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.698.050	-	-	29.698.050	-	29.698.050	100	100		
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.232.008.139	-	-	1.218.963.625	-	1.218.963.625	100	98,94		
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.756.848	91.732.906	115.407.202	151.502.909	29.177.442	387.820.459	100	79,51		
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124.584.475	30.600.000	42.400.000	38.600.000	8.176.000	119.776.000	100	96,14		
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.600.000	32.445.586	25.270.362	54.818.109	9.926.642	122.460.699	100	57,87		
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.572.373	28.687.320	47.736.840	58.084.800	11.074.800	145.583.760	100	96,05		
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.502.912	182.545.038	174.363.164	354.509.055	198.739.638	910.156.895	80	82,63		
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.667.012	68.543.038	55.104.180	188.361.000	50.602.000	362.610.218	100	90,5		
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000	-	958.984	10.567.055	3.503.250	15.029.289	100	51,83		
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	318.765.900	77.542.000	62.143.000	47.531.000	106.724.388	293.940.388	100	92,21		
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.500.000	-	-	-	-	-	0	0		
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.570.000	36.460.000	56.157.000	108.050.000	37.910.000	238.577.000	100	99,17		
	2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**69.367.129**	**39.318.000**	**29.865.629**	**-**	**-**	69.183.629	**100**	**99,74**	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	69.367.129	39.318.000	29.865.629	-	-	69.183.629	100	99,74		
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	69.367.129	39.318.000	29.865.629	-	-	69.183.629	100	99,74		
	2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**2.686.888.394**	**481.116.000**	**653.310.000**	**747.456.685**	**655.407.629**	2.537.290.314	**75**	**94,43**	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.686.888.394	481.116.000	653.310.000	747.456.685	655.407.629	2.537.290.314	75	94,43		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	385.547.459	64.011.000	18.720.000	70.560.000	146.130.000	299.421.000	100	77,66		
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.601.348.614	331.500.000	482.600.000	558.066.685	180.445.129	1.552.611.814	100	96,96		
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.682.368	-	-	-	-	-	0	0		
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	254.167.462	46.200.000	111.074.000	81.350.000	15.400.000	254.024.000	100	99,94		
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	317.459.450	11.730.000	5.730.000	-	299.972.500	317.432.500	100	99,99		
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	67.276.864	10.800.000	27.986.000	23.000.000	3.600.000	65.386.000	100	97,19		
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	58.406.177	16.875.000	7.200.000	14.480.000	9.860.000	48.415.000	100	82,89		
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**16.373.187.931**	**3.403.538.496**	**4.553.630.000**	**5.336.970.000**	**1.640.147.958**	14.934.286.454	**25,76**	**91,21**	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.373.187.931	3.403.538.496	4.553.630.000	5.336.970.000	1.640.147.958	14.934.286.454	25,76	91,21		
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	277.251.697	-	-	-	29.690.757	29.690.757	54,55	10,71		
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.987.701.290	3.403.538.496	4.536.810.000	5.291.470.000	1.610.457.201	14.842.275.697	100	99,03		
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	62.320.000	-	16.820.000	45.500.000	-	62.320.000	0	100		
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	930.303.681	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	55.924.763	-	-	-	-	-	0	0		
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	59.686.500	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**19.829.375.225**	**2.083.284.769**	**6.388.583.862**	**12.710.182.574**	**18.227.603.473**	39.409.654.678	**57,36**	**198,74**		
	2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.063.657.432**	**1.727.258.935**	**4.088.312.519**	**6.378.471.831**	**9.066.338.073**	21.260.381.358	**25,81**	**211,26**	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.300.000	63.300.000	-	-	-	63.300.000	20	100		
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.300.000	63.300.000	-	-	-	63.300.000	100	100		
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.829.876.826	1.072.410.579	2.698.500.318	4.290.617.120	6.088.761.563	14.150.289.580	100	207,18		
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.829.876.826	1.072.410.579	2.698.500.318	4.290.617.120	6.088.761.563	14.150.289.580	100	207,18		
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	852.800.000	192.000.000	449.600.000	577.600.000	833.600.000	2.052.800.000	53,66	240,71		
	2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	852.800.000	192.000.000	449.600.000	577.600.000	833.600.000	2.052.800.000	53,66	240,71		
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.036.099.244	179.255.150	466.098.204	652.454.541	1.028.190.850	2.325.998.745	34,29	224,5		
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.779.279	-	22.984.112	28.136.044	35.779.068	86.899.224	73,33	242,88		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.739.577	-	28.147.992	70.642.188	76.295.582	175.085.762	90	225,22		
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.420.000	29.000.000	86.700.000	147.800.000	208.360.000	471.860.000	0	226,4		
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.548.488	-	8.144.000	40.154.209	89.406.300	137.704.509	76,67	148,79		
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.100.000	-	5.100.000	5.100.000	6.850.000	17.050.000	0	168,81		
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.111.900	96.855.150	190.422.100	190.422.100	370.099.900	847.799.250	0	229,07		
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	241.400.000	53.400.000	124.600.000	170.200.000	241.400.000	589.600.000	0	244,24		
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.053.450	-	-	52.053.450	-	52.053.450	100	100		
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.053.450	-	-	52.053.450	-	52.053.450	100	100		
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.085.912	96.998.657	227.695.661	325.268.140	463.507.085	1.113.469.543	0	223,1		
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	199.938.312	45.000.000	107.600.000	139.719.000	194.319.000	486.638.000	0	243,39		
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.080.000	27.998.657	59.106.061	106.201.900	153.160.125	346.466.743	0	202,52		
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.067.600	24.000.000	60.989.600	79.347.240	116.027.960	280.364.800	0	218,92		
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.442.000	123.294.549	246.418.336	480.478.580	652.278.575	1.502.470.040	0	205,69		
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.029.000	45.944.549	90.513.336	161.375.580	239.865.575	537.699.040	0	221,25		
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.600.000	57.600.000	134.400.000	172.800.000	249.600.000	614.400.000	0	246,15		
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	162.813.000	19.750.000	21.505.000	146.303.000	162.813.000	350.371.000	0	215,2		
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**304.675.507**	**8.882.400**	**108.824.800**	**213.650.300**	**283.174.800**	614.532.300	**80**	**201,7**	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	9.085.484	4.441.200	8.507.600	8.976.100	-	21.924.900	100	241,32		
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	9.085.484	4.441.200	8.507.600	8.976.100	-	21.924.900	100	241,32		
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	295.590.023	4.441.200	100.317.200	204.674.200	283.174.800	592.607.400	75	200,48		
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	-	25.434.800	49.574.800	58.174.800	133.184.400	100	221,97		
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.590.023	4.441.200	8.882.400	9.599.400	-	22.923.000	0	216,46		
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	93.000.000	-	-	46.500.000	93.000.000	139.500.000	100	150		
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000	-	66.000.000	99.000.000	132.000.000	297.000.000	100	225		
	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**4.292.899.218**	**322.428.634**	**1.599.886.543**	**2.574.383.743**	**4.057.421.080**	8.554.120.000	**141,67**	**199,26**	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	602.839.000	-	127.790.000	400.590.000	507.440.000	1.035.820.000	356,27	171,82		
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	181.500.000	-	35.150.000	142.250.000	178.300.000	355.700.000	9,09	195,98		
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	220.000.000	-	37.400.000	95.400.000	132.800.000	265.600.000	0	120,73		
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	101.339.000	-	20.000.000	100.000.000	100.000.000	220.000.000	1416	217,09		
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.000.000	-	35.240.000	62.940.000	96.340.000	194.520.000	0	194,52		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.681.868.771	308.736.634	854.814.634	1.165.565.834	1.677.305.834	4.006.422.936	0	238,21		
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	387.500.000	-	155.000.000	271.250.000	387.500.000	813.750.000	0	210		
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.294.368.771	308.736.634	699.814.634	894.315.834	1.289.805.834	3.192.672.936	0	246,66		
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.508.888.474	3.307.200	415.244.109	684.909.309	1.375.091.646	2.478.552.264	33,33	164,26		
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.380.540	-	14.885.200	27.458.900	33.717.900	76.062.000	66,67	214,98		
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.324.729.278	3.307.200	345.767.200	586.838.700	1.193.867.337	2.129.780.437	0	160,77		
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	65.069.911	-	26.496.711	42.516.711	63.797.911	132.811.333	0	204,11		
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	83.708.745	-	28.094.998	28.094.998	83.708.498	139.898.494	66,67	167,13		
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	499.302.973	10.384.800	202.037.800	323.318.600	497.583.600	1.033.324.800	0	206,95		
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	230.502.973	10.384.800	31.330.800	56.055.600	230.320.600	328.091.800	0	142,34		
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	268.800.000	-	170.707.000	267.263.000	267.263.000	705.233.000	0	262,36		
	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**5.168.143.068**	**24.714.800**	**591.560.000**	**3.543.676.700**	**4.820.669.520**	8.980.621.020	**17,99**	**173,77**	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.824.857.923	16.692.400	123.472.400	2.284.171.400	2.698.932.000	5.123.268.200	23,99	181,36		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	44.753.000	-	-	-	40.695.600	40.695.600	0	90,93		
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000	-	7.200.000	16.800.000	19.200.000	43.200.000	50	225		
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	615.904.923	16.692.400	116.272.400	252.371.400	495.505.400	880.841.600	0	143,02		
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.145.000.000	-	-	2.015.000.000	2.143.531.000	4.158.531.000	93,94	193,87		
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.343.285.145	8.022.400	468.087.600	1.259.505.300	2.121.737.520	3.857.352.820	0	164,61		
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	978.000.000	-	195.600.000	489.000.000	782.400.000	1.467.000.000	0	150		
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.365.285.145	8.022.400	272.487.600	770.505.300	1.339.337.520	2.390.352.820	0	175,08		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**148.453.252.183**	**17.533.001.604**	**28.372.192.926**	**34.187.702.175**	**34.233.300.336**	114.326.197.042	**100**	**77,01**		
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**42.862.875.801**	**5.831.170.116**	**10.629.782.359**	**9.027.766.926**	**9.705.333.959**	35.194.053.360	**100**	**82,11**	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	345.580.472	36.222.645	32.870.000	113.842.292	142.186.000	325.120.937	100	94,08		
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.909.472	36.222.645	16.840.000	54.442.292	62.086.000	169.590.937	100	92,72		
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	33.999.500	-	-	-	30.400.000	30.400.000	100	89,41		
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.671.500	-	16.030.000	59.400.000	49.700.000	125.130.000	100	97,25		
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.225.122.429	2.506.492.191	3.921.337.868	3.654.092.332	4.299.407.909	14.381.330.300	100	88,64		
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.225.122.429	2.506.492.191	3.921.337.868	3.654.092.332	4.299.407.909	14.381.330.300	100	88,64		
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.141.400.000	263.400.000	351.200.000	175.600.000	351.200.000	1.141.400.000	100	100		
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.141.400.000	263.400.000	351.200.000	175.600.000	351.200.000	1.141.400.000	100	100		
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246.750.800	20.779.200	165.971.600	-	-	186.750.800	100	75,68		
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	246.750.800	20.779.200	165.971.600	-	-	186.750.800	100	75,68		
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.005.334.530	241.453.079	585.326.879	1.697.080.120	1.328.132.231	3.851.992.309	100	96,17		
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.462.804	-	26.885.000	308.891.000	54.685.148	390.461.148	100	100		
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	765.235.151	-	134.530.300	256.192.000	322.177.340	712.899.640	100	93,16		
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	455.970.000	29.135.000	13.790.000	188.200.000	200.355.000	431.480.000	100	94,63		
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.395.778.096	57.151.000	137.575.000	780.537.500	420.412.500	1.395.676.000	100	99,99		
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	221.290.000	26.000.000	27.000.000	53.290.000	115.000.000	221.290.000	100	100		
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.598.479	117.167.079	229.546.579	101.969.620	207.502.243	656.185.521	100	99,94		
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	120.000.000	12.000.000	16.000.000	8.000.000	8.000.000	44.000.000	100	36,67		
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.093.968.799	979.726.737	4.204.486.700	149.894.400	-	5.334.107.837	100	58,66		
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.421.175.924	-	2.192.000.000	-	-	2.192.000.000	100	90,53		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.589.671.602	318.314.700	620.023.800	149.894.400	-	1.088.232.900	100	68,46		
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	793.164.937	330.787.437	122.377.500	-	-	453.164.937	100	57,13		
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	424.043.562	175.224.600	-	-	-	175.224.600	100	41,32		
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.865.912.774	155.400.000	1.270.085.400	-	-	1.425.485.400	100	36,87		
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.573.067.520	354.877.504	420.496.158	316.155.134	429.484.642	1.521.013.438	100	96,69		
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	407.890.000	96.420.000	119.200.000	59.600.000	128.656.000	403.876.000	100	99,02		
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	978.860.000	229.657.504	227.260.478	225.585.834	250.691.742	933.195.558	100	95,33		
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.317.520	28.800.000	74.035.680	30.969.300	50.136.900	183.941.880	100	98,72		
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.231.651.251	1.428.218.760	948.093.154	2.921.102.648	3.154.923.177	8.452.337.739	100	82,61		
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	976.773.020	95.889.000	80.095.000	462.584.270	185.066.652	823.634.922	100	84,32		
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.591.537.751	257.462.000	118.054.154	1.676.324.098	2.084.474.925	4.136.315.177	100	90,09		
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.113.883.438	780.945.000	650.800.000	526.138.438	720.185.000	2.678.068.438	100	86		
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.549.457.042	293.922.760	99.144.000	256.055.842	165.196.600	814.319.202	100	52,56		
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**70.020.238.825**	**9.339.160.954**	**13.411.101.246**	**12.275.551.669**	**17.120.325.053**	52.146.138.922	**100**	**74,47**	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	57.173.857.272	7.932.766.684	10.106.187.101	9.350.696.069	14.135.708.753	41.525.358.607	100	72,63		
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	24.623.334.344	1.063.313.207	1.860.868.470	6.615.148.017	1.568.565.717	11.107.895.411	100	45,11		
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	32.550.522.928	6.869.453.477	8.245.318.631	2.735.548.052	12.567.143.036	30.417.463.196	100	93,45		
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3.546.266.000	816.456.000	631.690.000	324.200.000	1.163.149.000	2.935.495.000	100	82,78		
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	1.950.830.000	450.100.000	581.600.000	324.200.000	577.800.000	1.933.700.000	100	99,12		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.595.436.000	366.356.000	50.090.000	-	585.349.000	1.001.795.000	100	62,79		
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.144.685.328	449.249.800	244.620.500	569.019.050	229.304.500	1.492.193.850	100	69,58		
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	44.841.578	-	-	22.055.600	-	22.055.600	100	49,19		
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.099.843.750	449.249.800	244.620.500	546.963.450	229.304.500	1.470.138.250	100	70,01		
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	934.189.145	94.946.070	292.582.925	490.880.150	51.330.000	929.739.145	100	99,52		
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	863.049.145	94.946.070	292.582.925	423.970.150	51.330.000	862.829.145	100	99,97		
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	71.140.000	-	-	66.910.000	-	66.910.000	100	94,05		
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	304.683.000	45.742.400	42.662.400	67.564.800	88.404.800	244.374.400	100	80,21		
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	304.683.000	45.742.400	42.662.400	67.564.800	88.404.800	244.374.400	100	80,21		
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.025.910.160	-	1.729.760.000	1.473.191.600	1.432.928.000	4.635.879.600	100	92,24		
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.025.910.160	-	1.729.760.000	1.473.191.600	1.432.928.000	4.635.879.600	100	92,24		
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	890.647.920	-	363.598.320	-	19.500.000	383.098.320	100	43,01		
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	890.647.920	-	363.598.320	-	19.500.000	383.098.320	100	43,01		
	2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**35.570.137.557**	**2.362.670.534**	**4.331.309.321**	**12.884.383.580**	**7.407.641.325**	26.986.004.760	**100**	**75,87**	Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan	2.105.707.618	-	439.160.400	578.006.818	88.348.000	1.105.515.218	100	52,5		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal										
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.105.707.618	-	439.160.400	578.006.818	88.348.000	1.105.515.218	100	52,5		
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	26.529.421.952	1.420.863.180	2.337.607.071	10.111.719.749	5.801.684.830	19.671.874.830	100	74,15		
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	16.331.002.630	515.441.480	759.994.967	7.887.451.749	1.611.497.111	10.774.385.307	100	65,98		
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	10.198.419.322	905.421.700	1.577.612.104	2.224.268.000	4.190.187.719	8.897.489.523	100	87,24		
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	6.849.285.987	928.491.954	1.554.541.850	2.190.477.013	1.451.741.695	6.125.252.512	100	89,43		
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	115.444.538	5.643.600	24.298.000	55.213.338	29.519.600	114.674.538	100	99,33		
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	3.047.492.600	170.753.100	313.798.206	1.718.442.885	146.050.455	2.349.044.646	100	77,08		
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.323.148.849	206.095.254	491.245.644	52.820.790	548.171.640	1.298.333.328	100	98,12		
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2.363.200.000	546.000.000	725.200.000	364.000.000	728.000.000	2.363.200.000	100	100		
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	85.722.000	13.315.400	-	4.180.000	65.866.800	83.362.200	100	97,25		
	2.15.03.2.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	85.722.000	13.315.400	-	4.180.000	65.866.800	83.362.200	100	97,25		
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**25.431.726.180**	**1.714.403.445**	**3.975.225.562**	**8.462.186.378**	**8.929.530.185**	23.081.345.570	**91,72**	**90,76**		
	2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.770.922.953**	**1.407.716.845**	**2.031.775.916**	**2.525.001.957**	**2.490.391.613**	8.454.886.331	**90,46**	**86,53**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.271.680	9.900.000	-	40.987.500	56.939.200	107.826.700	112,5	52,02		
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.540.294	9.900.000	-	40.357.500	40.213.200	90.470.700	100	56,35		
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.731.386	-	-	630.000	16.726.000	17.356.000	125	37,14		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.189.500.285	1.104.385.777	1.670.173.077	1.641.851.411	1.835.532.864	6.251.943.129	93,33	86,96		
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.130.319.699	1.075.855.777	1.670.173.077	1.632.341.411	1.814.641.664	6.193.011.929	86,67	86,85		
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	59.180.586	28.530.000	-	9.510.000	20.891.200	58.931.200	100	99,58		
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.800.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	38.400.000	124.800.000	100	100		
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	124.800.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	38.400.000	124.800.000	100	100		
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.116.604.297	112.024.800	155.896.072	437.344.312	313.046.582	1.018.311.766	100	91,2		
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.176.486	-	-	-	14.086.000	14.086.000	100	42,46		
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.166.821	15.724.000	-	9.642.000	21.415.000	46.781.000	100	50,21		
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.940.000	8.260.000	3.720.000	51.760.000	32.520.000	96.260.000	100	82,32		
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.222.290	2.975.000	-	3.325.000	5.695.000	11.995.000	100	59,32		
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	853.098.700	85.065.800	152.176.072	372.617.312	239.330.582	849.189.766	100	99,54		
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.198.200	-	-	119.187.360	-	119.187.360	100	99,99		
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.198.200	-	-	119.187.360	-	119.187.360	100	99,99		
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.161.706	102.310.143	121.406.767	125.982.579	140.363.884	490.063.373	38,89	87,17		
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	224.331.815	53.000.000	65.600.000	30.400.000	60.800.000	209.800.000	8,33	93,52		
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.090.000	39.710.143	37.727.727	43.371.419	64.519.644	185.328.933	8,33	80,2		
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.739.891	9.600.000	18.079.040	52.211.160	15.044.240	94.934.440	100	88,94		
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.386.785	50.296.125	45.900.000	140.448.795	106.109.083	342.754.003	100	75,93		
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.539.369	-	-	83.007.021	28.243.900	111.250.921	100	61,62		
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.203.815	12.996.125	-	38.241.774	26.080.183	77.318.082	100	66,54		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.843.601	8.500.000	7.500.000	-	13.385.000	29.385.000	100	98,46		
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.800.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	38.400.000	124.800.000	100	100		
	2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**5.517.565.450**	**200.521.800**	**1.780.928.880**	**2.631.827.902**	**680.703.558**	5.293.982.140	**91,33**	**95,95**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.517.565.450	200.521.800	1.780.928.880	2.631.827.902	680.703.558	5.293.982.140	91,33	95,95		
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	2.653.427.600	18.849.400	756.711.500	1.683.936.842	113.275.000	2.572.772.742	100	96,96		
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	67.195.400	6.250.000	-	29.467.200	22.460.000	58.177.200	99,01	86,58		
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	338.505.158	53.280.000	71.222.400	56.564.800	96.647.958	277.715.158	49	82,04		
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	152.017.717	14.042.400	13.561.200	62.278.400	50.243.600	140.125.600	100	92,18		
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.622.936.718	15.210.000	806.100.000	576.125.800	170.951.400	1.568.387.200	100	96,64		
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	683.482.857	92.890.000	133.333.780	223.454.860	227.125.600	676.804.240	100	99,02		
	2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**10.143.237.777**	**106.164.800**	**162.520.766**	**3.305.356.519**	**5.758.435.014**	9.332.477.099	**100**	**92,01**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.143.237.777	106.164.800	162.520.766	3.305.356.519	5.758.435.014	9.332.477.099	100	92,01		
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	575.307.751	37.221.200	89.020.766	184.374.493	116.959.705	427.576.164	100	74,32		
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	587.654.500	68.943.600	73.500.000	140.706.500	142.575.311	425.725.411	100	72,44		
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	8.980.275.526	-	-	2.980.275.526	5.498.899.998	8.479.175.524	100	94,42		
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**11.289.367.947**	**1.551.731.425**	**2.306.459.662**	**2.614.833.453**	**2.902.886.719**	9.375.911.259	**72,4**	**83,05**		
	2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.850.181.914**	**1.551.731.425**	**2.306.459.662**	**2.614.833.453**	**2.705.072.812**	9.178.097.352	**101,91**	**84,59**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346.695.476	31.400.000	54.901.000	44.047.700	64.792.000	195.140.700	100	56,29		
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.333.972	4.603.000	24.916.000	25.970.700	-	55.489.700	100	45,36		
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	168.456.957	26.797.000	26.125.000	6.427.000	64.792.000	124.141.000	100	73,69		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.904.547	-	3.860.000	11.650.000	-	15.510.000	100	27,74		
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.266.485.680	901.828.352	1.391.874.894	1.346.740.585	1.476.443.340	5.116.887.171	132,5	81,65		
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.266.485.680	901.828.352	1.391.874.894	1.346.740.585	1.476.443.340	5.116.887.171	132,5	81,65		
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	416.000.000	96.000.000	128.000.000	64.000.000	128.000.000	416.000.000	100	100		
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	416.000.000	96.000.000	128.000.000	64.000.000	128.000.000	416.000.000	100	100		
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.160.902.323	161.298.093	238.976.898	388.265.700	362.723.991	1.151.264.682	100	99,17		
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.992.550	5.798.456	6.998.814	7.273.567	10.908.662	30.979.499	100	99,96		
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.008.656	23.324.185	25.501.972	25.929.979	23.911.832	98.667.968	100	99,66		
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.570.000	19.060.000	17.690.000	44.485.000	43.075.000	124.310.000	100	93,77		
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.501.117	8.085.022	10.277.662	13.841.164	7.177.097	39.380.945	100	99,7		
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51.840.000	12.960.000	12.960.000	12.960.000	12.960.000	51.840.000	100	100		
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	806.990.000	92.070.430	165.548.450	283.775.990	264.691.400	806.086.270	100	99,89		
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	308.515.893	11.480.000	9.000.000	24.500.000	73.535.000	118.515.000	100	38,41		
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	308.515.893	11.480.000	9.000.000	24.500.000	73.535.000	118.515.000	100	38,41		
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.421.988.000	312.730.690	400.888.386	220.925.591	423.320.202	1.357.864.869	100	95,49		
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.800.000	19.800.000	26.400.000	13.200.000	26.400.000	85.800.000	100	100		
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.188.000	34.930.690	34.088.386	38.925.591	59.320.202	167.264.869	100	75,96		
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.116.000.000	258.000.000	340.400.000	168.800.000	337.600.000	1.104.800.000	100	99		
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	929.594.542	36.994.290	82.818.484	526.353.877	176.258.279	822.424.930	100	88,47		
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.420.750	26.210.665	58.635.604	230.120.765	42.383.125	357.350.159	100	98,33		
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	566.173.792	10.783.625	24.182.880	296.233.112	133.875.154	465.074.771	100	82,14		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**84.499.825**	**-**	**-**	**-**	**60.850.707**	60.850.707	**50**	**72,01**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	84.499.825	-	-	-	60.850.707	60.850.707	50	72,01		
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	84.499.825	-	-	-	60.850.707	60.850.707	100	72,01		
	2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**0**	**0**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**354.686.208**	**-**	**-**	**-**	**136.963.200**	136.963.200	**12,5**	**38,62**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	354.686.208	-	-	-	136.963.200	136.963.200	12,5	38,62		
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	354.686.208	-	-	-	136.963.200	136.963.200	50	38,62		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**0**	**0**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**22.756.065.222**	**2.393.444.134**	**3.802.362.780**	**3.877.521.991**	**8.177.487.747**	18.250.816.652	**114,35**	**80,2**		
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**19.833.762.929**	**2.194.754.134**	**3.792.362.780**	**3.370.727.401**	**6.274.482.052**	15.632.326.367	**91,61**	**78,82**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.934.998	-	34.846.292	36.628.370	47.937.565	119.412.227	100	71,11		
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.877.182	-	24.644.006	21.016.840	25.989.165	71.650.011	100	65,81		
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.057.816	-	10.202.286	15.611.530	21.948.400	47.762.216	100	80,87		
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.703.450.246	1.473.746.824	2.274.072.394	2.231.560.277	2.633.603.498	8.612.982.993	100	88,76		
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.647.846.794	1.469.246.824	2.274.072.394	2.219.538.968	2.595.040.376	8.557.898.562	100	88,7		
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.603.452	4.500.000	-	12.021.309	38.563.122	55.084.431	100	99,07		
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	332.800.000	76.800.000	102.400.000	51.200.000	102.400.000	332.800.000	100	100		
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	332.800.000	76.800.000	102.400.000	51.200.000	102.400.000	332.800.000	100	100		
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.673.000	-	-	5.920.000	38.077.200	43.997.200	100	98,49		
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.673.000	-	-	5.920.000	38.077.200	43.997.200	100	98,49		
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.474.087.688	232.393.249	293.145.535	385.675.689	537.504.507	1.448.718.980	82,59	98,28		
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.459.965	5.523.000	13.636.322	7.463.095	98.765.682	125.388.099	71,43	96,85		
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.622.709	45.316.876	31.673.853	25.345.328	169.246.697	271.582.754	100	99,99		
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	106.822.477	9.562.204	91.500.000	400.000	5.360.273	106.822.477	50	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.880.000	21.330.000	22.190.000	62.880.000	28.380.000	134.780.000	100	99,93		
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	143.582.216	4.258.380	14.943.656	10.189.246	95.504.106	124.895.388	100	86,99		
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.000.000	-	7.450.000	20.550.000	11.000.000	39.000.000	66,67	100		
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648.720.321	146.402.789	111.751.704	258.848.020	129.247.749	646.250.262	90	99,62		
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.160.962.827	-	29.970.000	57.590.000	1.882.028.500	1.969.588.500	95,65	91,14		
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.160.962.827	-	29.970.000	57.590.000	1.882.028.500	1.969.588.500	95,65	91,14		
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.066.405.920	312.589.061	597.372.324	439.304.225	507.374.845	1.856.640.455	81,25	89,85		
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.645.000	8.400.000	15.400.000	8.000.000	24.400.000	56.200.000	100	99,21		
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.317.967.800	148.989.061	372.212.114	328.904.225	280.941.935	1.131.047.335	25	85,82		
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.000.000	72.000.000	96.000.000	48.000.000	91.200.000	307.200.000	100	98,46		
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	379.793.120	83.200.000	113.760.210	54.400.000	110.832.910	362.193.120	100	95,37		
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.883.448.250	99.225.000	460.556.235	162.848.840	525.555.937	1.248.186.012	100	32,14		
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.430.000	42.000.000	39.171.235	47.353.590	24.974.500	153.499.325	100	92,79		
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.814.000	6.350.000	6.749.000	8.927.000	4.976.000	27.002.000	100	73,35		
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	150	100		
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.430.000	7.405.000	-	7.400.000	29.625.000	44.430.000	100	100		
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.384.064.250	-	396.126.000	42.338.250	332.080.437	770.544.687	100	22,77		
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.710.000	43.470.000	18.510.000	56.830.000	123.900.000	242.710.000	50	100		
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**157.330.360**	**-**	**-**	**-**	**91.335.902**	91.335.902	**100**	**58,05**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	157.330.360	-	-	-	91.335.902	91.335.902	100	58,05		
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	157.330.360	-	-	-	91.335.902	91.335.902	100	58,05		
	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**507.961.375**	**198.690.000**	**-**	**303.677.590**	**5.000.000**	507.367.590	**100**	**99,88**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	507.961.375	198.690.000	-	303.677.590	5.000.000	507.367.590	100	99,88		
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	507.961.375	198.690.000	-	303.677.590	5.000.000	507.367.590	100	99,88		
	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**299.058.328**	**-**	**10.000.000**	**193.236.500**	**86.900.000**	290.136.500	**163,89**	**97,02**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	299.058.328	-	10.000.000	193.236.500	86.900.000	290.136.500	163,89	97,02		
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	72.500.000	-	10.000.000	35.000.000	27.500.000	72.500.000	100	100		
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	18.147.956	-	-	10.076.500	-	10.076.500	266,67	55,52		
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	208.410.372	-	-	148.160.000	59.400.000	207.560.000	125	99,59		
	2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**1.940.172.754**	**-**	**-**	**-**	**1.719.769.793**	1.719.769.793	**269,4**	**88,64**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.940.172.754	-	-	-	1.719.769.793	1.719.769.793	269,4	88,64		
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	46.633.404	-	-	-	46.457.000	46.457.000	200	99,62		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	74.597.350	-	-	-	74.170.500	74.170.500	575,71	99,43		
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	1.818.942.000	-	-	-	1.599.142.293	1.599.142.293	32,5	87,92		
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**17.779.476**	**-**	**-**	**9.880.500**	**-**	9.880.500	**75**	**55,57**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.779.476	-	-	9.880.500	-	9.880.500	75	55,57		
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	17.779.476	-	-	9.880.500	-	9.880.500	75	55,57		
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**10.843.590.681**	**1.526.485.616**	**758.797.516**	**733.717.119**	**833.388.006**	3.852.388.257	**459,69**	**35,53**		
	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.926.655.219**	**-**	**223.286.500**	**715.275.919**	**486.976.006**	1.425.538.425	**36,04**	**73,99**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.012.242.719	-	59.062.000	420.275.925	80.590.000	559.927.925	37,88	55,32		
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	174.456.000	-	59.062.000	16.253.000	-	75.315.000	0	43,17		
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	181.964.000	-	-	-	-	-	0	0		
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	166.283.897	-	-	-	16.370.000	16.370.000	0	9,84		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	19.698.000	-	-	11.410.000	-	11.410.000	27,27	57,92		
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	82.367.897	-	-	8.140.000	64.220.000	72.360.000	100	87,85		
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	387.472.925	-	-	384.472.925	-	384.472.925	100	99,23		
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	914.412.500	-	164.224.500	294.999.994	406.386.006	865.610.500	25	94,66		
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	914.412.500	-	164.224.500	294.999.994	406.386.006	865.610.500	25	94,66		
	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**8.916.935.462**	**1.526.485.616**	**535.511.016**	**18.441.200**	**346.412.000**	2.426.849.832	**883,33**	**27,22**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.277.615.738	1.504.885.616	458.686.616	-	-	1.963.572.232	33,33	26,98		
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	7.277.615.738	1.504.885.616	458.686.616	-	-	1.963.572.232	33,33	26,98		
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	-	10.000.000	15.350.000	14.000.000	39.350.000	50	78,7		
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	-	10.000.000	15.350.000	14.000.000	39.350.000	100	78,7		
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	129.319.000	-	7.940.000	-	-	7.940.000	0	6,14		
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	121.175.000	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	8.144.000	-	7.940.000	-	-	7.940.000	0	97,5		
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.425.203.724	21.600.000	24.092.400	3.091.200	332.412.000	381.195.600	3025	26,75		
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	121.203.724	21.600.000	24.092.400	3.091.200	28.412.000	77.195.600	6000	63,69		
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.304.000.000	-	-	-	304.000.000	304.000.000	50	23,31		
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	34.797.000	-	34.792.000	-	-	34.792.000	0	99,99		
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	34.797.000	-	34.792.000	-	-	34.792.000	0	99,99		
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**413.344.031**	**48.500.000**	**43.211.928**	**187.299.600**	**77.648.200**	356.659.728	**152,74**	**86,29**		
	2.20.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**412.782.103**	**48.500.000**	**42.650.000**	**187.299.600**	**77.648.200**	356.097.800	**152,74**	**86,27**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	412.782.103	48.500.000	42.650.000	187.299.600	77.648.200	356.097.800	152,74	86,27		
	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	412.782.103	48.500.000	42.650.000	187.299.600	77.648.200	356.097.800	152,74	86,27		
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**561.928**	**-**	**561.928**	**-**	**-**	561.928	**0**	**100**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	561.928	-	561.928	-	-	561.928	0	100		
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	561.928	-	561.928	-	-	561.928	0	100		
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**206.349.025**	**11.495.507**	**21.800.000**	**33.139.973**	**62.854.584**	129.290.064	**100**	**62,66**		
	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**206.349.025**	**11.495.507**	**21.800.000**	**33.139.973**	**62.854.584**	129.290.064	**100**	**62,66**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	136.601.025	1.295.507	840.000	22.479.973	45.514.584	70.130.064	100	51,34		
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	71.881.332	655.507	-	17.049.973	15.354.584	33.060.064	100	45,99		
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.719.693	640.000	840.000	5.430.000	30.160.000	37.070.000	100	57,28		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	69.748.000	10.200.000	20.960.000	10.660.000	17.340.000	59.160.000	100	84,82		
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.748.000	10.200.000	20.960.000	10.660.000	17.340.000	59.160.000	100	84,82		
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**4.331.445.601**	**985.269.668**	**512.234.838**	**566.090.718**	**509.348.332**	2.572.943.556	**441,9**	**59,4**		
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.157.237.050**	**277.846.668**	**106.240.000**	**29.960.000**	**405.663.332**	819.710.000	**35,83**	**70,83**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.320.020	53.510.000	106.240.000	29.960.000	16.000.000	205.710.000	100	74,99		
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	274.320.020	53.510.000	106.240.000	29.960.000	16.000.000	205.710.000	100	74,99		
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	282.917.030	-	-	-	14.000.000	14.000.000	21,67	4,95		
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	122.693.020	-	-	-	6.000.000	6.000.000	33,33	4,89		
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	160.224.010	-	-	-	8.000.000	8.000.000	10	4,99		
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	224.336.668	-	-	375.663.332	600.000.000	0	100		
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	600.000.000	224.336.668	-	-	375.663.332	600.000.000	0	100		
	2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**3.072.438.556**	**707.423.000**	**392.694.838**	**527.110.718**	**52.800.000**	1.680.028.556	**200**	**54,68**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.072.438.556	707.423.000	392.694.838	527.110.718	52.800.000	1.680.028.556	200	54,68		
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	3.072.438.556	707.423.000	392.694.838	527.110.718	52.800.000	1.680.028.556	200	54,68		
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**80.080.000**	**-**	**7.000.000**	**2.720.000**	**41.800.000**	51.520.000	**150**	**64,34**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	80.080.000	-	7.000.000	2.720.000	41.800.000	51.520.000	150	64,34		
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	80.080.000	-	7.000.000	2.720.000	41.800.000	51.520.000	150	64,34		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**21.689.995**	**-**	**6.300.000**	**6.300.000**	**9.085.000**	21.685.000	**2600**	**99,98**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	21.689.995	-	6.300.000	6.300.000	9.085.000	21.685.000	2600	99,98		
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	21.689.995	-	6.300.000	6.300.000	9.085.000	21.685.000	2600	99,98		
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**13.453.815.309**	**1.991.680.504**	**3.142.454.040**	**2.401.392.115**	**3.387.345.752**	10.922.872.411	**88,16**	**81,19**		
	2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.156.341.890**	**1.991.680.504**	**3.083.975.640**	**2.392.552.115**	**3.158.366.576**	10.626.574.835	**85,27**	**80,77**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.623.799	-	55.989.500	-	-	55.989.500	100	56,2		
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.018.500	-	25.568.500	-	-	25.568.500	100	98,27		
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.605.299	-	30.421.000	-	-	30.421.000	100	41,33		
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.144.355.914	1.429.691.125	2.133.700.327	1.767.558.860	2.246.363.591	7.577.313.903	100	82,86		
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.144.355.914	1.429.691.125	2.133.700.327	1.767.558.860	2.246.363.591	7.577.313.903	100	82,86		
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	790.400.000	-	-	-	-	-	0	0		
	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	790.400.000	-	-	-	-	-	0	0		
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.087.244	79.933.565	186.620.409	127.920.638	14.372.335	408.846.947	75,82	99,94		
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.555.197	-	7.893.066	661.765	-	8.554.831	70	100		
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.221.914	-	65.075.943	35.028.873	-	100.104.816	0	99,88		
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.865.000	-	27.870.000	30.316.000	13.667.000	71.853.000	100	99,98		
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.587.073	6.720.000	8.950.000	13.830.000	-	29.500.000	109,09	99,71		
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.858.060	73.213.565	76.831.400	48.084.000	705.335	198.834.300	100	99,99		
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.676.000	-	25.000.000	11.676.000	-	36.676.000	100	100		
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.676.000	-	25.000.000	11.676.000	-	36.676.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.731.143.565	348.915.261	451.822.404	343.885.370	458.573.014	1.603.196.049	100	92,61		
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108.085.525	26.082.000	32.800.000	16.400.000	32.800.000	108.082.000	100	100		
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.000.000	42.833.261	39.891.444	134.533.810	54.573.014	271.831.529	100	79,48		
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.281.058.040	280.000.000	379.130.960	192.951.560	371.200.000	1.223.282.520	100	95,49		
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.055.368	133.140.553	230.843.000	141.511.247	439.057.636	944.552.436	100	99,95		
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.587.968	27.540.553	71.763.000	60.088.847	33.165.091	192.557.491	100	99,98		
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	752.467.400	105.600.000	159.080.000	81.422.400	405.892.545	751.994.945	100	99,94		
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**273.151.801**	**-**	**39.318.400**	**8.840.000**	**224.021.648**	272.180.048	**95,37**	**99,64**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	247.077.801	-	39.318.400	-	206.911.648	246.230.048	93,06	99,66		
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	34.995.220	-	4.864.000	-	29.927.500	34.791.500	75	99,42		
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.400	-	9.940.000	-	24.940.000	34.880.000	83,33	99,66		
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	51.211.000	-	19.565.900	-	31.642.000	51.207.900	100	99,99		
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.999.980	-	4.948.500	-	-	4.948.500	100	98,97		
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	74.375.201	-	-	-	73.907.948	73.907.948	100	99,37		
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	46.496.000	-	-	-	46.494.200	46.494.200	100	100		
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.074.000	-	-	8.840.000	17.110.000	25.950.000	100	99,52		
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	17.150.000	-	-	-	17.110.000	17.110.000	100	99,77		
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	3.800.000	-	-	3.800.000	-	3.800.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5.124.000	-	-	5.040.000	-	5.040.000	100	98,36		
	2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**24.321.618**	**-**	**19.160.000**	**-**	**4.957.528**	24.117.528	**66,67**	**99,16**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	24.321.618	-	19.160.000	-	4.957.528	24.117.528	66,67	99,16		
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	24.321.618	-	19.160.000	-	4.957.528	24.117.528	66,67	99,16		
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**74.510.200**	**-**	**31.990.000**	**-**	**42.507.400**	74.497.400	**100**	**99,98**		
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**72.010.740**	**-**	**29.990.000**	**-**	**42.008.400**	71.998.400	**100**	**99,98**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	69.511.280	-	29.990.000	-	39.509.400	69.499.400	100	99,98		
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	69.511.280	-	29.990.000	-	39.509.400	69.499.400	100	99,98		
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2.499.460	-	-	-	2.499.000	2.499.000	100	99,98		
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	2.499.460	-	-	-	2.499.000	2.499.000	100	99,98		
	2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**2.499.460**	**-**	**2.000.000**	**-**	**499.000**	2.499.000	**100**	**99,98**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.499.460	-	2.000.000	-	499.000	2.499.000	100	99,98		
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.499.460	-	2.000.000	-	499.000	2.499.000	100	99,98		
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**17.935.289.324**	**1.925.117.287**	**3.729.982.829**	**3.540.677.654**	**4.305.689.046**	13.501.466.816	**110,48**	**75,28**		
	3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.854.474.892**	**1.551.287.287**	**2.785.496.829**	**2.404.135.282**	**2.860.895.484**	9.601.814.882	**101,19**	**74,7**	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.448.000	-	74.004.500	45.445.000	67.870.000	187.319.500	133,33	95,84		
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.450.000	-	17.580.000	14.180.000	27.560.000	59.320.000	100	92,04		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.748.000	-	25.330.000	31.265.000	13.280.000	69.875.000	100	96,05		
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.250.000	-	31.094.500	-	27.030.000	58.124.500	200	99,78		
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.383.030.903	1.295.226.228	1.967.144.119	1.874.357.710	2.031.723.647	7.168.451.704	100	69,04		
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.383.030.903	1.295.226.228	1.967.144.119	1.874.357.710	2.031.723.647	7.168.451.704	100	69,04		
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	353.600.000	27.000.000	163.400.000	52.800.000	102.400.000	345.600.000	100	97,74		
	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	353.600.000	27.000.000	163.400.000	52.800.000	102.400.000	345.600.000	100	97,74		
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	991.752.312	101.308.915	267.163.017	251.595.658	369.517.760	989.585.350	100	99,78		
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.136.685	-	7.977.552	15.315.201	4.843.932	28.136.685	100	100		
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.555.148	23.933.320	16.285.176	35.726.265	13.607.282	89.552.043	100	100		
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.500.000	-	42.500.000	33.000.000	16.000.000	91.500.000	100	97,86		
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.322.479	13.955.416	14.735.965	21.650.000	4.900.000	55.241.381	100	99,85		
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.600.000	-	16.500.000	9.900.000	13.200.000	39.600.000	100	100		
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.138.000	63.420.179	127.164.324	116.504.192	292.966.546	600.055.241	100	99,99		
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	85.500.000	-	42.000.000	19.500.000	24.000.000	85.500.000	100	100		
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.794.542	-	9.730.000	-	47.500.000	57.230.000	62,5	95,71		
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50.061.000	-	-	-	47.500.000	47.500.000	25	94,88		
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.733.542	-	9.730.000	-	-	9.730.000	100	99,96		
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.874.135	39.004.172	129.525.052	75.570.490	97.155.961	341.255.675	100	96,98		
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.244.875	16.600.000	29.000.000	16.750.000	35.596.000	97.946.000	100	91,33		
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.982.300	19.204.172	79.176.252	54.020.490	55.159.961	207.560.875	100	99,8		
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.646.960	3.200.000	21.348.800	4.800.000	6.400.000	35.748.800	100	97,55		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.975.000	88.747.972	174.530.141	104.366.424	144.728.116	512.372.653	100	98,73		
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.824.000	23.229.100	14.532.863	30.988.753	21.394.744	90.145.460	100	96,08		
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.356.000	23.918.872	7.282.528	12.992.921	11.625.372	55.819.693	100	95,65		
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.395.000	-	48.714.750	18.784.750	28.508.000	96.007.500	100	99,6		
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.400.000	41.600.000	104.000.000	41.600.000	83.200.000	270.400.000	100	100		
	3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**3.303.155.972**	**123.030.000**	**329.480.000**	**783.977.472**	**909.375.350**	2.145.862.822	**133,33**	**64,96**	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.428.719.396	113.830.000	105.790.000	607.458.896	412.871.050	1.239.949.946	150	86,79		
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	647.868.000	113.830.000	99.730.000	245.500.000	188.000.000	647.060.000	100	99,88		
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	780.851.396	-	6.060.000	361.958.896	224.871.050	592.889.946	200	75,93		
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.874.436.576	9.200.000	223.690.000	176.518.576	496.504.300	905.912.876	100	48,33		
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	170.518.576	3.200.000	3.200.000	157.718.576	6.400.000	170.518.576	0	100		
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	41.600.000	3.200.000	9.600.000	16.000.000	12.800.000	41.600.000	0	100		
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	1.662.318.000	2.800.000	210.890.000	2.800.000	477.304.300	693.794.300	100	41,74		
	3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**1.485.429.060**	**229.800.000**	**482.580.000**	**284.145.000**	**475.545.812**	1.472.070.812	**166,67**	**99,1**	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.485.429.060	229.800.000	482.580.000	284.145.000	475.545.812	1.472.070.812	166,67	99,1		
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	221.542.000	46.800.000	58.680.000	37.760.000	68.236.000	211.476.000	100	95,46		
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	139.394.060	4.400.000	83.650.000	18.201.000	31.192.400	137.443.400	100	98,6		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.124.493.000	178.600.000	340.250.000	228.184.000	376.117.412	1.123.151.412	300	99,88		
	3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**82.126.400**	**12.000.000**	**33.896.000**	**12.000.000**	**24.000.000**	81.896.000	**100**	**99,72**	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	82.126.400	12.000.000	33.896.000	12.000.000	24.000.000	81.896.000	100	99,72		
	3.25.05.2.01.0003	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	82.126.400	12.000.000	33.896.000	12.000.000	24.000.000	81.896.000	100	99,72		
	3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**210.103.000**	**9.000.000**	**98.530.000**	**56.419.900**	**35.872.400**	199.822.300	**100**	**95,11**	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	53.414.000	-	24.820.000	-	26.872.400	51.692.400	100	96,78		
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	53.414.000	-	24.820.000	-	26.872.400	51.692.400	100	96,78		
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	91.329.000	3.600.000	66.510.000	12.222.400	7.200.000	89.532.400	100	98,03		
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	91.329.000	3.600.000	66.510.000	12.222.400	7.200.000	89.532.400	100	98,03		
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	65.360.000	5.400.000	7.200.000	44.197.500	1.800.000	58.597.500	100	89,65		
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.360.000	5.400.000	7.200.000	44.197.500	1.800.000	58.597.500	100	89,65		
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**35.611.729.947**	**4.324.448.159**	**6.619.290.380**	**7.463.282.354**	**6.367.324.579**	24.774.345.472	**290,09**	**69,57**		
	3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.420.594.659**	**3.366.317.564**	**5.088.161.596**	**3.833.375.945**	**5.984.661.701**	18.272.516.806	**91,13**	**89,48**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.944.000	-	28.270.000	12.680.000	5.000.000	45.950.000	70	37,99		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.786.000	-	28.270.000	12.680.000	-	40.950.000	100	47,19		
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.158.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	40	14,64		
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.799.342.983	1.414.607.328	2.231.457.264	2.185.547.282	2.500.033.807	8.331.645.681	70,44	85,02		
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.728.987.983	1.414.607.328	2.231.457.264	2.174.056.082	2.457.193.807	8.277.314.481	115,87	85,08		
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.355.000	-	-	11.491.200	42.840.000	54.331.200	25	77,22		
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.032.000.000	465.600.000	632.000.000	307.200.000	611.200.000	2.016.000.000	8,33	99,21		
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.032.000.000	465.600.000	632.000.000	307.200.000	611.200.000	2.016.000.000	8,33	99,21		
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.973.645.584	278.426.036	276.798.734	357.485.536	839.573.397	1.752.283.703	89,05	88,78		
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	138.798.782	81.734.200	13.546.000	7.051.200	36.405.950	138.737.350	125	99,96		
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.890.034	41.607.186	51.019.971	46.493.266	110.662.223	249.782.646	100	99,96		
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	362.000.000	51.155.000	17.050.000	75.430.000	166.760.000	310.395.000	100	85,74		
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	241.142.768	29.174.000	12.629.000	60.107.000	65.114.500	167.024.500	90	69,26		
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.000.000	-	18.000.000	15.800.000	24.000.000	57.800.000	100	90,31		
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	791.670.000	74.755.650	154.553.763	143.094.070	397.480.724	769.884.207	100	97,25		
	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	126.144.000	-	10.000.000	9.510.000	39.150.000	58.660.000	8,33	46,5		
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.700.462	-	199.706.242	7.994.220	-	207.700.462	200	100		
	3.26.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.700.462	-	199.706.242	7.994.220	-	207.700.462	200	100		
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.266.410	128.200.000	145.201.670	168.109.287	166.954.081	608.465.038	100	80,67		
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.206.250	17.400.000	26.800.000	12.800.000	26.728.000	83.728.000	100	94,92		
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.700.000	76.000.000	70.730.790	118.247.487	85.578.121	350.556.398	100	71,73		
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.360.160	34.800.000	47.670.880	37.061.800	54.647.960	174.180.640	100	98,21		
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.532.695.220	1.079.484.200	1.574.727.686	794.359.620	1.861.900.416	5.310.471.922	102,5	95,98		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	397.000.000	27.584.200	98.657.036	40.670.000	184.319.437	351.230.673	110	88,47		
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.879.000	700.000	66.000.400	62.495.400	110.626.250	239.822.050	100	95,98		
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.853.994.220	1.051.200.000	1.386.220.250	691.194.220	1.559.754.729	4.688.369.199	100	96,59		
	3.26.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	31.822.000	-	23.850.000	-	7.200.000	31.050.000	100	97,57		
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**13.401.261.288**	**958.130.595**	**411.152.284**	**2.960.771.709**	**382.662.878**	4.712.717.466	**1004,55**	**35,17**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	13.389.441.288	958.130.595	399.492.284	2.960.771.709	382.662.878	4.701.057.466	2000	35,11		
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	13.389.441.288	958.130.595	399.492.284	2.960.771.709	382.662.878	4.701.057.466	2000	35,11		
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.820.000	-	11.660.000	-	-	11.660.000	9,09	98,65		
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.820.000	-	11.660.000	-	-	11.660.000	9,09	98,65		
	3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**1.789.874.000**	**-**	**1.119.976.500**	**669.134.700**	**-**	1.789.111.200	**1565,25**	**99,96**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.789.874.000	-	1.119.976.500	669.134.700	-	1.789.111.200	1565,25	99,96		
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	49.944.000	-	-	49.381.200	-	49.381.200	50	98,87		
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.739.930.000	-	1.119.976.500	619.753.500	-	1.739.730.000	3080,5	99,99		
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**82.776.991.052**	**9.361.872.232**	**10.052.246.368**	**20.003.280.404**	**19.297.047.147**	58.714.446.151	**88,8**	**70,93**		
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.764.051.102**	**1.531.448.217**	**3.237.369.620**	**3.083.014.267**	**3.264.687.781**	11.116.519.885	**87,08**	**87,09**	Dinas Perkebunan	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348.958.000	30.375.790	10.914.400	37.252.400	110.107.610	188.650.200	122,5	54,06		
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.987.210	17.832.000	6.402.400	10.700.000	70.554.210	105.488.610	120	62,42		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.970.790	12.543.790	4.512.000	26.552.400	39.553.400	83.161.590	125	46,21		
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.576.080.382	1.149.098.656	2.620.710.981	2.203.039.209	2.414.010.148	8.386.858.994	116	87,58		
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.576.080.382	1.149.098.656	2.620.710.981	2.203.039.209	2.414.010.148	8.386.858.994	116	87,58		
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	221.374.166	54.330.000	57.600.000	28.800.000	57.600.000	198.330.000	66,67	89,59		
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.250.000	11.130.000	-	-	-	11.130.000	100	72,98		
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	187.200.000	43.200.000	57.600.000	28.800.000	57.600.000	187.200.000	100	100		
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.924.166	-	-	-	-	-	0	0		
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.750.000	-	-	-	36.700.000	36.700.000	100	99,86		
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36.750.000	-	-	-	36.700.000	36.700.000	100	99,86		
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	749.918.988	135.443.771	128.211.200	264.239.920	164.710.527	692.605.418	92,52	92,36		
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.402.582	6.852.000	-	9.138.000	8.387.000	24.377.000	100	99,9		
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.184.756	20.418.000	-	76.331.000	27.704.000	124.453.000	65,75	99,42		
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.786.000	-	2.781.000	-	45.207.000	47.988.000	100	81,63		
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.460.430	18.830.000	-	-	35.630.000	54.460.000	83,33	100		
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	-	5.000.000	5.000.000	7.500.000	17.500.000	100	83,33		
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.885.220	53.343.771	64.930.200	161.770.920	15.582.527	295.627.418	98,52	99,91		
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	170.200.000	36.000.000	55.500.000	12.000.000	24.700.000	128.200.000	100	75,32		
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.259.404	-	-	-	-	-	0	0		
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.259.404	-	-	-	-	-	0	0		
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.053.159.174	162.200.000	312.508.000	241.584.650	303.754.000	1.020.046.650	100	96,86		
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	472.385.900	109.400.000	143.200.000	73.896.100	138.780.000	465.276.100	100	98,49		
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000	-	65.021.000	54.682.950	50.015.000	169.718.950	100	96,98		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.773.274	52.800.000	104.287.000	113.005.600	114.959.000	385.051.600	100	94,89		
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.550.988	-	107.425.039	308.098.088	177.805.496	593.328.623	78,86	82,69		
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.768.070	-	51.870.000	53.109.170	57.137.496	162.116.666	175	74,44		
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.723.000	-	36.278.700	49.519.000	101.168.000	186.965.700	100	77,35		
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.350.000	-	19.276.339	5.760.000	19.500.000	44.536.339	19,3	76,33		
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	0	0		
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.709.918	-	-	199.709.918	-	199.709.918	100	100		
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**97.967.588**	**-**	**4.800.000**	**4.580.000**	**26.400.000**	35.780.000	**66,67**	**36,52**	Dinas Perkebunan	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	86.483.588	-	4.800.000	4.580.000	16.950.000	26.330.000	50	30,45		
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	81.613.588	-	4.800.000	4.580.000	16.950.000	26.330.000	100	32,26		
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	4.870.000	-	-	-	-	-	0	0		
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.484.000	-	-	-	9.450.000	9.450.000	100	82,29		
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	11.484.000	-	-	-	9.450.000	9.450.000	100	82,29		
	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**21.968.674.970**	**1.177.267.971**	**100.460.665**	**5.846.643.110**	**3.664.055.283**	10.788.427.029	**105,36**	**49,11**	Dinas Perkebunan	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	705.908.680	-	34.380.000	86.040.000	350.511.900	470.931.900	83,33	66,71		
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	512.442.680	-	-	74.960.000	347.941.900	422.901.900	100	82,53		
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	18.880.000	-	14.150.000	2.160.000	2.570.000	18.880.000	50	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	174.586.000	-	20.230.000	8.920.000	-	29.150.000	100	16,7		
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	21.262.766.290	1.177.267.971	66.080.665	5.760.603.110	3.313.543.383	10.317.495.129	138,4	48,52		
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	12.482.605.549	810.880.973	11.101.000	2.706.612.876	972.329.226	4.500.924.075	136,17	36,06		
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	8.780.160.741	366.386.998	54.979.665	3.053.990.234	2.341.214.157	5.816.571.054	140,63	66,25		
	3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**221.851.660**	**16.202.060**	**20.600.000**	**28.653.000**	**70.014.000**	135.469.060	**46,3**	**61,06**	Dinas Perkebunan	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	221.851.660	16.202.060	20.600.000	28.653.000	70.014.000	135.469.060	46,3	61,06		
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	107.353.000	-	16.840.000	13.843.000	21.160.000	51.843.000	95,12	48,29		
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.274.000	-	-	-	2.560.000	2.560.000	0	78,19		
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	111.224.660	16.202.060	3.760.000	14.810.000	46.294.000	81.066.060	43,79	72,88		
	3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**275.009.229**	**13.797.940**	**29.040.000**	**68.277.000**	**78.130.000**	189.244.940	**100**	**68,81**	Dinas Perkebunan	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	275.009.229	13.797.940	29.040.000	68.277.000	78.130.000	189.244.940	100	68,81		
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	137.082.229	-	19.640.000	37.681.000	30.970.000	88.291.000	100	64,41		
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	137.927.000	13.797.940	9.400.000	30.596.000	47.160.000	100.953.940	100	73,19		
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**297.502.205**	**29.879.884**	**15.771.200**	**27.409.874**	**57.215.860**	130.276.818	**68,33**	**43,79**	Dinas Perkebunan	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	297.502.205	29.879.884	15.771.200	27.409.874	57.215.860	130.276.818	68,33	43,79		
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	69.074.840	1.049.840	-	4.920.000	14.826.000	20.795.840	100	30,11		
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	79.175.995	-	6.901.200	-	40.379.860	47.281.060	50	59,72		
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	15.073.874	3.780.000	-	8.219.874	2.010.000	14.009.874	60	92,94		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	91.489.240	16.755.070	-	8.170.000	-	24.925.070	100	27,24		
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	33.000.386	8.294.974	8.870.000	6.100.000	-	23.264.974	100	70,5		
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	9.687.870	-	-	-	-	-	0	0		
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.642.275.394**	**3.870.341.126**	**5.181.259.005**	**4.320.000.118**	**6.152.282.237**	19.523.882.486	**96,51**	**94,58**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.799.862	9.226.843	20.020.016	7.490.175	8.821.200	45.558.234	50	97,35		
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.799.862	9.226.843	20.020.016	7.490.175	8.821.200	45.558.234	100	97,35		
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.467.448.745	2.947.941.858	4.400.946.518	3.723.177.359	5.357.374.628	16.429.440.363	100	94,06		
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.467.448.745	2.947.941.858	4.400.946.518	3.723.177.359	5.357.374.628	16.429.440.363	100	94,06		
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	380.302.823	87.090.000	116.150.000	68.203.440	108.800.000	380.243.440	100	99,98		
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	353.600.000	81.600.000	108.800.000	54.400.000	108.800.000	353.600.000	100	100		
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.702.823	5.490.000	7.350.000	13.803.440	-	26.643.440	100	99,78		
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	748.950.110	156.714.011	175.049.296	201.954.720	199.366.458	733.084.485	90,28	97,88		
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.129.924	-	5.858.817	9.907.947	3.358.047	19.124.811	100	99,97		
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.555.677	5.606.802	4.310.506	36.708.620	8.076.611	54.702.539	100	91,85		
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.924.000	3.750.000	6.215.000	14.489.000	9.950.000	34.404.000	66,67	90,72		
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.202.104	15.742.507	16.487.231	28.740.000	24.154.947	85.124.685	75	97,62		
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.150.000	3.500.000	5.700.000	7.600.000	5.700.000	22.500.000	100	82,87		
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	517.988.405	128.114.702	136.477.742	104.509.153	148.126.853	517.228.450	100	99,85		
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.699.766	145.014.626	265.306.521	130.635.979	253.704.496	794.661.622	100	94,08		
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	507.600.000	111.000.000	157.200.000	72.800.000	137.000.000	478.000.000	100	94,17		
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.690.500	24.878.248	60.596.331	16.411.127	41.000.000	142.885.706	100	97,41		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.409.266	9.136.378	47.510.190	41.424.852	75.704.496	173.775.916	100	91,26		
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.154.074.088	524.353.788	203.786.654	188.538.445	224.215.455	1.140.894.342	118,41	98,86		
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	277.271.050	32.532.000	60.898.480	96.235.550	84.200.975	273.867.005	100	98,77		
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.500.000	12.771.788	6.541.184	1.740.361	4.379.202	25.432.535	54,55	99,74		
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.020.000	11.340.000	12.260.000	9.530.000	7.935.000	41.065.000	50	87,34		
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	791.798.038	464.546.000	117.796.990	80.529.534	125.515.278	788.387.802	100	99,57		
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.485.000	3.164.000	6.290.000	503.000	2.185.000	12.142.000	287,5	97,25		
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**5.392.029.556**	**1.906.665.000**	**112.082.400**	**653.506.372**	**1.922.174.666**	4.594.428.438	**76,79**	**85,21**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	102.638.000	15.550.000	14.820.000	12.640.000	18.720.000	61.730.000	100	60,14		
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	102.638.000	15.550.000	14.820.000	12.640.000	18.720.000	61.730.000	100	60,14		
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	478.830.000	50.803.600	31.962.400	72.411.200	240.067.491	395.244.691	100	82,54		
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	478.830.000	50.803.600	31.962.400	72.411.200	240.067.491	395.244.691	100	82,54		
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	366.336.772	33.885.000	40.000.000	132.006.772	70.365.000	276.256.772	100	75,41		
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	366.336.772	33.885.000	40.000.000	132.006.772	70.365.000	276.256.772	100	75,41		
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.444.224.784	1.806.426.400	25.300.000	436.448.400	1.593.022.175	3.861.196.975	7,14	86,88		
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.444.224.784	1.806.426.400	25.300.000	436.448.400	1.593.022.175	3.861.196.975	7,14	86,88		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**13.389.559.202**	**321.616.928**	**515.182.278**	**3.216.053.016**	**1.355.566.720**	5.408.418.942	**102,08**	**40,39**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.028.980.000	10.000.000	-	481.180.000	57.370.000	548.550.000	100	53,31		
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	1.028.980.000	10.000.000	-	481.180.000	57.370.000	548.550.000	100	53,31		
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	12.360.579.202	311.616.928	515.182.278	2.734.873.016	1.298.196.720	4.859.868.942	102,5	39,32		
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.546.668.252	301.616.928	437.398.642	1.458.162.682	704.285.590	2.901.463.842	12,5	38,45		
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.200.496.225	10.000.000	77.783.636	760.945.607	223.860.191	1.072.589.434	300	33,51		
	3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	452.450.000	-	-	16.800.000	195.550.000	212.350.000	100	46,93		
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	1.160.964.725	-	-	498.964.727	174.500.939	673.465.666	100	58,01		
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**3.346.302.250**	**141.300.000**	**274.841.200**	**1.429.810.493**	**1.241.847.000**	3.087.798.693	**90**	**92,27**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1.042.568.250	125.280.000	155.200.000	385.607.600	301.207.000	967.294.600	100	92,78		
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	766.892.000	113.700.000	142.700.000	291.600.000	165.210.000	713.210.000	100	93		
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	275.676.250	11.580.000	12.500.000	94.007.600	135.997.000	254.084.600	100	92,17		
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.194.420.000	6.900.000	84.520.000	998.602.893	940.640.000	2.030.662.893	75	92,54		
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	56.020.000	6.900.000	6.900.000	11.400.000	22.700.000	47.900.000	100	85,51		
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2.138.400.000	-	77.620.000	987.202.893	917.940.000	1.982.762.893	50	92,72		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	109.314.000	9.120.000	35.121.200	45.600.000	-	89.841.200	100	82,19		
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	109.314.000	9.120.000	35.121.200	45.600.000	-	89.841.200	100	82,19		
	3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**54.592.000**	**7.050.000**	**5.280.000**	**10.150.000**	**31.570.000**	54.050.000	**100**	**99,01**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	54.592.000	7.050.000	5.280.000	10.150.000	31.570.000	54.050.000	100	99,01		
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	54.592.000	7.050.000	5.280.000	10.150.000	31.570.000	54.050.000	100	99,01		
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**4.327.175.896**	**346.303.106**	**555.560.000**	**1.315.183.154**	**1.433.103.600**	3.650.149.860	**100**	**84,35**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4.327.175.896	346.303.106	555.560.000	1.315.183.154	1.433.103.600	3.650.149.860	100	84,35		
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.966.092.348	329.763.346	548.360.000	399.330.000	574.750.000	1.852.203.346	100	94,21		
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	621.611.034	6.541.200	-	63.380.000	68.783.600	138.704.800	100	22,31		
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	333.952.514	9.998.560	7.200.000	299.533.154	7.200.000	323.931.714	100	97		
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.100.000.000	-	-	403.600.000	634.550.000	1.038.150.000	100	94,38		
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	305.520.000	-	-	149.340.000	147.820.000	297.160.000	100	97,26		
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**25.507.359.628**	**3.201.191.531**	**-**	**6.602.038.791**	**7.098.106.447**	16.901.336.769	**58,3**	**66,26**		
	3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**19.235.181.596**	**3.178.431.531**	**-**	**6.602.038.791**	**6.558.103.893**	16.338.574.215	**29,42**	**84,94**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	372.201.710	11.000.000	-	-	-	11.000.000	20	2,96		
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	219.290.192	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.020.275	11.000.000	-	-	-	11.000.000	100	99,82		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	51.150.926	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	66.658.184	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.082.133	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.856.609.491	1.297.863.656	-	4.944.167.741	2.558.105.349	8.800.136.746	33,33	89,28		
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.773.013.640	1.283.204.156	-	4.942.403.741	2.558.105.349	8.783.713.246	100	89,88		
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.466.025	14.659.500	-	1.764.000	-	16.423.500	0	53,91		
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	53.129.826	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.832.000.000	556.800.000	-	683.200.000	537.600.000	1.777.600.000	100	97,03		
	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.832.000.000	556.800.000	-	683.200.000	537.600.000	1.777.600.000	100	97,03		
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.840.000	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.840.000	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.817.187.670	35.969.838	-	488.823.798	427.526.462	952.320.098	20,07	52,41		
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.696.958	-	-	258.213.166	230.166.344	488.379.510	0,56	86,49		
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	594.150.000	16.850.000	-	56.450.000	110.000.000	183.300.000	60	30,85		
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.471.292	469.838	-	14.172.757	16.986.411	31.629.006	50	52,3		
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.500.000	18.650.000	-	4.850.000	-	23.500.000	0	100		
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	175.000.000	-	-	75.000.000	-	75.000.000	0	42,86		
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	163.414.249	-	-	80.137.875	70.373.707	150.511.582	50	92,1		
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.955.171	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.154.399	277.244.037	-	485.847.252	487.034.844	1.250.126.133	56,25	82,35		
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	960.894.000	153.194.037	-	446.847.252	149.742.044	749.783.333	25	78,03		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.313.150	34.450.000	-	39.000.000	34.736.000	108.186.000	50	98,07		
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	-	-	-	41.600.000	41.600.000	100	52		
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	366.947.249	89.600.000	-	-	260.956.800	350.556.800	50	95,53		
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.820.188.326	999.554.000	-	-	2.547.837.238	3.547.391.238	16,67	92,86		
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.243.200.000	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.630.000	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	980.800.000	-	-	2.201.600.000	3.182.400.000	0	0		
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450.358.326	18.754.000	-	-	346.237.238	364.991.238	50	81,04		
	3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**89.100.715**	**-**	**-**	**-**	**60.001.264**	60.001.264	**122,22**	**67,34**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	23.810.000	-	-	-	4.660.000	4.660.000	66,67	19,57		
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	23.810.000	-	-	-	4.660.000	4.660.000	66,67	19,57		
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.200.000	-	-	-	23.641.264	23.641.264	200	78,28		
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	30.200.000	-	-	-	23.641.264	23.641.264	200	78,28		
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	35.090.715	-	-	-	31.700.000	31.700.000	100	90,34		
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	35.090.715	-	-	-	31.700.000	31.700.000	100	90,34		
	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**364.421.672**	**-**	**-**	**-**	**96.715.300**	96.715.300	**186,67**	**26,54**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	231.778.704	-	-	-	91.355.300	91.355.300	333,33	39,41		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	168.000.491	-	-	-	91.355.300	91.355.300	666,67	54,38		
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	63.778.213	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	132.642.968	-	-	-	5.360.000	5.360.000	40	4,04		
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	44.923.377	-	-	-	2.680.000	2.680.000	40	5,97		
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	87.719.591	-	-	-	2.680.000	2.680.000	40	3,06		
	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**5.452.063.750**	**-**	**-**	**-**	**338.300.000**	338.300.000	**47,22**	**6,2**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10.065.000	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.065.000	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	5.441.998.750	-	-	-	338.300.000	338.300.000	70,83	6,22		
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.308.010.000	-	-	-	308.010.000	308.010.000	100	5,8		
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	133.988.750	-	-	-	30.290.000	30.290.000	41,67	22,61		
	3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**54.072.205**	**-**	**-**	**-**	**17.400.000**	17.400.000	**125**	**32,18**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.072.205	-	-	-	17.400.000	17.400.000	125	32,18		
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	54.072.205	-	-	-	17.400.000	17.400.000	250	32,18		
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	-	-	-	-	-	-	0	0		
	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**312.519.690**	**22.760.000**	**-**	**-**	**27.585.990**	50.345.990	**16,67**	**16,11**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	312.519.690	22.760.000	-	-	27.585.990	50.345.990	16,67	16,11		
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	213.487.690	-	-	-	27.585.990	27.585.990	33,33	12,92		
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	99.032.000	22.760.000	-	-	-	22.760.000	0	22,98		
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**3.509.868.575**	**-**	**-**	**-**	**1.562.000.400**	1.562.000.400	**33,33**	**44,5**		
	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**3.379.037.537**	**-**	**-**	**-**	**1.562.000.400**	1.562.000.400	**50**	**46,23**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.379.037.537	-	-	-	1.562.000.400	1.562.000.400	50	46,23		
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	33.163.769	-	-	-	-	-	0	0		
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	339.803.869	-	-	-	338.135.045	338.135.045	100	99,51		
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.966.967.868	-	-	-	1.223.865.355	1.223.865.355	100	41,25		
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	39.102.031	-	-	-	-	-	0	0		
	3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**82.159.519**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**0**	**0**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	82.159.519	-	-	-	-	-	0	0		
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	82.159.519	-	-	-	-	-	0	0		
	3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**48.671.519**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**0**	**0**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	48.671.519	-	-	-	-	-	0	0		
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	48.671.519	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)										
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**94.511.819**	**35.149.540**	**11.041.200**	**21.525.555**	**23.746.144**	91.462.439	**100**	**96,77**		
	3.32.02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**54.745.495**	**22.008.340**	**11.041.200**	**21.525.555**	**-**	54.575.095	**100**	**99,69**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	54.745.495	22.008.340	11.041.200	21.525.555	-	54.575.095	100	99,69		
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	54.745.495	22.008.340	11.041.200	21.525.555	-	54.575.095	100	99,69		
	3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**39.766.324**	**13.141.200**	**-**	**-**	**23.746.144**	36.887.344	**100**	**92,76**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.766.324	13.141.200	-	-	23.746.144	36.887.344	100	92,76		
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	39.766.324	13.141.200	-	-	23.746.144	36.887.344	100	92,76		
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**179.997.396.806**	**17.142.240.256**	**39.057.602.319**	**68.253.621.612**	**75.183.134.281**	199.636.598.468	**92,88**	**110,91**		
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**123.177.247.083**	**13.582.397.766**	**23.045.291.244**	**34.832.305.760**	**32.374.093.019**	103.834.087.789	**95,58**	**84,3**	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	694.547.912	76.056.800	139.493.672	139.666.083	268.117.564	623.334.119	90	89,75		
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	328.702.829	34.852.800	99.415.475	44.502.810	123.622.477	302.393.562	50	92		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	41.734.048	-	8.084.800	14.849.250	17.791.176	40.725.226	100	97,58		
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.330.926	-	-	-	46.162.311	46.162.311	100	91,72		
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	132.379.621	21.740.400	24.886.000	31.581.800	43.273.200	121.481.400	100	91,77		
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.400.488	19.463.600	7.107.397	48.732.223	37.268.400	112.571.620	100	79,61		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.919.285.267	5.037.575.150	7.871.227.464	7.528.038.096	8.758.332.004	29.195.172.714	100	94,42		
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.613.040.669	5.003.539.550	7.795.829.980	7.421.865.871	8.702.100.038	28.923.335.439	100	94,48		
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.715.947	-	50.585.646	61.742.512	6.449.087	118.777.245	100	99,22		
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	46.547.706	-	-	17.830.800	-	17.830.800	100	38,31		
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.203.081	18.309.600	-	-	19.240.964	37.550.564	100	95,78		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.530.411	-	9.544.800	-	19.504.315	29.049.115	100	95,15		
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70.247.453	15.726.000	15.267.038	26.598.913	11.037.600	68.629.551	100	97,7		
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	737.716.715	139.200.000	221.539.248	141.163.315	218.018.100	719.920.663	100	97,59		
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	624.000.000	139.200.000	185.600.000	89.600.000	192.000.000	606.400.000	100	97,18		
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	113.716.715	-	35.939.248	51.563.315	26.018.100	113.520.663	100	99,83		
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	397.727.430	50.939.000	36.720.083	85.249.000	128.850.000	301.758.083	66,67	75,87		
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	319.978.650	38.100.000	24.000.000	68.439.000	113.000.000	243.539.000	100	76,11		
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	77.748.780	12.839.000	12.720.083	16.810.000	15.850.000	58.219.083	100	74,88		
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.973.873.379	1.807.953.329	4.542.512.682	7.959.265.664	8.747.768.589	23.057.500.264	100	88,77		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	630.945.200	-	84.000.000	167.795.200	-	251.795.200	100	39,91		
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.218.879.715	27.649.026	215.146.750	394.648.028	205.326.727	842.770.531	100	69,14		
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.701.827.861	99.812.500	199.000.000	938.076.100	48.995.996	1.285.884.596	100	75,56		
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.671.267.000	887.400.000	932.982.000	1.874.950.000	1.950.665.000	5.645.997.000	100	99,55		
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.007.684.808	28.600.000	127.596.200	347.671.600	233.868.302	737.736.102	100	73,21		
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.607.122.570	410.169.600	363.902.000	1.304.172.200	3.089.660.000	5.167.903.800	100	78,22		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.136.146.225	354.322.203	2.619.885.732	2.931.952.536	3.219.252.564	9.125.413.035	100	99,88		
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.877.621.123	-	697.023.150	2.360.042.750	313.387.250	3.370.453.150	100	42,79		
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.477.430.912	-	233.300.000	330.562.300	-	563.862.300	100	38,17		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.121.521.161	-	229.431.000	1.670.103.550	28.500.000	1.928.034.550	100	37,65		
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.278.669.050	-	234.292.150	359.376.900	284.887.250	878.556.300	100	68,71		
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.670.270.980	2.558.502.893	3.671.410.412	2.409.282.266	4.831.971.871	13.471.167.442	100	91,83		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.671.483.700	1.508.600.000	2.077.100.000	992.800.000	1.968.500.000	6.547.000.000	100	98,13		
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.166.684.000	699.502.893	681.691.412	760.640.266	1.379.728.110	3.521.562.681	100	84,52		
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.832.103.280	350.400.000	912.619.000	655.842.000	1.483.743.761	3.402.604.761	100	88,79		
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.972.955.163	3.209.879.864	4.638.314.464	11.101.619.172	6.261.510.146	25.211.323.646	100	74,21		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.376.159.850	478.016.396	1.093.975.622	1.278.779.126	1.525.289.566	4.376.060.710	100	100		
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.263.394.664	615.409.368	1.103.837.392	838.655.656	1.703.575.950	4.261.478.366	100	99,96		
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.269.410.984	1.022.443.300	1.360.731.100	1.686.681.100	1.626.516.090	5.696.371.590	100	61,45		
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.900.973.565	664.799.900	807.927.450	2.190.188.590	1.051.097.200	4.714.013.140	100	59,66		
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.163.016.100	429.210.900	271.842.900	5.107.314.700	355.031.340	6.163.399.840	100	75,5		
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.538.840.227	213.226.761	259.143.794	50.773.584	703.605.054	1.226.749.193	100	79,72		
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	226.668.249	82.831.433	47.562.034	47.562.034	36.036.741	213.992.242	100	94,41		
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	329.800.000	-	154.800.000	-	175.000.000	329.800.000	100	100		
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	-	56.781.760	3.211.550	-	59.993.310	100	30		
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	782.371.978	130.395.328	-	-	492.568.313	622.963.641	100	79,62		
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	196.422.789	-	-	-	135.000.000	135.000.000	100	68,73		
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	116.422.789	-	-	-	55.000.000	55.000.000	100	47,24		
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	40.000.000	-	-	-	40.000.000	40.000.000	100	100		
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	40.000.000	-	-	-	40.000.000	40.000.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.443.463.761	189.352.069	353.509.275	535.480.998	764.722.261	1.843.064.603	86,67	127,68		
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	272.338.300	34.773.460	46.129.600	39.389.834	129.822.600	250.115.494	100	91,84		
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	295.365.744	27.225.700	76.846.800	77.330.000	104.495.800	285.898.300	33,33	96,79		
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	286.444.305	46.031.200	29.223.400	29.485.100	124.568.645	229.308.345	100	80,05		
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.407.815	52.171.709	173.241.075	150.404.964	146.695.496	522.513.244	100	1718,35		
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	558.907.597	29.150.000	28.068.400	238.871.100	259.139.720	555.229.220	100	99,34		
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.754.522.337	299.711.900	614.397.000	2.521.724.832	1.242.810.180	4.678.643.912	100	98,4		
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	1.795.883.010	132.643.000	219.200.000	1.041.955.205	396.358.480	1.790.156.685	100	99,68		
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.385.215.000	53.084.500	239.406.500	557.390.000	482.750.000	1.332.631.000	100	96,2		
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.573.424.327	113.984.400	155.790.500	922.379.627	363.701.700	1.555.856.227	100	98,88		
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**50.540.301.416**	**2.569.394.330**	**14.044.858.598**	**30.402.749.126**	**38.644.808.761**	85.661.810.815	**74,17**	**169,49**	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	777.968.650	141.110.600	139.128.246	232.272.210	180.129.400	692.640.456	66,67	89,03		
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	292.642.000	61.453.600	46.026.646	80.690.610	103.624.600	291.795.456	100	99,71		
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	256.751.720	-	66.908.000	142.528.000	7.924.800	217.360.800	100	84,66		
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	228.574.930	79.657.000	26.193.600	9.053.600	68.580.000	183.484.200	0	80,27		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	47.153.158.518	2.111.180.875	13.311.842.305	29.582.065.691	37.492.939.401	82.498.028.272	100	174,96		
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24.111.948.291	74.767.000	3.228.556.530	17.017.276.032	21.752.978.812	42.073.578.374	100	174,49		
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5.346.869.664	1.560.872.500	236.442.500	1.086.777.500	2.321.302.300	5.205.394.800	100	97,35		
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	17.694.340.563	475.541.375	9.846.843.275	11.478.012.159	13.418.658.289	35.219.055.098	100	199,04		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.565.829.728	207.959.800	332.057.780	276.712.800	648.702.528	1.465.432.908	30	93,59		
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	348.237.228	57.939.200	37.711.800	124.461.100	127.964.628	348.076.728	43,33	99,95		
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.121.911.100	137.893.400	272.107.180	94.376.200	517.488.500	1.021.865.280	40	91,08		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	95.681.400	12.127.200	22.238.800	57.875.500	3.249.400	95.490.900	6,67	99,8		
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1.043.344.520	109.143.055	261.830.267	311.698.425	323.037.432	1.005.709.179	100	96,39		
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	455.487.500	69.864.655	140.756.061	115.927.730	128.939.594	455.488.040	100	100		
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	129.862.592	-	16.600.000	86.277.600	13.896.900	116.774.500	100	89,92		
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	457.994.428	39.278.400	104.474.206	109.493.095	180.200.938	433.446.639	100	94,64		
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**6.279.848.307**	**990.448.160**	**1.967.452.477**	**3.018.566.726**	**4.164.232.501**	10.140.699.864	**100**	**161,48**	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.378.324.938	268.415.139	402.615.471	239.792.618	502.424.116	1.413.247.344	100	102,53		
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	385.411.562	184.007.430	93.128.704	54.621.600	243.842.822	575.600.556	100	149,35		
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	571.736.821	52.171.709	173.241.075	150.404.964	146.695.496	522.513.244	100	91,39		
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	333.533.705	14.906.000	136.245.692	34.084.482	92.657.123	277.893.297	100	83,32		
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	87.642.850	17.330.000	-	681.572	19.228.675	37.240.247	100	42,49		
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	693.905.905	121.952.304	-	281.930.800	262.592.415	666.475.519	100	96,05		
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	204.267.720	53.620.000	-	71.559.000	74.500.000	199.679.000	100	97,75		
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	250.715.065	44.332.304	-	82.930.000	119.662.000	246.924.304	100	98,49		
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	238.923.120	24.000.000	-	127.441.800	68.430.415	219.872.215	100	92,03		
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.488.139.659	480.147.117	1.445.094.606	2.270.867.334	3.243.068.630	7.439.177.687	100	213,27		
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	292.549.334	9.324.542	92.874.542	255.527.074	290.391.874	648.118.032	100	221,54		
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	428.326.815	53.922.400	278.963.343	279.488.344	425.977.344	1.038.351.431	100	242,42		
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.767.263.510	416.900.175	1.073.256.721	1.735.851.916	2.526.699.412	5.752.708.224	100	207,88		
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	719.477.805	119.933.600	119.742.400	225.975.974	156.147.340	621.799.314	100	86,42		
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	162.169.347	27.121.200	36.601.200	75.375.630	20.710.000	159.808.030	100	98,54		
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	254.806.007	70.761.200	9.450.000	60.647.287	73.311.740	214.170.227	100	84,05		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	302.502.451	22.051.200	73.691.200	89.953.057	62.125.600	247.821.057	100	81,92		
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**120.941.193.382**	**6.118.647.314**	**33.707.164.577**	**27.104.373.082**	**44.956.211.021**	111.886.395.994	**96,88**	**92,51**		
	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**64.522.482.996**	**6.036.647.314**	**18.213.032.970**	**14.563.623.408**	**22.341.504.185**	61.154.807.877	**91,67**	**94,78**	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	654.757.422	5.400.000	57.093.200	135.939.900	262.580.768	461.013.868	100	70,41		
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	325.442.492	5.400.000	45.206.000	64.163.000	120.450.268	235.219.268	100	72,28		
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	53.602.283	-	5.943.600	19.529.600	16.305.300	41.778.500	100	77,94		
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	49.629.356	-	-	9.200.000	15.416.400	24.616.400	100	49,6		
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.517.863	-	5.943.600	21.443.600	32.199.900	59.587.100	100	93,81		
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.565.428	-	-	21.603.700	78.208.900	99.812.600	100	61,4		
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.273.661.122	517.092.401	2.858.207.568	1.993.559.900	2.237.865.686	7.606.725.555	82,26	91,94		
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.273.661.122	517.092.401	2.858.207.568	1.993.559.900	2.237.865.686	7.606.725.555	82,26	91,94		
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.802.400.000	96.000.000	564.800.000	349.291.800	525.281.000	1.535.372.800	100	85,18		
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.802.400.000	96.000.000	564.800.000	349.291.800	525.281.000	1.535.372.800	100	85,18		
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.856.000	-	-	-	-	-	0	0		
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	248.856.000	-	-	-	-	-	0	0		
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.141.374.992	-	1.747.569.111	2.048.436.296	2.806.762.925	6.602.768.332	100	92,46		
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	198.368.337	-	25.363.546	52.394.375	117.724.162	195.482.083	100	98,55		
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.870.175	-	-	14.732.467	136.074.708	150.807.175	100	99,96		
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.311.300.000	-	1.670.326.965	1.669.143.148	1.526.211.716	4.865.681.829	100	91,61		
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	292.688.780	-	-	15.577.527	265.044.359	280.621.886	100	95,88		
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	610.240.000	-	-	200.000.000	410.240.000	610.240.000	100	100		
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.907.700	-	51.878.600	96.588.779	351.467.980	499.935.359	100	86,51		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.216.071.930	-	-	-	1.146.689.052	1.146.689.052	85,71	94,29		
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	191.036.000	-	-	-	190.028.892	190.028.892	100	99,47		
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.025.035.930	-	-	-	956.660.160	956.660.160	71,43	93,33		
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.669.183.650	106.117.313	469.239.291	425.273.878	490.460.942	1.491.091.424	92,98	89,33		
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.533.650	1.800.000	10.800.000	3.600.000	100.175.736	116.375.736	96,6	99,86		
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.251.750.000	83.517.313	323.770.791	375.226.838	292.544.086	1.075.059.028	100	85,88		
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.900.000	20.800.000	134.668.500	46.447.040	97.741.120	299.656.660	82,35	99,59		
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.879.253.330	209.600.000	1.384.068.730	889.701.364	3.175.337.929	5.658.708.023	87,63	96,25		
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.140.000	-	17.365.630	10.415.000	76.983.065	104.763.695	100	89,43		
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	799.078.000	-	76.643.800	160.853.364	506.146.307	743.643.471	95,45	93,06		
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	49.500.000	-	-	-	45.332.500	45.332.500	30,3	91,58		
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	797.581.000	9.600.000	72.472.500	243.033.000	442.064.000	767.169.500	100	96,19		
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.755.954.330	200.000.000	1.217.586.800	425.400.000	876.167.530	2.719.154.330	100	98,66		
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.360.000.000	-	-	50.000.000	1.228.644.527	1.278.644.527	100	94,02		
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35.456.024.868	5.102.437.600	11.054.139.070	8.502.920.270	10.034.909.460	34.694.406.400	100	97,85		
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.510.449.868	5.102.437.600	11.054.139.070	8.502.920.270	8.190.361.947	32.849.858.887	100	98,03		
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.788.075.000	-	-	-	1.785.047.513	1.785.047.513	100	99,83		
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	157.500.000	-	-	-	59.500.000	59.500.000	100	37,78		
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	2.180.899.682	-	77.916.000	218.500.000	1.661.616.423	1.958.032.423	100	89,78		
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.180.899.682	-	77.916.000	218.500.000	1.661.616.423	1.958.032.423	100	89,78		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**56.418.710.386**	**82.000.000**	**15.494.131.607**	**12.540.749.674**	**22.614.706.836**	50.731.588.117	**102,7**	**89,92**	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.439.727.855	-	58.862.400	1.791.032.567	823.477.217	2.673.372.184	126,67	77,72		
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	456.970.720	-	58.862.400	14.440.000	383.456.800	456.759.200	100	99,95		
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.594.148.969	-	-	1.774.322.567	346.719.445	2.121.042.012	233,33	81,76		
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	251.031.812	-	-	-	8.646.400	8.646.400	100	3,44		
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	114.355.765	-	-	2.270.000	68.519.372	70.789.372	100	61,9		
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	23.220.589	-	-	-	16.135.200	16.135.200	100	69,49		
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.144.917.125	-	102.711.800	175.612.186	794.157.700	1.072.481.686	100	93,67		
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	117.872.983	-	-	-	109.127.400	109.127.400	100	92,58		
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	126.906.460	-	-	-	125.994.000	125.994.000	100	99,28		
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	367.094.751	-	-	23.905.000	309.277.600	333.182.600	100	90,76		
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	533.042.931	-	102.711.800	151.707.186	249.758.700	504.177.686	100	94,58		
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14.093.255.820	-	5.325.251.074	2.410.085.315	5.974.940.390	13.710.276.779	100	97,28		
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.247.766.991	-	953.765.539	714.340.882	1.459.140.238	3.127.246.659	100	96,29		
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.358.843.809	-	480.910.351	693.747.347	1.099.615.108	2.274.272.806	100	96,41		
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.674.226.592	-	1.843.682.570	166.467.854	1.659.173.077	3.669.323.501	100	99,87		
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.554.651.166	-	1.212.707.104	285.639.146	1.056.053.750	2.554.400.000	100	99,99		
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.257.767.262	-	834.185.510	549.890.086	700.958.217	2.085.033.813	100	92,35		
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	7.387.164.493	75.600.000	1.902.452.669	1.282.683.973	3.010.222.781	6.270.959.423	100	84,89		
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.826.276.000	-	156.081.218	305.588.991	677.679.090	1.139.349.299	100	62,39		
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.867.897.960	-	996.000.000	284.000.000	568.000.000	1.848.000.000	100	98,93		
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	627.050.000	37.000.000	222.000.000	74.000.000	148.000.000	481.000.000	100	76,71		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	443.363.950	-	-	-	194.422.600	194.422.600	100	43,85		
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2.622.576.583	38.600.000	528.371.451	619.094.982	1.422.121.091	2.608.187.524	100	99,45		
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	24.956.082.532	-	6.510.720.000	6.526.520.000	9.486.090.179	22.523.330.179	80,56	90,25		
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	98.988.000	-	-	-	42.600.000	42.600.000	100	43,04		
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	20.231.456.580	-	6.510.720.000	6.526.520.000	6.454.182.599	19.491.422.599	100	96,34		
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4.625.637.952	-	-	-	2.989.307.580	2.989.307.580	41,67	64,62		
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	208.932.240	-	46.852.800	-	121.445.252	168.298.052	100	80,55		
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	208.932.240	-	46.852.800	-	121.445.252	168.298.052	100	80,55		
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.188.630.321	6.400.000	1.547.280.864	354.815.633	2.404.373.317	4.312.869.814	98,41	83,12		
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	567.499.833	-	112.851.104	5.805.312	447.778.295	566.434.711	100	99,81		
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.526.057.000	6.400.000	1.434.429.760	337.660.321	1.881.315.130	3.659.805.211	95,24	80,86		
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	95.073.488	-	-	11.350.000	75.279.892	86.629.892	100	91,12		
	5.01	**PERENCANAAN**	**20.616.473.205**	**2.992.005.877**	**4.044.420.321**	**5.877.602.416**	**6.605.197.444**	19.519.226.058	**92,16**	**94,68**		
	5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.640.544.284**	**2.297.063.584**	**3.081.307.639**	**3.500.474.254**	**4.791.705.954**	13.670.551.431	**95**	**93,37**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	331.504.725	25.640.000	-	155.189.949	141.836.656	322.666.605	66,67	97,33		
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	317.287.199	25.640.000	-	142.407.949	141.836.656	309.884.605	100	97,67		
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.217.526	-	-	12.782.000	-	12.782.000	100	89,9		
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.749.613.538	1.573.158.571	2.436.950.784	2.365.416.544	2.693.042.789	9.068.568.688	100	93,01		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.749.613.538	1.573.158.571	2.436.950.784	2.365.416.544	2.693.042.789	9.068.568.688	100	93,01		
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	182.400.000	27.200.000	33.600.000	16.000.000	32.000.000	108.800.000	100	59,65		
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	182.400.000	27.200.000	33.600.000	16.000.000	32.000.000	108.800.000	100	59,65		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.229.885.271	432.706.701	314.021.995	796.022.355	603.710.710	2.146.461.761	100	96,26		
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.484.833	15.013.000	4.772.500	11.278.500	15.395.000	46.459.000	100	99,94		
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	482.332.026	99.244.000	48.466.000	139.688.000	192.827.000	480.225.000	100	99,56		
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.020.000	22.640.000	13.500.000	67.520.000	135.440.000	239.100.000	100	92,67		
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.640.811	19.898.000	9.663.000	26.111.000	6.868.800	62.540.800	100	99,84		
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	-	14.200.000	14.200.000	14.200.000	42.600.000	100	78,89		
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.045.963.601	244.761.701	199.420.495	422.114.855	178.979.910	1.045.276.961	100	99,93		
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	280.444.000	31.150.000	24.000.000	115.110.000	60.000.000	230.260.000	100	82,11		
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.204.700	-	-	-	151.603.800	151.603.800	100	98,96		
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.204.700	-	-	-	151.603.800	151.603.800	100	98,96		
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638.549.050	114.681.975	146.022.110	115.658.744	166.876.163	543.238.992	100	85,07		
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.893.850	8.260.000	6.460.000	5.720.000	12.750.000	33.190.000	100	59,38		
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369.394.000	63.696.216	82.862.272	81.472.186	97.193.046	325.223.720	100	88,04		
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.261.200	42.725.759	56.699.838	28.466.558	56.933.117	184.825.272	100	86,67		
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.355.387.000	123.676.337	150.712.750	52.186.662	1.002.635.836	1.329.211.585	100	98,07		
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.665.000	65.476.337	55.079.750	-	139.350.640	259.906.727	100	99,33		
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.235.000	600.000	6.180.000	3.169.899	199.122.000	209.071.899	100	98,51		
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	268.800.000	57.600.000	76.800.000	38.400.000	76.800.000	249.600.000	100	92,86		
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	612.687.000	-	12.653.000	10.616.763	587.363.196	610.632.959	100	99,66		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**3.715.697.535**	**304.000.000**	**571.900.000**	**1.591.609.650**	**1.191.044.781**	3.658.554.431	**75**	**98,46**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.863.723.989	193.500.200	190.876.800	872.624.702	583.436.781	1.840.438.483	100	98,75		
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	170.777.896	56.612.200	13.800.000	41.251.172	58.000.000	169.663.372	100	99,35		
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	58.338.422	32.328.000	21.134.800	-	1.200.000	54.662.800	100	93,7		
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	97.200.000	-	35.000.000	54.600.000	-	89.600.000	100	92,18		
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	108.482.808	5.900.000	29.750.000	63.946.007	-	99.596.007	100	91,81		
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	115.550.227	81.997.600	-	33.246.503	-	115.244.103	100	99,74		
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.313.374.636	16.662.400	91.192.000	679.581.020	524.236.781	1.311.672.201	100	99,87		
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.701.106.642	110.499.800	365.623.200	663.106.546	535.564.400	1.674.793.946	100	98,45		
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1.329.600.770	91.039.800	120.123.200	619.807.774	496.864.400	1.327.835.174	100	99,87		
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	371.505.872	19.460.000	245.500.000	43.298.772	38.700.000	346.958.772	100	93,39		
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	150.866.904	-	15.400.000	55.878.402	72.043.600	143.322.002	50	95		
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	150.866.904	-	15.400.000	55.878.402	72.043.600	143.322.002	100	95		
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	-	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
	5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.260.231.386**	**390.942.293**	**391.212.682**	**785.518.512**	**622.446.709**	2.190.120.196	**100**	**96,9**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	720.914.017	145.052.307	141.966.452	253.455.746	147.286.800	687.761.305	100	95,4		
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.189.492	31.078.000	35.753.940	26.386.546	34.784.775	128.003.261	100	94,68		
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.846.068	16.252.000	-	1.600.000	-	17.852.000	100	78,14		
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	68.689.158	18.763.100	-	47.389.700	2.436.000	68.588.800	100	99,85		
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	325.132.594	69.341.807	71.013.540	131.038.300	46.261.600	317.655.247	100	97,7		
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	169.056.705	9.617.400	35.198.972	47.041.200	63.804.425	155.661.997	100	92,08		
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	883.822.873	133.859.400	124.253.400	357.901.020	244.368.375	860.382.195	100	97,35		
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.370.000	42.233.600	12.960.200	2.460.000	-	57.653.800	100	98,77		
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	193.236.200	-	-	147.726.200	42.517.400	190.243.600	100	98,45		
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.798.172	-	-	8.939.500	-	8.939.500	100	69,85		
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	153.123.744	13.554.800	51.178.600	56.685.600	27.056.400	148.475.400	100	96,96		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.941.900	51.186.200	7.611.200	-	6.691.200	65.488.600	100	96,39		
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	67.592.000	-	-	30.024.760	32.678.600	62.703.360	100	92,77		
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.141.048	-	-	8.740.000	4.978.500	13.718.500	100	97,01		
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	316.619.809	26.884.800	52.503.400	103.324.960	130.446.275	313.159.435	100	98,91		
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	655.494.496	112.030.586	124.992.830	174.161.746	230.791.534	641.976.696	100	97,94		
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.651.764	40.171.200	13.788.964	-	1.470.000	55.430.164	100	96,15		
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.461.831	480.000	32.662.866	14.560.000	13.786.000	61.488.866	100	98,44		
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	331.631.985	34.149.426	74.283.400	95.082.500	127.267.893	330.783.219	100	99,74		
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.041.620	22.045.000	680.000	-	1.000.000	23.725.000	100	81,69		
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.832.214	-	-	11.739.000	6.900.801	18.639.801	100	89,48		
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	153.875.082	15.184.960	3.577.600	52.780.246	80.366.840	151.909.646	100	98,72		
	5.02	**KEUANGAN**	**810.227.297.558**	**76.866.969.161**	**31.690.756.736**	**172.274.004.792**	**183.703.370.682**	464.535.101.371	**113,25**	**57,33**		
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.995.454.626**	**6.179.740.630**	**5.111.979.908**	**6.650.788.041**	**9.951.599.986**	27.894.108.565	**124,72**	**92,99**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	367.960.590	80.269.954	30.772.898	86.290.209	65.897.820	263.230.881	100	71,54		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	275.628.471	72.936.852	30.772.898	46.132.443	34.474.773	184.316.966	100	66,87		
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.067.068	-	-	14.504.554	-	14.504.554	100	80,28		
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.340.780	-	-	10.348.980	-	10.348.980	100	83,86		
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.090.144	7.333.102	-	-	31.423.047	38.756.149	100	85,95		
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.834.127	-	-	15.304.232	-	15.304.232	100	90,91		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.059.596.714	985.214.560	2.831.410.747	3.625.236.976	3.110.493.148	10.552.355.431	100	95,41		
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.757.768.614	892.872.560	2.776.632.647	3.548.375.096	3.085.057.898	10.302.938.201	100	95,77		
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.289.811	27.576.050	12.120.000	-	4.534.800	44.230.850	100	80		
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.560.124	-	-	30.203.275	9.061.350	39.264.625	100	84,33		
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	158.377.984	64.765.950	20.440.650	35.270.780	9.470.500	129.947.880	100	82,05		
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.600.181	-	22.217.450	11.387.825	2.368.600	35.973.875	100	86,48		
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.459.552.126	632.039.465	552.820.781	1.194.413.133	1.560.994.287	3.940.267.666	100	88,36		
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	154.127.632	52.076.566	11.150.115	26.451.317	64.209.634	153.887.632	100	99,84		
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.294.900	147.601.214	41.295.527	94.925.884	129.166.650	412.989.275	100	96,2		
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.807.000	14.480.000	30.530.000	54.450.000	70.095.000	169.555.000	100	65,51		
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	115.893.528	19.230.875	-	14.686.486	40.900.000	74.817.361	100	64,56		
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63.600.000	-	15.150.000	20.200.000	25.250.000	60.600.000	100	95,28		
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.361.967.810	196.255.831	163.488.007	590.359.734	407.878.689	1.357.982.261	100	99,71		
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	217.250.689	88.696.079	21.207.132	35.339.712	59.543.314	204.786.237	100	94,26		
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.858.610.567	113.698.900	270.000.000	358.000.000	763.951.000	1.505.649.900	100	81,01		
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.343.260.199	3.351.507.000	-	95.528.000	2.621.394.974	6.068.429.974	330,7	95,67		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.867.000.000	1.770.427.000	-	95.528.000	1.942.359.750	3.808.314.750	700	98,48		
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	225.500.000	-	-	-	15.900.000	15.900.000	100	7,05		
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.250.760.199	1.581.080.000	-	-	663.135.224	2.244.215.224	192,11	99,71		
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.988.342.911	781.563.868	1.044.054.206	861.036.674	698.879.369	3.385.534.117	100	84,89		
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.613.711	3.900.000	-	7.800.000	37.824.475	49.524.475	100	80,38		
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	742.025.000	108.072.988	159.243.886	197.287.754	18.150.254	482.754.882	100	65,06		
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.184.704.200	669.590.880	884.810.320	655.948.920	642.904.640	2.853.254.760	100	89,59		
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.776.742.086	349.145.783	652.921.276	788.283.049	1.893.940.388	3.684.290.496	100	97,55		
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.004.521.725	39.659.430	469.247.123	430.816.169	1.040.296.243	1.980.018.965	100	98,78		
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	847.880.361	208.700.353	84.028.000	154.799.736	399.785.395	847.313.484	100	99,93		
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	100	0		
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	924.340.000	100.786.000	99.646.153	202.667.144	453.858.750	856.958.047	100	92,71		
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**729.273.767.939**	**60.241.239.910**	**18.854.177.138**	**156.591.334.473**	**159.733.352.497**	395.420.104.018	**96,67**	**54,22**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.968.814.202	718.575.585	455.890.666	829.493.150	2.868.229.662	4.872.189.063	100	98,06		
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	907.545.037	310.934.111	104.811.996	25.765.470	446.703.432	888.215.009	100	97,87		
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	495.484.920	88.109.735	49.382.040	61.151.665	253.198.756	451.842.196	100	91,19		
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	395.351.233	28.697.739	30.320.696	93.510.120	200.038.591	352.567.146	100	89,18		
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	254.450.000	-	-	-	244.664.778	244.664.778	100	96,15		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	502.890.265	137.966.000	-	82.076.095	262.980.069	483.022.164	100	96,05		
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	355.999.405	81.084.000	-	112.843.065	156.706.532	350.633.597	100	98,49		
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	666.436.340	-	54.014.039	59.026.140	513.418.621	626.458.800	100	94		
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	760.097.080	-	191.081.895	154.712.098	347.894.290	693.688.283	100	91,26		
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	630.559.922	-	26.280.000	240.408.497	289.321.652	556.010.149	100	88,18		
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	71.784.000	-	-	153.302.941	225.086.941	0	0		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.655.724.968	1.654.102.237	403.398.650	1.837.368.940	3.564.325.536	7.459.195.363	100	77,25		
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	464.124.308	71.784.000	-	-	15.330.294	87.114.294	100	18,77		
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	343.873.000	61.883.000	-	-	177.831.000	239.714.000	100	69,71		
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	854.987.014	-	-	-	531.809.959	531.809.959	100	62,2		
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	694.862.131	37.260.000	-	96.960.000	313.282.000	447.502.000	100	64,4		
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1.131.894.605	64.058.300	162.528.400	486.925.740	209.907.500	923.419.940	100	81,58		
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	872.565.724	235.584.000	-	-	530.331.939	765.915.939	100	87,78		
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	2.819.616.662	746.063.560	73.292.950	1.116.853.100	581.968.000	2.518.177.610	100	89,31		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	942.720.493	224.381.000	-	-	558.982.311	783.363.311	100	83,1		
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	907.854.119	168.448.377	167.577.300	136.630.100	209.058.100	681.713.877	100	75,09		
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	130.454.000	-	-	-	113.719.233	113.719.233	100	87,17		
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	270.830.148	44.640.000	-	-	157.368.000	202.008.000	100	74,59		
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	221.942.764	-	-	-	164.737.200	164.737.200	100	74,23		
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	6.205.800.596	1.244.456.088	1.259.584.122	1.492.290.050	2.164.125.491	6.160.455.751	100	99,27		
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	472.352.247	14.882.747	96.102.200	92.715.247	264.769.673	468.469.867	100	99,18		
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	248.169.480	47.327.376	-	103.067.728	91.826.513	242.221.617	100	97,6		
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4.359.772.561	1.132.517.587	984.000.000	1.000.736.513	1.223.808.545	4.341.062.645	100	99,57		
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	320.727.513	-	19.350.000	112.805.023	185.305.164	317.460.187	100	98,98		
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	268.447.004	-	97.801.322	95.162.496	72.298.000	265.261.818	100	98,81		
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150.405.348	-	-	16.840.979	126.419.746	143.260.725	100	95,25		
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	385.926.443	49.728.378	62.330.600	70.962.064	199.697.850	382.718.892	100	99,17		
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	708.443.428.173	56.624.106.000	16.735.303.700	152.432.182.333	151.136.671.808	376.928.263.841	50	53,21		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	703.686.882.584	56.624.106.000	16.735.303.700	152.432.182.333	151.136.671.808	376.928.263.841	100	53,56		
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.756.545.589	-	-	-	-	-	0	0		
	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**3.840.317.915**	**255.871.201**	**352.582.034**	**578.843.945**	**1.826.583.989**	3.013.881.169	**100**	**78,48**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.840.317.915	255.871.201	352.582.034	578.843.945	1.826.583.989	3.013.881.169	100	78,48		
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	282.957.930	7.037.200	126.320.000	58.527.000	79.205.000	271.089.200	100	95,81		
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	208.132.153	5.580.000	19.508.400	14.546.300	157.382.700	197.017.400	100	94,66		
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	133.414.098	-	-	22.494.000	40.600.000	63.094.000	100	47,29		
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	819.935.584	36.759.000	79.020.800	116.739.000	402.457.600	634.976.400	100	77,44		
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	201.321.118	-	-	77.923.200	94.011.800	171.935.000	100	85,4		
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	523.247.897	40.110.601	22.600.000	10.806.000	342.303.000	415.819.601	100	79,47		
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	265.353.646	10.134.800	3.110.000	36.366.545	111.719.904	161.331.249	100	60,8		
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	197.032.000	62.054.000	20.189.634	53.500.000	5.300.000	141.043.634	100	71,58		
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	321.470.225	38.380.400	39.650.000	87.198.900	56.870.000	222.099.300	100	69,09		
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	310.147.222	15.500.800	18.320.000	40.333.000	200.175.200	274.329.000	100	88,45		
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	577.306.042	40.314.400	23.863.200	60.410.000	336.558.785	461.146.385	100	79,88		
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**40.088.025.869**	**9.522.228.233**	**5.799.736.995**	**6.860.767.621**	**9.554.027.190**	31.736.760.039	**114,87**	**79,17**	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	358.078.252	78.642.000	24.761.600	143.613.599	62.478.199	309.495.398	92,16	86,43		
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.001.294	41.467.200	11.233.600	62.806.799	13.361.199	128.868.798	66,67	80,54		
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.475.641	-	-	-	-	-	0	0		
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.763.204	-	-	4.000.000	-	4.000.000	200	69,41		
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.199.200	19.124.800	6.980.000	52.693.200	14.810.000	93.608.000	100	91,59		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.638.913	18.050.000	6.548.000	24.113.600	34.307.000	83.018.600	94,12	98,09		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.294.005.669	8.008.199.816	3.894.115.919	3.907.211.652	6.536.776.488	22.346.303.875	100	76,28		
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.294.005.669	8.008.199.816	3.894.115.919	3.907.211.652	6.536.776.488	22.346.303.875	100	76,28		
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	451.200.000	86.400.000	115.200.000	86.400.000	86.400.000	374.400.000	25	82,98		
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	451.200.000	86.400.000	115.200.000	86.400.000	86.400.000	374.400.000	25	82,98		
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.870.159.763	329.151.592	566.418.800	1.440.021.418	1.276.314.901	3.611.906.711	171,63	93,33		
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	395.391.097	72.489.600	-	123.906.000	181.808.000	378.203.600	100	95,65		
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	930.337.751	-	92.325.000	586.940.500	250.947.400	930.212.900	100	99,99		
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	214.500.000	27.225.000	-	51.475.000	35.680.000	114.380.000	108,33	53,32		
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	582.263.085	-	164.649.000	101.713.000	248.591.000	514.953.000	100	88,44		
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	130.000.000	-	32.600.000	32.600.000	47.700.000	112.900.000	100	86,85		
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.536.067.830	211.436.992	275.844.800	534.386.918	510.588.501	1.532.257.211	93,04	99,75		
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	81.600.000	18.000.000	1.000.000	9.000.000	1.000.000	29.000.000	600	35,54		
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.762.568.660	579.267.825	747.740.981	622.491.844	643.234.272	2.592.734.922	100	93,85		
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.971.012.500	444.000.000	591.800.000	447.744.000	448.440.000	1.931.984.000	100	98,02		
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	695.000.000	117.378.345	132.088.341	156.858.364	177.563.952	583.889.002	100	84,01		
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.556.160	17.889.480	23.852.640	17.889.480	17.230.320	76.861.920	100	79,6		
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.352.013.525	440.567.000	451.499.695	661.029.108	948.823.330	2.501.919.133	92,46	74,64		
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	748.200.000	64.518.000	136.160.549	132.822.546	276.292.364	609.793.459	100	81,5		
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	844.724.485	68.499.000	66.394.146	232.546.562	262.578.366	630.018.074	100	74,58		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.089.040	62.850.000	6.670.000	67.590.000	173.836.600	310.946.600	71,43	87,57		
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	614.900.000	164.900.000	70.000.000	10.000.000	-	244.900.000	100	39,83		
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.400.000	79.800.000	-	33.600.000	-	113.400.000	100	100		
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	675.700.000	-	172.275.000	184.470.000	236.116.000	592.861.000	83,33	87,74		
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**7.029.731.209**	**667.889.187**	**1.572.280.661**	**1.592.270.712**	**2.637.807.020**	6.470.247.580	**132,22**	**92,04**	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.029.731.209	667.889.187	1.572.280.661	1.592.270.712	2.637.807.020	6.470.247.580	132,22	92,04		
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	334.548.000	17.910.000	39.893.000	11.420.000	166.855.000	236.078.000	116,67	70,57		
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	340.660.090	23.308.340	66.416.900	74.625.689	175.277.998	339.628.927	100	99,7		
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	473.877.910	11.613.600	70.878.775	100.070.897	131.664.999	314.228.271	125	66,31		
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	323.904.056	7.930.000	74.980.500	7.000.000	41.601.000	131.511.500	550	40,6		
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	696.490.034	78.094.400	89.773.620	103.222.980	424.791.549	695.882.549	100	99,91		
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.463.670.492	88.097.800	695.559.372	435.157.046	243.676.311	1.462.490.529	100	99,92		
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	941.719.450	138.859.600	208.924.800	187.573.200	374.034.250	909.391.850	125	96,57		
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	143.153.248	3.948.000	32.653.400	33.940.000	72.545.448	143.086.848	100	99,95		
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	274.180.000	36.569.900	20.118.000	25.378.000	128.146.800	210.212.700	100	76,67		
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	134.718.000	12.870.000	32.628.000	7.250.000	80.400.000	133.148.000	100	98,83		
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	702.802.000	176.770.000	9.470.000	206.140.000	307.905.000	700.285.000	100	99,64		
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.852.000	-	-	-	20.192.000	20.192.000	100	88,36		
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	417.792.000	-	126.991.500	146.393.500	144.060.000	417.445.000	100	99,92		
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	659.050.929	71.917.547	94.482.794	230.250.400	259.904.665	656.555.406	66,67	99,62		
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100.313.000	-	9.510.000	23.849.000	66.752.000	100.111.000	100	99,8		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.03	**KEPEGAWAIAN**	**16.661.643.590**	**2.091.633.953**	**3.820.736.773**	**3.256.138.118**	**5.057.301.549**	14.225.810.393	**464,08**	**85,38**		
	5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.973.266.657**	**2.012.432.753**	**2.968.990.273**	**2.824.576.091**	**3.524.925.562**	11.330.924.679	**76,77**	**87,34**	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.036.400	-	18.300.000	20.531.400	39.987.200	78.818.600	50	94,92		
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.036.400	-	18.300.000	20.531.400	39.987.200	78.818.600	50	94,92		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.039.282.355	1.506.765.080	2.371.364.479	2.316.762.716	2.631.529.315	8.826.421.590	98,21	87,92		
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.039.282.355	1.506.765.080	2.371.364.479	2.316.762.716	2.631.529.315	8.826.421.590	98,21	87,92		
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	355.362.560	82.040.640	109.240.640	54.840.640	109.240.640	355.362.560	100	100		
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	355.362.560	82.040.640	109.240.640	54.840.640	109.240.640	355.362.560	100	100		
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.567.172	-	-	2.275.500	-	2.275.500	0	9,66		
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.667.172	-	-	-	-	-	0	0		
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.900.000	-	-	2.275.500	-	2.275.500	0	58,35		
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.022.661.050	191.210.936	143.690.526	185.162.700	326.865.700	846.929.862	85,37	82,82		
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.906.209	4.012.000	1.877.000	1.940.000	1.810.000	9.639.000	100	40,32		
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.470.273	46.541.000	15.870.000	23.537.000	68.343.000	154.291.000	63,86	65,25		
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.879.000	1.653.000	2.897.000	38.013.000	37.793.000	80.356.000	57,68	75,18		
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.343.568	20.266.000	6.083.000	6.083.000	20.574.000	53.006.000	73,91	53,9		
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	-	4.600.000	2.300.000	4.600.000	11.500.000	100	71,88		
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	531.062.000	109.570.000	112.363.526	113.289.700	193.745.700	528.968.926	102,11	99,61		
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	9.168.936	-	-	-	9.168.936	100	91,69		
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.949.605	83.821.814	76.738.367	74.807.624	94.133.682	329.501.487	100	72,11		
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.694.885	13.445.360	11.245.360	10.637.360	16.237.360	51.565.440	100	99,75		
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.640.000	51.072.774	39.789.327	51.266.584	52.192.642	194.321.327	100	60,42		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.614.720	19.303.680	25.703.680	12.903.680	25.703.680	83.614.720	100	100		
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.407.515	148.594.283	249.656.261	170.195.511	323.169.025	891.615.080	79,62	89,84		
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.171.835	27.946.283	78.458.261	84.702.511	116.471.025	307.578.080	100	87,59		
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	541.895.680	120.648.000	160.648.000	80.648.000	160.648.000	522.592.000	0	96,44		
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.340.000	-	10.550.000	4.845.000	46.050.000	61.445.000	59,24	61,85		
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**3.688.376.933**	**79.201.200**	**851.746.500**	**431.562.027**	**1.532.375.987**	2.894.885.714	**829,89**	**78,49**	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.096.674.514	56.731.200	269.434.000	215.018.812	191.623.227	732.807.239	2343,25	66,82		
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	23.469.731	-	-	11.255.780	4.312.014	15.567.794	100	66,33		
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	653.343.794	5.131.200	176.981.600	154.638.741	91.938.998	428.690.539	49,13	65,61		
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	35.112.306	-	-	-	8.328.615	8.328.615	2,29	23,72		
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	35.013.524	-	13.672.400	3.656.000	15.033.600	32.362.000	13750	92,43		
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	307.341.311	51.600.000	68.800.000	34.400.000	68.800.000	223.600.000	0	72,75		
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	42.393.848	-	9.980.000	11.068.291	3.210.000	24.258.291	158,11	57,22		
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	626.994.863	-	43.520.700	69.508.400	167.110.400	280.139.500	64,84	44,68		
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	36.135.521	-	-	21.672.400	12.325.400	33.997.800	63,5	94,08		
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	53.051.233	-	7.168.200	10.106.000	28.218.600	45.492.800	108,53	85,75		
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	537.808.109	-	36.352.500	37.730.000	126.566.400	200.648.900	22,5	37,31		
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.771.333.068	9.630.000	495.291.800	97.789.941	1.121.699.800	1.724.411.541	32,17	97,35		
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	36.455.539	-	-	36.355.425	-	36.355.425	0	99,73		
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.643.046.716	9.630.000	495.291.800	61.434.516	1.044.912.800	1.611.269.116	30	98,07		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	91.830.813	-	-	-	76.787.000	76.787.000	66,5	83,62		
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	193.374.488	12.840.000	43.500.000	49.244.874	51.942.560	157.527.434	97,9	81,46		
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	19.670.000	-	-	11.084.114	6.200.000	17.284.114	100	87,87		
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	68.684.000	6.420.000	32.860.000	18.060.760	9.590.000	66.930.760	100	97,45		
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	33.200.724	-	-	-	19.392.560	19.392.560	49,4	58,41		
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	24.391.172	-	-	16.360.000	320.000	16.680.000	78	68,39		
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30.073.696	6.420.000	5.420.000	-	10.380.000	22.220.000	110	73,89		
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	17.354.896	-	5.220.000	3.740.000	6.060.000	15.020.000	150	86,55		
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**866.940.682**	**12.298.400**	**155.680.060**	**411.992.705**	**53.742.400**	633.713.565	**600**	**73,1**		
	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**866.940.682**	**12.298.400**	**155.680.060**	**411.992.705**	**53.742.400**	633.713.565	**600**	**73,1**	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	866.940.682	12.298.400	155.680.060	411.992.705	53.742.400	633.713.565	600	73,1		
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	866.940.682	12.298.400	155.680.060	411.992.705	53.742.400	633.713.565	600	73,1		
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**7.952.554.211**	**1.022.584.448**	**-**	**2.569.286.478**	**2.934.320.763**	6.526.191.689	**527,84**	**82,06**		
	5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.437.622.065**	**1.022.584.448**	**-**	**2.403.975.073**	**2.706.054.687**	6.132.614.208	**631,7**	**82,45**	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.293.705	-	-	17.536.900	54.531.000	72.067.900	250	95,72		
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.082.610	-	-	14.116.900	46.958.000	61.074.900	100	95,31		
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.211.095	-	-	3.420.000	7.573.000	10.993.000	400	98,05		
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.866.886.105	749.441.173	-	1.547.522.584	1.937.827.606	4.234.791.363	134,62	87,01		
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.866.886.105	749.441.173	-	1.547.522.584	1.937.827.606	4.234.791.363	134,62	87,01		
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	291.200.000	67.200.000	-	112.000.000	112.000.000	291.200.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	291.200.000	67.200.000	-	112.000.000	112.000.000	291.200.000	100	100		
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.823.815	-	-	268.569.300	175.082.323	443.651.623	1268,75	89,12		
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.519.233	-	-	58.650.610	40.262.323	98.912.933	1666,67	77,57		
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	-	-	14.500.000	9.920.000	24.420.000	3333,33	81,4		
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.603.711	-	-	11.994.000	42.500.000	54.494.000	25	84,35		
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.500.871	-	-	140.024.690	45.600.000	185.624.690	0	94,95		
	5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	80.200.000	-	-	43.400.000	36.800.000	80.200.000	50	100		
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.393.440	153.143.275	-	303.796.163	277.790.258	734.729.696	550	93,08		
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000	9.143.275	-	67.196.163	36.822.578	113.162.016	33,33	72,54		
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	633.393.440	144.000.000	-	236.600.000	240.967.680	621.567.680	1066,67	98,13		
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	917.025.000	52.800.000	-	154.550.126	148.823.500	356.173.626	434,17	38,84		
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	136.600.000	-	-	61.750.126	40.698.500	102.448.626	100	75		
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.625.000	-	-	-	20.125.000	20.125.000	2,5	72,85		
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	752.800.000	52.800.000	-	92.800.000	88.000.000	233.600.000	1200	31,03		
	5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**514.932.146**	**-**	**-**	**165.311.405**	**228.266.076**	393.577.481	**77,78**	**76,43**	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	327.402.670	-	-	116.450.187	208.290.768	324.740.955	100	99,19		
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	327.402.670	-	-	116.450.187	208.290.768	324.740.955	100	99,19		
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	71.160.404	-	-	27.123.874	9.987.580	37.111.454	33,33	52,15		
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	71.160.404	-	-	27.123.874	9.987.580	37.111.454	33,33	52,15		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	116.369.072	-	-	21.737.344	9.987.728	31.725.072	100	27,26		
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	116.369.072	-	-	21.737.344	9.987.728	31.725.072	100	27,26		
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**	**94.000.000**	**-**	**9.492.400**	**8.100.000**	**58.766.700**	76.359.100	**100**	**81,23**		
	5.06.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**94.000.000**	**-**	**9.492.400**	**8.100.000**	**58.766.700**	76.359.100	**100**	**81,23**	Sekretariat Daerah	
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	94.000.000	-	9.492.400	8.100.000	58.766.700	76.359.100	100	81,23		
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	-	-	-	12.193.500	12.193.500	0	0		
	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	16.462.000	-	-	-	-	-	0	0		
	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	77.538.000	-	9.492.400	8.100.000	46.573.200	64.165.600	100	82,75		
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**16.540.904.111**	**1.996.175.034**	**3.082.515.480**	**4.152.376.605**	**4.647.666.371**	13.878.733.490	**89,76**	**83,91**		
	6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.654.697.825**	**1.849.975.099**	**2.806.724.703**	**3.106.222.940**	**3.399.124.079**	11.162.046.821	**84,42**	**81,75**	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.278.400	11.762.000	7.581.200	173.521.349	148.173.347	341.037.896	100	92,1		
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.020.000	11.762.000	7.581.200	83.262.949	148.173.347	250.779.496	100	89,56		
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.258.400	-	-	80.258.400	-	80.258.400	100	100		
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	100	100		
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.923.604.842	1.354.734.834	2.177.468.506	2.011.485.706	2.433.048.324	7.976.737.370	100	80,38		
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.910.650.542	1.354.734.834	2.177.468.506	1.998.531.406	2.433.048.324	7.963.783.070	100	80,36		
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.954.300	-	-	12.954.300	-	12.954.300	100	100		
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.000.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	38.400.000	124.800.000	100	86,67		
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	144.000.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	38.400.000	124.800.000	100	86,67		
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	0	0		
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.846.821.499	352.312.779	274.571.552	540.408.502	530.885.762	1.698.178.595	98,32	91,95		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.386.971	6.950.224	14.724.100	10.137.926	20.368.142	52.180.392	100	99,61		
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.248.708	38.775.707	46.678.461	31.177.567	49.718.701	166.350.436	100	98,29		
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	346.976.000	40.738.000	61.739.600	129.797.200	110.612.000	342.886.800	100	98,82		
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	186.029.483	19.288.215	85.400.000	33.400.954	46.741.132	184.830.301	100	99,36		
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.500.000	-	11.850.000	31.950.000	13.700.000	57.500.000	100	100		
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	865.280.337	234.560.633	37.657.891	290.395.955	273.945.787	836.560.266	88,24	96,68		
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	169.400.000	12.000.000	16.521.500	13.548.900	15.800.000	57.870.400	100	34,16		
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.986.679	-	80.204.000	-	-	80.204.000	17,78	67,41		
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.986.679	-	80.204.000	-	-	80.204.000	53,33	67,41		
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.280.430	54.742.332	109.509.942	92.999.235	55.653.388	312.904.897	100	83,6		
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.090.750	21.800.000	43.052.000	46.473.500	9.100.000	120.425.500	100	85,96		
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.671.600	23.342.332	52.698.903	39.646.216	33.273.869	148.961.320	100	78,12		
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.518.080	9.600.000	13.759.039	6.879.519	13.279.519	43.518.077	100	100		
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	876.725.975	47.623.154	118.989.503	268.608.148	192.963.258	628.184.063	100	71,65		
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338.617.250	19.603.154	53.509.503	160.946.148	95.910.258	329.969.063	100	97,45		
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.300.000	19.200.000	25.600.000	12.800.000	20.800.000	78.400.000	100	24,71		
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.808.725	8.820.000	39.880.000	94.862.000	76.253.000	219.815.000	100	99,55		
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**2.059.600.286**	**88.618.547**	**210.919.571**	**797.163.761**	**878.688.192**	1.975.390.071	**100**	**95,91**	Inspektorat Daerah	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.647.070.784	66.881.747	190.962.571	661.830.259	689.915.487	1.609.590.064	100	97,72		
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	485.070.000	14.473.547	-	142.451.475	323.580.510	480.505.532	100	99,06		
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	302.788.000	28.200.000	-	223.836.000	42.000.000	294.036.000	100	97,11		
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	22.454.000	-	-	13.200.000	7.924.800	21.124.800	100	94,08		
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	243.097.384	-	16.957.200	89.035.384	132.557.500	238.550.084	100	98,13		
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	289.252.000	-	-	140.500.000	134.114.677	274.614.677	100	94,94		
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	304.409.400	24.208.200	174.005.371	52.807.400	49.738.000	300.758.971	100	98,8		
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	412.529.502	21.736.800	19.957.000	135.333.502	188.772.705	365.800.007	100	88,67		
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.250.000	-	-	12.500.000	-	12.500.000	100	76,92		
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	396.279.502	21.736.800	19.957.000	122.833.502	188.772.705	353.300.007	100	89,15		
	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**826.606.000**	**57.581.388**	**64.871.206**	**248.989.904**	**369.854.100**	741.296.598	**100**	**89,68**	Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	826.606.000	57.581.388	64.871.206	248.989.904	369.854.100	741.296.598	100	89,68		
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	429.054.000	57.581.388	31.434.501	151.963.488	173.352.600	414.331.977	100	96,57		
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	139.916.000	-	-	46.642.400	90.681.100	137.323.500	100	98,15		
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	246.386.000	-	33.436.705	39.134.016	105.820.400	178.391.121	100	72,4		
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	11.250.000	-	-	11.250.000	-	11.250.000	100	100		
	7.01	**KECAMATAN**	**161.647.936.449**	**18.710.614.191**	**29.572.566.781**	**45.257.783.269**	**58.286.577.512**	151.827.541.753	**91,45**	**93,92**		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.138.959.929**	**1.588.394.858**	**2.246.756.780**	**3.151.629.044**	**2.296.399.973**	9.283.180.655	**83,33**	**91,56**	Kecamatan Bengkalis	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.462.000	33.689.000	21.600.000	29.947.000	26.128.000	111.364.000	100	97,29		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.435.000	13.907.000	6.500.000	6.485.000	4.415.000	31.307.000	100	99,59		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.402.000	19.782.000	15.100.000	23.462.000	6.088.000	64.432.000	100	95,59		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.625.000	-	-	-	15.625.000	15.625.000	100	100		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.374.755.520	1.195.471.712	1.795.963.163	2.296.272.730	1.433.723.858	6.721.431.463	50	91,14		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.374.755.520	1.195.471.712	1.795.963.163	2.296.272.730	1.433.723.858	6.721.431.463	100	91,14		
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	332.800.000	83.200.000	83.200.000	83.200.000	83.200.000	332.800.000	100	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	332.800.000	83.200.000	83.200.000	83.200.000	83.200.000	332.800.000	100	100		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	727.387.464	88.655.784	88.428.701	233.259.064	239.479.208	649.822.757	85,71	89,34		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.612.579	4.137.000	-	-	3.372.489	7.509.489	100	87,19		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.064.497	21.014.169	12.440.791	17.100.160	13.781.420	64.336.540	100	94,52		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.780.000	16.550.000	11.900.000	25.585.000	43.480.000	97.515.000	100	96,76		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.240.579	8.357.615	26.365.410	24.405.515	44.649.299	103.777.839	100	87,77		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000	1.960.000	4.590.000	2.920.000	5.530.000	15.000.000	100	55,56		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.689.809	36.637.000	33.132.500	163.248.389	128.666.000	361.683.889	100	89,37		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	410.651.869	-	-	168.555.895	242.095.974	410.651.869	75	100		
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	144.890.563	-	-	105.852.551	39.038.012	144.890.563	100	100		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	258.371.808	-	-	62.703.344	195.668.464	258.371.808	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.389.498	-	-	-	7.389.498	7.389.498	100	100		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.404.930	85.424.362	103.697.625	114.665.355	75.525.533	379.312.875	100	78,63		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	171.237.375	39.000.000	52.744.000	60.273.240	13.761.375	165.778.615	100	96,81		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.574.435	39.776.082	44.305.345	47.743.835	55.115.878	186.941.140	100	65,69		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.593.120	6.648.280	6.648.280	6.648.280	6.648.280	26.593.120	100	100		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.498.146	101.954.000	153.867.291	225.729.000	196.247.400	677.797.691	100	97,32		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.963.667	23.734.000	42.637.291	66.119.000	54.862.000	187.352.291	100	90,96		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	312.000.000	72.000.000	86.000.000	82.000.000	72.000.000	312.000.000	100	100		
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.534.479	6.220.000	25.230.000	77.610.000	69.385.400	178.445.400	100	99,95		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.778.546.113**	**110.394.991**	**70.323.200**	**533.251.026**	**997.126.096**	1.711.095.313	**100**	**96,21**	Kecamatan Bengkalis	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	652.106.524	-	-	412.202.382	235.554.142	647.756.524	100	99,33		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	652.106.524	-	-	412.202.382	235.554.142	647.756.524	100	99,33		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	478.472.255	81.635.000	70.323.200	121.048.644	142.364.611	415.371.455	100	86,81		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	478.472.255	81.635.000	70.323.200	121.048.644	142.364.611	415.371.455	100	86,81		
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	43.039.991	28.759.991	-	-	14.280.000	43.039.991	100	100		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	43.039.991	28.759.991	-	-	14.280.000	43.039.991	100	100		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	604.927.343	-	-	-	604.927.343	604.927.343	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	604.927.343	-	-	-	604.927.343	604.927.343	100	100		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**4.672.791.392**	**291.999.612**	**205.328.462**	**1.738.687.391**	**2.308.129.558**	4.544.145.023	**100**	**97,25**	Kecamatan Bengkalis	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	428.957.316	-	-	-	428.957.316	428.957.316	100	100		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	428.957.316	-	-	-	428.957.316	428.957.316	100	100		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.001.638.468	291.999.612	205.328.462	1.597.537.242	1.784.497.242	3.879.362.558	100	96,94		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	442.961.105	-	-	165.379.957	276.539.589	441.919.546	100	99,76		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.558.677.363	291.999.612	205.328.462	1.432.157.285	1.507.957.653	3.437.443.012	100	96,59		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	242.195.608	-	-	141.150.149	94.675.000	235.825.149	100	97,37		
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	242.195.608	-	-	141.150.149	94.675.000	235.825.149	100	97,37		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**21.835.000**	**6.670.000**	**-**	**-**	**15.165.000**	21.835.000	**100**	**100**	Kecamatan Bengkalis	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.235.000	-	-	-	7.235.000	7.235.000	100	100		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.235.000	-	-	-	7.235.000	7.235.000	100	100		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.600.000	6.670.000	-	-	7.930.000	14.600.000	100	100		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.600.000	6.670.000	-	-	7.930.000	14.600.000	100	100		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.815.000**	**-**	**-**	**-**	**10.815.000**	10.815.000	**33,33**	**100**	Kecamatan Bengkalis	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.815.000	-	-	-	10.815.000	10.815.000	33,33	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.815.000	-	-	-	10.815.000	10.815.000	100	100		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**31.919.540**	**-**	**-**	**-**	**31.919.500**	31.919.500	**100**	**100**	Kecamatan Bengkalis	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.919.540	-	-	-	31.919.500	31.919.500	100	100		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.100.000	-	-	-	12.100.000	12.100.000	100	100		
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.819.540	-	-	-	19.819.500	19.819.500	100	100		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.227.262.986**	**703.239.615**	**1.339.689.065**	**1.129.755.582**	**1.653.331.373**	4.826.015.635	**75,3**	**92,32**	Kecamatan Bantan	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.423.000	-	2.450.000	2.850.000	26.511.200	31.811.200	16,67	70,03		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.918.000	-	2.450.000	2.850.000	26.511.200	31.811.200	33,33	83,89		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.505.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.426.900.142	570.257.234	857.651.950	817.353.198	907.421.729	3.152.684.111	95,45	92		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.900.142	570.257.234	857.651.950	817.353.198	907.421.729	3.152.684.111	95,45	92		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	187.200.000	43.200.000	57.600.000	28.800.000	57.600.000	187.200.000	100	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	187.200.000	43.200.000	57.600.000	28.800.000	57.600.000	187.200.000	100	100		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.847.058	11.400.000	128.623.500	111.568.600	367.466.500	619.058.600	87,4	98,29		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.612	-	-	4.600.000	-	4.600.000	0	92,21		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.036.932	-	54.500.000	20.000.000	86.295.000	160.795.000	100	98,62		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.397.775	-	-	-	6.000.000	6.000.000	100	93,78		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.000.000	-	45.000.000	46.500.000	118.100.000	209.600.000	100	99,34		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.363.515	-	-	-	19.222.000	19.222.000	100	99,27		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.460.224	-	13.923.500	32.868.600	115.449.500	162.241.600	99,2	99,25		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	54.400.000	11.400.000	15.200.000	7.600.000	15.200.000	49.400.000	100	90,81		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.746.137	-	-	-	32.000.000	32.000.000	50	30,26		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	32.000.000	-	-	-	32.000.000	32.000.000	100	100		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.746.137	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.649.920	25.582.381	28.343.434	34.753.238	39.981.944	128.660.997	100	89,57		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.349.920	8.400.000	11.200.000	5.600.000	14.465.920	39.665.920	100	91,5		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.500.000	12.382.381	10.743.434	25.953.238	19.116.024	68.195.077	100	85,78		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.800.000	4.800.000	6.400.000	3.200.000	6.400.000	20.800.000	100	100		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.496.729	52.800.000	265.020.181	134.430.546	222.350.000	674.600.727	82,14	97,98		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.916.000	-	57.000.000	71.200.000	136.700.000	264.900.000	100	99,24		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.760.000	-	-	15.630.000	15.250.000	30.880.000	28,57	72,22		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228.800.000	52.800.000	70.400.000	35.200.000	70.400.000	228.800.000	100	100		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.020.729	-	137.620.181	12.400.546	-	150.020.727	100	100		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**828.641.195**	**34.200.000**	**448.181.195**	**22.800.000**	**260.162.235**	765.343.430	**105,56**	**92,36**	Kecamatan Bantan	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	680.441.195	-	402.581.195	-	214.562.235	617.143.430	108,33	90,7		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.396.645	-	26.396.645	-	-	26.396.645	100	100		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	654.044.550	-	376.184.550	-	214.562.235	590.746.785	116,67	90,32		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	148.200.000	34.200.000	45.600.000	22.800.000	45.600.000	148.200.000	100	100		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	148.200.000	34.200.000	45.600.000	22.800.000	45.600.000	148.200.000	100	100		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**912.573.546**	**-**	**25.000.000**	**18.300.000**	**869.573.546**	912.873.546	**100**	**100,03**	Kecamatan Bantan	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	756.926.422	-	-	18.300.000	738.926.422	757.226.422	100	100,04		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	756.926.422	-	-	18.300.000	738.926.422	757.226.422	100	100,04		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	155.647.124	-	25.000.000	-	130.647.124	155.647.124	100	100		
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	155.647.124	-	25.000.000	-	130.647.124	155.647.124	100	100		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**95.290.000**	**-**	**-**	**-**	**25.440.000**	25.440.000	**50**	**26,7**	Kecamatan Bantan	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	69.850.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	69.850.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.440.000	-	-	-	25.440.000	25.440.000	100	100		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.440.000	-	-	-	25.440.000	25.440.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**167.878.628**	**-**	**-**	**143.768.628**	**24.110.000**	167.878.628	**66,67**	**100**	Kecamatan Bantan	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	167.878.628	-	-	143.768.628	24.110.000	167.878.628	66,67	100		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	143.768.628	-	-	143.768.628	-	143.768.628	100	100		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.110.000	-	-	-	24.110.000	24.110.000	100	100		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**43.170.000**	**-**	**-**	**-**	**43.170.000**	43.170.000	**100**	**100**	Kecamatan Bantan	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.170.000	-	-	-	43.170.000	43.170.000	100	100		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	43.170.000	-	-	-	43.170.000	43.170.000	100	100		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.071.323.653**	**1.002.007.019**	**2.609.564.781**	**2.957.569.629**	**4.514.461.027**	11.083.602.456	**57,19**	**156,74**	Kecamatan Bukit Batu	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.350.000	7.490.000	9.200.000	12.560.000	23.850.000	53.100.000	50	194,15		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.850.000	5.780.000	8.610.000	11.440.000	23.850.000	49.680.000	100	208,3		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	1.710.000	590.000	1.120.000	-	3.420.000	0	97,71		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.620.503.363	653.511.877	1.649.073.186	2.632.541.044	3.764.357.345	8.699.483.452	232,77	188,28		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.620.503.363	653.511.877	1.649.073.186	2.632.541.044	3.764.357.345	8.699.483.452	232,77	188,28		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	249.600.000	57.600.000	76.800.000	38.400.000	76.800.000	249.600.000	100	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	249.600.000	57.600.000	76.800.000	38.400.000	76.800.000	249.600.000	100	100		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.040.380.601	102.266.900	291.604.850	172.316.450	364.829.200	931.017.400	44,66	89,49		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.214.113	3.704.300	12.013.900	7.075.950	19.415.000	42.209.150	38,46	99,99		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.169.061	8.836.600	20.510.550	18.492.300	26.350.000	74.189.450	35	97,4		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.750.000	12.980.000	106.650.000	47.160.000	58.280.000	225.070.000	27,18	95,88		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.438.827	3.000.000	18.955.200	19.023.000	30.055.000	71.033.200	40	95,42		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	118.500.000	20.300.000	13.500.000	19.400.000	27.600.000	80.800.000	40	68,19		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.308.600	41.446.000	103.975.200	53.165.200	187.129.200	385.715.600	32	87,21		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.000.000	12.000.000	16.000.000	8.000.000	16.000.000	52.000.000	100	100		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.705.028	24.216.000	358.216.000	-	-	382.432.000	0	150,74		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	85.300.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	12.108.000	179.108.000	-	-	191.216.000	0	0		
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.405.028	12.108.000	179.108.000	-	-	191.216.000	0	113,55		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.068.470	89.500.319	121.180.609	40.556.060	129.195.132	380.432.120	58,33	85,67		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	183.818.470	35.400.000	57.386.200	23.600.000	55.364.400	171.750.600	50	93,43		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.450.000	48.300.319	55.394.409	12.756.060	65.430.732	181.881.520	25	77,91		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.800.000	5.800.000	8.400.000	4.200.000	8.400.000	26.800.000	100	100		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.716.191	67.421.923	103.490.136	61.196.075	155.429.350	387.537.484	55,83	88,94		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.706.540	-	-	8.020.406	31.700.000	39.720.406	100	64,37		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.743.506	7.751.923	8.130.136	3.675.669	33.643.350	53.201.078	50	62,78		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.600.000	57.600.000	76.800.000	38.400.000	76.800.000	249.600.000	40	100		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.666.145	1.035.000	9.280.000	5.550.000	6.643.000	22.508.000	33,33	56,74		
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1.035.000	9.280.000	5.550.000	6.643.000	22.508.000	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**873.232.746**	**37.200.000**	**436.497.400**	**119.464.000**	**176.192.000**	769.353.400	**35**	**88,1**	Kecamatan Bukit Batu	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	712.517.746	-	436.497.400	51.864.000	127.192.000	615.553.400	20	86,39		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.568.396	-	34.559.000	-	-	34.559.000	0	99,97		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	677.949.350	-	401.938.400	51.864.000	127.192.000	580.994.400	40	85,7		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	155.600.000	37.200.000	-	67.600.000	49.000.000	153.800.000	100	98,84		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	155.600.000	37.200.000	-	67.600.000	49.000.000	153.800.000	100	98,84		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.115.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.115.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.355.716.766**	**288.101.750**	**84.750.000**	**337.802.000**	**1.356.185.750**	2.066.839.500	**34,58**	**87,74**	Kecamatan Bukit Batu	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.071.897.330	50.400.000	41.400.000	31.600.000	935.804.100	1.059.204.100	83,33	98,82		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.071.897.330	50.400.000	41.400.000	31.600.000	935.804.100	1.059.204.100	83,33	98,82		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.090.689.436	200.881.750	9.200.000	272.702.000	376.381.650	859.165.400	12,5	78,77		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	978.689.436	200.881.750	9.200.000	272.702.000	376.381.650	859.165.400	25	87,79		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	193.130.000	36.820.000	34.150.000	33.500.000	44.000.000	148.470.000	30	76,88		
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	193.130.000	36.820.000	34.150.000	33.500.000	44.000.000	148.470.000	30	76,88		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**46.256.896**	**2.700.000**	**21.597.750**	**3.525.000**	**-**	27.822.750	**0**	**60,15**	Kecamatan Bukit Batu	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46.256.896	2.700.000	21.597.750	3.525.000	-	27.822.750	0	60,15		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	46.256.896	2.700.000	21.597.750	3.525.000	-	27.822.750	0	60,15		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**253.217.520**	**19.014.850**	**4.075.400**	**159.182.600**	**60.800.000**	243.072.850	**16,67**	**95,99**	Kecamatan Bukit Batu	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	253.217.520	19.014.850	4.075.400	159.182.600	60.800.000	243.072.850	16,67	95,99		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	211.801.520	-	-	150.182.600	60.800.000	210.982.600	33,33	99,61		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	41.416.000	19.014.850	4.075.400	9.000.000	-	32.090.250	0	77,48		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**19.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**0**	**0**	Kecamatan Bukit Batu	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.800.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.800.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.328.398.485**	**1.106.566.036**	**1.553.636.367**	**1.550.626.750**	**1.711.131.399**	5.921.960.552	**76,67**	**93,58**	Kecamatan Siak Kecil	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.000.000	-	13.000.000	-	38.000.000	51.000.000	33,33	79,69		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.000.000	-	13.000.000	-	38.000.000	51.000.000	66,67	100		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.871.124.861	843.669.902	1.240.759.223	1.221.489.461	1.394.307.914	4.700.226.500	100	96,49		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.871.124.861	843.669.902	1.240.759.223	1.221.489.461	1.394.307.914	4.700.226.500	100	96,49		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	166.400.000	38.400.000	51.200.000	25.600.000	51.200.000	166.400.000	100	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	166.400.000	38.400.000	51.200.000	25.600.000	51.200.000	166.400.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.084.268	116.500.000	133.430.000	174.151.000	151.322.000	575.403.000	85,71	93,25		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.474.750	-	14.230.000	3.496.000	9.742.000	27.468.000	100	99,98		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.800.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	11.800.000	36.800.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.424.518	20.000.000	-	20.000.000	30.000.000	70.000.000	100	96,65		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.000.000	6.000.000	8.000.000	18.000.000	6.000.000	38.000.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.785.000	47.000.000	74.900.000	108.255.000	70.980.000	301.135.000	100	90,22		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	108.600.000	36.000.000	28.800.000	14.400.000	22.800.000	102.000.000	100	93,92		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.287.616	-	-	32.000.000	50.287.616	82.287.616	100	100		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	32.000.000	-	-	32.000.000	-	32.000.000	100	100		
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.287.616	-	-	-	50.287.616	50.287.616	100	100		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.770.240	18.595.134	17.413.144	50.626.289	26.013.869	112.648.436	88,89	75,72		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.200.000	4.200.000	5.600.000	2.800.000	5.600.000	18.200.000	100	100		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.600.000	14.395.134	11.813.144	26.809.409	20.413.869	73.431.556	100	73,73		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.970.240	-	-	21.016.880	-	21.016.880	66,67	67,86		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.731.500	89.401.000	97.834.000	46.760.000	-	233.995.000	66,67	61,78		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.531.500	32.500.000	26.634.000	8.560.000	-	67.694.000	100	49,58		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.200.000	56.901.000	71.200.000	38.200.000	-	166.301.000	100	68,66		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**484.650.000**	**53.150.000**	**44.800.000**	**34.100.000**	**-**	132.050.000	**77,08**	**27,25**	Kecamatan Siak Kecil	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.950.000	24.950.000	7.200.000	3.600.000	-	35.750.000	100	83,24		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.550.000	19.550.000	-	-	-	19.550.000	100	100		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.400.000	5.400.000	7.200.000	3.600.000	-	16.200.000	100	69,23		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	122.200.000	28.200.000	37.600.000	18.800.000	-	84.600.000	75	69,23		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	122.200.000	28.200.000	37.600.000	18.800.000	-	84.600.000	75	69,23		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	319.500.000	-	-	11.700.000	-	11.700.000	33,33	3,66		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	319.500.000	-	-	11.700.000	-	11.700.000	33,33	3,66		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**922.986.362**	**54.350.000**	**100.970.056**	**51.367.740**	**-**	206.687.796	**85,29**	**22,39**	Kecamatan Siak Kecil	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	793.106.050	54.350.000	74.670.056	38.367.740	-	167.387.796	100	21,11		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	793.106.050	54.350.000	74.670.056	38.367.740	-	167.387.796	100	21,11		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	129.880.312	-	26.300.000	13.000.000	-	39.300.000	70,59	30,26		
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	129.880.312	-	26.300.000	13.000.000	-	39.300.000	70,59	30,26		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**111.505.000**	**-**	**-**	**18.640.000**	**-**	18.640.000	**41,67**	**16,72**	Kecamatan Siak Kecil	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	111.505.000	-	-	18.640.000	-	18.640.000	41,67	16,72		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.865.000	-	-	7.440.000	-	7.440.000	50	23,35		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	79.640.000	-	-	11.200.000	-	11.200.000	33,33	14,06		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**280.669.871**	**-**	**-**	**252.525.000**	**-**	252.525.000	**45**	**89,97**	Kecamatan Siak Kecil	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	280.669.871	-	-	252.525.000	-	252.525.000	45	89,97		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.109.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	234.535.871	-	-	234.525.000	-	234.525.000	85	100		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.025.000	-	-	18.000.000	-	18.000.000	50	51,39		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**10.225.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**0**	**0**	Kecamatan Siak Kecil	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.225.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.700.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.525.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.788.812.183**	**805.221.570**	**996.051.783**	**931.737.554**	**1.316.433.920**	4.049.444.827	**96,92**	**84,56**	Kecamatan Bandar Laksamana	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.473.379	21.180.000	17.640.000	39.397.000	47.882.000	126.099.000	100	94,48		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.090.000	21.180.000	17.640.000	39.022.000	47.882.000	125.724.000	100	94,47		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	383.379	-	-	375.000	-	375.000	100	97,81		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.949.076.752	415.757.700	625.693.933	594.166.738	719.095.344	2.354.713.715	100	79,85		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.949.076.752	415.757.700	625.693.933	594.166.738	719.095.344	2.354.713.715	100	79,85		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.800.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	38.400.000	124.800.000	100	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	124.800.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	38.400.000	124.800.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	630.061.496	120.681.457	123.235.902	126.055.477	218.179.548	588.152.384	99,66	93,35		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.617.902	-	17.617.902	-	-	17.617.902	100	100		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.618.730	42.807.355	-	17.548.561	25.262.814	85.618.730	114,29	100		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.500.000	-	25.750.000	34.605.916	24.899.084	85.255.000	100	75,78		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.470.252	7.468.102	5.750.000	-	21.898.650	35.116.752	83,33	75,57		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.800.000	4.800.000	7.200.000	4.800.000	12.000.000	28.800.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.654.612	48.206.000	44.618.000	57.501.000	110.919.000	261.244.000	100	99,09		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.400.000	17.400.000	22.300.000	11.600.000	23.200.000	74.500.000	100	98,81		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.200.000	99.202.413	95.281.948	71.526.339	131.380.112	397.390.812	94,44	84,34		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	244.600.000	55.600.000	72.000.000	37.400.000	74.800.000	239.800.000	100	98,04		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000	43.602.413	21.681.948	34.126.339	56.580.112	155.990.812	83,33	69,33		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.600.000	-	1.600.000	-	-	1.600.000	100	100		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.200.556	119.600.000	95.800.000	81.392.000	161.496.916	458.288.916	88,89	95,44		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.490.556	80.000.000	43.000.000	45.900.000	107.101.916	276.001.916	66,67	92,78		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.800.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	38.400.000	124.800.000	100	100		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.910.000	10.800.000	14.400.000	16.292.000	15.995.000	57.487.000	100	99,27		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**284.968.630**	**46.029.330**	**58.385.000**	**71.057.080**	**39.555.000**	215.026.410	**87,5**	**75,46**	Kecamatan Bandar Laksamana	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75.839.330	22.029.330	-	41.750.000	-	63.779.330	83,33	84,1		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.029.330	22.029.330	-	-	-	22.029.330	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.810.000	-	-	41.750.000	-	41.750.000	66,67	77,59		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	109.793.120	24.000.000	32.000.000	19.538.080	32.000.000	107.538.080	100	97,95		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	109.793.120	24.000.000	32.000.000	19.538.080	32.000.000	107.538.080	100	97,95		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	99.336.180	-	26.385.000	9.769.000	7.555.000	43.709.000	83,33	44		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	99.336.180	-	26.385.000	9.769.000	7.555.000	43.709.000	83,33	44		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.490.631.966**	**67.200.000**	**116.457.281**	**78.995.000**	**1.131.873.134**	1.394.525.415	**100**	**93,55**	Kecamatan Bandar Laksamana	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.264.280.694	67.200.000	87.800.000	44.800.000	1.046.580.694	1.246.380.694	100	98,58		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.264.280.694	67.200.000	87.800.000	44.800.000	1.046.580.694	1.246.380.694	100	98,58		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	226.351.272	-	28.657.281	34.195.000	85.292.440	148.144.721	100	65,45		
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	226.351.272	-	28.657.281	34.195.000	85.292.440	148.144.721	100	65,45		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**91.580.000**	**5.400.000**	**15.900.000**	**10.020.000**	**24.360.000**	55.680.000	**91,67**	**60,8**	Kecamatan Bandar Laksamana	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72.300.000	5.400.000	15.900.000	1.500.000	14.600.000	37.400.000	100	51,73		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	72.300.000	5.400.000	15.900.000	1.500.000	14.600.000	37.400.000	100	51,73		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.280.000	-	-	8.520.000	9.760.000	18.280.000	83,33	94,81		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	19.280.000	-	-	8.520.000	9.760.000	18.280.000	83,33	94,81		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**276.281.859**	**-**	**-**	**224.227.279**	**23.860.000**	248.087.279	**59,24**	**89,79**	Kecamatan Bandar Laksamana	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	276.281.859	-	-	224.227.279	23.860.000	248.087.279	59,24	89,79		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	62.776.443	-	-	30.111.863	23.860.000	53.971.863	92	85,97		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200.115.416	-	-	194.115.416	-	194.115.416	85,71	97		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.390.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**42.736.216**	**-**	**16.395.941**	**-**	**26.340.275**	42.736.216	**100**	**100**	Kecamatan Bandar Laksamana	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.736.216	-	16.395.941	-	26.340.275	42.736.216	100	100		
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	42.736.216	-	16.395.941	-	26.340.275	42.736.216	100	100		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.376.811.565**	**1.387.637.554**	**2.174.773.139**	**2.639.254.300**	**2.657.435.126**	8.859.100.119	**91,55**	**94,48**	Kecamatan Rupat	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	232.980.000	9.900.000	45.170.000	19.500.000	158.408.263	232.978.263	116,67	100		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.100.000	-	25.300.000	13.500.000	94.299.243	133.099.243	133,33	100		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.880.000	9.900.000	19.870.000	6.000.000	64.109.020	99.879.020	100	100		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.377.449.877	915.681.189	1.400.541.559	1.313.422.246	1.501.740.974	5.131.385.968	96,51	95,42		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.371.149.877	914.121.189	1.398.981.559	1.313.422.246	1.498.560.974	5.125.085.968	93,02	95,42		
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.300.000	1.560.000	1.560.000	-	3.180.000	6.300.000	100	100		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	416.000.000	96.000.000	128.000.000	64.000.000	123.200.000	411.200.000	100	98,85		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	416.000.000	96.000.000	128.000.000	64.000.000	123.200.000	411.200.000	100	98,85		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	967.403.630	105.343.028	220.091.596	208.225.947	433.707.405	967.367.976	92,36	100		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.891.135	-	21.891.135	-	-	21.891.135	46,51	100		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.403.543	20.344.607	12.819.765	4.239.171	-	37.403.543	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.000.000	30.000.000	20.000.000	85.990.000	72.010.000	208.000.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.397.952	6.998.421	7.997.157	8.366.720	-	23.362.298	100	99,85		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.300.000	-	11.325.000	-	33.975.000	45.300.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.411.000	30.000.000	122.058.539	97.630.056	283.722.405	533.411.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	98.000.000	18.000.000	24.000.000	12.000.000	44.000.000	98.000.000	100	100		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	369.567.000	-	-	369.567.000	-	369.567.000	0	100		
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.567.000	-	-	320.567.000	-	320.567.000	0	100		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.000.000	-	-	49.000.000	-	49.000.000	0	100		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.302.376	47.122.734	78.399.984	47.852.376	96.921.853	270.296.947	88,89	84,39		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83.347.176	21.796.894	22.499.000	10.000.000	29.051.282	83.347.176	100	100		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.355.200	15.725.840	43.100.984	31.452.376	55.070.571	145.349.771	66,67	74,4		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.600.000	9.600.000	12.800.000	6.400.000	12.800.000	41.600.000	100	100		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.693.108.682	213.590.603	302.570.000	616.686.731	343.456.631	1.476.303.965	100	87,19		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.265.562	7.870.603	-	35.133.611	87.456.631	130.460.845	100	97,9		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	832.000.000	192.000.000	256.000.000	128.000.000	256.000.000	832.000.000	100	100		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	727.843.120	13.720.000	46.570.000	453.553.120	-	513.843.120	100	70,6		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**639.810.894**	**77.810.980**	**51.399.500**	**126.279.380**	**384.320.534**	639.810.394	**100**	**100**	Kecamatan Rupat	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	488.775.980	37.435.980	-	110.600.000	340.740.000	488.775.980	100	100		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	37.435.980	37.435.980	-	-	-	37.435.980	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	451.340.000	-	-	110.600.000	340.740.000	451.340.000	100	100		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	88.949.914	20.640.000	25.600.000	15.679.380	27.030.534	88.949.914	100	100		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.949.914	20.640.000	25.600.000	15.679.380	27.030.534	88.949.914	100	100		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	62.085.000	19.735.000	25.799.500	-	16.550.000	62.084.500	100	100		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	62.085.000	19.735.000	25.799.500	-	16.550.000	62.084.500	100	100		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.520.085.984**	**97.951.000**	**498.618.300**	**3.216.333.240**	**2.478.247.024**	6.291.149.564	**79,26**	**83,66**	Kecamatan Rupat	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	811.416.016	4.351.000	5.568.300	98.778.400	686.767.016	795.464.716	100	98,03		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	811.416.016	4.351.000	5.568.300	98.778.400	686.767.016	795.464.716	100	98,03		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.524.691.360	93.600.000	493.050.000	3.081.554.840	1.645.601.400	5.313.806.240	38,89	81,44		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.980.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.673.999.560	-	-	1.560.465.760	192.461.400	1.752.927.160	66,67	65,55		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.809.711.800	93.600.000	493.050.000	1.521.089.080	1.453.140.000	3.560.879.080	50	93,47		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	183.978.608	-	-	36.000.000	145.878.608	181.878.608	99,33	98,86		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	22.714.425	-	-	-	22.714.425	22.714.425	100	100		
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	12.743.347	-	-	-	12.743.347	12.743.347	100	100		
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	87.480.000	-	-	36.000.000	49.380.000	85.380.000	96,67	97,6		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12.500.000	-	-	-	12.500.000	12.500.000	100	100		
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	48.540.836	-	-	-	48.540.836	48.540.836	100	100		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**39.186.880**	**7.810.000**	**24.106.880**	**-**	**7.200.000**	39.116.880	**39,58**	**99,82**	Kecamatan Rupat	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	31.306.880	-	24.106.880	-	7.200.000	31.306.880	66,67	100		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	31.306.880	-	24.106.880	-	7.200.000	31.306.880	66,67	100		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.880.000	7.810.000	-	-	-	7.810.000	12,5	99,11		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.880.000	7.810.000	-	-	-	7.810.000	12,5	99,11		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**439.661.230**	**-**	**34.637.860**	**308.740.685**	**96.282.685**	439.661.230	**66,67**	**100**	Kecamatan Rupat	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	439.661.230	-	34.637.860	308.740.685	96.282.685	439.661.230	66,67	100		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	29.069.740	-	-	-	29.069.740	29.069.740	100	100		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	308.740.685	-	-	308.740.685	-	308.740.685	0	100		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	101.850.805	-	34.637.860	-	67.212.945	101.850.805	100	100		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**8.130.000**	**1.245.000**	**-**	**-**	**6.885.000**	8.130.000	**100**	**100**	Kecamatan Rupat	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.130.000	1.245.000	-	-	6.885.000	8.130.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.130.000	1.245.000	-	-	6.885.000	8.130.000	100	100		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.221.023.029**	**679.699.874**	**1.456.921.108**	**1.176.812.679**	**1.737.782.414**	5.051.216.075	**95**	**81,2**	Kecamatan Rupat Utara	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.325.450	-	33.238.000	16.668.000	54.486.000	104.392.000	100	54,28		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.161.165	-	14.612.000	8.073.000	33.113.000	55.798.000	100	45,3		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.164.285	-	18.626.000	8.595.000	21.373.000	48.594.000	100	70,26		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.649.263.391	342.999.074	1.130.842.160	864.030.377	982.859.026	3.320.730.637	100	91		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.649.263.391	342.999.074	1.130.842.160	864.030.377	982.859.026	3.320.730.637	100	91		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	206.400.000	48.000.000	64.000.000	32.000.000	62.400.000	206.400.000	100	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	206.400.000	48.000.000	64.000.000	32.000.000	62.400.000	206.400.000	100	100		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.013.613.848	189.018.353	112.617.569	186.356.802	446.680.108	934.672.832	100	92,21		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.067.178	-	-	4.720.500	6.006.600	10.727.100	100	48,61		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.140.086	10.093.622	12.849.676	5.261.300	18.892.081	47.096.679	100	99,91		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.460.000	7.281.900	3.629.380	22.901.500	29.632.490	63.445.270	100	99,98		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.657.150	9.166.831	10.210.953	9.309.500	33.810.697	62.497.981	100	99,75		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.600.000	-	3.900.000	3.900.000	7.800.000	15.600.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.857.000	-	5.946.960	27.033.002	29.716.440	62.696.402	100	99,74		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	672.832.434	150.476.000	60.080.600	105.231.000	294.821.800	610.609.400	100	90,75		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	67.000.000	12.000.000	16.000.000	8.000.000	26.000.000	62.000.000	100	92,54		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.567.724	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.567.724	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.039.645	39.884.037	42.770.000	28.450.000	70.514.480	181.618.517	100	98,15		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.438.745	14.150.000	19.300.000	9.920.000	26.704.480	70.074.480	100	95,42		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.900	16.134.037	10.670.000	12.130.000	31.010.000	69.944.037	100	99,92		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.600.000	9.600.000	12.800.000	6.400.000	12.800.000	41.600.000	100	100		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.812.971	59.798.410	73.453.379	49.307.500	120.842.800	303.402.089	100	31,28		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.480.000	9.641.410	5.299.779	8.499.500	9.032.800	32.473.489	100	32,64		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.132.971	11.757.000	16.953.600	16.808.000	65.410.000	110.928.600	100	83,32		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.200.000	38.400.000	51.200.000	24.000.000	46.400.000	160.000.000	100	85,47		
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	-	-	-	-	-	100	0		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**247.047.326**	**45.000.000**	**112.047.326**	**30.000.000**	**60.000.000**	247.047.326	**100**	**100**	Kecamatan Rupat Utara	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52.047.326	-	52.047.326	-	-	52.047.326	100	100		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	52.047.326	-	52.047.326	-	-	52.047.326	100	100		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	195.000.000	45.000.000	60.000.000	30.000.000	60.000.000	195.000.000	100	100		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	195.000.000	45.000.000	60.000.000	30.000.000	60.000.000	195.000.000	100	100		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.449.396.587**	**42.600.000**	**106.800.000**	**177.520.000**	**1.121.610.140**	1.448.530.140	**100**	**99,94**	Kecamatan Rupat Utara	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.197.720.587	42.600.000	106.800.000	28.400.000	1.019.144.140	1.196.944.140	100	99,94		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.386.140	-	-	-	23.386.140	23.386.140	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.174.334.447	42.600.000	106.800.000	28.400.000	995.758.000	1.173.558.000	100	99,93		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	251.676.000	-	-	149.120.000	102.466.000	251.586.000	100	99,96		
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	251.676.000	-	-	149.120.000	102.466.000	251.586.000	100	99,96		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**95.136.993**	**47.870.000**	**-**	**11.430.000**	**25.847.000**	85.147.000	**100**	**89,5**	Kecamatan Rupat Utara	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.786.993	47.870.000	-	-	25.847.000	73.717.000	100	99,91		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.916.993	-	-	-	25.847.000	25.847.000	100	99,73		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	47.870.000	47.870.000	-	-	-	47.870.000	100	100		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21.350.000	-	-	11.430.000	-	11.430.000	100	53,54		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	21.350.000	-	-	11.430.000	-	11.430.000	100	53,54		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**504.142.825**	**-**	**-**	**364.383.000**	**130.830.000**	495.213.000	**66,67**	**98,23**	Kecamatan Rupat Utara	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	504.142.825	-	-	364.383.000	130.830.000	495.213.000	66,67	98,23		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	364.632.137	-	-	364.383.000	-	364.383.000	100	99,93		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	130.995.688	-	-	-	130.830.000	130.830.000	100	99,87		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.515.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**30.973.320**	**-**	**-**	**14.780.000**	**8.774.000**	23.554.000	**66,67**	**76,05**	Kecamatan Rupat Utara	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.973.320	-	-	14.780.000	8.774.000	23.554.000	66,67	76,05		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.789.200	-	-	14.780.000	-	14.780.000	100	99,94		
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.774.120	-	-	-	8.774.000	8.774.000	100	100		
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.410.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**22.615.732.707**	**3.056.171.490**	**5.475.233.489**	**5.239.529.830**	**7.152.663.640**	20.923.598.449	**97,91**	**92,52**	Kecamatan Mandau	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.053.479	-	43.310.278	77.914.612	165.987.059	287.211.949	100	99,71		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	177.231.562	-	36.083.102	56.173.102	84.477.378	176.733.582	100	99,72		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.009.652	-	3.327.176	-	58.338.926	61.666.102	100	99,45		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.812.265	-	3.900.000	21.741.510	23.170.755	48.812.265	100	100		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.816.538.451	1.960.869.377	2.992.150.269	2.860.713.309	3.400.140.105	11.213.873.060	250	94,9		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.724.738.936	1.960.869.377	2.971.030.269	2.860.713.309	3.329.690.590	11.122.303.545	400	94,86		
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	91.799.515	-	21.120.000	-	70.449.515	91.569.515	100	99,75		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	372.800.000	96.000.000	92.800.000	81.600.000	102.400.000	372.800.000	100	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	372.800.000	96.000.000	92.800.000	81.600.000	102.400.000	372.800.000	100	100		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.689.555	-	12.920.000	-	73.576.005	86.496.005	50	99,78		
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	86.689.555	-	12.920.000	-	73.576.005	86.496.005	100	99,78		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.856.823.260	310.583.029	463.865.059	885.695.931	1.751.230.768	3.411.374.787	75,88	88,45		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	123.495.311	21.086.877	11.158.630	-	91.249.804	123.495.311	40	100		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	616.835.843	67.025.092	105.558.690	5.554.705	437.904.813	616.043.300	94,88	99,87		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.165.285.000	118.660.000	137.971.000	115.180.000	604.619.000	976.430.000	100	83,79		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	518.449.490	40.041.060	42.495.539	-	239.812.891	322.349.490	95,45	62,18		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	91.465.000	15.450.000	18.180.000	27.945.000	23.175.000	84.750.000	73,33	92,66		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.118.772.616	18.320.000	72.261.200	707.016.226	268.239.260	1.065.836.686	27,46	95,27		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	222.520.000	30.000.000	76.240.000	30.000.000	86.230.000	222.470.000	100	99,98		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.289.005.000	-	1.082.805.000	5.400.000	800.000	1.089.005.000	100	84,48		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	144.975.000	-	143.375.000	1.200.000	400.000	144.975.000	100	100		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.144.030.000	-	939.430.000	4.200.000	400.000	944.030.000	100	82,52		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.262.348.506	422.034.084	409.185.390	462.106.883	858.921.253	2.152.247.610	92,5	95,13		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.322.480.000	299.000.000	289.200.000	301.100.000	433.180.000	1.322.480.000	100	100		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	697.718.506	90.634.084	105.585.390	146.606.883	245.106.957	587.933.314	77,5	84,27		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.150.000	32.400.000	14.400.000	14.400.000	180.634.296	241.834.296	100	99,87		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.643.474.456	266.685.000	378.197.493	866.099.095	799.608.450	2.310.590.038	81,07	87,41		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	762.212.638	134.205.000	161.793.900	70.835.738	364.605.312	731.439.950	51,06	95,96		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	616.400.000	132.480.000	126.720.000	124.608.000	232.592.000	616.400.000	100	100		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.264.861.818	-	89.683.593	670.655.357	202.411.138	962.750.088	92,16	76,12		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**981.607.368**	**180.545.455**	**89.705.509**	**223.558.204**	**487.798.200**	981.607.368	**100**	**100**	Kecamatan Mandau	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	723.839.295	125.221.095	31.010.000	142.860.000	424.748.200	723.839.295	100	100		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	93.201.095	93.201.095	-	-	-	93.201.095	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	630.638.200	32.020.000	31.010.000	142.860.000	424.748.200	630.638.200	100	100		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	257.768.073	55.324.360	58.695.509	80.698.204	63.050.000	257.768.073	100	100		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	257.768.073	55.324.360	58.695.509	80.698.204	63.050.000	257.768.073	100	100		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**26.131.744.670**	**2.795.773.462**	**4.013.358.008**	**9.515.550.897**	**9.090.139.169**	25.414.821.536	**96,14**	**97,26**	Kecamatan Mandau	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.001.034.210	158.718.462	429.667.018	597.477.650	2.587.137.564	3.773.000.694	100	94,3		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.001.034.210	158.718.462	429.667.018	597.477.650	2.587.137.564	3.773.000.694	100	94,3		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.366.262.761	2.448.350.000	3.475.690.990	8.182.264.143	5.948.327.650	20.054.632.783	91,32	98,47		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	207.670.240	-	-	130.322.560	102.112.030	232.434.590	111,11	111,92		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.482.817.302	-	2.588.490.990	1.700.030.165	52.183.100	4.340.704.255	43,06	79,17		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.650.876.999	2.448.350.000	887.200.000	6.351.911.418	5.769.134.300	15.456.595.718	111,11	105,5		
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	24.898.220	-	-	-	24.898.220	24.898.220	100	100		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.764.447.699	188.705.000	108.000.000	735.809.104	554.673.955	1.587.188.059	100	89,95		
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1.541.784.748	188.705.000	108.000.000	659.118.753	408.701.355	1.364.525.108	100	88,5		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	18.898.941	-	-	18.898.941	-	18.898.941	100	100		
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	50.441.410	-	-	50.441.410	-	50.441.410	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	153.322.600	-	-	7.350.000	145.972.600	153.322.600	100	100		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.620.171.220**	**68.215.000**	**77.298.000**	**374.521.496**	**946.778.324**	1.466.812.820	**100**	**90,53**	Kecamatan Mandau	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.323.875.820	-	33.200.000	273.743.496	873.702.324	1.180.645.820	100	89,18		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.323.875.820	-	33.200.000	273.743.496	873.702.324	1.180.645.820	100	89,18		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	296.295.400	68.215.000	44.098.000	100.778.000	73.076.000	286.167.000	100	96,58		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	296.295.400	68.215.000	44.098.000	100.778.000	73.076.000	286.167.000	100	96,58		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**884.223.437**	**25.974.645**	**17.150.750**	**699.491.210**	**141.249.000**	883.865.605	**50,17**	**99,96**	Kecamatan Mandau	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	884.223.437	25.974.645	17.150.750	699.491.210	141.249.000	883.865.605	50,17	99,96		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	736.340.667	-	-	635.557.710	100.530.000	736.087.710	0,33	99,97		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	147.882.770	25.974.645	17.150.750	63.933.500	40.719.000	147.777.895	100	99,93		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**82.335.025**	**-**	**-**	**-**	**82.333.105**	82.333.105	**100**	**100**	Kecamatan Mandau	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.335.025	-	-	-	82.333.105	82.333.105	100	100		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	71.610.235	-	-	-	71.609.585	71.609.585	100	100		
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.724.790	-	-	-	10.723.520	10.723.520	100	99,99		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.522.994.959**	**1.693.375.013**	**1.825.797.929**	**1.997.965.120**	**2.344.595.352**	7.861.733.414	**222,22**	**92,24**	Kecamatan Pinggir	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.934.280	43.260.000	71.800.000	44.640.000	87.069.000	246.769.000	100	99,93		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.052.280	21.630.000	37.890.000	12.200.000	61.169.000	132.889.000	100	99,88		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.882.000	21.630.000	33.910.000	32.440.000	25.900.000	113.880.000	100	100		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.021.869.963	816.712.040	1.287.738.953	1.211.851.074	1.381.858.839	4.698.160.906	100	93,55		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.021.869.963	816.712.040	1.287.738.953	1.211.851.074	1.381.858.839	4.698.160.906	100	93,55		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	312.000.000	72.000.000	96.000.000	48.000.000	96.000.000	312.000.000	750	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	312.000.000	72.000.000	96.000.000	48.000.000	96.000.000	312.000.000	750	100		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.201.294.372	210.082.934	142.619.300	342.244.200	457.914.800	1.152.861.234	125	95,97		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.967.245	1.986.000	4.020.700	11.458.600	17.406.200	34.871.500	50	99,73		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.700.336	2.920.134	4.055.600	8.212.600	31.247.300	46.435.634	100	99,43		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.600.000	44.660.000	18.500.000	53.600.000	61.840.000	178.600.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111.633.191	3.630.000	15.000.000	5.620.000	87.311.800	111.561.800	100	99,94		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	662.393.600	132.886.800	69.043.000	247.353.000	213.109.500	662.392.300	100	100		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	167.000.000	24.000.000	32.000.000	16.000.000	47.000.000	119.000.000	300	71,26		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	337.944.062	-	-	181.211.250	-	181.211.250	100	53,62		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	337.944.062	-	-	181.211.250	-	181.211.250	100	53,62		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.281.642	70.710.952	84.109.676	76.118.596	95.720.008	326.659.232	300	95,44		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160.531.465	34.000.000	46.363.680	23.200.000	52.295.040	155.858.720	700	97,09		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.950.177	31.910.952	28.345.996	49.718.596	37.024.968	147.000.512	100	93,07		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.800.000	4.800.000	9.400.000	3.200.000	6.400.000	23.800.000	100	100		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.060.670.640	480.609.087	143.530.000	93.900.000	226.032.705	944.071.792	400	89,01		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.191.553	28.555.000	17.500.000	26.610.000	69.372.705	142.037.705	100	89,79		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	409.600.000	96.000.000	121.600.000	64.000.000	128.000.000	409.600.000	1000	100		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	492.879.087	356.054.087	4.430.000	3.290.000	28.660.000	392.434.087	100	79,62		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**496.169.714**	**43.345.000**	**88.897.400**	**107.620.000**	**234.699.000**	474.561.400	**266,67**	**95,64**	Kecamatan Pinggir	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.569.714	18.745.000	54.697.400	91.220.000	201.899.000	366.561.400	100	100		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.999.714	18.745.000	5.621.400	-	5.625.000	29.991.400	100	99,97		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	336.570.000	-	49.076.000	91.220.000	196.274.000	336.570.000	100	100		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	129.600.000	24.600.000	34.200.000	16.400.000	32.800.000	108.000.000	600	83,33		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	129.600.000	24.600.000	34.200.000	16.400.000	32.800.000	108.000.000	600	83,33		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.742.247.753**	**573.735.000**	**244.871.250**	**1.305.439.900**	**3.552.304.511**	5.676.350.661	**100**	**98,85**	Kecamatan Pinggir	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.747.062.800	94.745.000	30.200.000	120.800.000	1.485.099.000	1.730.844.000	100	99,07		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.747.062.800	94.745.000	30.200.000	120.800.000	1.485.099.000	1.730.844.000	100	99,07		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.421.031.500	458.840.000	147.450.000	944.379.000	1.852.358.311	3.403.027.311	100	99,47		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.530.000	4.530.000	-	-	-	4.530.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	671.603.000	-	-	31.463.000	636.821.311	668.284.311	100	99,51		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.744.898.500	454.310.000	147.450.000	912.916.000	1.215.537.000	2.730.213.000	100	99,46		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	574.153.453	20.150.000	67.221.250	240.260.900	214.847.200	542.479.350	100	94,48		
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	574.153.453	20.150.000	67.221.250	240.260.900	214.847.200	542.479.350	100	94,48		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**27.500.000**	**5.440.000**	**2.560.000**	**7.500.000**	**6.960.000**	22.460.000	**100**	**81,67**	Kecamatan Pinggir	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.500.000	-	-	7.500.000	-	7.500.000	100	100		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.500.000	-	-	7.500.000	-	7.500.000	100	100		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000	5.440.000	2.560.000	-	6.960.000	14.960.000	100	74,8		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.000.000	5.440.000	2.560.000	-	6.960.000	14.960.000	100	74,8		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**278.636.085**	**-**	**4.800.000**	**266.074.500**	**4.700.000**	275.574.500	**100**	**98,9**	Kecamatan Pinggir	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	278.636.085	-	4.800.000	266.074.500	4.700.000	275.574.500	100	98,9		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	259.686.085	-	-	259.624.500	-	259.624.500	100	99,98		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.950.000	-	4.800.000	6.450.000	4.700.000	15.950.000	100	84,17		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**25.169.000**	**-**	**-**	**-**	**25.169.000**	25.169.000	**100**	**100**	Kecamatan Pinggir	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.169.000	-	-	-	25.169.000	25.169.000	100	100		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.127.000	-	-	-	20.127.000	20.127.000	100	100		
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.042.000	-	-	-	5.042.000	5.042.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.473.261.519**	**665.778.129**	**1.329.537.464**	**1.556.379.981**	**1.577.337.908**	5.129.033.482	**91,3**	**79,23**	Kecamatan Bathin Solapan	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.834.000	-	26.490.000	111.826.000	87.000.000	225.316.000	100	76,42		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	274.734.000	-	26.490.000	101.826.000	77.100.000	205.416.000	100	74,77		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.100.000	-	-	10.000.000	9.900.000	19.900.000	100	99		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.192.251.419	426.452.263	654.172.582	654.585.761	720.258.091	2.455.468.697	100	76,92		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.125.071.419	426.452.263	646.892.582	618.535.761	696.998.091	2.388.878.697	100	76,44		
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.080.000	-	-	19.560.000	23.260.000	42.820.000	100	99,4		
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.100.000	-	7.280.000	16.490.000	-	23.770.000	100	98,63		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	208.000.000	48.000.000	64.000.000	32.000.000	64.000.000	208.000.000	100	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	208.000.000	48.000.000	64.000.000	32.000.000	64.000.000	208.000.000	100	100		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.779.200	-	-	79.955.200	-	79.955.200	100	91,09		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87.779.200	-	-	79.955.200	-	79.955.200	100	91,09		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.183.761.217	-	218.923.200	417.959.700	342.685.200	979.568.100	100	82,75		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.453.930	-	6.000.000	7.000.000	18.625.000	31.625.000	100	86,75		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.452.657	-	24.550.000	32.300.000	80.970.000	137.820.000	100	85,89		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.100.000	-	21.525.000	13.000.000	49.700.000	84.225.000	100	52,61		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	250.185.330	-	20.650.000	205.831.000	17.800.000	244.281.000	100	97,64		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	80.200.000	-	29.200.000	15.800.000	17.600.000	62.600.000	100	78,05		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	494.000.400	-	116.998.200	142.459.800	157.990.200	417.448.200	100	84,5		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.368.900	-	-	1.568.900	-	1.568.900	100	66,23		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.334.668	-	-	56.860.000	-	56.860.000	33,33	37,57		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.334.668	-	-	56.860.000	-	56.860.000	100	37,57		
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	874.589.355	143.325.866	266.817.682	150.619.320	233.824.318	794.587.186	100	90,85		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	585.889.850	130.800.000	176.400.000	89.200.000	182.400.000	578.800.000	100	98,79		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.207.826	7.725.866	81.322.005	56.422.202	43.382.719	188.852.792	100	72,3		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.491.679	4.800.000	9.095.677	4.997.118	8.041.599	26.934.394	100	97,97		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.711.660	48.000.000	99.134.000	52.574.000	129.570.299	329.278.299	100	68,5		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.211.660	-	29.284.000	16.089.000	55.770.299	101.143.299	100	49,05		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208.000.000	48.000.000	64.000.000	32.000.000	64.000.000	208.000.000	100	100		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.500.000	-	5.850.000	4.485.000	9.800.000	20.135.000	100	30,28		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**186.380.000**	**33.000.000**	**87.380.000**	**22.000.000**	**44.000.000**	186.380.000	**66,67**	**100**	Kecamatan Bathin Solapan	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.380.000	-	43.380.000	-	-	43.380.000	50	100		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.380.000	-	43.380.000	-	-	43.380.000	100	100		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	143.000.000	33.000.000	44.000.000	22.000.000	44.000.000	143.000.000	100	100		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	143.000.000	33.000.000	44.000.000	22.000.000	44.000.000	143.000.000	100	100		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.904.059.200**	**-**	**58.060.000**	**57.067.200**	**1.684.673.760**	1.799.800.960	**75**	**94,52**	Kecamatan Bathin Solapan	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.635.680.000	-	-	-	1.629.579.360	1.629.579.360	100	99,63		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.635.680.000	-	-	-	1.629.579.360	1.629.579.360	100	99,63		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	268.379.200	-	58.060.000	57.067.200	55.094.400	170.221.600	50	63,43		
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	268.379.200	-	58.060.000	57.067.200	55.094.400	170.221.600	50	63,43		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**172.336.460**	**-**	**15.567.000**	**59.200.000**	**15.620.000**	90.387.000	**50**	**52,45**	Kecamatan Bathin Solapan	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60.000.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	112.336.460	-	15.567.000	59.200.000	15.620.000	90.387.000	100	80,46		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	112.336.460	-	15.567.000	59.200.000	15.620.000	90.387.000	100	80,46		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**855.584.554**	**-**	**-**	**561.525.000**	**98.110.000**	659.635.000	**100**	**77,1**	Kecamatan Bathin Solapan	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	855.584.554	-	-	561.525.000	98.110.000	659.635.000	100	77,1		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	417.474.000	-	-	197.344.000	70.000.000	267.344.000	100	64,04		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	364.181.759	-	-	364.181.000	-	364.181.000	100	100		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	73.928.795	-	-	-	28.110.000	28.110.000	100	38,02		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**32.543.820**	**-**	**-**	**-**	**13.150.000**	13.150.000	**50**	**40,41**	Kecamatan Bathin Solapan	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.543.820	-	-	-	13.150.000	13.150.000	50	40,41		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.344.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.199.820	-	-	-	13.150.000	13.150.000	100	99,62		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.744.396.432**	**823.270.958**	**1.176.209.408**	**1.063.757.438**	**1.524.809.737**	4.588.047.541	**83,82**	**79,87**	Kecamatan Talang Muandau	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.944.000	27.024.000	15.204.000	13.820.000	6.950.000	62.998.000	100	70,83		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.944.000	22.824.000	15.204.000	13.820.000	6.950.000	58.798.000	100	78,46		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000	4.200.000	-	-	-	4.200.000	100	30		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.332.394.725	455.364.176	683.925.766	672.497.458	800.862.324	2.612.649.724	91,18	78,4		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.321.204.725	447.564.176	683.925.766	672.497.458	798.052.324	2.602.039.724	82,35	78,35		
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.190.000	7.800.000	-	-	2.810.000	10.610.000	100	94,82		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	166.400.000	38.400.000	51.200.000	25.600.000	51.200.000	166.400.000	100	100		
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	166.400.000	38.400.000	51.200.000	25.600.000	51.200.000	166.400.000	100	100		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.082.155.511	131.168.000	216.669.035	212.659.200	336.917.600	897.413.835	89,56	82,93		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.353.060	-	10.540.000	-	28.276.000	38.816.000	50	98,64		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.666.575	15.042.000	15.042.000	8.996.000	9.885.000	48.965.000	83,33	96,64		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.180.000	5.630.000	2.580.000	15.540.000	39.720.000	63.470.000	100	75,4		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	184.569.876	7.696.000	86.838.300	10.550.000	23.070.000	128.154.300	100	69,43		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	-	-	-	14.400.000	14.400.000	100	100		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.986.000	54.800.000	49.668.735	145.573.200	157.566.600	407.608.535	93,56	79,46		
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	196.000.000	48.000.000	52.000.000	32.000.000	64.000.000	196.000.000	100	100		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.605.796	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.605.796	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.299.200	90.610.313	132.241.625	67.143.482	130.359.145	420.354.565	77,78	75,02		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330.500.000	70.800.000	105.971.680	48.389.338	95.585.837	320.746.855	91,67	97,05		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.999.200	15.010.313	19.869.945	15.554.144	28.373.308	78.807.710	41,67	37,71		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.800.000	4.800.000	6.400.000	3.200.000	6.400.000	20.800.000	100	100		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.597.200	80.704.469	76.968.982	72.037.298	198.520.668	428.231.417	83,33	86,58		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.147.200	44.404.469	30.568.982	44.137.298	144.320.668	263.431.417	80	82,54		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.200.000	33.600.000	46.400.000	20.800.000	38.400.000	139.200.000	80	94,57		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.250.000	2.700.000	-	7.100.000	15.800.000	25.600.000	90	90,62		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**574.035.000**	**69.330.000**	**46.400.000**	**170.800.000**	**32.800.000**	319.330.000	**70**	**55,63**	Kecamatan Talang Muandau	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	328.791.000	45.330.000	14.600.000	154.800.000	800.000	215.530.000	90	65,55		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45.330.000	45.330.000	-	-	-	45.330.000	100	100		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	283.461.000	-	14.600.000	154.800.000	800.000	170.200.000	80	60,04		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	103.800.000	24.000.000	31.800.000	16.000.000	32.000.000	103.800.000	100	100		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.800.000	24.000.000	31.800.000	16.000.000	32.000.000	103.800.000	100	100		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	141.444.000	-	-	-	-	-	0	0		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	141.444.000	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.565.973.191**	**67.196.000**	**109.076.000**	**71.763.000**	**1.226.833.191**	1.474.868.191	**78,25**	**94,18**	Kecamatan Talang Muandau	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.359.763.191	61.800.000	61.800.000	41.200.000	1.193.463.191	1.358.263.191	100	99,89		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.359.763.191	61.800.000	61.800.000	41.200.000	1.193.463.191	1.358.263.191	100	99,89		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	206.210.000	5.396.000	47.276.000	30.563.000	33.370.000	116.605.000	56,5	56,55		
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	206.210.000	5.396.000	47.276.000	30.563.000	33.370.000	116.605.000	56,5	56,55		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**14.080.000**	**-**	**-**	**-**	**14.080.000**	14.080.000	**400**	**100**	Kecamatan Talang Muandau	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.080.000	-	-	-	14.080.000	14.080.000	400	100		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.080.000	-	-	-	14.080.000	14.080.000	400	100		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**464.471.220**	**-**	**57.000.000**	**349.874.906**	**348.624.906**	755.499.812	**148**	**162,66**	Kecamatan Talang Muandau	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	464.471.220	-	57.000.000	349.874.906	348.624.906	755.499.812	148	162,66		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	323.034.605	-	-	316.874.906	316.874.906	633.749.812	196	196,19		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	141.436.615	-	57.000.000	33.000.000	31.750.000	121.750.000	100	86,08		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**18.200.000**	**-**	**-**	**3.600.000**	**5.400.000**	9.000.000	**250**	**49,45**	Kecamatan Talang Muandau	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.200.000	-	-	3.600.000	5.400.000	9.000.000	250	49,45		
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.200.000	-	-	3.600.000	5.400.000	9.000.000	250	49,45		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**20.387.578.855**	**1.314.992.781**	**2.813.345.331**	**6.180.375.145**	**8.096.961.539**	18.405.674.796	**67,78**	**90,28**		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.545.781.933**	**1.114.451.292**	**1.703.011.038**	**1.871.765.981**	**2.370.876.869**	7.060.105.180	**89,31**	**82,62**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.672.786	35.889.556	19.830.800	67.900.406	103.002.000	226.622.762	100	99,98		
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	226.672.786	35.889.556	19.830.800	67.900.406	103.002.000	226.622.762	100	99,98		
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.869.851.179	785.862.544	1.220.552.775	1.200.691.634	1.339.083.980	4.546.190.933	47,76	77,45		
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.869.851.179	785.862.544	1.220.552.775	1.200.691.634	1.339.083.980	4.546.190.933	47,76	77,45		
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.800.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	32.000.000	118.400.000	100	94,87		
	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	124.800.000	28.800.000	38.400.000	19.200.000	32.000.000	118.400.000	100	94,87		
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	992.911.636	137.130.793	176.285.979	240.721.461	427.120.822	981.259.055	105,78	98,83		
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.079.994	3.518.750	-	6.714.493	5.842.265	16.075.508	100	99,97		
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.626.265	19.888.066	8.755.588	19.819.818	92.129.539	140.593.011	100	99,98		
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.200.000	17.400.000	11.700.000	38.100.000	54.000.000	121.200.000	97,6	100		
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	117.756.377	11.423.917	2.760.494	17.362.126	75.203.856	106.750.393	100	90,65		
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.800.000	3.750.000	-	8.550.000	12.200.000	24.500.000	100	98,79		
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	526.449.000	77.250.060	153.069.897	130.175.024	165.865.162	526.360.143	142,86	99,98		
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	46.000.000	3.900.000	-	20.000.000	21.880.000	45.780.000	100	99,52		
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.126.625	-	-	59.126.625	-	59.126.625	35	100		
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	24.997.500	-	-	24.997.500	-	24.997.500	20	100		
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.129.125	-	-	34.129.125	-	34.129.125	50	100		
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.438.240	112.144.309	140.796.894	80.958.782	175.932.373	509.832.358	86,67	81,26		
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.737.500	21.200.000	25.800.000	11.200.000	21.930.000	80.130.000	60	86,41		
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.491.980	14.144.309	12.596.894	14.683.742	51.602.373	93.027.318	100	74,73		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.208.760	76.800.000	102.400.000	55.075.040	102.400.000	336.675.040	100	82,07		
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.981.467	14.624.090	107.144.590	203.167.073	293.737.694	618.673.447	100	95,92		
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	551.196.153	6.624.090	97.329.590	182.885.889	240.854.694	527.694.263	100	95,74		
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.785.314	8.000.000	9.815.000	20.281.184	52.883.000	90.979.184	100	97,01		
	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**3.361.759.614**	**-**	**-**	**3.157.883.870**	**129.753.008**	3.287.636.878	**66,67**	**97,8**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.361.759.614	-	-	3.157.883.870	129.753.008	3.287.636.878	66,67	97,8		
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	302.959.631	-	-	285.136.380	9.753.008	294.889.388	100	97,34		
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	139.156.000	-	-	-	120.000.000	120.000.000	0	86,23		
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	2.919.643.983	-	-	2.872.747.490	-	2.872.747.490	100	98,39		
	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**5.538.457.788**	**32.541.489**	**1.091.840.293**	**16.171.200**	**4.391.017.572**	5.531.570.554	**97,08**	**99,88**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.538.457.788	32.541.489	1.091.840.293	16.171.200	4.391.017.572	5.531.570.554	97,08	99,88		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.255.880	11.740.289	-	-	97.748.372	109.488.661	81,25	95		
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.365.349.855	6.451.200	1.081.076.059	10.861.200	4.265.869.200	5.364.257.659	110	99,98		
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	57.852.053	14.350.000	10.764.234	5.310.000	27.400.000	57.824.234	100	99,95		
	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**400.894.963**	**-**	**18.494.000**	**179.653.000**	**137.636.000**	335.783.000	**9,09**	**83,76**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	400.894.963	-	18.494.000	179.653.000	137.636.000	335.783.000	9,09	83,76		
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	62.201.464	-	-	-	-	-	0	0		
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	305.409.020	-	18.494.000	146.844.000	137.636.000	302.974.000	0	99,2		
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	33.284.479	-	-	32.809.000	-	32.809.000	27,27	98,57		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**258.295.761**	**-**	**-**	**17.401.094**	**158.119.400**	175.520.494	**33,33**	**67,95**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	258.295.761	-	-	17.401.094	158.119.400	175.520.494	33,33	67,95		
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	64.637.461	-	-	17.401.094	-	17.401.094	100	26,92		
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	158.460.000	-	-	-	158.119.400	158.119.400	0	99,79		
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35.198.300	-	-	-	-	-	0	0		
	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**2.282.388.796**	**168.000.000**	**-**	**937.500.000**	**909.558.690**	2.015.058.690	**25**	**88,29**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.282.388.796	168.000.000	-	937.500.000	909.558.690	2.015.058.690	25	88,29		
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24.230.773	-	-	-	-	-	0	0		
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	161.618.503	-	-	-	-	-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 x 100%		11	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	%		
		Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	19.040.000	-	-	-	-	-	0	0		
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.077.499.520	168.000.000	-	937.500.000	909.558.690	2.015.058.690	100	96,99		
JUMLAH			**4.662.371.362.430**	**509.170.093.761**	**718.194.895.899**	**1.047.816.449.289**	**1.191.555.429.735**	**3.466.736.868.684**				
Rata-rata capaian kinerja (%)									**391,98**	**74,36**		**SUB KEGIATAN**
Predikat kinerja									**Sangat tinggi**	**Sedang**		
Rata-rata capaian kinerja (%)									**140,69**			**PROGRAM**
Predikat kinerja									**Sangat tinggi**			

Sumber: e-walidata SIPD, 2026

2.3 Evaluasi Capaian SPM

2.3.1 Evaluasi SPM Bidang Pendidikan

Amanat Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Selaras SPM Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Bengkalis dalam penerapan SPM memprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan.

Tabel II-7 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023-2025

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	97,68	100%	94,22%	100%	81,75%
2	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Pendidikan Dasar	100%	98,48	100%	96,79%	100%	99,48%
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Pendidikan Kesetaraan	100%	93,25%	100%	94,97%	100%	96,78%
Capaian SPM Urusan Pendidikan			100%	96,47%	100%	95,33%	100%	92,67%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 adalah sebesar 92,67% dari target 100%. Capaian tersebut berada dalam

kategori "Tuntas Utama". Meskipun secara agregat capaian SPM Pendidikan masih berada pada kategori sangat baik, realisasi tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 96,47% dan tahun 2024 sebesar 95,33%. Penurunan capaian agregat ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya capaian pada jenis pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Secara rinci, capaian indikator SPM Urusan Pendidikan tahun 2023-2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini
   Capaian Pendidikan Anak Usia Dini terealisasi sebesar 81,75% dari target 100%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 94,22% dan tahun 2023 sebesar 97,68%. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam perumusan kebijakan dan penentuan prioritas intervensi layanan pendidikan.
b. Pendidikan Dasar
   Capaian Pendidikan Dasar terealisasi sebesar 99,48% dari target 100%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena hampir memenuhi target SPM, serta mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 96,79% dan tahun 2023 sebesar 98,48%.
c. Pendidikan Kesetaraan
   Capaian Pendidikan Kesetaraan terealisasi sebesar 96,78% dari target 100%. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 94,97% dan tahun 2023 sebesar 93,25%, sehingga mencerminkan adanya perkembangan positif dalam pemenuhan layanan pendidikan kesetaraan.

Dengan demikian, capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 secara umum telah menunjukkan kinerja sangat baik dan berada pada kategori "Tuntas Utama". Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan telah berjalan optimal. Namun demikian, capaian pada layanan Pendidikan Anak Usia Dini masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengingat realisasinya relatif lebih rendah dibandingkan jenis layanan pendidikan lainnya. Oleh karena itu, penguatan strategi pencapaian SPM menjadi fokus pemerintah daerah pada periode berikutnya, terutama melalui peningkatan akses, kualitas layanan, akurasi pendataan sasaran, serta optimalisasi program dan kegiatan perangkat daerah agar capaian indikator SPM dapat dioptimlkan.

2.3.2 Evaluasi SPM Bidang Kesehatan

Realisasi pencanpaian SPM pada Urusan Kesehatan mengacu penyusunan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan realisasi sebagai tabel berikut :

Tabel II-8 Pencapaian SPM Urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase (%) Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	91,08%	100%	88,85%	100%	91,35%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase (%) Pendidikan Dasar	100%	86,26%	100%	82,82%	100%	85,41%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase (%) Pendidikan Kesetaraan	100%	88,15%	100%	85,17%	100%	89,00%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Balita	100%	81,58%	100%	76,98%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100,00%	100%	104,77%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	68,35%	100%	84,90%	100%	98,26%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	100,00%	100%	111,58%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100%	54,29%	100%	76,18%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	75,07%	100%	68,84%	100%	78,16%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	100%	122,33%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	100%	100%	100,59%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	ResikoTerinfeksi HIV	ResikoTerinfeksi HIV						
Capaian SPM Kesehatan			100%	87,07%	100%	91,92%	100%	95,18%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ,2026

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi capaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 adalah sebesar 95,18% dari target 100%. Capaian tersebut berada dalam kategori "Tuntas Utama". Secara agregat, capaian SPM Kesehatan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 87,07% dan tahun 2024 sebesar 91,92%. Peningkatan capaian ini terutama didorong oleh meningkatnya realisasi pada beberapa jenis pelayanan dasar kesehatan, antara lain pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, serta tetap optimalnya capaian pada beberapa layanan yang telah mencapai 100%.

Secara rinci, capaian indikator SPM Urusan Kesehatan tahun 2023–2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

   Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2025 terealisasi sebesar 91,35% dari target 100%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 88,85%, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 91,08%. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penguatan layanan kesehatan ibu hamil, khususnya melalui peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan dan penguatan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

   Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2025 terealisasi sebesar 85,41% dari target 100%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 82,82%, namun masih berada di bawah capaian tahun 2023 sebesar 86,26%. Kondisi ini menjadi fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan persalinan sesuai standar.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

   Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2025 terealisasi sebesar 89,00% dari target 100%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 85,17% dan tahun 2023 sebesar 88,15%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelayanan kesehatan bayi baru lahir, namun tetap perlu diperkuat agar dapat mendekati target SPM.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

   Capaian pelayanan kesehatan balita pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar

76,98% dan tahun 2023 sebesar 81,58%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan yang sangat baik dalam pemenuhan layanan kesehatan balita.

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini tetap berada pada tingkat optimal sebagaimana tahun 2023 sebesar 100%, meskipun pada tahun 2024 realisasinya tercatat sebesar 104,77%. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan pada usia pendidikan dasar telah berjalan sangat baik.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif pada tahun 2025 terealisasi sebesar 98,26% dari target 100%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 84,90% dan tahun 2023 sebesar 68,35%. Peningkatan ini menunjukkan perkembangan positif dalam perluasan cakupan layanan kesehatan bagi kelompok usia produktif.

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini tetap menunjukkan kinerja optimal, setelah pada tahun 2024 tercatat sebesar 111,58% dan tahun 2023 sebesar 100%. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia telah berjalan dengan baik.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 76,18% dan tahun 2023 sebesar 54,29%. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan layanan deteksi, pemantauan, dan penanganan penderita hipertensi.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini konsisten dengan tahun 2023 dan tahun 2024 yang juga berada pada angka 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan layanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus telah berjalan optimal.

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun 2025 terealisasi sebesar 78,16% dari target 100%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 68,84% dan tahun 2023 sebesar 75,07%, namun masih menjadi capaian terendah pada tahun 2025. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah

Kabupaten Bengkalis dalam penguatan layanan kesehatan jiwa, pendataan sasaran, serta peningkatan jangkauan pelayanan.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Capaian pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini tetap berada pada tingkat optimal, setelah pada tahun 2024 tercatat sebesar 122,33% dan tahun 2023 sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap orang terduga tuberkulosis telah berjalan sangat baik.

l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini relatif stabil dibandingkan tahun 2024 sebesar 100,59% dan tahun 2023 sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan layanan kesehatan bagi kelompok berisiko terinfeksi HIV telah berjalan optimal.

Dengan demikian, capaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 secara umum telah menunjukkan kinerja sangat baik dan berada pada kategori "Tuntas Utama". Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar bidang kesehatan telah berjalan optimal dan mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Namun demikian, beberapa jenis layanan masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, serta pelayanan kesehatan ibu hamil. Oleh karena itu, penguatan strategi pencapaian SPM menjadi fokus pemerintah daerah pada periode berikutnya, terutama melalui peningkatan akses layanan, penguatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, akurasi pendataan sasaran, optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama, revitalisasi Posyandu, serta penguatan koordinasi lintas sektor dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten agar capaian indikator SPM Kesehatan dapat semakin optimal.

2.3.3 Evaluasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang teridiri atas 4 indikator dengan batas waktu pencapaian setiap tahun. Untuk Realisasi capaian SPM urusan Pekerjan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-9 Realisasi Capaian Urusan pekerjaan Umum Tahun 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase (%) penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	86,04%	100%	86,45%	100%	63,71%
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Persentase (%) Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	100%	77,94%	100%	76,20%	100%	93,85%
Capaian SPM Pekerjaan Umum			100%	81,99%	100%	81,33%	100%	78,78%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 adalah sebesar 78,78% dari target 100%. Capaian tersebut berada dalam kategori "Tuntas Madya". Secara agregat, capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 81,99% dan tahun 2024 sebesar 81,33%. Penurunan capaian ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya capaian pada jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Secara rinci, capaian indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2023–2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

   Capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2025 terealisasi sebesar 63,71% dari target 100%. Capaian ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 86,45% dan tahun 2023 sebesar 86,04%. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam perumusan kebijakan dan penentuan prioritas intervensi layanan dasar, khususnya dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.

b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

   Capaian penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2025 terealisasi sebesar 93,85% dari target 100%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun 2024 sebesar 76,20% dan tahun 2023 sebesar 77,94%. Kondisi ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam pemenuhan layanan pengelolaan air limbah domestik, meskipun masih perlu terus dioptimalkan agar semakin mendekati target SPM.

Dengan demikian, capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 secara umum berada pada kategori "Tuntas Madya". Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum masih memerlukan

penguatan, terutama pada layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang capaiannya relatif lebih rendah dibandingkan jenis layanan lainnya. Oleh karena itu, penguatan strategi pencapaian SPM menjadi fokus pemerintah daerah pada periode berikutnya, terutama melalui peningkatan cakupan layanan air minum, penguatan infrastruktur dasar, akurasi pendataan sasaran layanan, optimalisasi program dan kegiatan perangkat daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar capaian indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dapat lebih optimal.

2.3.4 Evaluasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berupaya secara maksimal melaksanakan seluruh Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal, Namun ada beberapa kendala dimasa transisi penerapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana transisi pada Penerapan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008. Untuk realisasi SPM pada urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-10 Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	15%	100%	100%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak Huni	100%	0,00%	100%	92,31%	100%	100%
Capaian SPM Perumahan Rakyat			100%	50,00%	100%	53,65%	100%	100%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2026

Berdasarkan Tabel II.8, realisasi capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 100%. Capaian tersebut berada dalam kategori "Tuntas Paripurna". Secara agregat, capaian SPM Perumahan Rakyat tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 50,00% dan tahun 2024 sebesar 53,65%. Peningkatan capaian ini terutama didorong oleh tercapainya seluruh indikator pelayanan dasar perumahan rakyat pada tahun 2025 dengan realisasi masing-masing sebesar 100%.

Secara rinci, capaian indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2023–2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten

   Capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 15,00% dan kembali mencapai kondisi optimal sebagaimana capaian tahun 2023 sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan layanan dasar bagi warga negara korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan berhasil dioptimalkan pada tahun 2025.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

   Capaian fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 92,31% dan tahun 2023 sebesar 0,00%. Kondisi ini mencerminkan adanya perkembangan sangat positif dalam pemenuhan layanan perumahan bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah.

Dengan demikian, capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 secara umum telah menunjukkan kinerja sangat baik dan berada pada kategori "Tuntas Paripurna". Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat telah berjalan optimal. Namun demikian, keberlanjutan capaian tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama dalam menjaga kesiapan intervensi terhadap korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan strategi pencapaian SPM menjadi fokus pemerintah daerah pada periode berikutnya, terutama melalui peningkatan akurasi pendataan sasaran, kesiapan program rehabilitasi dan fasilitasi rumah layak huni, koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi program dan kegiatan agar capaian indikator SPM Perumahan Rakyat dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan.

2.3.5 Evaluasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Penyusunan Laporan Pencapaian SPM Tahun 2018 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan

Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota.

Tabel II-11 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase (%) warga negara yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	97,02%	100%	93,56%	100%	88,69%
Capaian SPM			100%	97,02%	100%	93,56%	100%	88,69

Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi capaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 adalah sebesar 88,69% dari target 100%. Capaian tersebut berada dalam kategori "Tuntas Utama". Meskipun capaian tahun 2025 masih berada pada kategori baik, secara agregat realisasi SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 97,02% dan tahun 2024 sebesar 93,56%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum telah berjalan cukup baik. Namun demikian, tren penurunan capaian dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, penguatan strategi pencapaian SPM menjadi fokus pemerintah daerah pada periode berikutnya, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi deteksi dini dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta akurasi pendataan sasaran layanan agar capaian indikator SPM dapat lebih optimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari Satu Pelayanan Dasar yang berada dalam Urusan Badan Penanggulangan Bencana, yakni adalah jenis Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sub Urusan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis bertanggung Jawab akan Pelayanan Dasar Kententraman dan Ketertiban Umum dengan 3 (tiga) Indikator, adapun hasil capaian SPM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II-12 Capaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase (%) wargaca negara yang memperoleh	100%	100%	100%	90%	100%	90%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana						
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) warga negara yang memperoleh Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	92,92%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) warga negara yang memperoleh Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	96%	100%	96%	100%	100%
Capaian SPM			100%	98,67%	100%	95,33%	100%	93,31%

Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi capaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 adalah sebesar 93,31% dari target 100%. Capaian tersebut berada dalam kategori "Tuntas Utama". Meskipun capaian tahun 2025 masih berada pada kategori sangat baik, secara agregat realisasi SPM mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 98,67% dan tahun 2024 sebesar 95,33%. Penurunan capaian agregat ini terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya capaian pada pelayanan informasi rawan bencana serta menurunnya capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2025.

Secara rinci, capaian indikator SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023–2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

   Capaian pelayanan informasi rawan bencana pada tahun 2025 terealisasi sebesar 90,00% dari target 100%. Capaian ini sama dengan tahun 2024 sebesar 90,00%, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 100%. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penguatan penyebarluasan informasi rawan bencana, peningkatan literasi kebencanaan masyarakat, serta pemutakhiran data dan peta risiko bencana.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

   Capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2025 terealisasi sebesar 92,92% dari target 100%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023 yang masing-masing terealisasi sebesar 100%. Kondisi ini menjadi fokus pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur dan relawan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko bencana.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023 yang masing-masing terealisasi sebesar 96,00%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sehingga perlu terus dipertahankan melalui kesiapan personel, sarana prasarana, dan sistem respons kedaruratan yang cepat dan terkoordinasi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya sejak tahun 2017 telah memiliki Organisasi Perangkat Daerah mandiri yang menangani sub urusan kebakaran, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No. 41 tahun 2016 tentang Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis Pelayanan dasar sub urusan pemadaman kebakaran adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (response time) 15 (lima belas) menit. Ketentuan teknis ini telah menjadi satu faktor untuk penghitungan Indeks Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel II-13 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bengkalis Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Tahun 2023-2025

No	Indikator	2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	100%	97,39%	100%	98,02%	100%	96,83%
Capaian SPM		100%	97,39%	100%	98,02%	100%	96,83%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi capaian SPM Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 adalah sebesar 96,83% dari target 100%. Capaian tersebut berada dalam kategori "Tuntas Utama". Meskipun secara umum capaian tahun 2025 masih menunjukkan kinerja sangat baik,

realisasi tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 97,39% dan tahun 2024 sebesar 98,02%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah berjalan baik, namun tetap memerlukan penguatan agar capaian SPM dapat semakin mendekati target 100%. Oleh karena itu, penguatan strategi pencapaian SPM menjadi fokus pemerintah daerah pada periode berikutnya, terutama melalui peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran, optimalisasi sarana dan prasarana, penguatan sistem respons cepat, peningkatan edukasi dan pencegahan kebakaran berbasis masyarakat, serta koordinasi lintas perangkat daerah agar capaian indikator SPM dapat lebih optimal.

2.3.6 Evaluasi SPM Bidang Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya. Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel II-14 Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi social dasar tuna social	Persentase (%) gelandangan dan pengemis	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti						
5	Perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian SPM UrusanSosial			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 secara konsisten tercapai sebesar 100% dari target 100%. Capaian tersebut berada dalam kategori "Tuntas Paripurna". Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial telah berjalan optimal dan mampu dipertahankan secara konsisten selama tiga tahun terakhir.

Seluruh indikator SPM Urusan Sosial pada tahun 2023–2025 telah mencapai target 100%, meliputi:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan capaian 100%.
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan capaian 100%.
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian 100%.
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan capaian 100%.
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Dengan demikian, capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2023–2025 telah menunjukkan kinerja sangat baik dan berada pada kategori "Tuntas Paripurna". Kondisi ini menjadi capaian positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial. Ke depan, fokus pemerintah daerah diarahkan pada upaya mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan kualitas layanan, akurasi pendataan sasaran, penguatan kelembagaan sosial, serta optimalisasi program dan kegiatan perangkat daerah secara berkelanjutan.

2.4 Rumusan Masalah dan Isu Strategis

2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.4.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Belum optimalnya pemerataan pusat pertumbuhan wilayah karena pusat pemerintahan berada di Pulau Bengkalis, sedangkan pusat ekonomi lebih dominan berada di daratan Sumatera pada 7 dari 11 kecamatan.
2. Belum optimalnya konektivitas antarwilayah akibat karakter geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas wilayah pulau, pesisir, daratan, dan perairan lepas pantai.
3. Masih perlunya penguatan mitigasi kerentanan wilayah pesisir dan pulau terhadap banjir, rob, genangan, dan abrasi, terutama pada Kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupat, dan Rupat Utara yang berada pada ketinggian 5 mdpl.
4. Belum optimalnya pengelolaan kawasan datar sampai cekung/cekungan rawa yang mencapai 71% atau 551.949 Ha dan memiliki karakter drainase alam kurang baik.
5. Masih perlunya penguatan pengelolaan kawasan rawa dan gambut untuk menekan risiko kerusakan lingkungan dan kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Masih perlunya penguatan pengendalian intrusi air laut dan perlindungan kualitas air tanah pada wilayah yang dipengaruhi pasang surut air laut.
7. Belum optimalnya pengendalian tekanan terhadap tutupan lahan dan ekosistem alami akibat dominasi penggunaan lahan perkebunan/kebun seluas 286.877,08 Ha atau 33,12%.

2.4.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

1. Belum optimalnya diversifikasi struktur ekonomi daerah karena sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi sebesar 54,50% terhadap PDRB tahun 2025.
2. Belum optimalnya produksi hortikultura daerah, dengan total produksi sayuran sebesar 777,43 ton dari luas panen 791,75 Ha.
3. Belum meratanya produksi tanaman pangan antarwilayah, dengan produksi tertinggi di Kecamatan Siak Kecil sebesar 12.235,16 ton, sedangkan Kecamatan Rupat Utara sebesar 34,90 ton.
4. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan ternak besar karena populasi masih terkonsentrasi pada kambing sebanyak 35.785 ekor dan sapi sebanyak 14.725 ekor.

5. Belum meratanya pengembangan ternak unggas antarwilayah, dengan populasi ayam ras pedaging di Kecamatan Mandau sebesar 238.000 ekor dari total 276.458 ekor.
6. Belum optimalnya produktivitas sektor perkebunan.
7. Belum stabilnya produksi perikanan daerah, terutama perikanan tangkap yang mengalami fluktuasi cukup tajam dalam periode 2020–2025.

2.4.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama pada daya dukung air yang telah terlampaui seluas 204.386,64 Ha atau 23,73% dari wilayah Kabupaten Bengkalis.

2.4.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Belum stabilnya peningkatan ketahanan pangan daerah karena Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis masih mengalami fluktuasi sebelum meningkat menjadi 79,83 pada tahun 2025.
2. Masih perlunya penguatan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat, seiring dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 9,82 pada tahun 2025.
3. Belum stabilnya konsumsi listrik per kapita, ditunjukkan oleh penurunan konsumsi dari 5.024,05 kWh menjadi 4.011,30 kWh pada tahun 2025.
4. Belum optimalnya akses rumah tangga terhadap sumber air minum bersih, dengan capaian Kabupaten Bengkalis sebesar 70,31% pada tahun 2025.

2.4.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Masih perlunya penguatan pengendalian kualitas lingkungan hidup daerah, terutama pada aspek kualitas udara, meskipun nilai IKLH telah meningkat menjadi 77,09 pada tahun 2025.
2. Masih perlunya peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak, seiring dengan capaian yang masih menunjukkan kecenderungan fluktuatif.
3. Masih perlunya penguatan pengelolaan persampahan daerah, mengingat timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan baru mencapai 12,24% dan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah baru mencapai 51,63%.

2.4.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Masih perlunya penguatan upaya pengendalian emisi gas rumah kaca, seiring dengan konsentrasi CO_2 yang mencapai 427,55 ppm pada November 2025.
2. Masih perlunya peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan risiko bencana daerah, terutama terhadap kebakaran hutan dan lahan, banjir, abrasi, serta hotspot.

3. Masih perlunya peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana, tercermin dari Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bengkalis yang sebesar 0,30 pada tahun 2025.

2.4.1.1.7 Kondisi Demografi

1. Masih perlunya pengelolaan persebaran penduduk antarwilayah secara lebih seimbang, mengingat konsentrasi penduduk tertinggi berada di Kecamatan Mandau sebesar 174.714 jiwa atau 25,21%, sedangkan Kecamatan Rupat Utara sebesar 17.890 jiwa atau 2,58%.
2. Masih perlunya penguatan pengendalian dan pelayanan administrasi kependudukan, terutama pada wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi penduduk usia produktif sebagai modal pembangunan daerah, dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 404.316 jiwa.
4. Masih perlunya penguatan partisipasi kerja perempuan, seiring dengan jumlah penduduk perempuan bekerja sebanyak 100,48 ribu jiwa dibandingkan laki-laki sebanyak 179,86 ribu jiwa.

2.4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Masih perlunya penguatan stabilitas kinerja PDRB daerah, seiring dengan penurunan nilai sektor pertambangan dan penggalian dari Rp103.137,60 miliar menjadi Rp95.235,43 miliar pada tahun 2025.
2. Belum optimalnya diversifikasi struktur ekonomi daerah, mengingat sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi sebesar 54,50% pada tahun 2025.
3. Masih perlunya penguatan penanganan kemiskinan, seiring dengan meningkatnya garis kemiskinan menjadi Rp764.542 per kapita per bulan pada tahun 2025.
4. Masih perlunya penguatan stabilitas PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, seiring dengan penurunan dari Rp296,91 juta menjadi Rp292,06 juta pada tahun 2025.
5. Belum optimalnya rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB, yaitu sebesar 1,83% pada tahun 2025.
6. Masih perlunya penguatan penanganan pengangguran terbuka, seiring dengan posisi Kabupaten Bengkalis yang masih relatif tinggi di tingkat Provinsi Riau pada tahun 2025.

7. Masih perlunya penguatan pengendalian ketimpangan pendapatan, meskipun Gini Ratio Kabupaten Bengkalis berada pada kategori rendah sebesar 0,265 pada tahun 2025.
8. Masih perlunya penguatan pemerataan kapasitas ekonomi antarwilayah, seiring dengan masih adanya perbedaan jumlah penduduk, kontribusi PDRB, dan karakter pusat pertumbuhan.
9. Masih perlunya penguatan capaian pembangunan manusia, mengingat IPM Kabupaten Bengkalis masih berada di bawah beberapa daerah utama di Provinsi Riau.
10. Masih perlunya penguatan kinerja koperasi daerah, karena peningkatan jumlah koperasi aktif belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan anggota dan volume usaha.
11. Masih perlunya penguatan perkembangan usaha mikro dan kecil, seiring dengan persentase usaha mikro dan kecil sebesar 0,71% pada tahun 2025.
12. Masih perlunya penguatan pengembangan industri pengolahan besar dan sedang, meskipun jumlahnya meningkat menjadi 19 unit pada tahun 2025.
13. Masih perlunya penguatan kinerja pariwisata daerah, terutama dalam mendorong peningkatan dan perluasan kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
14. Masih perlunya peningkatan pemenuhan kebutuhan ikan daerah dari produksi lokal, mengingat rasio produksi terhadap konsumsi ikan sebesar 0,40 pada tahun 2025.

2.4.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

1. Belum optimalnya pemerataan kualitas layanan kesehatan meskipun usia harapan hidup menunjukkan peningkatan.
2. Belum optimalnya capaian keluarga sehat karena indikator pembentuk keluarga sehat masih memerlukan penguatan layanan dasar keluarga.
3. Belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga karena capaian IBangga masih berada pada kategori berkembang.
4. Belum stabilnya pelayanan KB modern karena capaian mCPR masih menunjukkan fluktuasi.
5. Masih perlunya penguatan pemenuhan kebutuhan layanan KB, seiring dengan capaian unmet need sebesar 14,80% pada tahun 2025.
6. Masih perlunya penguatan pencegahan kelahiran remaja, seiring dengan ASFR usia 15–19 tahun sebesar 19,7 per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun pada tahun 2025.

7. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas kesehatan, dengan rasio puskesmas sebesar 0,87 per 30.000 penduduk dan rasio tempat tidur rumah sakit sebesar 0,97 per 1.000 penduduk.
8. Belum optimalnya ketersediaan dokter spesialis tertentu, terutama dokter subspesialis dan dokter gigi spesialis.
9. Masih perlunya penguatan penurunan Angka Kematian Ibu, dengan capaian 87,3 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
10. Masih perlunya penguatan penanganan gizi balita, terutama balita berat badan kurang, balita pendek, gizi kurang, dan gizi buruk.
11. Belum konsistennya penurunan stunting karena prevalensi stunting masih mengalami fluktuasi sebelum menurun pada tahun 2025.
12. Belum meratanya penanganan Tuberkulosis antarwilayah puskesmas.
13. Belum optimalnya capaian SPM kesehatan, dengan realisasi keseluruhan sebesar 95,18% pada tahun 2025.
14. Belum optimalnya pemerataan status akreditasi rumah sakit dan Puskesmas sebagai bagian dari penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Kondisi ini memerlukan penguatan pemenuhan standar pelayanan, tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.

2.4.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Belum optimalnya peningkatan rata-rata lama sekolah karena capaian 9,93 tahun pada tahun 2025 belum mencerminkan pendidikan menengah penuh.
2. Belum optimalnya harapan lama sekolah, dengan realisasi 13,47 tahun dari target 13,62 tahun pada tahun 2025.
3. Belum meratanya kualitas literasi dan numerasi antarjenjang pendidikan.
4. Belum optimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dengan capaian 5,30 pada tahun 2025.
5. Belum optimalnya literasi digital masyarakat untuk mendukung transformasi digital dan daya saing tenaga kerja.
6. Belum optimalnya partisipasi pendidikan jenjang SMP/MTs, dengan APK sebesar 93,09 pada tahun 2025.
7. Belum optimalnya partisipasi sekolah tepat waktu pada jenjang SMP/MTs, dengan APM sebesar 85,92 pada tahun 2025.
8. Belum optimalnya partisipasi PAUD, dengan capaian 20,00 pada tahun 2025.
9. Belum optimalnya pemerataan dan kecukupan guru pada jenjang pendidikan dasar.

10. Belum optimalnya capaian SPM pendidikan, dengan realisasi keseluruhan sebesar 92,67% pada tahun 2025.

2.4.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Belum optimalnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah.
2. Belum optimalnya penyerapan penyandang disabilitas pada sektor formal.
3. Belum stabilnya cakupan perlindungan tenaga kerja, dengan cakupan pekerja/buruh peserta Jamsostek sebesar 49,79% pada tahun 2025.
4. Belum meratanya penanganan PPKS, dengan bantuan sosial baru menjangkau 150.719 orang dari 254.945 PPKS atau 59,12%.

2.4.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Perlunya penguatan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bengkalis.
2. Masih perlunya penguatan harmoni sosial.
3. Belum optimalnya pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bengkalis.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya, dengan realisasi 1 kegiatan pada tahun 2025.

2.4.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Belum optimalnya pemenuhan hak anak karena nilai IPHA masih lebih rendah dibandingkan IPKA.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Bengkalis.
3. Belum optimalnya pencapaian kesetaraan pembangunan gender, dengan IPG Kabupaten Bengkalis sebesar 90,97 pada tahun 2025.
4. Belum optimalnya pembangunan kepemudaan, terutama pada aspek partisipasi, kepemimpinan, kesehatan, inklusivitas, dan kesetaraan gender.

2.4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja berpendidikan tinggi, hingga tahun 2025 capaiannya masih 14,02%.
2. Masih perlunya penguatan produktivitas penduduk usia kerja, seiring dengan rasio ketergantungan sebesar 49,09% pada tahun 2025.

2.4.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Belum optimalnya peningkatan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB daerah, pada tahun 2025 hanya sebesar 17,50%.

2. Belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB, yaitu sebesar 0,33% pada tahun 2025.
3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.
4. Belum optimalnya rasio kewirausahaan daerah, meskipun meningkat menjadi 6,21% pada tahun 2025.
5. Belum stabilnya tingkat partisipasi angkatan kerja, meskipun TPAK meningkat menjadi 67,77% pada tahun 2025.
6. Belum optimalnya dampak inovasi daerah terhadap peningkatan produktivitas ekonomi.
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

2.4.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dalam mendukung transisi ekonomi rendah karbon dan keberlanjutan lingkungan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi biru meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki garis pantai sepanjang 446 Km.
3. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung ketahanan energi daerah.

2.4.1.3.4 Transformasi Digital

1. Belum meratanya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi antarwilayah Kabupaten Bengkalis.
2. Belum optimalnya perluasan layanan mobile broadband 4G karena masih terdapat desa/kelurahan yang belum terlayani pada tahun 2025.

2.4.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Belum optimalnya pembentukan modal tetap bruto dalam mendorong transformasi ekonomi nonmigas.
2. Belum optimalnya diversifikasi struktur ekspor daerah karena masih bergantung pada migas dan industri pengolahan CPO.

2.4.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Masih perlunya optimalisasi kondisi jalan mantap, pada tahun 2025 hanya sebesar 649,80 Km atau 49,53% pada tahun 2025.
2. Belum optimalnya perlindungan infrastruktur tebing/pantai, dengan pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik sebesar 29,60% pada tahun 2025.

3. Belum optimalnya layanan SPAM, terutama pada akses jaringan perpipaan dari sisi kuantitas dan kualitas.
4. Belum optimalnya aspek keselamatan dan kelayakan prasarana transportasi wilayah.
5. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
6. Masih perlunya penguatan akses kepemilikan hunian, seiring dengan rumah tangga berstatus kontrak/sewa sebesar 9,57% pada tahun 2025.
7. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh yang ditetapkan seluas 105,99 Ha.
8. Belum optimalnya capaian SPM pekerjaan umum, dengan realisasi keseluruhan sebesar 78,78% pada tahun 2025.
9. Masih perlunya penguatan pemenuhan SPM perumahan rakyat agar tidak hanya bersifat responsif terhadap korban bencana dan relokasi.
10. Belum stabilnya capaian Indeks Desa Membangun, yang menurun dari 0,9074 menjadi 0,839 pada tahun 2025.

2.4.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

1. Belum optimalnya rasio pajak daerah terhadap PDRB, yaitu sebesar 0,126% pada tahun 2025.
2. Belum optimalnya pengendalian inflasi berbasis data daerah karena penghitungan inflasi belum dilakukan secara spesifik untuk Kabupaten Bengkalis.

2.4.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Belum optimalnya reformasi hukum daerah karena capaian terakhir masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau.
2. Belum optimalnya reformasi birokrasi, terutama pada aspek akuntabilitas kinerja unit kerja dan komitmen manajemen kinerja.
3. Belum optimalnya keterpaduan layanan digital dan implementasi arsitektur SPBE.
4. Masih perlunya penguatan standar pelayanan publik agar capaian pelayanan sangat baik dapat dipertahankan.
5. Belum optimalnya penguatan integritas pemerintahan melalui pengendalian risiko korupsi, transparansi, dan perbaikan tata kelola.
6. Belum optimalnya profesionalitas ASN, dengan nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 80,41 dari target 80,63.

2.4.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Masih perlunya penguatan kesinambungan penegakan Peraturan Daerah, meskipun capaian penegakan Perda telah mencapai 100% selama periode 2021–2025.
2. Masih perlunya peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda, melalui penguatan sosialisasi, pembinaan, patroli, dan pengawasan secara berkelanjutan.
3. Masih perlunya penguatan kesinambungan capaian aksi HAM daerah, meskipun Kabupaten Bengkalis telah memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM.
4. Masih perlunya penguatan rasa aman masyarakat, seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Bengkalis.
5. Masih perlunya penguatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, meskipun persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan telah mencapai 100% selama periode 2021–2025.
6. Masih perlunya peningkatan capaian SPM ketenteraman dan ketertiban umum, seiring dengan capaian pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 88,69% pada tahun 2025.
7. Masih perlunya peningkatan pelayanan informasi rawan bencana serta pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, karena capaian masing-masing indikator masih sebesar 90% dan 92,92% pada tahun 2025.
8. Masih perlunya penguatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, mengingat capaian SPM sub-urusan pemadaman kebakaran sebesar 96,83% pada tahun 2025 dan belum mencapai target 100%.
9. Masih perlunya penguatan sistem penanggulangan kebakaran yang terpadu, preventif, dan berbasis partisipasi masyarakat, terutama untuk memastikan pelayanan sesuai standar waktu tanggap dan perlindungan masyarakat.

2.4.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Masih perlunya penguatan kesinambungan peningkatan daya saing daerah, meskipun skor IDSD Kabupaten Bengkalis meningkat dari 3,39 pada tahun 2024 menjadi 3,50 pada tahun 2025.
2. Belum optimalnya penguatan sistem keuangan daerah sebagai pendukung daya saing, dengan capaian pilar sistem keuangan sebesar 1,70 pada tahun 2025.
3. Masih perlunya penguatan kapabilitas inovasi daerah, mengingat capaian pilar kapabilitas inovasi masih sebesar 2,40 pada tahun 2025.

4. Belum optimalnya penguatan pasar produk daerah, dengan capaian pilar pasar produk sebesar 2,20 pada tahun 2025.
5. Masih perlunya penguatan pasar tenaga kerja daerah, seiring dengan capaian pilar pasar tenaga kerja sebesar 2,98 pada tahun 2025.
6. Masih perlunya peningkatan kualitas infrastruktur pendukung daya saing, karena capaian pilar infrastruktur menurun dari 3,59 pada tahun 2024 menjadi 3,50 pada tahun 2025.
7. Masih perlunya penguatan stabilitas ekonomi makro daerah, seiring dengan sedikit menurunnya capaian pilar stabilitas ekonomi makro dari 3,80 pada tahun 2024 menjadi 3,77 pada tahun 2025.
8. Masih perlunya penguatan dinamika bisnis daerah, meskipun capaian pilar dinamika bisnis meningkat menjadi 3,40 pada tahun 2025.

2.4.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pendidikan
    a. Belum optimalnya capaian Harapan Lama Sekolah, dengan realisasi 13,47 tahun dari target 13,62 tahun.
2. Kesehatan
    a. Masih perlunya penguatan penurunan jumlah kematian balita, seiring dengan realisasi 100 kasus dari target 90 kasus.
    b. Belum optimalnya cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis, dengan realisasi 14,23% dari target 36%.
    c. Belum optimalnya cakupan imunisasi bayi lengkap, dengan realisasi 68% dari target 80%.
    d. Belum optimalnya proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup, dengan realisasi 61,2% dari target 65%.
    e. Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPT BK RSUD Kecamatan Mandau, dengan realisasi 4 dari target 93.
    f. Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPT BK RSUD Kecamatan Bengkalis, dengan realisasi 85 dari target 93.
    g. Belum optimalnya pelayanan spesialistik unggulan pada UPT BK RSUD Kecamatan Bengkalis, dengan realisasi 28% dari target 80%.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    a. Belum optimalnya pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.

b. Belum optimalnya pengukuran persentase gedung pelayanan layak.

2. Perumahan dan Kawasan Permukiman

   a. Belum optimalnya pengukuran rumah tangga dengan akses hunian layak.

   b. Belum optimalnya pengukuran akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak.

   c. Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik karena IPLT belum berfungsi secara efektif, sehingga pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja dari tangki septik belum mendukung pemenuhan akses sanitasi aman secara menyeluruh.

3. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

   a. Belum optimalnya capaian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan realisasi 3 dari target 73.

   b. Belum optimalnya capaian Indeks Manajemen Satlinmas, dengan realisasi 0 dari target 70.

   c. Belum optimalnya pengukuran layanan pencegahan kebakaran karena realisasi capaian tahun 2025 belum tersedia pada tabel kinerja.

   d. Belum optimalnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan realisasi 97,50% dari target 100%.

4. Tenaga Kerja

   a. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, dengan realisasi 0% dari target 67%.

   b. Belum optimalnya penciptaan lapangan kerja formal, dengan realisasi 46,35% dari target 47,96%.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Gender, dengan realisasi 89,91 dari target 90,48.

6. Pertanahan

   a. Belum optimalnya penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi, dengan realisasi 3 kasus dari target 5 kasus.

7. Lingkungan Hidup

   a. Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Udara, dengan realisasi 76,83 dari target 81,52.

   b. Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lahan, dengan realisasi 74,41 dari target 74,52.

c. Belum optimalnya pengukuran Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah karena realisasi capaian tahun 2025 belum tersedia pada tabel kinerja.

8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    a. Belum optimalnya rasio penduduk ber-KTP, dengan realisasi 98,87% dari target 99,54%.
    b. Belum optimalnya rasio pasangan berakta nikah, dengan realisasi 82,81% dari target 83,28%.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa
    a. Belum optimalnya konsistensi pengukuran Indeks Desa Membangun.
10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    a. Belum optimalnya ketersediaan data capaian Angka Kelahiran Total.
    b. Belum optimalnya ketersediaan data capaian Indeks Pembangunan Keluarga.
    c. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, dengan realisasi 70,1 dari target 77,2.
    d. Belum optimalnya ketersediaan data capaian kebutuhan KB modern.
    e. Belum optimalnya ketersediaan data capaian angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun.
    f. Belum optimalnya ketersediaan data capaian kehamilan tidak direncanakan.
    g. Belum optimalnya ketersediaan data capaian Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja.
    h. Belum optimalnya ketersediaan data capaian Indeks Lansia Berdaya..
11. Perhubungan
    a. Masih perlunya penguatan kualitas dan keberlanjutan konektivitas antarwilayah, terutama antara wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan, agar capaian Rasio Konektivitas Antarwilayah sebesar 82% dapat dipertahankan serta semakin mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, dan akses terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi..
12. Penanaman Modal
    a. Belum optimalnya peningkatan investasi daerah, dengan realisasi -27,96% dari target 5,7%.
    b. Belum optimalnya realisasi investasi PMA dan PMDN, dengan realisasi Rp2.496.229.071.248 dari target Rp5.600.000.000.000.
    c. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan, dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat 90,49 dari target 95.

13. Kebudayaan
    a. Belum optimalnya penetapan warisan budaya tak benda terhadap total pencatatan, dengan realisasi 0% dari target 100%.
14. Perpustakaan
    a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkalis, dengan realisasi 5,30 dari target 44,39.
15. Kearsipan
    a. Belum optimalnya tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah, dengan realisasi 0,00% dari target 30,02%.
16. Kelautan dan Perikanan
    a. Belum optimalnya pengukuran jumlah produksi olahan perikanan.
17. Pertanian
    a. Belum optimalnya peningkatan produksi perkebunan, dengan realisasi 0% dari target 0,49%.
18. Energi dan Sumber Daya Mineral
    a. Belum optimalnya pengukuran rasio elektrifikasi.
19. Sekretariat Daerah
    a. Belum optimalnya pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi.
20. Perencanaan
    a. Belum optimalnya pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Keuangan
    a. Belum optimalnya pengukuran persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.
    b. Belum optimalnya pengukuran persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik.
    c. Belum optimalnya pengukuran persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar.
    d. Belum optimalnya pengukuran persentase penurunan SILPA.
    e. Belum optimalnya pengukuran persentase laporan keuangan tepat waktu.
    f. Belum optimalnya pengukuran persentase penambahan nilai aset tetap.
22. Kepegawaian

a. Belum optimalnya capaian Indeks Profesionalitas ASN, dengan realisasi 80,41 dari target 80,63.

23. Penelitian dan Pengembangan
    a. Belum optimalnya pengukuran persentase kebijakan berbasis bukti.
24. Pengelola Perbatasan
    a. Belum optimalnya pengukuran persentase pengelolaan wilayah perbatasan.
25. Kecamatan
    a. Belum optimalnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinggir, dengan realisasi 85 dari target 96,5.
    b. Belum optimalnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rupat Utara, dengan realisasi 90,89 dari target 95.
    c. Belum optimalnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bukit Batu, dengan realisasi 94,65 dari target 95.

2.4.2 Permasalahan Dominan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap berbagai masalah yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bengkalis masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Permasalahan-permasalahan ini bersifat lintas sektor, saling berkaitan, dan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perumusan permasalahan dominan berikut ini menjadi pijakan penting dalam penentuan isu strategis jangka menengah daerah Kabupaten Bengkalis kedepannya.

1. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan pendidikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan geografis.
2. Belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah kecamatan, terutama di daerah terpencil dan pesisir.
3. Belum optimalnya daya saing tenaga kerja dalam menghadapi bonus demografi dan percepatan perkembangan teknologi informasi.
4. Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah
5. Masih rendahnya daya saing Koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Belum optimalnya peningkatan investasi daerah
7. Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya strategis
8. Ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekonomi dunia dan menghambat perkembangan ekonomi daerah
9. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat mengakibatkan kemandirian fiskal daerah menjadi rendah
10. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan kualitas infastruktur yang masih rendah belum mendukung pembangunan daerah dengan baik

11. Ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata di seluruh wilayah
12. Belum optimalnya pengelolaan konservasi ekosistem daratan dan pesisir, termasuk pengendalian abrasi, risiko kebakaran hutan dan lahan, risiko banjir, dan rehabilitasi ekosistem mangrove
13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas

2.4.3 Isu Strategis Daerah

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah, international, kebijakan nasional dan provinsi. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaiansasaran pembangunan daerah.
1. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
2. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

2.4.3.1 Isu Strategis Global

1) Ketegangan Geopolitik Global dan Dampaknya terhadap Stabilitas Regional dan Harga Komoditas

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global ke depan menjadi tantangan serius bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Bengkalis. Konflik global seperti perang Rusia-Ukraina, Pakistan-India, Iran-Israel, telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya seperti ketegangan di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut China Selatan, telah menciptakan ketidakpastian global yang memengaruhi stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi dunia.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah penghasil utama minyak bumi dan minyak kelapa sawit (CPO) di Provinsi Riau sangat rentan terhadap dinamika global tersebut. CPO merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Bengkalis, dengan negara tujuan utama ekspor yakni Tiongkok dan India. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi menurunkan permintaan ekspor CPO dari Bengkalis. Sementara itu, perang India dan Pakistan berpotensi menurunkan volume ekspor ke kawasan Asia Selatan, yang berdampak pada penurunan penurunan kinerja perekonomian Kabupaten Bengkalis, khususnya sektor perkebunan dan sektor industri CPO yang menyumbang hampir setengah dari PDRB daerah. Di sisi lain, konflik antara Israel dan negara-negara Timur

Tengah, khususnya Iran, telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Hal ini berpotensi memberikan dampak positif bagi Kabupaten Bengkalis sebagai daerah penghasil minyak bumi, melalui peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

2) Risiko Resesi Global, Inflasi, dan Tekanan Nilai Tukar akibat Fluktuasi Suku Bunga Global

Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diprakirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia, khususnya Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

3) Kebijakan Proteksionis Perdagangan Global yang Menurunkan Daya Saing Ekspor

Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat pada tahun 2025, melalui peningkatan tarif impor secara signifikan, memberikan dampak serius terhadap perekonomian global, khususnya bagi China dan Indonesia. Peningkatan tarif hingga 145% terhadap berbagai barang asal China menyebabkan penurunan ekspor China ke AS sebesar 34,5% pada Mei 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dampak ini turut menekan laju pertumbuhan ekonomi China yang direvisi menjadi 4,5% dari target awal 5%, seiring dengan memburuknya kinerja sektor manufaktur yang tercermin dari penurunan indeks PMI ke level terendah sejak akhir 2023. Sementara itu, Indonesia juga terdampak melalui penerapan tarif tambahan sebesar 32% untuk sejumlah komoditas ekspor utama seperti elektronik, tekstil, alas kaki, dan furnitur. Kebijakan ini menjadi hambatan signifikan bagi akses ekspor Indonesia ke pasar Amerika dan memperlemah daya saing produk nasional di tengah ketidakpastian perdagangan global.

Dampak global dari kebijakan tarif tersebut sangat signifikan. Ketegangan dagang antara AS dan China kembali meningkat, mendorong terjadinya pembalasan tarif dan gangguan rantai pasok global. Negara-negara berkembang turut terdampak karena perlambatan aktivitas perdagangan internasional dan menurunnya permintaan ekspor dari dua ekonomi terbesar dunia. Salah satu konsekuensi paling nyata adalah melemahnya

pertumbuhan ekonomi China, yang sebelumnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan mitra dagang utama bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu daerah penghasil utama minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia, sangat bergantung pada ekspor ke negara-negara besar seperti China. Melemahnya ekonomi China akibat kebijakan tarif AS berpotensi menurunkan permintaan CPO dari Bengkalis, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan nilai tambah produk untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika perdagangan global yang tidak menentu.

4) Ketidakpastian Pasar Komoditas Global dan Kebutuhan Diversifikasi Ekonomi Daerah

Ketidakpastian pasar komoditas global akibat dinamika geopolitik, kebijakan proteksionis, dan perlambatan ekonomi dunia menjadi tantangan serius bagi daerah yang bergantung pada ekspor, termasuk Kabupaten Bengkalis. Konflik global serta kebijakan proteksi Amerika Serikat menjadi ancaman terhadap pelemahan ekonomi dunia khususnya China, yang merupakan salah satu pasar terbesar CPO Kabupaten Bengkalis. Melemahnya permintaan global berisiko menurunkan pendapatan sektor Perkebunan dan industri CPO yang menjadi penyumbang besar terhadap PDRB daerah. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi sangat penting melalui hilirisasi industri, perluasan pasar ekspor, dan penguatan sektor alternatif seperti perikanan, pariwisata bahari, serta UMKM berbasis potensi daerah guna memperkuat daya tahan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal.

5) Krisis Energi Global dan Perlunya Transisi Menuju Energi Terbarukan

Perkembangan global saat ini ditandai oleh krisis lingkungan multidimensi yang saling terkait, yang dikenal sebagai triple planetary crisis—perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi yang menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan bumi dan sistem ekonomi. Ekstraksi sumber daya alam yang masif, termasuk penggunaan energi fosil, menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan tertinggi ke-8 di dunia turut memberikan kontribusi terhadap tekanan lingkungan, sementara dampak lanjutan berupa kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp22,8 triliun per tahun. Transisi menuju energi terbarukan menjadi agenda penting untuk menekan emisi di sektor energi, memperkuat ketahanan lingkungan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana ekologis.

Dalam konteks Kabupaten Bengkalis, tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis mengalami 60 titik hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas kebakaran mencapai 145,33 hektare, 9 kejadian banjir yang berdampak pada 1.325 rumah, serta 6 kejadian abrasi pantai dengan luas mencapai 1.850 meter. Selain itu, abrasi pesisir yang semakin intensif mengancam kawasan permukiman dan infrastruktur pesisir,

sementara kejadian angin puting beliung juga mengalami trend peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berdampak langsung terhadap wilayah dan masyarakat Bengkalis. Oleh karena itu, Indonesia, khsusunya Kabupaten Bengkalis perlu mendorong kebijakan transisi energi melalui pemanfaatan potensi energi terbarukan seperti bioenergi dari limbah sawit dan tenaga surya, sekaligus mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan pesisir secara berkelanjutan.

6) Perkembangan Teknologi dan Kecerdasan Buatan sebagai Peluang Transformasi Ekonomi Daerah.

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) secara global mendorong transformasi cara kerja industri dan layanan publik, sekaligus membuka peluang baru bagi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektoral. Negara-negara maju kini berlomba dalam pengembangan AI, smart system, dan teknologi berbasis data yang berdampak luas terhadap rantai nilai global. Situasi ini menjadi peluang strategis bagi Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis, untuk menarik investasi di bidang teknologi pertanian (*smart farming*), logistik digital, dan pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan industri.

Kabupaten Bengkalis dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong modernisasi sektor pertanian dan perikanan melalui pemanfaatan sensor berbasis IoT, pemetaan spasial digital, dan sistem prediksi cuaca untuk budidaya yang lebih presisi. Selain itu, digitalisasi logistik dapat memperkuat efisiensi rantai pasok komoditas unggulan seperti CPO dan hasil perikanan, sekaligus membuka akses pasar baru. Di sektor pendidikan, penerapan platform digital sangat penting untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan pendidikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital juga menjadi kunci untuk meningkatkan responsivitas birokrasi dan partisipasi masyarakat. Dengan strategi adaptif berbasis inovasi, Kabupaten Bengkalis dapat membangun ekonomi daerah yang lebih inklusif, tangguh, dan kompetitif di tengah perubahan teknologi global

7) Komitmen Penurunan Emisi di Sektor AFOLU menuju FOLU Net Sink 2030

Penurunan emisi dari sektor AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) merupakan pilar utama dalam pencapaian target Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yaitu kondisi di mana tingkat serapan emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan melebihi jumlah emisi yang dilepaskan. Strategi ini menekankan pada penguatan tata kelola hutan, pengendalian deforestasi, rehabilitasi lahan kritis, serta peningkatan praktik pertanian berkelanjutan. Upaya ini juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dan sistem agroforestri, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, serta integrasi pendekatan berbasis bentang alam (landscape approach) dalam perencanaan wilayah. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Bengkalis yang memiliki ekosistem pesisir, lahan gambut, serta

kawasan perkebunan sawit yang luas, peran sektor AFOLU menjadi sangat penting untuk dikendalikan agar dapat mendukung pengurangan emisi sekaligus menjaga fungsi ekologi dan produktivitas lahan. Oleh karena itu, dukungan terhadap inisiatif FOLU Net Sink 2030 harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan rendah karbon.

2.4.3.2 Isu Stategis Nasional

1. Hilirisasi Sawit dari CPO ke Industri Turunan

   Hilirisasi Sawit dari CPO ke Industri Turunan. Riau merupakan produsen CPO terbesar di Indonesia. Hal ini memberikan Dampak ekonomi ke Riau dengan adanya potensi Investasi pabrik turunan sawit, Serapan tenaga kerja industri dan potensi Peningkatan PAD dari industri.

   Kabupaten Bengkalis memiliki luas perkebunan sawit sebesar 283.034,88 ha dengan total produksi sebesar 640.525,57, sehingga kebijakan hilirisasi turunan CPO menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat industri pengolahan, membuka lapangan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan di Kabupaten Bengkalis.

2. Penurunan Produksi Migas Nasional serta percepatan transisi energi baru

   Penurunan Produksi Migas Nasional serta percepatan transisi energi baru. Hal tersebut memberikan dampak ke Riau dikarenakan Riau mempunyai banyak sumur tua (blok lama) yang menyebabkan penurunan DBH migas.

   Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau, sehingga penurunan produksi migas nasional berpotensi berdampak terhadap struktur ekonomi dan penurunan DBH migas. Di sisi lain, untuk mendukung transisi energi baru terbarukan, Kabupaten Bengkalis memiliki potensi lahan perkebunan sawit yang luas sebagai basis pengembangan energi berbasis biomassa dan bioenergi. Selain itu, sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Bengkalis juga memiliki peluang untuk mendukung pengembangan energi terbarukan berbasis potensi kelautan dan wilayah pesisir.

3. Penguatan rantai pasok dan koridor ekonomi Sumatera

   Penguatan rantai pasok dan koridor ekonomi Sumatera. Posisi Riau di Selat Malaka,menjadi jalur dagang dunia memerlukan Integrasi pelabuhan, tol dan kawasan industri.

   Kabupaten Bengkalis memiliki posisi strategis sebagai wilayah pesisir yang berdekatan dengan jalur perdagangan Selat Malaka, sehingga penguatan rantai pasok dan koridor ekonomi Sumatera menjadi peluang untuk meningkatkan konektivitas pelabuhan, akses antarwilayah, distribusi barang, pengembangan kawasan ekonomi, serta peran Bengkalis dalam arus perdagangan regional.

4. Swasembada pangan

   Swasembada pangan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat merupakan arah pembangunan besar nasional melalui strategi transformasi bangsa.

   Kabupaten Bengkalis memiliki potensi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat mendukung penguatan ketahanan pangan daerah, sehingga agenda swasembada pangan perlu diarahkan pada peningkatan produksi pangan lokal, kelancaran distribusi pangan, penguatan cadangan pangan, serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan.

5. Pengentasan kemiskinan

   Pengentasan kemiskinan yang membutuhkan persatuan dan kepemimpinan yang bertanggung jawab sehingga memberikan dampak kepada masyarakat yang masih hidup dalam kesulitan.

   Kabupaten Bengkalis masih perlu memperkuat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan akses layanan dasar, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat pada wilayah dengan keterbatasan akses ekonomi.

6. Inflasi

   Inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat di Riau yang dipengaruhi oleh distribusi barang, ketergantungan pasokan luar daerah, struktur ekonomi sawit–migas, dan kondisi geografis pesisir dan kepulauan. Tren ini akan berdampak pada kebijakan fiskal.

   Kabupaten Bengkalis memiliki karakteristik wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan yang memengaruhi kelancaran distribusi barang serta biaya logistik, sehingga pengendalian inflasi menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta efektivitas kebijakan fiskal daerah.

7. Penanganan Risiko Bencana dan Anggaran Penanggulangan

   Penanganan Risiko Bencana dan Anggaran Penanggulangan Anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) dipotong meski tingginya frekuensi bencana di Indonesia, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana nasional yang berkelanjutan.

   Kabupaten Bengkalis memiliki kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, abrasi pantai, gelombang pasang, serta risiko bencana di wilayah pesisir dan kepulauan, sehingga penguatan kapasitas penanggulangan bencana

perlu diarahkan pada pencegahan, kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, sarana prasarana, dan dukungan anggaran yang memadai.

8. Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi

   Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi krisis kepercayaan publik tekanan era digital dan lemahnya partisipasi warga masih menjadi tantangan besar bagi tata kelola pemerintahan.

   Kabupaten Bengkalis perlu terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta perluasan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan daerah semakin efektif, responsif, dan berkelanjutan.

2.4.3.3 Isu Strategis Provinsi

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui optimalisasi mutu pendidikan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, serta ketenagakerjaan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui penguatan ekonomi inklusif yang mencakup sektor pertanian, pembangunan kawasan industri, hilirisasi produk unggulan daerah, serta penguatan pemodalan UMKM dan koperasi.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif melalui peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, disertai pengawasan pemanfaatan yang efektif.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon dan penguatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
6. Tantang fiskal dan kemandirian anggaran. Riau sedang menghadapi dilema fiskal, meskipun pertumbuhan ekonomi positif, kapasitas APBD diproyeksikan mengalami tekanan. Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat Riau perlu melakukan *refocussing* anggaran secara ketat.
7. Stabilitas makro yang berbasis nilai tambah

2.4.3.4 Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

Isu strategis daerah disimpulkan melalui perumusan isu-isu strategis berdasarkan kondisi kontekstual pembangunan daerah, dinamika lingkungan strategis, serta pertimbangan terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkalis. Setiap komponen dianalisis dengan melihat keterkaitan antara potensi, permasalahan, dan isu strategis, sehingga diperoleh kelompok aspek pembentuk pembangunan daerah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Aspek-aspek tersebut kemudian dirumuskan sebagai isu strategis daerah yang menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Berikut adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis, yang mencakup sejumlah isu utama untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel II-15 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Posisi letak geografis daerah yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan Jalur Pelayaran Internasional 2. Masih tingginya kontribusi sektor migas terhadap perekonomian daerah 3. Luas dan produksi Perkebunan sawit yang tinggi 4. Potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya yang besar 5. Besarnya potensi sektor pariwisata daerah 6. Kawasan industri buruk bakul 7. Pelabuhan internasional 8. Kecamatan Pinggir memiliki gerbang tol yang menghubungkan ruas tol Pekanbaru-Dumai dengan jalan lintas Sumatera 9. Kekayaan dan keragaman budaya daerah	1. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan pendidikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan geografis. 2. Belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah kecamatan, terutama di daerah terpencil dan pesisir. 3. Belum optimalnya daya saing tenaga kerja dalam menghadapi bonus demografi dan percepatan perkembangan teknologi informasi. 4. Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah 5. Masih rendahnya daya saing Koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Belum Optimalnya Pengendalian Tata Ruang Dan Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar, Terutama Air Bersih Dan Sanitasi Untuk Pengembangan Wilayah 2. Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah, Limbah B3 Dan Daur Ulang Sampah 3. Belum Optimalnya Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Masyarakat yang Mendukung Industri Menengah dan Besar 4. Distribusi Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Kurang Merata 5. Belum Optimalnya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 6. Belum optimalnya Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pemerataan akses dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan 7. Belum Optimalnya Pengelolaan Konservasi Pada Ekosistem Daratan dan Pengendalian	1. Ketegangan geopolitik global dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan harga komoditas. 2. Risiko resesi global, inflasi, dan tekanan nilai tukar akibat fluktuasi suku bunga global. 3. Kebijakan proteksionis perdagangan global yang menurunkan daya saing ekspor Indonesia. 4. Ketidakpastian pasar komoditas global dan kebutuhan diversifikasi ekonomi daerah. 5. Krisis energi global dan perlunya transisi menuju energi terbarukan. 6. Perkembangan teknologi dan AI sebagai peluang transformasi sektor pertanian, logistik, dan pendidikan. 7. Komitmen penurunan emisi sektor AFOLU menuju FOLU Net Sink 2030.	1. Hilirisasi Sawit dari CPO ke Industri Turunan 2. Penurunan Produksi Migas Nasional serta percepatan transisi energi baru 3. Penguatan rantai pasok dan koridor ekonomi Sumatera 4. Swasembada pangan 5. Pengentasan kemiskinan 6. Inflasi 7. Penanganan Risiko Bencana dan Anggaran Penanggulangan 8. Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui optimalisasi mutu pendidikan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, serta ketenagakerjaan. 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui penguatan ekonomi inklusif yang mencakup sektor pertanian, pembangunan kawasan industri, hilirisasi produk unggulan daerah, serta penguatan pemodalan UMKM dan koperasi. 3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif melalui peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk memperkuat konektivitas	1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Secara Merata dan Inklusif 2. Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Efisien, Transparan, dan Berbasis Digital serta Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah 4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur serta Konektivitas Antarwilayah 5. Penguatan kearifan lokal Budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6. Belum optimalnya peningkatan investasi daerah 7. Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya strategis 8. Ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekonomi dunia dan menghambat perkembangan ekonomi daerah 9. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat mengakibatkan kemandirian fiskal daerah menjadi rendah 10. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan kualitas infastruktur yang masih rendah belum mendukung pembangunan daerah dengan baik 11. Ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana	Abrasi, Resiko Banjir, Abrasi Serta Perbaikan Ekosistem Mangrove			antarwilayah, disertai pengawasan pemanfaatan yang efektif. 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon dan penguatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. 6. Tantang fiskal dan kemandirian anggaran. Riau sedang menghadapi dilema fiskal, meskipun pertumbuhan ekonomi positif, kapasitas APBD diproyeksikan mengalami tekanan. Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat Riau perlu melakukan refocussing anggaran secara ketat. 7. Stabilitas makro yang berbasis nilai tambah	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	umum yang belum memadai dan belum tersebar merata di seluruh wilayah 12. Belum optimalnya pengelolaan konservasi ekosistem daratan dan pesisir, termasuk pengendalian abrasi, risiko kebakaran hutan dan lahan, risiko banjir, dan rehabilitasi ekosistem mangrove 13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas					

1) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Secara Merata dan Inklusif

Isu pendidikan dan kesehatan merupakan isu penting dalam pembangunan kabupaten Bengkalis. Isu pendidikan dan kesehatan merupakan permasalahan yang dihadapi pada pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Bengkalis. Kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang tersebar pada beberapa pulau besar memerlukan penyediaan infrastruktur transportasi agar tingkat aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin baik.

Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Akibat kondisi wilayah yang cukup sulit karena banyak dipisah oleh sungai dan sangat tersebar, maka fasilitas dan tenaga bidang pendidikan dan kesehatan masih belum terdistribusi merata, tetapi hanya terkonsentrasi wilayah perkotaan dan wilayah pertumbuhan.

Wilayah yang tersebar dan banyak dipisahkan oleh laut dan selat dengan sarana dan prasarana transportasi yang terbatas mengakibatkan mobilitas penduduk sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur di daerah Bengkalis relatif mahal karena daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung tanah yang rendah, mengakibatkan biaya pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan semakin mahal juga. Kondisi wilayah yang dimikian mengakibatkan sebahagian sarana pendidikan dan kesehatan terkonsentrasi diwilayah ibu kota kecamatan, yang merupakan daerah dengan kondisi yang lebih baik, jika dibandingkan dengan desa-desa lain.

Pembangunan pembangunan manusia yang terbatas akan mengakibatkan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran terbuka dan akses penduduk untuk berusaha dan bekerja semakin terbatas. Kondisi ini secara akumulatif mengakibatkan kesejahteraan masyarakat rendah dan angka kemiskinan yang tinggi. Capaian pembangunan di Kabupaten Bengkalis yang merupakan akumulasi dari pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan manusia. Secara akumulatif pembangunan pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan manusia. Hasil-hasil pembangunan manusia merupakan potret dari keseriusan pembangunan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki kemampuan dalam aktivitas ekonomi yang ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pendapatan yang dimiliki mencukupi untuk memenuhi konsumsi sehari-hari, sehingga dapat menikmati hidup yang layak, termasuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula.

Untuk lebih memaksimalkan pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis dan untuk memantapkan basis pembangunan yang mengakar di tingkat masyarakat, maka upaya-upaya peningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus dilaksanakan memalui peningkatan basis kompetensi agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik lokal, nasional dan global.

Langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan merata adalah pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan terutama di luar pulau Bengkalis, sehingga akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin meningkat. Upaya-upaya ini tentu saja harus diiringi oleh peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan, yang terdistribusi secara merata disetiap wilayah di Kabupaten Bengkalis. Upaya peningkatan kesehatan penduduk juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan kesehatan dan penyuluhan kesehatan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Meningkatkan promosi, pembinaan, dan pengawasan kesehatan terhadap diri, rumah, dan lingkungan. Peningkatan akses wilayah terpencil dan sulit dijangkau perlu ditingkatkan, agar berdampak pada peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sumberdaya manusia.

2) Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Isu penting dalam perekonomian daerah adalah pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk dapat menggantikan sektor pertambangan minyak dan gas sebagai penopang perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis. Sektor pertanian sebagai sektor dominan dalam perekonomian tanpa minyak dan gas juga masih didominasi oleh sektor perkebunan yang lebih banyak dikuasai oleh perusahaan swasta besar. Perkembangan perkebunan rakyat telah tumbuh berkembang dan memerlukan perhatian serius dalam mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal mendukung sektor pertanian sebagai sektor unggulan, maka pemanfaatan keunggulan komparatif (kompetitif advantage) yakni potensi khusus wilayah Bengkalis yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa) belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan ekonomi kerakyatan pada sub-sektor perikanan darat dan peternakan. Disisi lain, pemanfaatan lahan untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat juga belum berjalan secara maksimal dalam pengembangan perekonomian rakyat, dan hal ini benyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Perkembangan sub sektor perkebunan juga mengakibatkan dampak buruk bagi perkembangan sub sektor tanaman pangan, dimana penggunaan lahan untuk pertanian telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian pangan kepada perkebunan.

Upaya mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan

peranan masyarakat terhambat dengan kualitas sumberdaya manusia yang masih terbatas. Kemampuan dan wawasan kewirausahaan penduduk menjadi faktor utama terhambatnya pengembangan perekonomian kerakyatan, khususnya pengembangan usaha kecil dan menengah pada sektor industri dan jasa. Penciptaan iklim investasi dan mendorong keterlibatan rakyat dalam pengembangan perekonomian tentu saja masih memerlukan perhatian, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspor non migas dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis terus mengalami perkembangan yang kurang stabil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mudah mengalami perubahan terhadap perkebangan ekonomi Global dan Nasional. Sektor dominan perekonomian Bengkalis adalah sektor pertambangan (khusunya minyak), dan pada perekonomian tanpa minyak dan gas sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan dimasa yang akan datang akan menjadikan sektor perekonomian Kabupaten Bengkalis semakin handal, karena potensi pertambangan minyak merupakan unrenewable resources atau sumberdaya yang tidak terbarukan, sehingga akan semakin menurun kontribusinya dalam struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis. Maka, untuk mendukung pembangunan perekonomian Kabupaten Bengkalis yang lebih baik dan berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan, maka diperlukan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan koparatif (comparative advantage) yakni potensi khusus wilayah Bengkalis yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa, perbukitan) untuk pengembangan produksi perekonomian masyarakat.

Pemanfaatan geografis daerah sebagai keunggulan daerah untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan agar penguasaan aset lahan dan distribusi penguasaan perkebunan kelapa sawit berlangsung dengan baik. Namun, disisi lain pengawasan terhadap pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan ekspor non migas, diperlukan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha. Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap perlu dimaksimalkan agar prosedur pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan baik.

Pembangunan sektor pertanian, selain dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, juga sangat penting dalam menopang pengamanan ketahanan pangan. Upaya-upaya peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan perlu menjadi prioritas

pembangunan sektor pertanian agar dapat memberikan kontribusi yang semakin tinggi pada perekonomian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor industri dan usaha kecil pada perekonomian daerah maka perlu prioritas pada program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro. Hal ini berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan penduduk, penurunan penangguran, dan penanggulangan kemiskinan. Artinya program dan kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah akan menjadi program utama yang dapat mengakomodir kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka penangguran, dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan menjadi isu strategis yang perlu dikedepankan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, terutama masalah kemiskinan dan pengangguran

3) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Efisien, Transparan, dan Berbasis Digital serta Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik mana kala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance). Suatu pemerintahan dikelola secara baik mana kala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas pemerintah Kabupaten Bengkalis. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan memudahkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, adanya birokrasi yang memadai akan memungkinkan terlaksananya program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah dengan melakukan penataan sistem kepegawaian yang meliputi sistem pengangkatan pegawai, penempatan yang sesuai dengan latar belakang dan kompetensi, kenaikan pangkat dan karier berdasarkan kinerja dan prestasi, pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment), pelatihan berkala dan on-job training, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Meningkatkan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan menerapkan standar pelayanan minimum pada semua bidang. Termasuk di dalamnya pengurusan surat menyurat, perizinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelayanan umum.

Menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan bertahap menggunakan sistem teknologi informasi (IT) yang efisien, efektif, dan akurat sehingga mempercepat pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kinerja aparatur. Menerapkan transparansi dalam penganggaran, program berbasis kinerja, dan asas-asas manajemen modern untuk melancarkan pembangunan.

Dalam bidang kependudukan, pembangunan diarahkan untuk menerapkan sistem informasi kependudukan sehingga administrasi kependudukan yang handal dapat membantu optimalisasi pelayanan publik, membangun jaringan dan program aplikasi informasi kependudukan yang tersambung (connected) di setiap kecamatan sampai ke dinas terkait, sehingga duplikasi data penduduk dapat dihindari, mempertegas penerapan ketentuan (Perda) bagi pendatang untuk mengurangi dampak-dampak sosial pengangguran yang bersumber dari arus urbanisasi, dan memperbaharui kebijakan kependudukan sesuai dengan perkembangan kota dan pembangunan.

Selain itu, tata kelola keuangan daerah khusunya dari sisi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pertama, terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Kedua, potensi pajak daerah yang belum sepenuhnya optimal, baik dari sektor pajak daerah seperti PBB maupun pajak restoran dan hotel, yang memerlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, sektor retribusi daerah juga berpotensi untuk lebih ditingkatkan melalui pengelolaan yang lebih efisien dan pelayanan yang lebih baik.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan inovatif. Keberagaman sumber pendapatan, menjadi pilihan yang strategis dengan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pengelolaan sumberdaya alam dan kekayaan daerah dan memacu pusat pertumbuhan ekonomi seperti pengembangan kawasan industri buruk bakul. Disamping itu penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat

4) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur serta Konektivitas Antarwilayah

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah pesisir pulau Sumatera. Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan NKRI khususnya pembangunan infrastruktur untuk pulau-pulau terluar merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka kesatuan dan ketahanan Republik Indonesia. Oleh karena itu Kabupaten Bengkalis perlu menyambut isu ini agar pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat disinkronisasikan dengan program pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk pulau Rupat yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan.

Sinkronisasi pembangunan tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerintah pusat. Pada tingkat yang lebih rendah, Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau untuk pengetasan kemiskinan dapat melakukan sinergi dengan pemerintah Bengkalis hingga saat ini secara

berkelanjutan membangun perumahan sederhana dan sehat serta jalan-jalan akses ke daerah-daerah terisolir. Program-program ini dapat dikomunikasikan dan disinkronisasikan dengan program-program dari Provinsi Riau.

Pembangunan infrastruktur baik darat, laut maupun udara di Kabupaten Bengkalis memerlukan dana yang relatif besar. Hal ini dikarenakan struktur tanah daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah lunak yang memiliki daya dukung yang rendah. Disamping itu, beban infrastruktur yang cukup tinggi untuk mendukung kegiatan ekonomi dibidang perkebunan, pengolahan hasil alam dan migas yang memerlukan konstruksi yang padat modal dan teknologi yang memadai. Namun demikian, pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam misi pembangunan Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, program pembangunan dan peningkatan infrastruktur tidak bisa diabaikan seperti percepatan pembangunan jalan dan jembatan baru untuk membuka isolasi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang ada, pembangunan fasilitas pelabuhan dan juga revitasisasi bandar udara suangi selari yang telah direncanakan. Program-program pembangunan infrastruktur yang strategis seperti misalnya pembangunan jembatan Sungai pakning-Pulau Bengkalis atau pembukan jalan dari kawasan industri buruk bakul menuju tol Duri diperkirakan dapat memberikan dampak pembangunan yang signifikan bagi kabupaten Bengkalis.

Untuk keperluan perumahan penduduk, terutama penduduk miskin, pembangunan rumah layak huni masih terus diperlukan. Hingga tahun 2023, tercatat Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 44,06 persen .Untuk keberlanjutan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ini, Pemerintah dapat memberikan target baru pada kawasan kumuh dalam pembangunan rumah layak huni.

Isu strategis lain yang perlu diperhatikan adalah isu mengenai ketersediaan air bersih yang masih minim. Rencana strategis yang ramah lingkungan perlu dipetimbangkan agar sumber air baku dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan air bersih secara berkelanjutan. Selain itu, untuk keperluan irigasi diperlukan sistem pompanisasi dan jaringan irigasi teknis yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang baik.

Selain akses air bersih, kondisi infrastruktur kelistrikan di wilayah pesisir Bengkalis masih tergolong terbatas dan perlu diantisipasi secara sistematis. Permasalahan ini berpotensi menghambat produktivitas perekonomian dan mengganggu kelancaran berbagai aktivitas pembangunan di kawasan pesisir Kabupaten Bengkalis.

Isu lain yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis secara global dan perlu dipertimbangkan serta dikonsultasikan secara baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat adalah kejelasan dan ketetapan mengenai struktur tata ruang dan wilayah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan tidak bertentangan dengan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang akan disahkan nantinya.

5) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi wilayah pesisir secara berkelanjutan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2025–2029. Sebagai wilayah yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang 446 km, Kabupaten Bengkalis menghadapi tekanan ekologis yang tinggi, seperti abrasi pantai yang terus meningkat, degradasi hutan mangrove, pencemaran perairan, serta kerusakan lahan gambut. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi daratan dan pesisir, lemahnya pengendalian alih fungsi lahan, serta praktik pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Dampak dari permasalahan tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir, tetapi juga mengganggu ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di wilayah pesisir menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi. Isu ini semakin relevan mengingat masih rendahnya capaian kualitas lingkungan hidup, seperti indeks kualitas air dan tutupan lahan yang berada pada kategori sedang. Selain itu, belum tersedianya sistem pengawasan dan pengendalian lingkungan yang efektif, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor yang adaptif dan berbasis ekosistem dalam mengelola wilayah pesisir, dengan memperkuat kelembagaan lokal, membangun sistem informasi lingkungan, dan mendorong kemitraan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.

Secara umum, isu ini mencerminkan pentingnya transformasi paradigma pembangunan dari eksploitasi sumber daya menuju keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi wilayah pesisir bukan hanya sebagai isu teknis, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi ekologis, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana lingkungan. Dengan menjadikan isu ini sebagai prioritas strategis, Kabupaten Bengkalis dapat mewujudkan visi pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

6) Penguatan kearifan lokal Budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah

Memasyarakatkan Budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah-sekolah, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik, penyelenggaraan acara seni dan budaya, dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan. Penerapan Budaya Melayu di tengah masyarakat harus memperhatikan adat yang bersendikan syara-syara bersendikan Kitabullah di mana Islam menjadi pilar utamanya.

Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam perdagangan dan aktivitas

lainnya, sehingga Budaya Melayu tidak hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan.

Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam Budaya Melayu termasuk dalam hal etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika (kesenian, tarian, pola gambar dan ukiran), ilmu pengetahuan (teknologi, arsitektur), sastera (buku, puisi, sajak) dan aspek budaya lainnya. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu menjadi hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan ini.

Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat, aparatur pemerintah, anak-anak, dan pemuda melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata.

Mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan pembangunan.

Memajukan dan membantu kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan pada masyarakat. Menangkal pengaruh negatif dari globalisasi dan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan akhlak dan ajaran agama dengan mempersiapkan perangkat hukum, pengawasan, pembinaan, dan sanksi sehingga kehidupan masyarakat terlindungi dari pengaruh yang tidak baik.

Memajukan ekonomi syari'ah dengan mendukung program lembaga ekonomi umat seperti lembaga amil zakat, baitul mal wattamwil (BMT), dan perbankan syari'ah yang turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggiatkan perekonomian masyarakat. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

2.5 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD

Menyusun Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok- pokok pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning.

Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan Program yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis. Berikut ringkasan pokok pikir Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2027.

Tabel II-16 Konsistensi Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027
1.	A. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, optimalisasi pelayanan kesehatan, pelayan publik, pemberdayaan UMKM dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bengkalis **B.** Pada sektor pendidikan yang memerlukan perhatian dan penanganan terkait sarana dan prasarana, infrastruktur dan Pendidikan Sumber Daya Manusia.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, optimalisasi pelayanan kesehatan, pelayan publik, pemberdayaan UMKM dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bengkalis	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur).
3.	Penuntasan pembangunan jalan poros pada tiap tiap Kecamatan yang dapat menghubungkan antar desa dan antar kecamatan yang merupakan kebutuhan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur (Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem Pendukung untuk pengembangan Industri)
4.	Optimalisasi program dan kegiatan pengembangan sektor pertanian	Pembangunan Kawasan Pesisir dan daerah terpencil/tertinggal (Lingkungan,

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027
	terutama pada kluster kawasan yang fokus pada agro industri melalui dukungan Program dan kebijakan yang bertujuan untuk memajukan industri pertanian di Kabupaten Bengkalis	Ekonomi dan Pemberdayaan)

2.6 Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta percepatan pencapaian pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan akses layanan, peningkatan responsivitas perangkat daerah, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Berbagai inovasi yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik dan menghadirkan solusi atas permasalahan pelayanan di tingkat masyarakat. Adapun daftar inovasi daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-17 Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
1	Tahun 2020	Menunjuk/Mengangkat Petugas Registrasi Desa/Kelurahan	Menunjuk/mengangkat Petugas Registrasi pada semua Desa/Kelurahan yang akan membantu pelaksanaan pelayanan sehingga masyarakat cukup mengakses layanan Dukcapil di Desa/Kelurahannya masing-masing	Disdukcapil
2	Tahun 2020	Layanan Dukcapil JEBOL MASTER (Jemput Bola Secara Massif dan Terintegrasi)	Petugas Disdukcapil yang datang melayani penduduk dimana saja sampai kerumah-rumah. Untuk semua penduduk, terutama Lansia, Disabilitas, Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan lainnya yang berkebutuhan Khusus.	Disdukcapil
3	Tahun 2020	Beramoek dengan Sismantik (Berantas nyamuk dengan Siswa Pemantau Jentik)	DBD masih menjasi penyakit yang mengkhawatirkan . Prevelensinya di Indonesia. Hal ini terlihat masih adanya warga negara Indonesia yang menderita DBD setiap tahunyya. Begitu juga halnya yang terjadi di Kabupaten Bengkalis , khususnya di Kecamatan Bukit Batu Wilayah Kerja UPT Puskesmas Sungai Pakning.	DINKES

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
4	Tahun 2020	Desa Siaga Kesehatan - Kader Pembangunan manusia	Latar belakang masih lemahnya koordinasi dan pendampingan dalam isu kesehatan, gizi, dan oendidikan dasar didesa Deskripsi Inovasi Mengangkat dan memberdayakan kader pembangunan manusia (KPM) untuk mendampingi keluarga dalam pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan ibu - anak, gizi dan pendidikan anak Tujuan Meningkatkan kualitas SDM desa sejak dini melalui pendampingan langsung oleh kader yang terlatih Manfaat Masalh stunting, kesehatan ibu - anak, dan putus sekolah dapat dicegah sejak awal, warga lebih peduli dan aktif dalam pembangunan manusia	Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis
5	Tahun 2020	Pelayanan Terpadu (PATEN)	Untuk memudahkan segala urusan pelayanan Masyarakat Kecamatan Rupat Utara maka diadakan pelayanan menggunakan 1 Pintu dengan menggunakan ruangan yang dimiliki kantor Camat Rupat Utara	Kecamatan Rupat Utara
6	Tahun 2020	Pelayanan Alikasi Digital Desa	Mengatasi masalah administrasi desa yang memakan waktu dan tenaga kerja, serta penigkatan akses informasi dan pelayanan digital, transparansi pemerataan informasi dan peluang untuk mengembangkan potensi desa, permasalahannya kurangnya literasi, kesenjangan akses jaringan	Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat
7	Tahun 2020	Website Desa Suka Damai	Tujuannya adalah agar Masyarakat bisa mengakses segala macam bentuk kegiatan yang ada di Desa	Desa Suka Damai Kecamatan Rupat Utara
8	Tahun 2021	Penegakkam Hak Tenaga Kerja Melalui Tertib Administrasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis	Latar Belakang Masalah : Masih rendahnya perhatian perusahaan terhadap hak tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis Deskripsi Inovasi : Meningkatkan hak-hak tenaga kerja melalui tertib administrasi tenaga kerja, Sosialisasi Perda Kab.Bengkalis No 4 Tahun 2004 ke perusahaan, Surat edaran tentang hak tenaga kerja lokal, penerbitan kartu hak tenaga kerja Tujuan Inovasi : Terpenuhinya hak hak tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis Manfaat Inovasi : Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Indikator Kinerja sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	RSUD Mandau
9	Tahun 2021	Layanan Dukcapil MOLDUK (Mobil Online Kependudukan)	Disdukcapil menyiapkan mobil pelayanan dengan fasilitas lengkap yang dapat bergerak kemana saja dalam Kabupaten Bengkalis, yang mampu memberikan pelayanan untuk semua jenis dokumen kependudukan.	Disdukcapil

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
10	Tahun 2021	Layanan Dukcapil KAMPUNG MANDIRI (Dokumen Administrasi Kependudukan Rampung Mantap di Desa/Kelurahan Terintegrasi)	Menjadikan Desa/Kelurahan sebagai tempat pelayanan, yang Disdukcapil tetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2021. Masyarakat cukup datang ke kantor Desa/Kelurahan tempat tinggalnya, semua dokumen dicetak di Desa/Kelurahan.	Disdukcapil
11	Tahun 2021	Layanan Dukcapil Go To School	Disdukcapil menurunkan petugas ke sekolah-sekolah mulai tingkat PAUD sampai SLTA untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan terutama Akta Kelahiran, KIA, dan KTP-el akan di lanjutkan dengan Go To Campus.	Disdukcapil
12	Tahun 2021	Layanan Dukcapil BUAH HATI (Buat Akta Kelahiran Hasil Terintegrasi)	KerjaSama antara Disdukcapil dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Bengkalis, untuk memberikan pelayanan secara bersama-sama yang memungkinkan anak baru lahir langsung diberikan Ata Kelahiran, Para Bidan atau pihak Rumah Sakit yang membantu memfasilitasinya.	Disdukcapil
13	Tahun 2021	Layanan Dukcapil KOLABORASI (Kerjasama Organisasi untuk Layanan Berbobot dan Terintegrasi)	Disdukcapil melakukan kerjasama dengan berbagai Organisasi Kemasyarakatan untuk mendukung terwujudnya layanan kependudukan yang benar-benar dapat membahagiakan masyarakat, seperti Badan Koordinasi Antar Gereja (BKAG) untuk layanan Akta Perkawinan, Forum Anak dan Forum PAUD untuk peningkatan layanan Akta Kelahiran dan lainnya.	Disdukcapil
14	Tahun 2021	Layanan Dukcapil LANTERA (Layanan Terintegrasi Keluarga)	Disdukcapil bekerjasama dengan pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama, khususnya untuk memberikan pelayanan bagi penduduk yang perkara cerainya telah ditetapkan dan mendapat Akta Cerai Pengadilan Agama atau bagi penduduk yang mengajukan isbat nikah dan ditetapkan sah oleh pengadilan Agama kemudian terbit Akta Cerainy, maka langsung pula Disdukcapil terbitkan dokumen kependudukannya dengan status barunya. Hal ini penting untuk validitas dokumen kependudukan.	Disdukcapil
15	Tahun 2021	WARUNG SAGU	Mengajak masyarakat untuk gemar makan sayur dan buah karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan ,pemeliharaan dan mengandung serat yang tinggi.	DINKES
16	Tahun 2021	SiKeli (Aplikasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan)	Dinas Perikanan melalui Bidang Perikanan Budidaya melakukan inovasi dengan membuat aplikasi kesehatan ikan dan lingkungan guna memberikan layanan dan fasilitas pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan. Aplikasi ini memudahkan pembudidayaan dapat secara langsung melalui Smartphone untuk mendaftar agar dapat dilakukan pengujian kualitas air lingkungan budidaya dan pengaduan penyakit ikan. Dengan adanya aplikasi ini, segala permasalahan kualitas air pada lingkungan budidaya dapat diketahui sehingga dapat dikontrol, informasi juga dapat diperoleh	Dinas Perikanan

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			dengan cepat sehingga strategi pengendalian penyakit tertentu lebih efisien dan aplikatif.	
17	Tahun 2021	Sistem Informasi Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	1. Latar Belakang Evaluasi Rencana Kerja (Renja) seringkali dilakukan secara manual atau terpisah-pisah antar unit, sehingga sulit mendapatkan gambaran real-time mengenai capaian program dan kegiatan. Aplikasi digital diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan integrasi data. 2. Tujuan Inovasi - Menyediakan platform digital untuk evaluasi Renja secara berkala (triwulan/tahunan). - Mempermudah pemantauan kinerja program dan kegiatan. - Meningkatkan akurasi pelaporan dan akuntabilitas unit kerja. - Mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 3. Fitur utama - Dashboard Kinerja Menampilkan ringkasan real-time pencapaian indikator kinerja. - Input Data Kegiatan Unit kerja dapat mengisi progres kegiatan, anggaran, dan output. - Evaluasi Otomatis Sistem menghitung pencapaian target dan memberikan status (Merah/Kuning/Hijau). - Laporan Periodik Ekspor laporan evaluasi dalam format PDF/Excel. - Notifikasi & Reminder Mengingatkan unit kerja untuk update data secara berkala.	BAPPEDA
18	Tahun 2021	SI-JABPRI (Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau)	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja wajib dilakukan oleh setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang digunakan dalam rangka penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan. Analisis jabatan dan analisis beban kerja juga merupakan salah satu syarat dalam pemanfaatan aplikasi Integrated Mutasi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN. Sebelum digunakannya aplikasi SI-JABPRI, proses penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama, tenaga yang banyak, dan biaya yang tidak sedikit. Dengan pemanfaatan aplikasi SI-JABPRI, maka proses penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat dilakukan secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien karena dapat meminimalisir besarnya anggaran, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja lebih mudah dan cepat serta dapat digunakan secara real time	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
19	Tahun 2021	SKUAD	Latar belakang dibuatnya inovasi Surat Keterangan Usaha dan Ahli Waris Deliveryini yaitu mengingat bahwa : 1. Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan desa/ kelurahan bagi warga yang memiliki usaha desa/ kelurahan tersebut perlu dipantau dan dibuktikan kebenarannya. Dengan adanya pengantaran dokumen yang telah terbit dari pihak desa dan kelurahan dapat memantau sekaligus membuktikan bahwa benar adanya usaha tersebut, mengingat bahwa banyaknya kejadian usaha yang tidak nyata yang dibuat untuk mendapatkan bantuan usaha dari pemerintah. 2. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh desa/ kelurahan yang kemudian diketahui oleh camat merupakan dokumen yang memiliki kerumitan cukup tinggi dimana sering terjadi kesalaha baik dari pihak desa/ kelurahan, masyarakat ataupun dari pihak kecamatan. Hal ini menyebabkan pengurusan ahli waris yang memakan waktu yang cukup lama tergantung kerumitannya. Oleh karena itu Kecamatan Bengkalis mempunyai komitmen dalam penyelesaian dokumen Surat Keterangan Ahli Waris menggunakan waktu paling lama 3 hari (diluar kesalahan), maka dibuatlah suatu inovasi yang mempunyai bentuk tanggungjawab dan komitmen pelayanan yang dibuat bahwa apabila berkas terjadi kesalahan di pihak desa/ kelurahan/ kecamatan, maka berkas yang telah selesai tersebut akan diantar langsung oleh petugas kepad masyarakat yang bersangkutan. Tujuan dari inovasi SKUAD adalah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk mewujudkan komitmen dalam pelayanan. Manfaat yang diperoleh dapat dilihat dari 2 (dua) sisi Yaitu : 1. Sisi masyarakat : Masyarakat terbantu dengan diantarnya berkas yang mereka urus dan merasa diperhatikan oleh pemerintah. 2. Sisi pelayan/ petugas : Petugas dapat mengawasi, bertanggungjawab terhadap pekerjaannya dan termotivasi untuk bekerja lebih baik.	Kecamatan Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
20	Tahun 2021	PANDU	Latar belakang Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepad masyarakat, Kecamatan Bengkalis membuat sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien yaitu Pelayanan Kecamatan Bengkalis Drive Thru (PANDU). Adapun pelayanan yang didapatkan memalui PANDU yaitu masyarakat dapat mengurus Surat Keterangan Kurang Mampu dan menyampaikan pengaduan serta laporan kejadian di pos PANDU Kecamatan Bengkalis melalui kendaraan pribadi. Latar belakang dibuatnya pelayanan PANDU dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat yang harus dilayani dengan cepat dalam mengurus Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) yang dipergunakan untuk mengurus BPJS gratis dari Dinas Ssosial Kabupaten Bengkalis. Seringnya msyarakat yang mengurus BPJS gratis sedang dalam keadaan darurat/ genting seperti ada keluarga yang berada di rumah sakit/ IGD yang memerlukan bantuan biaya berobat melalui BPJS. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dalam melunasi tunggakan pembayaran BPJS dan keperluan biaya mendadak jika sakit, membuat kantor Camat Bengkalis membantu masyarakat agar mendapatkan pelayanan dengan cepat dan efisien dalam pengurusan SKKM. Selain itu untuk pelayanan pengaduan dan lapor kejadian juga memerlukan respon cepat tanggap sehingga dengan adanya PANDU masyarakat dapat melaporkan suatu kejadian dengan cepat kepada petugas yang sedang bertugas. Bentuk inovasi Pelayanan Kecamatan Bengkalis Drive Thru (PANDU) adalah bentuk inovasi pelayanan publik yang meliputi proses pemberian layanan langsung kepada msyarakat melalui pos PANDU yang telah disediakan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada msyarakat dalam pengurusan Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) dan penyampaian pengaduan serta laporan kejadian Perubahan yang dilakukan Masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya masyarakat harus menunggu dan antri dengan masyarakat lainnya di loket PATEN untuk mendapatkan pelayanan, Kecamatan Bengkalis menyediakan alternatif khusus Surat Keterangan Kurang Mampu untuk keperluan berobat dapat dilakukan melalui pos PANDU dan pelaporan/ pengaduan yang lebih responsif/ cepat tanggap	Kecamatan Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
21	Tahun 2021	SI-COLET (Sistem Pencarian Informasi Elektronik)	Sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan di kantor camat Bengkalis melalui 1 (satu) link/ QR code. Penyelenggaraan inovassi Si Colet dapat diakses melalui link tautan (https://linktr.ee/SiColet_Kec.Bengkalis) atau melakukan scan pada QR code yang telah disediakan. Inovasi Si Colet memberikan informasi dan pelayanan sebagai berikut : Persyaratan pelayan di kantor camat Bengkalis, website kecamatan Bengkalis, akses ke aplikasi Si-Atand, survey kepuasan masyarakat online, pengeduan dan laporan kejadian, informasi dan pengaduan PATEN, kritik dan saran online, media sosial kecamatan Bengkalis (instagram, facebook dan youtube) dan peta lokasi kantor camat Bengkalis (google map)	Kecamatan Bengkalis
22	Tahun 2021	Kartu Pustaka PAUD HI serbaguna	Bunda PAUD Kecamatan Bengkalis memiliki inovasi yang bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, beberapa dokter gigi dan dokter anak yang ada di Bengkalis dan toko buku Sejarah Baru. Bunda PAUD mewajibkan untuk seluruh anak taman kanak kanak dan PAUD memiliki kartu pustaka. Dimana kartu pustaka selain mendapatkan akses membaca dan meminjam buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, juga memiliki manfaat yaitudapat potongan harga 10% berbelanja di toko buku dan berobat di dokter gigi dan dokter anak yang bekerjasama dengan Bunda PAUD.	Kecamatan Bengkalis
23	Tahun 2021	Wisata Mangrove	Membantu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggungjawab serta meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove dan lingkungan hidup yang menjadi daya Tarik tersendiri di wisata alami	Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat
24	Tahun 2021	Pacu Sampan	Menghidupkan kembali tradisi ciri khas Masyarakat pada saat melakukan penyebrangan melalui Sungai selat Morong dan dijadikan sebagai event tahunan Desa	Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat
25	Tahun 2021	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak Stunting	Sekilas yang melatar belakangi permasalahan yakni masih tingginya angka anak stunting didesa, sehingga timbul kekhawatiran munculnya gizi buruk bagi anak- anak yang ada di desa. Adapun tujuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bergizi pada anak- anak stunting tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya anak gizi buruk atau meningkatnya angka anak stunting di desa. Adapun manfaatnya bagi anak- anak adalah tidak terjadinya gizi buruk atau anak stunting dan meningkatkan pertumbuhan dan kecerdasan anak.	Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara
26	Tahun 2021	Desa wisata	Merupakan bentuk inovasi desa dibidang kepariwisataan yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sehingga mencetuskan ide-	Desa Muntai Barat

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			ide kreatif untuk menarik minat bagi pengunjung yang datang	Kecamatan Bantan
27	Tahun 2021	Batik tenum BUMDes Langgam Sako	Tujuan dibentuknya batik tenun BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) pada umumnya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi desa dan pelestarian budaya lokal, menciptakan lapangan kerja bagi warga desa terutama perempuan dan kelompok pengrajin, menambah pendapatan masyarakat desa melalui usaha produksi dan penjualan batik tenun serta meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)	Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis
28	Tahun 2021	Kerajinan tangan pembuatan piring dari lidi sawit	Memperhatikan perekonomian masyarakat yang pada saat ini belum stabil dan memanfaatkan SDM dan SDA pada bidang UMKM. Manfaatnya untuk mengembangkan penyetaraan ekonomi masyarakat	Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat
29	Tahun 2022	PROTEK PASIEN (Program Telphon Kembali)	Rendahnya cakupan kunjungan sehat kesadaran masyarakat yg rendah terhadap Pola Hidup Sehat	DINKES
30	Tahun 2022	WARUNG GERJANISWARUNG GERJANIS	LATAR BELAKANG : Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 memiliki persentase balita di timbang 69% naik menjadi 77 % pada tahun 2018. Hal ini masih belum mencapai target yang di tetapkan yakni 80%. (Profil Kesehatan Provinsi Riau, 2018). Khusus wilayah kerja Puskesmas Sadar Jaya pada Tahun 2018 memiliki rata-rata persentase 65% tingkat kehadiran balita di posyandu. Salah satu desa wilayah kerja puskesmas Sadar Jaya yaitu desa Tanjung Damai yang memiliki rata-rata tingkat partisipasi masyarakat untuk menimbang balitanya di posyandu di tahun 2018 memiliki persentase yaitu sebesar 70% dan masih di bawah standar yang di tetapkan. sebelumnya posyandu Anggrek Bulan Desa Tanjung Damai sudah mencapai target 80%, akan tetapi beberapa kurun waktu tahun belakangan ini persentase tersebut cenderung menurun pada tahun 2019 dan 2020 ibu balita tidak membawa balita nya ke posyandu di karenakan wabah Covid 19. Oleh karena itu, penting untuk dibuat suatu program inovasi untuk mengoptimalkan kunjungan posyandu balita melalui “Pasar Sehat dan Warung GERJANIS (Gerakan Jajan Higienis)” yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kehadiran balita di posyandu Anggrek Bulan Desa Tanjung Damai Di wilayah kerja UPT Puskesmas Sadar Jaya.	DINKES

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
31	Tahun 2022	SLIP GaJi (Sistem Laporan Informasi Pasien Gangguan Jiwa)	Indonesia telah menghadapi berbagai transformasi dan transisi khususnya di bidang kesehatan, secara epidemiologi ditunjukkan dengan bergesernya kelompok penyakit menular ke kelompok penyakit tidak menular, termasuk berbagai jenis gangguan akibat perilaku manusia dan gangguan jiwa.1 Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.2Berdasarkan data Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2017 burden of disease akibat penyakit jiwa adalah 2,463.29 per 100,000 penduduk sedangkan burden of disease bunuh diri adalah 3,4 per 100,000 penduduk. Berdasarkan data Riskesdas 2018 didapatkan data kasus ODGJ berat adalah 1,8 per 1000 penduduk atau 429.332 ODGJ berat. Terget layanan keswa terhadap ODGJ berat pada tahun 2024 adalah sebesar 100% sesuai Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. ODGJ berat yang dipasung adalah 31,5% dari jumlah penderita sementara ODGJ yang teratur minum obat hanya 48.9 %. Pengkonsumsi Minuman beralkohol adalah 3.3% dari jumlah penduduk Indonesia yang berusia ≥ 10 tahun. Data Depresi pada usia ≥ 15 tahun adalah 6,1 per 100,000 penduduk, sedangkan gangguan mental emosional adalah 9.8 per 100,000 penduduk.3,4 Keterbatasan sumber daya di bidang kesehatan jiwa, masih menjadi masalah, sehingga penguatan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal menjadi kebutuhan penting. Layanan kesehatan primer sebagai ujung tombak layanan kesehatan di masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan layanan kesehatan jiwa yang terpadu dengan layanan kesehatan umum selain sebagai penggerak masyarakat. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat maka diperlukan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pada fasilitas layanan primer perlu penguatan dalam pencatatan dan pelaporan, namun secara umum terdapat beberapa aspek yang menjadi kendala, salah satunya aspek sistem informasi.1 Proses perkembangan dunia teknologi digital telah	DINKES

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			mempengaruhi banyak bidang salah satunya di bidang kesehatan. Saat ini banyak bermunculan aplikasi-aplikasi kesehatan yang dapat dengan mudah diakses melalui perangkat smartphone atau tablet. Aplikasi tersebut dapat meningkatkan komunikasi yang lebih baik antara ahli kesehatan dan pasien itu sendiri dan mempermudah dalam pengelolaan data pasien dan pemantauan kondisi kesehatan jiwa pasien ODGJ. Saat ini Pencatatan dan pelaporan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) telah menggunakan aplikasi Sistem Kesehatan Jiwa (SIMKESWA). Namun demikian, data pasien baik dari identitas, alamat, dan riwayat penyakit, serta kepatuhan minum obat belum tergambar secara utuh, sehingga dibutuhkan suatu database pasien yang mencangkup secara keseluruhan tentang kondisi pasien ODGJ. UPT Puskesmas Lubuk Muda meluncurkan aplikasi Sistem Laporan Informasi Pasien Gangguan Jiwa (SLIP GAJI) yang merupakan aplikasi berbasis website yang memuat sistem terintegrasi mulai dari database pasien, yang memudahkan pelacakan alamat pasien ODGJ, riwayat perjalanan pasien, diagnosa psikiatri yang terdiri dari 5 aksis, keteraturan minum obat bagi pasien ODGJ dan pemeriksaan skrining kesehatan mental dengan mengisi kuisioner Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) dan Self Reporting Questionnaire 20 (SRQ) pada masyaraka serta memuat dokumen penting terkait kesehatan jiwa di UPT Puskesmas Lubuk Muda. Dengan demikian, diharapkan melalui inovasi digital ini dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan jiwa baik dari segi preventif, promotif, dan kuratif. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah petugas dalam mengakses banyak hal terkait kesehatan jiwa di wilayah kerja UPT Puskesmas Lubuk Muda. Hal ini mengingat tingginya angka pasien ODGJ di wilayah kerja UPT Puskesmas Lubuk Muda, yang hingga bulan Juli Tahun 2024 berjumlah 36 orang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat masalah kesehatan jiwa dengan judul "Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Lubuk Muda Melalui Aplikasi SLIP GAJI (Sistem Laporan Informasi Pasien Gangguan Jiwa).	
32	Tahun 2022	JEDAR (Jemput dan antar dahak)	maka permasalahan yang masih dihadapi oleh program TB paru di UPT Puskesmas Muara Basung adalah masih belum tercapainya target penjaringan terduga TB paru di UPT Puskesmas Muara Basung. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran anggota keluarga penderita dalam memanfaatkan program penanggulangan TB Paru. Dalam upaya untuk pencapaian target, UPT Puskesmas Muara Basung membuat suatu inovasi	DINKES

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
33	Tahun 2022	Aplikasi Bengaklis Menawan	Latar Belakang Pembuatan aplikasi Bengkalis Menawan dilatarbelakangi dari mulai meningkatnya penggunaan internet dan ponsel pintar/smartphone dikalangan masyarakat, serta kebutuhan akan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bengkalis. Bengkalis Menawan merupakan sebuah aplikasi yang memuat informasi mengenai destinasi wisata, akomodasi, kuliner, event pariwisata, serta beberapa informasi penting yang berada di seputar dunai kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Tujuan dan manfaat inovasi aplikasi ini adalah untuk mempermudah Masyarakat dalam mengakses informasi terkait dunia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berada di Kabupaten Bengkalis.	Dinas Parwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
34	Tahun 2022	KONSELING KELILING "SAHABAT KELUARGA" LK3	Kementerian Sosial hadir melalaui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3 sebagai teman bicara keluarga. LK3 menjadi salah satu alternatif bagi keluarga dalam mencegah, mengatasi dan memulihkan dampak psikososial yang dialaminya. LK3 adalah Unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Sasaran pelayanan LK3 difokuskan pada keluarga yang sedang mengalami masalah psikososial. Masalah Psikososoial adalah adalah Kondisi yang dialami sesorang yang disebabkan oleh terganggunya relasi sosial, sikap dan perilaku meliputi gangguan pemikiran, perasaan, dan atau relasi sosial yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam perkembngan LK3 terus melakukan berbagai terobosan yang awalnya bersifat klinis, kini berkembang menjadi Center Link atau Pusat Layanan Sosial.untuk penanganan masalah sosial keluarga. Untuk memperluas jangkauan LK3 membuat Program Konseling Keliling yang dinamakan "Sahabat Keluarga". Konseling Keliling ini berfungsi memberikan layanan jemput Bola dan Pos Pelayanan bergerak secara temporer dan terjadwal. Tujuan dari Konseling Keliling ini agar bisa memberikan kemudahan akses bagi penerima layanan sampai kedesa/kelurahan SeKabupaten Bengkalis, sehingga dapat tercapai untuk : 1. Menekan angka permasalahan Psikososial keluarga, 2. Mengupayakan keluarga dan Masyarakat sehat jiwa dan bathinnya, 3. Lebih mudah menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi Agar Masyarakat dapat mencari tempat/orang yang tepat dalam bercerita degan kondisi dan keadaan yang nyaman dan tenang.	Dinas Sosial

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
35	Tahun 2022	Sistem Informasi Bantuan Sosial (SI BOS)	Sistem Informasi Bantuan Sosial (Si BOS) muncul dari masih adanya masalah dalam memberikan akses layanan data. Masih belum adanya basis data terkait bantuan sosial menjadi alasan utama dari ide inovasi ini yaitu dengan membuat satu sistem data terpadu, dimana sistem ini dibuat dalam bentuk website yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Sistem Informasi Bantuan Sosial (Si BOS) merupakan Aplikasi Berbasis Web yang memuat informasi tentang data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta seluruh data penerima bantuan sosial, Program Jaminan Sosial di Kabupaten Bengkalis yang bersumber dari Dana APBN dan APBD. Kegunaan Aplikasi SI BOS Bagi Pengguna Mengetahui Informasi tentang Jenis Bantuan yang ada di Kabupaten Bengkalis Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kecepatan akses terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kedepannya aplikasi ini akan dibuat menjadi aplikasi terpadu yang tidak hanya berisi bantuan sosial yang ada pada dinas sosial, namun juga menjadi aplikasi yang menghimpun semua bantuan hibah dan non hibah di berbagai Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang ada di Kabupaten Bengkalis.	Dinas Sosial
36	Tahun 2022	Temukan AntaR obat Sampai TujuAN	Hampir setiap tahun sebelum tahun 2022 pasien TB yang datang berobat ada yang terlambat untuk datang kontrol berobat dikarenakan faktor teknis seperti transportasi dan masalah ekonomi	DINKES

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
37	Tahun 2022	KARTU BENGKALIS SEJAHTERA (KBS) DAN APLIKASI SIYAP BERMASA (Sistem Aplikasi Layanan Bermarwah, Maju dan Sejahtera)	Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis sebanyak 204.723 Jiwa/ 68.072 Kepala Keluarga (KK) yang memerlukan perhatian khusus pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kabupaten Bengkalis telah melaksananakan berbagai program Perlindungan dan Jaminan Sosial salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai Otonom (BPNT Otonom) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Selama periode 2019 sampai dengan 2021 dalam pelaksanaan BPNT Otonom pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Otonom yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai permasalahan yaitu proses pergantian kartu memerlukan waktu yang lama, jalur koordinasi yang cukup panjang dengan pihak terkait untuk mendapatkan laporan transaksi penyaluran, laporan penyaluran dari pendamping masih manual serta rendahnya pengendalian terhadap unsur 6 T (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, Tepat Administrasi, Tepat Mutu, dan Tepat Harga). Dampak dari permasalahan tersebut mengakibatkan rendahnya realisasi penyaluran BPNT Otonom pada tahun 2020 dari target 11.673 KPM tersalurkan 8.817 KPM (76%). Sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penyaluran BPNT Otonom pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial mengeluarkan inovasi berupa Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS). Keunggulan penggunaan KBS dalam penyaluran BPNT Otonom menjadi lebih akurat, transparan, cepat dan akuntabel. Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS) merupakan kartu Barcode yang memuat data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berisi saldo uang virtual untuk digunakan oleh KPM sebagai sarana melakukan transaksi di Kedai Bermasa yang menyediakan bahan pangan sesuai ketentuan. Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS) terkoneksi dengan Sistem Informasi Layanan Aplikasi Bermarwah Maju dan Sejahtera (SIYAP BERMASA). Melalui aplikasi SIYAP BERMASA pengendalian dan pengawasan penyaluran BPNT Otonom lebih transparan, akurat dan real time sehingga dapat meningkatkan capaian realisasi penyaluran. Untuk memperlancar penyaluran BPNT Otonom pelaksanaannya melibatkan 179 Usaha Kecil di 155 Desa/ Kelurahan se Kabupaten Bengkalis. Kedai Bermasa merupakan tempat KPM belanja bahan pangan dengan menggunakan KBS sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku yang terkoneksi dengan SIYAP BERMASA. Pelaksanaan BPNT Otonom melalui KBS merupakan program unggulan Bupati Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Dampak KBS selain memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin dan orang tidak mampu juga meningkatkan perekonomian masyarakat Desa/	Dinas Sosial

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			Kelurahan se Kabupaten Bengkalis. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yakni meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan inovasi ini untuk meningkatkan capaian penyaluran secara transparan, akuntabel, serta tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat mutu, dan tepat harga. Sasaran inovasi ini adalah KPM BPNT Otonom yang merupakan masyarakat miskin dan orang tidak mampu hasil musyawarah Desa/ Kelurahan serta Kedai Bermasa. Kartu Barcode yang terkoneksi dengan Aplikasi SIYAP BERMASA yang digunakan keluarga penerima sebagai fasilitas transaksi di Kedai Bermasa. Merupakan satu-satunya Kartu Penyaluran bantuan yang memuat data KPM dan berisi saldo uang virtual. Keunggulan KBS dibandingkan dengan kartu bantuan lainnya yang bekerja sama dengan BANK adalah : - Kartu dicetak mandiri oleh Dinas Sosial, sehingga jika terjadi kerusakan, kehilangan dan pergantian KPM proses penerbitan kartu baru lebih cepat, - Kartu tidak bisa digunakan untuk tarik tunai. - Mudah dalam penggunan, hanya dengan memindai kode barcode kartu - Efesiensi biaya dalam cetak kartu, - Tidak ditemukan lagi permasalahan dalam perbankan seperti saldo nol dan erorr. Aplikasi SIYAP BERMASA merupakan satu-satunya aplikasi penyaluran bantuan yang mengadopsi sistem belanja online dengan menggunakan uang virtual dengan Keunggulan : - Memuat data penerima manfaat - Data transaksi real time, - Data Penyaluran Akurat, - Laporan penyaluran dapat diakses kapanpun dan dimanapun	

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
38	Tahun 2022	e-Surat	1. Latar Belakang Proses surat-menyurat secara manual masih banyak digunakan oleh instansi atau organisasi, yang menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi surat, risiko kehilangan dokumen, dan kebutuhan ruang arsip fisik. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem Aplikasi E-Surat yang dapat mengelola surat masuk dan keluar secara digital, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. 2. Tujuan - Meningkatkan efisiensi pengelolaan surat masuk dan keluar. - Meminimalisir penggunaan kertas (paperless). - Mempercepat proses disposisi dan distribusi surat. - Menyediakan arsip surat digital yang mudah dicari. 3. Fitur Utama - Statistik surat masuk/keluar - Notifikasi surat baru - Manajemen Surat Masuk - Upload surat (scan/digital) - Disposisi otomatis/manual - Manajemen Surat Keluar - Persetujuan bertingkat (multi-level approval) - Tracking Surat - Status surat (draf, disetujui, dikirim) - Riwayat pengiriman dan penerimaan - Arsip Digital & Pencarian - Pencarian surat berdasarkan tanggal, nomor, pengirim, kata kunci	BAPPEDA
39	Tahun 2022	Pengadaan Hewan Ternak Kambing	Terpenuhi kebutuhan komoditi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan menyedaikan sumber protein dan pendapatan perekonomian	Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat
40	Tahun 2022	Penyediaan Biaya Pendidikan/ Beasiswa Khusus Tahfiz quran	Mendukung pendidikan agama untuk dapat membantu dalam mempelajari dan memahami al quran sehingga mereka dapat menjadi generasi yang lebih baik dalam memahami agama	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis
41	Tahun 2022	Penggiat/ Penyuluh Agama Islam (Da'i) Desa/ Kelurahan Serta Koordinator Kecamatan se- kabupaten Bengkalis	Memiliki peran penting dalam membimbing, memberikan motivasi, penyampaian program pemerintah, pencegahan penyebaran hoaks dan mengajak masyarakat dalam beribadah serta menjalankan ajaran agama islam.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis
42	Tahun 2022	SICAKEB (Sistem Informasi Capaian Kinerja Bengkalis)	Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengembangkan Sistem Informasi Capaian Kinerja (Sicakeb) berbasis web (sicakeb.bengkaliskab.go.id) untuk mengatasi permasalahan dalam pemantauan dan pelaporan kinerja instansi pemerintah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, seperti lambatnya proses pelaporan, keterbatasan akses informasi, minimnya	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			transparansi, serta kesulitan dalam analisis data. Dengan adanya Sicakeb, diharapkan tercipta sistem yang terintegrasi, real-time, dan akuntabel untuk memudahkan pemantauan kinerja, meningkatkan transparansi publik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan partisipatif	
43	Tahun 2022	Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada pemerintah desa	ppengalokasian alokasi dana desa kepada pemerintah desa sde Kabupaten Bengkalis tidak lagi disalurkan merata atau sama tetapi melalui inovasi perhitungan alokasi berdasarkan alokasia dana desa minimum (ADDM), alokasia dana desa proporsional (ADDP), alokasi dana desa kinerja (ADDK) dan alokasia dana desa insentif desa mandiri (ADD IDM)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis
44	Tahun 2022	Srikandi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Dalam upaya Meningkatkan penertiban PKL di wilayah Kabupaten Bengkalis dengan pendekatan yang humanis dan berkelanjutan.Memberikan pembinaan kepada PKL agar memahami dan mematuhi peraturan daerah terkait ketertiban umum.Meningkatkan kolaborasi antara Srikandi Pol PP, PKL, dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Bengkalis	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
45	Tahun 2022	E-Brosur	Kecamatan Bengkalis sebagai badan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi- informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dari pengamatan dilapangan bahwa untuk mengakses informasi- informasi yang bersifat umum, masyarakat sering meminta informasi tersebut ke kantor camat dan harus memfotocopy berkas atau informasi yang diinginkan. Hal ini membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi tersebut. Berangkat dari permasalahan diatas, kecamatan Bengkalis membuat sebuah inovasi yang menyediakan sebuah wadah informasi digital yang diberi nama E-Brosur dimana inovasi ini bisa diakses oleh masyarakat melalui scan QR code melalui handphone.	Kecamatan Bengkalis
46	Tahun 2022	Kritik dan saran online	Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada msyarakat, diperlukan input kritik dan saran. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran, maka masyarakat dapat mengakses menu digital kritik dan saran dengan cara scan QR code yang telah disediakan.	Kecamatan Bengkalis
47	Tahun 2022	Pojok UMKM	Pojok UMKM dibuat untuk membantu desa dalam mempromosikan produk UMKM yang ada di desa. Dimana inovasi ini bekerjasana dengan BUMDes yang ada di kecamatan Bengkalis yang dibentuk dalam sebuah perjanjian kerjasama/ Mou. Produk-produk UMKM yang ada di desa dan kelurahan se-Kecamatan Bengkalis dipajang dalam sebuah etalase dan buku katalog sebagai bentuk promosi. manfaatnya : masyarakat yang datang ke kantor camat dapat melihat dan mengenal produk UMKM	Kecamatan Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			serta mengakses/ belanja secara online. dari segi penjualan, BUMDes akan mengalami peningkatan dalam penjualannya.	
48	Tahun 2022	Pojok Baca	Pojok baca diruang pelayanan kantor camat Bengkalis merupakan sebuah inovasi dalam penyediaan buku- buku bacaan yang dapat digunakan/ dipinjam oleh masyarakat. Dalam penyediaan buku- buku, Kecamatan Bengkalis melakukan kerjasama/MoU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Bengkalis. Dimana buku- buku tersebut diperbaharui 6 (enam) bulan sekali.	Kecamatan Bengkalis
49	Tahun 2022	Loket Prioritas	Dalam memberikan pelayanan kepada orang berkebutuhan khusus, maka Kecamatan Bengkalis menyediakan sebuah loket khusus untuk memprioritaskan orang- orang berkebutuhan khusus/ disabilitas, orang tua, dan wanita hamil. Adapun sarana dan prasarana pendukungnya diantaranya seperti kursi roda, rambatan, jalur pemandu, alat bantu dengar, huruf braile, aplikasi tuna rungu, kartu layanan prioritas, toilet khusus, bel pemanggil darurat, parkir khusus dan ruang tunggu khusus.	Kecamatan Bengkalis
50	Tahun 2022	DIMEKAH (Dispensasi Melaksanakan Pernikahan)	Dalam rangka memberikan kemudahan didalam pelayanan khususnya dalam penerbitan surat rekomendasi dispensasi pernikahan dapat dilakukan secara online. Dilakukan melalui aplikasi Si ATAN untuk mengupload berkas pendukung sehingga masyarakat tidak perlu mengantar berkas ke kantor camat dan surat tersebut akan di tanda tangan secara elaktronik.	Kecamatan Bengkalis
51	Tahun 2022	Smart desa Muntai	Kantor Desa Muntai	Desa Muntai Kecamatan Bantan
52	Tahun 2022	Wifi gratis untuk masyarakat	Untuk mempermudah masyarakat dalam hal akses informasi terutama pelajar/ mahasiswa	Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
53	Tahun 2022	Smart Desa	Latar belakang permasalahan Pelayanan administrasi didesa seringkali masil dilakukan secara manual, yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar. Warga harus datang langsung ke kantor desa hanya untuk mengurus dokumen seperti surat keterangan, pengajuan KK, atau pengaduan. Hal ini kurang efisien apalgi bagi warga yang memiliki kesibukan atau tinggal jauh dari kantor desa. Selain itu, pencatatan dan dokumentasi data kependudukan juga belum terintegrasi secara digital, sehingga beresiko hilang atau lambat dalam proses verifikasi. Melihat kondisi tersebut perlu adanya inovasi berbasis teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan memperbaiki mutu layanan publik desa. Deskripsi Inovasi Smart Desa - Aplikasi pelayanan desa adalah inovasi digital berupa aplikasi (mobile atau berbasis web) yang menyediakan berbagai layanan administrasi desa secara online. Aplikasi ini memungkinkan warga untuk mengajukan permohonan surat, melihat status pelayanan, menyampaikan pengaduan dan mengakses informasi desa tanpa harus datang ke kantor desa. layanan yang tersedia meliputi : surat keterangan domisili, surat pengantar, permohonan KK/ KTP, layanan aspirasi/ pengaduan masyarakat, dan info kegiatan desa. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem arsip digital dan dikelola oleh operator desa. Tujuan Inovasi Meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi di tingkat desa Mempermudah warga dalam mengakses layanan desa dari mana saja dan kapan saja mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di desa Mendukung digitalisasi administrasi desa menuju pelayanan berbasis teknologi Manfaat Inovasi Bagi warga : lebih cepat, mudah dan hemat waktu dalam mengurus administrasi Bagi pemerintah desa : Proses kerja menjadi lebih efisiean dan tertata bagi generasi muda : membuka peluang peran serta dalam mengelola teknologi desa bagi pembangunan desa : mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan transparan	Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis
54	Tahun 2022	Smart Desa Suka Damai	Bertujuan untuk memberikan kemudahan Masyarakat dalam hal layanan administrasi masyarakat.	Desa Suka Damai Kecamatan Rupat Utara

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
55	Tahun 2023	SI-SUMAKER(Sistem Informasi Surat Masuk DanSurat Keluar Berbasis Elektronik)	1. Latar Belakang : Proses manual dalam pencatatan, pengarsipan, dan pencarian surat sering kali menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan, kehilangan dokumen, dan kesulitan dalam pelacakan arsip. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem yang mampu mengelola surat secara efektif dan efisien. 2. Deskripsi : SISUMAKER adalah aplikasi berbasis elektronik yang dirancang untuk mengelola surat masuk dan surat keluar secara sistematis dan terintegrasi. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat, menyimpan, mencari, dan melacak status surat dengan cepat di Lingkungan Internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.3. Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan surat masuk dan surat kelua 4. Manfaat : Kemudahan pencarian arsip surat secara cepat dan akurat	Dinas Lingkungan Hidup
56	Tahun 2023	SIMPLINK (Sistem Informasi dan Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup Secara Online)	1. Latar Belakang : Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan sebagai implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, maka dilakukan verifikasi pengaduan. Verifikasi pengaduan merupakan upaya untuk mencari kebenaran aduan dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, izin kehutanan dan Peraturan perundangan-udangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan arahan pelaksana pemeriksaan dalam melaksanakan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan seperti bagaimana merencanakan, mempersiapkan, pelaksanaan dan pembahasan hasil verifikasi sampai dengan melaporkan hasil verifikasi kepada atasan. Verifikasi pengaduan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam hal kegiatan verifikasi belum memperoleh kesimpulan pada pemeriksaan administrasi. 2. Deskripsi : SIMPLINK merupakan bagian dari sistem pengelolaan aduan dari masyarakat di lingkungan Dinas Lingungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis. Aplikasi ini dapat mencatat semua aduan dan masukan dari masyarakat Kab. Bengkalis terkait lingkungan hidup. 3.Tujuan : Dokumen perancangan ini dibuat dengan tujuan untuk mendefinisikan perancangan aplikasi SIMPLINK yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi pengembang untuk tahap implementasi.	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			4. Manfaat : Mempermudah pencatatan semua aduan dan masukan dari masyarakat Kab. Bengkalis terkait lingkungan hidup	
57	Tahun 2023	Kencan Gercep (Kenali dan Cegah Sedari Dini dengan Gerakan Cek PTM)	LATAR BELAKANG 1. Kasus PTM Menyebabkan kematian Tahun 2022 -> 73 % 2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif PUSK.DURI KOTA 2022 rendah (13%) Deskripsi Inovasi 1. Melakukan koordinasi dengan Lintas Sektor (kecamatan, Koramil, Polsek Mandau,Sekolah dan instansi lainnya) 2. Membuat pojok PTM di setiap acara-acara yang di buat oleh pihak ekternal 3. Pemberian Konseling Tentang Pola hidup sehat 4. Pemberian Informasi di Media sosial 5. Melakukan Penyuluhan Kesehatan mengenai PTM 6. Melakukan Konseling pada pasien 7. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan Manfaat 1. Menambah Pengetahuan dan Pemahaman tentang penyakit tidak menular 2. memberikan dorongan dan pengetahuan ke masyarakat pentingnya Pemeriksaan Kesehatan sejak dini 3. meningkatkan pengetahuan masyrakat tentang pentingnya melalukan pemeriksaan kesehatan secara berkala	DINKES
58	Tahun 2023	SPONTAN (Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antrian)	Permasalahan : • Lamanya waktu tunggu pendaftaran • Tidak pastinya waktu pelayanan pendaftaran • Tidak nyamanyya ruang tunggu (kondid fisik, keamanan pengunjung) Tujuan : • Proses pendaftaran pasien di rumah sakit dapat menjadi lebih cepat dan nyaman bagi pasien • Pelayanan terhadap pasien tetap dilayani • Memberikan informasi yang jelas mengenai kepesertaan, Riwayat pembayaran, dan kondidi kesehatan	RSUD Mandau
59	Tahun 2023	Peningkatan Kinerja Melalui Aplikasi Si Pokat (Sistem Pengelolaan Kearsipan Surat Menyurat)Pada Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	Latar Belakang Masalah : Dalam pengelolaan surat menyurat, banyak kendala yang dihadapi dalam proses mulai penerimaan, registrasi, disposisi, distribusi, serta pengarsipan surat. Kendala diantaranya pertama, dampak teknologi informasi sehingga penerimaan surat yang disampaikan bersifat digital. Kedua, registrasi surat yang masih bersifat konvensional sehingga surat-surat tersebut beresiko tercecer dan hilang. Ketiga, disposisi atasan terhadap surat tersebut membutuhkan cukup waktu karena tidak fleksibel dalam prosesnya. Keempat, distribusi surat ke unit kerja Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang membutuhkan cukup waktu untuk ditindaklanjuti karena belum tersampaikan ke pimpinan unit yang sedang Dinas Luar. Kelima, pengarsipan fisik surat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			yang belum optimal karena kendala sarana dan prasarana Deskripsi Inovasi : Pemanfaatan Aplikasi Si Pokat (Sistem Pengelolaan Kearsipan Surat Menyurat) yang dibuat secara offline dan online dalam pengelolaan surat menyurat Tujuan Inovasi : Mengintegrasikan pengelolaan surat menyurat Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Manfaat Inovasi : Terkelolanya Surat Menyurat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis; Memudahkan atasan dalam rangka pendisposisian Surat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis; Memudahkan sistem pelaporan dan dokumentasi	
60	Tahun 2023	SERASI (Sistem Elektronik Farmasi)	Permasalahan : • Efisiensi pelayanan yang buruk : - Waktu tunggu yang lama : Tanpa system elektronik, proses penerbitan resep, pencarian obat dan penyerahan obat akan lebih lama dan membutuhkan lebih banyak tenaga manusia. Hal ini dapat menyebabkan antrean Panjang dan kekecewaan pasien. - Kesulitan dalam melacak obat : Manajemen stok obat yang manual akan sulit untuk mengelola, sehingga rentan terhadap kekosongan obat atau kelebihan obat. Ini akan mengganggu pelayanan pasien dan menimbulkan kerugian finansial. - Sulit dalam mengidentifikasi interaksi obat : Tanpa system elektronik, apoteker akan kesulitan untuk mengecek interaksi obat dan memberikan informasi yang tepat kepada pasien. Hal ini dapat meningkatakan resiko kesalahan pemberian obat. • Hambatan dalam Pelayanan linis : - Sulit dalam mengitegrasikan data farmasi dengan rekam medis : Sistem manual tidak dapat terintegrasi dengan system rekam medis elektronik, sehingga apoteker kesulitan untuk mendapatkan informasi pasien yang komprehensif. - Sulit dalm mengumpulkan data untuk penelitian dan pengembangan. Tujuan : • Efisiensi Pelayanan yang baik : - Waktu tunggu yang cepat : Dengan system elektronik, proses penerbitan resep, pencarian obat, dan penyerahan obat akan lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak teanga manusia. - Kemudahan dalam melacak stok obat - Mudah dalam mengidentifikasi interaksi obat - Mudah dalam mengumpulkan data untuk penelitian dan pengembangan • Percepatan dalam pelayan Klinis : - Mudah dalam mengintegrasikan data farmasi dengan rekam medis - Mudah dalam mengumpulkan data untuk penelitian dan pengembangan	RSUD Mandau

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
61	Tahun 2023	Strategi Pengelolaan Data Kepegawaian ASN dan Non ASN Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	Latar Belakang Masalah : Masih belum banyak perhatian terhadap penyimpanan data dan dokumen kepegawaian yang baik dan benar sehingga dokumen menjadi tidak terstruktur dan terdapat kesulitan penemuan kembali, bahkan bisa terjadi adanya kehilangan suatu dokumen pegawai Deskripsi Inovasi : Pemanfaatan Bank Data dan Dokumen Kepegawaian melalui aplikasi Google Drive Tujuan Inovasi : Mengintegrasikan pengelolaan Data Kepegawaian Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Manfaat Inovasi : Mempermudah dalam memperoleh informasi tentang data dan dokumen kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, sehingga data dan dokumen kepegawaian lebih terorganisir dan risiko kehilangan data dan dokumen dapat dicegah.	RSUD Mandau
62	Tahun 2023	Strategi Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten Bengkalis	Latar Belakang Masalah : Terdapat kesenjangan antara kebutuhan keahlian di pasar tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja terampil Deskripsi Inovasi : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan vokasi selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana) Tujuan Inovasi : Terwujudnya lembaga pelatihan kerja yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Kabupaten Bengkalis mengacu pada PP No 31 Tahun 2006, Permenaker No 17 Tahun 2016 dan Perbup Bengkalis No 123 Tahun 2021	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
63	Tahun 2023	''PERAK PUKAT'' Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak dan Menjemput Masyarakat (Perak Pukat)	I. Latar belakang 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Pelayanan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya strategis dalam menekan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi. Namun tidak semua masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki akses mudah terhadap layanan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan inovatif berupa Mobil KB, yaitu layanan KB keliling yang menjangkau layanan langsung masyarakat (Perak Pukat) pelayanan KB bergerak Menjemput Masyarakat) memakai mobil Muyan, pada Tahun 2024 BKKBN Pusat telah memberikan 1 (satu) Unit mobil antar jemput akseptor KB. II. Tujuan Inovasi a. Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan KB khususnya di daerah sulit jangkauan pelayanan KB b. Meningkatkan kesadaran dan partisipsi	DisdaldukKB

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			masyarakat terhadap program pelayanan KB. c. Menyediakan pelayanan KB secara efisien dan berkualitas III. Deskripsi Inovasi Mobil Unit Pelayanan (Muyan) merupakan kendaraan operasional yang di modifikasi untuk memberikan berbagai jenis pelayanan KB Seperti : 1. Konseling dan edukasi KB 2. Penyuluhan kesehatan reproduksi 3. Pemberian alat kontrasepsi (suntik, Pil dan Kondom) 4. Pelayanan pemasangan IUD dan Implan (jika tersedia tenaga Medis terlatih) mobil ini dilengkapi dengan peralatan medis dasar, bahan promosi, serta tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, penyuluh KB). IV. Manfaat Inovasi a. Menjangkau kelompok masyarakat yang sulit datang ke fasilitas kesehatan. b. Mengurangi angka UNMET NEED KB c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak kesehatan reproduksi.	
64	Tahun 2023	SI RATU CAPEL (Sistem Register Terpadu Catatan Pelayanan)	Pencatatan proses pelayanan mulai penerimaan oleh petugas Disdukcapil dan penyerahan hasil layanan kepada penduduk pemohon, melalui aplikasi ini dapat dipantau perkembangan penyelesaian pelayanan.	Disdukcapil
65	Tahun 2023	SI RELA MANIS (Sistem Rekom Akta Kelahiran Manunggal Taktis)	Proses penerbitan rekomendasi akta kelahiran yang terlambat pelaporannya oleh penduduk yang disampaikan kepada UPT Disdukcapil Kecamatan. Proses komunikasi dengan Dinas dalam penerbitan Rekomendasi Penerbitan Akta Kelahiran dilakukan secara online yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, keputusan Kepala Dinas langsung terbit pada hari yang sama (tidak lama) setelah penerbitan permohonan dari Kepala UPT.	Disdukcapil
66	Tahun 2023	LAYANAN DARMAWAN (Dapat Rencanakan dan Menentukan Waktu Pelayanan Secara Mandiri untuk Penerbitan KTP-el dan KIA)	LAYANAN DARMAWAN adalah pendaftaran yang dikhususkan kepada masyarakat dalam pengurusan KTP-el dan KIA. Layanan ini dibuat untuk mempermudah masyarakat yang waktunya sangat terbatas oleh kesibukan masing-masing sehingga dengan adanya layanan online ini (LAYANAN DARMAWAN) masyarakat bisa menghubungi Disdukcapil kapan bisa datang untuk dilayani dalam perekaman/cetak KTP-el maupun pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak).	Disdukcapil
67	Tahun 2023	SATGAS KRETEK (SATUAN TUGAS KENDALI RESIKO TINGGI REMAJA MEROKOK)	pihak sekolah untuk membuat SK Satgas Kretek yang terdiri dari Petugas Puskesmas, kepala sekolah, guru dan siswa sebagai duta kretek. Kegiatan diawali dengan menyebarkan google form terkait pengetahuan dan perilaku siswa terkait perilaku merokok dan melakukan sosialisasi interaktif terkait bahaya merokok dengan menggunakan media pemutaran video dan praktek yang mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya siswa diminta untuk membuat kreasi kreatif berupa video maupun gambar tentang bahaya merokok dimana siswa yang	DINKES

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			dapat memberikan penampilan terbaik akan diberikan reward. Tahapan terakhir: melakukan konseling personal kepada anak sesuai dengan hasil google form yang telah diisi.	
68	Tahun 2023	SALING RINDU (Puskesmas Keliling Terintegrasi dan Terpadu Serai Wangi)	Latar belakang permasalahan adalah Luas Wilayah dan Sebaran Penduduk yang terpisah pisah, Deskripsi Inovasi adalah Puskesmas Keliling Terintegrasi dan Terpadu Setai Wangi,Tujuan Inovasi adalah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan diwilayah kerja puskesmas serai wangi, Manfaat Inovasi adalah Masyarakat memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Optimal	DINKES
69	Tahun 2023	SIMATA WADIR	Untuk Mengetahui Kepatuhan Minum Obat Pada Orang Dengan Skizofrenia Melalui Inovasi Aksi Masyarakat Menjaga Kesehatan Jiwa Secara Mandiri	DINKES
70	Tahun 2023	Pojok baca keliling	Menarik minat baca masyarakat	Desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan
71	Tahun 2023	Siap MERAH	1. Siap MERAH adalah (Sistim Informasi Administrasi Pelayanan Mengukur Tanah) Melalui Avenza Maps. Kegiatan ini terlebih dahulu akan dilakukan peninjauan ke lokasi tanah oleh operator tata Pemerintahan Kecamatan. 2. Pemetaan dilakukan melalui Avenza Maps yang bertujuan untuk memastikan tanah tersebut tidak ada masalah dan guna menetukan warna zona tanah tersebut, seperti : a. Warna Oranye : wilayah pemukiman b. Warna hijau tua : Kawasan hutan lindung c. Warna hijau muda : kawasan hutan produksi terbatas d. Warna kuning : Kawasan hutan produksi tetap e. Warna pink : Kawasan hutan produksi yang dapat di konversi g. Warna putih : area penggunaan lain 3. Jika tanah yang dipetakan masuk dalam warna putih maka pemerintah kecamatan melalui kepala seksi Tata pemerintahan akan menerbitkan surat tanah bagi masyarakat tersebut.	Kecamatan Rupat Utara

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
72	Tahun 2023	Desa tanggap bencana - membentuk masyarakat peduli bencana	Latar Belakang Masyarakat sering belum siap menghadapi bencana seperti banjir atau kebakaran karena kurangnya pengetahuan dan sistem tanggap darurat Deskripsi Inovasi Pembentukan tim relawan peduli bencana, pelatihan dasar kebencanaan, dan sistem informasi darurat desa Tujuan Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat warga terhadap bencana Manfaat Warga lebih siap, risiko korban dan kerugian bisa dikurangi, solidaritas antar warga makin kuat	Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis
73	Tahun 2023	Aplikasi Sistem lnformasi Kerja Sama Daerah	Merupakan Sebuah aplikasi Sistem lnformasi Kerja Sama Daerah dalam mendukung fasilitasi keria sama berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018, yakni sebagai bank data dengan semua perjanjian dan nota kesepahaman yang telah dilakukan kemudian sebagai sarana komunikasi untuk calon mitra yang akan melakukan kerja sama dengan Pemkab sena sebagai jalur untuk evaluasi atas kerja sama dengan disediakannya kuesioner dan perlengkapan evaluasi yang hanya bisa di akses oleh bupati dan sekda.	Bagian Keria Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis
74	Tahun 2023	SISUKMA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)	Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu memahami kebutuhan yang dilayani, cepat dalam memberikan layanan, tepat waktu, dan tanggap akan pemenuhan kebutuhan yang dilayani. Kualitas pelayanan dalam berbagai aspek menjadi salah satu penghubung utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara transparan,cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, berdasarkan pada aturan tersebut diatas upaya untuk mengukur kualitas pelayanan publik dilaksanakan dalam bentuk survei.Melalui pelaksanaan survei ini diharapkan akan diketahui sejauh mana perkembangan kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) maupun Unit Pelayanan Publik (UPP).Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu produk, layanan, atau program tertentu.9	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			unsur penilaian survei kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Menter iPAN-RB No. 14 Tahun2017 merupakan tolok ukur yang komprehensif untukmengukur kualitas pelayanan publik.Hasil pengukuran tertuang dalam nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai cerminan kualitas pelayanan. Selanjutnya nilai SKM akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan mutu layanan pada tiap-tiap PD/UPP. Tujuan Secara umum penggunaan SISUKMA Kabupaten Bengkalis yang eksisting dan pasca perbaikan dan pengembangannya bertujuan: a. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik. b.Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik. c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan. d.Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Sehingga masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. e.Memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap produk, layanan, atau program yang ditawarkan. f. Memperoleh informasi terhadap Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan dari UPP terkait sesuai kebutuhan dalam MCP KPK.	
75	Tahun 2023	aplikasi KASMART	aplikasi digital untuk monitoring perkembangan desa oleh pendamping desa di Kabupaten Bengkalis	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis
76	Tahun 2023	Gerbong Deskel Bermasa (Gerakan Bergotong Royong Desa Kelurahan Bersih Bersama Masyarakat)	Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan peduli terhadap sesama, Kecamatan Bengkalis membuat sebuah inovasi yang menggerakkan seluruh elemen dengan cara memberdayakan desa dan kelurahan. Inovasi ini dibuat dilatar belakangi oleh adanya beberapa lingkungan yang kotor dan timbulnya penyakit DBD. Selain itu kondisi masyarakat miskin juga menjadi perhatian yang sangat penting. Dengan bergotong royong, semua permasalahan dapat diselesaikan. Inovasi ini adalag gerakan membersihakn lingkungan, dimana sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi akan ditabung di bank sampah yang sudah bekerjasama dengan kecamatan. tabungan tersebut akan dikumpulkan dan diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Kegiatan inovasi ini dilaksanakan tidak hanya dilingkungan kantir camat, tetapi dijadwal setiap bulan serentak diseluruh desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Bengkalis. Keluran dan desa juga dapat	Kecamatan Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			melakukan gotong royong mandiri dengan memanfaatkan buku tabungan sampah yang sudah dikerjasamakan. Inovasi ini bekerjsama dengan bank sampah Berseri dibawah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dikumpulkan dan ditabung di bank sampah. Buku tabungan disediakan oleh bank sampah Berseri, dimana setaiap transaksi penabungan sampah dicatat dibuku tersebut.	
77	Tahun 2023	CASTING (Camat Cegah Stunting)	Dalam rangka mempercepat penanganan dan pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Bengkalis, maka dilakukan sebuah upaya yang diwadahi dalam sebuah inovasi yaitu Camat Cegah Stunting (CASTING). Kegiatan dari inovasi ini berupa pemberian bantuan susu dan makanan tambahan bagi bayi dan balita serta pendataan perkembangan anak yang terindikasi stunting. Inovasi ini bekerjasama dengan UPT Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis dan Forkopimcam terkait. Inovasi ini didukung melalui anggaran dana Bermasa yang diberikan oleh Bupati Bengkalis.	Kecamatan Bengkalis
78	Tahun 2023	BUSTER (Buku Saku Terpadu)	Buku Saku Terpadu (BUSTER) adalah sebuah wadah inovasi Kecamatan Bengkalis dalam memberikan informasi yang berisikan kumpulan peraturan yang berlaku, pedoman/ petunjuk teknis (juknis) dan format- format surat menyurat. Tujuan dibentuknya inovasi ini agar memberikan kemudahan bagi aparatur kecamatan/ kelurahan/ desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing. Inovasi BUSTER diakses secara digital melalui scan QR code.	Kecamatan Bengkalis
79	Tahun 2023	Rumah DILAN (Pendidikan Keterampilan)	Inovasi Rumah DILAN merupaka sebuah rumah yang menjadi tempat membuat keterampilan pembuatan tas dari manik- manik. Dimana rumah ini merupakan salah satu rumah anggota PKK sehingga lebih dekat dengan masyarakat.	Kecamatan Bengkalis
80	Tahun 2023	Forum Bersama Menyambangi Masyarakat (FORBERMASA)	FORBERMASA sebagai wadah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi serta evaluasi langsung ke setiap Desa bersama dengan Unit Pelaksanana Tugas (UPT) dan Kelembagaan ditingkat Kecamatan, dengan tujuan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat	Kecamatan Bandar Laksamana
81	Tahun 2023	Gebrak Goyang Sapu Desa	Masih kurangnya perhatian dan kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan Gebrak Goyang Sapu Desa merupakan salah satu program PKK Kecamatan Bandar Laksamana yang bertujuan untuk menjaga kelestarian	Kecamatan Bandar Laksamana

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			lingkungan yang langsung turun ke setiap Desa bersama Pemeritah Desa Setempat	
82	Tahun 2023	PKK Goes To School	Masih kurangnya keterampilan siswa dan pengetahuan siswa tentang kesehatan sehingga PKK Kecamatan Bandar Laksamana membuat program PKK goes to School sebagai salah satu upaya memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta keterampilan kepada setiap siswa	Kecamatan Bandar Laksamana
83	Tahun 2023	Rumah Bibit	Masih kurangya penghetahuan masyarakat terutama bagi ibu rumah tangga terhadap pelestarian lingkungan serta pemahaman terhadap bibit perkebunan. Rumah bibit merupakan salah satu inovasi PKK Kecamatan Bandar Laksamana yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bibit perkebunan serta untuk menjaga dan melestarikan penghijauan pekarangan rumah	Kecamatan Bandar Laksamana
84	Tahun 2023	Memberikan Pelayanan jarak Jauh (Whatsapp)	Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat kecamatan rupat utara untuk mendapat pelayanan yang cepat dan tepat dengan melakukan : 1. Adanya kontak person atau whatsapp pelayanan kecamatan yang bisa dihubungi seluruh masyarakat selama jam kerja agar masyarakat tidak bingung dalam menyiapkan persyaratan yang akan dibawa ke kantor camat.	Kecamatan Rupat Utara
85	Tahun 2023	Ruang Bermasa (Rumah Bimbingan Bersama Anak Bangsa)	Untuk membentuk dan mengangkat tenaga pengajar dan untuk memberikan peningkatan pendidikan ilmu pengetahuan dan bimbingan bagi anak kelurahan damon	KELURAHAN DAMON KECAMATAN BENGKALIS
86	Tahun 2023	SI LATO BIRU	Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584)	Kelurahan Rimba Sekampung
87	Tahun 2023	Posko Siskamling	Menjadikan pusat tanggap darurat dalam menghadapi situasi keamanan lingkungan Desa dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dengan melibatkan pasrtsipasi aktif masyarakat	Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat
88	Tahun 2023	Desa Cerdas/ Desa digital	Sekilas yang melatar belakangi permasalahan yakni munculnya talentaatau bakat dari pemuda/ pemudi desa Puteri Sembilan yang sangat berpotensi dan berprestasi, sehingga diusulkan oleh kabupaten menjadi desa cerdas/ Desa Digital yang tujuannya diharapkan dapat menampung aktifitas- aktifitas positif dari pemuda/pemudi desa untuk berkarya dan berprestasi melalui media digital desa	Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
89	Tahun 2023	Pelayanan administrasi digital	Masyarakat dipermudah ketika mengurus administrasi di Desa Dungun tanpa harus datang ke kantor desa, melalui pelayanan administrasi secara digital	Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat
90	Tahun 2023	Pelayanan administrasi digital	Dengan kesibukan masyarakat sehingga tidak sempat hadir di kantor desa dalam menguruskan administrasi, manfaatnya masyarakat bisa mengurus secara online serta tidak memerlukan waktu lama dalam mengurus administrasi	Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat
91	Tahun 2024	Aplikasi Peternakan "SI JANTAN"	1. Latar Belakang : Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan inovasi dengan membuat aplikasi peternakan "SI JANTAN" agar dapat memberikan kemudahan dalam mengakses data peternakan, baik dalam hal Kesehatan ternak maupun populasi ternak pada Kabupaten Bengkalis. 2. Deskripsi Inovasi : Aplikasi SI JANTAN ini merupakan aplikasi yang di buat oleh bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaloborasi dengan Politeknik Negeri Bengkalis. 3. Tujuan Inovasi : Mempermudah Peternak maupun Masyarakat dalam mengakses data yang di perlukan dalam sektor pertanian. 4. Manfaat Inovasi : Dengan adanya Aplikasi ini dapat meningkatkan populasi maupun Kesehatan pada hewan ternak Masyarakat.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
92	Tahun 2024	Aplikasi SI MANISKU (Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Bengkalisku)	Merupakan Sistem Teknologi Informasi yang berfungsi sebagai data *Base* aset tanah milik pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain berfungsi sebagai data *Base* aset tanah, aplikasi ini juga dibangun sebagai arsip digital yang dapat menyimpan seluruh dokumen sertifikat aset tanah milik pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pada aplikasi ini semua lokasi tanah dapat terhubung dengan GPS (Global Positioning System) sehingga sistem ini dapat menyajikan data aset tanah yang akurat dan informatif.	BPKAD
93	Tahun 2024	SIMPEL LAB (Sistem Informasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan)	1. Latar belakang : UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sudah terakreditasi sejak tahun 2021 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LP-1493- IDN, untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi laboratorium sebagai persayaratan umum menggukan ISO/IEC 17025-2017. 2. Deskripsi : SIMPEL LAB adalah inovasi Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Melalui Aplikasi Website pada UPT Laboraotorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, agar terwujudnya daya dukung dari semua stekholder baik internal maupun eksternal. 3. Tujuan : Meningkatkan Sistem Pelayanan Uji Sampel Laboratorium Lingkungan 4. Manfaat : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
94	Tahun 2024	DATINPELHI (Database Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup)	1. Latar belakang : Amdal dan UKL– UPL merupakan komitmen perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan apabila komitmen ini tidak dilaksanakan maka termasuk ke dalam pelanggaran. Selain menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memegang Persetujuan Lingkungan juga wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam persetujuan lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Jumlah dokumen laporan RKL-RPL/UKL-UPL yang disampaikan oleh pelaku usaha dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan masih banyak terdapat perusahaan yang tidak menyampaikan laporan RKL- RPL/UKL-UPL. Dari jumlah total keseluruhan dokumen laporan yang telah masuk sebanyak 169 laporan belum dilakukan evaluasi. 2. Deskripsi : Dengan adanya sistem ini, data evaluasi dapat diakses secara terpusat dan diperbarui secara berkala dan memudahkan tim pelaksana dalam memantau perkembangan laporan setiap bulannya. Selain itu, pengguna dari berbagai unit dapat secara langsung mengakses informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan akurat, dan memperkuat koordinasi antar tim. 3. Tujuan : 1). Mengembangkan dan mengimplementasikan database teknologi untuk mengevaluasi data pelaporan pemantauan lingkungan dari berbagai perusahaan di Kabupaten Bengkalis. 2). Meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data pemantauan lingkungan melalui otomatisasi dan integrasi data sehingga memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat. 3). Mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan lingkungan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan lingkungan yang dinamis. 4. Manfaat : 1). Mempermudah pembinaan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan melalui pemantauan data yang lebih akurat dan real- time; 2). Mengurangi biaya yang terkait dengan pengolahan data manual dan penyimpanan dokumen fisik melalui digitalisasi dan otomatisasi proses; 3). Perusahaan akan mendapatkan panduan yang jelas dan standar yang harus diikuti sehingga meminimalkan risiko pelanggaran dan sanksi hukum; 4). Dengan pemantauan dan pengelolaan yang lebih efektif, kualitas lingkungan hidup akan	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			meningkat, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	
95	Tahun 2024	KBS SIAGA		Dinas Pemadam Kebakaran
96	Tahun 2024	KBS TERINTEGRASI (Kartu Bengkalis Sejahtera Terintegrasi dengan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Otonom, Bantuan Pangan Lanjut Usia, Bantuan Pangan Disabilitas, Bantuan Pangan Anak Terlantar).	Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan berbagai Program Perlindungan Jaminan Sosial salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai Otonom (BPNT Otonom) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Selama tahun 2019 - 2021 dalam pelaksanaan BPNT Otonom, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Otonom yang dikeluarkan oleh Pihak Perbankan. Dalam pelaksanaan ditemukan berbagai permasalahan yaitu proses pergantian kartu memerlukan waktu yang lama, jalur koordinasi yang cukup panjang dengan pihak terkait untuk mendapatkan laporan transaksi penyaluran, laporan penyaluran pendamping masih manual serta rendahnya pengendalian terhadap unsur 6 T (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, Tepat Sasaran, Tepat Administrasi, Tapat Mutu dan Tepat Harga). Dampak dari permasalahan Tersebut mengakibatkan Rendahnya realisasi Penyaluran BPNT Otonom. Pada Tahun 2022 Sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penyaluran BPNT Otonom pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial mengeluarkan Inovasi berupa Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS). Keunggulan penggunaan KBS dalam penyaluran BPNT Otonom menjadi lebih akurat, transparan, cepat dan akuntabel. Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS) merupakan kartu Barcode yang memuat data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berisi saldo uang virtual untuk digunakan oleh KPM sebagai sarana melakukan transaksi di Kedai Bermasa yang menyediakan bahan pangan sesuai ketentuan. Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS) terkoneksi dengan Sistem Informasi Layanan Aplikasi Bermarwah Maju dan Sejahtera (SIYAP BERMASA). Melalui aplikasi SIYAP BERMASA pengendalian dan pengawasan penyaluran BPNT Otonom lebih transparan, akurat dan real time sehingga dapat meningkatkan capaian realisasi penyaluran. Kemudian ditahun 2024 Dinas Sosial kembali lagi mengeluarkan Inovasi Terbaru yakni KBS Terintegrasi. KBS Terintegrasi adalah Kartu Bengkalis Sejahetera Terintegrasi dengan BPNT Otonom, Bantuan Pangan Bagi Lanjut Usia, Bantuan Pangan Bagi Disabilitas dan Bantuan Pangan Bagi Anak Terlantar. Untuk memperlancar penyaluran KBS Terintegrasi pelaksanaannya melibatkan 179 Usaha Kecil di 155 Desa/ Kelurahan se Kabupaten Bengkalis. Kedai Bermasa merupakan tempat KPM belanja bahan pangan dengan menggunakan KBS sesuai dengan kebutuhan	Dinas Sosial

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			dan peraturan yang berlaku yang terkoneksi dengan SIYAP BERMASA. Tujuan inovasi ini untuk meningkatkan capaian penyaluran secara transparan, akuntabel, serta tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat mutu, dan tepat harga. Keunggulan KBS Terintegrasi dibandingkan dengan kartu bantuan lainnya yang bekerja sama dengan BANK adalah : - Kartu dicetak mandiri oleh Dinas Sosial, sehingga jika terjadi kerusakan, kehilangan dan pergantian KPM proses penerbitan kartu baru lebih cepat, - Kartu tidak bisa digunakan untuk tarik tunai, - Mudah dalam penggunan, hanya dengan memindai kode barcode kartu, - Efesiensi biaya dalam cetak kartu, - Tidak ditemukan lagi permasalahan dalam perbankan seperti saldo nol dan erorr.	
97	Tahun 2024	PICU (Unit Perawatan Intensif Terpusat)	Permasalahan : • Penanganan yang tidak opyimal : anak anak dengan kondisi kritis mungkin tidak dapat menerima perawatan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa mereka atau mencegah komplikasi serius. • Risiko kematian atau komplikasi : anak-anak dengan kondisi kritis mungkin tidak dapat menerima perwatan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa mereka atau mencegah komplikasi serius. • Ketidaknyamanan dan stres bagi pasien dan keluarga karena kondisi lingkungan yang kurang kondusif untuk pemulihan. • Meningkatkan sisiko rantai penularan penyakit yang tingii bagi anaka-anak. • Keterlambatan pemulihan : penanganan yang tidak optimal di ruang umum dapat menyebabkan keterlambatan pemulihan anak-anak dengan kondisi kritis. Tujuan: • Penangan menjadi optimal, sehingga anak-anak dengan kondisi kritis dapat menerima perawatan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa mereka atau mencegah komplikasi serius. • Risiko kematian rendah. • Nyaman dan tidak stress bagi pasien dan keluarga : anak-anak dengan kondisi kritis yang dirawat di ruangan PICU merasa nyaman dan tidak stress karena lingkungan yang kondusif untuk pemulihan. • Rantai penularan penyakit : Jika anak-anak dengan kondisi kritis dirawat diruangan PICU, mereka tidak mudah tertular infeksi dari pasien lain atau personel medis, menurunkan risiko komplikasi. • Percepatan pemulihan : penanganan yang optimal di ruangan	RSUD Mandau

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			PICU dapat mempercepat pemulihan anak-anak dengan konsisi kritis.	
98	Tahun 2024	SELF CARE REMAJA CERIA	Latar Belakang :Banyaknya permasalahan remaja yang begitu komplit dan Masih rendah nya tingkat kunjungan remaja yang memeriksakan masalah Kesehatan ke puskesmas mendorong puskesmas batu Panjang untuk membuat aplikasi Kesehatan berbasis android, di mana dalam aplikasi tersebut terdapat kuisioner2 permasalahan remaja yang di isi secara mandiri oleh remaja kemudian di analisis oleh puskesmas Batu Panjang dan mendapatkan feedback yg langsung dikirim lewat aplikasi dan bisa di lihat oleh remaja yang bersangkutan	DINKES
99	Tahun 2024	STIPAR (Snack Time Ikan Parang)	Latar Belakang : Tingginya prevalensi stunting di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara yaitu tahun 2022 (15.3%) dan tahun 2023 (12.2%). Faktor risiko penyebab tingginya prevalensi stunting pada tahun 2023 adalah asupan protein yang tidak adekuat pada balita yaitu 35%, ibu hamil KEK 23.4%, bayi BBLR 5.8%, pemberian ASI Eksklusif masih rendah 37.89% dan rendahnya tingkat pengetahuan ibu tentang MPASI yaitu 25%. Ikan parang merupakan salah satu ikan yang paling sering ditemukan di Kecamatan Rupat Utara, akan tetapi ibu balita tidak memberikan ikan tersebut karena banyak duri. Ikan parang memiliki nilai gizi yang tinggi 20.8 gr/100 gr. Deskripsi Inovasi : Ikan parang dibuat menjadi tepung ikan parang kemudian diolah menjadi biskuit dengan menggunakan tepung ikan parang sebagai bahan baku utamanya. Tujuan Inovasi : Menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan asupan protein pada balita. Manfaat inovasi : Peningkatan asupan protein dan pencegahan stunting	DINKES
100	Tahun 2024	KABIN (KAMPUNG BINAAN) ILP (INTEGRASI LAYANAN PRIMER)	Transpformasi layanan dan Perubahan regulasi puskesmas dengan sistem klaster dengan layanan secara terintegrasi,dengan tujuan mendekatkan akses layanan kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratifrehabilitatif dan atau paliatif setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas menciptakan inovasi kabin (kampung binaan) ILP dengan mekanisme kerja setiap rutin Tim Kampung Binaan yang terdiri dari Dokter, Perawat dan Bidan melakukan pelayanan kesehatan secara terintegrasi di Desa (meet doctor)	DINKES
101	Tahun 2024	LAYANAN DUKCAPIL DURIAN RUNTUH (Dukcapil Rekam Beri Layanan Turun Khusus)	Pentugas Disdukcapil turun langsung ke tempat domisili penduduk memberikan pelayanan perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan/marginal yang memerlukan layanan khusus seperti penduduk penyandang disabilitas, bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, penduduk yang menempati kawasan hutan dan komunitas terpencil.	Disdukcapil

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
102	Tahun 2024	LAYANAN DUKCAPIL SAGU LEMAK (Sabtu Minggu Layanan Elektronik Mendapatkan Administrasi Kependudukan)	Inovasi SAGU LEMAK ini merupakan inovasi yang memberikan pelayanan kepada penduduk pada hari sabtu dan minggu, yang dilaksanakan pada momen-momen tertentu seperti menjelang pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten, pemilihan Kepala Daerah di Tingkat Provinsi dan juga Kabupaten/Kota serta pada waktu-waktu tertentu untuk memberikan Layanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.	Disdukcapil
103	Tahun 2024	Program matching fund pemanfaatan teknologi desa di kabupaten Bengkalis	Program kolaborasi antara Dinas PMD dengan Politeknik Negeri Bengkalis untuk fasilitasi desa melalui pengembangan alat teknologi tepat guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis
104	Tahun 2024	SINARAN (Sistem Pelayanan Informasi Pemerintahan)'	Inovasi SINARAN merupakan inovasi yang terdiri dari 3 komponan yaitu BUSTER (Buku Saku Terpadu), E-Learning (sosialisasi webinar) dan konsultasi online. SINARAN dapat diakses melalui scan QR code. Buku saku terpadu berisi informasi peraturan-peraturan yang disusun berdasarkan urusan/ bidangnya yang dapat diakses secara digital oleh aparatur kecamatan, desa dan kelurahan. E-Learning atau sosialisasi webinar merupakan program terjadwal yang dilakukan secara virtual melalui zoom meeting kepada aparatur desa dan kelurahan di wliayah Kecamatan Bengkalis yang membahas tentang isu- isu terkait dan memberikan pemahamantentang tugas- tugas yang ada. Konsuktasi online merupakan wadah untuk aparatur dapat berkonsultasi terkait tentang tugas- tugas pemerintahan. Tujuan utama inovasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur, mempermudah koordinasi dan komunikasi, meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan, mengurangi beban administratif, menigkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur.	Kecamatan Bengkalis
105	Tahun 2024	Peningkatan penilaian kinerja pegawai melalui laporan pelaksanaan tugas harian menggunakan google form di Kantor Camat Bengkalis	Inovasi ini dilakukan dengan cara setiap aparatur yang berada di Kecamatan Bengkalis mengrimkan foto dan keterangan kegiatan setiap harinya melalui google form. Tujuan inovasi ini adalah untuk membantu para pegawai dalam menyusun SKP bulanan, meminimalisir pegawai yang tidak melaksanakan kegiatan/ pekerjaannya dan mengawasi kinerja pegawai.	Kecamatan Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
106	Tahun 2024	SEKATAN (http://sekatan.camatbantan.bengkaliskab.go.id)	SEKATAN (Sembang Kecamatan Bantan) menghadirkan solusi dalam miningkatkan pelayanan publik di kecamatan Bantan melalui aplikasi digital yang bisa diakses masyarakat seperti : 1. Data Pelayanan Kecamatan 2. Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dan Desa 3. Melakukan pengaduan terhadap proses pelayanan Kecamatan dan Desa 4. Jumlah indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dan Desa Selain bisa diakses melalui digital, SEKATAN menghadirkan solusi pelayanan yang di lakukan pihak Kecamatan dengan sembang secara langsung kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan yang diberikan Kecamatan dan Desa	Kecamatan Bantan
107	Tahun 2024	BEDA SEKATAN	BEDA SEKATAN adalah Program Bersih Desa Se Kecamatan Bantan. Program ini melibatkan berbagai aktivitas yang meliputi : 1. Gotong Royong, Seluruh Warga Desa bekerjasama membersihkan lingkungan sekitar, termasuk jalan, selokan dan tempat umum lainnya; 2. Pengelolaan sampah, Mengatur sistem pengumpulan, pemilahan dan pembuangan sampah yang lebih baik; 3. Penanaman Pohon, Mengadakan kegiatan menanam pohon untuk penghijauan dan memperbaiki kualitas udara; 4. Pendidikan lingkungan,Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan cara-cara melakukannya dengan benar; 5. Pembangunan Infrastruktur, Memperbaiki atau membangun fasilitas umum seperti tempat sampah, toilet umum dan sarana kebersihan lainnya. Kegiatan Gotong royong massal di setiap Desa se Kecamatan Bantan akan dilaksanakan secara serentak bersama pemerintah Kecamatan setiap 2 (Dua) Bulan sekali dengan jadwal akan ditentukan oleh Kecamatan.	Kecamatan Bantan
108	Tahun 2024	BEAJEBA (Becak Antar Jemput Balita)	mempermudah akses masyarakat yang mempunyai balita untuk datang ke Pos Yandu, dan meningkatkan kesadaran orang tua agar peduli terhadap kesehatan bayinya. Becak Antar Jemput Balita (BEAJEBA) yang disiapkan pemerintah bagi masyarakat yang mempunyai balita, yang tempat tinggalnya jauh dari pos yandu dengan tujuan kelancaran untuk akses ke pos yandu lebih mudah dan lancar bagi masyarakat yang berada jauh di desa terpencil.	Kecamatan Rupat Utara

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
109	Tahun 2024	Betah Bermasa (Becak Antar Wllayah Bergerak Menekan Stunting)	Untuk menggerakkan atau mengembangkan berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan dimana pos yandu merupakan milik masyarakat dan dikelola oleh masyarakat	KELURAHAN DAMON KECAMATAN BENGKALIS
110	Tahun 2024	Cinta Bunda (Cipta Makanan Sehat Anak dan Balita Kelurahan Damon)	Untuk mewujudkan generasi sehat dan cerdas diperlukan perhatian terhadap proses tumbuh dan kembang anak/balita serta peran pemerintah maupun keluarga	KELURAHAN DAMON KECAMATAN BENGKALIS
111	Tahun 2024	SELARAS	1. Tentang birokrasi pelayanan masyarakat yang masih manual dan lama 2. Terlalu banyak aplikasi satu desa	Desa Pangkalan Batang Barat Kecamatan Bengkalis
112	Tahun 2024	Pembangunan gerai BUMDes	Sekilas yang melatar belakangi permasalahan yakni tidak adanya tempat untuk memasarkan hasil usaha UMKM masyarakat desa, sehingga sulit dalam pemasaran produk tersebut. Adapun tujuan dan manfaatnya adalah agar masyarakat yang memiliki usaha UMKM bisa memasarkan di Gerai BUMDes, sehingga mudah para konsumen atau pembeli mendapatkan produk para UMKM desa Puteri Sembilan melalui BUMDes	Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara
113	Tahun 2024	UMKM Kerajinan Tangan Dengan Manfaatkan Oyang Lidi	- Latar Belakang Permasalahan lnovasi ini adalah Oyang Lidi yang diambil dari pohon kelapa yang disisihkan dari Pelepahnya,Selesai dikumpulkan akan dibersihkan sampai bersih dari daunnya tesebut,membersihkan lidi itu ujungnya tidak boleh patah, dibersihkan sampai bersih tidak ada lagi serabut halus di lidi. Lidi yang diambil harus berdaun yang muda,jika lidi berdaun kering dibersihkan ujungnya itu akan patah patah,untuk anyaman ini lidi ini tidak bisa menggunakan lidi yang ujungnya patah patah. lidi yang ujungnya patah tidak bisa dipakai untuk anyaman jika dalam pengerjaan penganyaman lidi patah patah maka dasar dari pembentukan anyaman tersebut harus dibongkar ulang,supaya hasil penganyaman bagus sesuai yang kita inginkan.jika tidak di bongkar ulang hasilnya tidak akan bagus. Deskripsi lnovasi Piring lidi ini Memanfaatkan Limbah Lidi Kelapa menjadi suatu produk kerajinan yang fungsional dan ramah lingkungan.piring lidi ini dianyam dari lidi kelapa yang kuat dan lentur, menghasilkan piring yang tahan lama dan memiliki nilai estetik.inovasi ini tidak hanya mengurangi limbah,tetapi juga memberikan altematif piring yang lebih baik dibandingkan piring plastlk yang sulit terurai. Keunggulan Piring Lidi Kelapa adalah pemanfaatan limbah lidi kelapa mengurangi limbah organik dan berkontribusi, pada prinsip berkelanjutan.Piring Lidi dapat digunakan sebagai wadah makanan ,alas hidangan,atau bahkan sebagai hiasan meja. Dalam penganyaman lidi ini diperlukan 70 batang lidi untuk satu piring makan, jika dalam 70 batang lidi ini dibentuk dasar piring ada kedapatan salah satu	Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupat Utara

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			lidi itu patah maka hasilnya tidak akan bagus,jika penganyaman piring lidi ini tidak mencukupi 70 batang,maka akan dibentuk piring kecil seperti piring tempat sneks, jika lidi yang diperlukan melebihi 70 batang maka yang akan dibentuk talam. Setelah dibentuk menjadi piring lidi.proses selanjutnya pengeringan Piring lidi. Perkiraan pengeringan lidi satu hari,supaya kering,sesudah piring lidi kering dapat diberi finishing seperti pewarnaan atau lapisan pelindung untuk meningkatkan daya tahan dan keindahan. Lidi Kelapa memiliki serat yang kuat,membuat piring lidi cukup tahan lama untuk penggunaan sehari-hari.Piring lidi memiliki tampilan alami dan tekstur yang menarik, menambah nilai estetik dalam penyajian makanan. Lidi Kelapa memiliki serat yang kuat,membuat piring lidi cukup tahan lama untuk penggunaan sehari- hari.Piring lidi memiliki tampilan alami dan tekstur yang menarik, menambah nilai estetik dalam penyajian makanan. - Tujuan lnovasi 1- Untuk memanfaatkan Limbah lidi kelapa yang melimpah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. 2- selain itu mengurangi menggunakan piring plastik. 3- Meningkatkan Nilai ekonomis limbah 4- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 5- Mengembangkan keragarnan kerajinan. 6- Menlngkatkan pemberdayaan ekonomi lokal . 7- Mengurangi limbah organik 8- Memberikan alternative produk ramah lingkunga'n 9- Menghidupkan kembali tradisi kerajinan 6- Menlngkatkan pemberdayaan ekonomi local . 7- Mengurangi limbah organik 8- Memberikan alternative produk ramah lingkungan 9- Menghidupkan kembali tradisi kerajinan - Manfaat lnovasi 1- Meningkatkan Kesadaran Lingkungan 2- Piring Lidi Merupakan solusl ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan piring plastic sekali pakai,sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dengan membuka peluang usahadan peningkatanan pendapatan melalui pembuatan kerajinan 3- Peningkatan pendapatan 4- Peningkatan kreativitas 5- Pemberdayaan masyarakat 6- Peluang usaha 7- Pemanfaatan bahan lokal	
114	Tahun 2024	Door prize untuk yang rajin ke pos yandu	penigkatan partisipasi layanan kesehatan, karena mendorong kehadiran masyarakat (khususnya ibu dan balita) ke pos yandu, inovasi ini membantu	Desa Teluk Latak

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
		(Gema Penting/ Gerakan Peduli Stunting)	mengubah perilaku masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar	Kecamatan Bengkalis
115	Tahun 2024	Gerakan sedekah subuh masal se- Desa Bantan Tengah	Untuk membudayakan sedekah/ infak dikalangan masyarakat dalam rangka untuk kegiatan pembangunan rumah ibadah dan program kegiatan sosial lainnya	Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan
116	Tahun 2024	Unit layanan bantuan pengurusan sertifikasi dan perizinan produk pangan (ULURTANGAN)	Untuk mempermudah pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi dan perizinan produk pangan (sertifikat halal, NIB, PIRT dll)	Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan
117	Tahun 2024	Perpustakaan Berjalan "KAISAR PINTAR"	Untuk meningkatkan gemar membaca masyarakat dan mendekatkan akses masyarakat terhadap koleksi buku perpustakaan desa	Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan
118	Tahun 2024	Konten Edukasi Pangan Aman (KONEKSI PAMAN)	Untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pangan aman meliputi proses pengolahan pangan aman, zat- zat berbahaya pada produk pangan dll	Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan
119	Tahun 2025	TELEMEDICINE (Pemberian layanan Kesehatan jarajk jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh professional Kesehatan)	Permasalahan : • Pasien yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau untuk berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan perwatan medis. Tujuan : • Dokter dan pasien berinteraksi melalui video, telepon, atau chat untuk membahas kondisi Kesehatan dan rencana perwatan.	RSUD Mandau
120	Tahun 2025	TPT BERKAH	Latar Belakang : Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis (MTb). Indonesia termasuk negara dengan beban TBC tinggi dimana saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia. Beban ILTB di dunia pada tahun 2014 diperkirakan sebanyak 1.700.000.000 orang dimana 35% diantaranya berasal dari wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Cakupan pemberian TPT di UPT Puskesmas Sebangar tahun 2024 sebesar 18 orang (32%), dimana masih jauh dari target Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yaitu 56 orang. Sedangkan untuk tahun 2025, targetnya adalah 57 orang. Capaian pemberian TPT sampai trisemester II adalah 37 orang. Deskripsi Inovasi : Berupa lembar follow up TPT yang dibawa oleh penerima TPT untuk mengontrol jadwal pengobatan. Tujuan inovasi : memantau pengobatan penerima TPT. Manfaat inovasi : memudahkan nakes dan penerima TPT dalam mengingat jadwal pengobatan.	DINKES
121	Tahun 2025		Dinas kesehatan dan RSUD bekerja sama dengan Lapas dalam Pelayanan terhadap warga binaan Lapas/Rutan yang membutuhkan penanganan medis. pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan di	DINKES

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			Poliklinik Khusus (warga Binaan Lapas) di RSUD Bengkalis	
122	Tahun 2025	DBON (Desain Besar Olahraga Nasional)	Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) adalah rencana induk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, menciptkan budaya olahraga, dan mengembangkan olahraga Pendidikan, olahraga Masyarakat, serta olahraga prestasi. Latar Belakang Permasalahan - Keterbatasan Infrastruktur Fasilitas olahraga yang belum memadai di berbagai daerah menjadi kendala utama dalam pengembangan olahraga - Kualitas Pelatih dan Atlet Kualitas pelatih dan atlet nasional masih perlu ditingkatkan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi - Kurangnya Partisipasi Masyarakat Kurangnya minat dan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan olahrag menjadi tantangan dalam menciptakan budaya olahraga yang kuat - Ketidakseragaman Pembinaan Pembinaan olahraga yang belum terstruktur dan terintegrasi di berbagai daerah menyebabkan ketidaksetaraan dalam pengembangan bakat dan prestasi Tujuan : - Meningkatkan Prestasi Olahraga Nasional Menjadikan Indonesia sebagai negara yang berprestasi dalam ajang olahrag internasional, terutama olimpiade 2044 - Menciptakan Budaya Olahraga yang Kuat Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan olahraga dan menciptakan gaya hidup sehat melalui olahraga - Mengembangkan Olahraga Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi Menyelenggarakan pembinaan olahrag yang terstruktur dan terpatu di semua tingkatan, mulai dari Pendidikan, Masyarakat, hingga prestasi. Manfaat - Peningkatan Prestasi DBON diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet Indonesia di level nasional dan internasional - Peningkatan Kualitas SDM Program ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga, termasuk pelatih, atlet, dan tenaga pendukung - Peningkatan Partisipasi Masyarakat DBON diharapkan dapat meningktakan partisipasi masyarkat dalam kegiatan olahraga dan menciptakan budaya olahraga yang kuat - Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dengan meningkatnya partisipasi dalam olahraga, diharapkan Kesehatan Masyarakat juga akan	Dinas Parwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			meningkat - Peningkatan Ekonomi Industri olahraga dan pariwisata olahraga juga akan mendapatkan manfaat dari DBON, seperti peningkatan pendapatan dan lapangan kerja.	
123	Tahun 2025	ASN Mengaji	1.Latar Belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelayan publik, abdi negara, dan perekat persatuan bangsa. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, ASN dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral dan spiritual yang kuat. Salah satu cara untuk membangun karakter ASN yang berakhlak adalah melalui kegiatan pembinaan rohani secara rutin. ASN Mengaji merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan keagamaan yang bertujuan memperkuat nilai-nilai spiritual, etika, dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ASN dapat menjalankan tugas dengan lebih amanah, profesional, dan penuh tanggung jawab, serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. 2. Tujuan Kegiatan - Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan ASN. - Membentuk karakter ASN yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab melalui pendekatan spiritual. - Menumbuhkan semangat kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. - Menjadikan kegiatan keagamaan sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual ASN secara berkesinambungan. - Membangun suasana kerja yang harmonis dan penuh berkah melalui kegiatan tausyiah rutin.	BAPPEDA
124	Tahun 2025	Pemetaan Lahan Sawah dan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Swakelola Tipe II Dengan Politeknik Negeri Bengkalis	1. Latar Belakang : Pemetaan lahan sawah pada suatu daerah merupakan suatu masalah tak terkecuali di Kabupaten Bengkalis. Hal ini di perlukan untuk mengetahui daerah mana yang mempunyai potensi besar dalam pertanian terutama tanaman padi sawah. 2. Deskripsi Inovasi : Pemetaan lahan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dengan Politeknik Negeri Bengkalis dalam mempermudah perangkat daerah maupun Masyarakat dalam mengetahui Potensi wilayahnya. 3. Tujuan Inovasi : Mempermudah dalam mengakses data potensi yang dimiliki pada suatu daerah. 4. Manfaat Inovasi : Mempermudah dalam pemetaan potensi wilayah Kabupaten Bengkalis.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
125	Tahun 2025	UMI BERDASI (USAHA MIKRO BERDAYA SAING TINGGI)	1. Latar Belakang Permasalahan: - Rendahnya Kapasitas Manajerial dan Kewirausahaan - Akses Permodalan yang Terbatas - Daya Saing Produk yang Lemah - Kurangnya Akses Pasar dan Promosi - Minimnya Prestasi dan Rekognisi Usaha Mikro Deskripsi: UMI BERDASI, singkatan dari usaha mikro berdaya saing dan berprestasi, adalah sebuah program inovatif yang dirancang untuk memperkuat posisi pelaku usaha mikro agar mampu bersaing di pasar lokal maupun global. program ini lahir dari kepedulian terhadap potensi besar usaha mikro yang selama ini belum tergarap secara maksimal karena keterbatasan akses terhadap pelatihan, teknologi, permodalan dan jaringan pasar. Melalui pendekatan berbasis pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan, UMI BERDASI menghadirkan solusi konkret, seperti pelatihan manajemen usaha, literasi digital, peningkatan kualitas produk, serta fasilitasi ke ajang-ajang kompetisi dan pameran usaha. Harapannya, pelaku usaha mikro tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi pelaku usaha yang inovatif, adaptif, dan berprestasi. UMI BERDASI menjadi simbol transformasi usaha mikro: dari yang semula berjalan secara tradisional, menjadi lebih modern profesional dan siap bersaing di Era Ekonomi Digital. 2. Tujuan: 1). Meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha mikro 2). Mendorong inovasi dan kreativitas 3). Mewujudkan kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro 4). Menciptakan peluang prestasi dan pengakuan 5). Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan keluarganya 6). Membangun citra positif dan kepercayaan konsumen 7). Mendorong terbentuknya ekosistem usaha mikro yang kolaboratif 8). Mewujudkan Usaha Mikro yang Berdaya Saing Tinggi 9). Mendorong Prestasi dan Rekognisi Usaha Mikro 3. Manfaat: 1). Peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro 2). Terciptanya lapangan kerja baru 3). Pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil 4). Peningkatan daya saing produk lokal 5). Mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha 6). Meningkatkan prestasi dan motivasi wirausaha 7). Penguatan peran perempuan dan kelompok rentan 8). Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
126	Tahun 2025			Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			daerah. UMI BERDASI adalah konsep inovatif yang mendorong pelaku usaha mikro untuk naik kelas melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan branding yang kuat. Program ini menggabungkan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pendampingan digitalisasi agar UMKM tidak hanya bertahan, tapi mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan prinsip "Berdaya Saing Tinggi" UMI BERDASI menargetkan usaha mikro yang memiliki potensi produk unggulan, namun belum terkelola secara profesional. Melalui pendekatan ini, usaha mikro ditransformasi menjadi entitas bisnis yang rapi secara administratif, menarik secara visual, serta tangguh dalam menghadapi tantangan pasar digital dan globalisasi.	
127	Tahun 2025	Sistem Inovasi Inflasi	Bagian Perekonomian sebagai sekretariat TPID memiliki peran yang sangat penting dalam memotoori kinerja TPID.Khususnya dalam hal mnegoordinasikan tim dan menyediakan data/ informasi perkembangan inflasi sebagai bahan kebijakan pimpinan. Data series perkembangan inflasi saat ini masih dicatat dan dianalisis secara manual sesuai dengan kemampuan SDM yang tersedia. Dalam pelaksanaannya masih sering terjadi keterlambatan penyediaan analisi data dan informasi yang diperlukan untuk segera dilaporkan kepada pimpinan secara realtime, khususnya dalam kondisi fluktuasi inflasi yang membutuhkan intervensi. Begitu juga dengan kualitas analisis yang sangat dipengaruhi kompetensi SDM, interpretasi akan kondisi aktual data analisis inflasi juga belum dapat dilakukan secara terstandar, sehingga secara keseluruhan masih ditemukan banyak persoalan dalam praktik pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian sebagai sekretariat TPID. Dalam upaya perbaikan berkelanjutan (continuous inprovement) menuju organisasi publik yang berkinerja tinggi (OBT). Perbaikan kinerja, perubahan dan inovasi sektor publik, sebagaimana yang diamanatkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang menggariskan bahwa inovasi pelayanan publik memerlauakan terobisan pelayanan publik berupa gagasan kreatif, orisinilo layanan pemerintah yang dilakukan dengan pendekatan pemanfaatan digital. Berdasarkan gambaran kondisi diatas, maka diperlukan suatau terobosan baru terhadap manajemen data yang dikelola skretariat TPID yang bisa menjawab kebutuhan akan kemudahan pencatatan, penghimpunan dan sekaligus kemampuan melakukan analisis cepat sesuai keperluan, yang dapat dijadikan sumber informasi bagi pimpinan daerah maupun stakeholder untuk melakukan	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis

No.	Tahun Pelaksanaan	Judul Inovasi	Ringkasan Inovasi	Perangkat Daerah/Pelaksana Inovasi
			intervensi dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi secara aktuan dan efektif sesuai data dan fakta yang ada.	
128	Tahun 2025	Absen digital	Sekilas yang melatar belakangi permasalahan yakni kurangnya disiplin perangkat dan staf desa untuk hadir dan pulang kerja tepat waktu. Adapun tujuan dan manfaatnya agar perangkat dan staf desa bisa berdisiplin hadir dan pulang tepat waktu dan pelayanan terhadap masyarakat lebih cepat disiapkan pada saat jam kerja	Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara
129	Tahun 2025	Kampong warisan melayu	Sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sangat mendukung, siap berpartisipasi	Desa Muntai Kecamatan Bantan
130	Tahun 2025	Aplikasi toko online BUMDes Langgam Sako Desa Teluk Latak (BUMDes Shop)	Aplikassi toko online (BUMDes Shop) merupakan suatu aplikasi yang diciptakan untuk meningkatkan perekonomian desa, memperluas jangkauan pasar, digitalisasi ekonomi desa, meningkatkan pendapatan BUMDes. Dengan adanya aplikasi online ini juga mempermudah konsumen untuk membeli produk di BUMDes Langgam Sako Desa Teluk Latak	Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis
131	Tahun 2025	Inovasi Bekam Sehat (Bersih Kampung Semua Sehat)	Meningkatkan gotong royong bertujuan untuk menunjang kebersihan lingkungan diwilayah desa Kembung Baru	Desa Kembung Baru Kecamatan Bantan
132	Tahun 2025	Inovasi Layan Jempol (Pelayanan Jemput Bola)	Semakin mengingkatnya Layan Jempol (Pelayanan Jemput Bola) untuk mewujudkan pelayanan yang prima pemerintah desa Kembung Baru	Desa Kembung Baru Kecamatan Bantan
133	Tahun 2025	Pos pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (POSYANDU ILP)	Latar belakang Pelayanan kesehatan dasar sering terpisah pisah dan tidak maksimal, terutama bagi ibu, anak dan kelompok rentan Deskripsi Inovasi Penggabungan berbagai layanan dasar seperti imunisasi, gizi, kesehatan ibu dan anak, sert akonseling dalam satu pos yandu terpadu Tujuan Meningkatkan efisiensi dan cakupan layanan kesehatan dasar masyarakat desa Manfaat Warga mendapat layanan lengkap dalam satu tempat, lebih praktis dan efektif	Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah serta kemampuan keuangan daerah pada tahun perencanaan. Bagian ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan tahunan yang disusun secara sistematis, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui kerangka ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal serta dinamika perekonomian yang berkembang.

Kerangka Ekonomi Daerah disusun berdasarkan analisis terhadap berbagai indikator makro ekonomi daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta perkembangan investasi. Selain itu, analisis juga memperhatikan sektor-sektor unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah yang diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan nilai tambah sektor unggulan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan proyeksi ekonomi daerah tahun perencanaan, juga dipertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian daerah, baik yang bersumber dari kondisi global, nasional, maupun regional. Perubahan harga komoditas, perkembangan investasi, kebijakan fiskal nasional, serta dinamika permintaan domestik menjadi faktor penting yang turut mempengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kerangka ekonomi daerah disusun secara adaptif agar mampu mengantisipasi ketidakpastian ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan yang tersedia.

Sementara itu, Kerangka Keuangan Daerah menggambarkan kapasitas fiskal daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer, secara efektif. Kemudian pada sisi belanja daerah, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil, terutama untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan keterkaitan antara kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah, diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dalam

RKPD dapat disusun secara lebih terukur dan implementatif. Sinkronisasi antara prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.1 Arah Kebijakan Fiskal, Target Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan

3.1.1 Arah Kebijakan Fiskal

Arah kebijakan fiskal daerah merupakan kerangka strategis yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah melalui kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan APBD, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi daerah, alokasi sumber daya pembangunan, distribusi kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan fiskal harus mampu menciptakan keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Tahun 2027 diperkirakan masih diwarnai oleh berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Ketidakpastian perekonomian global, fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan fiskal nasional, dinamika transfer ke daerah, inflasi, serta meningkatnya kebutuhan belanja pelayanan publik menjadi faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tuntutan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menerapkan kebijakan fiskal yang, antisipatif, dan mampu menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

3.1.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum, arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pendapatan transfer, serta penguatan sumber pendapatan lain yang sah. Optimalisasi PAD menjadi prioritas utama mengingat tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih relatif tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD secara terukur. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, perbaikan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, serta penguatan pengawasan untuk meminimalisir kebocoran penerimaan. Khusus terhadap opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor yang masuk dalam komponen PAD kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan pengawasan dengan mengalokasi anggaran sebesar 1% dari penerimaan pajak tersebut. Sementara itu, ekstensifikasi diarahkan pada penggalian potensi pajak dan retribusi , khususnya dari sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan seperti jasa, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi digital.

Selain itu, pengelolaan pajak daerah perlu didukung oleh pembaruan basis data wajib pajak yang akurat dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan memperluas cakupan objek pajak. Dalam hal retribusi daerah, kebijakan diarahkan pada penyesuaian tarif secara rasional dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan iklim investasi. Reformasi tata kelola retribusi juga penting dilakukan agar pelayanan publik yang diberikan sebanding dengan kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat.

Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan aset daerah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan pendapatan. Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan penilaian ulang terhadap aset yang dimiliki, serta mendorong pemanfaatannya melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga yang transparan dan akuntabel. Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi bagian dari arah kebijakan pendapatan, dengan mendorong BUMD agar lebih profesional, berorientasi bisnis, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Dalam konteks pendapatan transfer, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas daerah dalam mengakses dan mengelola dana transfer secara optimal. Hal ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan prioritas nasional, sehingga peluang memperoleh dana insentif fiskal dapat dimaksimalkan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pemanfaatan dana transfer dilakukan secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, dalam menghadapi volatilitas pendapatan dari sektor migas, kebijakan pendapatan daerah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential fiscal policy). Diversifikasi sumber pendapatan menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko fiskal akibat fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, pengembangan sektor-sektor non-migas sebagai basis penerimaan baru harus menjadi prioritas, sejalan dengan upaya transformasi ekonomi daerah.

Arah kebijakan juga perlu memperhatikan aspek inovasi, dengan mendorong penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2027–2028 diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD,

peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, diversifikasi sumber penerimaan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dengan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan struktur pendapatan daerah menjadi lebih kuat, stabil, dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara efektif.Dengan kebijakan-kebijakan tersebut diatas diperkirakan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3.1.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Setiap alokasi belanja harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan capaian output dan outcome pembangunan, sehingga penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran menjadi kunci utama agar belanja daerah lebih tepat sasaran dan tidak bersifat incremental semata.

Prioritas utama belanja daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Investasi pada sektor ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang. Belanja pendidikan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu layanan, termasuk penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, belanja kesehatan diarahkan pada peningkatan layanan primer, penguatan fasilitas kesehatan, serta upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, belanja daerah juga perlu diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor produktif. Hal ini mencakup alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur ekonomi seperti jalan, pelabuhan, dan konektivitas antarwilayah yang mampu mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Selain itu, dukungan terhadap sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, serta industri pengolahan perlu diperkuat melalui program peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan akses pasar.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas, kebijakan belanja juga harus mendorong pengembangan sektor non-migas yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Oleh karena itu, belanja daerah perlu memberikan stimulus bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta digitalisasi ekonomi lokal. Intervensi ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan, akses pembiayaan, serta dukungan infrastruktur pendukung.

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah juga menekankan pada penguatan belanja modal yang produktif dibandingkan belanja rutin yang kurang memberikan dampak jangka panjang. Rasionalisasi belanja operasional menjadi penting untuk memastikan ruang fiskal yang cukup bagi pembiayaan program-program prioritas. Dalam hal ini,

efisiensi belanja pegawai dan belanja barang/jasa perlu terus ditingkatkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Kebijakan belanja daerah juga harus responsif terhadap isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta penanganan ketimpangan wilayah. Program perlindungan sosial perlu diperkuat dan ditargetkan secara tepat sasaran untuk kelompok masyarakat rentan. Selain itu, pembangunan berbasis kewilayahan perlu diperhatikan agar tidak terjadi disparitas pembangunan antar kecamatan atau desa.

Dalam perspektif keberlanjutan, belanja daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Pengalokasian anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Terakhir, penguatan tata kelola belanja daerah menjadi aspek yang tidak kalah penting. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2027 diarahkan pada penguatan kualitas belanja yang produktif, berorientasi hasil, serta mampu mendorong transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan dalam alokasi anggaran belanja di Kabupaten Bengkalis 2027 masih memperlihatkan bahwa proporsi belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja lainnya.

3.1.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pada aspek pembiayaan daerah, kebijakan diarahkan untuk menjaga kesehatan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara selektif, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati (*prudent fiscal management*). Pembiayaan daerah dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang pembangunan, arah kebijakan fiskal Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif dan berorientasi hasil, menjaga kesinambungan fiskal, serta memperluas ruang pembiayaan pembangunan. Melalui kebijakan tersebut diharapkan APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen

keuangan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.2 Target Ekonomi Makro

Penyusunan target ekonomi makro daerah didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kondisi perekonomian daerah serta proyeksi perkembangan ekonomi pada tahun perencanaan. Analisis tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja pembangunan yang telah dicapai, tantangan dan peluang yang dihadapi, serta prospek perekonomian daerah di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemerintah daerah menetapkan target indikator ekonomi makro yang menjadi arah dan sasaran pembangunan tahun 2027. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini diawali dengan uraian mengenai kondisi ekonomi makro daerah sebagai dasar analisis, kemudian dilanjutkan dengan penetapan target ekonomi makro yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.

3.1.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2026

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dinamika pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi, tetapi juga menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai wilayah yang memiliki keunggulan di sektor perkebunan, perikanan, serta didukung oleh aktivitas migas, Kabupaten Bengkalis memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk terus dikembangkan.

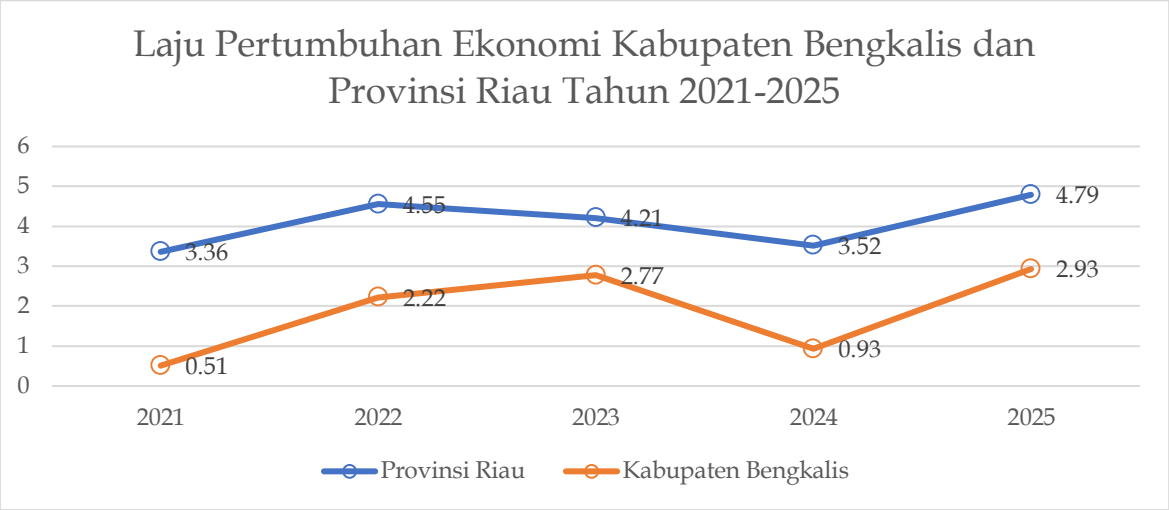
Dalam beberapa tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis menunjukkan kecenderungan yang masih bertumpu pada sektor primer, khususnya sub sektor migas dan perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, ketergantungan terhadap sektor-sektor tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama terkait fluktuasi harga komoditas di pasar global dan isu keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih beragam menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan pertumbuhan yang lebih stabil dan inklusif.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan berbasis nilai tambah, pengembangan industri hilir, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, optimalisasi peran investasi, baik dari pemerintah maupun swasta, menjadi faktor penting dalam mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai, kemudahan berusaha, serta kepastian regulasi juga menjadi prasyarat utama dalam menarik investasi.

Dengan memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Bengkalis yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional serta kedekatannya dengan wilayah pertumbuhan

di Provinsi Riau, peluang untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah semakin terbuka lebar. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan adaptif terhadap perubahan.

Melalui pendekatan pembangunan yang terencana, Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2021–2025 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2026

Gambar III-1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Termasuk Minyak Bumi Dan Gas dengan Provinsi Riau Tahun 2021-2025

Merujuk pada Gambar di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cenderung fluktuatif jika dibandingkan dengan Provinsi Riau yang relatif lebih stabil. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bengkalis tercatat sebesar 0,51 persen, jauh berada di bawah capaian Provinsi Riau sebesar 3,36 persen. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya dampak pemulihan pasca pandemi terhadap struktur ekonomi daerah yang belum sepenuhnya pulih, terutama pada sektor-sektor utama yang menjadi penopang perekonomian.

Memasuki tahun 2022 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 2,22 persen dan 2,77 persen. Tren ini menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi yang mulai berjalan, didorong oleh membaiknya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat serta meningkatnya kinerja sektor unggulan seperti perkebunan dan migas. Namun demikian, meskipun mengalami peningkatan, laju pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau yang pada periode yang sama mampu tumbuh di atas 4 persen, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.

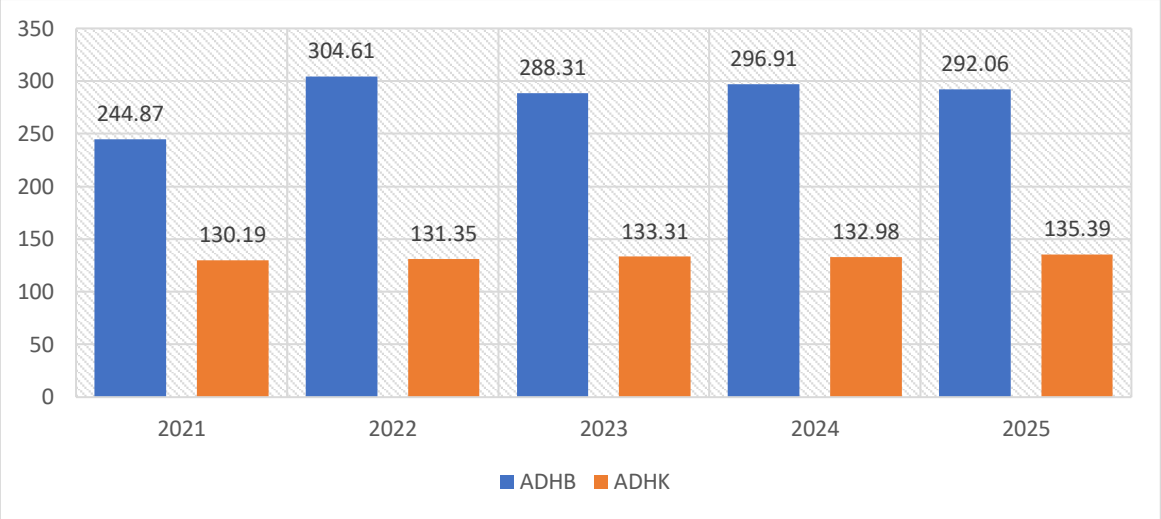
Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis kembali mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 0,93 persen, sementara Provinsi Riau masih mampu tumbuh sebesar 3,52 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap perekonomian daerah, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas di pasar global maupun faktor internal seperti keterbatasan diversifikasi ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis masih rentan terhadap gejolak, karena ketergantungan yang tinggi pada sektor primer.

Selanjutnya, pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis kembali menunjukkan perbaikan dengan capaian sebesar 2,98 persen. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan Provinsi Riau yang mencapai 4,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Bengkalis belum sepenuhnya kuat dan masih memerlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama periode tersebut memperlihatkan karakteristik yang fluktuatif dengan tingkat pertumbuhan yang berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini mencerminkan perlunya transformasi struktural ekonomi melalui diversifikasi sektor, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, serta penguatan investasi dan infrastruktur. Tanpa adanya upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baengkalis akan cenderung tetap rentan dan sulit untuk mengejar ketertinggalan dari capaian pertumbuhan di tingkat provinsi.

B. PDRB Per kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Indikator ini dihitung dengan membagi total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk pada periode tertentu, sehingga dapat menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu. PDRB per kapita sering dijadikan acuan dalam menganalisis perkembangan ekonomi daerah, dan menilai efektivitas kebijakan pembangunan. Dengan melihat pertumbuhan PDRB per kapita, dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk.



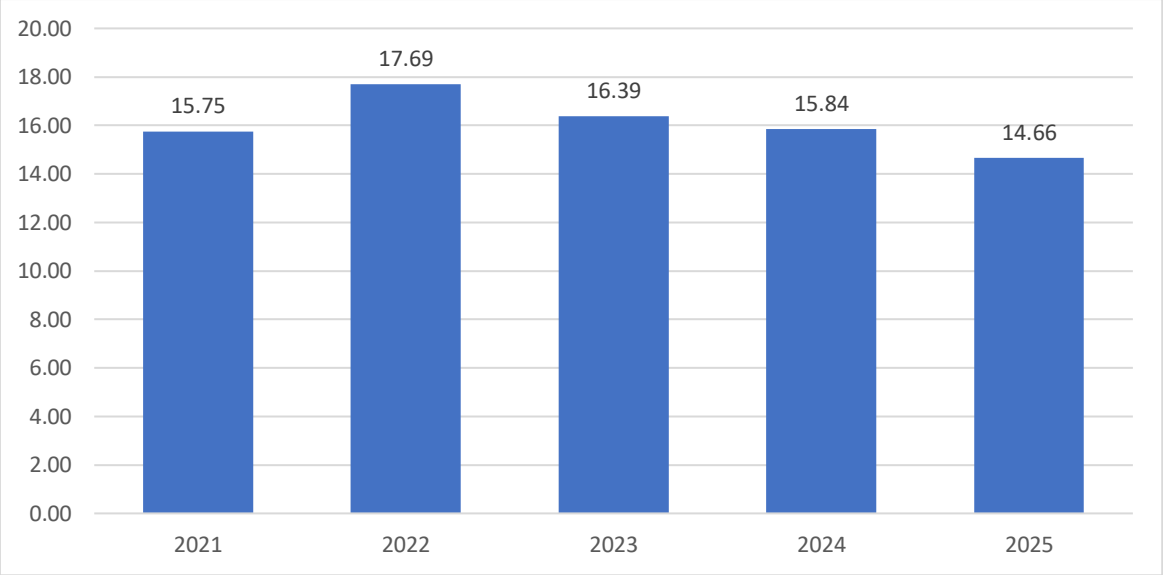
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2026

Gambar III-2 PDRB per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2025 (Juta Rupiah)

Perkembangan PDRB per kapita ADHK tahun 2021–2025 seperti terlihat pada grafik diatas cenderung stagnan, hanya naik dari 130,19juta rupiah menjadi 135,39 juta rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil per kapita masih lambat dan belum memberi peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat. Sebaliknya, PDRB per kapita ADHB meningkat cukup tinggi dari 244,87 juta rupiah pada 2021 menjadi 292,06 juta rupiah pada 2025, meskipun sempat turun di 2023. Kenaikan ini lebih disebabkan oleh faktor harga dan inflasi, bukan pertumbuhan produksi riil. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas agar pertumbuhan nominal dapat sejalan dengan kesejahteraan riil masyarakat

C. Kontribusi PDRB Kabupaten Bengkalis terhadap PDRB Provinsi

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis terhadap PDRB Provinsi Riau memiliki peran yang cukup signifikan, mengingat Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah dengan basis ekonomi yang kuat di sektor migas, perkebunan, serta perdagangan dan jasa. Sebagai wilayah strategis dengan posisi geografis yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis tidak hanya menopang perekonomian daerahnya sendiri, tetapi juga memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi Riau secara keseluruhan. Oleh karena itu, dinamika PDRB Kabupaten Bengkalis dapat menjadi cerminan penting dalam menilai kinerja perekonomian Provinsi Riau, sekaligus menjadi indikator untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di masa depan. Adapun kontribusi PDRB Kabupaten Bengkalis terhadap PDRB Provinsi Riau berdasarkan harga berlaku adalah seperti terlihat sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2026

Gambar III-3 Kontribusi PDRB Kab. Bengkalis Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar kontribusi PDRB Kabupaten Bengkalis terhadap PDRB Provinsi Riau periode 2021–2025 terlihat bahwa kontribusi Bengkalis cenderung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun setelah mencapai titik tertinggi pada tahun 2022. Pada tahun 2021 kontribusinya tercatat sebesar 15,75%, kemudian meningkat dan mencapai puncaknya di tahun 2022 sebesar 17,69%. Namun, setelah itu kontribusi Kabupaten Bengkalis kembali menurun ke angka 16,39% pada 2023, kemudian turun menjadi 15,84% pada 2024, dan kembali menurun menjadi 14,66% pada 2025. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Provinsi Riau, kontribusinya masih belum stabil dan cenderung dipengaruhi oleh dinamika sektor-sektor unggulan, terutama migas dan perkebunan. Dengan demikian, diperlukan strategi diversifikasi ekonomi agar kontribusi Kabupaten Bengkalis terhadap PDRB Riau dapat lebih konsisten dan berkelanjutan.

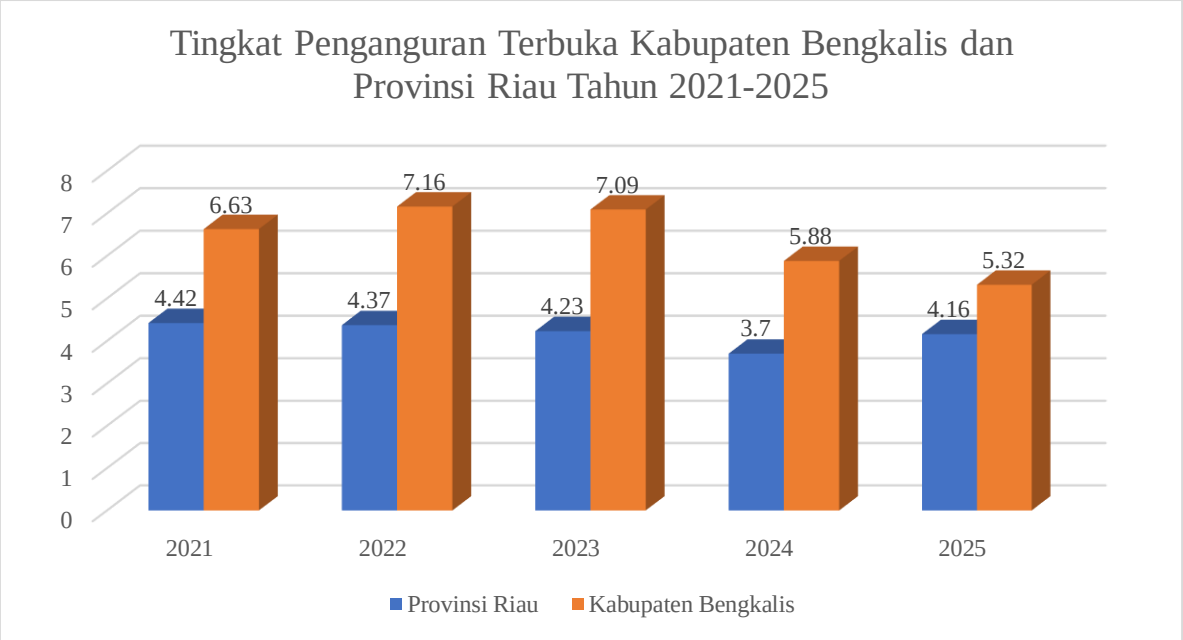
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pasar tenaga kerja serta tingkat penyerapan angkatan kerja di suatu daerah. Pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis, mencerminkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis mampu menciptakan lapangan kerja dan mengakomodasi peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Tingginya angka pengangguran terbuka tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya tantangan struktural, terutama terkait keterbatasan kesempatan

kerja yang sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Kondisi ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer, sehingga penciptaan lapangan kerja relatif terbatas dan kurang beragam. Selain itu, ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja juga turut memperbesar potensi pengangguran terbuka.

Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis tahun 2021–2025 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Privinsi Riau 2026

Gambar III-4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2021-2025

Grafik di atas memperlihatkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis selama periode 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau. Pada tahun 2021, angka pengangguran Kabupaten Bengkalis sebesar 6,63 persen, mencerminkan masih kuatnya tekanan pasar kerja pasca pandemi. Kondisi ini memburuk pada tahun 2022 ketika tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,16 persen. Hal ini menandakan belum seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.

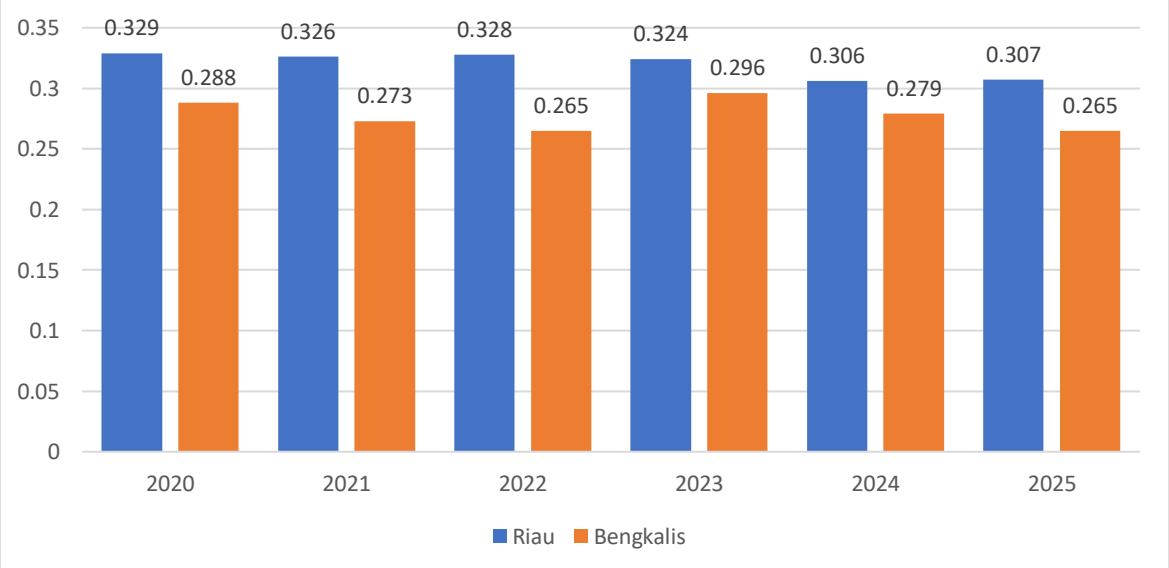
Memasuki tahun 2023 hingga 2025, tren mulai menunjukkan perbaikan dengan penurunan bertahap dari 7,09 persen menjadi 5,32 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, meskipun lajunya masih terbatas. Di sisi lain, tingkat pengangguran Provinsi Riau relatif lebih stabil dan berada pada level yang lebih rendah, sehingga kesenjangan antara Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tetap terlihat sepanjang periode tersebut.

Secara struktural, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Kabupaten Bengkalis masih menghadapi keterbatasan dalam penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan, terutama akibat dominasi sektor ekonomi yang kurang padat karya. Oleh karena itu, meskipun terdapat tren penurunan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, khususnya melalui penguatan sektor padat karya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.

E. Indek Gini Rasio

Gini rasio merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah, yang mencerminkan kesenjangan antara kelompok masyarakat serta kualitas pemerataan hasil pembangunan. Dalam pembangunan daerah, indikator ini penting untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif atau justru memperlebar disparitas sosial. Kabupaten Bengkalis, sebagai wilayah strategis di Provinsi Riau dengan basis ekonomi pada sektor migas, perkebunan, dan perdagangan, memiliki potensi pertumbuhan yang sekaligus berisiko menimbulkan ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan yang efektif.

Gini rasio berkaitan erat dengan berbagai indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, pengangguran, serta akses terhadap layanan dasar. Tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial dan memperlemah kohesi masyarakat, sementara ketimpangan yang rendah mencerminkan distribusi pembangunan yang lebih adil. Oleh karena itu, gini rasio Kabupaten Bengkalis menjadi langkah penting untuk memahami tren ketimpangan, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Adapun Indek Gini Rasio Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2026

Gambar III-5 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2025

Berdasarkan gambar perbandingan Gini Rasio Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau periode 2020–2025, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Bengkalis secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2020, Gini Rasio Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 0,288, sementara Provinsi Riau mencapai 0,329. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Bengkalis relatif lebih merata dibandingkan tingkat provinsi. Tren ini berlanjut hingga tahun 2025, di mana Bengkalis berada pada angka 0,265 dan Riau sebesar 0,307. Secara umum, kesenjangan antara keduanya menunjukkan adanya struktur distribusi pendapatan yang lebih inklusif di tingkat kabupaten.

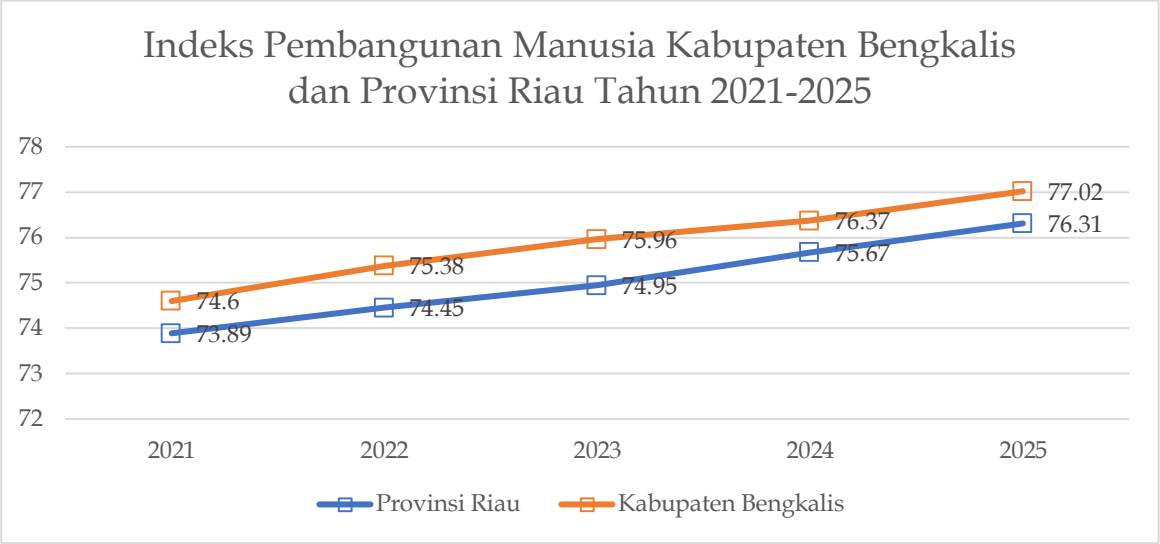
Dari sisi dinamika, Gini Rasio Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi yang cukup moderat. Setelah mengalami penurunan dari 0,288 pada tahun 2020 menjadi 0,265 pada tahun 2022, terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi sekitar 0,296 sebelum kembali menurun pada 2024 menjadi 0,279 dan kembali turun pada tahun 2025 menjadi 0,265. Kenaikan pada 2023 mengindikasikan adanya tekanan ketimpangan, yang dapat mencerminkan belum meratanya manfaat pemulihan ekonomi antar sektor atau kelompok masyarakat. Sementara itu, Gini Rasio Provinsi Riau menunjukkan tren yang relatif lebih stabil dengan kecenderungan menurun secara perlahan dari 0,329 pada tahun 2020 menjadi 0,306 pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,307, dan tetap berada pada level ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bengkalis.

Secara substantif, pola ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, tetap terdapat kerentanan terhadap peningkatan disparitas, terutama sebagaimana terlihat pada kenaikan Gini Rasio tahun 2023. Namun, penurunan kembali pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang berfokus pada pemerataan, seperti penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat, peningkatan akses terhadap lapangan kerja, serta distribusi pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, pengendalian Gini Rasio tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kualitas distribusi hasil pembangunan agar tetap inklusif dan berkeadilan secara berkelanjutan.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan dari sisi ekonomi, tetapi juga menunjukkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks pembangunan daerah, IPM menjadi alat evaluasi yang penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Riau memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Dinamika ekonomi daerah yang ditopang oleh sektor unggulan perlu diimbangi dengan peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan IPM Kabupaten Bengkalis menjadi penting, untuk melihat capaian pembangunan manusia dari waktu ke waktu, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. Adapun angka IPM Kabupaten Bengkalis 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2026

Gambar III-6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau periode 2021–2025, terlihat bahwa kedua wilayah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kabupaten Bengkalis memiliki capaian IPM yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2021, IPM Bengkalis tercatat sebesar 74,6, lebih tinggi dibandingkan Riau sebesar 73,89. Kesenjangan ini terus terjaga hingga tahun 2025, di mana Kabupaten Bengkalis mencapai 77,02, sementara Riau berada pada angka 76,31. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Bengkalis relatif lebih baik dibandingkan tingkat provinsi.

Dari sisi dinamika pertumbuhan, peningkatan IPM di Kabupaten Bengkalis terlihat cukup stabil dan progresif. Kenaikan dari 74,6 (2021) menjadi 77,02 (2025) menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Sementara itu, Provinsi Riau juga mengalami tren peningkatan dari 73,89 menjadi 76,31 dalam periode yang sama, meskipun dengan level yang sedikit lebih rendah. Konsistensi peningkatan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan manusia pada level

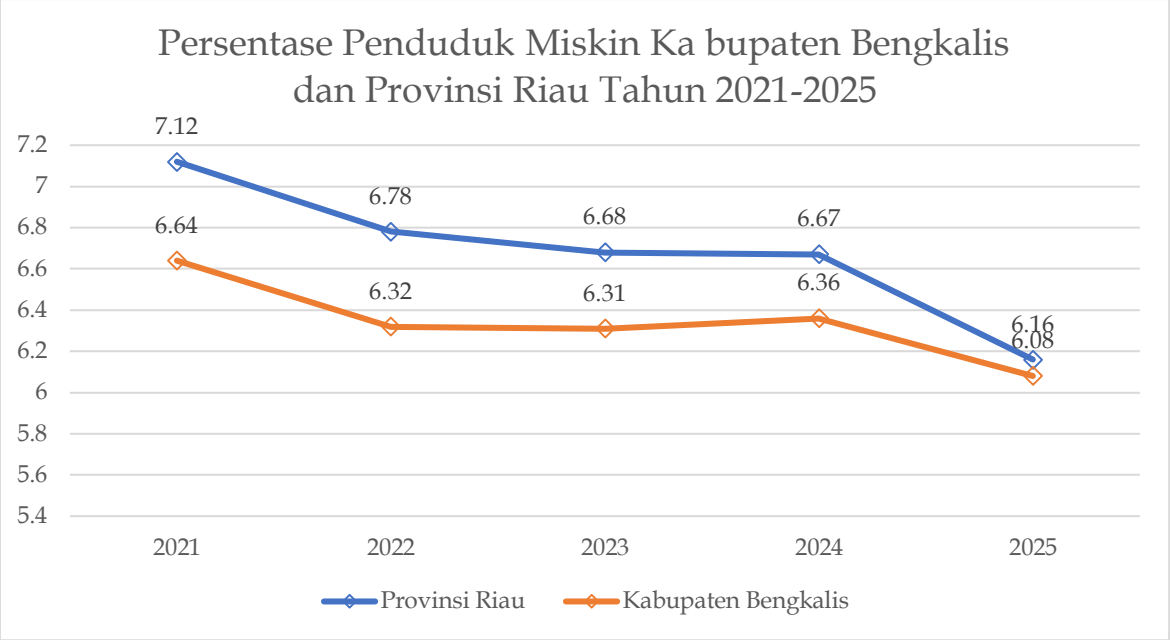
provinsi dan Kabupaten Bengkalis berjalan efektif, namun Kabupaten Bengkalis tampak memiliki akselerasi yang sedikit lebih unggul.

Secara substantif, capaian IPM yang lebih tinggi di Kabupaten Bengkalis mencerminkan keberhasilan relatif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun tetap perlu dicermati aspek pemerataan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Kenaikan IPM tidak selalu berarti bebas dari kesenjangan, sehingga penting untuk memastikan bahwa peningkatan tersebut bersifat inklusif. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan angka IPM, tetapi juga pada pemerataan akses layanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan daya beli masyarakat agar pembangunan manusia di Bengkalis dapat berkelanjutan dan merata.

G. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Indikator ini tidak hanya menggambarkan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Dalam konteks pembangunan daerah, tingkat kemiskinan menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat serta stabilitas sosial-ekonomi secara keseluruhan.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Riau menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, distribusi hasil pembangunan yang belum merata mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis penting untuk memahami pola, faktor penyebab, serta efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, sehingga dapat dirumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Adapun perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis periode 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2026

Gambar III-7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau 2021-2025

Berdasarkan Gambar persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau selama periode 2021–2025, terlihat adanya kecenderungan penurunan angka kemiskinan di kedua wilayah. Kabupaten Bengkalis secara konsisten menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Bengkalis tercatat sebesar 6,64%, sementara Riau berada pada 7,12%. Pola ini terus berlanjut hingga tahun 2025, di mana Kabupaten Bengkalis mencapai 6,08% dan Riau sebesar 6,16%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara relatif tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis lebih baik dibandingkan dengan kondisi di tingkat provinsi.

Dilihat dari perkembangannya, penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis terjadi secara bertahap dengan variasi yang relatif kecil. Setelah menurun dari 6,64% pada tahun 2021 menjadi 6,31% pada tahun 2023, angka kemiskinan sempat mengalami kenaikan tipis pada tahun 2024 menjadi 6,36%, sebelum kembali menurun pada tahun 2025. Di sisi lain, Provinsi Riau menunjukkan tren penurunan yang lebih stabil dari 7,12% pada tahun 2021 menjadi 6,16% pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami kecenderungan stagnasi pada periode 2023–2024. Fluktuasi yang terjadi, terutama di Kabupaten Bengkalis, mengindikasikan adanya pengaruh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, inflasi, serta ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi.

Secara lebih mendalam, meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis relatif lebih rendah, upaya untuk mempertahankan tren penurunan tersebut tetap menghadapi tantangan. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas program perlindungan sosial, ketersediaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh

karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan inklusif agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan serta mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalkan secara optimal

H. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

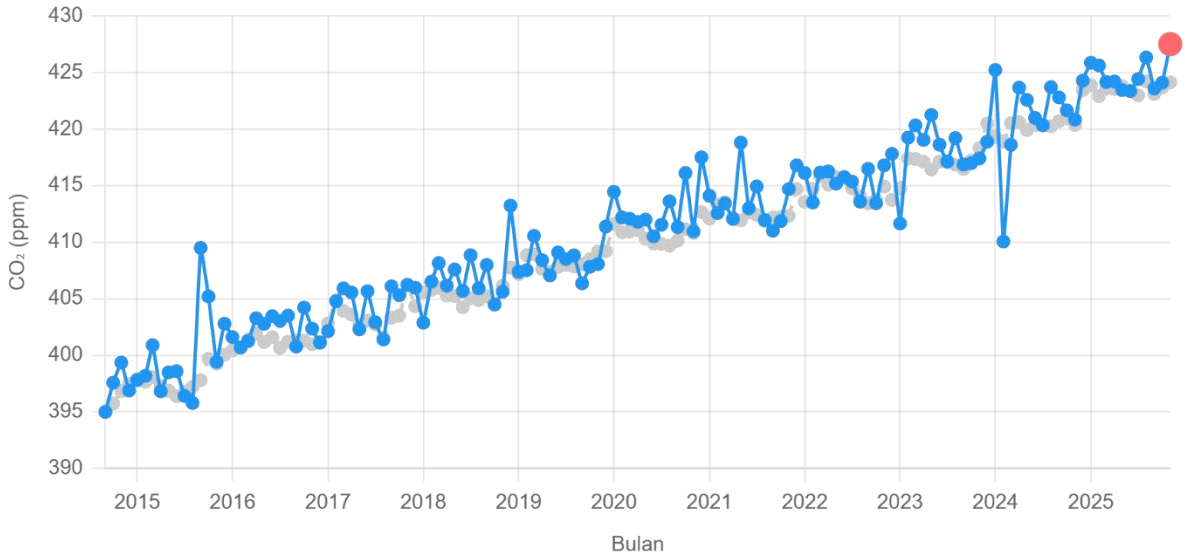
Penurunan intensitas emisi GRK Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 tercatat sebesar 16,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian emisi gas rumah kaca telah mulai memberikan hasil dalam menurunkan intensitas emisi, yang pada dasarnya mencerminkan adanya perbaikan kinerja pembangunan yang lebih efisien dan lebih terkendali terhadap tekanan emisi. Dalam konteks dokumen perencanaan, nilai tersebut dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta langkah-langkah mitigasi perubahan iklim telah bergerak ke arah yang positif. Meskipun demikian, capaian ini tetap perlu diperkuat melalui konsistensi pelaksanaan program mitigasi, peningkatan integrasi kebijakan lintas sektor, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi agar penurunan intensitas emisi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel III-1 Penurunan Intensitas emisi GRK (%) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Keterangan	Nilai
Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	16,67

Sumber: DLHK Kabupaten Bengkalis, 2026

Sementara itu, tren konsentrasi gas rumah kaca CO_2 di Kabupaten Bengkalis selama periode 2014 sampai dengan November 2025 cenderung mengalami peningkatan, dengan nilai CO_2 pada November 2025 mencapai 427,55 ppm. Kondisi ini menegaskan bahwa tekanan emisi dan akumulasi konsentrasi karbon di atmosfer masih menjadi tantangan yang perlu direspons secara lebih serius. Dengan demikian, meskipun intensitas emisi telah menunjukkan penurunan, tren kenaikan konsentrasi CO_2 mengindikasikan bahwa upaya mitigasi masih perlu diperluas dan diperdalam, baik melalui pengurangan sumber emisi, penguatan pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pembakaran lahan, peningkatan tutupan vegetasi, maupun pengembangan kebijakan pembangunan rendah karbon. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada penguatan program mitigasi perubahan iklim yang lebih terukur, terpadu, dan berkelanjutan agar pengendalian emisi tidak hanya tercermin dalam indikator intensitas, tetapi juga mampu menahan laju peningkatan konsentrasi CO_2 secara bertahap.



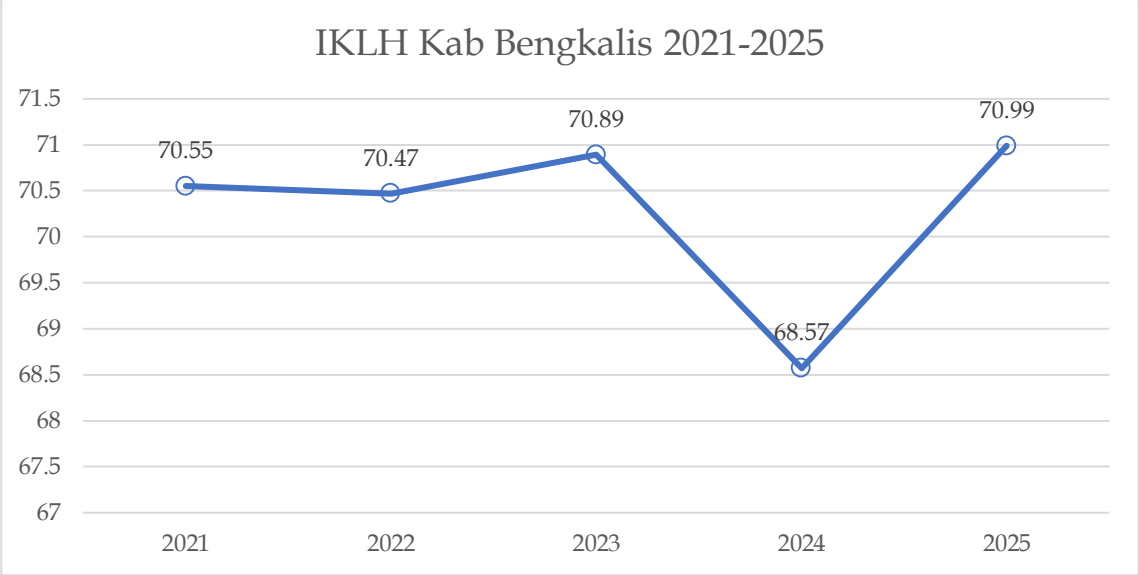
Sumber: BMKG, 2026

Gambar III-8 Tren Konsentrasi Gas Rumah Kaca CO_2 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014– November 2025

I. Indek Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan secara menyeluruh di suatu wilayah. Indikator ini mencakup berbagai aspek penting seperti kualitas udara, kualitas air, serta tutupan lahan, sehingga mampu merepresentasikan secara komprehensif daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap aktivitas pembangunan. Dalam perspektif pembangunan daerah, IKLH berperan strategis sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Kabupaten Bengkalis, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar, dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kegiatan pada sektor perkebunan, industri, serta risiko kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor yang dapat memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan. Oleh karena itu perkembangan IKLH Kabupaten Bengkalis menjadi penting untuk melihat dinamika kondisi lingkungan dari waktu ke waktu, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2025 sebagai berikut:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2026

Gambar III-9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar di atas , Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bengkalis periode 2021–2025, terlihat bahwa kondisi kualitas lingkungan secara umum berada pada level yang relatif baik, meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, IKLH tercatat sebesar 70,55 dan sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 70,47. Selanjutnya, terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 70,89 yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 68,57, sebelum kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 70,99. Pola ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Bengkalis tidak sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor dinamis.

Dari sisi tren, fluktuasi IKLH tersebut mengindikasikan adanya tekanan terhadap lingkungan, terutama pada periode 2023–2024 ketika terjadi penurunan yang cukup tajam. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai kemungkinan, seperti peningkatan aktivitas ekonomi, alih fungsi lahan, kebakaran hutan dan lahan, atau penurunan kualitas udara dan air. Sementara itu, kenaikan kembali pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya perbaikan atau intervensi kebijakan yang mulai memberikan dampak positif. Hal ini menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis cukup responsif terhadap perubahan kebijakan maupun aktivitas pembangunan.

Secara substantif, meskipun nilai IKLH Kabupaten Bengkalis masih berada pada kategori cukup baik, tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan tetap signifikan. Fluktuasi yang terjadi menegaskan pentingnya pengelolaan lingkungan yang konsisten dan terintegrasi, terutama dalam mengendalikan dampak aktivitas ekonomi terhadap ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan

pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis dapat terus ditingkatkan secara stabil seiring dengan pembangunan ekonomi yang berlangsung.

3.1.2.2 Target Ekonomi Makro Tahun 2027

Perekonomian Kabupaten Bengkalis pada periode 2027–2028 diperkirakan masih berada dalam fase transisi struktural, yaitu dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan berkelanjutan. Selama ini, struktur ekonomi Bengkalis ditopang secara dominan oleh sektor pertambangan dan migas, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus memperkuat ketahanan struktur ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global, penurunan alami cadangan minyak atau natural decline, kondisi geopolitik yang belum sepenuhnya stabil, ketidakpastian ekonomi global, serta potensi pelemahan nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2027 disusun secara moderat sebagai bentuk kehati-hatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada saat yang sama, aktivitas drilling sumur migas baru oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Blok Rokan menjadi salah satu faktor pendorong yang dapat menjaga kinerja sektor migas dalam jangka menengah. Kondisi tersebut akan terus menjadi bagian dari perhatian kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2027 dan 2028.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang relatif rendah dan bahkan sempat mengalami perlambatan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah masih perlu terus diperkuat melalui penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru di luar sektor migas. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus berupaya memperluas basis pertumbuhan ekonomi daerah agar lebih inklusif, produktif, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini juga berkaitan dengan karakter sektor migas yang cenderung padat modal, sehingga serapan tenaga kerja langsung relatif terbatas dibandingkan dengan besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi daerah akan terus diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja lebih luas, termasuk pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa, dan UMKM.

Tantangan lainnya terletak pada masih terbatasnya diversifikasi ekonomi. Sektor-sektor potensial seperti industri pengolahan, pertanian berbasis agroindustri, serta sektor jasa belum berkembang secara optimal. Untuk itu, Pemerintah Daerah akan terus mendorong penguatan produksi lokal, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, serta

pengembangan hilirisasi secara bertahap agar struktur ekonomi Bengkalis menjadi lebih beragam dan berdaya tahan.

Dari aspek makro, tekanan inflasi dan fluktuasi daya beli masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pelemahan nilai tukar rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya barang impor, bahan baku, barang modal, serta komponen pendukung kegiatan produksi, sehingga dapat memberikan tekanan tambahan terhadap harga, investasi, dan daya beli masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah, menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, serta mendorong penguatan sektor produksi lokal sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern turut menjadi perhatian dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang lebih produktif dan berbasis teknologi. Hal ini juga dipengaruhi oleh angka rata-rata lama sekolah yang belum sepenuhnya mencapai target wajib belajar, sehingga peningkatan sarana sekolah, program beasiswa, jaminan kesehatan daerah, serta layanan kesehatan gratis bagi kelompok bawah perlu terus diperkuat sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial.

Selain itu, dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik, ketidakpastian global, dan kecenderungan pelemahan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2027 lebih tepat diproyeksikan secara moderat. Dengan asumsi stabilitas harga komoditas global tetap terjaga secara relatif dan kondisi makroekonomi tidak mengalami tekanan yang berlebihan, Kabupaten Bengkalis masih mempunyai peluang potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Peluang tersebut juga didukung oleh keberlanjutan aktivitas sektor migas, peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan, serta penguatan program pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari agenda pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka makro, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Salah satu peluang utama terletak pada pengembangan hilirisasi sektor unggulan daerah. Komoditas seperti kelapa sawit, migas, dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui industri pengolahan. Ke depan, Pemerintah Daerah akan terus mendorong pengembangan hilirisasi secara selektif dan terukur, terutama pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat, peningkatan nilai tambah daerah, dan perluasan kesempatan kerja.

Selain itu, posisi geografis Kabupaten Bengkalis yang strategis di jalur perdagangan internasional, khususnya di kawasan Selat Malaka, memberikan keunggulan kompetitif

dalam pengembangan sektor perdagangan dan logistik. Potensi ini dapat dimanfaatkan melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan, kawasan industri, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, Kabupaten Bengkalis berpeluang untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Riau. Namun, pemanfaatan keunggulan geografis tersebut tetap perlu memperhatikan kerentanan wilayah terhadap bencana alam, terutama banjir dan abrasi, karena dapat berdampak pada kerusakan aset, gangguan konektivitas, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemulihan infrastruktur. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap risiko bencana, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memastikan bahwa pengembangan kawasan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan wilayah pesisir.

Di sisi lain, tren global menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan membuka peluang bagi Bengkalis untuk mengembangkan sektor-sektor ramah lingkungan, seperti bioenergi berbasis kelapa sawit dan perikanan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Arah pembangunan tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan kerentanan sosial dan wilayah pesisir. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan terus mendorong penguatan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah yang selaras dengan kebutuhan peningkatan daya saing, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2027–2028 berada pada fase penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah ke depan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas melalui penguatan diversifikasi ekonomi, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Faktor pendorong berupa aktivitas drilling sumur migas baru, peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan, pelatihan kerja, dukungan konstruksi, beasiswa, layanan kesehatan gratis, peningkatan sarana pendidikan, dan jaminan kesehatan daerah perlu dioptimalkan. Sementara itu, faktor penghambat berupa natural decline migas, kerentanan banjir dan abrasi, keterbatasan serapan tenaga kerja sektor migas, kesenjangan upah, serta rata-rata lama sekolah yang belum mencapai target wajib belajar perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Selain faktor-faktor tersebut, kondisi geopolitik, ketidakpastian global, dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi dasar penting mengapa proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2027 disusun dalam skenario moderat dan berprinsip kehati-hatian. Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat

menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi di atas, maka diproyeksikan perekonomian Kabupaten Bengkalis tahun 2027 adalah seperti tabel berikut:

Tabel III-2 Proyeksi Perkenomian Kabupaten Bengkalis 2027

No	Uraian	Satuan	Proyeksi 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,49 - 3,06
2	PDRB Perkapita	Rp Juta/tahun	309,15 - 313,44
3	Kontrbusi PDRB Bengkalis Terhadap PDRB Riau	Persen	13,99 - 13,87
4	Tingkat Penganguran Terbuka	Persen	4,80 - 5,32
5	Indeks Gini Rasio	Poin	0,226 - 0,231
6	Angka Kemiskinan	Persen	4,75 - 5,43
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	78,06 - 78,32
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	20,37
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,92

Sumber: e-walidata SIPD dan BPS, 2026

3.1.3 Pokok-Pokok Kebijakan

Pokok-pokok kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 merupakan pedoman dalam mengarahkan alokasi sumber daya fiskal agar selaras dengan tema pembangunan, prioritas daerah, serta sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Riau. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan prinsip disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil (*result-based budgeting*), dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang semakin dinamis.

Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 serta arah kebijakan fiskal daerah, pokok-pokok kebijakan penyusunan anggaran diarahkan pada hal-hal sebagai berikut.

1. Penguatan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penguatan kinerja Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil. Alokasi anggaran diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghasilkan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Prioritas Pendanaan terhadap Program Strategis Daerah

Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, antara lain peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan sektor unggulan daerah, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing daerah.

4. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Riau, dan Kabupaten Bengkalis

Penyusunan APBD Tahun 2027 diarahkan agar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau, serta kebijakan strategis nasional. Dukungan anggaran difokuskan pada pencapaian target nasional dan daerah, antara lain pengendalian inflasi, percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pengembangan investasi, reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Penguatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah

Belanja operasional diarahkan secara lebih efisien melalui pengendalian belanja yang bersifat administratif dan kurang produktif, sementara belanja pembangunan diprioritaskan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

6. Penguatan Ketahanan Fiskal Daerah

Pengelolaan APBD dilakukan secara hati-hati dengan menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal, memperluas ruang fiskal pembangunan, mengendalikan risiko fiskal, serta menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah dalam jangka menengah.

7. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penganggaran diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.

8. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Disparitas Wilayah

Alokasi anggaran diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan perdesaan, kawasan pesisir dan pulau-pulau, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten Bengkalis.

Dengan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan tersebut, penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah, menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun Provinsi Riau

3.2 Realisasi Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023–2025 memberikan gambaran mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi terhadap realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode tersebut menjadi dasar untuk menilai kapasitas fiskal, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun proyeksi keuangan daerah, merumuskan arah kebijakan fiskal, dan menetapkan kebijakan penganggaran pada tahun perencanaan agar lebih realistis, efektif, dan berkelanjutan.

3.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023–2025 memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan realisasi pendapatan tersebut mencerminkan kapasitas fiskal daerah sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan pendapatan serta mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023–2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III-3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 – 2025

NO	Jenis Penerimaan	Realisasi		
		2023	2024	2025
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**614,588,429,804.39**	**411.660.000.319,72**	**498.053.424.260,07**
1,1	Pajak Daerah	106,094,877,800.42	137.776.016.047,00	246.967.785.504,93
1,2	Retribusi Daerah	14,326,950,569.00	183.186.875.940,00	189.023.117.028,00
1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	316,861,797,346.00	73.977.162.709,00	27.456.226.430,00
1,4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	177,304,804,088.97	16.719.945.623,72	34.606.295.297,14
2	**Pendapatan Transfer**	**3,407,347,653,865.00**	**3.121.844.220.933,00**	**3.382.108.262.102,00**
2.1	Transfer Dana Pusat	3,211,081,404,574.00	2.992.830.949.381,00	3.282.500.912.288,00
2.2	Transfer Antar Daerah	196,266,249,291.00	129.013.271.552,00	99.607.349.814,00
3	**Lain-lain Pendapatan daerah yang sah**			
	Jumlah	**4,021,936,083,669.39**	**3.533.504.221.252,72**	**3.880.161.686.362,07**

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2026

Merujuk pada Tabel diatas realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023–2025, menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah mengalami fluktuasi. Total pendapatan daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4,022 triliun, kemudian menurun menjadi Rp3,534 triliun pada tahun 2024 atau turun sekitar 12,14%. Pada tahun 2025, pendapatan daerah kembali meningkat menjadi Rp3,880 triliun atau tumbuh sekitar 9,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan tren pemulihan, realisasi pendapatan tahun 2025 masih lebih rendah sekitar 3,52% dibandingkan capaian tahun 2023, sehingga kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya kembali pada kondisi sebelum penurunan yang terjadi pada tahun 2024.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Realisasi PAD meningkat dari Rp411,66 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp498,05 miliar pada tahun 2025 atau naik sekitar 20,99%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan penerimaan Pajak Daerah yang meningkat dari Rp137,78 miliar menjadi Rp246,97 miliar atau tumbuh sekitar 79,25%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai berlaku pada tahun 2025 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan tersebut, penerimaan PKB dan BBNKB yang sebelumnya diterima pemerintah kabupaten melalui mekanisme bagi hasil dari pemerintah provinsi beralih menjadi penerimaan pajak daerah dalam bentuk opsen, sehingga memberikan tambahan penerimaan yang signifikan terhadap kelompok Pajak Daerah.

Selain pajak daerah, Retribusi Daerah juga memberikan kontribusi yang cukup stabil terhadap peningkatan PAD. Setelah mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp183,19 miliar, realisasinya kembali meningkat menjadi Rp189,02 miliar pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 3,19%. Namun demikian, peningkatan PAD tersebut belum mampu mengimbangi penurunan pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang terus mengalami penurunan dari Rp316,86 miliar pada tahun 2023 menjadi hanya Rp27,46 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi dividen maupun hasil penyertaan modal pemerintah daerah masih belum optimal sehingga memerlukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan investasi daerah.

Pada sisi lain, kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mulai menunjukkan perbaikan. Setelah mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2024 menjadi Rp16,72 miliar, realisasinya meningkat menjadi Rp34,61 miliar pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 106,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, kontribusi kelompok pendapatan ini masih jauh di bawah capaian tahun 2023, sehingga masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi Pendapatan Transfer, penerimaan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Realisasi pendapatan transfer meningkat dari Rp3,122 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp3,382 triliun pada tahun 2025 atau naik sekitar 8,34%, yang terutama berasal dari peningkatan Transfer Dana Pusat. Sebaliknya, Transfer Antar Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari Rp196,27 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp129,01 miliar pada tahun 2024 dan kembali turun menjadi Rp99,61 miliar pada tahun 2025. Penurunan tersebut bukan semata-mata mencerminkan berkurangnya kemampuan fiskal daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengelolaan PKB dan BBNKB. Sejak tahun 2025, penerimaan yang sebelumnya disalurkan kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme bagi hasil pajak provinsi tidak lagi dicatat sebagai Transfer Antar Daerah, melainkan dipungut secara langsung sebagai opsen PKB dan opsen BBNKB yang masuk ke kelompok Pajak Daerah. Dengan demikian, penurunan Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 secara substansial diimbangi oleh meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, sehingga perubahan tersebut lebih merupakan pergeseran klasifikasi sumber pendapatan daripada penurunan kapasitas fiskal daerah secara riil.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Bengkalis masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Pada tahun 2025, Pendapatan Transfer masih memberikan kontribusi sekitar 87,16% terhadap total pendapatan daerah, sedangkan PAD berkontribusi sekitar 12,84%. Meskipun kontribusi PAD menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2023–2025 masih mengalami kontraksi sebesar 1,17%, dengan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar -6,02%. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah mencapai 54,56%, sedangkan Transfer Antar Daerah mengalami rata-rata penurunan sebesar 28,53% sebagai konsekuensi perubahan mekanisme pengelolaan PKB dan BBNKB melalui skema opsen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal daerah mulai berjalan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah, namun tetap perlu diimbangi dengan optimalisasi retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, pengelolaan aset yang lebih produktif, serta diversifikasi sumber-sumber PAD agar struktur pendapatan daerah menjadi lebih sehat, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

3.2.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mewujudkan prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan penganggaran berbasis kinerja sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap realisasi belanja daerah menjadi penting untuk menilai tingkat penyerapan anggaran, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan APBD. Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten

Bengkalis selama periode 2023–2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pengeluaran daerah, komposisi belanja, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel III-4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Sumber Pengeluaran Tahun 2023-2025

NO	JENIS BELANJA	REALISASI		
		2023	2024	2025
I	**BELANJA DAN TRANSFER**	**4,227,671,123,678.05**	**3,615,947,720,604.17**	**3.878.672.936.327,55**
1.2	**BELANJA DAERAH**	**3,620,557,410,448.05**	**3,114,623,237,821.17**	**3,370,707,865,484.55**
1.2.1	**BELANJA OPERASI**	**2,652,305,698,094.02**	**2,652,305,698,094.02**	**2.744.468.935.270,08**
1.2.1.1	Belanja Pegawai	1,273,396,081,405.00	1,273,396,081,405.00	1.334.563.158.279,00
1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,234,871,516,209.16	1,234,871,516,209.16	1.291.466.024.233,95
1.2.1.3	Belanja Subsidi	21,920,833,286.00	21,920,833,286.00	93.670.659.557,13
1.2.1.4	Belanja Hibah	100,381,666,143.86	100,381,666,143.86	24.769.093.200,00
1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21,735,601,050.00	21,735,601,050.00	
1.2.2	**BELANJA MODAL**	**891,490,372,209.00**	**461,578,403,627.15**	**626.238.930.214,47**
1.2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	129,460,420,955.00	85,347,971,046.00	136.202.213.487,00
1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	133,063,665,969.00	71,466,581,186.51	78.627.669.390,29
1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	618,021,154,762.00	283,810,720,565.64	384.712.707.454,18
1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10,896,502,523.00	20,779,718,829.00	25.955.838.947,00
1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	48,628,000.00	173,412,000.00	740.500.936,00
1.2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**13,022,550.00**	**739,136,100.00**	**0.00**
1.2.3.1	Belanja Tak Terduga	13,022,550.00	739,136,100.00	0.00
1.3	**TRANSFER**	**607,113,713,230.00**	**501,324,482,783.00**	**507.965.070.843,00**
1.3.1	**Transfer Bagi Hasil ke Desa**	12,818,526,500.00	0.00	41.489.070.335,00
1.3.1.1	Bagi Hasil Pajak dan Retrbusi	12,818,526,500.00	0.00	41.489.070.335,00
1.3.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
1.3.3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	594,295,186,730.00	501,324,482,783.00	466.476.000.508,00
1.3.4	Transfer Bantuan Keuangan lainnya		0.00	

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2026

Merujuk pada data tabel di atas terlihat bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023–2025, mengalami dinamika yang sejalan dengan perkembangan kapasitas fiskal daerah. Total Belanja dan Transfer pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4,228 triliun, kemudian menurun menjadi Rp3,616 triliun pada tahun 2024 atau turun sekitar 14,47%. Pada tahun 2025, realisasi kembali meningkat menjadi Rp3,879 triliun atau tumbuh sekitar 7,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami perbaikan, realisasi belanja tahun 2025 masih lebih rendah sekitar 8,26% dibandingkan tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah masih dipengaruhi oleh penyesuaian kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Daerah sebagai komponen utama pengeluaran pemerintah menunjukkan pola yang relatif sama. Belanja daerah menurun dari Rp3,621 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp3,115 triliun pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi Rp3,371 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 8,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi yang pada tahun 2025 mencapai Rp2,744 triliun atau sekitar 81,42% dari total belanja daerah. Dominannya belanja operasi menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran daerah masih diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari, khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Komponen Belanja Pegawai meningkat dari Rp1,273 triliun menjadi Rp1,335 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 4,80%, sedangkan Belanja Barang dan Jasa meningkat dari Rp1,235 triliun menjadi Rp1,291 triliun atau naik sekitar 4,58%. Peningkatan kedua komponen tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan operasional perangkat daerah serta meningkatnya aktivitas pelayanan publik. Sementara itu, Belanja Subsidi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp21,92 miliar menjadi Rp93,67 miliar, sedangkan Belanja Hibah justru mengalami penurunan tajam menjadi Rp24,77 miliar. Penurunan belanja hibah mengindikasikan adanya kebijakan refocusing atau penyesuaian prioritas belanja menuju program-program yang lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pada kelompok Belanja Modal, realisasi meningkat dari Rp461,58 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp626,24 miliar pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 35,68%, meskipun masih berada di bawah realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp891,49 miliar. Peningkatan belanja modal terutama didorong oleh bertambahnya alokasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang meningkat menjadi Rp384,71 miliar, serta Belanja Peralatan dan Mesin yang mencapai Rp136,20 miliar. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk kembali memperkuat pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pendukung pelayanan publik setelah mengalami penurunan belanja modal pada tahun sebelumnya. Namun demikian, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah pada tahun 2025 baru mencapai sekitar 18,58%, sehingga masih diperlukan peningkatan ruang fiskal untuk mendukung investasi pembangunan yang lebih produktif.

Realisasi Transfer mengalami penurunan dari Rp607,11 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp501,32 miliar pada tahun 2024, kemudian meningkat tipis menjadi Rp507,97 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kembali dialokasikannya Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebesar Rp41,49 miliar, sementara Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa menurun menjadi Rp466,48 miliar. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian komposisi transfer kepada pemerintah desa sejalan dengan implementasi mekanisme pembagian penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kebutuhan pendanaan pembangunan di tingkat desa.

Secara keseluruhan, struktur belanja Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai lebih dari 80% dari total belanja daerah, sedangkan Belanja Modal masih berada di bawah 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk belanja pembangunan masih relatif terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan. Meskipun demikian, peningkatan belanja modal pada tahun 2025 merupakan sinyal positif bahwa pemerintah daerah mulai memperkuat kembali investasi pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar dan sarana pelayanan publik. Ke depan, kebijakan belanja daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (*quality of spending*) melalui pengendalian belanja operasional yang lebih efisien, peningkatan proporsi belanja modal yang produktif, serta penguatan belanja yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berbeda dengan pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan tidak mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, melainkan transaksi keuangan yang memengaruhi posisi kas dan kapasitas fiskal daerah. Pengelolaan pembiayaan daerah dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal, keberlanjutan keuangan daerah, serta efektivitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu, analisis terhadap realisasi pembiayaan daerah diperlukan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan APBD, mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), memenuhi kewajiban pembiayaan, serta memperkuat ruang fiskal guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Bengkalis selama periode 2023–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-5 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2025

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI		
		2023	2024	2025
1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**293,406,324,261.33**	**87.854.841.328,67**	**5.472.478.346,22**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	293,268,675,966.33	87.671.284.252,67	5.411.341.977,22
1.2	Pencairan Dana Cadangan			
1,3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang disahkan			
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	137,648,295.00	183.557.076,00	61.136.369,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya			
2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**			
2.1	Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo			
2.2	Penyertaan Modal			
2.3	Pemberian Pinjaman Daerah			
2,4	Pembentukan Dana Cadangan			
2.5	Pemberian Pinjaman Daerah			
2.6	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			
2.7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			
3	**Pembiayaan Neto**	**293,406,324,261.33**	**87.854.841.328,67**	**5.472.478.346,22**

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2026

Berdasarkan tabel di atas realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023–2025, menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah menurun dari Rp293,41 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp87,85 miliar pada tahun 2024 atau turun sekitar 70,06%, kemudian kembali menurun menjadi Rp5,47 miliar pada tahun 2025 atau turun sekitar 93,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sebagai komponen utama penerimaan pembiayaan, dari Rp293,27 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp87,67 miliar pada tahun 2024 dan hanya Rp5,41 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan semakin kecilnya sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan APBD pada tahun anggaran berikutnya.

Selama periode 2023–2025, Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak merealisasikan pencairan dana cadangan, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, maupun pembayaran pokok utang, sehingga Pembiayaan Neto sepenuhnya berasal dari penerimaan pembiayaan dan memiliki nilai yang sama dengan penerimaan pembiayaan daerah. Penurunan SiLPA di satu sisi mencerminkan semakin optimalnya penyerapan anggaran dan meningkatnya keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, namun di sisi lain mengurangi

fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, keberlanjutan fiskal daerah ke depan perlu semakin ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah, optimalisasi pendapatan transfer, serta pengelolaan belanja yang lebih efektif dan efisien sehingga pembiayaan daerah tidak lagi bergantung pada ketersediaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

3.3 Proyeksi Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 2027

Berdasarkan arah kebijakan fiskal daerah pada sisi pendapatan, proyeksi pendapatan Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional, potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah, serta tren realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi ini menjadi dasar dalam menentukan kapasitas fiskal daerah yang akan mendukung pembiayaan program dan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Secara rinci, proyeksi pendapatan daerah menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan Tahun 2027 sebagaimana arah kebijakan pendapatan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III-6 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

No.	JENIS PENDAPATAN	PROYEKSI PENDAPATAN 2027
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**527.205.007.207,00**
1.1	Pajak Daerah	273.008.000.000,00
1.2	Retribusi Daerah	184.164.263.810,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	39.956.226.430,00
1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	30.076.516.967,00
2	**Pendapatan Transfer**	**2.719.968.364.100,93**
2.1	Transfer Dana Pusat	2.565.864.143.600,00
2.2	Transfer Antar Daerah	154.104.220.500,93
3	**Lain-lain Pendapatan daerah yang sah**	**0,0**
3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,0
	Jumlah	**3.247.173.371.307,93**

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2026 (diolah)

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3.247.173.371.307,93, yang mencerminkan struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antardaerah. Pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2.719.968.364.100,93 atau sekitar 83,77% dari total pendapatan daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp527.205.007.207,00 atau sekitar 16,23%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas

fiskal Kabupaten Bengkalis masih sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat, sehingga setiap perubahan kebijakan transfer berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Dari sisi PAD, sumber penerimaan terbesar berasal dari Pajak Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp273.008.000.000,00 atau sekitar 51,78% dari total PAD. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari Retribusi Daerah sebesar Rp184.164.263.810,00 atau sekitar 34,93%, diikuti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp39.956.226.430,00 (7,58%) dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp30.076.516.967,00 (5,71%). Struktur tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi PAD masih bertumpu pada penerimaan perpajakan daerah dan retribusi, sehingga diperlukan penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan pemungutan, digitalisasi sistem pembayaran, serta optimalisasi pengelolaan aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar sumber-sumber PAD menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, pendapatan transfer terdiri atas Transfer Dana Pusat sebesar Rp2.565.864.143.600,00 atau sekitar 94,33% dari total pendapatan transfer, sedangkan Transfer Antar Daerah diproyeksikan sebesar Rp154.104.220.500,93 atau sekitar 5,67%. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak memproyeksikan adanya penerimaan dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sehingga struktur pendapatan Tahun 2027 hanya mengandalkan dua sumber utama, yaitu PAD dan pendapatan transfer. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi peningkatan kemandirian fiskal melalui perluasan basis pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dalam jangka menengah dan panjang.

3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis 2027

Proyeksi belanja daerah Tahun 2027 disusun berdasarkan arah kebijakan fiskal daerah pada sisi belanja dengan mengacu pada kemampuan keuangan daerah yang tercermin dalam proyeksi pendapatan serta memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah. Penyusunan proyeksi belanja dilakukan secara cermat untuk menjaga keseimbangan fiskal, mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta memastikan pemenuhan belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, alokasi belanja diarahkan pada pendanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara rinci proyeksi belanja daerah Tahun 2027 berdasarkan kelompok dan jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-7 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

No.	JENIS BELANJA	PROYEKSI BELANJA 2027
I	**BELANJA DAN TRANSFER**	**3.260.173.371.307,93**
1.2	**BELANJA DAERAH**	**2,850,390,877,533.20**
1.2.1	**BELANJA OPERASI**	**2,602,774,215,693.01**
1.2.1.1	Belanja Pegawai	1,476,332,550,198.67
1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,068,697,419,574.45
1.2.1.3	Belanja Subsidi	57,475,116,999.94
1.2.1.4	Belanja Hibah	269,128,919.95
1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	
1.2.2	**BELANJA MODAL**	**242,751,647,199.03**
1.2.2.1	Belanja Tanah	112,606,242.66
1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	44,602,069,157.11
1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	65,494,257,503.92
1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	132,535,859,759.67
1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	
1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	6,854,535.67
1.2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**4,865,014,641.16**
1.2.3.1	Belanja Tak Terduga	4,865,014,641.16
1.3	**TRANSFER**	**409,782,493,774.73**
1.3.1	Transfer Bagi Hasil ke Desa	19,853,319,691.22
1.3.1.1	Bagi Hasil Pajak dan Retrbusi	19,853,319,691.22
1.3.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
1.3.3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	389,929,174,083.52
1.3.4	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	**00.0**

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2026 (diolah)

Proyeksi belanja dan transfer Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3.260.173.371.307,93, yang terdiri atas belanja daerah sebesar Rp2.850.390.877.533,20 atau sekitar 87,43 persen dan belanja transfer sebesar Rp409.782.493.774,73 atau sekitar 12,57 persen dari total belanja dan transfer. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran Tahun 2027 masih diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kewajiban transfer kepada pemerintah desa. Dari sisi belanja daerah, belanja operasi masih mendominasi dengan alokasi sebesar Rp2.602.774.215.693,01 atau sekitar 91,31 persen dari total belanja daerah. Komponen terbesar belanja operasi adalah belanja pegawai sebesar Rp1.476.332.550.198,67 (51,79 persen dari belanja daerah), diikuti belanja barang dan jasa sebesar Rp1.068.697.419.574,45 (37,49 persen), belanja subsidi sebesar Rp57.475.116.999,94 (2,02 persen), serta belanja hibah sebesar Rp269.128.919,95. Komposisi ini mencerminkan

bahwa sebagian besar kapasitas fiskal masih digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik.

Di sisi lain, belanja modal diproyeksikan sebesar Rp242.751.647.199,03 atau sekitar 8,52 persen dari total belanja daerah, yang difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Alokasi terbesar berada pada belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp132.535.859.759,67, diikuti belanja gedung dan bangunan sebesar Rp65.494.257.503,92 serta belanja peralatan dan mesin sebesar Rp44.602.069.157,11, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas wilayah, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan infrastruktur dasar. Sementara itu, belanja tak terduga dialokasikan sebesar Rp4.865.014.641,16 sebagai ruang fiskal untuk mengantisipasi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Adapun belanja transfer sebesar Rp409.782.493.774,73 didominasi oleh bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp389.929.174.083,52 dan bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa sebesar Rp19.853.319.691,22, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat kapasitas fiskal desa, mendukung pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis 2027

Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memastikan terpenuhinya kebutuhan pendanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, kebijakan pembiayaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent fiscal management) agar struktur APBD tetap sehat dan berkelanjutan. Secara rinci proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-8 Proyeksi Pembiyaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

No.	JENIS PEMBIAYAAN	PROYEKSI PEMBIAYAAN 2027
I	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**13.000.000.000,00**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.000.000.000,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang disahkan	0.00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000.000,00
1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0.00
II	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**0.00**
2.1	Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo	0.00

No.	JENIS PEMBIAYAAN	PROYEKSI PEMBIAYAAN 2027
2.2	Penyertaan Modal	0.00
2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
2.4	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
2.6	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0.00
2.7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0.00
III	**Pembiayaan Neto**	**13.000.000.000,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2026 (diolah)

Berdasarkan hasil proyeksi keuangan daerah Tahun 2027, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp13.000.000.000,00, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.12.000.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000. Penerimaan pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran yang timbul dari selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah, sehingga keseimbangan APBD tetap dapat terjaga. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tidak diproyeksikan pada Tahun 2027 karena belum terdapat kebutuhan untuk penyertaan modal, pembayaran pokok utang, maupun bentuk pengeluaran pembiayaan lainnya. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan Tahun 2027 berfungsi sebagai instrumen penyeimbang anggaran melalui pemanfaatan SiLPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman secara optimal tanpa menambah beban fiskal daerah pada tahun berjalan.

3.4 Pendanaan Non APBD

Keterbatasan kapasitas fiskal daerah sebagai dampak dari dinamika penerimaan daerah, perubahan kebijakan transfer ke daerah, serta meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan menuntut Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi pendanaan non-APBD menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya terhadap program-program yang membutuhkan investasi besar, bersifat lintas sektor, dan memiliki manfaat ekonomi maupun sosial yang luas.

Pendanaan non-APBD merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar APBD, baik yang bersumber dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, maupun lembaga lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan ini diarahkan untuk memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan tanpa meningkatkan beban fiskal daerah, sekaligus mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan non-APBD, antara lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Tugas Pembantuan, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD Provinsi), pendanaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi swasta, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR), hibah pemerintah maupun lembaga donor, serta bentuk pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi pendanaan non-APBD dilakukan melalui penguatan sinergi perencanaan pusat dan daerah, peningkatan kualitas usulan program kepada kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Riau, pengembangan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendorong agar pelaksanaan program TJSL/CSR perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.

Melalui optimalisasi berbagai sumber pendanaan non-APBD tersebut, diharapkan kapasitas pembiayaan pembangunan Kabupaten Bengkalis semakin meningkat, sehingga berbagai prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana secara lebih optimal. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sasaran pembangunan nasional, serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 Kabupaten Bengkalis mengacu pada sasaran pembangunan penggalan kedua dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2027 Kabupaten Bengkalis juga disusun berdasarkan telaah terhadap: hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026; Capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 untuk tahun 2026; Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional yang bersumber kepada Rancangan Kerja Pembangunan Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2027; dan Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2027.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dalam RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ini, perlu mempedomani dan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, provinsi Riau, dan Kabupaten Bengkalis sendiri agar arah pembangunan dapat dilakukan secara sinergi antar jenjang pemerintahan. Keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi Riau dijelaskan berikut ini.

4.1 Tujuan dan Sasaran RKPD

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan ketiga dalam RPJMN 2025-2029 yang menjadi tahap pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 tema pembangunan adalah. "***Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri***.".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan Indikasi Sasaran Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ; 5,80 – 6,50
- Pendapatan Per Kapita ; 5.800–5.840 (GNI per Kapita, US$ (juta)
- Tingkat Kemiskinan ; 6,00 – 6,50
- Tingkat Pengangguran Terbuka ; 4,30–4,87
- Rasio Gini ; 0,362–0,367
- Indeks Modal Manusia (IMM) ; 0,575
- Penurunan Intensitas emisi GRK (%) ; 39,57
- IKLH ; 76,84

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2027

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki link and match dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2027 adalah ***Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif***.

Dengan indikator capaian yang hendak dicapai sebagai berikut;

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ; 4,92 – 5,31
- Tingkat Kemiskinan ; 6,00-6,50
- Tingkat Pengangguran Terbuka ; 4,80-5,34
- Rasio Gini ; 0,178-0,247

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ; 76,66-76,98

Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Riau 2027

Infrastruktur :	Peningkatan Aksesibilitas (Jalan dan Jembatan) dan Infrastruktur Dasar (Air Minum, Sanitasi, Kawasan Kumuh, Listrik)
Pengembangan Kapasitas SDM :	Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan (Pengangguran dan Kemiskinan)
Ekonomi Inklusif :	Pertanian, Pengembangan Kawasan Industri, Hilirisasi Produk Unggulan, Pengembangan UMKM dan Koperasi
Tata Kelola Pemerintahan :	Peningkatan Kapasitas ASN Implementasi Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif
Lingkungan Hidup Berkelanjutan :	Pembangunan Rendah Karbon (Penurunan Intensitas GRK) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2027 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2027 maka hal ini mengacu pada visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029, yang juga berpedoman pada visi RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Bengkalis, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis dan juga memperhatikan visi RPJMN 2025-2045.

RKPD Kabupaten Bengkalis juga merupakan kristalisasi dari komitmen pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah seperti termuat di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029, yaitu:

"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju , dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia"

Agar pencapaian Visi Pembangunan 2025-2029 dapat dilaksanakan dengan baik, maka ditetapkanlah sejumlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian tersebut. Dimana keterhubungan misi, tujuan dan sasaran dapat dijelaskan pada Tabel IV-1. berikut ini.

Tabel IV-1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA			
1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.	1.1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	1.1.1. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatnnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri
			Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan
		1.1.2. Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan Berkelanjutan	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko
		1.1.3. Terwujudnya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
			Meningkatnya daya saing UMKM
		1.1.4. Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
		1.1.5. Terwujudnya Petani yang Sejahtera	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian
			Meningkatnya distribusi dan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
			kualitas prasarana perkebunan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya
		1.1.6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan
		1.1.7. Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
		1.1.8. Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga
		1.1.9. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak
		1.1.10. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan	Meningkatnya rehabilitasi sosial
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter	2.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	2.1.1. Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat
			Terselenggaranya urusan pemerintah daerah
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
			Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidng pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidangperekonomian dan SDA
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
		2.1.2. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Meningkatnya tata kelola anggaran
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan
			Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
		2.1.3. Meningkatnya budaya kerja ASN Yang prosesional dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional
		2.1.4. Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan
		2.1.5. Terciptanya kerukunan umat beragama	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikakan
		2.1.6. Meningkatnya pelestarian budaya melayu	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
			Meningkatnya akses

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
			masyarakat terhadap informasi sejarah
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat	3.1. Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan	3.1.1. Terbangunnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat
			Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi air
		3.1.2. Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antarwilayah	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi-(Perkim)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
			Meningkatnya layanan persampahan regional
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung
			Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman
			Meningkatnya pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman
		3.1.3. Berkembangnya kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan identitas wilayah	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan
		3.1.4. Terjaganya kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Menurunya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
			Meningkatnya tata kelola persampahan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran

4.1.3.1 Target Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis

Pembangunan Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Capaian target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana target-target strategis yang telah ditetapkan mampu diwujudkan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, khususnya dalam mengejar target tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis sesuai desain RPJMD dan RKPD Tahun 2027. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang juga merupakan bagian dari indikator makro daerah atau dikenal juga sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana beberapa indikator bahkan telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2027, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan percepatan capaian, terutama pada dimensi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Target capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis pada RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-2 Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET SASARAN PADA RPJMD THN 2027	TARGET SASARAN RKPD THN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,93	1,81 - 2,93	2,49 - 3,06	Target IKU pada RPJMD sudah terlampaui
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,5	3,17	3,51–3,60	Target IKU pada RPJMD sudah terlampaui
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	4,80 - 5,34	4,80 - 5,32	Sama dengan Target IKU pada RPJMD
4	Rasio Gini	Indeks	0,265	0,226-0,231	0,226 - 0,231	Sama dengan Target IKU pada RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET SASARAN PADA RPJMD THN 2027	TARGET SASARAN RKPD THN 2027	KETERANGAN
5	Pendapatan Perkapita	Rp. Juta Per Tahun	292,06	325,78 - 331,86	309,15 - 313,44	Dibawah target IKU pada RPJMD
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,02	77,49 - 77,84	78,06 - 78,32	Target IKU pada RPJMD sudah terlampaui
7	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,08	6,09 - 6,16	4,75 - 5,43	Target IKU pada RPJMD sudah terlampaui
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,52	69,57	77,53–79,00	Target IKU pada RPJMD sudah terlampaui
9	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	42,05	12,99	43,00–45,00	Target IKU pada RPJMD sudah terlampaui
10	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	75	100	100	Sama dengan Target IKU pada RPJMD
11	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Angka	82	67	82,50–85,00	Target IKU pada RPJMD sudah terlampaui
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks		75,60	75,60	Sama dengan Target IKU pada RPJMD
13	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	%	16,67	20,37	20,37	Sama dengan Target IKU pada RPJMD

Secara keseluruhan, dari 13 indikator yang dievaluasi, 7 indikator (Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Indeks Reformasi Birokrasi, Cagar Budaya, dan Rasio Konektivitas) telah melampaui target RPJMD 2027; 5 indikator yaitu TPT, Rasio Gini, Warisan Budaya Tak Benda, IKLI, dan Penurunan Intensitas Emisi GRK berada pada level yang sejalan dengan target RPJMD 2027; dan 1 indikator yaitu Pendapatan Perkapita disesuaikan di bawah target target RPJMD 2027. Pola ini menunjukkan bahwa fondasi makroekonomi, pembangunan manusia, tata kelola, kebudayaan, pembangunan fisik/infrastruktur, dan lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis

berjalan cukup baik, namun tantangan utama ke depan terletak pada peningkatan kesejahteraan riil masyarakat khususnya pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan (rasio gini) serta perhitungan indikator IKLI dan percepatan pencapaian target penetapan warisan budaya tak benda, agar seluruh target RKPD dan RPJMD Tahun 2027 dapat dicapai secara utuh dan berimbang antar-dimensi pembangunan.

4.1.3.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari:

1) SPM Bidang Pendidikan;
2) SPM Bidang Kesehatan;
3) SPM Bidang Pekerjaan Umum;
4) SPM Bidang Perumahan Rakyat;
5) SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6) SPM Bidang Sosial.

Ketentuan penerapan SPM di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis dan indikator pelayanan dasar yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel IV-3 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
I. SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
II. SPM KESEHATAN				

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9	Pelayanan kesehatan Penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10	Pelayanan kesehatan orang Dengan gangguan jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11	Pelayanan kesehatan orang Terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehtan	100%	Setiap tahun
III. SPM PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Setiap tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT				

	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasirumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaanrumah yanglayak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
	VI. SPM SOSIAL			
1	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun

	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

4.2 Tema dan Fokus Pembangunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis mempedomani RKP dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2027, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis. Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2027 yaitu:

"Peningkatan Daya Saing Melalui Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Wilayah untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat"

Tema RKPD tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2027. Tema pada RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 mencerminkan arah pembangunan yang menempatkan daya saing sebagai tujuan utama. Daya saing daerah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan ekonomi semata, tetapi juga sebagai kapasitas daerah dalam menarik investasi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Dalam posisi ini, Kabuapten Bengkalis berupaya memperkuat posisinya sebagai daerah yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengoptimalkan potensi lokal, khususnya sektor pesisir, sumber daya alam, dan ekonomi berbasis masyarakat.

Pilar utama dalam peningkatan daya saing tersebut adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan SDM yang sehat, terdidik, dan terampil, diharapkan masyarakat Bengkalis mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi, termasuk perkembangan teknologi dan transformasi digital, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

Selain itu, tema ini juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi sebagai enabler utama pembangunan. Birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem administrasi, tetapi juga pada peningkatan kinerja aparatur dan penerapan digitalisasi pemerintahan. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mengelola sumber daya pembangunan secara optimal.

Di sisi lain, pertumbuhan wilayah menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak terpusat, melainkan merata hingga ke kawasan pesisir dan daerah terpencil. Bengkalis sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan pesisir menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan konektivitas, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan wilayah yang inklusif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Secara keseluruhan, tema RKPD ini bermuara pada upaya mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup, pemerataan pembangunan, serta keadilan sosial. Dengan mengintegrasikan peningkatan daya saing, kualitas SDM, reformasi birokrasi, dan pertumbuhan wilayah, Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat

4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

Untuk mewujudkan tema pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027, pemerintah daerah menetapkan empat prioritas pembangunan sebagai fokus utama pelaksanaan program dan kegiatan lintas perangkat daerah. Penetapan prioritas ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, mempercepat pencapaian sasaran RPJMD, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Keempat prioritas tersebut saling terintegrasi dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Keempat prioritas pembangunan tersebut yaitu:

- Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur"
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)"
- Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan
- Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)

Keempat prioritas pembangunan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling memperkuat satu sama lain. Penguatan konektivitas dan infrastruktur akan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan mampu memanfaatkan peluang pembangunan. Pembangunan kawasan pesisir dan daerah terpencil akan mendorong pemerataan hasil pembangunan serta mengurangi disparitas antarwilayah.

Sementara itu, reformasi birokrasi menjadi fondasi dalam memastikan seluruh kebijakan, program, dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui implementasi empat prioritas tersebut secara terpadu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2027, meningkatkan daya saing wilayah, memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pembangunan Kabupaten Bengkalis merupakan bagian dari pembangunan Provinsi Riau dan Pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Oleh kerena itu, keselarasan prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan perlu dipastikan agar pembangunan dapat berjalan dengan koordinasi yang baik dan target tujuan yang menyatu. Untuk dapat melihat sinkronisasi data keselarasan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV-4 Sinkroninasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

RKP Nasional			RKPD Provinsi Riau 2027		RKPD Kabupaten Bengkalis 2027	
Tema	**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri**		**Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif**		**Peningkatan Daya Saing Melalui Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Wilayah untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat**	
Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,49-2,93	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,49 - 3,06
Sasaran	Pendapatan Per Kapita	5.800–5.840 (GNI per Kapita, US$ (juta)			Pendapatan Per Kapita	309,15 - 313,44
	Tingkat Kemiskinan	6,50 – 7,50	Tingkat Kemiskinan	6,09-6,16	Tingkat Kemiskinan	4,75-5,43
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,30–4,87	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80-5,34	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80 - 5,32
	Rasio Gini	0,362–0,367	Rasio Gini	0,178-0,247	Rasio Gini	0,226-0,231
	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,575	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,66-76,98	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,06 – 78,32
	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	39,57			Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	20.37
	IKLH	76,84			IKLH	73,92
Prioritas	PN1 - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).					
	PN2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi					

	RKP Nasional	RKPD Provinsi Riau 2027	RKPD Kabupaten Bengkalis 2027
	syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.		
	PN3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	**Infrastruktur :** Peningkatan Aksesibilitas (Jalan dan Jembatan) dan Infrastruktur Dasar (Air Minum, Sanitasi, Kawasan Kumuh, Listrik)	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur
	PN4 - Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	***Pengembangan Kapasitas SDM :*** Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan (Pengangguran dan Kemiskinan)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)
	PN5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		
	PN6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	***Ekonomi Inklusif :*** Pertanian, Pengembangan Kawasan Industri, Hilirisasi Produk Unggulan, Pengembangan UMKM dan Koperasi	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan
	PN7 - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	***Tata Kelola Pemerintahan :*** Peningkatan Kapasitas ASN Implementasi Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola, Kinerja Aparatur dan Pilkades)

RKP Nasional		RKPD Provinsi Riau 2027	RKPD Kabupaten Bengkalis 2027
	narkoba, judi, dan penyelundupan		
	PN8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	***Lingkungan Hidup Berkelanjutan :*** Pembangunan Rendah Karbon (Penurunan Intensitas GRK) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir

Tabel IV-5 Keselarasan Pro-SN/Tematik Pembangunan Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	05 Pertumbuhan Ekonomi / Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	05.002 Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	40	Pagu Renja 2027 Sebesar 100 Juta Untuk 50 Orang Pengurus Kdkmp (Peningkatan Kualitas Sdm Koperasi) (2 Angkatan)
2	02 Ketahanan Pangan / Pangan Akuatik	02.005 Pangan Akuatik	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	Unit	0	2	Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Di Dalam Renja 2027 Karena Secara Substansi Sudah Diakomodir Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Dengan Pagu Rp. 2.5 Milyar
3	02 Ketahanan Pangan / Pangan Akuatik	02.005 Pangan Akuatik	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	500	550	Kesepakatan Target Indikator Outcome Sesuai Dengan Target Pada Renja 2027 Dengan Pagu Rp. 2.5 Milyar
4	02 Ketahanan Pangan / Pangan Akuatik	02.005 Pangan Akuatik	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Ekstraksi Garam Yang Memiliki Izin Kabupaten/Kota, Yang Diperiksa Kepatuhannya	Pelaku Usaha	0		Tidak Ada Produksi Garam Di Provinsi Riau
5	01 Pengentasan Kemiskinan / Pembangunan Tiga Juta Rumah	01.004 Pembangunan 3 Juta Rumah	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg), Sertifikat Laik Fungsi (Slf), Surat Bukti	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg), Sertifikat Laik Fungsi (Slf), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	Dokumen	150	30	Pada Tahun 2025 Diterbitkan Sebanyak 204 Dokumen, Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan Tahun 2027 Sebanyak 150 Dokumen

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Kepemilikan Bangunan Gedung (Sbkbg), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (Rtb), Tim Profesi Ahli (Tpa), Tim Penilai Teknis (Tpt), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui Simbg	(Sbkbg), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (Rtb), Tim Profesi Ahli (Tpa), Tim Penilai Teknis (Tpt), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui Simbg				
6	01 Pengentasan Kemiskinan / Pembangunan Tiga Juta Rumah	01.004 Pembangunan 3 Juta Rumah	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terbangun	Unit Rumah	5	5	Tahun 2027 Rumah Bagi Korban Bencana Yang Dibangun Sebanyak 5 Unit Dengan Pagu Per Unit Sebesar 80juta
7	01 Pengentasan Kemiskinan /	01.004 Pembangunan 3 Juta Rumah	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah Bagi	Jumlah Rumah Bagi Masyarakat	Unit Rumah			

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Pembangunan Tiga Juta Rumah		Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				
8	01 Pengentasan Kemiskinan / Pembangunan Tiga Juta Rumah	01.004 Pembangunan 3 Juta Rumah	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Yang Diperbaiki	Unit Rumah	10	20	Tahun 2027 Rumah Yang Diperbaiki Sebanyak 10 Unit Dengan Pagu 40 Juta Perunit
9	01 Pengentasan Kemiskinan / Pembangunan Tiga Juta Rumah	01.004 Pembangunan 3 Juta Rumah	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni Yang Dibangun Dalam Rangka	Unit	5	10	Tahun 2027 Rumah Baru Layak Huni Yang Dibangun Sebanyak 5 Unit

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Permukiman		Terhadap Kumuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru	Pencegahan Kumuh				
10	04 Perluasan Akses Pendidikan / Digitalisasi Pembelajaran	04.003 Pembangunan Dan Revitalisasi Sma Unggul Garuda Dan Digitalisasi Pembelajaran	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	Orang	65	15	Bimtek/Pelatihan Mendukung Digitalisasi Pembelajaran.
11	04 Perluasan Akses Pendidikan / Digitalisasi Pembelajaran	04.003 Pembangunan Dan Revitalisasi Sma Unggul Garuda Dan Digitalisasi Pembelajaran	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Orang	25		Tahun 2025 Memeproleh 110 Unit. 2026 Disulkan 150 Unit. Bimtek Dukungan Program Disgitalisasi Pembelajar. Dukungan Progran Digitalisasi Pembelajaran. Disarankan Untuk Dimunculkan Pada Renja

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Pendidikan Yang Dilaksanakan				2027. Alokasi Anggaran Mneyesuikan.
12	04 Perluasan Akses Pendidikan / Digitalisasi Pembelajaran	04.003 Pembangunan Dan Revitalisasi Sma Unggul Garuda Dan Digitalisasi Pembelajaran	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	Orang	0		Tahun 2025 Tidak Memperoleh Pib. Tahun 2026b 3 Pkbm Mengusulkan..
13	04 Perluasan Akses Pendidikan / Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan	04.002 Pembangunan Dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Dan Menengah	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	4	Agar Dimunculkan Kegiatan Monef Refitalisasi Tahun Berjalan. Dan Koordinasi Pengusulan Refitalisasi Untuk Mendukun Program Revitalisasi Pendidikan Jenjang Sd.

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Pendidikan Menengah									
14	04 Perluasan Akses Pendidikan / Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah	04.002 Pembangunan Dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Dan Menengah	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	4	Agar Dimunculkan Kegiatan Monef Refitalisasi Tahun Berjalan. Dan Koordinasi Pengusulan Refitalisasi Untuk Mendukun Program Revitalisasi Pendidikan Jenjang Smp.
15	04 Perluasan Akses Pendidikan / Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Revitalisasi Satuan	04.002 Pembangunan Dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Dan Menengah	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Dokumen		2	Agar Dimunculkan Kegiatan Monef Refitalisasi Tahun Berjalan. Dan Koordinasi Pengusulan Refitalisasi Untuk Mendukun Program Revitalisasi Pendidikan Jenjang Paud.

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah									
16	04 Perluasan Akses Pendidikan / Makan Bergizi Gratis	04.004 Makan Bergizi Gratis	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	Orang	50		Bimtek/Pelatihan Bagi Pengelola Mbg Da Satuan Pendidikan.
17	04 Perluasan Akses Pendidikan / Makan Bergizi Gratis	04.004 Makan Bergizi Gratis	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Dokumen	12	2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Untuk Mendukung Program Mbg.

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
					Pengelolaan Makanan (Tpm) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (Dam)	Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (Dam)				
18	04 Perluasan Akses Pendidikan / Makan Bergizi Gratis	04.004 Makan Bergizi Gratis	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbujan (Psat) Dan Sanitasi Hiegine Mendukung Program Mbg.
19	04 Perluasan Akses Pendidikan / Makan Bergizi Gratis	04.004 Makan Bergizi Gratis	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang	Unit Usaha	3	3	Target Sesuai Renja 2027. Pembinaan Pelaku Usha Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
					Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko	Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko				
20	Perlindungan Anak	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0055	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Kegiatan	2	2	Bappeda Provinsi : Pastikan Kembali Sub Kegiatan Dimaksud Terdapat Di Renja
21	Perlindungan Anak	Penguatan Kesetaraan Gender Dan	1.06 Urusan Pemerintah	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,	Orang	20	50	Bappeda Provinsi : Pastikan Kembali Target Dan Sub Kegiatan

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	an Bidang Sosial		Spiritual, Dan Sosial	Spiritual Dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				Dimaksud Terdapat Di Renja
22	Perlindungan Anak	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	Bappeda Provinsi : Pastikan Kembali Sub Kegiatan Dimaksud Terdapat Di Renja
23	Perlindungan Anak	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan Teknis Dan Pendampingan Sdm Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah Sdm Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Orang	50	50	Dp3a Bengkalis : Sub Kegiatan Dimaksud Belum Tersedia Di Renstra Dan Renja, Yang Ada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Pendampingan Sdm Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penyandang Disabilitas	Perlindungan Anak		Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab/Kota Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Dan Pendampingan .				Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Usulan Kegiatan Baru) Bappeda Bengkalis : Akan Membahas Bersama Opd Terkait Penyesuaian Target Bappeda Provinsi : Untuk Melakukan Perubahan Renstra Dan Renja 2027 Dp3ap2kb : Fokuskan Pada Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak (Uptd Ppa, Faskes, Uppa Polri, Upt Dinsos, Dll) Dan Untuk Meningkatkan Jumlah Lembaga Layanan Terstandardisasi
24	Perlindungan Anak	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	5.01 Perencanaan	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	Bappeda Provinsi : Pastikan Kembali Sub Kegiatan Dimaksud Terdapat Di Renja Dp3ap2kb Provinsi : Pastikan Partisipasi Aktif Forum Anak Pada Forum Musrenbang Hingga Tingkat Desa/Kelurahan Dan Berperan Aktif Dalam Pemenuhan Capaian Kla

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
25	Ekonomi Syariah	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi Dan Penguatan Umkm Melalui Program Kredit Usaha Dan Pembangunan Ibukota Nusantara (Ikn) Serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	Sesuai Dengan Target Yang Ditetapkan
26	Ekonomi Syariah	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi Dan Penguatan Umkm Melalui Program Kredit Usaha Dan Pembangunan Ibukota Nusantara (Ikn) Serta	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan Dan Fasilitasi Sertifikasi Dan Standardisasi Produk	Jumlah Umkm Yang Dibina Dan Difasilitasi Dalam Mengakses Sertifikasi Dan Standardisasi Produk	Unit Usaha	100	100	Bappeda Kab. Bengkalis : Koordinasikan Capaian Target Pada Renja 2027 Dinas Koperasi Dan Ukm : Pagu Menjadi 170 Jt

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya								
27	Ekonomi Syariah	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi Dan Penguatan Umkm Melalui Program Kredit Usaha Dan Pembangunan Ibukota Nusantara (Ikn) Serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi Dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Advokasi Dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi Dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	30	30	Untuk Dikoordinasikan Dengan Bappeda Agar Mempersiapkan Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim
28	Ekonomi Syariah	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi Dan Penguatan Umkm Melalui Program Kredit Usaha	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (Jph) Di Level Kabupaten/ Kota	- Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal Yang Dapat Diawasi - Jumlah Program	Dokumen	10	10	Koodinasikan Terkait Capaian Target Yang Ditetapkam Pada Renja 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Dan Pembangunan Ibukota Nusantara (Ikn) Serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya				Pengawasan Jaminan Produk Halal Yang Dapat Diimplementasikan				
29	Ekonomi Syariah	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi Dan Penguatan Umkm Melalui Program Kredit Usaha Dan Pembangunan Ibukota Nusantara (Ikn) Serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	4.01 Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	5	Perubahan Target 1 Laporan Tahunan Ekonomi Syariah

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
30	03 Kesehatan Untuk Semua / Pemeriksaan Kesehatan Gratis	03.002 Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	Dinkes Bengkalis : Kondisi Jumlah Pagu Sekarang Adalah Skema Lama 45 Kabupaten/55 Provinsi, Namun Jika Terjadi Perubahan Skema Budget Sharing 20provinsi/80 Kabupaten Akan Terjadi Kekurangan Anggaran Sebesar 15 M, Pagu Yang Ada Pada Renja 2027 Rp. 100.702.502.450
31	03 Kesehatan Untuk Semua / Pemeriksaan Kesehatan Gratis	03.002 Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	12		Bappeda Bengkalis : Dinkes Bengkalis : Pagu Pada Renja 2027 Rp. 300.000.000 Dengan Target 12 Laporan Rincian : Pembelian Larvasida Malaria, Dan Screening Tb Dinkes Provinsi : Kegiatan Ini Mendukung Program Ckg, Dengan Rincian Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Ckg, Seperti Rujukan Spesimen, Mendukung Operasional Pelaksanaan Ckg

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
32	03 Kesehatan Untuk Semua / Pemeriksaan Kesehatan Gratis	03.002 Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	12		Dinkes Bengkalis : Pagu Pada Renja 2027 Rp. 103.000.000 Dengan Target 12 Laporan Rincian : Kunjungan Penemuan Kasus, Kie Penyakit Tidak Menular Dinkes Provinsi : Kegiatan Ini Mendukung Program Ckg, Dengan Rincian Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Ckg, Rujukan Spesimen Penyakit Tidak Menular, Mendukung Operasional Pelaksanaan Ckg
33	03 Kesehatan Untuk Semua / Pemeriksaan Kesehatan Gratis	03.002 Pemeriksaan Kesehatan Gratis	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	0	0	Dinkes Provinsi : - Sasaran Ckg Adalah Penduduk Yang Nik Yang Dikeluarkan Kabupaten Bengkalis Dan Diluar Kabupaten Bengkalis. - Nik Yang Bukan Dikeluarkan Kabupaten Bengkalis Apabila Diperlukan Layanan Kesehatan Lanjutan Agar Difasilitasi Oleh Dukcapil Mengkoordinasikan Ke Daerah Asal Penduduk Untuk Menerbitkan Nik Bengkalis Dukcapil

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
										Bengkalis : Subkegiatan Ini Belum Ada Pada Renja 2027 Bappeda Bengkalis : Akan Dibahas Lebih Lanjut Untuk Penambahan Sub Kegiatan Dan Pagu Bappeda Provinsi : Subkegiatan Ini Direkomendasikan Untuk Dimunculkan Pada Renja 2027
34	Pengarusutamaan Gender	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	Orang	15	15	Bappeda Provinsi : Pastikan Sub Kegiatan Dimaksud Sudah Tersedia Di Renja 2027 Dan Rincian Kegiatan Sudah Mendukung Tematik Gender
35	Pengarusutamaan Gender	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Dokumen	1	1	Bappeda Bengkalis : Sub Kegiatan Ini Belum Ada Di Renja 2027 Dan Akan Membahas Bersama Opd Terkait Penyesuaian Target Bappeda Provinsi : Untuk Memunculkan Sub

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penyandang Disabilitas								Kegiatan Dimaksud Pada Renja 2027
36	Pengarusutamaan Gender	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	50		Disnaker Bengkalis : Sub Kegiatan Ini Belum Ada Di Renja 2027 Dan Renstra Bappeda Bengkalis : Akan Membahas Bersama Opd Terkait Penyesuaian Target Bappeda Provinsi : Untuk Melakukan Perubahan Renstra Dan Renja 2027 Dengan Berpedoman Pada Pemutahiran Terakhir
37	Pengarusutamaan Gender	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.01.0015	Advokasi Dan Sosialisasi Terkait Penyelenggaraan Pug Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Pemangku Kepentingan Tingkat Kab/Kota Yang Mendapatkan Advokasi Dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah Dan Non Pemerintah) Terkait Penyelenggaraan Pug	Lembaga	35		Ppa Bengkalis : Sub Kegiatan Ini Belum Tersedia Di Renstra Dan Renja Namun Ada Kegiatan Pada Dokumen Renja Sub Kegiatan Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Pug Kewenangan Kab/Kota Dengan Pagu 583.000.000 Dan Target 1 Laporan. Bappeda Bengkalis: Akan Melakukan Pembahasan Dengan Opd Terkait. Bappeda Provinsi :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
						Kewenangan Kab/Kota				Direkomendasikan Untuk Dimasukan Kedalam Dokumen Renja Tahun 2027 Dengan Memperhatikan Target Indikator Serta Dimasukan Kedalam Rencana Perubahan Renstra.
38	Pengarusutamaan Gender	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan Dan Fasilitasi Pelaku Usaha Dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	20	20	Bappeda Provinsi : Pastikan Sub Kegiatan Dimaksud Sudah Tersedia Di Renja 2027 Dan Rincian Kegiatan Sudah Mendukung Tematik Gender Dp3ap2kb Provinsi : Pastikan Sasaran Dalam Memudahkan Akses Terhadap Pelaku Usaha Perempuan
39	03 Kesehatan Untuk Semua / Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/Kota	03.005 Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/Kota	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Dan Sdm Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan	Unit	1	4	Dinkes Bengkalis : Untuk Tahun 2027 Sub Kegiatan Ini Tidak Ada Pada Renja, Yang Ada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukung Dengan Bagu Rp. 1 Miliyar. Direncanakan Pada Tahun 2027pembangunan Rumah Sakit Baru Didaerah Bukit

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
						Kelas Rumah Sakit Yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Dan/Atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit				Batu Dengan Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan (Fs, Master Plan Dan Ded) Dengan Tipe D Pratama Dinkes Provinsi : Sesuaikan Dengan Peraturan Kemenkes Dengan Memperhatikan Akses, Ketersediaan Tenaga Sdm, Jumlah Penduduk
40	03 Kesehatan Untuk Semua / Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/Kota	03.005 Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/Kota	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	104	750	Dinkes Bengkalis : - Sub Kegiatan Ini Sebelumnya Untuk Gaji Paramedis Yang Ditempatkan Dipuskesmas,Namun Pada Tahun 2025 Sudah Diangkat Sebagai Pppk Paruh Waktu Dan Penuh Waktu - Sub Kegiatan Ini Tidak Dilaksanakna Lagi Pada Tahun 2027, Untuk Pppk Paruh Waktu Yang Bertugas Dipuskesmas Penggajiannya Melalui Jasa Pelayanan Umum

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Kantor Sebesar Rp. 8 Miliyar (104 Orang)
41	03 Kesehatan Untuk Semua / Penuntasan Tuberkulosis (Tbc)	03.004 Penuntasan Tbc	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7654	8872	Menyesuaikan Target Kemenkes
42	03 Kesehatan Untuk Semua / Penuntasan Tuberkulosis (Tbc)	03.004 Penuntasan Tbc	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1575	1643	Menyesuaikan Dengan Target Kemenkes
43	03 Kesehatan Untuk Semua / Penuntasan Tuberkulosis (Tbc)	03.004 Penuntasan Tbc	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (Pm) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	1575	18830	Dinkes Provinsi : Koordinasikan Data Pasien Tb Dengan Penerima Bantuan Sosial Dinkes Bengkalis : Dari 18830 Sasaran Penerima Bansos, Dipastikan Penderita Tb Yang Sedang Dalam

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Kewenangan Kabupaten/Kota				Pengobatan Sebanyak 1575 Menjadi Sasaran Bansos
44	03 Kesehatan Untuk Semua / Penuntasan Tuberkulosis (Tbc)	03.004 Penuntasan Tbc	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	0	0	Capil Bengkalis : Sub Kegiatan Tidak Ada Pada Renja 2027
45	02 Ketahanan Pangan / Kampung Nelayan Merah Putih	02.006 Kampung Nelayan Merah Putih	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	75	50	1. Kesepakatan Target Indikator Outcome Sesuai Dengan Target Pada Renja 2027 2. Pagu Sub Kegiatan Rp 171 Juta
46	02 Ketahanan Pangan / Kampung Nelayan Merah Putih	02.006 Kampung Nelayan Merah Putih	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil Yang Difasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	15	20	1. Kesepakatan Target Indikator Outcome Sesuai Dengan Target Pada Renja 2027 2. Pagu Sub Kegiatan Sebesar Rp. 68 Juta

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47	02 Ketahanan Pangan / Kampung Nelayan Merah Putih	02.006 Kampung Nelayan Merah Putih	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	500	550	1. Kesepakatan Target Indikator Outcome Sesuai Dengan Target Pada Renja 2027 2. Pagu Sub Kegiatan Rp 2.5 Miliar 3. Intervensi Berupa Bantuan Kapal Dan Alat Tangkap
48	03 Kesehatan Untuk Semua / Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn)	03.003 Jaminan Kesehatan Nasional	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	Dinkes Bengkalis : Kondisi Jumlah Pagu Sekarang Adalah Skema Lama 45 Kabupaten/55 Provinsi, Namun Jika Terjadi Perubahan Skema Budget Sharing 20provinsi/80 Kabupaten Akan Terjadi Kekurangan Anggaran Sebesar 15 M, Pagu Yang Ada Pada Renja 2027 Rp. 100.702.502.450
49	03 Kesehatan Untuk Semua / Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn)	03.003 Jaminan Kesehatan Nasional	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan Yang Terverifikasi Dan Tervalidasi, Dan Usulan Perbaikan Yang Dilaksanakan	Usulan	0	39000	Bappeda Provinsi : Rincian Pelaksanaan Subkegiatan Untuk Meningkatkan Verivali Data Penerima Jaminan Kesehatan Bappeda Bengkalis : Sub Kegiatan Tidak Terdapat Pada Renja 2027, Akan Dibahas Lebih Lanjut Dengan Opd Terkait

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
50	03 Kesehatan Untuk Semua / Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn)	03.003 Jaminan Kesehatan Nasional	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	0	0	Disdukcapil Bengkalis : Sub Kegiatan Belum Ada Di Renja 2027 Bappeda Riau : Direkomendasikan Subkegiatan Ini Untuk Muncul Di Renja 2027
51	01 Pengentasan Kemiskinan / Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	01.001 Penanggulangan Kemiskinan	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	Bappeda Provinsi Riau: Pelaksanaan Kegiatan Agar Mempertimbangkan Target Kinerja. Bappeda Dan Dinsos Kabupaten Bengkalis: Pembahasan Renja Dengan Alokasi Anggaran Rp. 60jt Dan Target 10 Orang (2 Kelompok Masyarakat). Penyesuaian Target Pada Renja Tahun 2027 Sesuai Ketersediaan Anggaran Di Dinas Sosial Bengkalis.
52	01 Pengentasan Kemiskinan / Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan	01.001 Penanggulangan Kemiskinan	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (Pm) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	18245	18830	Bappeda Provinsi Riau: Program Mesti Disesuaikan Dengan Kondisi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dan Dijalankan Dengan Efektif Dan Efisien. Pertimbangkan

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem					Kewenangan Kabupaten/Kota				Kemampuan Dinas Terkait Dalam Pemenuhan Spm. Dinas Sosial Provinsi Riau: Fokus Di Desil 1 Dan 2 Dtsen. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis : Pada Rancangan Renja Anggaran Dialokasikan Sebesar Rp. 35.611.099.740, Untuk 18.245 Penerima Manfaat. Bantun Pangan Non Tunai Otonom Sebesar Rp. 200rb/Bln Selama 9 Bln Untuk Masyarakat Miskin Di Luar Penerima Bantuan Pkh Dan Sembako Pusat.
53	01 Pengentasan Kemiskinan / Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	01.001 Penanggulangan Kemiskinan	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0		Bappeda Provinsi Riau: Koordinasikan Dengan Disnaker. Bappeda Kabupaten Bengkalis : Untuk Dipertimbangkan Dalam Perencanaan Penganggaran. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis : Pada Pembahasan Renja Belum Mendapatkan Alokasi Anggaran.

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
54	01 Pengentasan Kemiskinan / Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	01.001 Penanggulangan Kemiskinan	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0		Bappeda Provinsi Riau: Diharapkan Jika Dimungkinkan Untuk Dapat Dialokasikan Sesuai Kebutuhan Dan Ketersediaan Anggaran, Agar Menjadi Prioritas Pembahasan Perencanaan Penganggaran. Bappeda Kabupaten Bengkalis: Sub Kegiatan Ini Tidak Ada Di Renstra Dan Renja. Dukungan Ada Di Kegiatan &Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota& Untuk 5 Ton Sebesar Rp. 40jt.
55	03 Kesehatan Untuk Semua / Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting	03.001 Stunting	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	Dinkes Kabupaten :Pagu Rp. 543.000.000 Dengan Target 2 Dokumen Pada Renja 2027, Rincian : Pengadaan Pmt Untuk Balita Stunting Dan Gizi Kurang (86 Balita) Dinkes Provinsi : Pmt Tidak Bentuk Makanan Dalam Kemasan - Dianjurkan Pmt Dalam Bentuk Bahan Pangan Lokal Bukan Dalam Bentuk Kemasan -

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Anggaran Yang Tersedia Dialihkan Ke Susu Pkmk Kebalita Gizi Buruk
56	03 Kesehatan Untuk Semua / Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting	03.001 Stunting	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Dokumen	0	1	Dinkes Bengkalis : Sub Kegiatan Ini Pada Renja 2027 Tidak Ada, Sebelumnya Sub Kegiatan Ini Sumber Anggaran Berasal Dari Dak Non Fisik Untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Terdapat Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Dan Balita
57	03 Kesehatan Untuk Semua / Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting	03.001 Stunting	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan Yang Dibangun	Liter/Detik	0	0	Bappeda Provinsi : Sub Kegiatan Ini Direkomendasikan Untuk Muncul Pada Renja 2027 Untuk Mendukung Pencapaian Ketersediaan Air Minum Aman
58	03 Kesehatan Untuk Semua / Pencegahan Dan Percepatan	03.001 Stunting	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Keluarga	-	30	Bappeda Bengkalis : Akan Dibahas Lebih Lanjut Kepada Opd Terkait

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penurunan Stunting					Pangan Keluarga				
59	03 Kesehatan Untuk Semua / Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting	03.001 Stunting	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	-	978	Bappeda Bengkalis : Akan Dibahas Lebih Lanjut Dengan Opd Terkait
60	Penanggulangan Bencana	Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (Sda), Termasuk Sumber Daya Maritim Untuk Membuka Lapangan Kerja Yang	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (Krb) Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling Lama Dalam 1 (Satu) Tahun	Dokumen	1	0	Bappeda Provinsi Riau: Sesuai Bpbdpk Provinsi Riau: Sesuai Bappeda Kab.Bengkalis: Sesuai Bpbd Kab.Bengkalis: Sub Kegiatan Sudah Ada Di Renstra Akan Dilakukan Penyusunan Dokumen Krb Tahun 2027 Dengan Pagu Rp. 475.000.000

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Seluas-Luasnya Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi								
61	Penanggulangan Bencana	Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (Sda), Termasuk Sumber Daya Maritim Untuk Membuka Lapangan Kerja Yang Seluas-Luasnya Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (Rpb) Kabupaten/Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling Lama Dalam 1 (Satu) Tahun	Dokumen	1	0	Bappeda Provinsi Riau: Sesuai Bpbdpk Provinsi Riau: Sesuai Bappeda Kab.Bengkalis: Sesuai Bpbd Kab.Bengkalis: Sub Kegiatan Sudah Ada Di Renstra Akan Dilakukan Penyusunan Dokumen Rpb Tahun 2027 Dengan Pagu Rp. 480.000.000
62	Penanggulangan Bencana	Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (Sda),	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur Bpbd Kabupaten/Kota Dan Lintas Perangkat Daerah	Orang	2	2	Bappeda Provinsi Riau: Agar Tetap Dianggarkan Pada Tahun 2027 Bpbdpk Provinsi Riau: Agar Tetap Dianggarkan Pada Tahun 2027 Bappeda

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Termasuk Sumber Daya Maritim Untuk Membuka Lapangan Kerja Yang Seluas-Luasnya Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	Umum Serta Perlindungan Masyarakat			Kabupaten/Kota Yang Memiliki Kemampuan Teknis Dalam Menyusun Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (r3p)				Kab.Bengkalis: - Bpbd Kab.Bengkalis: Sub Kegiatan Sudah Ada Di Renstra Pagu Renja 2027 Rp. 0
63	Penanggulangan Bencana	Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (Sda), Termasuk Sumber Daya Maritim Untuk Membuka Lapangan Kerja Yang Seluas-	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana Di Semua Sektor Sesuai Berdasarkan Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana (r3p) Kabupaten/Ko	Kegiatan	1	1	Bappeda Provinsi Riau: Sesuai Bpbdpk Provinsi Riau: Sesuai Bappeda Kab.Bengkalis: Sesuai Bpbd Kab.Bengkalis: Target Dan Pagu Sesuai Di Renstra

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Luasnya Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi				ta Yang Dilegalkan				
64	Penanggulangan Bencana	Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (Sda), Termasuk Sumber Daya Maritim Untuk Membuka Lapangan Kerja Yang Seluas-Luasnya Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana (r3p) Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (r3p) Kab/Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah Dan Legal Paling Lama Dalam 1 (Satu) Tahun	Dokumen	1	1	Bappeda Provinsi Riau: Agar Tetap Dianggarkan Pada Tahun 2027 Bpbdpk Provinsi Riau: Agar Tetap Dianggarkan Pada Tahun 2027 Bappeda Kab.Bengkalis: - Bpbd Kab.Bengkalis: Sub Kegiatan Sudah Ada Di Renstra Pagu Renja 2027 Rp. 0
65	01 Pengentasan Kemiskinan / Sekolah Rakyat	01.003 Sekolah Rakyat	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan Yang Terverifikasi Dan Tervalidasi,	Usulan	39000	39000	Bappeda Provinsi Riau: Diharapkan Jika Dimungkinkan Untuk Dapat Dialokasikan Sesuai Kebutuhan Dan Ketersediaan Anggaran, Agar Menjadi Prioritas

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Dan Usulan Perbaikan Yang Dilaksanakan				Pembahasan Perencanaan Penganggaran. Dinas Sosial Provinsi Riau: Realisasi Tw. 2 Tahun 2026 Sebesar 9.500 Untuk Usulan Dan Pemutakhiran Dtsen. Bappeda Kabupaten Bengkalis : Penyesuaian Dengan Anggaran Dan Prioritas. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis : Pada Pembahasan Renja Kegiatan Ini Tidak Teranggarkan.
66	01 Pengentasan Kemiskinan / Sekolah Rakyat	01.003 Sekolah Rakyat	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin Pplh	Jumlah Rekomendasi Dan/Atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, Dan Surat Kelayakan Operasi Yang Diberikan	Dokumen	12	12	Bappeda Dan Dinas Sosial Provinsi Riau: Pemerintah Daerah Dibutuhkan Pemenuhan Readiness Criteria Sekolah Rakyat Yang Mesti Dipenuhi. Bappeda Bengkalis: Dibutuhkan Percepatan Penyelesaian Persyaratan Pembangunan Sekolah Rakyat. Dinas Sosial Bengkalis: Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat Diantaranya Adalah Dokumen Amdal/Ukl-Upl Sesuai

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Persyaratan Dari Kemensos. Dinas Lh Bengkalis: Anggaran Pada Rancangan Renja Sebesar Rp. 67.082.360.
67	02 Ketahanan Pangan / Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	02.002 Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas Dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitas Dan Fungsinya	Unit	0		Sub Kegiatan Ini Tidak Dianggarkan Karena Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2025 Bahwa Kewenangan Penyuluh/Penyuluhan Sudah Dialihkan Ke Pusat. Perlunya Sinkronisasi Regulasi Antara Kementerian Teknis Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Nomenklatur Sub Kegiatan
68	02 Ketahanan Pangan / Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	02.002 Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/ Bpp Dan Desa	Jumlah Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/Bpp Dan Desa Yang Tersedia Dan Terpelihara	Unit	0		Sub Kegiatan Ini Tidak Dianggarkan Karena Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2025 Bahwa Kewenangan Penyuluh/Penyuluhan Sudah Dialihkan Ke Pusat. Perlunya Sinkronisasi Regulasi Antara Kementerian Teknis Dan

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Kementerian Dalam Negeri Dalam Nomenklatur Sub Kegiatan
69	02 Ketahanan Pangan / Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	02.004 Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.12.2.01.0011	Penetapan Rtrw Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda Rtrw Kabupaten/Kota	Dokumen	0		Bukan Merupakan Urusan Pertanian
70	02 Ketahanan Pangan / Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	02.004 Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	3	3	1. Kesepakatan Target Indikator Outcome Sesuai Dengan Target Pada Renja 2027 2. Intervensi Kegiatan Untuk Mendukung Lumbung Pangan Eksisting
71	02 Ketahanan Pangan / Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas	02.004 Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah	Unit	0		Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Di Dalam Renja 2027 Karena Substansi Kegiatan Ini

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)			Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota Yang Tersedia				Sudah Diakomodir Oleh Bulog
72	02 Ketahanan Pangan / Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	02.004 Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas Kawasan Pertanian Yang Termanfaatkan	Ha	500	500	Kesepakatan Target Indikator Outcome Sesuai Dengan Target Pada Renja 2027
73	02 Ketahanan Pangan / Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	02.004 Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Secara Numerik Dan Spasial Di Kabupaten/ Kota	Penetapan Kawasan, Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	0		Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan Di Dalam Renja 2027 Karena Secara Substansi Sudah Diakomodir Pada Sub Kegiatan Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Dengan Pagu Rp. 175 Juta

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
74	02 Ketahanan Pangan / Irigasi Yang Mendukung Swasembada Pangan	02.001 Swasembada Pangan (Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan)	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah Dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah Dan Air Baku Yang Disusun	Dokumen	0	2	Belum Ada Kegiatan
75	02 Ketahanan Pangan / Irigasi Yang Mendukung Swasembada Pangan	02.001 Swasembada Pangan (Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan)	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.0021	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Km			
76	02 Ketahanan Pangan / Irigasi Yang Mendukung Swasembada Pangan	02.001 Swasembada Pangan (Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan)	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.0023	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Km	1	1	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Sebanyak 1 Dir
77	02 Ketahanan Pangan / Irigasi Yang Mendukung Swasembada Pangan	02.001 Swasembada Pangan (Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan)	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.0026	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Km			

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
78	Masyarakat Adat	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	1	Kegiatan Ini Tidak Di Anggarkan Dalam Penysunan Renja Tahun 2027 Dinas Pemberdayaan Masyrakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis,(Untuk Menjadi Catatan Bagi Bappeda Bengkalis Mempertimbangkan Pendanaannya Pada Sub Kegiatan Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Pada Tahapan Penyusunan Rankhir Renja Tahun 2027)
79	Masyarakat Adat	Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang	Dokumen		11	Kegiatan Ini Tidak Di Anggarkan Dalam Penysunan Renja Tahun 2027 Dinas Pemberdayaan Masyrakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis,(Untuk Menjadi Catatan Bagi Bappeda Bengkalis Mempertimbangkan Pendanaannya Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n Dan Masyarakat Hukum Adat				Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat Pada Tahapan Penyusunan Rankhir Renja Tahun 2027)
80	05 Pertumbuhan Ekonomi / Pengendalian Inflasi	05.001 Pengendalian Inflasi	2.09 Urusan Pemerintah an Bidang Pangan	2.09.03.2.0 1.0008	Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/Ko ta	Laporan	1	1	Di Renja 2027 Pagu Sebesar Rp. 40 Juta (Target 8 Kali Gerakan Pangan Murah)
81	05 Pertumbuhan Ekonomi / Pengendalian Inflasi	05.001 Pengendalian Inflasi	2.09 Urusan Pemerintah an Bidang Pangan	2.09.03.2.0 1.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Ko ta	Dokume n	1	1	Untuk Dimunculkan Kembali Pada Tahun 2027, Karena Ini Merupakan Sub Kegiatan Mendukung Pro Sn. Untuk Membentuk Tim Neraca Pangan Di Kabupaten.
82	05 Pertumbuhan Ekonomi / Pengendalian Inflasi	05.001 Pengendalian Inflasi	3.30 Urusan Pemerintah an Bidang Perdagangan	3.30.04.2.0 2.0002	Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Dan Stok Barang	Laporan	12	8	Pagu Tahun 2027 Sesuai Dengan Pagu Renstra.

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
					Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan				

Tabel IV-6 Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

KODE	RKPD 2027 PROVINSI RIAU			RKPD 2027 KABUPATEN/KOTA		KET
	LOKASI PRIORITAS (BERNILAI)	ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH BERNILAI (INDIKATIF)		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
A.	1. Kabupaten Bengkalis 2. Kabupaten Rokan Hilir 3. Kabupaten Rokan Hilir 4. Kota Dumai	**Peningkatan Konektifitas dan Aksebilitas melalui Pengembangan Infrastruktur**		Kabupaten Bengkalis	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	
		1.	Pembangunan dan peningkatan ruas jalan Dalu-Dalu-Mahato-Sp Manggala			
		2.	Pembangunan dan peningkatan ruas jalan Panipahan-Teluk Piyai-Batas Sumut			
		3.	Pembangunan dan peningkatan ruas jalan Dumai-Lubuk Gaung-Batu Teritip-Sinaboi-Bagansiapiapi			
			Pengembangan Ekonomi			

KODE	RKPD 2027 PROVINSI RIAU			RKPD 2027 KABUPATEN/KOTA		KET
	LOKASI PRIORITAS (BERNILAI)	ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH BERNILAI (INDIKATIF)		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		1	Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan tangkap.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		2	Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap			
		3	Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi.			
		4	Pengembangan Kawasan strategis pariwisata Dumai – Rupat danPengembangan Kawasan parwisata religi dan budaya di Rokan Hulu dan Rokan Hilir			
		5	Pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah pada WP Bernilai			

KODE	RKPD 2027 PROVINSI RIAU			RKPD 2027 KABUPATEN/KOTA		KET
	LOKASI PRIORITAS (BERNILAI)	ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH BERNILAI (INDIKATIF)		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
			Pengelolaan Lingkungan		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	
		1	Dukungan Penyelesaian Masalah Banjir			
			Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (Riau Mantap)			
		1	Penyediaan dan Pengelolaan Unit Air Baku SPAM Regional Dumai-Rohil-Bengkalis			

4.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 disusun sebagai pedoman dalam menentukan fokus intervensi pembangunan, pelaksanaan program prioritas, serta pengalokasian sumber daya daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan tersebut mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 serta disesuaikan dengan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip keselarasan dan sinkronisasi antarjenjang pemerintahan. Hal ini penting karena pembangunan Kabupaten Bengkalis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Riau dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 diselaraskan dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2027.

Penyelarasan tersebut diarahkan untuk memastikan adanya keterpaduan antara sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Keterpaduan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, menghindari tumpang tindih program, memperkuat dukungan pendanaan, serta mengoptimalkan pencapaian target pembangunan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027, arah kebijakan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan empat prioritas pembangunan daerah, yaitu penguatan konektivitas dan peningkatan layanan infrastruktur; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, vokasi, dan kesehatan; pembangunan kawasan pesisir serta daerah terpencil dan tertinggal; serta reformasi birokrasi melalui peningkatan tata kelola dan kinerja aparatur. Arah kebijakan tersebut menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta target kinerja masing-masing.

Dengan demikian, penyelarasan arah kebijakan nasional, Provinsi Riau, dan Kabupaten Bengkalis merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, efektif, dan berkesinambungan. Adapun keterkaitan dan penyelarasan antara arah kebijakan RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Riau Tahun 2027, RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, dan tema RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV-7 Penyelarasan Arah Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

NASIONAL	PROVINSI RIAU	BENGKALIS
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah;	Pemerataan aksesibiltas dan kualitas pendidikan yang unggul dan Berkeadilan
	b. Peningkatan akses pelayanan dasar pendidikan untuk masyarakat miskin (semua siswa miskin harus bersekolah sampai jenjang tertinggi);	
	c. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;	
	d. Dukungan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM;	
	e. Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas;	
	f. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	
Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;	Memperkuat Derajat Kesehatan Masyarakat
	b. Pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;	
	c. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;	
	d. Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan;	
	e. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting;	
	f. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;	
	g. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis;	
	h. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat.	

NASIONAL	PROVINSI RIAU	BENGKALIS
Penguatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air		Meningkatkan ketahanan pangan daerah
Pemenuhan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	a. Pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah;	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya saing daerah
	b. Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau	Peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar guna memperkuat peran strategis kawasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan Hub Daerah
Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		Peningkatan infrastruktur dasar yang handal dan merata secara berkelanjutan
Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan sistem pencegahan dan mitigasi bencana daerah
Percepatan penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	a. Pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;	Mendorong pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
	b. Peningkatan akses pelayanan dasar infrastruktur masyarakat miskin;	
	c. Pemerataan pembangunan dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan;	
	d. Pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin	

NASIONAL	PROVINSI RIAU	BENGKALIS
Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan daya saing Tenaga Kerja Daerah
Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	a. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;	Mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah serta mengoptimalkan peran keluarga
	b. Peningkatan kualitas perlindungan anak	Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak
Penguatan ketahanan pangan	a. Peningkatan ketahanan pangan daerah dan akses pangan untuk masyarakat;	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
	b. Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat petani miskin.	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah		Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya saing daerah
Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan sistem pencegahan dan mitigasi bencana daerah
Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital		Penyempurnaan Layanan Publik
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Peningkatan infrastruktur dasar	Memperkuat Potensi Desa dalam Pembangunan Daerah
Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	a. Peningkatan ketangguhan keluarga;	Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga

NASIONAL	PROVINSI RIAU	BENGKALIS
	b. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;	
	c. Pengaturan fertilitas melalui program KB dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan advokasi	
Pemenuhan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah	Peningkatan Konektivitas wilayah antar pulau
Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital	Penyempurnaan Layanan Publik Peningkatan Budaya Inovasi di Pemerintahan
Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan destinasi serta pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif dalam pemasaran produk, pembiayaan usaha, dan penguatan jejaring pelaku usaha
Pemenuhan pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah	Digitaliasi pelayaan Perizinan secara terpadu dan terintegrasi
Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	a. Peningkatan pembangunan keolahragaan;	Mendorong prestasi olahraga dan Kualitas Kepemudaan
	b. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.	Mendorong prestasi olahraga dan Kualitas Kepemudaan
Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Penguatan tata kelola riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy)

NASIONAL	PROVINSI RIAU	BENGKALIS
Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah		Penguatan Sistem Pengawasan Internal
Peningkatan Indeks Pemajuan	Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang Agamis	Mendorong pelestarian budaya melalui restorasi situs Melayu dan penguatan perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah
Kebudayaan (IPK)		Mendorong pelestarian budaya melalui restorasi situs Melayu dan penguatan perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah
Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Pengembangan budaya gemar membaca	Pemerataan aksesibiltas dan kualitas pendidikan yang unggul dan Berkeadilan
Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa		Penyempurnaan Layanan Publik
Penguatan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan		Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya saing daerah
Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Penataan amenitas, peningkatan SDM pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan destinasi serta pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif dalam pemasaran produk, pembiayaan usaha, dan penguatan jejaring pelaku usaha
Peningkatan Produksi Pertanian		Meningkatkan ketahanan pangan daerah

NASIONAL	PROVINSI RIAU	BENGKALIS
Peningkatan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi		Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya saing daerah
Penguatan pencapaian Ketahanan Energi	Mendorong ketahanan dan transisi energi	
Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Peningkatan pendapatan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui penguatan sistem dan peningkatan kepatuhan wajib pajak
Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	a. Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya saing daerah
	b. Penguatan ekosistem ekonomi syariah	Penguatan ekosistem halal Penguatan ekosistem keuangan syariah dan kelembagaan pengelolaan dana sosial syariah
Pemenuhan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi		Peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar guna memperkuat peran strategis kawasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan Hub Daerah
Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	a. Peningkatan profesionalitas ASN dan budaya kerja ASN;	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme ASN
	b. Penguatan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas;	Penguatan Sistem Pengawasan Internal
	c. Penguatan kerjasama dalam pembangunan daerah;	Mengoptimalkan Perencanan Daerah yang adaptif

NASIONAL	PROVINSI RIAU	BENGKALIS
	d. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;	Peningkatan Toleransi dan Penghargaan Terhadap Perbedaan
	e. Dukungan peningkatan kenyamanan, keamanan, toleransi dan kesejahteraan rakyat.	

4.5 Program Prioritas RKPD 2027

Untuk memastikan keempat prioritas pembangunan dapat diimplementasikan secara optimal, masing-masing prioritas dijabarkan ke dalam program-program prioritas daerah beserta indikasi kebutuhan pendanaannya. Program-program tersebut disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengarahkan sumber daya pembangunan pada kegiatan yang memiliki dampak strategis terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Adapun rincian program prioritas beserta rencana alokasi anggaran Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV-8 Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

TEMA	PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Daya Saing Melalui Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Wilayah untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.000.000.000,00	BKPP
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.389.715.000,00	DISNAKERTRANS
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.132.683.029,00	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	43.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.336.960.000,00	RSUD BENGKALIS
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.297.200.000,00	RSUD MANDAU
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	200.000.000,00	UPT BK RSUD PULAU RUPAT
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	87.265.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	36.932.099.740,00	DINAS SOSIAL
			159.596.987.769,00	
	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur).	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.900.000.000,00	BAPPEDA
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	521.078.762.224,00	BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.850.000.000,00	BAPENDA
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	45.126.157.985,00	SEKRETARIAT DEWAN
			569.954.920.209,00	
	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	149.330.000.000,00	DISPERKIMTAN

TEMA	PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Infrastruktur (Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem Pendukung untuk pengembangan Industri)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	45.000.900,00	DINAS PERKEBUNAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.260.000.000,00	DTPHP
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	913.241.000,00	DINAS PUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	92.701.190.756,00	DINAS PUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	49.557.644.207,00	DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.988.839.225,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	27.550.854.000,00	DINAS PUPR
			334.566.770.088,00	
	Pembangunan Kawasan Pesisir dan daerah terpencil/tertinggal (Lingkungan, Ekonomi dan Pemberdayaan)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	251.022.368,00	DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	960.000.000,00	DISPARBUDPORA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.050.000.000,00	DISPARBUDPORA
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.235.231.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	27.623.500.000,00	DINAS PUPR
			36.119.753.420,00	

Sementara itu, sinkronisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2027 perlu dilakukan supaya prioritas daerah yang telah ditetapkan bisa memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan memiliki arah yang benar denganmengutamakan syarat-syarat pelayanan minimal pada masing-masing bidang pelayanan dasar. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan standar pelayanan minimal. Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel IV-9 Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2027

No	Urusan	SPM		Program Prioritas Daerah	
1	Pendidikan	A.	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1	Program Pengelolaan Pendidikan
		B.	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		C.	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3	Program Pengembangan Kurikulum
		D.	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan)		
		E.	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		
2	Kesehatan	A.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		B.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		C.	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

No	Urusan	SPM		Program Prioritas Daerah	
					Kesehatan
		D.	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		E.	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		F.	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		G.	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		H.	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		I.	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		J.	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		K.	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunoteficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
3	Pekerjaan Umum	A.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	1	Program Penyelenggaraan Jalan
		B.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				3	Program Penataan Bangunan Gedung
				4	Program Pengelolaan dan Pengembangan

No	Urusan	SPM		Program Prioritas Daerah	
					Sistem Drainase
				5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Perumahan Rakyat	A.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		B.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	2	Program Pengembangan Perumahan
				3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
				5	Program Kawasan

No	Urusan	SPM		Program Prioritas Daerah	
					Permukiman
				6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
				7	Program Peningkatan
				8	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5	Trantibumlinmas	A.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		B.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		C.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan tergadap bencana	3	Program Penanggulangan Bencana
		D.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		E.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
6	Sosial	A.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	1	Program Pemberdayaan Sosial
		B.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	2	Program Penanganan Bencana
		C.	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar lanjut	3	Program Penanganan Warga Negara Migran

No	Urusan	SPM		Program Prioritas Daerah	
			usia di dalam panti		Korban Tindak Kekerasan
		D.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		E.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				7	Program Rehabilitasi Sosial
				8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui tahapan penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan tahunan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik melalui Konsultasi Publik Rancangan RKPD maupun Musrenbang RKPD Tahun 2027. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 tahun perencanaan kedua, diupayakan mempunyai keberpihakan terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkalis, serta memperhatikan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2027 maupun Provinsi Riau.

Dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis di tahun 2025 masih mengambarkan tingginya ketergantungan daerah pada produksi sektor migas dan turunannya perlu disikapi oleh Kabupaten Bengkalis untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah maupun diversifikasi sektor-sektor non migas, termasuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai "agen of change" pembangunan di masa depan. Namun Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menyadari bahwa masih belum optimalnya aksesibilitas utama antar wilayah di Kabupaten Bengkalis yang perlu segera di selesaikan agar pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus bergantung kepada migas.

Selain itu, upaya pembangunan daerah tahun 2027 dan kewajiban mencukupi mandatori pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas ASN dan pengawasan hendaknya sedikit banyak telah menyebabkan refocusing dalam indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah pelaksana.

Semua kondisi tersebut di atas telah tersaji dalam Rekapitulasi jumlah program, kegiatan dan pagu per prioritas disajikan pada tabel lampiran 2.

Perumusan prioritas pembangunan didasari dari:

1) Hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan,
2) Isu strategis dan target pembangunan global/nasional/daerah,
3) Arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan,
4) Arahan RPJMD serta RPJPD Kabupaten Bengkalis

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1) Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Sustainable Development Goals (17 target pembangunan berkelanjutan dunia), Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penguatan perekomonian serta kesejahteraan masyarakat.
2) Pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis.
3) Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetiti daerah; dan
4) Penyelesaian isu-isu strategis dan mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan terkait.

Untuk mandatori anggaran yang diamanatkan, aggaran urusan Pendidikan berjumlah Rp 657,856,273,883.00 atau 21,37 persen dari total anggaan belanja tahun 2027. Selajutnya pada urusan kesehatan Rp 683,451,786,216.00 , atau 22,20 persen dan Pendidikan dan Pelatihan ASN memiliki anggaran Rp 13,464,550,345.00 atau sebesar 0,5 persen dari total anggaran tahun 2027, serta Urusan APIP sebesar Rp. 15,141,205,931.01 atau sebesar 0,49 persen dari total anggaran tahun 2027. Rencana kerja dan pendanaan daerah kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2026 dipaparkan dalam matrik pada Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Tabel VI-1 berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025–2029 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027.

Tabel VI-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN DAN TARGET KINERJA UTAMA (IKU)		KET
			REALISASI 2025	TARGET 2027	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,93	2,49 - 3,06	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5	3,51–3,60	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	4,80 - 5,32	
4	Rasio Gini	Indeks	0,265	0,226 - 0,231	
5	Pendapatan Perkapita	Rp. Juta Per Tahun	292,06	309,15 - 313,44	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,02	78,06 - 78,32	
7	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,08	4,75 - 5,43	
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72,02	77,53–79,00	
9	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	42,05	43,00–45,00	
10	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	75.00	100	
11	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	82,00	82,50–85,00	
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	N/A	75,60	PUPR tidak menghitung indikator ini pada tahun 2025
13	Penurunan intensitas emisi GRK	%	16,67	20,37	

Tabel VI-2 Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Kabupaten Bengkalis tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	2,93	1,81 - 2,93	2,49 - 3,06	
2	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,5	3,17	3,51–3,60	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	4,80 - 5,34	4,80 - 5,32	
4	Rasio Gini	angka	0,265	0,226 - 0,231	0,226 - 0,231	
5	Pendapatan Perkapita (Juta)	juta	292,06	325,78 - 331,86	309,15 - 313,44	
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	77,02	77,49 - 77,84	78,06 - 78,32	
7	Tingkat Kemiskinan	%	6,08	6,09 - 6,16	4,75 - 5,43	
8	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	17,5	16,64	17,51–17,75	
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,77	68,09	68,09	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	21,2	20,68	21,21–21,50	
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,33	0,34	0,34	
12	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	angka	5.487	3.639	5.500–5.700	
13	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	6,21	4,65	6,22–6,50	
14	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	angka	79,83	69,75	79,84–80,50	
15	Nilai Tukar Petani	angka	188	182,65	182,65	
16	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	12,9	14,02	14,02	
17	Usia Harapan Hidup	usia	74,68	74,76	74,76	
18	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	13,47	13,94	13,94	
19	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,93	9,78	9,94–10,00	
20	Jumlah Prestasi Olahraga (cabang)	cabang	5	19	19	
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	89,91	90,5	90,5	
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,4	0,39	0,39	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
23	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	73,54	65,95	73,55–75,00	
24	Indeks Kesejahteraan Sosial	angka	52,17	60	60	
25	Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%		6,39-7,39	6,39-7,39	
26	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	77,52	69,57	77,53–79,00	
27	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	42,05	12,99	43,00–45,00	
28	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	%	75	100	100	
29	Indeks Pemerintah Digital	angka	N/A	1,5	1,5	
30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	92,96	96,6	96,6	
31	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	angka	N/A	98,05	98,05	
32	Persetase Peningkatan PAD	%	4,60%	5,42%	5,42%	
33	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	
34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	predikat	B	B	B	
35	Indeks Profesionalis ASN	angka	80,48	82,76	82,76	
36	Indeks Sistem Merit	angka	258,5	267,5	267,5	
37	Indeks Inovasi Daerah	angka	46,55 (Inovatif)	47,83	47,83	
38	Persentase penyelesaian konflik SARA	%	100	60,3	60,3	
39	Indeks Pelestarian Budaya Melayu	angka	1	5	5	
40	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	%	82	67	82,50–85,00	
41	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	angka	N/A	75,6	75,6	
42	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	angka	16,67	20,37	20,37	
43	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	%	82	67	82,50–85,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
44	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	52,33	53,32%	53,32%	
45	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	76,57	81,33	81,33	
46	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%)	%	95,82	96,37	96,37	
47	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%)	%	94,13	94,01	94,16	
48	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	N/A	0,93	0,93	
49	Rasio pemukiman layak huni	%	99,85	99,63	99,63	
50	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	%	65	77,8	77,8	
51	Persentase ketersediaan infrastruktur dasar wilayah perbatasan	%	N/A	63,39%	63,39%	
52	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	77,09	73,92	73,92	
53	Indeks Risiko Bencana	angka	85,76	118,07	118,07	

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk mengukur capaian kinerja makro dan strategis, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah pada tingkat dampak (*impact*) serta IKU Perangkat Daerah pada tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Keterpaduan antara indikator tingkat dampak dan tingkat hasil tersebut menggambarkan target kinerja pembangunan daerah yang akan dicapai setiap tahun. Adapun target kinerja daerah pada setiap urusan pemerintahan Tahun 2027 disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel VI-3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	9,82	9,88	9,70–9,81	
2	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih	%	70,31	78,54	78,54	
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	12,24	13.78	13.78	
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	51,63	34,3	51,64–52,50	
5	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	30	37	79,84–80,50	
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,15	1,73%	1,73%	
7	Rasio Penduduk	%	104,8	104,79	104,79	
8	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	80,47	80,28	80,28	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	394	394	
2	Angka Literasi/Numerasi					
a	Skor Literasi SD	angka	72,48	67,38	72,49–73,00	
b	Skor Numerasi SD	angka	69,76	61,66	69,77–70,25	
c	Skor Literasi SMP	angka	77,9	73,98	77,91–78,50	
d	Skor Numerasi SMP	angka	73,29	67,05	73,30–74,00	
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	5,3	55,93	55,93	
4	Indeks Masyarakat Digital	Angka	51,21	50,07	51,22–52,00	
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	51,33	64,5	64,5	
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	69,8	68,8	68,8	
7	Indeks Pembangunan Pemuda					
a	Jumlah Prestasi Olahraga (cabang)	Cabang Olahraga (Cabor)	5	19	19	
b	Persentase Wirausaha Muda	%	0,04	0,11	0,11	
8	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,61	0,67	0,67	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Angka Ketergantungan	%	49,09	41,9	41,9	
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,61	0,79 – 0,81	0,79 – 0,81	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	46,35	47,98	47,98	
4	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	N/A	62,39	62,39	
5	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	N/A	30,49	30,49	
6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	N/A	6,22	6,22	
7	Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	% PDRB	52,67	56,83	56,83	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
8	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persentase	88,5	82,51	88,55–89,00	
9	Persentase Desa Mandiri	%	100	77,35	100	
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,126	0,087		
11	Tingkat Inflasi	%	4,24	2,61 - 3,64	2,61 - 3,64	
12	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Nilai	7,02	7,96	7,96	
13	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	N/A	4,91	4,91	
14	Kontrbusi PDRB Bengkalis Terhadap PDRB Riau	%	14,66	NA	13,99 - 13,87	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Indeks Reformasi Hukum	angka	77,52	55,44	77,55–78,50	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	3,01	3,06	3,06	
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	N/A	4,45	4,45	
4	Indeks Integritas Nasional	Persentase	72,32	73,73	73,73	
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100,00%	100,00%	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	84,00	66,77	84,10–85,00	
7	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	%	74,17	74	74,20–75,00	
8	Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk	Angka	23,25	18,6	18,6	
9	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	3	83	83	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**					
A	**Pendidikan**					
1	Skor Literasi/Numerasi					
a	Skor Literasi SD	angka	72,48	67,38	72,49–73,00	
b	Skor Numerasi SD	angka	69,76	61,66	69,77–70,25	
c	Skor Literasi SMP	angka	77,9	73,98	77,91–78,50	
d	Skor Numerasi SMP	angka	73,29	67,05	73,30–74,00	
2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,93	9,78	9,94–10,00	
3	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,47	13,94	13,94	
B	**Kesehatan**					
1	Prevalensi Balita Stunting	%	5,16	16,5	5,00–5,15	
2	Jumlah kematian ibu	angka	9	13	7-8	
3	Jumlah kematian balita	angka	100	80	80	
4	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	14,23	55	55	
5	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	68	90	90	
6	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,88	98,7	98,89–99,00	
7	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	90	90	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	25	100	
9	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	61,2	71	71	
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	69	61,37	69,10–70,00	
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	angka		75,602	75,602	
2	Persentase Gedung Pelayanan Layak	%	75%	100	100	
3	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	52,33	53,32	53,32	
D	**Perumahan dan Kawasan Pemukiman**					
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	88,5	82,51	88,55–89,00	
2	Rasio pemukiman layak huni	%	99,85	99,63	99,86–100,00	
E	**Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat**					
1	Persentase Penanggulangan Bencana Banjir	%	95	100	100	
2	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	
3	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU)	angka	2,86	83	83	
4	Indeks Manajemen Satlinmas	angka	71,85	80	80	
5	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Kebakaran	%	100	100	100	
6	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	97,5	100	100	
F	**Sosial**					
1	Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	
4	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5	Persentas Korban Bencana korban Alam, Sosial dan/atau NonAlam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	
G	**Tenaga Kerja**					
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,68	94,7	94,7	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	-2,7	69	69	
3	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	%	46,35	47,98	47,98	
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	89,91	90,5	90,5	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,4	0,39	0,39	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	73,54	65,95	73,55–75,00	
I	**Pangan**					
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	79,83	69,75	79,84–80,50	
2	Persentase desa bebas dari status rawan pangan	%	99,35	99,13	99,36–100,00	
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,51	93,85	93,85	
J	**Pertanahan**					
1	Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi	angka	3	3	3	
K	**Lingkungan Hidup**					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	77,09	73,92	73,92	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	78,93	64,66	64,66	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	76,83	82,12	82,12	
4	Indeks Kualitas Lahan	Angka	74,41	74,66	74,66	
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka		0,4	0,4	
I	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan	%	98,87	99,71	99,71	
2	Rasio pasangan berakte nikah	%	82,81	88,6	88,6	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	72,61	72,52	72,62–73,00	
J	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**					
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	0,839	0,9424	0,9424	
K	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) per wanita usia subur (15-49 tahun)	angka	2,5	2,3	2,3	
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	69,8	68,8	69,85–70,50	
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	70,1	85,1	85,1	
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied of Modern Contraception)	%	79,4	97,3	97,3	
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	%	19,7	11,5	11,5	
6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	angka	23,4	12,6	12,6	
7	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	angka		87,9	87,9	
8	Indeks Lansia Berdaya	angka	69,8	63,2	69,85–70,50	
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	56,8	61,2	61,2	
L	**Perhubungan**					
1	Rasio konektivitas antar wilayah	%	82	67	82,50–85,00	
M	**Komunikasi dan Informatika**					
1	Indeks SPBE	angka	3,01	3,06	3,06	
2	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	angka	2	4	4	
N	**Koperasi Usaha Kecil Menengah**					
1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	16	5	16,10–17,00	
2	Jumlah UKM menjalin kemitraan	Unit Usaha	28	25	29-30	
O	**Penanaman Modal**					
1	Persentase peningkatan investasi	%	-0,28	2	2	
P	**Kepemudaan dan Olahraga**					
1	Indeks Partisipasi Olahraga	angka	12	104	104	
Q	**Statistik**					
1	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,26	2,6	2,6	
R	**Persandian**					
1	Tingkat Kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	33,08	41	41	
S	**Kebudayaan**					
1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	42,05	8	43,00–45,00	
2	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	%	75	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
T	**Perpustakaan**					
1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	angka	5,3	55,93	55,93	
2	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	angka	88	80	88,50–90,00	
U	**Kearsipan**					
1	Indeks Pengelolaan Kearsipan	angka	52,83	40	53,00–55,00	
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	36,27	25	36,50–38,00	
3	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	N/A	40,94	40,94	
V	**Kelautan dan Perikanan**					
1	Jumlah produksi perikanan (Ton)	ton	11.517	10.284	11.600–12.000	
2	Jumlah produksi olahan perikanan (ton)	ton	110	107	111–115	
W	**Pariwisata**					
1	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,33	0,34	0,34	
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	jiwa	5.487	3.639	5.500–5.700	
3	Jumlah Wisatawan Nusantara	jiwa	312.998	266.957	313.000–315.000	
X	**Pertanian**					
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	12,9	14,02	14,02	
Y	**Energi dan Sumber Daya Mineral**					
1	Rasio Elektrifikasi	%	100	94,67	100	
Z	**Perdagangan**					
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,52	6,53	7,53–7,75	
AA	**Perindustrian**					
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	17,5	16,64	17,51–17,75	
AB	**Transmigrasi**					
1	Tingkat Kesempatan Kerja di Wilayah Transmigrasi	%	65	94,7	94,7	
AC	**Sekretariat Daerah**					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	72,02	69,57	77,53–79,00	
AD	**Sekretariat DPRD**					
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	92,1	94,69	94,69	
AE	**Perencananaan**					
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka		84	84	
AF	**Keuangan**					
1	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	WTP	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN THN 2025	TARGET RPJMD TAHUN 2027	TARGET RKPD TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
AG	**Kepegawaian**					
1	Indeks Profesionalitas ASN	angka	80,41	82,755	82,755	
AH	**Pendidikan dan Pelatihan**					
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	angka	27,91	27,41	27,92–28,50	
AI	**Penelitian dan Pengembangan**					
1	Indeks Inovasi Daerah	angka	46,55 (Inovatif)	47,83	47,83	
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	40	45	45	
3	Indeks Kapabilitas Inovasi	angka	2,4	2,19	2,41–2,50	
AJ	**Pengawasan**					
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	Level 3	Level 3	Level 3	
AK	**Kesatuan Bangsa dan Poliktik**					
1	Indeks Harmoni Sosial	angka	6,67	6,7	6,7	
AL	**Pengelola Perbatasan**					
1	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	%	65	77,8	77,8	
AM	**Kecamatan Bengkalis**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94,09	96	96	
AN	**Kecamatan Bandar Laksamana**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	88,45	81,85	88,50–89,50	
AO	**Kecamatan Pinggir**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	85	98,4	98,4	
AP	**Kecamatan Siak Kecil**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94,78	90	94,80–95,50	
AQ	**Kecamatan Rupat Utara**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90,89	97	97	
AR	**Kecamatan Rupat**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	98,49	92	98,50–99,00	
AS	**Kecamatan Talang Muandau**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	97,07	96	97,10–98,00	
AT	**Kecamatan Bantan**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94,83	81	94,85–95,50	
AU	**Kecamatan Bathin Solapan**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	96,36	95	96,40–97,00	
AV	**Kecamatan Mandau**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	98,35	95,75	98,40–99,00	
AW	**Kecamatan Bukit Batu**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94,65	95,5	95,5	

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ini disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2027 yang bersumber dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, juga mempertimbangkan isu terkini baik nasional dan internasional yang memerlukan antisipasi pada tahun 2027. Dokumen RKPD Tahun 2027 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2027 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027.

LAMPIRAN I

Tabel Evaluasi RKPD

Kabupaten Bengkalis

Triwulan IV Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS

LAPORAN EVALUASI RKPD

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis Bermasa
Berkemajuan, hidup dan sejahtera

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pembangunan daerah, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian target pembangunan selama Tahun 2025.

Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah, baik dari aspek capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan, maupun pengelolaan anggaran pembangunan. Hasil evaluasi ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya guna mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Akhirnya, semoga Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 30 Juni 2026
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

RINTO, SE., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19810601 200903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-2

1.4 Sistematika Laporan I-2

BAB II CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2025 ..... **II-1**

2.1 Capaian Indikator Makro Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ..... II-1

A. Prioritas Pembangunan II-2

B. Hasil Evaluasi RKPD II-7

C. Capaian Kinerja SKPD II-302

D. Capaian Prioritas Pembangunan II-303

E. Capaian Kinerja Pembangunan II-315

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA **III-1**

3.1 Faktor Pendorong III-2

3.2 Faktor Penghambat III-2

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT **IV-1**

4.1 Kesimpulan IV-2

4.2 Rekomendasi IV-2

DAFTAR TABEL

2.1PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS II-2

2.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS II-6

2.3 HASIL EVALUASI RKPD II-7

2.4 TINGKAT CAPAIAN SKPD.....II-302

2.5 TINGKAT CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN II-303

2.6 CAPAIAN KINJERJA PEMBANGUNAN II-306

KABUPATEN
BENGKALIS

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta berbagai layanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (United Nations Development Programme/UNDP, 2024).

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Sementara pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Berdasarkan pasal 306 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten/Kota setiap tahunnya dan menyampaikan laporan tersebut kepada Gubenur melalui Kepala Bappeda Provinsi. Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kewajiban dalam menyusun laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan menyampaikannya ke Bappeda Provinsi setiap triwulan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 112/KPTS/I/2025 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggatan 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2025 Kabupaten Bengkalis adalah mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota, rencana program, kegiatan, kelompok, sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah dilaksanakan melalui renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Adapun tujuan dilakukannya evaluasi terhadap laporan hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Triwulan IV Tahun 2025 adalah untuk melihat sejauh mana konsistensi antara pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja Perangkat Daerah dengan capaian yang telah dilaksanakan.

D. Sistematika Laporan

Sistematika laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud tujuan dan sistematika laporan.

BAB II **Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025**

Memuat penjabaran dan analisis capaian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 beserta capaian indikator makro pembangunan.

BAB III **Faktor Pendorong Dan Penghambat**

Pencapaian Kinerja Memuat hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja prioritas pembangunan RKPD Tahun 2025.

BAB IV **Kesimpulan Dan Rekomendasi Tindak Lanjut**

Memuat kesimpulan terhadap hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja prioritas pembangunan RKPD Tahun 2025, sebagai rekomendasi untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

KABUPATEN
BENGKALIS

BAB II

CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2025

LAPORAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



BAB II
CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2025

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis yang didukung dengan program-program pembangunan pada perubahan RKPD 2025 disiapkan untuk penyelesaian isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 termasuk pencapaian program unggulan. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Prioritas Daerah
1.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
2.	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik serta perbaikan kapasitas fiskal daerah
3.	Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif
4.	Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan

Keempat fokus ini telah tersaji baik secara eksplisit maupun impilisit dalam sub-sub kegiatan pada program prioritas Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yang tersaji pada Tabel 1 sesuai dengan kelompok prioritas pembangunan yang telah ditetapkan berikut ini:

Tabel 1. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2025

Prioritas	Urusan	Program	Pagu (Rp.)
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PENDIDIKAN	Program pengelolaan pendidikan	132.890.800.398,
		Program pengembangan kurikulum	400.000.000
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	1.300.000.000
	KESEHATAN	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	126.007.742.215
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	17.199.500.000,00
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	200.000.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat bidang	350.000.000,00

Prioritas	Urusan	Program	Pagu (Rp.)
		kesehatan	
		Porgram akreditasi pelayanan kesehatan	
	SOSIAL	Program pemberdayaan sosial	3.697.583.100
		Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	8.000.000
		Program rehabilitasi sosial	2.660.000.000
		Program perlindungan dan jaminan sosial	28.748.292.420
		Program penanganan bencana	1.192.200.000
		Program pengelolaan taman makam pahlawan	470.750.000
Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik serta perbaikan kapasitas fiskal daerah;	PERENCANAAN	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3.855.300.365
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	4.480.029.613
	KEUANGAN	Program pengelolaan keuangan daerah	463.012.542.381
		Program pengelolaan barang milik daerah	6.000.000.007
		Program pengelolaan pendapatan daerah	6.680.000.000
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Program pengembangan sumber daya manusia	1.251.816.528
	KECAMATAN	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.751.238.002
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	55.324.164.470
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	2.956.568.792
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.505.371.623
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	831.568.026
Peningkatan	TENAGA	Program perencanaan tenaga kerja	230.000.000

Prioritas	Urusan	Program	Pagu (Rp.)
daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif	KERJA	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.630.514.575
		Program penempatan tenaga kerja	259.411.329
		Program hubungan industrial	5.068.556.027
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	700.000.000
		Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	430.000.000
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	300.000.000
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	360.000.000
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	2.308.000.000
		Program pengembangan umkm	650.000.000
		Program penguatan badan hukum koperasi	
	PERINDUSTRIAN	Program perencanaan dan pembangunan industri	4.247.522.000
		Program pengendalian izin usaha industri	100.000.000
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	50.000.000
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program pengelolaan perikanan tangkap	4.182.000.000
		Program pengelolaan perikanan budidaya	2.679.000.000
		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	114.000.000
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	800.000.000
	PARIWISATA	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	288.000.000
		Program pemasaran pariwisata	1.750.000.000
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	562.000.000

Prioritas	Urusan	Program	Pagu (Rp.)
	PERTANIAN	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	7.022.125.700
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	22.576.048.525
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1.047.585.346
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	530.249.543
		Program perizinan usaha pertanian	670.637.000
		Program penyuluhan pertanian	3.263.549.310
Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	25.084.109.000
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	7.066.395.590
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	8.390.631.000
		Program penataan bangunan gedung	11.073347.537
		Program penyelenggaraan jalan	92.323.964.037
		Program pengembangan jasa konstruksi	297.036.000
		Program penyelenggaraan penataan ruang	1.700.000.000
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program pengembangan perumahan	970.000.000
		Program kawasan permukiman	461.600.000
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	5.520.000.000
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	101.703.745.000
	LINGKUNGAN HIDUP	Program perencanaan lingkungan hidup	450.000.000
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.029.571.487
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	4.863.385.040
		Program pengendalian bahan berbahaya	80.000.000

Prioritas	Urusan	Program	Pagu (Rp.)
		dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	235.719.800
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100.000.000
		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	280.000.000
	Grand Total		**1.200.222.171.786**

Evaluasi RKPD Kabupaten Bengkalis memiliki 4 prioritas pembangunan dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.200.222.171.786 yang diuraikan menjadi 145 program prioritas yang dliaksanakan oleh 35 Perangkat Daerah dan 11 Kecamatan. Program prioritas terbanyak terdapat pada prioritas **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik serta perbaikan kapasitas fiskal daerah** yaitu sebanyak 22 program dengan 9 Perangkat Daerah dan 11 Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.124.848.729.108,00 dan prioritas paling sedikit terdapat pada prioritas **Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia** yaitu sebanyak 14 program prioritas di 5 Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 315.124.868.133.

Tabel 2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PROGRAM	KETERANGAN
1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	315.124.868.133	14	
2	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	561.648.599.807	22	
3	Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif	49.882.717.424	16	
4	Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan	261.629.504.491	18	
TOTAL		**1.200.222.171.786**		

B. HASIL EVALUASI RKPD

TABEL 3. EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DAN PROGRAM PRIORITAS TRIWULAN IV TAHUN 2024

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.059.200.237.496**		**961.932.872.171**	**119,72**	**90,82**		
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**743.302.009.279**		**727.604.236.360**	**330,19**	**97,89**	Dinas Pendidikan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (%)	80		2		2,5	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			95,73		0	0		
2.	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			812.383.000		794.023.200	150	97,74		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		6		0	0		
3.	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			519.299.000		517.480.800	200	99,65		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		6		200	0		
		Persentase Prencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
4.	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			293.084.000		276.542.400	100	94,36		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
5.	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			730.126.616.782		716.146.497.102	50	98,09		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0		3		0	0		
6.	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			730.076.483.304		716.124.873.502	0	98,09		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0		3		0	0		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12		6		0	0		
7.	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			50.133.478		21.623.600	50	43,13		

		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12		6		50	0		
8.	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			804.600.000		696.000.000	66,67	86,5		
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		8		0	0		
9.	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			804.600.000		696.000.000	66,67	86,5		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		8		66,67	0		
10.	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.385.945.460		1.169.487.200	46,73	84,38		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		0	0		
11.	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			295.380.000		295.380.000	100	100		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		100	0		
		Bimbingan teknis administrasi peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		2		0	0		
12.	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			206.262.000		6.340.000	40	3,07		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		2		40	0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		1		0	0		
13.	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			884.303.460		867.767.200	0,2	98,13		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		1		0,2	0		
14.	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.956.756.755		3.463.037.658	782,29	87,52		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		40		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
15.	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			177.300.000		171.300.000	2000	96,62		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		40		2000	0		
16.	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			63.877.295		63.625.295	100	99,61		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		0	0		
17.	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			657.733.393		533.882.861	100	81,17		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		100	0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		24		0	0		
18.	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.500.932.000		1.499.037.956	1200	99,87		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		24		1200	0		

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
19.	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			413.200.000		312.745.000	100	75,69		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
		umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		18		0	0		
20.	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			115.830.853		103.895.432	225	89,7		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		18		225	0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		24		0	0		
21.	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			399.183.214		352.166.114	2400	88,22		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		24		2400	0		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3		4		0	0		
22.	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			628.700.000		426.385.000	133,33	67,82		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3		4		133,33	0		
23.	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			193.061.782		172.685.782	125	89,45		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		3		0	0		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
24.	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			70.000.000		49.624.000	150	70,89		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		3		150	0		
25.	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			123.061.782		123.061.782	100	100		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
26.	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.645.955.500		4.012.450.213	177,78	86,36		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
27.	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.008.317.000		501.442.053	100	49,73		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
28.	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.070.056.000		980.428.160	100	91,62		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		40		0	0		

29.	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.567.582.500		2.530.580.000	333,33	98,56		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		40		333,33	0		
30.	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.376.690.000		1.150.055.205	81,52	83,54		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		5		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24		24		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	115		30		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		0	0		
31.	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		184.602.689	0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		5		0	0		
32.	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			649.990.000		615.138.016	100	94,64		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24		24		100	0		
33.	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.700.000		150.600.000	26,09	99,93		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	115		30		26,09	0		
34.	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			376.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0	0		
35.	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000.000		199.714.500	200	99,86		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		200	0		
36.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**315.898.228.217**		**234.328.635.811**	**60,29**	**74,18**	Dinas Pendidikan	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD (APS) (%)			54,03		0	0		
			Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)			98,83		0	0		
			Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)			55,1		0	0		
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) (%)			21,33		0	0		
			Angka Partisipasi Sekolah (Rata-rata) (%)	96,56		99,48		103,02	0		

37.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			172.874.461.812		146.640.520.457	86,49	84,82		
		Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	15		6		0	0		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		0	0		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7		5		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	28		0		0	0		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	16		0		0	0		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	14		0		0	0		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		2		0	0		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	13		0		0	0		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	6		2		0	0		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		9		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	66		66		0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	4221		4.221		0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	884		884		0	0		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	361		361		0	0		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	722		361		0	0		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	5		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	50		0		0	0		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50		40		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	15		15		0	0		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	361		361		0	0		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1		0		0	0		

			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6		0		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		5		0	0		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	365		365		0	0		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	24		0		0	0		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1101		1.101		0	0		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
38.	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			315.740.532		8.960.000	100	2,84		
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		100	0		
39.	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.746.790.770		1.115.548.908	40	63,86		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	15		6		40	0		
40.	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			15.490.000		-	0	0		
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		0	0		
41.	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			459.605.462		232.553.600	71,43	50,6		
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7		5		71,43	0		
42.	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			8.059.905.583		4.675.782.746	0	58,01		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	28		0		0	0		
43.	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.117.072.972		540.239.248	0	48,36		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	16		0		0	0		
44.	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			310.241.862		10.850.000	0	3,5		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	14		0		0	0		
45.	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			444.841.862		27.620.000	100	6,21		
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		2		100	0		
46.	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			740.541.549		14.792.000	0	2		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	13		0		0	0		
47.	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			16.664.583.142		8.053.366.710	33,33	48,33		
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	6		2		33,33	0		
48.	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			7.956.875.084		7.891.100.445	900	99,17		
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		9		900	0		

49.	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			690.247.665		614.000	100	0,09		
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		1		100	0		
50.	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			566.190.960		454.428.336	100	80,26		
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	66		66		100	0		
51.	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			36.069.934.856		35.802.314.175	100	99,26		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	4221		4.221		100	0		
52.	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.237.088.453		1.001.459.151	100	80,95		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	884		884		100	0		
53.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			67.819.748.000		67.819.748.000	100	100		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	361		361		100	0		
54.	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			207.923.748		176.801.300	50	85,03		
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	722		361		50	0		
55.	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			333.415.586		19.560.000	20	5,87		
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	5		1		20	0		
56.	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			68.302.382		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	50		0		0	0		
57.	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			184.283.095		62.800.200	80	34,08		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50		40		80	0		
58.	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			911.358.000		643.279.654	100	70,58		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	15		15		100	0		
59.	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			206.746.569		148.874.087	100	72,01		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	361		361		100	0		
60.	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			1.960.000.000		1.499.373.600	0	76,5		
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1		0		0	0		
61.	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.529.519.143		1.523.556.400	100	99,61		
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		
62.	1.01.02.2.01.004	Pembangunan Ruang Kelas Baru			3.073.584.480		1.939.148.368	0	63,09		

	7										
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6		0		0	0		
63.	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			687.368.138		8.880.000	100	1,29		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		5		100	0		
64.	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			192.843.578		162.957.357	100	84,5		
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	365		365		100	0		
65.	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			5.829.496.842		2.442.010.174	0	41,89		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	24		0		0	0		
66.	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			831.369.102		827.735	100	0,1		
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1101		1.101		100	0		
67.	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			12.643.352.397		10.363.074.263	100	81,96		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		
68.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			106.348.669.009		62.157.971.827	29,15	58,45		
		Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		0	0		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	9		0		0	0		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0	0		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0	0		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3		0		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	21		7		0	0		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		1		0	0		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		0	0		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	12		0		0	0		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	150		75		0	0		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	380		80		0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	2002		2.002		0	0		

			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	550		550		0	0		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	116		0		0	0		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	198		198		0	0		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	50		50		0	0		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	100		0		0	0		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	116		0		0	0		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	4000		4.000		0	0		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	7		1		0	0		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5000		0		0	0		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0	0		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	14		14		0	0		
69.	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			294.880.000		7.320.000	0	2,48		
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		0	0		
70.	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.505.370.000		24.590.000	0	1,63		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	9		0		0	0		
71.	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			21.680.000		6.960.000	0	32,1		
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0	0		
72.	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			-		-	0	0		
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0	0		
73.	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			70.020.000		14.670.000	0	20,95		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3		0		0	0		
74.	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			5.470.298.809		2.019.557.848	33,33	36,92		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	21		7		33,33	0		
75.	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.475.823.026		394.573.026	10	15,94		
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		1		10	0		
76.	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			27.050.000		-	0	0		

			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0	0		
77.	1.01.02.2.02.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			543.497.968		523.497.968	0	96,32		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		0	0		
78.	1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah			13.522.577.700		3.418.221.500	0	25,28		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	12		0		0	0		
79.	1.01.02.2.02.0027		Pengadaan Perlengkapan Sekolah			7.027.695.250		7.027.162.250	0	99,99		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0	0		
80.	1.01.02.2.02.0032		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			809.336.060		352.087.060	50	43,5		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	150		75		50	0		
81.	1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			984.722.722		470.752.681	21,05	47,81		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	380		80		21,05	0		
82.	1.01.02.2.02.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			21.502.044.217		21.545.789.564	100	100,2		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	2002		2.002		100	0		
83.	1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			426.702.663		174.277.972	100	40,84		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	550		550		100	0		
84.	1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			550.988.335		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	116		0		0	0		
85.	1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			31.025.874.000		15.512.947.000	100	50		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	198		198		100	0		
86.	1.01.02.2.02.0043		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			214.229.378		178.192.992	100	83,18		
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	50		50		100	0		
87.	1.01.02.2.02.0054		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			-		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	100		0		0	0		
88.	1.01.02.2.02.0055		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			-		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	116		0		0	0		
89.	1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			386.291.637		185.483.637	100	48,02		

		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	4000		4.000		100	0		
90.	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.609.058.245		1.043.478.245	14,29	39,99		
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	7		1		14,29	0		
91.	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			1.600.000.000		-	0	0		
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5000		0		0	0		
92.	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			234.100.000		-	0	0		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0	0		
93.	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			15.046.429.000		9.258.410.084	100	61,53		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	14		14		100	0		
94.	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			31.966.234.715		21.870.999.349	58,31	68,42		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	13		1		0	0		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1956		0		0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	2068		2.068		0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	500		500		0	0		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	420		420		0	0		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0		452		0	0		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1956		1.956		0	0		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	13		0		0	0		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		1		0	0		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		2		0	0		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	7		0		0	0		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		2		0	0		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1956		0		0	0		

			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0	0		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	3		0		0	0		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	13		13		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	420		420		0	0		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	2		0		0	0		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0	0		
95.	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.647.210.625		204.774.314	7,69	12,43		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	13		1		7,69	0		
96.	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			230.403.020		60.670.308	100	26,33		
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		
97.	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD			-		-	0	0		
		Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	1		0		0	0		
98.	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			530.403.020		298.095.154	100	56,2		
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		
99.	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			278.161.528		-	0	0		
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1956		0		0	0		
100.	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			13.588.048.657		13.561.094.655	100	99,8		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	2068		2.068		100	0		
101.	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			552.002.221		49.134.800	100	8,9		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	500		500		100	0		
102.	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			913.450.250		682.179.530	100	74,68		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	420		420		100	0		
103.	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			7.646.111.000		4.459.976.546	0	58,33		

			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0		452		0	0		
104.	1.01.02.2.03.0019		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			257.794.142		214.380.403	100	83,16		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1956		1.956		100	0		
105.	1.01.02.2.03.0020		Pemeliharaan Mebel Sekolah			129.993.020		29.835.154	0	22,95		
			Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	13		0		0	0		
106.	1.01.02.2.03.0026		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			236.900.118		200.973.000	50	84,83		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		1		50	0		
107.	1.01.02.2.03.0028		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			249.599.355		14.260.383	100	5,71		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		2		100	0		
108.	1.01.02.2.03.0029		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			-		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	7		0		0	0		
109.	1.01.02.2.03.0030		Pembangunan Ruang Kelas Baru			696.167.564		11.105.154	100	1,6		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		2		100	0		
110.	1.01.02.2.03.0034		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			401.741.070		19.260.000	0	4,79		
			Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1956		0		0	0		
111.	1.01.02.2.03.0037		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			196.420.715		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0	0		
112.	1.01.02.2.03.0038		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			505.000.000		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	3		0		0	0		
113.	1.01.02.2.03.0040		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			38.106.413		22.853.077	100	59,97		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		100	0		
114.	1.01.02.2.03.0041		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			224.627.795		24.585.385	100	10,94		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		
115.	1.01.02.2.03.0042		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			226.140.000		226.093.119	100	99,98		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	13		13		100	0		
116.	1.01.02.2.03.0045		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			126.516.567		6.405.231	100	5,06		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4		4		100	0		
117.	1.01.02.2.03.0046		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			1.523.125.500		1.208.959.900	100	79,37		

		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1		1		100	0		
118.	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			548.638.367		176.689.468	100	32,21		
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	420		420		100	0		
119.	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			100.000.000		-	0	0		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	2		0		0	0		
120.	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.119.673.768		399.673.768	0	35,7		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0	0		
121.	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4.708.862.681		3.659.144.178	68,75	77,71		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	350		0		0	0		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	326		360		0	0		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	9		9		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	300		100		0	0		
122.	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			1.849.754.000		1.652.676.000	0	89,35		
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	350		0		0	0		
123.	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			756.188.287		736.171.498	110,43	97,35		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	326		360		110,43	0		
124.	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			1.832.100.000		1.068.663.930	100	58,33		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	9		9		100	0		
125.	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			74.722.530		67.500.000	100	90,33		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		2		100	0		
126.	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			196.097.864		134.132.750	33,33	68,4		
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	300		100		33,33	0		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**788.781.710.334**		**374.317.017.816**	**59,82**	**47,46**		
127.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**465.511.862.298**		**167.801.581.221**	**39,67**	**36,05**	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan (%)	100		100		100	0		

			Persentase pelaksanaan penunjangurusan pemerintah yang dilaksanakan diRumah Sakit Umum Daerah KecamatanMandau (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah di RSUD Mandau (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			400		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor (%)	100		100		100	0		
128.	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			432.538.198		348.196.357	32,63	80,5		
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	17		13		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	56		12		0	0		
129.	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			153.411.788		153.941.357	76,47	100,35		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	17		13		76,47	0		
130.	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.269.410		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		0	0		
131.	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			275.857.000		194.255.000	21,43	70,42		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	56		12		21,43	0		
132.	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			267.687.554.120		123.656.084.040	0	46,19		
		Persentase penyediaan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1510		0		0	0		
133.	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			267.687.554.120		123.656.084.040	0	46,19		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1510		0		0	0		
134.	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.244.085.000		2.179.868.000	42,86	67,2		
		Persentase penyediaan administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	14		12		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		0		0	0		
135.	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			3.049.025.000		2.179.868.000	85,71	71,49		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	14		12		85,71	0		
136.	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			195.060.000		-	0	0		

		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		0		0	0		
137.	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37.303.000		37.030.000	2	99,27		
		Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		4		0	0		
138.	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0	0		
139.	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			37.303.000		37.030.000	4	99,27		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		4		4	0		
140.	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.383.221.093		2.441.084.240	51,58	102,43		
		Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		2		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	70		36		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	405		100		0	0		
141.	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.370.354		-	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
142.	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.054.161.239		1.140.598.240	33,33	108,2		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		2		33,33	0		
143.	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			158.158.000		159.360.000	100	100,76		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
144.	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			158.008.500		150.000.000	100	94,93		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
145.	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.400.000		100.000.000	51,43	99,6		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	70		36		51,43	0		
146.	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			907.123.000		891.126.000	24,69	98,24		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	405		100		24,69	0		

147.	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.300.886.266		-	0	0		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
148.	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.260.886.266		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
149.	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
150.	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
151.	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.647.707.298		2.348.080.464	71,11	24,34		
		Persentase Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	18		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	18		12		0	0		
152.	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.692.757.647		457.057.644	80	27		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15		12		80	0		
153.	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.808.624.651		783.022.820	66,67	13,48		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	18		12		66,67	0		
154.	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.146.325.000		1.108.000.000	66,67	51,62		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	18		12		66,67	0		
155.	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.566.408.596		3.207.869.344	44,22	57,63		
		Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksankan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		32		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29		0		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	772		0		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		2		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		0	0		

156.	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			640.638.061		640.642.736	71,11	100		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		32		71,11	0		
157.	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.778.845		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29		0		0	0		
158.	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			32.740.080		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	772		0		0	0		
159.	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.430.225.000		2.163.200.000	50	48,83		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		2		50	0		
160.	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			456.026.610		404.026.608	100	88,6		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100	0		
161.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			175.212.158.727		33.583.368.776	100	19,17		
		Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang menerapkan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	22		22		0	0		
162.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			175.212.158.727		33.583.368.776	100	19,17		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	22		22		100	0		
163.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**282.065.312.841**		**192.541.078.357**	**69,59**	**68,26**	Dinas Kesehatan	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)			85		0	0		
			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100		100		100	0		
			Persentase lanjut usia yang mandiri (%)			0		0	0		
			Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan Rumah Sakit (%)	100		100		100	0		
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)			75		0	0		
			Jumlah Kematian Ibu (Kasus)					0	0		
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)					0	0		
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)					0	0		
			Cakupan penemuan kasus TB (%)					0	0		
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)					0	0		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)					0	0		

			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)					0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam system informasi kesehatan nasional (%)					0	0		
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)					0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)					0	0		
			Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit (%)	100				0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)					0	0		
164.	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			149.755.247.581		94.493.207.544	52,9	63,1		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	11		8		0	0		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	3		1		0	0		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	3		0		0	0		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	27		20		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	22		0		0	0		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	305		20		0	0		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	10		12		0	0		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	25		0		0	0		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	2		1		0	0		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	64		50		0	0		
165.	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4.518.487.593		1.457.533.592	72,73	32,26		
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	11		8		72,73	0		

166.	1.02.02.2.01.0004		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		846.323.375		846.323.372	33,33	100		
			Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	3		1		33,33	0		
167.	1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas			3.579.591.964		3.579.591.964	100	100		
			Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	4		4		100	0		
168.	1.02.02.2.01.0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.274.753.703		1.274.753.700	100	100		
			Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	4		4		100	0		
169.	1.02.02.2.01.0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			39.200.000		-	0	0		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	3		0		0	0		
170.	1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			3.173.175.736		1.963.175.972	74,07	61,87		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	27		20		74,07	0		
171.	1.02.02.2.01.0011		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			21.600.000		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	22		0		0	0		
172.	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			84.306.985.365		37.262.382.428	6,56	44,2		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	305		20		6,56	0		
173.	1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			268.996.305		268.996.304	120	100		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	10		12		120	0		
174.	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100.000.000		-	0	0		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	25		0		0	0		
175.	1.02.02.2.01.0022		Pengembangan Rumah Sakit			17.800.295.917		42.003.344.332	50	235,97		
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	2		1		50	0		
176.	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			33.825.837.623		5.837.105.880	78,13	17,26		

		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	64		50		78,13	0		
177.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			131.553.281.246		97.614.214.678	74,42	74,2		
		Persentase Capaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12394		12.915		0	0		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11831		11.828		0	0		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11268		11.268		0	0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	54600		54.600		0	0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	139346		139.346		0	0		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	398574		398.572		0	0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35339		35.336		0	0		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	122614		93.920		0	0		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	80667		80.664		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	909		45		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9663		9.660		0	0		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	14957		13.495		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	2		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	5		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	2015		0		0	0		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	999		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	10		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	3		2		0	0		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1791		1.841		0	0		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	98		96		0	0		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5		2		0	0		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		0		0	0		
178.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			1.489.195.584		199.500.000	104,2	13,4		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12394		12.915		104,2	0		
179.	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			49.980.000		49.980.000	99,97	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11831		11.828		99,97	0		
180.	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			37.417.200		37.417.200	100	100		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11268		11.268		100	0		
181.	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			37.097.000		37.097.000	100	100		

			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	54600		54.600		100	0		
182.	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			1.002.474.576		16.752.580	100	1,67		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	139346		139.346		100	0		
183.	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			32.508.920		32.508.920	100	100		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	398574		398.572		100	0		
184.	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			102.929.000		32.809.000	99,99	31,88		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35339		35.336		99,99	0		
185.	1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			31.564.660		31.564.660	76,6	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	122614		93.920		76,6	0		
186.	1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			18.739.720		18.739.720	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	80667		80.664		100	0		
187.	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			225.965.820		39.715.820	4,95	17,58		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	909		45		4,95	0		
188.	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			438.260.300		58.003.000	99,97	13,23		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9663		9.660		99,97	0		
189.	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			350.472.496		350.472.496	90,23	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	14957		13.495		90,23	0		
190.	1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			40.408.160		40.408.160	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1		1		100	0		
191.	1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			25.345.100		25.345.100	50	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	2		1		50	0		
192.	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			4.149.818.232		87.874.000	100	2,12		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2		2		100	0		
193.	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			166.464.000		53.834.000	100	32,34		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	2		2		100	0		

194.	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			492.635.981		248.452.840	100	50,43		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	2		2		100	0		
195.	1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			245.470.068		23.418.000	80	9,54		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	5		4		80	0		
196.	1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			8.910.000		8.910.000	100	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1		1		100	0		
197.	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan			621.242.843		331.780.440	100	53,41		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	3		3		100	0		
198.	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			114.030.000		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	2015		0		0	0		
199.	1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			24.378.020		24.378.020	0,3	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	999		3		0,3	0		
200.	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			2.580.372.501		210.665.000	40	8,16		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	10		4		40	0		
201.	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			97.195.721.501		78.770.166.512	100	81,04		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		100	0		
202.	1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			49.942.000		49.942.000	100	100		
			Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1		1		100	0		
203.	1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit			5.725.558.890		6.626.294.692	100	115,73		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		1		100	0		
204.	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas			12.772.651.253		8.156.264.872	100	63,86		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		100	0		
205.	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.380.864.758		1.849.018.756	100	77,66		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	2		2		100	0		
206.	1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			36.623.740		30.163.740	66,67	82,36		
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	3		2		66,67	0		
207.	1.02.02.2.02.0038		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			-		-	0	0		

			Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1		0		0	0		
208.	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			39.167.000		30.613.740	102,79	78,16		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1791		1.841		102,79	0		
209.	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			84.025.150		84.025.150	97,96	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	98		96		97,96	0		
210.	1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			45.189.955		35.673.000	40	78,94		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5		2		40	0		
211.	1.02.02.2.02.0043		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			22.426.260		22.426.260	100	100		
			Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1		1		100	0		
212.	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			301.265.506		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		0		0	0		
213.	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			272.690.696		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0	0		
214.	1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			341.474.356		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		0		0	0		
215.	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			633.649.879		310.522.000	0,02	49,01		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	77463		12		0	0		
216.	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			633.649.879		310.522.000	0,02	49,01		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	77463		12		0,02	0		
217.	1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			123.134.135		123.134.135	100	100		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	6		6		0	0		
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	6		6		0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1		1		0	0		
218.	1.02.02.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			40.408.962		40.408.962	100	100		
			Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	6		6		100	0		
219.	1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			47.715.789		47.715.789	100	100		

		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	6		6		100	0		
220.	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			35.009.384		35.009.384	100	100		
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1		1		100	0		
221.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**39.888.623.485**		**13.698.378.000**	**35,85**	**34,34**	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase peningkatan dan pengembangan tenagakesehatan (%)	100				0	0		
			Persentase peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit (%)	100				0	0		
			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)					0	0		
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000)					0	0		
			Persentae peningkatan kapasitas seumber daya manusia kesehatan (%)	100				0	0		
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)					0	0		
			Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)					0	0		
222.	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			23.140.000		23.140.000	54,27	100		
		Persentase tenaga kesehatan memiliki izin praktek di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	32		32		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	585		50		0	0		
223.	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			10.180.000		10.180.000	100	100		
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	32		32		100	0		
224.	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			12.960.000		12.960.000	8,55	100		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	585		50		8,55	0		
225.	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			38.709.336.845		13.646.478.000	34,44	35,25		
		Jumlah Puskesmas dan RSUD yang tenaga kesehatannya sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	8		4		0	0		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1153		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	30		16		0	0		
226.	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			24.986.000		24.986.000	50	100		
		Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	8		4		50	0		
227.	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			38.598.459.040		13.535.600.000	0	35,07		

		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1153		0		0	0		
228.	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			85.891.805		85.892.000	53,33	100		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	30		16		53,33	0		
229.	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.156.146.640		28.760.000	3,22	2,49		
		Presentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya dengan Ujian Kompetensi, Fungsional dan Bimbingan Teknis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	622		20		0	0		
230.	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.156.146.640		28.760.000	3,22	2,49		
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	622		20		3,22	0		
231.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**751.434.238**		**100.970.238**	**94,44**	**13,44**	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (%)	95				0	0		
			Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)					0	0		
232.	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			688.960.000		38.496.000	88,89	5,59		
		Jumlah Apotek yang memenuhi syarat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	18		16		0	0		
233.	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			688.960.000		38.496.000	88,89	5,59		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	18		16		88,89	0		
234.	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			62.474.238		62.474.238	100	100		
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	2		2		0	0		
235.	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			62.474.238		62.474.238	100	100		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	2		2		100	0		
236.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**564.477.472**		**175.010.000**	**80**	**31**	Dinas Kesehatan	

		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)					0	0		
			Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100				0	0		
237.	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000		25.000.000	100	100		
		Cakupan Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	12		12		0	0		
238.	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			25.000.000		25.000.000	100	100		
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	12		12		100	0		
239.	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			87.664.000		87.564.000	50	99,89		
		Cakupan Tatanan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	174656		12		0	0		
240.	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			50.100.000		50.000.000	100	99,8		
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	12		12		100	0		
241.	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			37.564.000		37.564.000	0,01	100		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	174656		12		0,01	0		
242.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			451.813.472		62.446.000	120	13,82		
		Cakupan Posyandu Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	10		12		0	0		
243.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			451.813.472		62.446.000	120	13,82		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	10		12		120	0		
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**488.688.054.015**		**385.367.994.276**	**8757,19**	**78,86**		
244.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.686.122.977**		**23.267.530.911**	**53,99**	**94,25**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)	100		94,02		94,02	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)					0	0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		59,63		59,63	0		
245.	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			799.514.687		799.356.229	100	99,98		

		Persentase terlaksananya pembuatan laporan dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
246.	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			799.514.687		799.356.229	100	99,98		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
247.	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.666.262.481		11.966.815.895	85,56	94,48		
		Persentase administrasi keuangan dalam satu tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		77		0	0		
248.	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.666.262.481		11.966.815.895	85,56	94,48		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		77		85,56	0		
249.	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.608.834.400		1.589.565.200	30	98,8		
		Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	50		15		0	0		
250.	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.608.834.400		1.589.565.200	30	98,8		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	50		15		30	0		
251.	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.306.267.645		1.303.457.856	45,19	99,78		
		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		3		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	800		475		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		18		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	23		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	466		15		0	0		
252.	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.794.298		24.794.298	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		100	0		
253.	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			301.715.928		301.715.928	8,57	100		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		3		8,57	0		
254.	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44.885.000		44.885.000	59,38	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	800		475		59,38	0		
255.	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			60.007.884		60.007.884	100	100		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		18		100	0		
256.	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.500.000		2.500.000	0	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	23		0		0	0		

257.	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			872.364.535		869.554.746	3,22	99,68		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	466		15		3,22	0		
258.	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			167.043.165		99.600.000	19,67	59,63		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam satu tahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	483		95		0	0		
259.	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			167.043.165		99.600.000	19,67	59,63		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	483		95		19,67	0		
260.	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.880.471.630		4.525.375.078	33,33	92,72		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		18		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24		6		0	0		
261.	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.175.275.000		2.008.270.000	25	92,32		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		25	0		
262.	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			573.070.750		562.777.750	50	98,2		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		18		50	0		
263.	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.132.125.880		1.954.327.328	25	91,66		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24		6		25	0		
264.	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.257.728.969		2.983.360.653	85,83	91,58		
		Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam satu tahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		23		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		28		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
265.	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			123.980.000		117.433.000	57,5	94,72		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		23		57,5	0		
266.	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.737.785.374		1.705.472.058	200	98,14		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		28		200	0		
267.	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.395.963.595		1.160.455.595	0	83,13		

		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
268.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**95.580.921.944**		**45.547.656.334**	**137,09**	**47,65**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)					0	0		
			Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)					0	0		
			Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik; Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur; Panjang infrastruktur pengaman tebing untuk daerah rawan longsor; Jumlah unit air baku dalam kondisi baik ()			75,85		0	0		
269.	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			93.326.534.944		43.947.916.204	130,11	47,09		
		Persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi insfrastruktur	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		2		0	0		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	12		1		0	0		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	150		553		0	0		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	0.072		0,1		0	0		
			Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	1		1		0	0		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)	1.17		1,86		0	0		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi (KM)	0.16		0,2		0	0		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)	0		0,1		0	0		
			Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	82.16		1		0	0		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	3		0		0	0		
270.	1.03.02.2.01.0071	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku			102.243.020		102.243.020	200	100		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		2		200	0		
271.	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			143.396.674		140.591.374	8,33	98,04		
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	12		1		8,33	0		
272.	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai			81.918.542.417		35.736.453.977	368,67	43,62		
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	150		553		368,67	0		
273.	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			599.086.980		599.086.980	138,89	100		
		Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	0.072		0,1		138,89	0		

274.	1.03.02.2.01.0108	Rehabilitasi Unit Air Baku			9.773.550		9.773.550	100	100		
		Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	1		1		100	0		
275.	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			8.664.122.652		5.754.067.652	158,97	66,41		
		Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)	1.17		1,86		158,97	0		
276.	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			380.960.940		380.960.940	125	100		
		Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi (KM)	0.16		0,2		125	0		
277.	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			269.319.300		269.319.300	0	100		
		Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)	0		0,1		0	0		
278.	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir			755.777.384		472.227.384	1,22	62,48		
		Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	82.16		1		1,22	0		
279.	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			179.201.867		179.201.867	200	100		
		Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1		2		200	0		
280.	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			304.110.160		303.990.160	0	99,96		
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	3		0		0	0		
281.	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.254.387.000		1.599.740.130	172	70,96		
		Persentasi daerah irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	5		2,2		0	0		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0		5,1		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1		3		0	0		
282.	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa			1.467.433.000		815.893.642	44	55,6		
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	5		2,2		44	0		
283.	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa			449.200.000		449.200.000	0	100		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0		5,1		0	0		
284.	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			337.754.000		334.646.488	300	99,08		
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1		3		300	0		
285.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**45.531.661.711**		**38.505.146.467**	**86**	**84,57**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)					0	0		
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, panjang jaringan perpipaan yang terbangun ()			71,35		0	0		

286.	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			45.531.661.711		38.505.146.467	86	84,57		
		Persentase rumah memiliki jaringan air bersih	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	0		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	2		3		0	0		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	7.5		7,5		0	0		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	50		0		0	0		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	10		8		0	0		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	250		250		0	0		
287.	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			12.000.000		12.000.000	0	100		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	0		0		0	0		
288.	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			835.624.400		604.842.000	150	72,38		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	2		3		150	0		
289.	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			20.191.263.044		20.112.393.043	100	99,61		
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	7.5		7,5		100	0		
290.	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			-		-	0	0		
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	50		0		0	0		
291.	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			2.699.610.000		1.185.130.222	80	43,9		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	10		8		80	0		
292.	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			21.793.164.267		16.590.781.202	100	76,13		
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	250		250		100	0		
293.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**6.433.581.291**		**4.501.729.691**	**50**	**69,97**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)			0		0	0		
294.	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			6.433.581.291		4.501.729.691	50	69,97		
		Persentase desa yang dilayani pengangkutan sampah	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/hari)	0		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	6		0		0	0		

			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	4		4		0	0		
295.	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			1.756.092.491		1.656.092.491	0	94,31		
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/hari)	0		0		0	0		
296.	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			2.764.846.800		1.717.395.200	0	62,12		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	6		0		0	0		
297.	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			1.912.642.000		1.128.242.000	100	58,99		
		Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	4		4		100	0		
298.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**9.566.897.776**		**9.092.135.176**	**108,33**	**95,04**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)					0	0		
			Meningkatnya Pengelolaan air limbah domestik (Desa)	14				0	0		
299.	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.566.897.776		9.092.135.176	108,33	95,04		
		Persentase Desa Penerima sarana Prasarana Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0		0		0	0		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	300		350		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	3		3		0	0		
300.	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			1.089.299.010		1.089.299.010	0	100		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0		0		0	0		
301.	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			7.284.401.766		7.281.140.766	116,67	99,96		
		Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	300		350		116,67	0		
302.	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			1.193.197.000		721.695.400	100	60,48		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	3		3		100	0		
303.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**22.144.236.663**		**16.285.690.980**	**104080**	**73,54**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)					0	0		
			Persentase luas kawasan bebas banjir (%)	85,1		85,1		100	0		
304.	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			22.144.236.663		16.285.690.980	104080,4	73,54		
		Persentase luas kawasan bebas banjir	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	2000		2.040		0	0		

			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan)	5		0		0	0		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1		1.700		0	0		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1		3.502		0	0		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	2		2		0	0		
305.	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			5.897.393.552		2.216.279.229	102	37,58		
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	2000		2.040		102	0		
306.	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan			630.328.522		630.328.522	0	100		
		Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan)	5		0		0	0		
307.	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			728.640.000		317.665.762	170000	43,6		
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1		1.700		170000	0		
308.	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			14.650.555.589		12.900.192.967	350200	88,05		
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1		3.502		350200	0		
309.	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			237.319.000		221.224.500	100	93,22		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	2		2		100	0		
310.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**40.392.925.459**		**35.778.453.698**	**257,5**	**88,58**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)					0	0		
			Persentase bangunan gedung yang layak (%)	57,40				0	0		
311.	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			40.392.925.459		35.778.453.698	257,5	88,58		
		Persentase Bangunan Gedung Yang Layak	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	5		9		0	0		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		15		0	0		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	20		130		0	0		
312.	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			2.467.098.000		1.349.678.000	180	54,71		

		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	5		9		180	0		
313.	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			133.726.000		85.693.200	100	64,08		
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	4		4		100	0		
314.	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			37.198.878.259		34.108.088.098	100	91,69		
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		15		100	0		
315.	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			593.223.200		234.994.400	650	39,61		
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	20		130		650	0		
316.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**242.493.046.394**		**210.735.058.353**	**42,33**	**86,9**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik (Km) (Km)	672,122		498,13		74,11	0		
			Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)			100		0	0		
317.	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			242.493.046.394		210.735.058.353	42,33	86,9		
		Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi mantap (Km)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	7		6		0	0		
			Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	1		0		0	0		
			Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	1		0		0	0		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2.1		2,1		0	0		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	4		0		0	0		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	6		3		0	0		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1311961		1.311,96		0	0		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	38		39,06		0	0		
318.	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			4.811.909.387		1.850.710.367	85,71	38,46		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	7		6		85,71	0		

319.	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan			3.804.105.133		3.804.105.133	0	100		
		Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	1		0		0	0		
320.	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			25.622.000		24.755.160	0	96,62		
		Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	1		0		0	0		
321.	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan			185.406.627.998		172.773.463.670	100	93,19		
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2.1		2,1		100	0		
322.	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan			983.629.315		741.248.459	0	75,36		
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	4		0		0	0		
323.	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			16.127.438.537		14.331.951.640	50	88,87		
		Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	6		3		50	0		
324.	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			2.074.877.762		1.067.017.762	0,1	51,43		
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1311961		1.311,96		0,1	0		
325.	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan			29.258.836.262		16.141.806.162	102,79	55,17		
		Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	38		39,06		102,79	0		
326.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**598.838.200**		**553.349.180**	**79,17**	**92,4**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (%)	100		100		100	0		
			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)					0	0		
327.	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			598.838.200		553.349.180	79,17	92,4		
		Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	2		0		0	0		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	12		19		0	0		
328.	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			37.220.000		37.070.000	0	99,6		
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	2		0		0	0		
329.	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI			561.618.200		516.279.180	158,33	91,93		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	12		19		158,33	0		
330.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**1.259.821.600**		**1.101.243.486**	**61,75**	**87,41**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten (%)					0	0		
			Persentase Kepastian pemberian informasi dan perizinan terkait tata ruang; Jumlah Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang; Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Penataan Ruang; Jumlah Koordinasi Tata Ruang ()			96		0	0		

331.	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			740.568.400		651.399.086	25	87,96		
		Jumlah Dokumen RTR	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		1		0	0		
332.	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			740.568.400		651.399.086	25	87,96		
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		1		25	0		
333.	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			431.610.000		372.549.600	86	86,32		
		Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam 1 tahun	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	50		86		0	0		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1		0		0	0		
334.	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			431.610.000		372.549.600	172	86,32		
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	50		86		172	0		
335.	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			-		-	0	0		
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1		0		0	0		
336.	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			87.643.200		77.294.800	50	88,19		
		Jumlah Koordinasi Multi Sektoral dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	10		5		0	0		
337.	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			87.643.200		77.294.800	50	88,19		
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	10		5		50	0		
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**284.581.258.342**		**169.504.739.688**	**82,67**	**59,56**		
338.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.045.969.706**		**13.567.634.395**	**82,08**	**84,55**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase penyelenggaranya penunjang Urusan dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (%)	100		220		220	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) (%)	100		254		254	0		
339.	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			364.133.441		283.692.325	100	77,91		
		Persentase dokumen perencanan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		6		0	0		
340.	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			202.991.030		152.028.644	100	74,89		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
341.	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			161.142.411		131.663.681	100	81,71		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		6		100	0		

342.	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.325.136.449		7.812.530.319	100	83,78		
		Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57		57		0	0		
343.	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.325.136.449		7.812.530.319	100	83,78		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57		57		100	0		
344.	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			678.440.000		607.903.000	100	89,6		
		Persentase pelayanan administrasi Barang milik daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	21		21		0	0		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
345.	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			432.000.000		363.200.000	100	84,07		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	21		21		100	0		
346.	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			246.440.000		244.703.000	100	99,3		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
347.	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.241.609.588		1.776.768.893	64,4	79,26		
		Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1000		0		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		10		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	35		35		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		127		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
348.	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			47.728.663		38.056.000	100	79,73		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
349.	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			217.390.633		200.401.321	100	92,18		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
350.	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			79.920.000		30.390.000	0	38,03		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1000		0		0	0		
351.	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			186.523.068		153.192.622	100	82,13		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		10		100	0		
352.	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			310.550.000		104.450.000	100	33,63		

		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	35		35		100	0		
353.	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.332.197.224		1.182.978.950	50,8	88,8		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		127		50,8	0		
354.	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			67.300.000		67.300.000	0	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
355.	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			184.125.000		184.125.000	0	100		
		Persentase pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		10		0	0		
356.	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			184.125.000		184.125.000	0	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		10		0	0		
357.	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			506.520.570		367.702.001	100	72,59		
		Persentase pelayanan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		0	0		
358.	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			187.729.650		127.695.500	100	68,02		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		100	0		
359.	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			270.198.700		193.045.381	100	71,45		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100	0		
360.	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			48.592.220		46.961.120	100	96,64		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		100	0		
361.	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.746.004.658		2.534.912.857	78,14	92,31		
		Persentase pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		4		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		6		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		0	0		
362.	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			207.118.625		184.602.689	80	89,13		

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		4		80	0		
363.	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			320.621.675		287.667.400	85,71	89,72		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		6		85,71	0		
364.	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			677.069.558		664.585.919	100	98,16		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100	0		
365.	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.463.524.800		1.339.321.224	25	91,51		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		1		25	0		
366.	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			77.670.000		58.735.625	100	75,62		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		100	0		
367.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**1.048.938.015**		**1.042.324.000**	**100**	**99,37**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase rumah layak huni (%)	98,11		100		101,93	0		
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)			0		0	0		
			Persentase pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota ()			0		0	0		
368.	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			706.430.033		704.873.800	100	99,78		
		Jumlah rumah layak huni yang terbangun dan/ atau direhabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	16		16		0	0		
369.	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			706.430.033		704.873.800	100	99,78		
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	16		16		100	0		
370.	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			342.507.982		337.450.200	100	98,52		
		Persentase penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1		1		0	0		
371.	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			342.507.982		337.450.200	100	98,52		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1		1		100	0		
372.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**591.471.873**		**423.418.400**	**50**	**71,59**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)			72		0	0		

			Persentase luasan permukiman kumuh di perkotaan (%)	2,92		0		0	0		
373.	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			149.983.873		-	0	0		
		Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertata dan meningkat kualitasnya	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	33		0		0	0		
374.	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah			149.983.873		-	0	0		
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	33		0		0	0		
375.	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			441.488.000		423.418.400	100	95,91		
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1		1		0	0		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	0		1		0	0		
376.	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			41.938.000		23.868.400	100	56,91		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1		1		100	0		
377.	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			399.550.000		399.550.000	0	100		
		Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	0		1		0	0		
378.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**9.484.681.629**		**8.631.214.363**	**77,95**	**91**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Terpenuhinya rumah layak huni di kawasan permukiman kumuh dan berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)			0		0	0		
			Persentase pencegahan perumahan kumuh (%)	2,92		0		0	0		
379.	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			9.484.681.629		8.631.214.363	77,95	91		
		Persentase pencegahan perumahan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	246		240		0	0		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	12		7		0	0		
380.	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			8.264.617.586		7.958.304.400	97,56	96,29		
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	246		240		97,56	0		
381.	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			1.220.064.043		672.909.963	58,33	55,15		

		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	12		7		58,33	0		
382.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**257.410.197.119**		**145.840.148.530**	**100**	**56,66**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)					0	0		
			Persentase Kemantapan Jalan (Meter)	8414,31		191,75		2,28	0		
			Panjang Drainase yang dipelihara (Meter)	128,98		100		77,53	0		
			Panjang jalan yang dipelihara (Meter)	10038,38		759,3		7,56	0		
			Panjang Drainase yang dibangun (%)	92,65		79,1		85,38	0		
383.	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			257.410.197.119		145.840.148.530	100	56,66		
		Panjang Jalan yang dibangun, Panjang Drainase yang dibangun, Panjang jalan yang dipelihara, Panjang Drainase yang dipelihara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	11		11		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1		1		0	0		
384.	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			369.690.600		244.351.600	100	66,1		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1		1		100	0		
385.	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			256.775.416.519		145.353.648.030	100	56,61		
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	11		11		100	0		
386.	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			265.090.000		242.148.900	100	91,35		
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1		1		100	0		
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**68.193.785.386**		**61.974.968.342**	**79,88**	**90,88**		
387.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.186.069.281**		**8.036.108.857**	**73,45**	**98,17**	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (%)	100		95,81		95,81	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)					0	0		
388.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.609.628		50.368.100	100	99,52		
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		0	0		

389.	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.152.174		7.150.000	100	99,97		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
390.	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.742.298		5.772.400	100	100,52		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
391.	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.715.156		37.445.700	100	99,29		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		100	0		
392.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.425.627.129		4.940.857.628	49,17	91,07		
		Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		29		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
393.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.418.717.437		4.933.958.628	96,67	91,05		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		29		96,67	0		
394.	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
395.	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		0		0	0		
396.	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			6.909.692		6.899.000	100	99,85		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
397.	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			301.805.382		274.425.100	100	90,93		
		Persentase pengelolaan aset	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
398.	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			301.805.382		274.425.100	100	90,93		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
399.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Administrasi Kepegawaian Bagi ASN BPBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		0		0	0		
400.	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		

		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		0		0	0		
401.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			891.673.965		884.282.031	100	99,17		
		Persentase Administrasi Kepegawaian Bagi ASN BPBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		16		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	82		82		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	650		650		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9		9		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
402.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			57.434.263		57.432.700	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		16		100	0		
403.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			95.284.374		95.214.000	100	99,93		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	82		82		100	0		
404.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.795.000		45.790.000	100	99,99		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	650		650		100	0		
405.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			78.445.180		78.302.500	100	99,82		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9		9		100	0		
406.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			527.148.834		527.108.031	100	99,99		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
407.	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			87.566.314		80.434.800	100	91,86		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
408.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Pengadaan aset Sebagai Penunjang Urusan BPBD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
409.	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
410.	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		

411.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			538.302.585		911.161.250	77,78	169,27		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
412.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			16.663.295		16.647.000	100	99,9		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
413.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.050.000		484.286.700	33,33	461,01		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		1		33,33	0		
414.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			416.589.290		410.227.550	100	98,47		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
415.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			978.050.592		975.014.748	83,18	99,69		
		Persentase Pemeliharaan Aset Penunjang Urusan BPBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		8		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		12		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		0	0		
416.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			392.450.000		381.610.311	100	97,24		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		100	0		
417.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			425.040.000		433.993.137	72,73	102,11		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		8		72,73	0		
418.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			97.335.430		96.194.700	60	98,83		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		12		60	0		
419.	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			63.225.162		63.216.600	100	99,99		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		100	0		
420.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**8.406.161.552**		**7.509.949.282**	**75**	**89,34**	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana (Persentase)			69,31		0	0		
			Persentase terlaksananya penanggulangan Bencana di Kabupaten Bengkalis (%)	100				0	0		
421.	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			650.178.061		170.607.994	100	26,24		
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1000		1.000		0	0		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		1		0	0		
422.	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			59.584.001		59.509.883	100	99,88		
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1000		1.000		100	0		
423.	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			590.594.060		111.098.111	100	18,81		
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		1		100	0		
424.	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			321.661.642		143.927.200	56,25	44,74		
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1		1		0	0		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	100		85		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	100		65		0	0		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	11		11		0	0		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	100		0		0	0		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		1		0	0		

			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	5		0		0	0		
425.	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			38.753.806		38.458.200	100	99,24		
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1		1		100	0		
426.	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			28.560.579		24.400.000	85	85,43		
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	100		85		85	0		
427.	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			45.714.434		6.542.400	65	14,31		
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	100		65		65	0		
428.	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			53.688.345		42.275.000	100	78,74		
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	11		11		100	0		
429.	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			71.395.732		-	0	0		
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	100		0		0	0		
430.	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			-		18.296.200	0	0		
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		1		0	0		
431.	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			14.937.758		13.955.400	100	93,42		
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1		1		100	0		
432.	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			25.000.423		-	0	0		
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		

433.	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			43.610.565		-	0	0		
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	5		0		0	0		
434.	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			7.254.799.564		7.057.766.788	100	97,28		
		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	200		200		0	0		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	50		50		0	0		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		1		0	0		
435.	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			74.195.082		53.800.000	100	72,51		
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		1		100	0		
436.	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			7.086.677.800		6.923.024.770	100	97,69		
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	200		200		100	0		
437.	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			59.365.762		51.233.218	100	86,3		
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	50		50		100	0		
438.	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			34.560.920		29.708.800	100	85,96		
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		1		100	0		
439.	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			179.522.285		137.647.300	75	76,67		
		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Tentang Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1		1		0	0		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		
440.	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			35.918.690		34.006.400	100	94,68		

		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1		1		100	0		
441.	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			38.655.895		37.070.400	100	95,9		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1		1		100	0		
442.	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			66.789.121		66.570.500	100	99,67		
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1		1		100	0		
443.	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			38.158.579		-	0	0		
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0	0		
444.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.066.810.682**		**11.301.702.237**	**80,95**	**86,49**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			86,49		0	0		
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian) (%)	100				0	0		
445.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.618.032		57.485.584	50	94,83		
		Persentase Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		3		0	0		
446.	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			37.535.705		35.570.027	100	94,76		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100	0		
447.	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			23.082.327		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0	0		
448.	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		21.915.557	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		3		0	0		
449.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.613.879.133		9.024.417.292	50	85,02		
		Persentase Administrasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	107		0		0	0		

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
450.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.583.707.685		8.994.487.292	0	84,98		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	107		0		0	0		
451.	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			30.171.448		29.930.000	100	99,2		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
452.	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			214.800.000		195.600.000	100	91,06		
		Persentase Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
453.	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			214.800.000		195.600.000	100	91,06		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
454.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			642.453.258		633.827.657	92,86	98,66		
		Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	26		26		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	94		94		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	21		21		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	19		19		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		1		0	0		
455.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.995.234		24.361.000	100	97,46		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	26		26		100	0		
456.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			32.491.457		32.314.500	100	99,46		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	94		94		100	0		
457.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			47.500.000		47.150.000	100	99,26		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100	0		
458.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			61.589.567		55.635.400	100	90,33		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	21		21		100	0		
459.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			34.200.000		34.200.000	100	100		

		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	19		19		100	0		
460.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			424.677.000		423.166.757	100	99,64		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
461.	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			17.000.000		17.000.000	50	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		1		50	0		
462.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.974.324		72.135.000	100	94,95		
		Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	18		18		0	0		
463.	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.974.324		72.135.000	100	94,95		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	18		18		100	0		
464.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			265.502.435		251.853.443	66,67	94,86		
		Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
465.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.988.875		6.120.000	100	61,27		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
466.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			192.136.400		189.436.543	100	98,59		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
467.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			63.377.160		56.296.900	0	88,83		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
468.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.193.583.500		1.066.383.261	90	89,34		
		Persentase Kondisi Aset Perangkat Daerah yang Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		7		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33		33		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	63		63		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		0	0		
469.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			151.770.000		145.420.642	100	95,82		

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		7		100	0		
470.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			665.383.500		643.723.619	100	96,74		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33		33		100	0		
471.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.430.000		50.239.000	100	99,62		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	63		63		100	0		
472.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			187.200.000		187.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
473.	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			138.800.000		39.800.000	50	28,67		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		50	0		
474.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**8.367.542.803**		**7.276.591.034**	**54,17**	**86,96**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Pesentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)			213,05		0	0		
			Persentase Terlaksananya Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100				0	0		
			Persentase terlaksananya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran (%)	100				0	0		
475.	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			8.186.488.583		7.152.170.400	58,33	87,37		
		presentase pelayanan pencegahan,penanggulangan penye;amatan kebakaran dan non kebalaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1		2		0	0		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	3		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	15		5		0	0		
476.	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		6.980.010.000	0	0		
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0		1		0	0		

477.	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.774.003.889		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0	0		
478.	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			95.893.761		78.727.600	200	82,1		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1		2		200	0		
479.	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			84.977.123		30.956.200	0	36,43		
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	3		0		0	0		
480.	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			231.613.810		62.476.600	33,33	26,97		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	15		5		33,33	0		
481.	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			30.048.000		22.939.200	0	76,34		
		persentase terlaksananya inpeksi peralatan proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0		1		0	0		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		0	0		
482.	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			-		22.939.200	0	0		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0		1		0	0		
483.	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			30.048.000		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		0	0		
484.	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			151.006.220		101.481.434	66,67	67,2		
		Presentase terlaksananya masyarakat dalam pencegahan masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	500		500		0	0		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	10		0		0	0		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1		1		0	0		
485.	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			68.418.000		65.348.800	100	95,51		

		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	500		500		100	0		
486.	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			59.675.586		14.620.000	0	24,5		
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	10		0		0	0		
487.	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana			22.912.634		21.512.634	100	93,89		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1		1		100	0		
488.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**27.069.406.891**		**24.956.796.459**	**99,86**	**92,2**	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja (%)	100		92,2		92,2	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			92,2		0	0		
489.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			128.247.777		126.166.310	100	98,38		
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
490.	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			92.881.078		91.066.400	100	98,05		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100	0		
491.	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			28.485.769		28.379.669	100	99,63		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
492.	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.390.000		4.248.000	100	96,77		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		100	0		
493.	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.490.930		2.472.241	100	99,25		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
494.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.155.926.805		11.241.531.763	97,56	85,45		
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82		80		0	0		

495.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.155.926.805		11.241.531.763	97,56	85,45		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82		80		97,56	0		
496.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.612.193		-	0	0		
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		0	0		
497.	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2.612.193		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		0	0		
498.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			879.483.852		866.494.171	100	98,52		
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		0	0		
499.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11.705.320		11.699.796	100	99,95		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
500.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.832.720		58.792.901	100	99,93		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
501.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			172.673.000		161.910.000	100	93,77		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100	0		
502.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			59.034.445		59.034.071	100	100		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
503.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16.000.000		16.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		100	0		
504.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			561.238.367		559.057.403	100	99,61		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100	0		
505.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			187.581.000		187.581.000	100	100		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		0	0		

506.	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			187.581.000		187.581.000	100	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100	0		
507.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.010.911.370		11.833.491.084	100	98,52		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		0	0		
508.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.995.550		3.990.000	100	99,86		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
509.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.065.500		91.663.204	100	87,24		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
510.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			11.901.850.320		11.737.837.880	100	98,62		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		100	0		
511.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			704.643.894		701.532.131	100	99,56		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	45		45		0	0		
512.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			501.645.804		500.027.131	100	99,68		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		100	0		
513.	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			202.998.090		201.505.000	100	99,26		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	45		45		100	0		
514.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**3.097.794.177**		**2.893.820.473**	**85,63**	**93,42**	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)			93,41		0	0		
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)			93,41		0	0		
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			93,41		0	0		
			Persentase pencapaian Penerima Pelayanan Dasar dan Mutu Minimal Layanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara (%)	100		93,41		93,41	0		
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			93,41		0	0		

515.	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.566.188.994		2.447.463.487	88,44	95,37		
		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	4		4		0	0		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	0		0		0	0		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	230		1		0	0		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	25		21		0	0		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	6		6		0	0		
516.	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			188.662.724		188.379.000	100	99,85		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
517.	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			149.999.318		149.999.318	100	100		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		1		100	0		
518.	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			14.628.311		10.296.000	100	70,38		

			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	2		2		100	0		
519.	1.05.02.2.01.0008		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			11.980.818		9.120.368	100	76,12		
			Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1		1		100	0		
520.	1.05.02.2.01.0010		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			1.315.727.600		1.315.417.800	100	99,98		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	4		4		100	0		
521.	1.05.02.2.01.0013		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			1.017.737		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	0		0		0	0		
522.	1.05.02.2.01.0014		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			51.300.000		2.400.000	0,43	4,68		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	230		1		0,43	0		
523.	1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			496.441.386		495.610.500	84	99,83		
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	25		21		84	0		
524.	1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			30.250.000		30.000.000	100	99,17		
			Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1		1		100	0		
525.	1.05.02.2.01.0017		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			2.000.000		1.500.000	100	75		
			Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1		1		100	0		
526.	1.05.02.2.01.0018		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			304.181.100		244.740.501	100	80,46		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	6		6		100	0		
527.	1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			487.627.182		413.486.986	75	84,8		
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	12		12		0	0		

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2		2		0	0		
528.	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			85.616.542		76.356.055	100	89,18		
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	12		12		100	0		
529.	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			19.070.383		-	0	0		
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1		0		0	0		
530.	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			247.536.928		239.396.928	100	96,71		
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	2		2		100	0		
531.	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			135.403.329		97.734.003	100	72,18		
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2		2		100	0		
532.	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			43.978.001		32.870.000	100	74,74		
		Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1		1		0	0		
533.	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			43.978.001		32.870.000	100	74,74		
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1		1		100	0		
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**45.241.078.797**		**43.460.258.862**	**67,62**	**96,06**		
534.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.129.580.548**		**11.409.781.066**	**38,01**	**94,07**	Dinas Sosial	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)					0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial (%)	100		94		94	0		
535.	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			121.121.000		115.406.571	10	95,28		
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		1		0	0		
536.	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			70.015.000		67.708.248	0	96,71		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0	0		

537.	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.106.000		47.698.323	20	93,33		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		1		20	0		
538.	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.189.448.103		7.712.375.083	11,41	94,17		
		Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1236		141		0	0		
539.	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.189.448.103		7.712.375.083	11,41	94,17		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1236		141		11,41	0		
540.	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			270.400.000		256.000.000	25	94,67		
		Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		3		0	0		
541.	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			270.400.000		256.000.000	25	94,67		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		3		25	0		
542.	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.325.278.849		1.248.904.692	47,62	94,24		
		Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	50		15		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		85		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		10		0	0		
543.	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			31.893.677		31.855.000	100	99,88		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100	0		
544.	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			231.621.296		210.375.500	25	90,83		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		25	0		
545.	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			131.322.006		117.290.000	25	89,31		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		25	0		
546.	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			110.952.870		90.715.000	25	81,76		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		25	0		
547.	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			52.940.000		35.400.000	30	66,87		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	50		15		30	0		

			Disediakan (Dokumen)								
548.	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			688.749.000		685.469.192	28,33	99,52		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		85		28,33	0		
549.	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			77.800.000		77.800.000	100	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		10		100	0		
550.	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			355.461.586		324.323.490	60	91,24		
		Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Dinas Sosial dalam satu tahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		3		0	0		
551.	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			355.461.586		324.323.490	60	91,24		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		3		60	0		
552.	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			607.813.525		549.818.081	25	90,46		
		Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		0	0		
553.	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			206.813.525		199.560.000	25	96,49		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		25	0		
554.	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			216.000.000		167.001.481	25	77,32		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25	0		
555.	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			185.000.000		183.256.600	25	99,06		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		25	0		
556.	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.260.057.485		1.202.953.149	53,13	95,47		
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	49		20		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		8		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	70		13		0	0		
557.	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			435.934.500		428.263.464	40,82	98,24		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	49		20		40,82	0		
558.	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			356.800.000		355.200.000	100	99,55		

		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		8		100	0		
559.	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			467.322.985		419.489.685	18,57	89,76		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	70		13		18,57	0		
560.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**3.272.851.003**		**2.955.279.629**	**83,06**	**90,3**	Dinas Sosial	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)					0	0		
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)					0	0		
			Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial (%)	100		91		91	0		
561.	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			1.375.053.840		1.363.036.450	49,17	99,13		
		Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	225		165		0	0		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	60		15		0	0		
562.	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			1.360.789.090		1.351.081.700	73,33	99,29		
		Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	225		165		73,33	0		
563.	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			14.264.750		11.954.750	25	83,81		
		Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	60		15		25	0		
564.	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.897.797.163		1.592.243.179	100	83,9		
		Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11		11		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	150		150		0	0		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2		2		0	0		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	4		4		0	0		
565.	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			216.116.467		170.980.000	100	79,11		
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11		11		100	0		
566.	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			1.049.059.312		964.779.593	100	91,97		
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	150		150		100	0		

567.	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			497.169.243		383.141.627	100	77,06		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2		2		100	0		
568.	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			135.452.141		73.341.959	100	54,15		
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	4		4		100	0		
569.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**3.225.000**		**1.725.000**	**120**	**53,49**	Dinas Sosial	
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)					0	0		
			Persentase Kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dalam satu tahun (%)	100		53		53	0		
570.	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			3.225.000		1.725.000	120	53,49		
		Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		6		0	0		
571.	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			3.225.000		1.725.000	120	53,49		
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		6		120	0		
572.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**1.637.491.292**		**1.280.373.920**	**97,87**	**78,19**	Dinas Sosial	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					0	0		
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					0	0		
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial (%)	100		79		79	0		
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					0	0		
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					0	0		
			Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					0	0		
573.	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.046.539.202		788.939.995	123,61	75,39		
		meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80		50		0	0		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	133		85		0	0		

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24		24		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		6		0	0		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21		9		0	0		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		8		0	0		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		10		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		10		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		493		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		129		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7		4		0	0		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4		4		0	0		
574.	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			24.142.000		16.182.000	62,5	67,03		
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80		50		62,5	0		
575.	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			140.489.125		40.399.417	63,91	28,76		
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	133		85		63,91	0		
576.	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			142.623.412		109.107.400	100	76,5		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24		24		100	0		
577.	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			56.510.100		56.118.100	60	99,31		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		6		60	0		
578.	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			439.119.794		389.438.598	42,86	88,69		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21		9		42,86	0		
579.	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			7.785.500		3.360.000	53,33	43,16		

			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		8		53,33	0		
580.	1.06.04.2.01.0007		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			1.000.000		1.000.000	100	100		
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		10		100	0		
581.	1.06.04.2.01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			83.543.500		42.736.730	100	51,16		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		10		100	0		
582.	1.06.04.2.01.0009		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			1.434.021		1.016.000	98,6	70,85		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		493		98,6	0		
583.	1.06.04.2.01.0010		Pemberian Layanan Kedaruratan			26.592.750		16.752.750	645	63		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		129		645	0		
584.	1.06.04.2.01.0011		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			8.560.000		5.090.000	57,14	59,46		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7		4		57,14	0		
585.	1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan			114.739.000		107.739.000	100	93,9		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4		4		100	0		
586.	1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			590.952.090		491.433.925	63,54	83,16		
			Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110		110		0	0		
				Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28		28		0	0		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26		26		0	0		
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38		15		0	0		
				Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		5		0	0		
				Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0	0		

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22		21		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0	0		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23		20		0	0		
587.	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			45.948.355		43.938.355	100	95,63		
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110		110		100	0		
588.	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang			9.800.000		9.800.000	100	100		
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28		28		100	0		
589.	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu			84.893.440		62.309.120	100	73,4		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26		26		100	0		
590.	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			44.360.000		38.000.000	39,47	85,66		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38		15		39,47	0		
591.	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			6.090.000		1.290.000	50	21,18		
		Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		5		50	0		
592.	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			1.000.000		-	0	0		
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0	0		
593.	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			33.000.000		33.000.000	95,45	100		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22		21		95,45	0		
594.	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			12.633.845		1.050.000	0	8,31		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0	0		
595.	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan			353.226.450		302.046.450	86,96	85,51		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23		20		86,96	0		
596.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**27.019.583.654**		**26.678.336.773**	**83,63**	**98,74**	Dinas Sosial	

		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial (%)	100		98		98	0		
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)					0	0		
597.	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			642.590.860		617.620.000	100	96,11		
		Terlaksananya Pemeliharaan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	440		440		0	0		
598.	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			642.590.860		617.620.000	100	96,11		
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	440		440		100	0		
599.	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			26.376.992.794		26.060.716.773	79,53	98,8		
		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	5885		1.177		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	45000		45.000		0	0		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	18890		18.890		0	0		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	267		262		0	0		
600.	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			145.993.756		103.219.400	20	70,7		
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	5885		1.177		20	0		
601.	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			146.082.928		127.900.000	100	87,55		
		Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	45000		45.000		100	0		
602.	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			23.893.325.192		23.720.659.400	100	99,28		
		Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	18890		18.890		100	0		
603.	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			2.191.590.918		2.108.937.973	98,13	96,23		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	267		262		98,13	0		
604.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**649.302.581**		**609.813.500**	**20**	**93,92**	Dinas Sosial	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial (%)	100		94		94	0		
			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)					0	0		
605.	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			498.502.581		462.613.500	0	92,8		
		Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	800		0		0	0		

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11		0		0	0		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0	0		
606.	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			387.472.000		380.268.500	0	98,14		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	800		0		0	0		
607.	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			104.491.581		82.345.000	0	78,81		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		0	0		
608.	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			3.789.000		-	0	0		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11		0		0	0		
609.	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			2.750.000		-	0	0		
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0	0		
610.	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			150.800.000		147.200.000	100	97,61		
		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28		28		0	0		
611.	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			150.800.000		147.200.000	100	97,61		
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28		28		100	0		
612.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**529.044.719**		**524.948.974**	**23,21**	**99,23**	Dinas Sosial	
		Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)					0	0		
			Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara dalam satu tahun (%)	100		98		98	0		
613.	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			529.044.719		524.948.974	23,21	99,23		
		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara Kondisi dan Keadaannya	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	52		13		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	14		3		0	0		
614.	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			324.166.719		320.288.974	25	98,8		
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam	52		13		25	0		

		Kabupaten/Kota	Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)								
615.	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			204.878.000		204.660.000	21,43	99,89		
		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	14		3		21,43	0		
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**22.977.371.557**		**17.390.176.264**	**111,89**	**75,68**		
616.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.386.677.670**		**10.408.097.873**	**106,3**	**67,64**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah (%)	100		87,13		87,13	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			87,13		0	0		
617.	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			98.155.445		96.805.145	100	98,62		
		Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
618.	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			72.648.435		71.438.135	100	98,33		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100	0		
619.	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.507.010		25.367.010	100	99,45		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
620.	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.484.569.376		6.842.515.579	59,09	59,58		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66		39		0	0		
621.	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.484.569.376		6.842.515.579	59,09	59,58		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66		39		59,09	0		
622.	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			728.000.000		702.400.000	100	96,48		
		Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		2		0	0		
623.	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			728.000.000		702.400.000	100	96,48		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
624.	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.092.054.837		1.082.249.423	95,29	99,1		
		Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500		335		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
625.	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.363.946		25.363.946	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
626.	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			90.880.345		90.880.345	100	100		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
627.	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.940.000		23.500.000	100	94,23		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
628.	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			65.328.846		61.551.783	100	94,22		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
629.	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.950.000		7.050.000	100	64,38		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
630.	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			546.991.700		546.303.349	67	99,87		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500		335		67	0		
631.	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			327.600.000		327.600.000	100	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
632.	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			165.783.000		84.051.000	175	50,7		
		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Yang Tersedia	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		35		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		0		0	0		
633.	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			84.051.000		84.051.000	350	100		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		35		350	0		
634.	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			81.732.000		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		0		0	0		
635.	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			448.560.965		424.287.487	100	94,59		
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		12		0	0		

			yang Disediakan (Laporan)								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
636.	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			246.349.825		246.344.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100	0		
637.	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			170.411.140		146.521.687	100	85,98		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
638.	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			31.800.000		31.421.800	100	98,81		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
639.	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.369.554.047		1.175.789.239	112,5	85,85		
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		14		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		10		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		3		0	0		
640.	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			195.892.000		173.647.138	100	88,64		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		14		100	0		
641.	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.300.000		40.975.000	100	99,21		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		10		100	0		
642.	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			666.560.915		656.936.421	100	98,56		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		100	0		
643.	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			465.801.132		304.230.680	150	65,31		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		3		150	0		
644.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**83.152.534**		**22.739.180**	**50**	**27,35**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)			0		0	0		
			Persentase Data Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	92		17,65		19,18	0		
645.	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			83.152.534		22.739.180	50	27,35		
		Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0	0		

			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	10		10		0	0		
646.	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			67.202.954		7.462.400	0	11,1		
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0	0		
647.	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			15.949.580		15.276.780	100	95,78		
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	10		10		100	0		
648.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**839.125.487**		**742.854.700**	**218,75**	**88,53**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih (%)			99,67		0	0		
			Persentase Tenaga Kerja Yang Ditingkatkan Daya Saing dan Produktivitasnya (%)	30		99,67		332,23	0		
649.	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			766.693.816		687.092.500	162,5	89,62		
		Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	64		48		0	0		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2		5		0	0		
650.	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			728.720.125		649.311.700	75	89,1		
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	64		48		75	0		
651.	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			37.973.691		37.780.800	250	99,49		
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2		5		250	0		
652.	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			31.830.279		29.933.600	550	94,04		
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2		11		0	0		
653.	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			31.830.279		29.933.600	550	94,04		
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2		11		550	0		
654.	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			40.601.392		25.828.600	0	63,62		
		Terlaksananya Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2		0		0	0		
655.	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			40.601.392		25.828.600	0	63,62		
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2		0		0	0		
656.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**168.718.924**		**167.162.324**	**72,72**	**99,08**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)			100		0	0		

			Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan (%)	87		100		114,94	0		
657.	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			168.718.924		167.162.324	72,72	99,08		
		Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2000		909		0	0		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50		50		0	0		
658.	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			32.558.450		32.017.450	45,45	98,34		
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2000		909		45,45	0		
659.	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			136.160.474		135.144.874	100	99,25		
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50		50		100	0		
660.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**6.499.696.942**		**6.049.322.187**	**95,64**	**93,07**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (%)	97		99,5		102,58	0		
			Besaran Kasus Yang Diselesaikan (%)			99,5		0	0		
661.	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			276.343.734		272.555.615	78,33	98,63		
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	20		19		0	0		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	5		2		0	0		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1		1		0	0		
662.	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			70.391.556		70.267.750	95	99,82		
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	20		19		95	0		
663.	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			67.233.704		67.112.010	40	99,82		
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	5		2		40	0		
664.	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			138.718.474		135.175.855	100	97,45		
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1		1		100	0		
665.	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			6.223.353.208		5.776.766.572	108,62	92,82		
		Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupatan /Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20		30		0	0		

			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	25		23		0	0		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1		1		0	0		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	34000		31.449		0	0		
666.	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			31.529.871		31.364.271	150	99,47		
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20		30		150	0		
667.	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			65.326.707		64.776.637	92	99,16		
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	25		23		92	0		
668.	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			104.213.277		98.361.877	100	94,39		
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1		1		100	0		
669.	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			6.022.283.353		5.582.263.787	92,5	92,69		
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	34000		31.449		92,5	0		
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**12.326.562.993**		**10.913.774.127**	**82,21**	**88,54**		
670.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.793.965.022**		**8.789.664.446**	**88,89**	**89,75**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (%)	100		100		100	0		
671.	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			235.262.346		200.178.480	100	85,09		
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
672.	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			134.557.320		122.296.180	100	90,89		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
673.	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			53.914.942		39.137.800	100	72,59		

		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
674.	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.790.084		38.744.500	100	82,8		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
675.	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.770.178.496		6.182.480.962	100	91,32		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Laporan Keuangan/Realisasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		0	0		
676.	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.770.178.496		6.182.480.962	100	91,32		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		100	0		
677.	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			499.200.000		499.200.000	100	100		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
678.	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			499.200.000		499.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
679.	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12		0		0	0		
680.	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12		0		0	0		
681.	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.042.786.480		894.448.254	85,71	85,77		
		Persentase Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0	0		
682.	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			33.706.744		33.706.000	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
683.	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			189.701.407		189.460.400	100	99,87		

		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
684.	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			93.200.000		79.020.000	100	84,79		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
685.	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			76.998.695		71.241.400	100	92,52		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
686.	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			47.899.000		44.579.000	100	93,07		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		100	0		
687.	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			601.280.634		476.441.454	100	79,24		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
688.	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-	0	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0	0		
689.	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			352.107.100		250.167.548	100	71,05		
		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
690.	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			74.689.400		74.680.000	100	99,99		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
691.	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			230.024.500		128.301.788	100	55,78		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
692.	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			47.393.200		47.185.760	100	99,56		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
693.	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			894.430.600		763.189.202	100	85,33		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		0	0		
694.	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			269.000.600		203.876.202	100	75,79		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		100	0		

695.	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			625.430.000		559.313.000	100	89,43		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		100	0		
696.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**1.285.596.928**		**1.092.662.419**	**66,67**	**84,99**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (%)	92,1		100		108,58	0		
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)			100		0	0		
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)			100		0	0		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)			100		0	0		
697.	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			1.151.769.075		1.092.662.419	100	94,87		
		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang)	60		60		0	0		
698.	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			1.118.677.388		1.059.622.919	100	94,72		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
699.	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			33.091.687		33.039.500	100	99,84		
		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang)	60		60		100	0		
700.	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			133.827.853		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		0	0		
701.	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			133.827.853		-	0	0		
		Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		0	0		
702.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**374.451.767**		**369.086.205**	**100**	**98,57**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)			100		0	0		
			Meningkatnya Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	80		100		125	0		
			Pravelensi kekerasan terhadap perempuan (%)	1		100		10000	0		
703.	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			1.410.000		1.410.000	100	100		

		Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang dilayani secara komprehensif	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	16		16		0	0		
704.	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.410.000		1.410.000	100	100		
		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	16		16		100	0		
705.	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			373.041.767		367.676.205	100	98,56		
		tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	35		35		0	0		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	10		10		0	0		
706.	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			327.041.767		321.841.205	100	98,41		
		Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	35		35		100	0		
707.	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			46.000.000		45.835.000	100	99,64		
		Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	10		10		100	0		
708.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**31.676.695**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga (%)	100		100		100	0		
			Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)			100		0	0		
709.	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			31.676.695		-	0	0		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0	0		
710.	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			31.676.695		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0	0		
711.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**53.091.018**		**51.586.330**	**100**	**97,17**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)			100		0	0		
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak (%)	50		100		200	0		

712.	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			53.091.018		51.586.330	100	97,17		
		Jumlah dokumen Data/ Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		0	0		
713.	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			53.091.018		51.586.330	100	97,17		
		Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		100	0		
714.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**87.833.919**		**75.753.400**	**100**	**86,25**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Terjaminya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Terlaksananya Pemenuhan Hak Anak (%)	50		100		200	0		
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)			100		0	0		
715.	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			38.983.519		37.846.600	100	97,08		
		Terciptanya Lembaga Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
716.	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			38.983.519		37.846.600	100	97,08		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
717.	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			48.850.400		37.906.800	100	77,6		
		Terciptanya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
718.	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			48.850.400		37.906.800	100	77,6		
		Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
719.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**699.947.644**		**535.021.327**	**62,55**	**76,44**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)			83,33		0	0		
			Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak (%)	2		83,33		4166,5	0		
720.	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			148.727.629		148.591.429	12,77	99,91		
		Terciptanya lembaga pencegahan kekerasan terhadap anak disetiap kelurahan dan Kabupaten	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	470		60		0	0		
721.	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			148.727.629		148.591.429	12,77	99,91		
		Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	470		60		12,77	0		
722.	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			430.453.815		319.473.498	100	74,22		

		Terciptanya pelayanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	100		100		0	0		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Layanan)	90		90		0	0		
723.	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			246.313.815		142.629.298	100	57,91		
		Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	100		100		100	0		
724.	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			184.140.000		176.844.200	100	96,04		
		Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Layanan)	90		90		100	0		
725.	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			120.766.200		66.956.400	50	55,44		
		Terbentuknya lembaga layanan yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK (Kegiatan)	1		0		0	0		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)	45		45		0	0		
726.	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			51.746.200		-	0	0		
		Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK (Kegiatan)	1		0		0	0		
727.	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			69.020.000		66.956.400	100	97,01		
		Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)	45		45		100	0		
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**11.242.852.062**		**9.179.741.343**	**87,28**	**81,65**		
728.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.397.301.989**		**6.695.646.678**	**100,46**	**79,74**	Dinas Ketahanan Pangan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan (%)	100		231,36		231,36	0		
729.	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.711.620		57.446.000	100	99,54		
		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
730.	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			57.711.620		57.446.000	100	99,54		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
731.	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.467.419.996		4.776.325.501	100	73,85		
		Persentase Adminstrasi Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32		32		0	0		
732.	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.467.419.996		4.776.325.501	100	73,85		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32		32		100	0		

733.	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			167.596.000		167.229.440	100	99,78		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
734.	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			167.596.000		167.229.440	100	99,78		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
735.	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8		0		0	0		
736.	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8		0		0	0		
737.	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			860.778.171		855.894.582	72,68	99,43		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	56		56		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	48		48		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		10		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	32		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	165		164		0	0		
738.	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			69.510.292		69.503.476	100	99,99		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		100	0		
739.	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			170.214.646		169.873.808	100	99,8		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	56		56		100	0		
740.	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		0	0		
741.	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			109.880.000		109.780.000	100	99,91		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	48		48		100	0		
742.	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.646.327		155.280.602	100	99,77		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		10		100	0		
743.	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.000.000		20.000.000	9,38	83,33		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	32		3		9,38	0		

			Disediakan (Dokumen)								
744.	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			331.526.906		331.456.696	99,39	99,98		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	165		164		99,39	0		
745.	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0		
		Persebtase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13		0		0	0		
746.	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13		0		0	0		
747.	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			286.119.200		320.220.707	233,33	111,92		
		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		5		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
748.	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			119.522.500		119.296.320	500	99,81		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		5		500	0		
749.	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			145.647.200		122.420.707	100	84,05		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		100	0		
750.	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.949.500		78.503.680	100	374,73		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
751.	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			557.677.002		518.530.448	100	92,98		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		0	0		
752.	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			171.767.800		141.441.373	100	82,34		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		4		100	0		
753.	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40.365.000		33.482.536	100	82,95		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		100	0		

754.	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			272.343.500		271.747.640	100	99,78		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
755.	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			73.200.702		71.858.899	100	98,17		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100	0		
756.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			**-**		**-**	**0**	**0**	Dinas Ketahanan Pangan	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedauatan dan kemandirian pangan	Persentase peningkatan kegiatan usaha masyarakat menjadi usaha ekonomi produktif (%)	100		0		0	0		
757.	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Persentase Peningkatan kegiatan Usaha Masyarakat menjadi usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2		0		0	0		
758.	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			-		-	0	0		
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2		0		0	0		
759.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**2.246.234.093**		**2.127.001.965**	**80**	**94,69**	Dinas Ketahanan Pangan	
		Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan (%)	100		100		100	0		
			Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahananan (%)			100		0	0		
			Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	90,5		93,51		103,33	0		
760.	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			466.501.567		448.512.127	100	96,14		
		Persentase Kegiatan tersedianya Penyaluran Pangan pokok	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1		1		0	0		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0	0		
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1		1		0	0		
761.	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			75.993.107		73.452.247	100	96,66		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1		1		100	0		
762.	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			125.867.500		123.560.500	100	98,17		
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1		1		100	0		
763.	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			35.035.600		33.717.100	100	96,24		
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1		1		100	0		

764.	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			152.718.360		151.355.680	100	99,11		
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100	0		
765.	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			56.996.000		47.683.600	100	83,66		
		Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
766.	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			19.891.000		18.743.000	100	94,23		
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1		1		100	0		
767.	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			41.668.960		35.924.100	0	86,21		
		Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10		0		0	0		
768.	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			41.668.960		35.924.100	0	86,21		
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10		0		0	0		
769.	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1.738.063.566		1.642.565.738	66,67	94,51		
		Persentase Capaian Target Konsumsi Pangan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1		0		0	0		
770.	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			30.539.650		19.871.850	100	65,07		
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		1		100	0		
771.	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1.707.523.916		1.622.693.888	100	95,03		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1		1		100	0		
772.	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			-		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1		0		0	0		
773.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**271.236.100**		**138.136.900**	**58,33**	**50,93**	Dinas Ketahanan Pangan	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan (%)	100		100		100	0		
			Persentase meningkatnya desa Bebas Rawan Pangan (%)	100		100		100	0		
774.	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			23.389.100		22.460.300	100	96,03		
		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		1		0	0		
775.	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			23.389.100		22.460.300	100	96,03		
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		1		100	0		

776.	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		247.847.000		115.676.600	44,44	46,67		
		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		1		0	0		
777.	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			75.995.000		66.685.000	100	87,75		
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		1		100	0		
778.	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			129.496.000		7.200.000	0	5,56		
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1		0		0	0		
779.	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			42.356.000		41.791.600	33,33	98,67		
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		1		33,33	0		
780.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**144.290.880**		**135.780.800**	**100**	**94,1**	Dinas Ketahanan Pangan	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pengawasan keamanan pangan segar (%)	100		100		100	0		
781.	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			144.290.880		135.780.800	100	94,1		
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		1		0	0		
782.	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			144.290.880		135.780.800	100	94,1		
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		1		100	0		
783.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**183.789.000**		**83.175.000**	**100**	**45,26**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
		Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)			100		0	0		
			Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat di Kabupaten Bengkalis (%)	100		100		100	0		
784.	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			183.789.000		83.175.000	100	45,26		
		Persentase Pemenuhan penyediaan dan penyaluran pangan di Kabupaten Bengkalis	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1		1		0	0		
785.	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			183.789.000		83.175.000	100	45,26		
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1		1		100	0		
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**311.225.547**		**207.161.400**	**3000**	**66,56**		
786.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**213.828.389**		**122.382.800**	**150**	**57,23**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)			0		0	0		

			Persentase pelaksanaan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (%)	14		59		421,43	0		
787.	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			213.828.389		122.382.800	150	57,23		
		Jumlah Kasus Pertanahan yang difasilitasi dalam Penyelesaiannya	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		3		0	0		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		3		0	0		
788.	2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota			113.853.598		68.651.600	150	60,3		
		Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		3		150	0		
789.	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			99.974.791		53.731.200	150	53,74		
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		3		150	0		
790.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**			**97.397.158**		**84.778.600**	**8700**	**87,04**	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Persentase Penetapan Tanah Ulayat (%)	10		87		870	0		
791.	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			97.397.158		84.778.600	8700	87,04		
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		87		0	0		
792.	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			97.397.158		84.778.600	8700	87,04		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		87		8700	0		
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**47.291.224.582**		**44.511.313.422**	**87,37**	**94,12**		
793.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.570.644.966**		**17.483.452.091**	**80,73**	**94,15**	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			96,67		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (%)	100		218,21		218,21	0		
794.	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			291.669.687		277.545.981	100	95,16		
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggararan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		8		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16		16		0	0		
795.	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			159.087.245		146.895.735	100	92,34		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		8		100	0		

796.	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			54.142.795		52.859.340	100	97,63		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
797.	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.439.647		77.790.906	100	99,17		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16		16		100	0		
798.	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.554.088.549		8.402.231.812	0,42	87,94		
		Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	720		3		0	0		
799.	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.554.088.549		8.402.231.812	0,42	87,94		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	720		3		0,42	0		
800.	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			563.200.000		563.200.000	100	100		
		Jumlah bulan penertiban administrasi barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
801.	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			563.200.000		563.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
802.	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			10.326.040		9.316.040	100	90,22		
		Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan SKPD	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
803.	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			10.326.040		9.316.040	100	90,22		
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
804.	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0	0		
805.	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0	0		
806.	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.201.229.574		1.211.741.282	100	100,88		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan administrasi dan umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		0	0		

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
807.	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			33.311.753		89.502.255	100	268,68		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
808.	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			71.768.849		70.316.043	100	97,98		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
809.	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			165.170.000		146.454.378	100	88,67		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100	0		
810.	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			104.993.677		103.675.480	100	98,74		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
811.	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			75.000.000		75.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		100	0		
812.	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			693.138.963		668.946.794	100	96,51		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100	0		
813.	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			57.846.332		57.846.332	100	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
814.	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.352.000		-	0	0		
		Jumlah pengadaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
815.	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			23.352.000		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
816.	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			617.050.042		931.966.299	100	151,04		
		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
817.	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			260.714.000		433.112.000	100	166,13		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100	0		
818.	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			314.736.042		428.454.299	100	136,13		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		

819.	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			41.600.000		70.400.000	100	169,23		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
820.	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.309.729.074		6.087.450.677	71,3	96,48		
		Jumlah bulan penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		3		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	90		52		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	84		60		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		0	0		
821.	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			227.730.000		208.449.247	27,27	91,53		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		3		27,27	0		
822.	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.715.712.112		5.522.737.980	57,78	96,62		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	90		52		57,78	0		
823.	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.158.962		29.140.450	71,43	99,94		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	84		60		71,43	0		
824.	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			317.368.000		317.368.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		100	0		
825.	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.760.000		9.755.000	100	49,37		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		100	0		
826.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**347.885.180**		**347.536.895**	**100**	**99,9**	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)			100		0	0		
			Persentase pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup (%)	100		100		100	0		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup (%)	95		100		105,26	0		
827.	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			347.885.180		347.536.895	100	99,9		
		Jumlah dokumen penyusunan, pengendalian dan penetapan RPPLH	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1		1		0	0		
828.	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			347.885.180		347.536.895	100	99,9		

		RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1		1		100	0		
829.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**1.166.472.761**		**732.890.750**	**100**	**62,83**	Dinas Lingkungan Hidup	
		Menurunya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	95		65		68,42	0		
			Indeks Kualitas Air (Indeks)			65		0	0		
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)			65		0	0		
830.	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			966.649.118		620.385.050	100	64,18		
		Jumlah lokasi/wilayah pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1		1		0	0		
831.	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			185.573.108		66.560.000	100	35,87		
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1		1		100	0		
832.	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			151.637.844		28.210.484	100	18,6		
		Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		1		100	0		
833.	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			83.814.972		78.502.478	100	93,66		
		Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	1		1		100	0		
834.	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			142.432.820		142.406.870	100	99,98		
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2		2		100	0		
835.	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			403.190.374		304.705.218	100	75,57		
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1		1		100	0		
836.	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			199.823.643		112.505.700	100	56,3		
		Jumlah lokasi/wilayah pemulihan kerusakan lingkungan hidup	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1		1		0	0		
837.	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi			199.823.643		112.505.700	100	56,3		
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1		1		100	0		

838.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**5.939.661.792**		**5.504.257.415**	**100**	**92,67**	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)			92,71		0	0		
			Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati (%)	95		231,26		243,43	0		
839.	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			5.939.661.792		5.504.257.415	100	92,67		
		Jumlah lokasi/wilayah pengelolaan eanekaragaman hayati	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	50		50		0	0		
840.	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			5.939.661.792		5.504.257.415	100	92,67		
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	50		50		100	0		
841.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**257.274.118**		**256.370.911**	**66,67**	**99,65**	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang di terbitkan	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH (%)	95		99,97		105,23	0		
			Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)			99,97		0	0		
842.	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			257.274.118		256.370.911	66,67	99,65		
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	4		0		0	0		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	13		13		0	0		
843.	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			142.571.736		141.903.440	100	99,53		
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	12		12		100	0		
844.	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			-		-	0	0		
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	4		0		0	0		
845.	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			114.702.382		114.467.471	100	99,8		
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	13		13		100	0		
846.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**69.561.090**		**69.514.832**	**100**	**99,93**	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kinerka pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup (%)	50		110		220	0		
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)			100		0	0		
847.	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			69.561.090		69.514.832	100	99,93		

		Jumlah pembinaan lembaga pendidikan dan penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	10		10		0	0		
848.	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			69.561.090		69.514.832	100	99,93		
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	10		10		100	0		
849.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**324.991.013**		**253.217.020**	**100**	**77,92**	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang telah ditangani (%)	100		222,2		222,2	0		
			Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)			78,71		0	0		
850.	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			324.991.013		253.217.020	100	77,92		
		Jumlah kasus pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa terkait PPLH yang telah ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	6		6		0	0		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	6		6		0	0		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	6		6		0	0		
851.	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			220.138.586		149.477.100	100	67,9		
		Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	6		6		100	0		
852.	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			94.626.428		93.675.921	100	99		
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	6		6		100	0		
853.	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			10.225.999		10.063.999	100	98,42		
		Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	6		6		100	0		
854.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**20.614.733.662**		**19.864.073.508**	**100**	**96,36**	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)			96,78		0	0		
			Persentase sampah yang dikelola (%)	83		245,65		295,96	0		
855.	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			20.614.733.662		19.864.073.508	100	96,36		
		Volume timbulan sampah kabupaten/kota yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	40		40		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	16		16		0	0		
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	1		1		0	0		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	64178.86		64.179		0	0		
856.	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			222.693.392		209.526.750	100	94,09		
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	40		40		100	0		
857.	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			20.266.327		17.424.000	100	85,98		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	2		2		100	0		
858.	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			682.636.746		243.410.158	100	35,66		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	16		16		100	0		
859.	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota			84.872.033		59.501.000	100	70,11		
		Tersusunnya laporan pemantauaan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	1		1		100	0		
860.	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			19.604.265.164		19.334.211.600	100	98,62		
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	64178.86		64.179		100	0		
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**20.986.422.899**		**19.193.194.419**	**96,21**	**91,46**		
861.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.917.962.902**		**14.332.086.139**	**95,61**	**90,04**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / Kota di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100				0	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)					0	0		

			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / Kota (%)	100				0	0		
			Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabapaten / kota (%)	100				0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100				0	0		
862.	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95.203.030		94.389.900	100	99,15		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
863.	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			81.803.030		80.989.900	100	99,01		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
864.	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.400.000		13.400.000	100	100		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
865.	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.519.707.224		8.219.142.321	100	86,34		
		Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	61		61		0	0		
866.	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.519.707.224		8.219.142.321	100	86,34		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	61		61		100	0		
867.	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.035.200.000		1.011.200.000	100	97,68		
		Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	50		50		0	0		
868.	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.035.200.000		1.011.200.000	100	97,68		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	50		50		100	0		
869.	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.707.430.013		2.656.025.476	100	98,1		
		Terlaksananya pelayanan ketersediaan kebutuhan operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	528		528		0	0		
870.	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.852.841		4.852.841	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
871.	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.936.003.440		1.890.028.440	100	97,63		

		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
872.	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			80.100.000		81.100.000	100	101,25		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
873.	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			78.431.732		73.632.240	100	93,88		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
874.	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800.000		10.800.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		100	0		
875.	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			597.242.000		595.611.955	100	99,73		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	528		528		100	0		
876.	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			654.871.735		617.724.200	100	94,33		
		Persentase pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		3		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	22		22		0	0		
877.	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			32.190.000		32.190.000	0	100		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		3		0	0		
878.	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			622.681.735		585.534.200	100	94,03		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	22		22		100	0		
879.	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			681.885.900		623.994.891	72,22	91,51		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		6		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		4		0	0		
880.	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.985.900		4.980.000	100	99,88		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		4		100	0		
881.	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			552.100.000		494.214.891	50	89,52		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		6		50	0		
882.	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			124.800.000		124.800.000	66,67	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		4		66,67	0		
883.	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.223.665.000		1.109.609.351	100	90,68		

		Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		12		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150		150		0	0		
884.	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			138.160.000		130.436.066	100	94,41		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		4		100	0		
885.	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			164.680.000		162.958.285	100	98,95		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		100	0		
886.	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			62.400.000		62.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		3		100	0		
887.	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			740.800.000		640.000.000	100	86,39		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		12		100	0		
888.	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			117.625.000		113.815.000	100	96,76		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150		150		100	0		
889.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**192.377.380**		**192.106.000**	**100**	**99,86**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk (%)	100				0	0		
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)					0	0		
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Persen)	100				0	0		
			Persentase pelayanan pendaftaran Penduduk (%)	100				0	0		
			Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)					0	0		
890.	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			192.377.380		192.106.000	100	99,86		
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	10		10		0	0		
891.	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			192.377.380		192.106.000	100	99,86		

		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	10		10		100	0		
892.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**73.021.737**		**28.371.000**	**100**	**38,85**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatanya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)					0	0		
			Persentase pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil (%)	100				0	0		
			Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil (%)	100				0	0		
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)					0	0		
			Persentase pelayanan pencatatan sipil (%)	100				0	0		
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)					0	0		
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)					0	0		
893.	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			73.021.737		28.371.000	100	38,85		
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	8		8		0	0		
894.	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			73.021.737		28.371.000	100	38,85		
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	8		8		100	0		
895.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**4.803.060.880**		**4.640.631.280**	**100**	**96,62**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)					0	0		
			Persentase pelaksanaan pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (%)	100				0	0		
896.	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			4.803.060.880		4.640.631.280	100	96,62		
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12		12		0	0		
897.	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			4.803.060.880		4.640.631.280	100	96,62		
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12		12		100	0		
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**34.097.067.623**		**29.734.675.213**	**78,32**	**87,21**		
898.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.967.624.169**		**12.193.914.816**	**91,67**	**81,47**	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		25		25	0		

			Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100		100		100	0		
			Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan oprasional perkantoran (%)	100		100		100	0		
			Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat dearah (%)	90		90		100	0		
			Persentase pemenuhan prencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Dokumen)	5		5		100	0		
			Persentase Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		100		100	0		
899.	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			149.259.000		144.024.000	100	96,49		
		Persentase Prencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
900.	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			114.963.000		112.961.600	100	98,26		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
901.	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.296.000		31.062.400	100	90,57		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
902.	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.674.443.023		7.569.997.642	100	78,25		
		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		3		0	0		
903.	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.581.931.023		7.492.565.442	100	78,19		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		100	0		
904.	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			17.452.000		8.212.200	100	47,06		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
905.	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			75.060.000		69.220.000	100	92,22		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		3		100	0		
906.	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			166.400.000		166.400.000	100	100		
		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
907.	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			166.400.000		166.400.000	100	100		

		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
908.	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0	0		
909.	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0	0		
910.	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.126.556.197		1.766.854.145	100	83,09		
		Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		60		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	75		75		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	250		250		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100		100		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		30		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		300		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
911.	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			87.389.933		87.347.000	100	99,95		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		60		100	0		
912.	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			271.014.006		260.506.500	100	96,12		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	75		75		100	0		
913.	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			268.030.000		183.425.000	100	68,43		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	250		250		100	0		
914.	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			149.984.484		148.474.000	100	98,99		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100		100		100	0		
915.	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			89.221.365		54.000.000	100	60,52		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		30		100	0		
916.	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			716.351.411		607.601.645	100	84,82		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		300		100	0		
917.	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			544.564.998		425.500.000	100	78,14		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		

918.	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.261.706.189		1.248.661.675	100	98,97		
		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		0	0		
919.	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			29.698.050		29.698.050	100	100		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
920.	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.232.008.139		1.218.963.625	100	98,94		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		100	0		
921.	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			487.756.848		387.820.459	100	79,51		
		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1000		1.000		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
922.	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			124.584.475		119.776.000	100	96,14		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1000		1.000		100	0		
923.	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			211.600.000		122.460.699	100	57,87		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
924.	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			151.572.373		145.583.760	100	96,05		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
925.	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.101.502.912		910.156.895	80	82,63		
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	70		70		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	70		70		0	0		
926.	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			400.667.012		362.610.218	100	90,5		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		100	0		

927.	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			29.000.000		15.029.289	100	51,83		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		100	0		
928.	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			318.765.900		293.940.388	100	92,21		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	70		70		100	0		
929.	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			112.500.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
930.	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			240.570.000		238.577.000	100	99,17		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	70		70		100	0		
931.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**69.367.129**		**69.183.629**	**100**	**99,74**	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentasae desa yang melakukan kerjasama (%)			100		0	0		
			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama desa (%)	100		100		100	0		
932.	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			69.367.129		69.183.629	100	99,74		
		Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	11		11		0	0		
933.	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			69.367.129		69.183.629	100	99,74		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	11		11		100	0		
934.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**2.686.888.394**		**2.537.290.314**	**75**	**94,43**	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahan desa sesuai aturan (%)			100		0	0		
			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (%)	100		100		100	0		
935.	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.686.888.394		2.537.290.314	75	94,43		
		Persentase Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	136		136		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	11		11		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	136		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	11		11		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	11		11		0	0		

			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	136		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	11		11		0	0		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	8		8		0	0		
936.	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			385.547.459		299.421.000	100	77,66		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	136		136		100	0		
937.	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			1.601.348.614		1.552.611.814	100	96,96		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	11		11		100	0		
938.	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			2.682.368		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	136		0		0	0		
939.	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			254.167.462		254.024.000	100	99,94		
		Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	11		11		100	0		
940.	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			317.459.450		317.432.500	100	99,99		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	11		11		100	0		
941.	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			-		-	0	0		
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	136		0		0	0		
942.	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			67.276.864		65.386.000	100	97,19		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	11		11		100	0		
943.	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			58.406.177		48.415.000	100	82,89		
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	8		8		100	0		
944.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**16.373.187.931**		**14.934.286.454**	**25,76**	**91,21**	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Peresentase desa yang mendapatkan pembinaan kelembagaan desa (%)	100		100		100	0		
			Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (%)			100		0	0		
945.	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			16.373.187.931		14.934.286.454	25,76	91,21		
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	11		6		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	11		11		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	11		0		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	11		0		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	11		0		0	0		
946.	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			277.251.697		29.690.757	54,55	10,71		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	11		6		54,55	0		
947.	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			14.987.701.290		14.842.275.697	100	99,03		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	11		11		100	0		
948.	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			62.320.000		62.320.000	0	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		0		0	0		
949.	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			930.303.681		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	11		0		0	0		
950.	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			55.924.763		-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	11		0		0	0		
951.	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			59.686.500		-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	11		0		0	0		
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**19.829.375.225**		**39.409.654.678**	**57,36**	**198,74**		
952.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.063.657.432**		**21.260.381.358**	**25,81**	**211,26**	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

									Berencana	
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			0		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilakanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100		211		211	0		
953.	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.300.000		63.300.000	20	100		
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		0		0	0		
954.	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			63.300.000		63.300.000	100	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100	0		
955.	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
956.	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
957.	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0	0		
958.	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		0		0	0		
959.	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.829.876.826		14.150.289.580	100	207,18		
		Persentase Administrasi Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		0	0		
960.	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.829.876.826		14.150.289.580	100	207,18		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		100	0		

961.	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			852.800.000		2.052.800.000	53,66	240,71		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	41		22		0	0		
962.	2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			852.800.000		2.052.800.000	53,66	240,71		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	41		22		53,66	0		
963.	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35		0		0	0		
964.	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35		0		0	0		
965.	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.036.099.244		2.325.998.745	34,29	224,5		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		22		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		18		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2850		0		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		23		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	412		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
966.	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35.779.279		86.899.224	73,33	242,88		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		22		73,33	0		
967.	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			77.739.577		175.085.762	90	225,22		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		18		90	0		
968.	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			208.420.000		471.860.000	0	226,4		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2850		0		0	0		
969.	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			92.548.488		137.704.509	76,67	148,79		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		23		76,67	0		
970.	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.100.000		17.050.000	0	168,81		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		0		0	0		
971.	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			370.111.900		847.799.250	0	229,07		

		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	412		0		0	0		
972.	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			241.400.000		589.600.000	0	244,24		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
973.	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			52.053.450		52.053.450	100	100		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		0	0		
974.	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			52.053.450		52.053.450	100	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		100	0		
975.	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			499.085.912		1.113.469.543	0	223,1		
		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
976.	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			199.938.312		486.638.000	0	243,39		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0	0		
977.	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			171.080.000		346.466.743	0	202,52		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
978.	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			128.067.600		280.364.800	0	218,92		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0	0		
979.	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			730.442.000		1.502.470.040	0	205,69		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		0		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		0		0	0		
980.	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			243.029.000		537.699.040	0	221,25		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		0		0	0		
981.	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			249.600.000		614.400.000	0	246,15		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		

982.	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			162.813.000		350.371.000	0	215,2		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		0		0	0		
983.	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		0		0	0		
984.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**304.675.507**		**614.532.300**	**80**	**201,7**	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)			0		0	0		
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)			0		0	0		
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)			0		0	0		
			Persentase penurunan angka laju pertumbuhan penduduk; kepadatan penduduk; menurunnya angka kelahiran total (TFR) ()	1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48%		93:93		1406,67	0		
985.	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			9.085.484		21.924.900	100	241,32		
		Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	1		1		0	0		
986.	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			9.085.484		21.924.900	100	241,32		
		Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	1		1		100	0		
987.	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			295.590.023		592.607.400	75	200,48		
		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		1		0	0		
988.	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			60.000.000		133.184.400	100	221,97		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1		1		100	0		
989.	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			10.590.023		22.923.000	0	216,46		
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1		0		0	0		

990.	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			93.000.000		139.500.000	100	150		
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1		1		100	0		
991.	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			132.000.000		297.000.000	100	225		
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		1		100	0		
992.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**4.292.899.218**		**8.554.120.000**	**141,67**	**199,26**	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)			0		0	0		
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)			0		0	0		
			Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR); presentase kesertaan KB Baru ()	70:67		94,51:94,51		95,71	0		
993.	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			602.839.000		1.035.820.000	356,27	171,82		
		Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	11		1		0	0		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	110		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1		14,16		0	0		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	4		0		0	0		
994.	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			181.500.000		355.700.000	9,09	195,98		
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	11		1		9,09	0		
995.	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			220.000.000		265.600.000	0	120,73		
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	110		0		0	0		
996.	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			101.339.000		220.000.000	1416	217,09		

		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1		14,16		1416	0		
997.	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			100.000.000		194.520.000	0	194,52		
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	4		0		0	0		
998.	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.681.868.771		4.006.422.936	0	238,21		
		Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	0		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	12		0		0	0		
999.	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			387.500.000		813.750.000	0	210		
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	0		0		0	0		
1000.	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			1.294.368.771		3.192.672.936	0	246,66		
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	12		0		0	0		
1001.	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1.508.888.474		2.478.552.264	33,33	164,26		
		Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12		8		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3300		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	12		8		0	0		
1002.	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			35.380.540		76.062.000	66,67	214,98		
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12		8		66,67	0		
1003.	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.324.729.278		2.129.780.437	0	160,77		

		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3300		0		0	0		
1004.	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			65.069.911		132.811.333	0	204,11		
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		0		0	0		
1005.	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			83.708.745		139.898.494	66,67	167,13		
		Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	12		8		66,67	0		
1006.	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			499.302.973		1.033.324.800	0	206,95		
		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	48		0		0	0		
1007.	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB			230.502.973		328.091.800	0	142,34		
		Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	1		0		0	0		
1008.	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			268.800.000		705.233.000	0	262,36		
		Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	48		0		0	0		
1009.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**5.168.143.068**		**8.980.621.020**	**17,99**	**173,77**	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)			0		0	0		
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)			0		0	0		
			Persentase kelompok BKB, BKL, BKR, dan UPPKS yang aktif; persentase kelompok PIK-R aktif ()	75:75		93,28:93,28		100	0		
			Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)			0		0	0		
1010.	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2.824.857.923		5.123.268.200	23,99	181,36		
		Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	1		0		0	0		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2		1		0	0		

			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	165		155		0	0		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	100		0		0	0		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	978		0		0	0		
1011.	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			44.753.000		40.695.600	0	90,93		
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	1		0		0	0		
1012.	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			19.200.000		43.200.000	50	225		
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2		1		50	0		
1013.	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			615.904.923		880.841.600	0	143,02		
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2		0		0	0		
1014.	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			2.145.000.000		4.158.531.000	93,94	193,87		
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	165		155		93,94	0		
1015.	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			-		-	0	0		
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	100		0		0	0		
1016.	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			-		-	0	0		

		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	978		0		0	0		
1017.	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2.343.285.145		3.857.352.820	0	164,61		
		Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	978		0		0	0		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2		0		0	0		
1018.	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			978.000.000		1.467.000.000	0	150		
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	978		0		0	0		
1019.	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			1.365.285.145		2.390.352.820	0	175,08		
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2		0		0	0		
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**148.453.252.183**		**114.326.197.042**	**100**	**77,01**		
1020.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**42.862.875.801**		**35.194.053.360**	**100**	**82,11**	Dinas Perhubungan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
1021.	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			345.580.472		325.120.937	100	94,08		
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		0	0		
1022.	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			182.909.472		169.590.937	100	92,72		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
1023.	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			33.999.500		30.400.000	100	89,41		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
1024.	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			128.671.500		125.130.000	100	97,25		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		100	0		

1025.	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.225.122.429		14.381.330.300	100	88,64		
		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan sesuai standar akuntansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	103		103		0	0		
1026.	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.225.122.429		14.381.330.300	100	88,64		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	103		103		100	0		
1027.	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.141.400.000		1.141.400.000	100	100		
		Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai Prosedur	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		12		0	0		
1028.	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.141.400.000		1.141.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		12		100	0		
1029.	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			246.750.800		186.750.800	100	75,68		
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		0	0		
1030.	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			246.750.800		186.750.800	100	75,68		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		100	0		
1031.	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.005.334.530		3.851.992.309	100	96,17		
		Persentase pelayanan umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		300		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		12		0	0		
1032.	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			390.462.804		390.461.148	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
1033.	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			765.235.151		712.899.640	100	93,16		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
1034.	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			455.970.000		431.480.000	100	94,63		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
1035.	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.395.778.096		1.395.676.000	100	99,99		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		

1036.	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			221.290.000		221.290.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		100	0		
1037.	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			656.598.479		656.185.521	100	99,94		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		300		100	0		
1038.	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			120.000.000		44.000.000	100	36,67		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		12		100	0		
1039.	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.093.968.799		5.334.107.837	100	58,66		
		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30		30		0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		10		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		7		0	0		
1040.	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.421.175.924		2.192.000.000	100	90,53		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		3		100	0		
1041.	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			1.589.671.602		1.088.232.900	100	68,46		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30		30		100	0		
1042.	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			793.164.937		453.164.937	100	57,13		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		10		100	0		
1043.	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			424.043.562		175.224.600	100	41,32		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
1044.	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.865.912.774		1.425.485.400	100	36,87		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		7		100	0		
1045.	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.573.067.520		1.521.013.438	100	96,69		
		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
1046.	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			407.890.000		403.876.000	100	99,02		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100	0		

1047.	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			978.860.000		933.195.558	100	95,33		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1048.	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			186.317.520		183.941.880	100	98,72		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1049.	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.231.651.251		8.452.337.739	100	82,61		
		Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		30		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	500		500		0	0		
1050.	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			976.773.020		823.634.922	100	84,32		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		100	0		
1051.	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.591.537.751		4.136.315.177	100	90,09		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		30		100	0		
1052.	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.113.883.438		2.678.068.438	100	86		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1053.	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.549.457.042		814.319.202	100	52,56		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	500		500		100	0		
1054.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**70.020.238.825**		**52.146.138.922**	**100**	**74,47**	Dinas Perhubungan	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase peenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi (%)	70		70		100	0		
			Konektivitas Darat (Persentase)			16,2		0	0		
1055.	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			57.173.857.272		41.525.358.607	100	72,63		
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	500		500		0	0		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	500		500		0	0		
1056.	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			24.623.334.344		11.107.895.411	100	45,11		
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	500		500		100	0		

1057.	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			32.550.522.928		30.417.463.196	100	93,45		
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	500		500		100	0		
1058.	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			3.546.266.000		2.935.495.000	100	82,78		
		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Terminal Penumpang Tipe C yang layak fungsi	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1		1		0	0		
1059.	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C			1.950.830.000		1.933.700.000	100	99,12		
		Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	12		12		100	0		
1060.	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			1.595.436.000		1.001.795.000	100	62,79		
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1		1		100	0		
1061.	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.144.685.328		1.492.193.850	100	69,58		
		Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2		2		0	0		
1062.	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			44.841.578		22.055.600	100	49,19		
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1		1		100	0		
1063.	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.099.843.750		1.470.138.250	100	70,01		
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2		2		100	0		
1064.	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			934.189.145		929.739.145	100	99,52		
		Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0	0		
1065.	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			863.049.145		862.829.145	100	99,97		
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		100	0		
1066.	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			71.140.000		66.910.000	100	94,05		
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100	0		
1067.	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			304.683.000		244.374.400	100	80,21		
		Persentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0	0		

1068.	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			304.683.000		244.374.400	100	80,21		
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100	0		
1069.	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.025.910.160		4.635.879.600	100	92,24		
		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		0	0		
1070.	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			5.025.910.160		4.635.879.600	100	92,24		
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		100	0		
1071.	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			890.647.920		383.098.320	100	43,01		
		Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
1072.	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			890.647.920		383.098.320	100	43,01		
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
1073.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**35.570.137.557**		**26.986.004.760**	**100**	**75,87**	Dinas Perhubungan	
		Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi air	Konektivitas Laut (Unit)			49		0	0		
			Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi (%)	80		80		100	0		
1074.	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			2.105.707.618		1.105.515.218	100	52,5		
		Persentase pelaksanaan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	2		2		0	0		
1075.	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			2.105.707.618		1.105.515.218	100	52,5		
		Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	2		2		100	0		
1076.	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			26.529.421.952		19.671.874.830	100	74,15		
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	4		4		0	0		
1077.	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal			16.331.002.630		10.774.385.307	100	65,98		
		Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	3		3		100	0		
1078.	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal			10.198.419.322		8.897.489.523	100	87,24		

		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	4		4		100	0		
1079.	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			6.849.285.987		6.125.252.512	100	89,43		
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	12		12		0	0		
1080.	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			115.444.538		114.674.538	100	99,33		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)	4		4		100	0		
1081.	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau			3.047.492.600		2.349.044.646	100	77,08		
		Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	1		1		100	0		
1082.	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau			1.323.148.849		1.298.333.328	100	98,12		
		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1		1		100	0		
1083.	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			2.363.200.000		2.363.200.000	100	100		
		Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	12		12		100	0		
1084.	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			85.722.000		83.362.200	100	97,25		
		Persentase ketersediaan dokumen perizinan Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	40		40		0	0		
1085.	2.15.03.2.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			85.722.000		83.362.200	100	97,25		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	40		40		100	0		
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**25.431.726.180**		**23.081.345.570**	**91,72**	**90,76**		
1086.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.770.922.953**		**8.454.886.331**	**90,46**	**86,53**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	80		80		100	0		
			Persentase Pemenuhan layanan administrasi kantor (%)	0				0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Dinas Komunikasi Informastik dan Statistik (%)	0				0	0		
			Persentase DSSD yang Dipublikasikan (%)	47		47		100	0		

1087.	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			207.271.680		107.826.700	112,5	52,02		
		Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		5		0	0		
1088.	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			160.540.294		90.470.700	100	56,35		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100	0		
1089.	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.731.386		17.356.000	125	37,14		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		5		125	0		
1090.	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.189.500.285		6.251.943.129	93,33	86,96		
		Terselenggaranya Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		39		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		3		0	0		
1091.	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.130.319.699		6.193.011.929	86,67	86,85		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		39		86,67	0		
1092.	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			59.180.586		58.931.200	100	99,58		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		3		100	0		
1093.	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			124.800.000		124.800.000	100	100		
		Terselenggaranya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
1094.	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			124.800.000		124.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1095.	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.116.604.297		1.018.311.766	100	91,2		
		Terselenggaranya Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		25		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40		40		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1500		1.500		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		15		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		100		0	0		
1096.	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			33.176.486		14.086.000	100	42,46		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		25		100	0		

1097.	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			93.166.821		46.781.000	100	50,21		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40		40		100	0		
1098.	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			116.940.000		96.260.000	100	82,32		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1500		1.500		100	0		
1099.	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.222.290		11.995.000	100	59,32		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		15		100	0		
1100.	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			853.098.700		849.189.766	100	99,54		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		100		100	0		
1101.	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			119.198.200		119.187.360	100	99,99		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
1102.	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			119.198.200		119.187.360	100	99,99		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
1103.	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			562.161.706		490.063.373	38,89	87,17		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1104.	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			224.331.815		209.800.000	8,33	93,52		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1		8,33	0		
1105.	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			231.090.000		185.328.933	8,33	80,2		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		1		8,33	0		
1106.	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			106.739.891		94.934.440	100	88,94		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1107.	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			451.386.785		342.754.003	100	75,93		
		Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		

1108.	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			180.539.369		111.250.921	100	61,62		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		100	0		
1109.	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			116.203.815		77.318.082	100	66,54		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100	0		
1110.	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.843.601		29.385.000	100	98,46		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100	0		
1111.	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			124.800.000		124.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1112.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**5.517.565.450**		**5.293.982.140**	**91,33**	**95,95**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Menigkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Lapor) yang Diselesaikan (Angka)	2		3		150	0		
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)			92,7		0	0		
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis ()					0	0		
1113.	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5.517.565.450		5.293.982.140	91,33	95,95		
		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	101		100		0	0		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	100		49		0	0		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1		1		0	0		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	200		200		0	0		
			Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1000		1.000		0	0		
1114.	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			2.653.427.600		2.572.772.742	100	96,96		
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1		1		100	0		
1115.	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			67.195.400		58.177.200	99,01	86,58		
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di	101		100		99,01	0		

			Dinas Kominfo (Komunitas)								
1116.	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			338.505.158		277.715.158	49	82,04		
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	100		49		49	0		
1117.	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			152.017.717		140.125.600	100	92,18		
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1		1		100	0		
1118.	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1.622.936.718		1.568.387.200	100	96,64		
		Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	200		200		100	0		
1119.	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			683.482.857		676.804.240	100	99,02		
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1000		1.000		100	0		
1120.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**10.143.237.777**		**9.332.477.099**	**100**	**92,01**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Angka)	3		3,01		100,33	0		
			Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis ()					0	0		
			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (Angka)	2		2		100	0		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)			3,01		0	0		
			Indeks Pemerintah Digital (Indeks)			0		0	0		
1121.	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			10.143.237.777		9.332.477.099	100	92,01		
		Terlaksananya Dukungan dalam Penyelenggaraan SPBE/Pemerintah Digital	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	47		47		0	0		
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan (Aplikasi)	2		2		0	0		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	47		47		0	0		
1122.	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			575.307.751		427.576.164	100	74,32		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	47		47		100	0		
1123.	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			587.654.500		425.725.411	100	72,44		
		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan (Aplikasi)	2		2		100	0		
1124.	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			8.980.275.526		8.479.175.524	100	94,42		
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	47		47		100	0		
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**11.289.367.947**		**9.375.911.259**	**72,4**	**83,05**		

1125.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.850.181.914**		**9.178.097.352**	**101,91**	**84,59**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan (Persen)	100				0	0		
1126.	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			346.695.476		195.140.700	100	56,29		
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
1127.	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			122.333.972		55.489.700	100	45,36		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100	0		
1128.	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			168.456.957		124.141.000	100	73,69		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1129.	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.904.547		15.510.000	100	27,74		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1130.	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.266.485.680		5.116.887.171	132,5	81,65		
		Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		53		0	0		
1131.	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.266.485.680		5.116.887.171	132,5	81,65		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		53		132,5	0		
1132.	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			416.000.000		416.000.000	100	100		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
1133.	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			416.000.000		416.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1134.	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.160.902.323		1.151.264.682	100	99,17		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1135.	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.992.550		30.979.499	100	99,96		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1136.	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			99.008.656		98.667.968	100	99,66		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1137.	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			132.570.000		124.310.000	100	93,77		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1138.	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			39.501.117		39.380.945	100	99,7		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1139.	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			51.840.000		51.840.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
1140.	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			806.990.000		806.086.270	100	99,89		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1141.	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			308.515.893		118.515.000	100	38,41		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		12		0	0		
1142.	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			308.515.893		118.515.000	100	38,41		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		12		100	0		
1143.	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.421.988.000		1.357.864.869	100	95,49		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1144.	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			85.800.000		85.800.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		4		100	0		
1145.	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			220.188.000		167.264.869	100	75,96		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1146.	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.116.000.000		1.104.800.000	100	99		

		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1147.	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			929.594.542		822.424.930	100	88,47		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		13		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		0	0		
1148.	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			363.420.750		357.350.159	100	98,33		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		13		100	0		
1149.	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			566.173.792		465.074.771	100	82,14		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100	0		
1150.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**84.499.825**		**60.850.707**	**50**	**72,01**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilakukan (%)	65		50		76,92	0		
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)					0	0		
1151.	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			84.499.825		60.850.707	50	72,01		
		Jumlah Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	110		0		0	0		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	45		45		0	0		
1152.	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			-		-	0	0		
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	110		0		0	0		
1153.	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			84.499.825		60.850.707	100	72,01		
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	45		45		100	0		
1154.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**-**		**-**	**0**	**0**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Orang)	50				0	0		
			Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)					0	0		
1155.	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	60		0		0	0		

1156.	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	60		0		0	0		
1157.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**354.686.208**		**136.963.200**	**12,5**	**38,62**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informasi ke formal dan Jumlah Pertumbuhan Wirausaha (%)			12,32		0	0		
			Persentase produk UMKM yang diberdayakan (Persen)	1,8				0	0		
1158.	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			354.686.208		136.963.200	12,5	38,62		
		Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	22		0		0	0		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	40		0		0	0		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	1		0		0	0		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	100		50		0	0		
1159.	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			-		-	0	0		
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	22		0		0	0		
1160.	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			-		-	0	0		
		Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	40		0		0	0		
1161.	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			-		-	0	0		
		Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	1		0		0	0		
1162.	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			354.686.208		136.963.200	50	38,62		
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	100		50		50	0		
1163.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**-**		**-**	**0**	**0**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan Ekspor (%)					0	0		
			Persentase fasilitasi peningkatan pengembangan UMKM yang dilakukan (UKM)	80				0	0		
1164.	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			-		-	0	0		
		Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	20		0		0	0		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	40		0		0	0		

1165.	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			-		-	0	0		
		Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	20		0		0	0		
1166.	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			-		-	0	0		
		Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	40		0		0	0		
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**22.756.065.222**		**18.250.816.652**	**114,35**	**80,2**		
1167.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.833.762.929**		**15.632.326.367**	**91,61**	**78,82**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			95,48		0	0		
1168.	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			167.934.998		119.412.227	100	71,11		
		Persentase Peningkatan Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		6		0	0		
1169.	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			108.877.182		71.650.011	100	65,81		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100	0		
1170.	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			59.057.816		47.762.216	100	80,87		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		6		100	0		
1171.	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.703.450.246		8.612.982.993	100	88,76		
		Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN DPMPTSP Kabupaten Bengkalis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52		52		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		5		0	0		
1172.	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.647.846.794		8.557.898.562	100	88,7		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52		52		100	0		
1173.	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			55.603.452		55.084.431	100	99,07		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		5		100	0		
1174.	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			332.800.000		332.800.000	100	100		

		Persentase pendataan dan penataan barang milik perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	16		16		0	0		
1175.	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			332.800.000		332.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	16		16		100	0		
1176.	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			44.673.000		43.997.200	100	98,49		
		Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		20		0	0		
1177.	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			44.673.000		43.997.200	100	98,49		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		20		100	0		
1178.	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.474.087.688		1.448.718.980	82,59	98,28		
		Persentase terlaksananya pemenuhan dan pemeliharaan prasrana dan sarana kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	21		15		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	55		55		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8		4		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		10		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	45		30		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		180		0	0		
1179.	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			129.459.965		125.388.099	71,43	96,85		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	21		15		71,43	0		
1180.	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			271.622.709		271.582.754	100	99,99		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	55		55		100	0		
1181.	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			106.822.477		106.822.477	50	100		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8		4		50	0		
1182.	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			134.880.000		134.780.000	100	99,93		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		100	0		
1183.	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			143.582.216		124.895.388	100	86,99		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		10		100	0		
1184.	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			39.000.000		39.000.000	66,67	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	45		30		66,67	0		

1185.	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			648.720.321		646.250.262	90	99,62		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		180		90	0		
1186.	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.160.962.827		1.969.588.500	95,65	91,14		
		Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	23		22		0	0		
1187.	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.160.962.827		1.969.588.500	95,65	91,14		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	23		22		95,65	0		
1188.	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.066.405.920		1.856.640.455	81,25	89,85		
		Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		15		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	17		17		0	0		
1189.	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			56.645.000		56.200.000	100	99,21		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		2		100	0		
1190.	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.317.967.800		1.131.047.335	25	85,82		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25	0		
1191.	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			312.000.000		307.200.000	100	98,46		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		15		100	0		
1192.	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			379.793.120		362.193.120	100	95,37		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	17		17		100	0		
1193.	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.883.448.250		1.248.186.012	100	32,14		
		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		15		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	314		157		0	0		

1194.	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			165.430.000		153.499.325	100	92,79		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		100	0		
1195.	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			36.814.000		27.002.000	100	73,35		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		100	0		
1196.	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			10.000.000		10.000.000	150	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		15		150	0		
1197.	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44.430.000		44.430.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		100	0		
1198.	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.384.064.250		770.544.687	100	22,77		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		100	0		
1199.	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			242.710.000		242.710.000	50	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	314		157		50	0		
1200.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**157.330.360**		**91.335.902**	**100**	**58,05**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)			95		0	0		
			Jumlah Regulasi mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1201.	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			157.330.360		91.335.902	100	58,05		
		Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		1		0	0		
1202.	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			157.330.360		91.335.902	100	58,05		
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		1		100	0		
1203.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**507.961.375**		**507.367.590**	**100**	**99,88**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (Laporan)	1		1		100	0		
			Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)			99,88		0	0		
1204.	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			507.961.375		507.367.590	100	99,88		
		Persentase terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		

1205.	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			507.961.375		507.367.590	100	99,88		
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
1206.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**299.058.328**		**290.136.500**	**163,89**	**97,02**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)			96,08		0	0		
			Jumlah Laporan Pelayanan Penanaman Modal (Laporan)	1		1		100	0		
1207.	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			299.058.328		290.136.500	163,89	97,02		
		Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibdang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	40		40		0	0		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	15		40		0	0		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	120		150		0	0		
1208.	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			72.500.000		72.500.000	100	100		
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	40		40		100	0		
1209.	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			18.147.956		10.076.500	266,67	55,52		
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	15		40		266,67	0		
1210.	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			208.410.372		207.560.000	125	99,59		
		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	120		150		125	0		
1211.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**1.940.172.754**		**1.719.769.793**	**269,4**	**88,64**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Laporan)	1		1		100	0		
			Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)			98,6		0	0		
1212.	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.940.172.754		1.719.769.793	269,4	88,64		

		Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	7		14		0	0		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	70		403		0	0		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	80		26		0	0		
1213.	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			46.633.404		46.457.000	200	99,62		
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	7		14		200	0		
1214.	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			74.597.350		74.170.500	575,71	99,43		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	70		403		575,71	0		
1215.	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			1.818.942.000		1.599.142.293	32,5	87,92		
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	80		26		32,5	0		
1216.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**17.779.476**		**9.880.500**	**75**	**55,57**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)			100		0	0		
			umlah Laporan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Laporan)	1		1		100	0		
1217.	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			17.779.476		9.880.500	75	55,57		
		Jumlah Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkatan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	12		9		0	0		
1218.	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			17.779.476		9.880.500	75	55,57		
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	12		9		75	0		
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**10.843.590.681**		**3.852.388.257**	**459,69**	**35,53**		

1219.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**1.926.655.219**		**1.425.538.425**	**36,04**	**73,99**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pembinaan Kepemudaan (%)	95		54,03		56,87	0		
			Persentase Pemuda Mandiri (%)			1		0	0		
1220.	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.012.242.719		559.927.925	37,88	55,32		
		Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	120		0		0	0		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1		0		0	0		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	55		15		0	0		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	30		30		0	0		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2		2		0	0		
1221.	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota			174.456.000		75.315.000	0	43,17		
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1222.	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			181.964.000		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	120		0		0	0		
1223.	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			166.283.897		16.370.000	0	9,84		
		Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1		0		0	0		
1224.	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota			19.698.000		11.410.000	27,27	57,92		
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	55		15		27,27	0		
1225.	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			82.367.897		72.360.000	100	87,85		

		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	30		30		100	0		
1226.	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota			387.472.925		384.472.925	100	99,23		
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2		2		100	0		
1227.	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			914.412.500		865.610.500	25	94,66		
		Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	4		1		0	0		
1228.	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			914.412.500		865.610.500	25	94,66		
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	4		1		25	0		
1229.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**8.916.935.462**		**2.426.849.832**	**883,33**	**27,22**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Prestasi Olahraga (%)	80		86,81		108,51	0		
			Jumlah atlet berprestasi (Angka)			26		0	0		
1230.	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7.277.615.738		1.963.572.232	33,33	26,98		
		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	30		10		0	0		
1231.	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			7.277.615.738		1.963.572.232	33,33	26,98		
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	30		10		33,33	0		
1232.	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		39.350.000	50	78,7		
		Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1		1		0	0		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	200		0		0	0		
1233.	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			50.000.000		39.350.000	100	78,7		
		Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1		1		100	0		
1234.	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			-		-	0	0		
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	200		0		0	0		
1235.	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			129.319.000		7.940.000	0	6,14		

		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	100		0		0	0		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	1		0		0	0		
1236.	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			121.175.000		-	0	0		
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	100		0		0	0		
1237.	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			8.144.000		7.940.000	0	97,5		
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	1		0		0	0		
1238.	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			1.425.203.724		381.195.600	3025	26,75		
		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	1		60		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		1		0	0		
1239.	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota			121.203.724		77.195.600	6000	63,69		
		Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	1		60		6000	0		
1240.	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			1.304.000.000		304.000.000	50	23,31		
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		1		50	0		
1241.	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			34.797.000		34.792.000	0	99,99		
		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	0		1		0	0		
1242.	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			34.797.000		34.792.000	0	99,99		
		Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	0		1		0	0		
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**413.344.031**		**356.659.728**	**152,74**	**86,29**		
1243.	**2.20.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**412.782.103**		**356.097.800**	**152,74**	**86,27**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang Akurat, Mutakhir dan Dapat Diakses untuk Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Kebijakan Publik	Persentase DSSD yang Dipublikasikan (%)	47		47		100	0		
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	80		80		100	0		
			Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)			250		0	0		
1244.	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			412.782.103		356.097.800	152,74	86,27		
		Terselenggaranya Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan DSSD pada Modul E-Walidata	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2300		3.513		0	0		

1245.	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			412.782.103		356.097.800	152,74	86,27		
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2300		3.513		152,74	0		
1246.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**561.928**		**561.928**	**0**	**100**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Angka)	2,26		2,26		100	0		
1247.	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			561.928		561.928	0	100		
		Terselenggaranya Statistik Sektoral Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0		0		0	0		
1248.	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			561.928		561.928	0	100		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0		0		0	0		
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**206.349.025**		**129.290.064**	**100**	**62,66**		
1249.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**206.349.025**		**129.290.064**	**100**	**62,66**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	30,02		33,01		109,96	0		
1250.	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			136.601.025		70.130.064	100	51,34		
		Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	47		47		0	0		
1251.	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			71.881.332		33.060.064	100	45,99		
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1		1		100	0		
1252.	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			64.719.693		37.070.000	100	57,28		
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	47		47		100	0		
1253.	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			69.748.000		59.160.000	100	84,82		
		Terlaksananya Operasionalisasi Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	47		47		0	0		
1254.	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			69.748.000		59.160.000	100	84,82		
		Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	47		47		100	0		
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**4.331.445.601**		**2.572.943.556**	**441,9**	**59,4**		
1255.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**1.157.237.050**		**819.710.000**	**35,83**	**70,83**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Tradisi Budaya yang Dilestarikan (%)	100		70,57		70,57	0		

			Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)			20		0	0		
1256.	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			274.320.020		205.710.000	100	74,99		
		Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2		2		0	0		
1257.	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			274.320.020		205.710.000	100	74,99		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2		2		100	0		
1258.	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			282.917.030		14.000.000	21,67	4,95		
		Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	3		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	20		2		0	0		
1259.	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			122.693.020		6.000.000	33,33	4,89		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	3		1		33,33	0		
1260.	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			160.224.010		8.000.000	10	4,99		
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	20		2		10	0		
1261.	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000		600.000.000	0	100		
		Persentase Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		0		0	0		
1262.	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			600.000.000		600.000.000	0	100		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		0		0	0		
1263.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**3.072.438.556**		**1.680.028.556**	**200**	**54,68**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal (%)			54,68		0	0		
			Persentase Benda, Situs dan Kawasan Bernilai Sejarah yang dilestarikan (%)	90		48,05		53,39	0		
1264.	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.072.438.556		1.680.028.556	200	54,68		
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Bernilai Sejarah yang dilestarikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	20		40		0	0		
1265.	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			3.072.438.556		1.680.028.556	200	54,68		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	20		40		200	0		
1266.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**80.080.000**		**51.520.000**	**150**	**64,34**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatnya warisan budaya yang di lestarikan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan (%)			64,34		0	0		

			Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	50		40		80	0		
1267.	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			80.080.000		51.520.000	150	64,34		
		Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2		3		0	0		
1268.	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			80.080.000		51.520.000	150	64,34		
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2		3		150	0		
1269.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**21.689.995**		**21.685.000**	**2600**	**99,98**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatnya tata kelola museum	Persentase kunjungan museum (%)	80		99,98		124,98	0		
1270.	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			21.689.995		21.685.000	2600	99,98		
		Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1		26		0	0		
1271.	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			21.689.995		21.685.000	2600	99,98		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1		26		2600	0		
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**13.453.815.309**		**10.922.872.411**	**88,16**	**81,19**		
1272.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.156.341.890**		**10.626.574.835**	**85,27**	**80,77**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			93,12		0	0		
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian) ()					0	0		
1273.	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			99.623.799		55.989.500	100	56,2		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Keprgawaian)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1274.	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			26.018.500		25.568.500	100	98,27		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1275.	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			73.605.299		30.421.000	100	41,33		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1276.	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.144.355.914		7.577.313.903	100	82,86		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		55		0	0		
1277.	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.144.355.914		7.577.313.903	100	82,86		

		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		55		100	0		
1278.	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			790.400.000		-	0	0		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
1279.	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			790.400.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
1280.	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			409.087.244		408.846.947	75,82	99,94		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		35		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	85		0		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9		9		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	91		91		0	0		
1281.	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.555.197		8.554.831	70	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		35		70	0		
1282.	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.221.914		100.104.816	0	99,88		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	85		0		0	0		
1283.	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			71.865.000		71.853.000	100	99,98		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9		9		100	0		
1284.	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.587.073		29.500.000	109,09	99,71		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11		12		109,09	0		
1285.	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			198.858.060		198.834.300	100	99,99		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	91		91		100	0		
1286.	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36.676.000		36.676.000	100	100		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
1287.	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			36.676.000		36.676.000	100	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
1288.	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.731.143.565		1.603.196.049	100	92,61		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		0	0		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6		6		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		0	0		
1289.	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			108.085.525		108.082.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		100	0		
1290.	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			342.000.000		271.831.529	100	79,48		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6		6		100	0		
1291.	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.281.058.040		1.223.282.520	100	95,49		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		100	0		
1292.	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			945.055.368		944.552.436	100	99,95		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		10		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
1293.	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			192.587.968		192.557.491	100	99,98		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		10		100	0		
1294.	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			752.467.400		751.994.945	100	99,94		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1295.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**273.151.801**		**272.180.048**	**95,37**	**99,64**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Program Pembinaan Perpustakaan ()					0	0		
			Persentase Pengelolaan Perpustakaan (%)			88		0	0		
1296.	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			247.077.801		246.230.048	93,06	99,66		
		Persentase Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	20		15		0	0		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	6		5		0	0		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2		2		0	0		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	30		30		0	0		

			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	500		500		0	0		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2		2		0	0		
1297.	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			34.995.220		34.791.500	75	99,42		
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	20		15		75	0		
1298.	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			35.000.400		34.880.000	83,33	99,66		
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	6		5		83,33	0		
1299.	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			51.211.000		51.207.900	100	99,99		
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2		2		100	0		
1300.	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.999.980		4.948.500	100	98,97		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	30		30		100	0		
1301.	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			74.375.201		73.907.948	100	99,37		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	500		500		100	0		
1302.	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			46.496.000		46.494.200	100	100		
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2		2		100	0		
1303.	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.074.000		25.950.000	100	99,52		
		Persentase Masyarakat Gemar Membaca	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	10		10		0	0		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	12		12		0	0		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2		2		0	0		
1304.	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			17.150.000		17.110.000	100	99,77		
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	10		10		100	0		
1305.	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			3.800.000		3.800.000	100	100		

		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	12		12		100	0		
1306.	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			5.124.000		5.040.000	100	98,36		
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2		2		100	0		
1307.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**24.321.618**		**24.117.528**	**66,67**	**99,16**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Pelestarian dan penyimpanan Naskah Kuno Di Tingkat Kabupaten/Kota ()					0	0		
			Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno (%)			96,74		0	0		
1308.	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			24.321.618		24.117.528	66,67	99,16		
		Persentase Pelestarian Koleksi Naskah Kuno Milik Daerah	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	150		100		0	0		
1309.	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			24.321.618		24.117.528	66,67	99,16		
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	150		100		66,67	0		
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**74.510.200**		**74.497.400**	**100**	**99,98**		
1310.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**72.010.740**		**71.998.400**	**100**	**99,98**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)			98,98		0	0		
			Persentase Pengelolaan Arsip ()					0	0		
1311.	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			69.511.280		69.499.400	100	99,98		
		Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	46		46		0	0		
1312.	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			69.511.280		69.499.400	100	99,98		
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	46		46		100	0		
1313.	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			2.499.460		2.499.000	100	99,98		
		Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	46		46		0	0		
1314.	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			2.499.460		2.499.000	100	99,98		
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	46		46		100	0		
1315.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**2.499.460**		**2.499.000**	**100**	**99,98**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip (%)			99,98		0	0		
			Persentase Arsip Yang Dilindungi dan Diselamatkan ()					0	0		

1316.	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			2.499.460		2.499.000	100	99,98		
		Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi Dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	5		5		0	0		
1317.	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			2.499.460		2.499.000	100	99,98		
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	5		5		100	0		
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**17.935.289.324**		**13.501.466.816**	**110,48**	**75,28**		
1318.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.854.474.892**		**9.601.814.882**	**101,19**	**74,7**	Dinas Perikanan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH DI DINAS PERIKANAN (%)	100		100		100	0		
1319.	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			195.448.000		187.319.500	133,33	95,84		
		Persentase Peningkatan Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		2		0	0		
1320.	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			64.450.000		59.320.000	100	92,04		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
1321.	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			72.748.000		69.875.000	100	96,05		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
1322.	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			58.250.000		58.124.500	200	99,78		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		2		200	0		
1323.	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.383.030.903		7.168.451.704	100	69,04		
		Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49		49		0	0		
1324.	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.383.030.903		7.168.451.704	100	69,04		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49		49		100	0		
1325.	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			353.600.000		345.600.000	100	97,74		
		Persentase pendataan dan penataan barang milik perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
1326.	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			353.600.000		345.600.000	100	97,74		

		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1327.	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			991.752.312		989.585.350	100	99,78		
		Persentase terlaksananya pemenuhan dan pemeliharaan prasrana dan sarana kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	35		35		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		2		0	0		
1328.	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			28.136.685		28.136.685	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
1329.	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			89.555.148		89.552.043	100	100		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
1330.	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			93.500.000		91.500.000	100	97,86		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
1331.	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			55.322.479		55.241.381	100	99,85		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
1332.	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			39.600.000		39.600.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	35		35		100	0		
1333.	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			600.138.000		600.055.241	100	99,99		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
1334.	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			85.500.000		85.500.000	100	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
1335.	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			59.794.542		57.230.000	62,5	95,71		
		Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		1		0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
1336.	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			50.061.000		47.500.000	25	94,88		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		1		25	0		

1337.	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.733.542		9.730.000	100	99,96		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
1338.	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			351.874.135		341.255.675	100	96,98		
		Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		0	0		
1339.	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			107.244.875		97.946.000	100	91,33		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1340.	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			207.982.300		207.560.875	100	99,8		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100	0		
1341.	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			36.646.960		35.748.800	100	97,55		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		100	0		
1342.	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			518.975.000		512.372.653	100	98,73		
		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		0	0		
1343.	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			93.824.000		90.145.460	100	96,08		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		100	0		
1344.	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			58.356.000		55.819.693	100	95,65		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		100	0		
1345.	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.395.000		96.007.500	100	99,6		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		6		100	0		
1346.	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			270.400.000		270.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		100	0		
1347.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**3.303.155.972**		**2.145.862.822**	**133,33**	**64,96**	Dinas Perikanan	

		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	94,23				0	0		
			persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	94,23		185,19		196,53	0		
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			6.863,83		0	0		
1348.	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.428.719.396		1.239.949.946	150	86,79		
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	2		4		0	0		
1349.	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			647.868.000		647.060.000	100	99,88		
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		100	0		
1350.	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			780.851.396		592.889.946	200	75,93		
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	2		4		200	0		
1351.	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.874.436.576		905.912.876	100	48,33		
		Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan, usaha dan fasilitasi nelayan kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0		0		0	0		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	0		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	2		2		0	0		
1352.	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			170.518.576		170.518.576	0	100		
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0		0		0	0		
1353.	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			41.600.000		41.600.000	0	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	0		0		0	0		
1354.	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil			1.662.318.000		693.794.300	100	41,74		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	2		2		100	0		
1355.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**1.485.429.060**		**1.472.070.812**	**166,67**	**99,1**	Dinas Perikanan	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	98,75				0	0		
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			4.461,79		0	0		
			persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	98,75				0	0		
1356.	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.485.429.060		1.472.070.812	166,67	99,1		
		Persentase terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1		3		0	0		
1357.	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			221.542.000		211.476.000	100	95,46		
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
1358.	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			139.394.060		137.443.400	100	98,6		
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1		1		100	0		
1359.	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.124.493.000		1.123.151.412	300	99,88		
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1		3		300	0		
1360.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**82.126.400**		**81.896.000**	**100**	**99,72**	Dinas Perikanan	
		Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati	persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya (%)	97,00				0	0		
			Luasan Kawasan Konservasi (KmÄ²)			0		0	0		
1361.	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			82.126.400		81.896.000	100	99,72		
		Persentase terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari Operasi)	1		1		0	0		
1362.	3.25.05.2.01.0003	Operasi Kapal Pengawas Perikanan			82.126.400		81.896.000	100	99,72		
		Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari Operasi)	1		1		100	0		
1363.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**210.103.000**		**199.822.300**	**100**	**95,11**	Dinas Perikanan	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	persentase tingkat konsumsi ikan (%)	98,18				0	0		
			Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)			47,41		0	0		
1364.	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			53.414.000		51.692.400	100	96,78		
		Persentase terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala miko dan kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1		1		0	0		
1365.	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			53.414.000		51.692.400	100	96,78		
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1		1		100	0		
1366.	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			91.329.000		89.532.400	100	98,03		
		Persentase terlaksananya bimbingan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3		3		0	0		

1367.	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			91.329.000		89.532.400	100	98,03		
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3		3		100	0		
1368.	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			65.360.000		58.597.500	100	89,65		
		Persentase peningkatan angka konsumsi ikan dan pelatihan pengolahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	5		5		0	0		
1369.	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			65.360.000		58.597.500	100	89,65		
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	5		5		100	0		
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**35.611.729.947**		**24.774.345.472**	**290,09**	**69,57**		
1370.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.420.594.659**		**18.272.516.806**	**91,13**	**89,48**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			97,52		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (%)	100		243,46		243,46	0		
1371.	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.944.000		45.950.000	70	37,99		
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		2		0	0		
1372.	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			86.786.000		40.950.000	100	47,19		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
1373.	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.158.000		5.000.000	40	14,64		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		2		40	0		
1374.	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.799.342.983		8.331.645.681	70,44	85,02		
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63		73		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		1		0	0		
1375.	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.728.987.983		8.277.314.481	115,87	85,08		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63		73		115,87	0		
1376.	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			70.355.000		54.331.200	25	77,22		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		1		25	0		

1377.	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.032.000.000		2.016.000.000	8,33	99,21		
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		1		0	0		
1378.	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2.032.000.000		2.016.000.000	8,33	99,21		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		1		8,33	0		
1379.	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.973.645.584		1.752.283.703	89,05	88,78		
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		25		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		18		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	40		40		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		300		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		1		0	0		
1380.	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			138.798.782		138.737.350	125	99,96		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		25		125	0		
1381.	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			249.890.034		249.782.646	100	99,96		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20		100	0		
1382.	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			362.000.000		310.395.000	100	85,74		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20		100	0		
1383.	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			241.142.768		167.024.500	90	69,26		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		18		90	0		
1384.	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			64.000.000		57.800.000	100	90,31		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	40		40		100	0		
1385.	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			791.670.000		769.884.207	100	97,25		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		300		100	0		
1386.	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			126.144.000		58.660.000	8,33	46,5		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		1		8,33	0		
1387.	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			207.700.462		207.700.462	200	100		

		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2		0	0		
1388.	3.26.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			207.700.462		207.700.462	200	100		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2		200	0		
1389.	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			754.266.410		608.465.038	100	80,67		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
1390.	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			88.206.250		83.728.000	100	94,92		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100	0		
1391.	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			488.700.000		350.556.398	100	71,73		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1392.	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			177.360.160		174.180.640	100	98,21		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1393.	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.532.695.220		5.310.471.922	102,5	95,98		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		11		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		20		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	19		19		0	0		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1		1		0	0		
1394.	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			397.000.000		351.230.673	110	88,47		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		11		110	0		
1395.	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			249.879.000		239.822.050	100	95,98		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		20		100	0		
1396.	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.853.994.220		4.688.369.199	100	96,59		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	19		19		100	0		
1397.	3.26.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			31.822.000		31.050.000	100	97,57		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1		1		100	0		

1398.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**13.401.261.288**		**4.712.717.466**	**1004,55**	**35,17**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Daerah yang Dikembangkan (%)	30		30		100	0		
			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (%)			43,8		0	0		
1399.	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			13.389.441.288		4.701.057.466	2000	35,11		
		Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	1		20		0	0		
1400.	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			13.389.441.288		4.701.057.466	2000	35,11		
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	1		20		2000	0		
1401.	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			11.820.000		11.660.000	9,09	98,65		
		Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	11		1		0	0		
1402.	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			11.820.000		11.660.000	9,09	98,65		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	11		1		9,09	0		
1403.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**1.789.874.000**		**1.789.111.200**	**1565,25**	**99,96**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata (%)			10,2		0	0		
			Persentase Kunjungan wisata (%)	100		99,96		99,96	0		
1404.	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.789.874.000		1.789.111.200	1565,25	99,96		
		Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2		1		0	0		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2		61,61		0	0		
1405.	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			49.944.000		49.381.200	50	98,87		
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2		1		50	0		
1406.	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			1.739.930.000		1.739.730.000	3080,5	99,99		
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2		61,61		3080,5	0		
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**82.776.991.052**		**58.714.446.151**	**88,8**	**70,93**		
1407.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.764.051.102**		**11.116.519.885**	**87,08**	**87,09**	Dinas Perkebunan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		

			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan (%)	100		100		100	0		
1408.	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			348.958.000		188.650.200	122,5	54,06		
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		6		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		5		0	0		
1409.	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			168.987.210		105.488.610	120	62,42		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		6		120	0		
1410.	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			179.970.790		83.161.590	125	46,21		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		5		125	0		
1411.	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.576.080.382		8.386.858.994	116	87,58		
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		58		0	0		
1412.	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.576.080.382		8.386.858.994	116	87,58		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		58		116	0		
1413.	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			221.374.166		198.330.000	66,67	89,59		
		Persentase pengelolaan aset	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1414.	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			15.250.000		11.130.000	100	72,98		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1415.	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			187.200.000		187.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1416.	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			18.924.166		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1417.	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			36.750.000		36.700.000	100	99,86		
		Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Kompetensi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		4		0	0		
1418.	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			36.750.000		36.700.000	100	99,86		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		4		100	0		
1419.	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			749.918.988		692.605.418	92,52	92,36		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		16		0	0		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73		48		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		15		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	135		133		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
1420.	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.402.582		24.377.000	100	99,9		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		16		100	0		
1421.	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			125.184.756		124.453.000	65,75	99,42		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73		48		65,75	0		
1422.	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			58.786.000		47.988.000	100	81,63		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
1423.	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			54.460.430		54.460.000	83,33	100		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		15		83,33	0		
1424.	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			21.000.000		17.500.000	100	83,33		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		100	0		
1425.	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			295.885.220		295.627.418	98,52	99,91		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	135		133		98,52	0		
1426.	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			170.200.000		128.200.000	100	75,32		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1427.	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60.259.404		-	0	0		
		Persentase Barang Milik Daerah yang dicatat sebagai Aset	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	23		0		0	0		
1428.	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			60.259.404		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	23		0		0	0		
1429.	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.053.159.174		1.020.046.650	100	96,86		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		0	0		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		0	0		
1430.	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			472.385.900		465.276.100	100	98,49		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		4		100	0		
1431.	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			175.000.000		169.718.950	100	96,98		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		100	0		
1432.	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			405.773.274		385.051.600	100	94,89		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		100	0		
1433.	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			717.550.988		593.328.623	78,86	82,69		
		Persentase Pemeliharaan Aset Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		7		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	114		22		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
1434.	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			217.768.070		162.116.666	175	74,44		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		7		175	0		
1435.	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			241.723.000		186.965.700	100	77,35		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		100	0		
1436.	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			58.350.000		44.536.339	19,3	76,33		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	114		22		19,3	0		
1437.	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0	0		
1438.	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			199.709.918		199.709.918	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1439.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**97.967.588**		**35.780.000**	**66,67**	**36,52**	Dinas Perkebunan	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan	Persentase Peningkatan sarana produksi Perkebunan (%)	5,50		5,5		100	0		

			Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan (%)			100		0	0		
1440.	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			86.483.588		26.330.000	50	30,45		
		Persentase pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung perkebunan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3200		0		0	0		
1441.	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			81.613.588		26.330.000	100	32,26		
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3		3		100	0		
1442.	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang			4.870.000		-	0	0		
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3200		0		0	0		
1443.	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			11.484.000		9.450.000	100	82,29		
		Jumlah laporan pengawasan mutu benih/bibit dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1		1		0	0		
1444.	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			11.484.000		9.450.000	100	82,29		
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1		1		100	0		
1445.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**21.968.674.970**		**10.788.427.029**	**105,36**	**49,11**	Dinas Perkebunan	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Persentase Peningkatan Prasarana Produksi Perkebunan (%)	0,65		0,65		100	0		
			Persentase peningkatan prasarana perkebunan (%)	0,65		0,65		100	0		
1446.	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			705.908.680		470.931.900	83,33	66,71		
		Persentase Pegembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	2		1		0	0		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1		1		0	0		
1447.	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			512.442.680		422.901.900	100	82,53		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2		2		100	0		
1448.	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			18.880.000		18.880.000	50	100		
		terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	2		1		50	0		
1449.	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			174.586.000		29.150.000	100	16,7		
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1		1		100	0		
1450.	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			21.262.766.290		10.317.495.129	138,4	48,52		
		Persentase prasarana perkebunan yang dibangun	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	47		64		0	0		

			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	32		45		0	0		
1451.	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			12.482.605.549		4.500.924.075	136,17	36,06		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	47		64		136,17	0		
1452.	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			8.780.160.741		5.816.571.054	140,63	66,25		
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	32		45		140,63	0		
1453.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**221.851.660**		**135.469.060**	**46,3**	**61,06**	Dinas Perkebunan	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)			100		0	0		
			Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)			100		0	0		
			Persentase penanganan gangguan usaha perkebunan (%)	1,24		1,24		100	0		
1454.	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			221.851.660		135.469.060	46,3	61,06		
		Persentase pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	4288.36		4.078,9		0	0		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	330		0		0	0		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	330		144,5		0	0		
1455.	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			107.353.000		51.843.000	95,12	48,29		
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	4288.36		4.078,9		95,12	0		
1456.	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			3.274.000		2.560.000	0	78,19		
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	330		0		0	0		
1457.	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			111.224.660		81.066.060	43,79	72,88		
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	330		144,5		43,79	0		
1458.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**275.009.229**		**189.244.940**	**100**	**68,81**	Dinas Perkebunan	
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha perkebunan	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan (%)			100		0	0		
			Persentase pelaku usaha perkebunan yang patuh (%)	70,47		70,47		100	0		
1459.	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			275.009.229		189.244.940	100	68,81		
		Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1		1		0	0		
1460.	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			137.082.229		88.291.000	100	64,41		

		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1		1		100	0		
1461.	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			137.927.000		100.953.940	100	73,19		
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1		1		100	0		
1462.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**297.502.205**		**130.276.818**	**68,33**	**43,79**	Dinas Perkebunan	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh peternakan dan perkebunan	Persentase peningkatan kompetensi kelembagaan pekebun (%)	39		39		100	0		
			Persentase Sdm Penyuluh Pertanian Dan Petani Pekebun Yang Ditingkatkan (%)			100		0	0		
1463.	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			297.502.205		130.276.818	68,33	43,79		
		Perasentase Pelaksanaan Penyuluhan Bidang Perkebunan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5		3		0	0		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1		0		0	0		
1464.	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			69.074.840		20.795.840	100	30,11		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1		1		100	0		
1465.	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			79.175.995		47.281.060	50	59,72		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2		1		50	0		
1466.	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			15.073.874		14.009.874	60	92,94		
		Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5		3		60	0		
1467.	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			91.489.240		24.925.070	100	27,24		
		Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1		1		100	0		
1468.	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			33.000.386		23.264.974	100	70,5		
		Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	2		2		100	0		
1469.	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			9.687.870		-	0	0		
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1		0		0	0		
1470.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.642.275.394**		**19.523.882.486**	**96,51**	**94,58**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		

			Persentase penyusunan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	100		100		100	0		
1471.	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.799.862		45.558.234	50	97,35		
		Persentase terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0	0		
1472.	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			46.799.862		45.558.234	100	97,35		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1473.	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0	0		
1474.	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.467.448.745		16.429.440.363	100	94,06		
		Persentase penyelengaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		0	0		
1475.	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.467.448.745		16.429.440.363	100	94,06		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		100	0		
1476.	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			380.302.823		380.243.440	100	99,98		
		Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1477.	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			353.600.000		353.600.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1478.	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			26.702.823		26.643.440	100	99,78		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1479.	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			748.950.110		733.084.485	90,28	97,88		
		Persentase pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	64		64		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1480.	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.129.924		19.124.811	100	99,97		

		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1481.	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			59.555.677		54.702.539	100	91,85		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	64		64		100	0		
1482.	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			37.924.000		34.404.000	66,67	90,72		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		66,67	0		
1483.	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			87.202.104		85.124.685	75	97,62		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		3		75	0		
1484.	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			27.150.000		22.500.000	100	82,87		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
1485.	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			517.988.405		517.228.450	100	99,85		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1486.	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			844.699.766		794.661.622	100	94,08		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1487.	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			507.600.000		478.000.000	100	94,17		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1488.	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			146.690.500		142.885.706	100	97,41		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1489.	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			190.409.266		173.775.916	100	91,26		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1490.	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.154.074.088		1.140.894.342	118,41	98,86		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		6		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		50		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23		23		0	0		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		23		0	0		
1491.	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			277.271.050		273.867.005	100	98,77		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		6		100	0		
1492.	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.500.000		25.432.535	54,55	99,74		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		6		54,55	0		
1493.	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.020.000		41.065.000	50	87,34		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		50		50	0		
1494.	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			791.798.038		788.387.802	100	99,57		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23		23		100	0		
1495.	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.485.000		12.142.000	287,5	97,25		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		23		287,5	0		
1496.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**5.392.029.556**		**4.594.428.438**	**76,79**	**85,21**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan dan pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (%)	100		98		98	0		
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)					0	0		
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)					0	0		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)					0	0		
1497.	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			102.638.000		61.730.000	100	60,14		
		Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1		1		0	0		
1498.	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			102.638.000		61.730.000	100	60,14		
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1		1		100	0		
1499.	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			478.830.000		395.244.691	100	82,54		
		Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	11		11		0	0		
1500.	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			478.830.000		395.244.691	100	82,54		
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	11		11		100	0		
1501.	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			366.336.772		276.256.772	100	75,41		

		Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1		1		0	0		
1502.	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			366.336.772		276.256.772	100	75,41		
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1		1		100	0		
1503.	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			4.444.224.784		3.861.196.975	7,14	86,88		
		Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	420		30		0	0		
1504.	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			4.444.224.784		3.861.196.975	7,14	86,88		
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	420		30		7,14	0		
1505.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**13.389.559.202**		**5.408.418.942**	**102,08**	**40,39**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan dan pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)					0	0		
			Persentase terselenggaranya program penatagunaan tanah (%)	100		86,97		86,97	0		
			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	100		86,97		86,97	0		
1506.	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			1.028.980.000		548.550.000	100	53,31		
		Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		1		0	0		
1507.	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota			1.028.980.000		548.550.000	100	53,31		
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		1		100	0		
1508.	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			12.360.579.202		4.859.868.942	102,5	39,32		
		Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase terselenggaranya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	24		3		0	0		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1		3		0	0		
			Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2		0		0	0		
1509.	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			7.546.668.252		2.901.463.842	12,5	38,45		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	24		3		12,5	0		
1510.	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			3.200.496.225		1.072.589.434	300	33,51		

		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1		3		300	0		
1511.	3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			452.450.000		212.350.000	100	46,93		
		Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	3		3		100	0		
1512.	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan			1.160.964.725		673.465.666	100	58,01		
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	4		4		100	0		
1513.	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			-		-	0	0		
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2		0		0	0		
1514.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**3.346.302.250**		**3.087.798.693**	**90**	**92,27**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)					0	0		
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)					0	0		
			Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat (%)	100		82,1		82,1	0		
1515.	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			1.042.568.250		967.294.600	100	92,78		
		Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12		12		0	0		
1516.	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			766.892.000		713.210.000	100	93		
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	1		1		100	0		
1517.	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			275.676.250		254.084.600	100	92,17		
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12		12		100	0		
1518.	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.194.420.000		2.030.662.893	75	92,54		
		Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	2		1		0	0		
1519.	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			56.020.000		47.900.000	100	85,51		
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1		1		100	0		
1520.	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			2.138.400.000		1.982.762.893	50	92,72		

		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	2		1		50	0		
1521.	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			109.314.000		89.841.200	100	82,19		
		Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1		1		0	0		
1522.	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			109.314.000		89.841.200	100	82,19		
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1		1		100	0		
1523.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**54.592.000**		**54.050.000**	**100**	**99,01**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perternakan dan pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)					0	0		
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)					0	0		
			Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100		100		100	0		
1524.	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			54.592.000		54.050.000	100	99,01		
		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2992		2.992		0	0		
1525.	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			54.592.000		54.050.000	100	99,01		
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2992		2.992		100	0		
1526.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**4.327.175.896**		**3.650.149.860**	**100**	**84,35**	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh peternakan dan perkebunan	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)					0	0		
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)					0	0		
			Persentase Penyuluhan Pertanian (%)	100		89,13		89,13	0		
1527.	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			4.327.175.896		3.650.149.860	100	84,35		
		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11		11		0	0		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	155		155		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	11		11		0	0		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	11		11		0	0		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	67		67		0	0		
1528.	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.966.092.348		1.852.203.346	100	94,21		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11		11		100	0		

1529.	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			621.611.034		138.704.800	100	22,31		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	155		155		100	0		
1530.	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			333.952.514		323.931.714	100	97		
		Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	11		11		100	0		
1531.	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			1.100.000.000		1.038.150.000	100	94,38		
		Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	11		11		100	0		
1532.	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			305.520.000		297.160.000	100	97,26		
		Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	67		67		100	0		
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**25.507.359.628**		**16.901.336.769**	**58,3**	**66,26**		
1533.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.235.181.596**		**16.338.574.215**	**29,42**	**84,94**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Presentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (persen)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		100		100	0		
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		100		100	0		
			Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	100		100		100	0		
1534.	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			372.201.710		11.000.000	20	2,96		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0	0		
1535.	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			219.290.192		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0	0		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		1		0	0		
1536.	3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.020.275		11.000.000	100	99,82		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		1		100	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0	0		
1537.	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			51.150.926		-	0	0		

		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0	0		
1538.	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			66.658.184		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		0	0		
1539.	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			24.082.133		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		0	0		
1540.	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.856.609.491		8.800.136.746	33,33	89,28		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		62		0	0		
1541.	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.773.013.640		8.783.713.246	100	89,88		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		62		100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
1542.	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			30.466.025		16.423.500	0	53,91		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0	0		
1543.	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			53.129.826		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0	0		
1544.	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.832.000.000		1.777.600.000	100	97,03		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
1545.	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.832.000.000		1.777.600.000	100	97,03		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1546.	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.840.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		0		0	0		
1547.	3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			18.840.000		-	0	0		

		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		0		0	0		
1548.	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.817.187.670		952.320.098	20,07	52,41		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	180		1		0	0		
1549.	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			564.696.958		488.379.510	0,56	86,49		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	180		1		0,56	0		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500		300		0	0		
1550.	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			594.150.000		183.300.000	60	30,85		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500		300		60	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		10		0	0		
1551.	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			60.471.292		31.629.006	50	52,3		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		10		50	0		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	26		0		0	0		
1552.	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			23.500.000		23.500.000	0	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	26		0		0	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0	0		
1553.	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			175.000.000		75.000.000	0	42,86		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0	0		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		10		0	0		
1554.	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			163.414.249		150.511.582	50	92,1		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		10		50	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0	0		
1555.	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			210.955.171		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
1556.	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0	0		
1557.	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.518.154.399		1.250.126.133	56,25	82,35		

		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		1		0	0		
1558.	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			960.894.000		749.783.333	25	78,03		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		1		25	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50		25		0	0		
1559.	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			110.313.150		108.186.000	50	98,07		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50		25		50	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		0	0		
1560.	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.000.000		41.600.000	100	52		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		100	0		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		2		0	0		
1561.	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			366.947.249		350.556.800	50	95,53		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		2		50	0		
1562.	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.820.188.326		3.547.391.238	16,67	92,86		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0	0		
1563.	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.243.200.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0	0		
1564.	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			126.630.000		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		0	0		
1565.	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		3.182.400.000	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		4		0	0		
1566.	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			450.358.326		364.991.238	50	81,04		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		4		50	0		

1567.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**89.100.715**		**60.001.264**	**122,22**	**67,34**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (%)	65		100		153,85	0		
			Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)			0		0	0		
			persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (%)	5		0		0	0		
			Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota (%)	100		0		0	0		
1568.	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			23.810.000		4.660.000	66,67	19,57		
		Tersedianya DokumenTanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3		2		0	0		
1569.	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			23.810.000		4.660.000	66,67	19,57		
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3		2		66,67	0		
1570.	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			30.200.000		23.641.264	200	78,28		
		Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	1		2		0	0		
1571.	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			30.200.000		23.641.264	200	78,28		
		Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	1		2		200	0		
1572.	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			35.090.715		31.700.000	100	90,34		
		Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	5		5		0	0		
1573.	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			35.090.715		31.700.000	100	90,34		
		Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	5		5		100	0		
1574.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**364.421.672**		**96.715.300**	**186,67**	**26,54**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	100		13		13	0		
			Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)					0	0		
			Persentase Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan (%)	100		0		0	0		
1575.	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			231.778.704		91.355.300	333,33	39,41		
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3		20		0	0		
1576.	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			168.000.491		91.355.300	666,67	54,38		
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3		20		666,67	0		

		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	7		0		0	0		
1577.	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			63.778.213		-	0	0		
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	7		0		0	0		
1578.	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			132.642.968		5.360.000	40	4,04		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5		2		0	0		
1579.	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			44.923.377		2.680.000	40	5,97		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5		2		40	0		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5		2		0	0		
1580.	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			87.719.591		2.680.000	40	3,06		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5		2		40	0		
1581.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**5.452.063.750**		**338.300.000**	**47,22**	**6,2**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	85		13		15,29	0		
			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (Nilai)			0		0	0		
			Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)					0	0		
			inflasi pangan bergejolak (%)	(3-5)		0		0	0		
1582.	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			10.065.000		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1		0		0	0		
1583.	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			10.065.000		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1		0		0	0		
1584.	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			5.441.998.750		338.300.000	70,83	6,22		
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0	0		
1585.	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			5.308.010.000		308.010.000	100	5,8		
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100	0		

		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12		5		0	0		
1586.	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			133.988.750		30.290.000	41,67	22,61		
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12		5		41,67	0		
1587.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**54.072.205**		**17.400.000**	**125**	**32,18**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	5		2		40	0		
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)			0		0	0		
1588.	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			54.072.205		17.400.000	125	32,18		
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2		5		0	0		
1589.	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			54.072.205		17.400.000	250	32,18		
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2		5		250	0		
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	10		0		0	0		
1590.	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			-		-	0	0		
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	10		0		0	0		
1591.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**312.519.690**		**50.345.990**	**16,67**	**16,11**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	45		16		35,56	0		
			Persentase kepatuhan pelaku usaha. (%)			0		0	0		
1592.	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			312.519.690		50.345.990	16,67	16,11		
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3000		1.000		0	0		
1593.	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			213.487.690		27.585.990	33,33	12,92		
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3000		1.000		33,33	0		
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	55		0		0	0		
1594.	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			99.032.000		22.760.000	0	22,98		
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	55		0		0	0		
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**3.509.868.575**		**1.562.000.400**	**33,33**	**44,5**		

1595.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**3.379.037.537**		**1.562.000.400**	**50**	**46,23**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Presentase Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	100		15		15	0		
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)			75		0	0		
1596.	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			3.379.037.537		1.562.000.400	50	46,23		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	5		0		0	0		
1597.	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			33.163.769		-	0	0		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	5		0		0	0		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	5		5		0	0		
1598.	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			339.803.869		338.135.045	100	99,51		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	5		5		100	0		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	19		19		0	0		
1599.	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			2.966.967.868		1.223.865.355	100	41,25		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	19		19		100	0		
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0	0		
1600.	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			39.102.031		-	0	0		
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0	0		
1601.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**82.159.519**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Dokumen Hasil Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam 1 tahun (%)	100		0		0	0		
			Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)			0		0	0		
1602.	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			82.159.519		-	0	0		

		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	5		0		0	0		
1603.	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			82.159.519		-	0	0		
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	5		0		0	0		
1604.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**48.671.519**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)			0		0	0		
			Dokumen Hasil Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam 1 tahun (%)	100		0		0	0		
1605.	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			48.671.519		-	0	0		
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	9		0		0	0		
1606.	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			48.671.519		-	0	0		
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	9		0		0	0		
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**94.511.819**		**91.462.439**	**100**	**96,77**		
1607.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**54.745.495**		**54.575.095**	**100**	**99,69**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi (%)	100		99,69		99,69	0		
			Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)			99,69		0	0		
1608.	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			54.745.495		54.575.095	100	99,69		
		Terselenggaranya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	1		1		0	0		
1609.	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			54.745.495		54.575.095	100	99,69		
		Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	1		1		100	0		

1610.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**39.766.324**		**36.887.344**	**100**	**92,76**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (%)	100		100		100	0		
1611.	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			39.766.324		36.887.344	100	92,76		
		Terselenggaranya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	16		16		0	0		
1612.	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi			39.766.324		36.887.344	100	92,76		
		Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	16		16		100	0		
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**179.997.396.806**		**199.636.598.468**	**92,88**	**110,91**		
1613.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**123.177.247.083**		**103.834.087.789**	**95,58**	**84,3**	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksankan di Sekretriat Daerah (%)	100		90,74		90,74	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			90,74		0	0		
1614.	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			694.547.912		623.334.119	90	89,75		
		Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		2		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
1615.	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			328.702.829		302.393.562	50	92		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		2		50	0		
1616.	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			41.734.048		40.725.226	100	97,58		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1617.	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			50.330.926		46.162.311	100	91,72		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1618.	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			132.379.621		121.481.400	100	91,77		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		

1619.	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			141.400.488		112.571.620	100	79,61		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1620.	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.919.285.267		29.195.172.714	100	94,42		
		Terlaksananya pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	216		216		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
1621.	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.613.040.669		28.923.335.439	100	94,48		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	216		216		100	0		
1622.	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			119.715.947		118.777.245	100	99,22		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1623.	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			46.547.706		17.830.800	100	38,31		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1624.	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			39.203.081		37.550.564	100	95,78		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1625.	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			30.530.411		29.049.115	100	95,15		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1		100	0		
1626.	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			70.247.453		68.629.551	100	97,7		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1627.	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			737.716.715		719.920.663	100	97,59		
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	31		31		0	0		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		0	0		

1628.	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			624.000.000		606.400.000	100	97,18		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	31		31		100	0		
1629.	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			113.716.715		113.520.663	100	99,83		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1630.	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			397.727.430		301.758.083	66,67	75,87		
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	9		9		0	0		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	46		0		0	0		
1631.	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			319.978.650		243.539.000	100	76,11		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	9		9		100	0		
1632.	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			77.748.780		58.219.083	100	74,88		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		100	0		
1633.	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	46		0		0	0		
1634.	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.973.873.379		23.057.500.264	100	88,77		
		Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15		15		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	11		11		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		3		0	0		
1635.	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			630.945.200		251.795.200	100	39,91		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100	0		
1636.	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.218.879.715		842.770.531	100	69,14		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100	0		
1637.	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.701.827.861		1.285.884.596	100	75,56		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15		15		100	0		

1638.	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.671.267.000		5.645.997.000	100	99,55		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100	0		
1639.	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.007.684.808		737.736.102	100	73,21		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
1640.	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.607.122.570		5.167.903.800	100	78,22		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	11		11		100	0		
1641.	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			9.136.146.225		9.125.413.035	100	99,88		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		3		100	0		
1642.	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.877.621.123		3.370.453.150	100	42,79		
		Tercapainya kondisi aset perangkat daerah yang baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	75		75		0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		9		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		0	0		
1643.	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			1.477.430.912		563.862.300	100	38,17		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	75		75		100	0		
1644.	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.121.521.161		1.928.034.550	100	37,65		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		9		100	0		
1645.	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.278.669.050		878.556.300	100	68,71		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100	0		
1646.	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.670.270.980		13.471.167.442	100	91,83		
		Terlaksananya penyediaan kebutuhan rutin kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4000		4.000		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9		9		0	0		
1647.	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.671.483.700		6.547.000.000	100	98,13		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4000		4.000		100	0		
1648.	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.166.684.000		3.521.562.681	100	84,52		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		100	0		
1649.	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.832.103.280		3.402.604.761	100	88,79		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9		9		100	0		
1650.	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.972.955.163		25.211.323.646	100	74,21		

		Tercapainya kondisi aset perangkat daerah yang baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	75		75		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		75		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	176		176		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		50		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	45		45		0	0		
1651.	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			4.376.159.850		4.376.060.710	100	100		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	75		75		100	0		
1652.	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.263.394.664		4.261.478.366	100	99,96		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		75		100	0		
1653.	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			9.269.410.984		5.696.371.590	100	61,45		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	176		176		100	0		
1654.	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.900.973.565		4.714.013.140	100	59,66		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		50		100	0		
1655.	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.163.016.100		6.163.399.840	100	75,5		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	45		45		100	0		
1656.	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.538.840.227		1.226.749.193	100	79,72		
		Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2		2		0	0		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		0	0		
1657.	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			226.668.249		213.992.242	100	94,41		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		100	0		
1658.	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			329.800.000		329.800.000	100	100		

		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
1659.	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			200.000.000		59.993.310	100	30		
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2		2		100	0		
1660.	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			782.371.978		622.963.641	100	79,62		
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		100	0		
1661.	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			196.422.789		135.000.000	100	68,73		
		Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
1662.	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			116.422.789		55.000.000	100	47,24		
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
1663.	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			40.000.000		40.000.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
1664.	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			40.000.000		40.000.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
1665.	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			1.443.463.761		1.843.064.603	86,67	127,68		
		Meningkatnya kualitas sistem tata kelola yang baik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	3		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
1666.	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			272.338.300		250.115.494	100	91,84		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1		1		100	0		
1667.	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			295.365.744		285.898.300	33,33	96,79		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	3		1		33,33	0		
1668.	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			286.444.305		229.308.345	100	80,05		
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		1		100	0		

1669.	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			30.407.815		522.513.244	100	1718,35		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		1		100	0		
1670.	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			558.907.597		555.229.220	100	99,34		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1671.	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.754.522.337		4.678.643.912	100	98,4		
		Terlaksananya semua kegiatan Kepala Daerah dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1		1		0	0		
1672.	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			1.795.883.010		1.790.156.685	100	99,68		
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1		1		100	0		
1673.	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1.385.215.000		1.332.631.000	100	96,2		
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1		1		100	0		
1674.	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1.573.424.327		1.555.856.227	100	98,88		
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1		1		100	0		
1675.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**50.540.301.416**		**85.661.810.815**	**74,17**	**169,49**	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase terselenggaranya administrasi pemerintahan dan kewilayahan (%)	100		97,3		97,3	0		
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)			255,61		0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100		98,24		98,24	0		
1676.	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			777.968.650		692.640.456	66,67	89,03		
		Terselenggaranya administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3		0		0	0		
1677.	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			292.642.000		291.795.456	100	99,71		
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1		1		100	0		
1678.	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			256.751.720		217.360.800	100	84,66		
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2		2		100	0		
1679.	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			228.574.930		183.484.200	0	80,27		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3		0		0	0		

1680.	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			47.153.158.518		82.498.028.272	100	174,96		
		Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1		1		0	0		
1681.	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			24.111.948.291		42.073.578.374	100	174,49		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1		1		100	0		
1682.	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			5.346.869.664		5.205.394.800	100	97,35		
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		1		100	0		
1683.	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			17.694.340.563		35.219.055.098	100	199,04		
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1		1		100	0		
1684.	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			1.565.829.728		1.465.432.908	30	93,59		
		Persentase terselenggaranya administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	30		13		0	0		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	5		2		0	0		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	30		2		0	0		
1685.	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			348.237.228		348.076.728	43,33	99,95		
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	30		13		43,33	0		
1686.	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			1.121.911.100		1.021.865.280	40	91,08		
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	5		2		40	0		
1687.	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			95.681.400		95.490.900	6,67	99,8		
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	30		2		6,67	0		
1688.	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			1.043.344.520		1.005.709.179	100	96,39		

		Terlaksananya kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	2		2		0	0		
1689.	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			455.487.500		455.488.040	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	2		2		100	0		
1690.	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			129.862.592		116.774.500	100	89,92		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1		1		100	0		
1691.	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			457.994.428		433.446.639	100	94,64		
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	2		2		100	0		
1692.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**6.279.848.307**		**10.140.699.864**	**100**	**161,48**	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakaan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)			0		0	0		
			Meningkatnya kualitas layanan perekonomian dan pembangunan (%)	100		97,3		97,3	0		
			Persentase Koordinasi, Pemantauan dan Penataan Kebijakan (%)	80		29		36,25	0		
1693.	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1.378.324.938		1.413.247.344	100	102,53		
		Tersedianya bahan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5		5		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1		1		0	0		
1694.	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			385.411.562		575.600.556	100	149,35		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1		1		100	0		
1695.	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			571.736.821		522.513.244	100	91,39		
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5		5		100	0		
1696.	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			333.533.705		277.893.297	100	83,32		
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1		1		100	0		
1697.	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			87.642.850		37.240.247	100	42,49		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1		1		100	0		
1698.	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			693.905.905		666.475.519	100	96,05		

		Terlaksananya Administrasi pembangunan yang tertib dan berkualitas baik diKabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	11		11		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12		12		0	0		
1699.	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			204.267.720		199.679.000	100	97,75		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1700.	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			250.715.065		246.924.304	100	98,49		
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	11		11		100	0		
1701.	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			238.923.120		219.872.215	100	92,03		
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12		12		100	0		
1702.	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			3.488.139.659		7.439.177.687	100	213,27		
		Terlaksananya Proses Pembinaan Bagi Pelaku Pengadaan, Proses Pengadaan Barang dan Jasa Serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	474		474		0	0		
1703.	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			292.549.334		648.118.032	100	221,54		
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1		1		100	0		
1704.	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			428.326.815		1.038.351.431	100	242,42		
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1		1		100	0		
1705.	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			2.767.263.510		5.752.708.224	100	207,88		
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	474		474		100	0		
1706.	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			719.477.805		621.799.314	100	86,42		
		Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1		1		0	0		

1707.	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			162.169.347		159.808.030	100	98,54		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1		1		100	0		
1708.	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			254.806.007		214.170.227	100	84,05		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1		1		100	0		
1709.	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			302.502.451		247.821.057	100	81,92		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1		1		100	0		
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**120.941.193.382**		**111.886.395.994**	**96,88**	**92,51**		
1710.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**64.522.482.996**		**61.154.807.877**	**91,67**	**94,78**	Sekretariat DPRD	
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			93		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksankan di Sekretriat DPRD (%)	100		91		91	0		
1711.	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			654.757.422		461.013.868	100	70,41		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		0	0		
1712.	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			325.442.492		235.219.268	100	72,28		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
1713.	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			53.602.283		41.778.500	100	77,94		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1714.	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			49.629.356		24.616.400	100	49,6		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		

1715.	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			63.517.863		59.587.100	100	93,81		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		100	0		
1716.	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			162.565.428		99.812.600	100	61,4		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		100	0		
1717.	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.273.661.122		7.606.725.555	82,26	91,94		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		51		0	0		
1718.	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.273.661.122		7.606.725.555	82,26	91,94		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		51		82,26	0		
1719.	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.802.400.000		1.535.372.800	100	85,18		
		Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	60		60		0	0		
1720.	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.802.400.000		1.535.372.800	100	85,18		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	60		60		100	0		
1721.	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			248.856.000		-	0	0		
		Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	70		0		0	0		
1722.	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			248.856.000		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	70		0		0	0		
1723.	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.141.374.992		6.602.768.332	100	92,46		
		Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		20		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	375		375		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		200		0	0		
1724.	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			198.368.337		195.482.083	100	98,55		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1725.	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.870.175		150.807.175	100	99,96		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		

1726.	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.311.300.000		4.865.681.829	100	91,61		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		100	0		
1727.	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			292.688.780		280.621.886	100	95,88		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		20		100	0		
1728.	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			610.240.000		610.240.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	375		375		100	0		
1729.	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			577.907.700		499.935.359	100	86,51		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		200		100	0		
1730.	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.216.071.930		1.146.689.052	85,71	94,29		
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	28		20		0	0		
1731.	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			191.036.000		190.028.892	100	99,47		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
1732.	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.025.035.930		956.660.160	71,43	93,33		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	28		20		71,43	0		
1733.	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.669.183.650		1.491.091.424	92,98	89,33		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1765		1.705		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	17		14		0	0		
1734.	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			116.533.650		116.375.736	96,6	99,86		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1765		1.705		96,6	0		
1735.	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.251.750.000		1.075.059.028	100	85,88		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100	0		
1736.	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			300.900.000		299.656.660	82,35	99,59		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	17		14		82,35	0		
1737.	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.879.253.330		5.658.708.023	87,63	96,25		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		0	0		

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22		21		0	0		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	99		30		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		7		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		0	0		
1738.	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			117.140.000		104.763.695	100	89,43		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		100	0		
1739.	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			799.078.000		743.643.471	95,45	93,06		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22		21		95,45	0		
1740.	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			49.500.000		45.332.500	30,3	91,58		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	99		30		30,3	0		
1741.	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			797.581.000		767.169.500	100	96,19		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		7		100	0		
1742.	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.755.954.330		2.719.154.330	100	98,66		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		100	0		
1743.	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.360.000.000		1.278.644.527	100	94,02		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		100	0		
1744.	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			35.456.024.868		34.694.406.400	100	97,85		
		Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45		45		0	0		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5		5		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45		45		0	0		
1745.	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			33.510.449.868		32.849.858.887	100	98,03		
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45		45		100	0		
1746.	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			1.788.075.000		1.785.047.513	100	99,83		
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5		5		100	0		
1747.	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			157.500.000		59.500.000	100	37,78		

		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45		45		100	0		
1748.	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			2.180.899.682		1.958.032.423	100	89,78		
		Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	7		7		0	0		
1749.	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			2.180.899.682		1.958.032.423	100	89,78		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	7		7		100	0		
1750.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**56.418.710.386**		**50.731.588.117**	**102,7**	**89,92**	Sekretariat DPRD	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Peningkatan Pelayanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	100		92		92	0		
			Persentase Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan (%)			94		0	0		
1751.	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			3.439.727.855		2.673.372.184	126,67	77,72		
		Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	22		22		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	3		7		0	0		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		1		0	0		
1752.	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			456.970.720		456.759.200	100	99,95		
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	22		22		100	0		
1753.	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			2.594.148.969		2.121.042.012	233,33	81,76		
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	3		7		233,33	0		
1754.	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			251.031.812		8.646.400	100	3,44		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	3		3		100	0		
1755.	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			114.355.765		70.789.372	100	61,9		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2		2		100	0		
1756.	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			23.220.589		16.135.200	100	69,49		
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		1		100	0		
1757.	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			1.144.917.125		1.072.481.686	100	93,67		
		Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2		2		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1		1		0	0		
1758.	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			117.872.983		109.127.400	100	92,58		
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2		2		100	0		
1759.	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			126.906.460		125.994.000	100	99,28		
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2		2		100	0		
1760.	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			367.094.751		333.182.600	100	90,76		
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		100	0		
1761.	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			533.042.931		504.177.686	100	94,58		
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1		1		100	0		
1762.	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			14.093.255.820		13.710.276.779	100	97,28		
		Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	71		71		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	35		35		0	0		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	71		71		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	71		71		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	36		36		0	0		
1763.	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			3.247.766.991		3.127.246.659	100	96,29		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	71		71		100	0		
1764.	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			2.358.843.809		2.274.272.806	100	96,41		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	35		35		100	0		
1765.	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			3.674.226.592		3.669.323.501	100	99,87		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	71		71		100	0		
1766.	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			2.554.651.166		2.554.400.000	100	99,99		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	71		71		100	0		
1767.	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			2.257.767.262		2.085.033.813	100	92,35		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	36		36		100	0		
1768.	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			7.387.164.493		6.270.959.423	100	84,89		

		Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	27		27		0	0		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7		7		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	150		150		0	0		
1769.	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			1.826.276.000		1.139.349.299	100	62,39		
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4		4		100	0		
1770.	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			1.867.897.960		1.848.000.000	100	98,93		
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	27		27		100	0		
1771.	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			627.050.000		481.000.000	100	76,71		
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7		7		100	0		
1772.	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			443.363.950		194.422.600	100	43,85		
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	3		3		100	0		
1773.	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			2.622.576.583		2.608.187.524	100	99,45		
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	150		150		100	0		
1774.	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			24.956.082.532		22.523.330.179	80,56	90,25		
		Terlaksanya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	45		45		0	0		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	27000		11.250		0	0		
1775.	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			98.988.000		42.600.000	100	43,04		
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	45		45		100	0		
1776.	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			20.231.456.580		19.491.422.599	100	96,34		
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3		3		100	0		
1777.	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah			4.625.637.952		2.989.307.580	41,67	64,62		
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	27000		11.250		41,67	0		
1778.	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			208.932.240		168.298.052	100	80,55		
		Terlaksanaya pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	2		2		0	0		
1779.	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			208.932.240		168.298.052	100	80,55		
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	2		2		100	0		

1780.	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			5.188.630.321		4.312.869.814	98,41	83,12		
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	27		27		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	210		200		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	1		1		0	0		
1781.	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			567.499.833		566.434.711	100	99,81		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	27		27		100	0		
1782.	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4.526.057.000		3.659.805.211	95,24	80,86		
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	210		200		95,24	0		
1783.	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			95.073.488		86.629.892	100	91,12		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	1		1		100	0		
	5.01	**PERENCANAAN**			**20.616.473.205**		**19.519.226.058**	**92,16**	**94,68**		
1784.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.640.544.284**		**13.670.551.431**	**95**	**93,37**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah di Bappeda (Persentase)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
1785.	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			331.504.725		322.666.605	66,67	97,33		
		Persentase pemenuhan laporan perencanaan dan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0	0		
1786.	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			317.287.199		309.884.605	100	97,67		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100	0		
1787.	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.217.526		12.782.000	100	89,9		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		100	0		
1788.	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0	0		
1789.	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.749.613.538		9.068.568.688	100	93,01		
		Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		60		0	0		

1790.	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.749.613.538		9.068.568.688	100	93,01		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		60		100	0		
1791.	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			182.400.000		108.800.000	100	59,65		
		Persentase honorarium jasa keamanan kantor yang dibayarkan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	9		9		0	0		
1792.	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			182.400.000		108.800.000	100	59,65		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	9		9		100	0		
1793.	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.229.885.271		2.146.461.761	100	96,26		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	22		22		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73		73		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3300		3.300		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		18		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	21		21		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	375		375		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		4		0	0		
1794.	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			46.484.833		46.459.000	100	99,94		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	22		22		100	0		
1795.	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			482.332.026		480.225.000	100	99,56		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73		73		100	0		
1796.	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			258.020.000		239.100.000	100	92,67		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3300		3.300		100	0		
1797.	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			62.640.811		62.540.800	100	99,84		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		18		100	0		
1798.	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			54.000.000		42.600.000	100	78,89		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	21		21		100	0		
1799.	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.045.963.601		1.045.276.961	100	99,93		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	375		375		100	0		
1800.	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			280.444.000		230.260.000	100	82,11		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4		4		100	0		

		pada SKPD	pada SKPD (Dokumen)								
1801.	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			153.204.700		151.603.800	100	98,96		
		Persentase Barang Milik Daerah yang dicatat sebagai Aset	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		7		0	0		
1802.	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			153.204.700		151.603.800	100	98,96		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		7		100	0		
1803.	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			638.549.050		543.238.992	100	85,07		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3500		3.500		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
1804.	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			55.893.850		33.190.000	100	59,38		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3500		3.500		100	0		
1805.	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			369.394.000		325.223.720	100	88,04		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1806.	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			213.261.200		184.825.272	100	86,67		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1807.	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.355.387.000		1.329.211.585	100	98,07		
		Persentase Pemeliharaan Aset Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		7		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13		13		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		25		0	0		
1808.	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			261.665.000		259.906.727	100	99,33		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		7		100	0		
1809.	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			212.235.000		209.071.899	100	98,51		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13		13		100	0		
1810.	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			268.800.000		249.600.000	100	92,86		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		

1811.	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		612.687.000		610.632.959	100	99,66		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		25	100	0		
1812.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**3.715.697.535**		**3.658.554.431**	**75**	**98,46**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (%)	100		100	100	0		
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)			100	0	0		
1813.	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.863.723.989		1.840.438.483	100	98,75		
		Persentase penyampaian kelengkapan dokumen pada area perencanaan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1		1	0	0		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1		1	0	0		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	98		98	0	0		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		2	0	0		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	11		11	0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2		2	0	0		
1814.	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			170.777.896		169.663.372	100	99,35		
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1		1	100	0		
1815.	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			58.338.422		54.662.800	100	93,7		
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1		1	100	0		
1816.	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			97.200.000		89.600.000	100	92,18		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	98		98	100	0		
1817.	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			108.482.808		99.596.007	100	91,81		
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		2	100	0		
1818.	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			115.550.227		115.244.103	100	99,74		
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	11		11	100	0		
1819.	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.313.374.636		1.311.672.201	100	99,87		
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2		2	100	0		
1820.	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			-		-	0	0		

		Persentase pemenuhan laporan monitoring dan evaluasi perencanaan dan program unggulan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	17		0		0	0		
1821.	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			-		-	0	0		
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1		0		0	0		
1822.	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	17		0		0	0		
1823.	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.701.106.642		1.674.793.946	100	98,45		
		Persentase pemenuhan laporan monitoring dan evaluasi perencanaan dan program unggulan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4		4		0	0		
1824.	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			1.329.600.770		1.327.835.174	100	99,87		
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1		1		100	0		
1825.	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			371.505.872		346.958.772	100	93,39		
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4		4		100	0		
1826.	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			150.866.904		143.322.002	50	95		
		Persentase usulan partisipatif yang diakomodir pada dokumen perencanaan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1827.	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			150.866.904		143.322.002	100	95		
		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1		1		100	0		
1828.	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	0		
1829.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**2.260.231.386**		**2.190.120.196**	**100**	**96,9**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidng pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidangperekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra (%)	99		99		100	0		

			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)			80		0	0		
1830.	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			720.914.017		687.761.305	100	95,4		
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		0	0		
1831.	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			135.189.492		128.003.261	100	94,68		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4		4		100	0		
1832.	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			22.846.068		17.852.000	100	78,14		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4		4		100	0		
1833.	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			68.689.158		68.588.800	100	99,85		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1		1		100	0		
1834.	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			325.132.594		317.655.247	100	97,7		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4		4		100	0		
1835.	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			169.056.705		155.661.997	100	92,08		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		100	0		
1836.	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			883.822.873		860.382.195	100	97,35		
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1		1		0	0		
1837.	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			58.370.000		57.653.800	100	98,77		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		100	0		
1838.	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			193.236.200		190.243.600	100	98,45		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		100	0		
1839.	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			12.798.172		8.939.500	100	69,85		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		100	0		
1840.	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			153.123.744		148.475.400	100	96,96		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		100	0		
1841.	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			67.941.900		65.488.600	100	96,39		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		100	0		
1842.	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			67.592.000		62.703.360	100	92,77		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		1		100	0		
1843.	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			14.141.048		13.718.500	100	97,01		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		1		100	0		
1844.	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			316.619.809		313.159.435	100	98,91		

		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1		1		100	0		
1845.	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			655.494.496		641.976.696	100	97,94		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1		1		0	0		
1846.	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			57.651.764		55.430.164	100	96,15		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		100	0		
1847.	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			62.461.831		61.488.866	100	98,44		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		100	0		
1848.	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			331.631.985		330.783.219	100	99,74		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		100	0		
1849.	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			29.041.620		23.725.000	100	81,69		
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		100	0		
1850.	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			20.832.214		18.639.801	100	89,48		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1		1		100	0		
1851.	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			153.875.082		151.909.646	100	98,72		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1		1		100	0		

	5.02	**KEUANGAN**			**810.227.297.558**		**464.535.101.371**	**113,25**	**57,33**		
1852.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**29.995.454.626**		**27.894.108.565**	**124,72**	**92,99**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (%)	100		96,43		96,43	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			96,43		0	0		
1853.	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			367.960.590		263.230.881	100	71,54		
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		3		0	0		
1854.	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			275.628.471		184.316.966	100	66,87		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100	0		
1855.	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			18.067.068		14.504.554	100	80,28		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1856.	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			12.340.780		10.348.980	100	83,86		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1857.	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			45.090.144		38.756.149	100	85,95		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1858.	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.834.127		15.304.232	100	90,91		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		3		100	0		
1859.	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.059.596.714		10.552.355.431	100	95,41		
		Persentase Fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		60		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
1860.	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.757.768.614		10.302.938.201	100	95,77		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		60		100	0		
1861.	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			55.289.811		44.230.850	100	80		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1862.	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			46.560.124		39.264.625	100	84,33		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1863.	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			158.377.984		129.947.880	100	82,05		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1		100	0		
1864.	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			41.600.181		35.973.875	100	86,48		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
1865.	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.459.552.126		3.940.267.666	100	88,36		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
1866.	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			154.127.632		153.887.632	100	99,84		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
1867.	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			429.294.900		412.989.275	100	96,2		

		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
1868.	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			258.807.000		169.555.000	100	65,51		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1869.	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			115.893.528		74.817.361	100	64,56		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
1870.	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			63.600.000		60.600.000	100	95,28		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
1871.	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.361.967.810		1.357.982.261	100	99,71		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
1872.	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			217.250.689		204.786.237	100	94,26		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1873.	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1.858.610.567		1.505.649.900	100	81,01		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
1874.	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.343.260.199		6.068.429.974	330,7	95,67		
		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai perencanaan dan kebutuhan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		7		0	0		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	38		73		0	0		
1875.	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3.867.000.000		3.808.314.750	700	98,48		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		7		700	0		
1876.	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			225.500.000		15.900.000	100	7,05		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		100	0		
1877.	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.250.760.199		2.244.215.224	192,11	99,71		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	38		73		192,11	0		
1878.	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.988.342.911		3.385.534.117	100	84,89		
		Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
1879.	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			61.613.711		49.524.475	100	80,38		

		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100	0		
1880.	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			742.025.000		482.754.882	100	65,06		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1881.	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.184.704.200		2.853.254.760	100	89,59		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
1882.	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.776.742.086		3.684.290.496	100	97,55		
		Persentase terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	145		145		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		18		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		10		0	0		
1883.	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.004.521.725		1.980.018.965	100	98,78		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	145		145		100	0		
1884.	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			847.880.361		847.313.484	100	99,93		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		18		100	0		
1885.	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	100	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1886.	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			924.340.000		856.958.047	100	92,71		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		10		100	0		
1887.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**729.273.767.939**		**395.420.104.018**	**96,67**	**54,22**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)			28,6		0	0		
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)			85,86		0	0		
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	75		64,16		85,55	0		
1888.	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			4.968.814.202		4.872.189.063	100	98,06		
		Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4		4		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0		203		0	0		
1889.	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			907.545.037		888.215.009	100	97,87		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1890.	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			495.484.920		451.842.196	100	91,19		
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4		4		100	0		
1891.	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			395.351.233		352.567.146	100	89,18		
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1892.	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			254.450.000		244.664.778	100	96,15		
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	1		1		100	0		
1893.	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			502.890.265		483.022.164	100	96,05		

		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1		1		100	0		
1894.	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			355.999.405		350.633.597	100	98,49		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	1		1		100	0		
1895.	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			666.436.340		626.458.800	100	94		
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1		1		100	0		
1896.	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			760.097.080		693.688.283	100	91,26		
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1		1		100	0		
1897.	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			630.559.922		556.010.149	100	88,18		
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1		1		100	0		
1898.	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			-		225.086.941	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0		203		0	0		
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)			31,51		0	0		
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)			26,41		0	0		
1899.	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			9.655.724.968		7.459.195.363	100	77,25		
		Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	203		203		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	200		200		0	0		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	88		88		0	0		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	88		88		0	0		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	147		147		0	0		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	32		32		0	0		

			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	331		331		0	0		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	295		295		0	0		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	1		1		0	0		
1900.	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			464.124.308		87.114.294	100	18,77		
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	203		203		100	0		
1901.	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			343.873.000		239.714.000	100	69,71		
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	200		200		100	0		
1902.	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			854.987.014		531.809.959	100	62,2		
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	88		88		100	0		
1903.	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			694.862.131		447.502.000	100	64,4		
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	88		88		100	0		
1904.	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			1.131.894.605		923.419.940	100	81,58		
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	147		147		100	0		
1905.	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			872.565.724		765.915.939	100	87,78		
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	32		32		100	0		
1906.	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2.819.616.662		2.518.177.610	100	89,31		
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	331		331		100	0		
1907.	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			942.720.493		783.363.311	100	83,1		
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	295		295		100	0		
1908.	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			907.854.119		681.713.877	100	75,09		
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2		2		100	0		
1909.	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			130.454.000		113.719.233	100	87,17		
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1		1		100	0		

1910.	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			270.830.148		202.008.000	100	74,59		
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1911.	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			221.942.764		164.737.200	100	74,23		
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	1		1		100	0		
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)			100		0	0		
1912.	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			6.205.800.596		6.160.455.751	100	99,27		
		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	72		72		0	0		
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	1		1		0	0		
1913.	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			472.352.247		468.469.867	100	99,18		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5		5		100	0		
1914.	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			248.169.480		242.221.617	100	97,6		
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	4		4		100	0		
1915.	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			4.359.772.561		4.341.062.645	100	99,57		
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1		1		100	0		
1916.	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			320.727.513		317.460.187	100	98,98		
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		4		100	0		

1917.	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			268.447.004		265.261.818	100	98,81		
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
1918.	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			150.405.348		143.260.725	100	95,25		
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	72		72		100	0		
1919.	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			385.926.443		382.718.892	100	99,17		
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	1		1		100	0		
1920.	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			708.443.428.173		376.928.263.841	50	53,21		
		Tersalurnya Bantuan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		0		0	0		
1921.	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			703.686.882.584		376.928.263.841	100	53,56		
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		1		100	0		
1922.	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			4.756.545.589		-	0	0		
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		0		0	0		
1923.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**3.840.317.915**		**3.013.881.169**	**100**	**78,48**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indek Pengelolaan Aset (%)	75		0		0	0		
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)			2,17		0	0		
1924.	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.840.317.915		3.013.881.169	100	78,48		
		Persentase penambahan nilai aset	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		

			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1		1		0	0		
1925.	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			282.957.930		271.089.200	100	95,81		
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		1		100	0		
1926.	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			208.132.153		197.017.400	100	94,66		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1927.	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			133.414.098		63.094.000	100	47,29		
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1928.	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			819.935.584		634.976.400	100	77,44		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1929.	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			201.321.118		171.935.000	100	85,4		
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1930.	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			523.247.897		415.819.601	100	79,47		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1931.	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			265.353.646		161.331.249	100	60,8		
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1932.	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			197.032.000		141.043.634	100	71,58		
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1933.	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			321.470.225		222.099.300	100	69,09		
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1934.	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			310.147.222		274.329.000	100	88,45		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1935.	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			577.306.042		461.146.385	100	79,88		
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1		1		100	0		
1936.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**40.088.025.869**		**31.736.760.039**	**114,87**	**79,17**	Badan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (%)	100		100		100	0		

			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			25		0	0		
1937.	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			358.078.252		309.495.398	92,16	86,43		
		Persentase Peningkatan Capaian Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		4		0	0		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		2		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17		16		0	0		
1938.	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			160.001.294		128.868.798	66,67	80,54		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		4		66,67	0		
1939.	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.475.641		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
1940.	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			5.763.204		4.000.000	200	69,41		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		2		200	0		
1941.	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			102.199.200		93.608.000	100	91,59		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
1942.	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			84.638.913		83.018.600	94,12	98,09		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17		16		94,12	0		
1943.	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			29.294.005.669		22.346.303.875	100	76,28		
		Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		100		0	0		
1944.	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			29.294.005.669		22.346.303.875	100	76,28		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		100		100	0		
1945.	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			451.200.000		374.400.000	25	82,98		
		Persentase pendataan dan penataan barang milik perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		3		0	0		
1946.	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			451.200.000		374.400.000	25	82,98		

		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		3		25	0		
1947.	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.870.159.763		3.611.906.711	171,63	93,33		
		Persentase peningkatan pelayanan umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		13		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	35		35		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	575		535		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		6		0	0		
1948.	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			395.391.097		378.203.600	100	95,65		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
1949.	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			930.337.751		930.212.900	100	99,99		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
1950.	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			214.500.000		114.380.000	108,33	53,32		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		13		108,33	0		
1951.	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			582.263.085		514.953.000	100	88,44		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
1952.	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			130.000.000		112.900.000	100	86,85		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	35		35		100	0		
1953.	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.536.067.830		1.532.257.211	93,04	99,75		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	575		535		93,04	0		
1954.	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			81.600.000		29.000.000	600	35,54		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		6		600	0		
1955.	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.762.568.660		2.592.734.922	100	93,85		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1500		1.500		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		

1956.	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.971.012.500		1.931.984.000	100	98,02		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1500		1.500		100	0		
1957.	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			695.000.000		583.889.002	100	84,01		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1958.	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			96.556.160		76.861.920	100	79,6		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
1959.	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.352.013.525		2.501.919.133	92,46	74,64		
		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		8		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	350		250		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		5		0	0		
1960.	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			748.200.000		609.793.459	100	81,5		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		8		100	0		
1961.	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			844.724.485		630.018.074	100	74,58		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		100	0		
1962.	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			355.089.040		310.946.600	71,43	87,57		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	350		250		71,43	0		
1963.	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			614.900.000		244.900.000	100	39,83		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		100	0		
1964.	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			113.400.000		113.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
1965.	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			675.700.000		592.861.000	83,33	87,74		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		5		83,33	0		

1966.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.029.731.209**		**6.470.247.580**	**132,22**	**92,04**	Badan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase pengelolaan pendapatan daerah (%)	100		100		100	0		
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)					0	0		
1967.	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.029.731.209		6.470.247.580	132,22	92,04		
		Persentase pengelolaan dan Penerimaan Daerah yang meningkat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	6		7		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	6		6		0	0		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4		5		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	2		11		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	2000		2.500		0	0		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	12		12		0	0		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	19		19		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	3		2		0	0		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
1968.	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			334.548.000		236.078.000	116,67	70,57		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	6		7		116,67	0		
1969.	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			340.660.090		339.628.927	100	99,7		
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	6		6		100	0		
1970.	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			473.877.910		314.228.271	125	66,31		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4		5		125	0		

1971.	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			323.904.056		131.511.500	550	40,6		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	2		11		550	0		
1972.	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			696.490.034		695.882.549	100	99,91		
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1973.	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			1.463.670.492		1.462.490.529	100	99,92		
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
1974.	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			941.719.450		909.391.850	125	96,57		
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	2000		2.500		125	0		
1975.	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			143.153.248		143.086.848	100	99,95		
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1976.	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			274.180.000		210.212.700	100	76,67		
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	12		12		100	0		
1977.	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			134.718.000		133.148.000	100	98,83		
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	19		19		100	0		
1978.	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			702.802.000		700.285.000	100	99,64		
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1979.	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			22.852.000		20.192.000	100	88,36		
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1980.	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			417.792.000		417.445.000	100	99,92		
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		100	0		
1981.	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			659.050.929		656.555.406	66,67	99,62		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	3		2		66,67	0		
1982.	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			100.313.000		100.111.000	100	99,8		
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
	5.03	**KEPEGAWAIAN**			**16.661.643.590**		**14.225.810.393**	**464,08**	**85,38**		
1983.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.973.266.657**		**11.330.924.679**	**76,77**	**87,34**	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			99,39		0	0		

			Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (%)	100		236,48		236,48	0		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) (%)	100		236,48		236,48	0		
1984.	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			83.036.400		78.818.600	50	94,92		
		Pesentase Penyusunan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		5		0	0		
1985.	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			83.036.400		78.818.600	50	94,92		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		5		50	0		
1986.	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.039.282.355		8.826.421.590	98,21	87,92		
		Persentase Biaya Administrasi Kantor yang dibayar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56		55		0	0		
1987.	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.039.282.355		8.826.421.590	98,21	87,92		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56		55		98,21	0		
1988.	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			355.362.560		355.362.560	100	100		
		Persentase Pemenuhan Keamanan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	17		17		0	0		
1989.	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			355.362.560		355.362.560	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	17		17		100	0		
1990.	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			23.567.172		2.275.500	0	9,66		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	300		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		0		0	0		
1991.	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			19.667.172		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	300		0		0	0		
1992.	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			3.900.000		2.275.500	0	58,35		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		0		0	0		
1993.	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.022.661.050		846.929.862	85,37	82,82		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		9		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	166		106		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1770		1.021		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	23		17		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	16		16		0	0		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	95		97		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
1994.	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.906.209		9.639.000	100	40,32		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		9		100	0		
1995.	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			236.470.273		154.291.000	63,86	65,25		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	166		106		63,86	0		
1996.	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			106.879.000		80.356.000	57,68	75,18		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1770		1.021		57,68	0		
1997.	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			98.343.568		53.006.000	73,91	53,9		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	23		17		73,91	0		
1998.	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16.000.000		11.500.000	100	71,88		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	16		16		100	0		
1999.	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			531.062.000		528.968.926	102,11	99,61		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	95		97		102,11	0		
2000.	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			10.000.000		9.168.936	100	91,69		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2001.	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			456.949.605		329.501.487	100	72,11		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
2002.	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			51.694.885		51.565.440	100	99,75		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100	0		
2003.	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			321.640.000		194.321.327	100	60,42		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
2004.	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			83.614.720		83.614.720	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
2005.	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			992.407.515		891.615.080	79,62	89,84		

		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	184		109		0	0		
2006.	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			351.171.835		307.578.080	100	87,59		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9		100	0		
2007.	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			541.895.680		522.592.000	0	96,44		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0	0		
2008.	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			99.340.000		61.445.000	59,24	61,85		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	184		109		59,24	0		
2009.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**3.688.376.933**		**2.894.885.714**	**829,89**	**78,49**	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian (%)	100		100		100	0		
2010.	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.096.674.514		732.807.239	2343,25	66,82		
		Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	800		393		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	350		8		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	2		275		0	0		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	8500		13.439		0	0		
2011.	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			23.469.731		15.567.794	100	66,33		
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		100	0		
2012.	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			653.343.794		428.690.539	49,13	65,61		
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	800		393		49,13	0		
2013.	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			35.112.306		8.328.615	2,29	23,72		
		Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	350		8		2,29	0		
2014.	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			35.013.524		32.362.000	13750	92,43		

		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	2		275		13750	0		
2015.	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			307.341.311		223.600.000	0	72,75		
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		0	0		
2016.	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			42.393.848		24.258.291	158,11	57,22		
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	8500		13.439		158,11	0		
2017.	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			626.994.863		280.139.500	64,84	44,68		
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2000		1.270		0	0		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1500		1.628		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	800		180		0	0		
2018.	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			36.135.521		33.997.800	63,5	94,08		
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2000		1.270		63,5	0		
2019.	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			53.051.233		45.492.800	108,53	85,75		
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1500		1.628		108,53	0		
2020.	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			537.808.109		200.648.900	22,5	37,31		
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	800		180		22,5	0		
2021.	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			1.771.333.068		1.724.411.541	32,17	97,35		
		Persentase Pengembangan Kapasitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1		0		0	0		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	10		3		0	0		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	200		133		0	0		
2022.	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			36.455.539		36.355.425	0	99,73		
		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1		0		0	0		
2023.	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			1.643.046.716		1.611.269.116	30	98,07		
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	10		3		30	0		
2024.	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			91.830.813		76.787.000	66,5	83,62		
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	200		133		66,5	0		
2025.	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			193.374.488		157.527.434	97,9	81,46		
		Persentase Penilaian Dsiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	3		3		0	0		

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	500		247		0	0		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	500		390		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	10		11		0	0		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	18		27		0	0		
2026.	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			19.670.000		17.284.114	100	87,87		
		Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	3		3		100	0		
2027.	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			68.684.000		66.930.760	100	97,45		
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1		1		100	0		
2028.	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			33.200.724		19.392.560	49,4	58,41		
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	500		247		49,4	0		
2029.	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			24.391.172		16.680.000	78	68,39		
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	500		390		78	0		
2030.	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			30.073.696		22.220.000	110	73,89		
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	10		11		110	0		
2031.	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			17.354.896		15.020.000	150	86,55		
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	18		27		150	0		
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**866.940.682**		**633.713.565**	**600**	**73,1**		
2032.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**866.940.682**		**633.713.565**	**600**	**73,1**	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (%)	100		100		100	0		
2033.	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			866.940.682		633.713.565	600	73,1		
		Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1		6		0	0		
2034.	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			866.940.682		633.713.565	600	73,1		
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1		6		600	0		
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**7.952.554.211**		**6.526.191.689**	**527,84**	**82,06**		

2035.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.437.622.065**		**6.132.614.208**	**631,7**	**82,45**	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
2036.	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.293.705		72.067.900	250	95,72		
		Persentase Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		4		0	0		
2037.	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			64.082.610		61.074.900	100	95,31		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		100	0		
2038.	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.211.095		10.993.000	400	98,05		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		4		400	0		
2039.	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.866.886.105		4.234.791.363	134,62	87,01		
		Persentase Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		35		0	0		
2040.	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.866.886.105		4.234.791.363	134,62	87,01		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		35		134,62	0		
2041.	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			291.200.000		291.200.000	100	100		
		Persentase Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2042.	5.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			291.200.000		291.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2043.	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			497.823.815		443.651.623	1268,75	89,12		
		Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		50		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		100		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		30		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		1		0	0		
2044.	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			127.519.233		98.912.933	1666,67	77,57		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		50		1666,67	0		
2045.	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30.000.000		24.420.000	3333,33	81,4		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		100		3333,33	0		

2046.	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			64.603.711		54.494.000	25	84,35		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		25	0		
2047.	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			195.500.871		185.624.690	0	94,95		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		30		0	0		
2048.	5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			80.200.000		80.200.000	50	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		1		50	0		
2049.	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			789.393.440		734.729.696	550	93,08		
		Persentase Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		32		0	0		
2050.	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			156.000.000		113.162.016	33,33	72,54		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		1		33,33	0		
2051.	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			633.393.440		621.567.680	1066,67	98,13		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		32		1066,67	0		
2052.	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			917.025.000		356.173.626	434,17	38,84		
		Persentase Kondisi Aset Perangkat Daerah yang Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		12		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		1		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		12		0	0		
2053.	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			136.600.000		102.448.626	100	75		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		12		100	0		
2054.	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.625.000		20.125.000	2,5	72,85		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		1		2,5	0		
2055.	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			752.800.000		233.600.000	1200	31,03		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		12		1200	0		
2056.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**514.932.146**		**393.577.481**	**77,78**	**76,43**	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oelh Perangkat Daerah (%)			55		0	0		
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah (%)	80				0	0		
2057.	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			327.402.670		324.740.955	100	99,19		

		Persentase Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1		1		0	0		
2058.	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			327.402.670		324.740.955	100	99,19		
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1		1		100	0		
2059.	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			71.160.404		37.111.454	33,33	52,15		
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	3		1		0	0		
2060.	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			71.160.404		37.111.454	33,33	52,15		
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	3		1		33,33	0		
2061.	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			116.369.072		31.725.072	100	27,26		
		Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1		1		0	0		
2062.	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			116.369.072		31.725.072	100	27,26		
		Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1		1		100	0		
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**			**94.000.000**		**76.359.100**	**100**	**81,23**		
2063.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**			**94.000.000**		**76.359.100**	**100**	**81,23**	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan						100	0		
2064.	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			94.000.000		76.359.100	100	81,23		
		Terlaksananya pengelolaan perbatasan di wilayah kabupaten bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	0		100		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	0		0		0	0		
			Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	1		1		0	0		
2065.	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan			-		12.193.500	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	0		100		0	0		
2066.	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			16.462.000		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	0		0		0	0		
2067.	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah			77.538.000		64.165.600	100	82,75		
		Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	1		1		100	0		
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**16.540.904.111**		**13.878.733.490**	**89,76**	**83,91**		
2068.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.654.697.825**		**11.162.046.821**	**84,42**	**81,75**	Inspektorat Daerah	

		Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100		81,75		81,75	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			81,75		0	0		
2069.	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			370.278.400		341.037.896	100	92,1		
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		0	0		
2070.	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			280.020.000		250.779.496	100	89,56		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100	0		
2071.	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			80.258.400		80.258.400	100	100		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
2072.	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000		10.000.000	100	100		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		100	0		
2073.	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.923.604.842		7.976.737.370	100	80,38		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Laporan Keuangan/Realisasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44		44		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
2074.	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.910.650.542		7.963.783.070	100	80,36		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44		44		100	0		
2075.	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12.954.300		12.954.300	100	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2076.	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			144.000.000		124.800.000	100	86,67		
		Persentase Pemenuhan Pengadministrasian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		5		0	0		
2077.	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			144.000.000		124.800.000	100	86,67		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		5		100	0		
2078.	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Capaian Pemenuhan Kompetensi Aparatur Pengawasan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		0	0		

2079.	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		0	0		
2080.	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.846.821.499		1.698.178.595	98,32	91,95		
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Penunjang Kegiatan Pengawasan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		60		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1500		1.500		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		20		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20		20		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	170		150		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2081.	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			52.386.971		52.180.392	100	99,61		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		100	0		
2082.	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			169.248.708		166.350.436	100	98,29		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		60		100	0		
2083.	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			346.976.000		342.886.800	100	98,82		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1500		1.500		100	0		
2084.	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			186.029.483		184.830.301	100	99,36		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		20		100	0		
2085.	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			57.500.000		57.500.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20		20		100	0		
2086.	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			865.280.337		836.560.266	88,24	96,68		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	170		150		88,24	0		
2087.	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			169.400.000		57.870.400	100	34,16		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2088.	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			118.986.679		80.204.000	17,78	67,41		
		Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Kegiatan Pengawasan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		8		0	0		
2089.	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2090.	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
2091.	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			118.986.679		80.204.000	53,33	67,41		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		8		53,33	0		
2092.	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			374.280.430		312.904.897	100	83,6		
		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		0	0		
2093.	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			140.090.750		120.425.500	100	85,96		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		100	0		
2094.	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			190.671.600		148.961.320	100	78,12		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100	0		
2095.	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			43.518.080		43.518.077	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		100	0		
2096.	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			876.725.975		628.184.063	100	71,65		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		20		0	0		
2097.	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			338.617.250		329.969.063	100	97,45		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9		100	0		
2098.	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			317.300.000		78.400.000	100	24,71		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
2099.	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			220.808.725		219.815.000	100	99,55		

		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		20		100	0		
2100.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**2.059.600.286**		**1.975.390.071**	**100**	**95,91**	Inspektorat Daerah	
		Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Opini Laporan Keuangan (Opini)	4		4		100	0		
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)			95,91		0	0		
2101.	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.647.070.784		1.609.590.064	100	97,72		
		Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP dan Persentase Tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	25		25		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	25		25		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	11		11		0	0		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	5		5		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2		2		0	0		
2102.	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			485.070.000		480.505.532	100	99,06		
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	25		25		100	0		
2103.	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			302.788.000		294.036.000	100	97,11		
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	25		25		100	0		
2104.	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			22.454.000		21.124.800	100	94,08		
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1		1		100	0		
2105.	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			243.097.384		238.550.084	100	98,13		
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	11		11		100	0		
2106.	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			289.252.000		274.614.677	100	94,94		
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	5		5		100	0		
2107.	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			304.409.400		300.758.971	100	98,8		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2		2		100	0		
2108.	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			412.529.502		365.800.007	100	88,67		
		Persentase Tindak Lanjut atas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10		10		0	0		
2109.	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			16.250.000		12.500.000	100	76,92		

		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1		1		100	0		
2110.	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			396.279.502		353.300.007	100	89,15		
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10		10		100	0		
2111.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**826.606.000**		**741.296.598**	**100**	**89,68**	Inspektorat Daerah	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Maturitas SPIP (Level)	3		3		100	0		
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Asistensi (%)			89,68		0	0		
2112.	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			826.606.000		741.296.598	100	89,68		
		Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	46		46		0	0		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	10		10		0	0		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4		4		0	0		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	46		46		0	0		
2113.	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			429.054.000		414.331.977	100	96,57		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	46		46		100	0		
2114.	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			139.916.000		137.323.500	100	98,15		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	10		10		100	0		
2115.	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			246.386.000		178.391.121	100	72,4		
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4		4		100	0		
2116.	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			11.250.000		11.250.000	100	100		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	46		46		100	0		
	7.01	**KECAMATAN**			**161.647.936.449**		**151.827.541.753**	**91,45**	**93,92**		
2117.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.138.959.929**		**9.283.180.655**	**83,33**	**91,56**	Kecamatan Bengkalis	
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			91,56		0	0		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100		91,56		91,56	0		
2118.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			114.462.000		111.364.000	100	97,29		
		Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0	0		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8		8		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		0	0		
2119.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			31.435.000		31.307.000	100	99,59		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100	0		
2120.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			67.402.000		64.432.000	100	95,59		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8		8		100	0		
2121.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.625.000		15.625.000	100	100		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		100	0		
2122.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.374.755.520		6.721.431.463	50	91,14		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		60		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		0		0	0		
2123.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.374.755.520		6.721.431.463	100	91,14		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		60		100	0		
2124.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		0		0	0		
2125.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			332.800.000		332.800.000	100	100		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	16		16		0	0		
2126.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			332.800.000		332.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	16		16		100	0		
2127.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35		0		0	0		
2128.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35		0		0	0		
2129.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			727.387.464		649.822.757	85,71	89,34		

		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		17		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		30		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		100		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2130.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.612.579		7.509.489	100	87,19		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		17		100	0		
2131.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68.064.497		64.336.540	100	94,52		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		30		100	0		
2132.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.780.000		97.515.000	100	96,76		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
2133.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			118.240.579		103.777.839	100	87,77		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2134.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			27.000.000		15.000.000	100	55,56		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100	0		
2135.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			404.689.809		361.683.889	100	89,37		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		100		100	0		
2136.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-	0	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0	0		
2137.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			410.651.869		410.651.869	75	100		
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		0	0		
2138.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0		

		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
2139.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			144.890.563		144.890.563	100	100		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		2		100	0		
2140.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			258.371.808		258.371.808	100	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
2141.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.389.498		7.389.498	100	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		100	0		
2142.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			482.404.930		379.312.875	100	78,63		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	800		800		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8		8		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		0	0		
2143.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			171.237.375		165.778.615	100	96,81		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	800		800		100	0		
2144.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			284.574.435		186.941.140	100	65,69		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8		8		100	0		
2145.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			26.593.120		26.593.120	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		100	0		
2146.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			696.498.146		677.797.691	100	97,32		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		20		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		15		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		0	0		
2147.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			205.963.667		187.352.291	100	90,96		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		20		100	0		
2148.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			312.000.000		312.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		15		100	0		
2149.	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			178.534.479		178.445.400	100	99,95		

		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		100	0		
2150.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.778.546.113**		**1.711.095.313**	**100**	**96,21**	Kecamatan Bengkalis	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100		96,21		96,21	0		
			Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)			96,21		0	0		
2151.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			652.106.524		647.756.524	100	99,33		
		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7		7		0	0		
2152.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			652.106.524		647.756.524	100	99,33		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7		7		100	0		
2153.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			478.472.255		415.371.455	100	86,81		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		2		0	0		
2154.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			478.472.255		415.371.455	100	86,81		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		2		100	0		
2155.	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			43.039.991		43.039.991	100	100		
		Persentase Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1		1		0	0		
2156.	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			43.039.991		43.039.991	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1		1		100	0		
2157.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			604.927.343		604.927.343	100	100		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1		1		0	0		
2158.	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			604.927.343		604.927.343	100	100		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1		1		100	0		
2159.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**4.672.791.392**		**4.544.145.023**	**100**	**97,25**	Kecamatan Bengkalis	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)			97,25		0	0		
			Persentase Keterpenuhan Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)	100		97,25		97,25	0		
2160.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			428.957.316		428.957.316	100	100		

		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		0	0		
2161.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			428.957.316		428.957.316	100	100		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		100	0		
2162.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.001.638.468		3.879.362.558	100	96,94		
		Persentase Terwujudnya Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		0	0		
2163.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			442.961.105		441.919.546	100	99,76		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		100	0		
2164.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.558.677.363		3.437.443.012	100	96,59		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		100	0		
2165.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			242.195.608		235.825.149	100	97,37		
		Persentase Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	1		1		0	0		
2166.	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			242.195.608		235.825.149	100	97,37		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	1		1		100	0		
2167.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**21.835.000**		**21.835.000**	**100**	**100**	Kecamatan Bengkalis	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)			100		0	0		
			Persentase Keterpenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100		100	0		
2168.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.235.000		7.235.000	100	100		
		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		0	0		
2169.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			7.235.000		7.235.000	100	100		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		100	0		
2170.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			14.600.000		14.600.000	100	100		
		Persentase Terwujudnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1		1		0	0		

2171.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			14.600.000		14.600.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1		1		100	0		
2172.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**10.815.000**		**10.815.000**	**33,33**	**100**	Kecamatan Bengkalis	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)			100		0	0		
			Persentase Keterpenuhan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		100		100	0		
2173.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.815.000		10.815.000	33,33	100		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	1		1		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3		0		0	0		
2174.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.815.000		10.815.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	1		1		100	0		
2175.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1		0		0	0		
2176.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3		0		0	0		
2177.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**31.919.540**		**31.919.500**	**100**	**100**	Kecamatan Bengkalis	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100	0		
			Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)			100		0	0		
2178.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			31.919.540		31.919.500	100	100		
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	31		31		0	0		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	31		31		0	0		
2179.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12.100.000		12.100.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	31		31		100	0		
2180.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			19.819.540		19.819.500	100	100		

		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	31		31		100	0		
2181.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.227.262.986**		**4.826.015.635**	**75,3**	**92,32**	Kecamatan Bantan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			209,7		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah yang dilaksanakan (%)	100				0	0		
2182.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.423.000		31.811.200	16,67	70,03		
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		2		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	25		0		0	0		
2183.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			37.918.000		31.811.200	33,33	83,89		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		2		33,33	0		
2184.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.505.000		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	25		0		0	0		
2185.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.426.900.142		3.152.684.111	95,45	92		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22		21		0	0		
2186.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.426.900.142		3.152.684.111	95,45	92		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22		21		95,45	0		
2187.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			187.200.000		187.200.000	100	100		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	9		9		0	0		
2188.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			187.200.000		187.200.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	9		9		100	0		
2189.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		0	0		
2190.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		0	0		
2191.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			629.847.058		619.058.600	87,4	98,29		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		10		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		248		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3		3		0	0		
2192.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.988.612		4.600.000	0	92,21		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0	0		
2193.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			163.036.932		160.795.000	100	98,62		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100	0		
2194.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.397.775		6.000.000	100	93,78		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2195.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			211.000.000		209.600.000	100	99,34		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
2196.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.363.515		19.222.000	100	99,27		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2197.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.200.000		7.200.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		10		100	0		
2198.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			163.460.224		162.241.600	99,2	99,25		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		248		99,2	0		
2199.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			54.400.000		49.400.000	100	90,81		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3		3		100	0		
2200.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			105.746.137		32.000.000	50	30,26		
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0	0		
2201.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			32.000.000		32.000.000	100	100		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		2		100	0		
2202.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			73.746.137		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0	0		

2203.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			143.649.920		128.660.997	100	89,57		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2204.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			43.349.920		39.665.920	100	91,5		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		100	0		
2205.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			79.500.000		68.195.077	100	85,78		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		100	0		
2206.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.800.000		20.800.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2207.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			688.496.729		674.600.727	82,14	97,98		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		2		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11		11		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		0	0		
2208.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			266.916.000		264.900.000	100	99,24		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		100	0		
2209.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			42.760.000		30.880.000	28,57	72,22		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		2		28,57	0		
2210.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			228.800.000		228.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11		11		100	0		
2211.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.020.729		150.020.727	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		100	0		
2212.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**828.641.195**		**765.343.430**	**105,56**	**92,36**	Kecamatan Bantan	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100		195,43		195,43	0		
2213.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			680.441.195		617.143.430	108,33	90,7		

		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	23		23		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	6		7		0	0		
2214.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			26.396.645		26.396.645	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	23		23		100	0		
2215.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			654.044.550		590.746.785	116,67	90,32		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	6		7		116,67	0		
2216.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			148.200.000		148.200.000	100	100		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja lain kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7		7		0	0		
2217.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			148.200.000		148.200.000	100	100		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7		7		100	0		
2218.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**912.573.546**		**912.873.546**	**100**	**100,03**	Kecamatan Bantan	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100		109,37		109,37	0		
2219.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			756.926.422		757.226.422	100	100,04		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		0	0		
2220.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			756.926.422		757.226.422	100	100,04		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		100	0		
2221.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			155.647.124		155.647.124	100	100		
		Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	30		30		0	0		
2222.	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			155.647.124		155.647.124	100	100		
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	30		30		100	0		
2223.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**95.290.000**		**25.440.000**	**50**	**26,7**	Kecamatan Bantan	

		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100		26,7		26,7	0		
2224.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			69.850.000		-	0	0		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		0		0	0		
2225.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			69.850.000		-	0	0		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		0		0	0		
2226.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			25.440.000		25.440.000	100	100		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	23		23		0	0		
2227.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			25.440.000		25.440.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	23		23		100	0		
2228.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**167.878.628**		**167.878.628**	**66,67**	**100**	Kecamatan Bantan	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	100		185,64		185,64	0		
2229.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			167.878.628		167.878.628	66,67	100		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	46		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	32		32		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	23		23		0	0		
2230.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			-		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	46		0		0	0		
2231.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			143.768.628		143.768.628	100	100		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	32		32		100	0		
2232.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			24.110.000		24.110.000	100	100		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	23		23		100	0		
2233.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**43.170.000**		**43.170.000**	**100**	**100**	Kecamatan Bantan	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		100		100	0		

2234.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			43.170.000		43.170.000	100	100		
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23		23		0	0		
2235.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			43.170.000		43.170.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23		23		100	0		
2236.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.071.323.653**		**11.083.602.456**	**57,19**	**156,74**	Kecamatan Bukit Batu	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bukti Batu (%)	100		85,13		85,13	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			85,13		0	0		
2237.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.350.000		53.100.000	50	194,15		
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		0	0		
2238.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			23.850.000		49.680.000	100	208,3		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100	0		
2239.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.500.000		3.420.000	0	97,71		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		0	0		
2240.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.620.503.363		8.699.483.452	232,77	188,28		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		81,47		0	0		
2241.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.620.503.363		8.699.483.452	232,77	188,28		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		81,47		232,77	0		
2242.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			249.600.000		249.600.000	100	100		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2243.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			249.600.000		249.600.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2244.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.040.380.601		931.017.400	44,66	89,49		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13		5		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		7		0	0		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6550		1.780		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		4		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25		10		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		80		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2245.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			42.214.113		42.209.150	38,46	99,99		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13		5		38,46	0		
2246.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			76.169.061		74.189.450	35	97,4		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		7		35	0		
2247.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			234.750.000		225.070.000	27,18	95,88		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6550		1.780		27,18	0		
2248.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			74.438.827		71.033.200	40	95,42		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		4		40	0		
2249.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			118.500.000		80.800.000	40	68,19		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25		10		40	0		
2250.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			442.308.600		385.715.600	32	87,21		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		80		32	0		
2251.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			52.000.000		52.000.000	100	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2252.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			253.705.028		382.432.000	0	150,74		
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		0	0		
2253.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			85.300.000		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0	0		
2254.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		191.216.000	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0	0		

2255.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			168.405.028		191.216.000	0	113,55		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		0	0		
2256.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			444.068.470		380.432.120	58,33	85,67		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		1		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2257.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			183.818.470		171.750.600	50	93,43		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		1		50	0		
2258.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			233.450.000		181.881.520	25	77,91		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		1		25	0		
2259.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			26.800.000		26.800.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2260.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			435.716.191		387.537.484	55,83	88,94		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		1		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		2		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		2		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		0	0		
2261.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			61.706.540		39.720.406	100	64,37		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		100	0		
2262.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			84.743.506		53.201.078	50	62,78		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		1		50	0		
2263.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			249.600.000		249.600.000	40	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		2		40	0		
2264.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			39.666.145		22.508.000	33,33	56,74		

		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		2		33,33	0		
2265.	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		22.508.000	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		0	0		
2266.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**873.232.746**		**769.353.400**	**35**	**88,1**	Kecamatan Bukit Batu	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100		88,1		88,1	0		
2267.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			712.517.746		615.553.400	20	86,39		
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		2		0	0		
2268.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			34.568.396		34.559.000	0	99,97		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2		0		0	0		
2269.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			677.949.350		580.994.400	40	85,7		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		2		40	0		
2270.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			155.600.000		153.800.000	100	98,84		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja lain kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		0	0		
2271.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			155.600.000		153.800.000	100	98,84		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		100	0		
2272.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5.115.000		-	0	0		
		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3		0		0	0		
2273.	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			5.115.000		-	0	0		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3		0		0	0		
2274.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**2.355.716.766**		**2.066.839.500**	**34,58**	**87,74**	Kecamatan Bukit Batu	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyaraka (%)	100		95,47		95,47	0		
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100		78,77		78,77	0		
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)			95,47		0	0		

2275.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.071.897.330		1.059.204.100	83,33	98,82		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6		5		0	0		
2276.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.071.897.330		1.059.204.100	83,33	98,82		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6		5		83,33	0		
2277.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.090.689.436		859.165.400	12,5	78,77		
		Persentase terlaksananya Kegiatan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		0		0	0		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		1		0	0		
2278.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			112.000.000		-	0	0		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		0		0	0		
2279.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			978.689.436		859.165.400	25	87,79		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		1		25	0		
2280.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			193.130.000		148.470.000	30	76,88		
		Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	10		3		0	0		
2281.	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			193.130.000		148.470.000	30	76,88		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	10		3		30	0		
2282.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**46.256.896**		**27.822.750**	**0**	**60,15**	Kecamatan Bukit Batu	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100		60,15		60,15	0		
2283.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			46.256.896		27.822.750	0	60,15		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2		0		0	0		
2284.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			46.256.896		27.822.750	0	60,15		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2		0		0	0		
2285.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**253.217.520**		**243.072.850**	**16,67**	**95,99**	Kecamatan Bukit Batu	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)			95,99		0	0		

			Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (%)	100		95,99		95,99	0		
2286.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			253.217.520		243.072.850	16,67	95,99		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1500		500		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		0		0	0		
2287.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			211.801.520		210.982.600	33,33	99,61		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1500		500		33,33	0		
2288.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			41.416.000		32.090.250	0	77,48		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		0		0	0		
2289.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**19.800.000**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Bukit Batu	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)			0		0	0		
			Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		0		0	0		
2290.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			19.800.000		-	0	0		
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	2		0		0	0		
2291.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			19.800.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	2		0		0	0		
2292.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.328.398.485**		**5.921.960.552**	**76,67**	**93,58**	Kecamatan Siak Kecil	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Siak Kecil (%)	100		80,25		80,25	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)					0	0		
2293.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.000.000		51.000.000	33,33	79,69		
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		2		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0	0		
2294.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			51.000.000		51.000.000	66,67	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		2		66,67	0		
2295.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13.000.000		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0	0		

2296.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.871.124.861		4.700.226.500	100	96,49		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34		34		0	0		
2297.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.871.124.861		4.700.226.500	100	96,49		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34		34		100	0		
2298.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			166.400.000		166.400.000	100	100		
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8		8		0	0		
2299.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			166.400.000		166.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8		8		100	0		
2300.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11		0		0	0		
2301.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11		0		0	0		
2302.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			617.084.268		575.403.000	85,71	93,25		
		Persentase pemenuhan Pelayanan administrasi umum pada perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		6		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		2		0	0		
2303.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0	0		
2304.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			27.474.750		27.468.000	100	99,98		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20		100	0		
2305.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			36.800.000		36.800.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
2306.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			72.424.518		70.000.000	100	96,65		

		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2307.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			38.000.000		38.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		100	0		
2308.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			333.785.000		301.135.000	100	90,22		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		6		100	0		
2309.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			108.600.000		102.000.000	100	93,92		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		2		100	0		
2310.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			82.287.616		82.287.616	100	100		
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		10		0	0		
2311.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			32.000.000		32.000.000	100	100		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		100	0		
2312.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.287.616		50.287.616	100	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		10		100	0		
2313.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148.770.240		112.648.436	88,89	75,72		
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		2		0	0		
2314.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			18.200.000		18.200.000	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		2		100	0		
2315.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			99.600.000		73.431.556	100	73,73		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		100	0		
2316.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			30.970.240		21.016.880	66,67	67,86		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		2		66,67	0		
2317.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			378.731.500		233.995.000	66,67	61,78		
		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0	0		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		0	0		
2318.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			136.531.500		67.694.000	100	49,58		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100	0		
2319.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0	0		
2320.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			242.200.000		166.301.000	100	68,66		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100	0		
2321.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**484.650.000**		**132.050.000**	**77,08**	**27,25**	Kecamatan Siak Kecil	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100		0		0	0		
2322.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			42.950.000		35.750.000	100	83,24		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3		3		0	0		
2323.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			19.550.000		19.550.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		100	0		
2324.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.400.000		16.200.000	100	69,23		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3		3		100	0		
2325.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			122.200.000		84.600.000	75	69,23		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Kedinasan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		9		0	0		
2326.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			122.200.000		84.600.000	75	69,23		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		9		75	0		
2327.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			319.500.000		11.700.000	33,33	3,66		
		Pesentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3		1		0	0		
2328.	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			319.500.000		11.700.000	33,33	3,66		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3		1		33,33	0		

2329.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**922.986.362**		**206.687.796**	**85,29**	**22,39**	Kecamatan Siak Kecil	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100		0		0	0		
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)					0	0		
2330.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			793.106.050		167.387.796	100	21,11		
		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		3		0	0		
2331.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			793.106.050		167.387.796	100	21,11		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		3		100	0		
2332.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			129.880.312		39.300.000	70,59	30,26		
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	17		12		0	0		
2333.	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			129.880.312		39.300.000	70,59	30,26		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	17		12		70,59	0		
2334.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**111.505.000**		**18.640.000**	**41,67**	**16,72**	Kecamatan Siak Kecil	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100		0		0	0		
2335.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			111.505.000		18.640.000	41,67	16,72		
		Persentase Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		1		0	0		
2336.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			31.865.000		7.440.000	50	23,35		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		1		50	0		
2337.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			79.640.000		11.200.000	33,33	14,06		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		1		33,33	0		
2338.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**280.669.871**		**252.525.000**	**45**	**89,97**	Kecamatan Siak Kecil	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (%)	100		89,98		89,98	0		
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)					0	0		
2339.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			280.669.871		252.525.000	45	89,97		

		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Kepada Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	10		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100		85		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		1		0	0		
2340.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			11.109.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	10		0		0	0		
2341.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			234.535.871		234.525.000	85	100		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100		85		85	0		
2342.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			35.025.000		18.000.000	50	51,39		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		1		50	0		
2343.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**10.225.000**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Siak Kecil	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		0		0	0		
			Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)					0	0		
2344.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.225.000		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	2		0		0	0		
2345.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			4.700.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2		0		0	0		
2346.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			5.525.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	2		0		0	0		
2347.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.788.812.183**		**4.049.444.827**	**96,92**	**84,56**	Kecamatan Bandar Laksamana	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			90		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bandar Laksamana (%)	100		90		90	0		
2348.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			133.473.379		126.099.000	100	94,48		
		Persentase Pelaporan dan evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		6		0	0		

2349.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			133.090.000		125.724.000	100	94,47		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100	0		
2350.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			383.379		375.000	100	97,81		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		6		100	0		
2351.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.949.076.752		2.354.713.715	100	79,85		
		Persentase terwujudnya Penatausahaan Keuangan Yang baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		23		0	0		
2352.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.949.076.752		2.354.713.715	100	79,85		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		23		100	0		
2353.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			124.800.000		124.800.000	100	100		
		Persentase Tepeliharanya barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6		6		0	0		
2354.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			124.800.000		124.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6		6		100	0		
2355.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			630.061.496		588.152.384	99,66	93,35		
		Persentase Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		40		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		10		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3		3		0	0		
2356.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			17.617.902		17.617.902	100	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		100	0		
2357.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			85.618.730		85.618.730	114,29	100		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		40		114,29	0		
2358.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			112.500.000		85.255.000	100	75,78		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0		
2359.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			46.470.252		35.116.752	83,33	75,57		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		10		83,33	0		

2360.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			28.800.000		28.800.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		100	0		
2361.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			263.654.612		261.244.000	100	99,09		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100	0		
2362.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			75.400.000		74.500.000	100	98,81		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3		3		100	0		
2363.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			471.200.000		397.390.812	94,44	84,34		
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		10		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2364.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			244.600.000		239.800.000	100	98,04		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100	0		
2365.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			225.000.000		155.990.812	83,33	69,33		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		10		83,33	0		
2366.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.600.000		1.600.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2367.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			480.200.556		458.288.916	88,89	95,44		
		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		2		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		15		0	0		
2368.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			297.490.556		276.001.916	66,67	92,78		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		2		66,67	0		
2369.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			124.800.000		124.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		100	0		
2370.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			57.910.000		57.487.000	100	99,27		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		15		100	0		

2371.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**284.968.630**		**215.026.410**	**87,5**	**75,46**	Kecamatan Bandar Laksamana	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100		90		90	0		
2372.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			75.839.330		63.779.330	83,33	84,1		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7		7		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	15		10		0	0		
2373.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			22.029.330		22.029.330	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7		7		100	0		
2374.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			53.810.000		41.750.000	66,67	77,59		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	15		10		66,67	0		
2375.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			109.793.120		107.538.080	100	97,95		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Kedinasan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		0	0		
2376.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			109.793.120		107.538.080	100	97,95		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		100	0		
2377.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			99.336.180		43.709.000	83,33	44		
		Pesentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		10		0	0		
2378.	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			99.336.180		43.709.000	83,33	44		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		10		83,33	0		
2379.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.490.631.966**		**1.394.525.415**	**100**	**93,55**	Kecamatan Bandar Laksamana	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)			98		0	0		
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100		98		98	0		
2380.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.264.280.694		1.246.380.694	100	98,58		
		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		3		0	0		
2381.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.264.280.694		1.246.380.694	100	98,58		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		3		100	0		
2382.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			226.351.272		148.144.721	100	65,45		

		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25		25		0	0		
2383.	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			226.351.272		148.144.721	100	65,45		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25		25		100	0		
2384.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**91.580.000**		**55.680.000**	**91,67**	**60,8**	Kecamatan Bandar Laksamana	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100		70		70	0		
2385.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			72.300.000		37.400.000	100	51,73		
		Persentase Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		12		0	0		
2386.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			72.300.000		37.400.000	100	51,73		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		12		100	0		
2387.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			19.280.000		18.280.000	83,33	94,81		
		Persentase Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		10		0	0		
2388.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			19.280.000		18.280.000	83,33	94,81		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		10		83,33	0		
2389.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**276.281.859**		**248.087.279**	**59,24**	**89,79**	Kecamatan Bandar Laksamana	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)			95		0	0		
			Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (%)	100		95		95	0		
2390.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			276.281.859		248.087.279	59,24	89,79		
		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Kepada Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25		23		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	70		60		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0	0		
2391.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			62.776.443		53.971.863	92	85,97		

		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25		23		92	0		
2392.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			200.115.416		194.115.416	85,71	97		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	70		60		85,71	0		
2393.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			13.390.000		-	0	0		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0	0		
2394.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**42.736.216**		**42.736.216**	**100**	**100**	Kecamatan Bandar Laksamana	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan (%)	100		150		150	0		
			Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)			100		0	0		
2395.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			42.736.216		42.736.216	100	100		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7		7		0	0		
2396.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			42.736.216		42.736.216	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7		7		100	0		
2397.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.376.811.565**		**8.859.100.119**	**91,55**	**94,48**	Kecamatan Rupat	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		400		400	0		
2398.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			232.980.000		232.978.263	116,67	100		
		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		4		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
2399.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			133.100.000		133.099.243	133,33	100		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		4		133,33	0		
2400.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			99.880.000		99.879.020	100	100		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
2401.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.377.449.877		5.131.385.968	96,51	95,42		
		Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		40		0	0		

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16		16		0	0		
2402.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.371.149.877		5.125.085.968	93,02	95,42		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		40		93,02	0		
2403.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			6.300.000		6.300.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16		16		100	0		
2404.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			416.000.000		411.200.000	100	98,85		
		Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		10		0	0		
2405.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			416.000.000		411.200.000	100	98,85		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		10		100	0		
2406.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			967.403.630		967.367.976	92,36	100		
		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	344		160		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	130		130		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12000		12.000		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		30		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6		6		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		150		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		12		0	0		
2407.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.891.135		21.891.135	46,51	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	344		160		46,51	0		
2408.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			37.403.543		37.403.543	100	100		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	130		130		100	0		
2409.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			208.000.000		208.000.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12000		12.000		100	0		
2410.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			23.397.952		23.362.298	100	99,85		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		30		100	0		
2411.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			45.300.000		45.300.000	100	100		

		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6		6		100	0		
2412.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			533.411.000		533.411.000	100	100		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		150		100	0		
2413.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			98.000.000		98.000.000	100	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		12		100	0		
2414.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			369.567.000		369.567.000	0	100		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		2		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2415.	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			320.567.000		320.567.000	0	100		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		2		0	0		
2416.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49.000.000		49.000.000	0	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2417.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			320.302.376		270.296.947	88,89	84,39		
		Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		500		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		8		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
2418.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			83.347.176		83.347.176	100	100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		500		100	0		
2419.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			195.355.200		145.349.771	66,67	74,4		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		8		66,67	0		
2420.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			41.600.000		41.600.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
2421.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.693.108.682		1.476.303.965	100	87,19		
		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		10		0	0		
2422.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			133.265.562		130.460.845	100	97,9		

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9		100	0		
2423.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			832.000.000		832.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		100	0		
2424.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			727.843.120		513.843.120	100	70,6		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		10		100	0		
2425.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**639.810.894**		**639.810.394**	**100**	**100**	Kecamatan Rupat	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)			90		0	0		
			Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik (%)	100		90		90	0		
2426.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			488.775.980		488.775.980	100	100		
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3		3		0	0		
2427.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			37.435.980		37.435.980	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		100	0		
2428.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			451.340.000		451.340.000	100	100		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3		3		100	0		
2429.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			88.949.914		88.949.914	100	100		
		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		0	0		
2430.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			88.949.914		88.949.914	100	100		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		100	0		
2431.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			62.085.000		62.084.500	100	100		
		Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	5		5		0	0		
2432.	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			62.085.000		62.084.500	100	100		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	5		5		100	0		
2433.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**7.520.085.984**		**6.291.149.564**	**79,26**	**83,66**	Kecamatan Rupat	

		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Desa Mandiri (%)			70		0	0		
			Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100				0	0		
2434.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			811.416.016		795.464.716	100	98,03		
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		0	0		
2435.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			811.416.016		795.464.716	100	98,03		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		100	0		
2436.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.524.691.360		5.313.806.240	38,89	81,44		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	20		0		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	30		20		0	0		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		0	0		
2437.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			40.980.000		-	0	0		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	20		0		0	0		
2438.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.673.999.560		1.752.927.160	66,67	65,55		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	30		20		66,67	0		
2439.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.809.711.800		3.560.879.080	50	93,47		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		50	0		
2440.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			183.978.608		181.878.608	99,33	98,86		
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30		30		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	30		30		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30		29		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	30		30		0	0		

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	30		30		0	0		
2441.	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			22.714.425		22.714.425	100	100		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30		30		100	0		
2442.	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			12.743.347		12.743.347	100	100		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	30		30		100	0		
2443.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			87.480.000		85.380.000	96,67	97,6		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30		29		96,67	0		
2444.	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			12.500.000		12.500.000	100	100		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	30		30		100	0		
2445.	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			48.540.836		48.540.836	100	100		
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	30		30		100	0		
2446.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**39.186.880**		**39.116.880**	**39,58**	**99,82**	Kecamatan Rupat	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Ketertiban Umum (%)	100		100		100	0		
			Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)			360		0	0		
2447.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			31.306.880		31.306.880	66,67	100		
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	15		10		0	0		
2448.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			31.306.880		31.306.880	66,67	100		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	15		10		66,67	0		
2449.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			7.880.000		7.810.000	12,5	99,11		
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	16		2		0	0		
2450.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			7.880.000		7.810.000	12,5	99,11		

		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	16		2		12,5	0		
2451.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**439.661.230**		**439.661.230**	**66,67**	**100**	Kecamatan Rupat	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			360		0	0		
2452.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			439.661.230		439.661.230	66,67	100		
		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50		50		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	16		16		0	0		
2453.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			29.069.740		29.069.740	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50		50		100	0		
2454.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			308.740.685		308.740.685	0	100		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100		0		0	0		
2455.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			101.850.805		101.850.805	100	100		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	16		16		100	0		
2456.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**8.130.000**		**8.130.000**	**100**	**100**	Kecamatan Rupat	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		100		100	0		
			Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan (Desa)			12		0	0		
2457.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8.130.000		8.130.000	100	100		
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	12		12		0	0		
2458.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			8.130.000		8.130.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	12		12		100	0		
2459.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.221.023.029**		**5.051.216.075**	**95**	**81,2**	Kecamatan Rupat Utara	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			100		0	0		
			Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan (%)	100		81,35		81,35	0		
2460.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			192.325.450		104.392.000	100	54,28		

		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		7		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
2461.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			123.161.165		55.798.000	100	45,3		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		7		100	0		
2462.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			69.164.285		48.594.000	100	70,26		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
2463.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.649.263.391		3.320.730.637	100	91		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		25		0	0		
2464.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.649.263.391		3.320.730.637	100	91		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		25		100	0		
2465.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			206.400.000		206.400.000	100	100		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		12		0	0		
2466.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			206.400.000		206.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		12		100	0		
2467.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.013.613.848		934.672.832	100	92,21		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	51		51		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		7		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	156		156		0	0		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	277		277		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	13		13		0	0		
2468.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			22.067.178		10.727.100	100	48,61		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		100	0		

2469.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			47.140.086		47.096.679	100	99,91		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	51		51		100	0		
2470.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			63.460.000		63.445.270	100	99,98		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100	0		
2471.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			62.657.150		62.497.981	100	99,75		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		7		100	0		
2472.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.600.000		15.600.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	156		156		100	0		
2473.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			62.857.000		62.696.402	100	99,74		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		100	0		
2474.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			672.832.434		610.609.400	100	90,75		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	277		277		100	0		
2475.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			67.000.000		62.000.000	100	92,54		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	13		13		100	0		
2476.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.567.724		-	0	0		
		Persentase Barang Milik Daerah yang dicatat sebagai Aset	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2477.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.567.724		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0	0		
2478.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			185.039.645		181.618.517	100	98,15		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14		14		0	0		
2479.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			73.438.745		70.074.480	100	95,42		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100	0		
2480.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			70.000.900		69.944.037	100	99,92		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
2481.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			41.600.000		41.600.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14		14		100	0		

2482.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			969.812.971		303.402.089	100	31,28		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		0	0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	37		37		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		0	0		
2483.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			99.480.000		32.473.489	100	32,64		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		100	0		
2484.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			133.132.971		110.928.600	100	83,32		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	37		37		100	0		
2485.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			187.200.000		160.000.000	100	85,47		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
2486.	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			550.000.000		-	100	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		100	0		
2487.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**247.047.326**		**247.047.326**	**100**	**100**	Kecamatan Rupat Utara	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100		0		0	0		
			Persentase telaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100		99,99		99,99	0		
			Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)			0		0	0		
2488.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			52.047.326		52.047.326	100	100		
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2		2		0	0		
2489.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			52.047.326		52.047.326	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2		2		100	0		
2490.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			195.000.000		195.000.000	100	100		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja lain kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		0	0		
2491.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			195.000.000		195.000.000	100	100		

		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		100	0		
2492.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.449.396.587**		**1.448.530.140**	**100**	**99,94**	Kecamatan Rupat Utara	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan (%)	100		99,95		99,95	0		
			Persentase desa berkinerja baik (%)	100		0		0	0		
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)			0		0	0		
2493.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.197.720.587		1.196.944.140	100	99,94		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8		8		0	0		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		0	0		
2494.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			23.386.140		23.386.140	100	100		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8		8		100	0		
2495.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.174.334.447		1.173.558.000	100	99,93		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		100	0		
2496.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			251.676.000		251.586.000	100	99,96		
		Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	80		80		0	0		
2497.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			251.676.000		251.586.000	100	99,96		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	80		80		100	0		
2498.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**95.136.993**		**85.147.000**	**100**	**89,5**	Kecamatan Rupat Utara	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)			0		0	0		
			Persentase terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100		0		0	0		
			Persentase terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100		89,66		89,66	0		
2499.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			73.786.993		73.717.000	100	99,91		
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		0	0		

2500.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			25.916.993		25.847.000	100	99,73		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		100	0		
2501.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			47.870.000		47.870.000	100	100		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		100	0		
2502.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			21.350.000		11.430.000	100	53,54		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1		1		0	0		
2503.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			21.350.000		11.430.000	100	53,54		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1		1		100	0		
2504.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**504.142.825**		**495.213.000**	**66,67**	**98,23**	Kecamatan Rupat Utara	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)			0		0	0		
			Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100		98,28		98,28	0		
2505.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			504.142.825		495.213.000	66,67	98,23		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1000		1.000		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	400		400		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0	0		
2506.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			364.632.137		364.383.000	100	99,93		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1000		1.000		100	0		
2507.	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			130.995.688		130.830.000	100	99,87		
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	400		400		100	0		
2508.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			8.515.000		-	0	0		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0	0		
2509.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**30.973.320**		**23.554.000**	**66,67**	**76,05**	Kecamatan Rupat Utara	

		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)			0		0	0		
			Meningkatnya kualitas sosial masyarakat (%)	100		96,91		96,91	0		
2510.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30.973.320		23.554.000	66,67	76,05		
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		8		0	0		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	8		8		0	0		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	8		0		0	0		
2511.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			14.789.200		14.780.000	100	99,94		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		8		100	0		
2512.	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			8.774.120		8.774.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	8		8		100	0		
2513.	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			7.410.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	8		0		0	0		
2514.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**22.615.732.707**		**20.923.598.449**	**97,91**	**92,52**	Kecamatan Mandau	
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			70,34		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Mandau (%)	100		70,34		70,34	0		
2515.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			288.053.479		287.211.949	100	99,71		
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		6		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		10		0	0		
2516.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			177.231.562		176.733.582	100	99,72		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		100	0		
2517.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			62.009.652		61.666.102	100	99,45		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		6		100	0		

2518.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.812.265		48.812.265	100	100		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		10		100	0		
2519.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.816.538.451		11.213.873.060	250	94,9		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75		300		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7		7		0	0		
2520.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.724.738.936		11.122.303.545	400	94,86		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75		300		400	0		
2521.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			91.799.515		91.569.515	100	99,75		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7		7		100	0		
2522.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			372.800.000		372.800.000	100	100		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	20		20		0	0		
2523.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			372.800.000		372.800.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	20		20		100	0		
2524.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			86.689.555		86.496.005	50	99,78		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0	0		
2525.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			86.689.555		86.496.005	100	99,78		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		12		100	0		
2526.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0	0		
2527.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.856.823.260		3.411.374.787	75,88	88,45		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	170		68		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	410		389		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40		40		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	66		63		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		22		0	0		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1300		357		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		5		0	0		
2528.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			123.495.311		123.495.311	40	100		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	170		68		40	0		
2529.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			616.835.843		616.043.300	94,88	99,87		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	410		389		94,88	0		
2530.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.165.285.000		976.430.000	100	83,79		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40		40		100	0		
2531.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			518.449.490		322.349.490	95,45	62,18		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	66		63		95,45	0		
2532.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			91.465.000		84.750.000	73,33	92,66		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		22		73,33	0		
2533.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.118.772.616		1.065.836.686	27,46	95,27		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1300		357		27,46	0		
2534.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			222.520.000		222.470.000	100	99,98		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		5		100	0		
2535.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.289.005.000		1.089.005.000	100	84,48		
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		10		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		15		0	0		
2536.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			144.975.000		144.975.000	100	100		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		10		100	0		
2537.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.144.030.000		944.030.000	100	82,52		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		15		100	0		
2538.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.262.348.506		2.152.247.610	92,5	95,13		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1250		1.250		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120		93		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		0	0		
2539.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.322.480.000		1.322.480.000	100	100		

		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1250		1.250		100	0		
2540.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			697.718.506		587.933.314	77,5	84,27		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120		93		77,5	0		
2541.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			242.150.000		241.834.296	100	99,87		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		100	0		
2542.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.643.474.456		2.310.590.038	81,07	87,41		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	141		72		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		25		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	51		47		0	0		
2543.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			762.212.638		731.439.950	51,06	95,96		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	141		72		51,06	0		
2544.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			616.400.000		616.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		25		100	0		
2545.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.264.861.818		962.750.088	92,16	76,12		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	51		47		92,16	0		
2546.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**981.607.368**		**981.607.368**	**100**	**100**	Kecamatan Mandau	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100		99,3		99,3	0		
2547.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			723.839.295		723.839.295	100	100		
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	250		250		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	8		8		0	0		
2548.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			93.201.095		93.201.095	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	250		250		100	0		
2549.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			630.638.200		630.638.200	100	100		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	8		8		100	0		

2550.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			257.768.073		257.768.073	100	100		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja lain kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9		9		0	0		
2551.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			257.768.073		257.768.073	100	100		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9		9		100	0		
2552.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**26.131.744.670**		**25.414.821.536**	**96,14**	**97,26**	Kecamatan Mandau	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100		99,92		99,92	0		
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)			99,92		0	0		
2553.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			4.001.034.210		3.773.000.694	100	94,3		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		5		0	0		
2554.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.001.034.210		3.773.000.694	100	94,3		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		5		100	0		
2555.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			20.366.262.761		20.054.632.783	91,32	98,47		
		Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	45		50		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	72		31		0	0		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	45		50		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	9		9		0	0		
2556.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			207.670.240		232.434.590	111,11	111,92		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	45		50		111,11	0		
2557.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.482.817.302		4.340.704.255	43,06	79,17		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	72		31		43,06	0		
2558.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			14.650.876.999		15.456.595.718	111,11	105,5		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	45		50		111,11	0		
2559.	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			24.898.220		24.898.220	100	100		
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	9		9		100	0		
2560.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			1.764.447.699		1.587.188.059	100	89,95		

		Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	1000		1.000		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100		100		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	100		100		0	0		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100		100		0	0		
2561.	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			1.541.784.748		1.364.525.108	100	88,5		
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	1000		1.000		100	0		
2562.	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			18.898.941		18.898.941	100	100		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100		100		100	0		
2563.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			50.441.410		50.441.410	100	100		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	100		100		100	0		
2564.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			153.322.600		153.322.600	100	100		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100		100		100	0		
2565.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.620.171.220**		**1.466.812.820**	**100**	**90,53**	Kecamatan Mandau	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase penurunan gangguan KANTIBMAS (%)	100		99,71		99,71	0		
			Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)			99,71		0	0		
2566.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1.323.875.820		1.180.645.820	100	89,18		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		3		0	0		
2567.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1.323.875.820		1.180.645.820	100	89,18		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		3		100	0		

2568.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			296.295.400		286.167.000	100	96,58		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	11		11		0	0		
2569.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			296.295.400		286.167.000	100	96,58		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	11		11		100	0		
2570.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**884.223.437**		**883.865.605**	**50,17**	**99,96**	Kecamatan Mandau	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (%)	100		100		100	0		
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)			100		0	0		
2571.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			884.223.437		883.865.605	50,17	99,96		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	903		3		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		0	0		
2572.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			736.340.667		736.087.710	0,33	99,97		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	903		3		0,33	0		
2573.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			147.882.770		147.777.895	100	99,93		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100	0		
2574.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**82.335.025**		**82.333.105**	**100**	**100**	Kecamatan Mandau	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	80		100		125	0		
			Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)			100		0	0		
2575.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			82.335.025		82.333.105	100	100		
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	11		11		0	0		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	2		2		0	0		
2576.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			71.610.235		71.609.585	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	11		11		100	0		
2577.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			10.724.790		10.723.520	100	99,99		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	2		2		100	0		

2578.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.522.994.959**		**7.861.733.414**	**222,22**	**92,24**	Kecamatan Pinggir	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100		95,97		95,97	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			92,24		0	0		
			Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		89,01		89,01	0		
			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		95,44		95,44	0		
			Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100		0		0	0		
			Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		53,62		53,62	0		
			Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100	0		
			Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		93,55		93,55	0		
			Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100		99,93		99,93	0		
2579.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			246.934.280		246.769.000	100	99,93		
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0	0		
2580.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			133.052.280		132.889.000	100	99,88		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100	0		
2581.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			113.882.000		113.880.000	100	100		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		100	0		
2582.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.021.869.963		4.698.160.906	100	93,55		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34		34		0	0		
2583.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.021.869.963		4.698.160.906	100	93,55		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34		34		100	0		
2584.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			312.000.000		312.000.000	750	100		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		15		0	0		
2585.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			312.000.000		312.000.000	750	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		15		750	0		

2586.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0	0			
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6		0		0	0			
2587.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0			
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6		0		0	0			
2588.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.201.294.372		1.152.861.234	125	95,97			
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		0	0			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0	0			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		0	0			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		6		0	0			
2589.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			34.967.245		34.871.500	50	99,73			
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		50	0			
2590.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			46.700.336		46.435.634	100	99,43			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0			
2591.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			178.600.000		178.600.000	100	100			
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0			
2592.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			111.633.191		111.561.800	100	99,94			
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100	0			
2593.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			662.393.600		662.392.300	100	100			
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100	0			
2594.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			167.000.000		119.000.000	300	71,26			
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		6		300	0			
2595.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			337.944.062		181.211.250	100	53,62			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0			
2596.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			337.944.062		181.211.250	100	53,62			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0			

2597.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			342.281.642		326.659.232	300	95,44		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		7		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		0	0		
2598.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			160.531.465		155.858.720	700	97,09		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		7		700	0		
2599.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			157.950.177		147.000.512	100	93,07		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		100	0		
2600.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			23.800.000		23.800.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100	0		
2601.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.060.670.640		944.071.792	400	89,01		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		20		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
2602.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			158.191.553		142.037.705	100	89,79		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100	0		
2603.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			409.600.000		409.600.000	1000	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		20		1000	0		
2604.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			492.879.087		392.434.087	100	79,62		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
2605.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**496.169.714**		**474.561.400**	**266,67**	**95,64**	Kecamatan Pinggir	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (%)	100		83,33		83,33	0		
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)	100		100		100	0		
			Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)			95,64		0	0		
2606.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			366.569.714		366.561.400	100	100		

		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		1		0	0		
2607.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			29.999.714		29.991.400	100	99,97		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		100	0		
2608.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			336.570.000		336.570.000	100	100		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		1		100	0		
2609.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			129.600.000		108.000.000	600	83,33		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja lain kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		6		0	0		
2610.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			129.600.000		108.000.000	600	83,33		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		6		600	0		
2611.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**5.742.247.753**		**5.676.350.661**	**100**	**98,85**	Kecamatan Pinggir	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)	100		99,07		99,07	0		
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)			98,85		0	0		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (%)	100		94,48		94,48	0		
			Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	100		99,47		99,47	0		
2612.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.747.062.800		1.730.844.000	100	99,07		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		0	0		
2613.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.747.062.800		1.730.844.000	100	99,07		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		100	0		
2614.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.421.031.500		3.403.027.311	100	99,47		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		2		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		0	0		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		0	0		
2615.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.530.000		4.530.000	100	100		

		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		2		100	0		
2616.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			671.603.000		668.284.311	100	99,51		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		100	0		
2617.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.744.898.500		2.730.213.000	100	99,46		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		100	0		
2618.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			574.153.453		542.479.350	100	94,48		
		Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	2		2		0	0		
2619.	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			574.153.453		542.479.350	100	94,48		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	2		2		100	0		
2620.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**27.500.000**		**22.460.000**	**100**	**81,67**	Kecamatan Pinggir	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)			82		0	0		
			Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	100		100		100	0		
			Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100		40		40	0		
2621.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.500.000		7.500.000	100	100		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		0	0		
2622.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			7.500.000		7.500.000	100	100		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		100	0		
2623.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			20.000.000		14.960.000	100	74,8		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2		2		0	0		
2624.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			20.000.000		14.960.000	100	74,8		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2		2		100	0		
2625.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**278.636.085**		**275.574.500**	**100**	**98,9**	Kecamatan Pinggir	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	100		98,9		98,9	0		

		Kecamatan	Kepala Daerah (%)								
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)			98,9		0	0		
2626.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			278.636.085		275.574.500	100	98,9		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50		50		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		2		0	0		
2627.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			259.686.085		259.624.500	100	99,98		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50		50		100	0		
2628.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			18.950.000		15.950.000	100	84,17		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		2		100	0		
2629.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**25.169.000**		**25.169.000**	**100**	**100**	Kecamatan Pinggir	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)			100		0	0		
			Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100	0		
2630.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			25.169.000		25.169.000	100	100		
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1		1		0	0		
2631.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			20.127.000		20.127.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		1		100	0		
2632.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			5.042.000		5.042.000	100	100		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1		1		100	0		
2633.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.473.261.519**		**5.129.033.482**	**91,3**	**79,23**	Kecamatan Bathin Solapan	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bathin Solapan (%)	100				0	0		
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)					0	0		
2634.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			294.834.000		225.316.000	100	76,42		
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
2635.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			274.734.000		205.416.000	100	74,77		

		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
2636.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.100.000		19.900.000	100	99		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2637.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.192.251.419		2.455.468.697	100	76,92		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		17		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12		0	0		
2638.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.125.071.419		2.388.878.697	100	76,44		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		17		100	0		
2639.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			43.080.000		42.820.000	100	99,4		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100	0		
2640.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			24.100.000		23.770.000	100	98,63		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12		100	0		
2641.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			208.000.000		208.000.000	100	100		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2642.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			208.000.000		208.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2643.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			87.779.200		79.955.200	100	91,09		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		1		0	0		
2644.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			87.779.200		79.955.200	100	91,09		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		1		100	0		
2645.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.183.761.217		979.568.100	100	82,75		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		12		0	0		
2646.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			36.453.930		31.625.000	100	86,75		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2647.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			160.452.657		137.820.000	100	85,89		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2648.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			160.100.000		84.225.000	100	52,61		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2649.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			250.185.330		244.281.000	100	97,64		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100	0		
2650.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			80.200.000		62.600.000	100	78,05		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		100	0		
2651.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			494.000.400		417.448.200	100	84,5		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100	0		
2652.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2.368.900		1.568.900	100	66,23		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		12		100	0		
2653.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			151.334.668		56.860.000	33,33	37,57		
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
2654.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
2655.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			151.334.668		56.860.000	100	37,57		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100	0		
2656.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0		

		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0	0		
2657.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			874.589.355		794.587.186	100	90,85		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
2658.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			585.889.850		578.800.000	100	98,79		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100	0		
2659.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			261.207.826		188.852.792	100	72,3		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
2660.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			27.491.679		26.934.394	100	97,97		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
2661.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			480.711.660		329.278.299	100	68,5		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0	0		
2662.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			206.211.660		101.143.299	100	49,05		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		100	0		
2663.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			208.000.000		208.000.000	100	100		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
2664.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			66.500.000		20.135.000	100	30,28		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100	0		
2665.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**186.380.000**		**186.380.000**	**66,67**	**100**	Kecamatan Bathin Solapan	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100				0	0		
			PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI (%)	84				0	0		
2666.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			43.380.000		43.380.000	50	100		

		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		0	0		
2667.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			43.380.000		43.380.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		100	0		
2668.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-	0	0		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		0	0		
2669.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			143.000.000		143.000.000	100	100		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja lain kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		0	0		
2670.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			143.000.000		143.000.000	100	100		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		100	0		
2671.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.904.059.200**		**1.799.800.960**	**75**	**94,52**	Kecamatan Bathin Solapan	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)					0	0		
			PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI (%)	84				0	0		
2672.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.635.680.000		1.629.579.360	100	99,63		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		2		0	0		
2673.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.635.680.000		1.629.579.360	100	99,63		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		2		100	0		
2674.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			268.379.200		170.221.600	50	63,43		
		Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	400		200		0	0		
2675.	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			268.379.200		170.221.600	50	63,43		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	400		200		50	0		
2676.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**172.336.460**		**90.387.000**	**50**	**52,45**	Kecamatan Bathin Solapan	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)					0	0		

			Persentase penurunan gangguan KANTIBMAS (%)	100				0	0		
2677.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			60.000.000		-	0	0		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		0		0	0		
2678.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			60.000.000		-	0	0		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		0		0	0		
2679.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			112.336.460		90.387.000	100	80,46		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		0	0		
2680.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			112.336.460		90.387.000	100	80,46		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		100	0		
2681.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**855.584.554**		**659.635.000**	**100**	**77,1**	Kecamatan Bathin Solapan	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI (%)	84				0	0		
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)					0	0		
2682.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			855.584.554		659.635.000	100	77,1		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	450		450		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	300		300		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		0	0		
2683.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			417.474.000		267.344.000	100	64,04		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	450		450		100	0		
2684.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			364.181.759		364.181.000	100	100		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	300		300		100	0		
2685.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			73.928.795		28.110.000	100	38,02		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100	0		
2686.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**32.543.820**		**13.150.000**	**50**	**40,41**	Kecamatan Bathin Solapan	

		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)					0	0		
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	84				0	0		
2687.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			32.543.820		13.150.000	50	40,41		
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	13		13		0	0		
2688.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			19.344.000		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13		0		0	0		
2689.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			13.199.820		13.150.000	100	99,62		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	13		13		100	0		
2690.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.744.396.432**		**4.588.047.541**	**83,82**	**79,87**	Kecamatan Talang Muandau	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)			79,35		0	0		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		278,74		278,74	0		
2691.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			88.944.000		62.998.000	100	70,83		
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		0	0		
2692.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			74.944.000		58.798.000	100	78,46		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
2693.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.000.000		4.200.000	100	30		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		100	0		
2694.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.332.394.725		2.612.649.724	91,18	78,4		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		14		0	0		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		2		0	0		
2695.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.321.204.725		2.602.039.724	82,35	78,35		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		14		82,35	0		
2696.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.190.000		10.610.000	100	94,82		

		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		2		100	0		
2697.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			166.400.000		166.400.000	100	100		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		12		0	0		
2698.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			166.400.000		166.400.000	100	100		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		12		100	0		
2699.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.082.155.511		897.413.835	89,56	82,93		
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		8		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		5		0	0		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	450		421		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		12		0	0		
2700.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			39.353.060		38.816.000	50	98,64		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		8		50	0		
2701.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.666.575		48.965.000	83,33	96,64		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		5		83,33	0		
2702.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			84.180.000		63.470.000	100	75,4		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100	0		
2703.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			184.569.876		128.154.300	100	69,43		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		100	0		
2704.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			14.400.000		14.400.000	100	100		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		100	0		
2705.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			512.986.000		407.608.535	93,56	79,46		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	450		421		93,56	0		
2706.	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			196.000.000		196.000.000	100	100		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		12		100	0		

2707.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			19.605.796		-	0	0		
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		0		0	0		
2708.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.605.796		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		0		0	0		
2709.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			560.299.200		420.354.565	77,78	75,02		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		11		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		5		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0	0		
2710.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			330.500.000		320.746.855	91,67	97,05		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		11		91,67	0		
2711.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			208.999.200		78.807.710	41,67	37,71		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		5		41,67	0		
2712.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.800.000		20.800.000	100	100		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100	0		
2713.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			494.597.200		428.231.417	83,33	86,58		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		8		0	0		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		4		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		18		0	0		
2714.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			319.147.200		263.431.417	80	82,54		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		8		80	0		
2715.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			147.200.000		139.200.000	80	94,57		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		4		80	0		
2716.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			28.250.000		25.600.000	90	90,62		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		18		90	0		
2717.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**574.035.000**		**319.330.000**	**70**	**55,63**	Kecamatan Talang Muandau	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)			66,22		0	0		

			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100		161,33		161,33	0		
2718.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			328.791.000		215.530.000	90	65,55		
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		4		0	0		
2719.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			45.330.000		45.330.000	100	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		100	0		
2720.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			283.461.000		170.200.000	80	60,04		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		4		80	0		
2721.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			103.800.000		103.800.000	100	100		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja lain kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		0	0		
2722.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			103.800.000		103.800.000	100	100		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		100	0		
2723.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			141.444.000		-	0	0		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2		0		0	0		
2724.	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			141.444.000		-	0	0		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2		0		0	0		
2725.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.565.973.191**		**1.474.868.191**	**78,25**	**94,18**	Kecamatan Talang Muandau	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)			98,23		0	0		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		129,12		129,12	0		
2726.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.359.763.191		1.358.263.191	100	99,89		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7		7		0	0		
2727.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.359.763.191		1.358.263.191	100	99,89		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7		7		100	0		
2728.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			206.210.000		116.605.000	56,5	56,55		

		Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	200		113		0	0		
2729.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			206.210.000		116.605.000	56,5	56,55		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	200		113		56,5	0		
2730.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**14.080.000**		**14.080.000**	**400**	**100**	Kecamatan Talang Muandau	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)			100		0	0		
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100		100	0		
2731.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			14.080.000		14.080.000	400	100		
		Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2		8		0	0		
2732.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			14.080.000		14.080.000	400	100		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2		8		400	0		
2733.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**464.471.220**		**755.499.812**	**148**	**162,66**	Kecamatan Talang Muandau	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		197,11		197,11	0		
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)			98,76		0	0		
2734.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			464.471.220		755.499.812	148	162,66		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1000		1.960		0	0		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3		3		0	0		
2735.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			323.034.605		633.749.812	196	196,19		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1000		1.960		196	0		
2736.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			141.436.615		121.750.000	100	86,08		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3		3		100	0		
2737.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**18.200.000**		**9.000.000**	**250**	**49,45**	Kecamatan Talang Muandau	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		77,78		77,78	0		

			Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)			55,56		0	0		
2738.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			18.200.000		9.000.000	250	49,45		
		Persentase Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	2		5		0	0		
2739.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			18.200.000		9.000.000	250	49,45		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	2		5		250	0		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**20.387.578.855**		**18.405.674.796**	**67,78**	**90,28**		
2740.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.545.781.933**		**7.060.105.180**	**89,31**	**82,62**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			99,34		0	0		
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)			98,71		0	0		
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	100		99,34		99,34	0		
			Nilai Sakip Perangkat Daerah (%)			74		0	0		
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja (%)			100		0	0		
2741.	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			226.672.786		226.622.762	100	99,98		
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		0	0		
2742.	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			226.672.786		226.622.762	100	99,98		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100	0		
2743.	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.869.851.179		4.546.190.933	47,76	77,45		
		Persentase administrasi keuangan bagi ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67		32		0	0		
2744.	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.869.851.179		4.546.190.933	47,76	77,45		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67		32		47,76	0		
2745.	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			124.800.000		118.400.000	100	94,87		
		Persentase administrasi barang yang dikuasai SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2746.	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			124.800.000		118.400.000	100	94,87		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2747.	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			992.911.636		981.259.055	105,78	98,83		
		Persentase penyediaan administrasi umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		0	0		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	65		65		0	0		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2920		2.850		0	0		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9		9		0	0		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		0	0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	280		400		0	0		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		0	0		
2748.	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			16.079.994		16.075.508	100	99,97		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		100	0		
2749.	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			140.626.265		140.593.011	100	99,98		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	65		65		100	0		
2750.	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			121.200.000		121.200.000	97,6	100		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2920		2.850		97,6	0		
2751.	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			117.756.377		106.750.393	100	90,65		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9		9		100	0		
2752.	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.800.000		24.500.000	100	98,79		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		100	0		
2753.	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			526.449.000		526.360.143	142,86	99,98		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	280		400		142,86	0		
2754.	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			46.000.000		45.780.000	100	99,52		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100	0		
2755.	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			59.126.625		59.126.625	35	100		
		Persentase pengadaan aset sebagai penunjang urusan kesatuan bangsa dan politik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		0	0		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		2		0	0		
2756.	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			24.997.500		24.997.500	20	100		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		20	0		
2757.	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			34.129.125		34.129.125	50	100		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		2		50	0		
2758.	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			627.438.240		509.832.358	86,67	81,26		

		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan kesatuan bangsa dan politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1000		600		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		0	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9		9		0	0		
2759.	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			92.737.500		80.130.000	60	86,41		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1000		600		60	0		
2760.	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			124.491.980		93.027.318	100	74,73		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		100	0		
2761.	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			410.208.760		336.675.040	100	82,07		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9		9		100	0		
2762.	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			644.981.467		618.673.447	100	95,92		
		Persentase pemeliharaan aset penunjang urusan Kesatuan bangsa dan politik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		0	0		
2763.	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			551.196.153		527.694.263	100	95,74		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		100	0		
2764.	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			93.785.314		90.979.184	100	97,01		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		100	0		
2765.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**3.361.759.614**		**3.287.636.878**	**66,67**	**97,8**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Meningkatnya penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (%)	100		140		140	0		
			Cakupan penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%) (%)			50		0	0		
2766.	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3.361.759.614		3.287.636.878	66,67	97,8		
		Pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	140		140		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50		0		0	0		
			Jumlah Paskibraka (Orang)	36		36		0	0		
2767.	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			302.959.631		294.889.388	100	97,34		

		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	140		140		100	0		
2768.	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			139.156.000		120.000.000	0	86,23		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50		0		0	0		
2769.	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			2.919.643.983		2.872.747.490	100	98,39		
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	36		36		100	0		
2770.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**5.538.457.788**		**5.531.570.554**	**97,08**	**99,88**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)			100		0	0		
			Meningkatnya pendidikan politik kepada masyarakat (%)	100		99,92		99,92	0		
2771.	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			5.538.457.788		5.531.570.554	97,08	99,88		
		Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	80		65		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	30		33		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	11		11		0	0		
2772.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			115.255.880		109.488.661	81,25	95		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	80		65		81,25	0		
2773.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			5.365.349.855		5.364.257.659	110	99,98		

		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	30		33		110	0		
2774.	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			57.852.053		57.824.234	100	99,95		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	11		11		100	0		
2775.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**400.894.963**		**335.783.000**	**9,09**	**83,76**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (%)	100		100		100	0		
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)			90		0	0		
2776.	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			400.894.963		335.783.000	9,09	83,76		
		Pemantapan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	11		3		0	0		
2777.	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			62.201.464		-	0	0		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50		0		0	0		
2778.	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			305.409.020		302.974.000	0	99,2		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50		0		0	0		
2779.	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			33.284.479		32.809.000	27,27	98,57		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	11		3		27,27	0		

		Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas Asing di Daerah (Laporan)								
2780.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**258.295.761**		**175.520.494**	**33,33**	**67,95**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)			50		0	0		
			Meningkatnya pembinaan Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (%)	100		75		75	0		
2781.	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			258.295.761		175.520.494	33,33	67,95		
		Pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50		50		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	4		0		0	0		
2782.	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			64.637.461		17.401.094	100	26,92		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50		50		100	0		
2783.	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			158.460.000		158.119.400	0	99,79		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50		0		0	0		
2784.	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			35.198.300		-	0	0		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	4		0		0	0		
2785.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**2.282.388.796**		**2.015.058.690**	**25**	**88,29**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikakan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)			50		0	0		

			Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penurunan potensi konflik sosial (%)	100		80		80	0		
2786.	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			2.282.388.796		2.015.058.690	25	88,29		
		Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	20		0		0	0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	35		0		0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0	0		
2787.	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			24.230.773		-	0	0		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	20		0		0	0		
2788.	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			161.618.503		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	35		0		0	0		
2789.	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			19.040.000		-	0	0		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4		0		0	0		
2790.	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			2.077.499.520		2.015.058.690	100	96,99		

		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100	0		
								0	0		
	JUMLAH				**4.662.371.362.430**		**3.466.736.868.684**				
	Rata-rata capaian kinerja (%)							**86,87**	**74,36**		
	Predikat kinerja							**Sangat tinggi**	**Sedang**		

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, secara umum pelaksanaan pembangunan daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa rata-rata capaian kinerja program dan kegiatan mencapai 86,87%**,** sehingga termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”**.** Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 berhasil direalisasikan, bahkan beberapa indikator mampu melampaui target yang direncanakan.

Tingginya capaian kinerja tersebut mencerminkan adanya komitmen, koordinasi, dan sinergi yang baik antara perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Selain itu, pelaksanaan berbagai program prioritas daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sehingga tujuan dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara optimal.

Dari aspek keuangan, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp3.466.736.868.684 atau 74,36% dari total anggaran sebesar Rp4.662.371.362.430. Persentase tersebut berada pada kategori “Sedang”**,** yang menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang belum dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian karena tingkat penyerapan anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan tingginya capaian kinerja yang berhasil dicapai.

Oleh karena itu, pada periode perencanaan berikutnya perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan efektivitas pengendalian dan monitoring pelaksanaan program. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi anggaran tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Bengkalis.

C. Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025

Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan IV Tahun 2025

No.	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan	1.059.200.237.496,00	26,38	100	961.932.872.171,00	90,82
2	Dinas Kesehatan	788.781.710.334,00	53,85	59,82	374.317.017.816,00	47,46
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	488.688.054.015,00	61,11	100	385.367.994.276,00	78,86
4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	284.892.483.889,00	100	100	169.711.901.088,00	59,57
5	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.592.230.833,00	47,91	74,11	15.546.058.139,00	93,69
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	21.434.353.485,00	0	73,56	18.578.293.271,00	86,68
7	Satuan Polisi Pamong Praja	30.167.201.068,00	92,81	93,19	27.850.616.932,00	92,32
8	Dinas Sosial	45.241.078.797,00	86,71	67,62	43.460.258.862,00	96,06
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.071.883.376,00	100	100	17.481.638.703,00	75,77
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.326.562.993,00	100	82,21	10.913.774.127,00	88,54
11	Dinas Ketahanan Pangan	11.059.063.062,00	100	86,92	9.096.566.343,00	82,25
12	Dinas Lingkungan Hidup	47.291.224.582,00	100	87,37	44.511.313.422,00	94,12
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.986.422.899,00	0	96,21	19.193.194.419,00	91,46
14	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.097.067.623,00	91,67	78,32	29.734.675.213,00	87,21
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.829.375.225,00	100	57,36	39.409.654.678,00	198,74
16	Dinas Perhubungan	148.453.252.183,00	100	100	114.326.197.042,00	77,01
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	26.051.419.236,00	100	94,49	23.567.295.362,00	90,46
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.289.367.947,00	10,99	72,4	9.375.911.259,00	83,05
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.756.065.222,00	100	100	18.250.816.652,00	80,2
20	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	50.786.766.229,00	88,89	100	31.199.677.285,00	61,43
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.528.325.509,00	0	89,43	10.997.369.811,00	81,29
22	Dinas Perikanan	17.935.289.324,00	42,36	100	13.501.466.816,00	75,28
23	Dinas Perkebunan	35.625.056.754,00	100	82,82	22.395.717.732,00	62,87
24	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	47.335.723.298,00	92,9	95,2	36.401.903.419,00	76,9
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	29.017.228.203,00	39,57	54,98	18.463.337.169,00	63,63
26	Sekretariat Daerah	180.091.396.806,00	86,49	92,98	199.712.957.568,00	110,9
27	Sekretariat DPRD	120.941.193.382,00	91,5	96,88	111.886.395.994,00	92,51
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.616.473.205,00	100	92,16	19.519.226.058,00	94,68
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	763.109.540.480,00	60,66	100	426.328.093.752,00	55,87
30	Badan Pendapatan Daerah	47.117.757.078,00	100	100	38.207.007.619,00	81,09
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	17.528.584.272,00	100	100	14.859.523.958,00	84,77
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.952.554.211,00	50	100	6.526.191.689,00	82,06
33	Inspektorat Daerah	16.540.904.111,00	93,92	89,76	13.878.733.490,00	83,91
34	Kecamatan Bengkalis	16.654.866.974,00	97,5	84,62	15.602.990.491,00	93,68
35	Kecamatan Bantan	7.274.816.355,00	100	77,98	6.740.721.239,00	92,66
36	Kecamatan Bukit Batu	10.619.547.581,00	71,94	45,48	14.190.690.956,00	133,63
39	Kecamatan Rupat	18.023.686.553,00	100	85,05	16.276.968.187,00	90,31
40	Kecamatan Rupat Utara	8.547.720.080,00	62,9	91,18	7.350.707.541,00	86
41	Kecamatan Mandau	52.315.814.427,00	99,05	95,55	49.753.038.883,00	95,1
42	Kecamatan Pinggir	15.092.717.511,00	84,87	100	14.335.848.975,00	94,99
43	Kecamatan Bathin Solapan	9.624.165.553,00	0	84,29	7.878.386.442,00	81,86
44	Kecamatan Talang Muandau	8.381.155.843,00	100	100	7.160.825.544,00	85,44
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.387.578.855,00	99,04	67,78	18.405.674.796,00	90,28
		4.662.371.362.430,00	**76,37**	**86,87**	**3.466.736.868.684,00**	**74,36**

Berdasarkan Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bengkalis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian indikator program sebesar 76,37% dan capaian indikator sub kegiatan sebesar 86,87%**,** yang mengindikasikan bahwa sebagian besar target pembangunan daerah telah terlaksana sesuai dengan perencanaan. Dari sisi keuangan, realisasi anggaran mencapai Rp3,47 triliun atau 74,36% dari total pagu RKPD sebesar Rp4,66 triliun, sehingga masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas penyerapan anggaran pada beberapa perangkat daerah.

Sebagian besar perangkat daerah menunjukkan capaian kinerja yang tinggi, bahkan terdapat beberapa perangkat daerah yang berhasil mencapai nilai indikator program dan sub kegiatan mendekati atau mencapai 100 persen, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kecamatan Talang Muandau, serta beberapa perangkat daerah lainnya. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen yang baik dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sesuai target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang memerlukan perhatian lebih karena capaian indikator program maupun realisasi keuangannya relatif rendah dibandingkan perangkat daerah lainnya. Kondisi ini terlihat pada beberapa perangkat daerah yang memiliki capaian indikator program di bawah rata-rata daerah serta tingkat penyerapan anggaran yang belum optimal. Selain itu, terdapat perbedaan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan pada beberapa perangkat daerah, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target belum selalu diikuti dengan tingkat penyerapan anggaran yang seimbang.

Oleh karena itu, pada periode perencanaan dan pelaksanaan berikutnya perlu dilakukan penguatan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan pengendalian dan monitoring, serta evaluasi terhadap perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja maupun realisasi anggaran rendah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan optimalisasi pemanfaatan anggaran sehingga target pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis dapat dicapai secara lebih maksimal, efisien, dan berkelanjutan.

D. Capaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Tabel 2.5

No.	Prioritas Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	Rp	Predikat
1.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	91,56	Tinggi	86,25	Tinggi
2.	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	88,45	Tinggi	86,57	Sangat Tinggi
3.	Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif	91,22	Tinggi	62,07	Sedang
4.	Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan	91,55	Sangat Tinggi	82,98	Tinggi

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia terdiri dari 10 (sepuluh) Perangkat Daerah penanggung jawab yaitu :

1. Dinas Pendidikan ;
2. Dinas Kesehatan ;
3. Dinas Sosial ;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (urusan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga) ;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
9. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mencapai realisasi kinerja sebesar 91,56% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi keuangan mencapai 86,25% dengan kategori Tinggi**.** Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Bengkalis telah berjalan secara efektif dan mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Tingginya capaian kinerja ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur. Sementara itu, capaian realisasi keuangan yang berada pada kategori tinggi mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilaksanakan dengan cukup optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan SDM, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dan percepatan pelaksanaan kegiatan pada beberapa program tertentu. Secara umum, prioritas pembangunan ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Tabel 2.6 Tingkat Capaian Prioritas Peningkatan Kualitas SDM

No	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6
	DINAS PENDIDIKAN				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90	Sangat Tinggi	97,89	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	60,29	Rendah	74,18	Sedang
	DINAS KESEHATAN				
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39,67	Sangat Rendah	36,05	Sangat Rendah
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	69,59	Sedang	68,26	Sedang

No	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	35,85	Sangat Rendah	34,34	Sangat Rendah
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	94,44	Sangat Tinggi	13,44	Sangat Rendah
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	80	Tinggi	31	Sangat Rendah
	DINAS SOSIAL		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38,01	Sangat Rendah	94,07	Sangat Tinggi
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	83,06	Tinggi	90,3	Sangat Tinggi
10	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	120	Sangat Tinggi	53,49	Rendah
11	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	97,87	Sangat Tinggi	78,19	Tinggi
12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	83,63	Tinggi	98,74	Sangat Tinggi
13	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	20	Sangat Rendah	93,92	Sangat Tinggi
14	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	23,21	Sangat Rendah	99,23	Sangat Tinggi
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106,3	Sangat Tinggi	67,64	Sedang
16	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	50	Rendah	27,35	Sangat Rendah
17	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	218,75	Sangat Tinggi	88,53	Tinggi
18	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	72,72	Sedang	99,08	Sangat Tinggi
19	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	95,64	Sangat Tinggi	93,07	Sangat Tinggi
20	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100	Sangat Tinggi	99,69	Sangat Tinggi
21	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100	Sangat Tinggi	92,76	Sangat Tinggi
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88,89	Tinggi	89,75	Tinggi
23	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	66,67	Sedang	84,99	Tinggi
24	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100	Sangat Tinggi	98,57	Sangat Tinggi
25	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
26	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100	Sangat Tinggi	97,17	Sangat Tinggi
27	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100	Sangat Tinggi	86,25	Tinggi
28	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	62,55	Rendah	76,44	Tinggi
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,81	Sangat Rendah	211,26	Sangat Tinggi
30	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	80	Tinggi	201,7	Sangat Tinggi
31	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	141,67	Sangat Tinggi	199,26	Sangat Tinggi
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	17,99	Sangat Rendah	173,77	Sangat Tinggi
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

No	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
	DAN OLAHRAGA				
33	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	36,04	Sangat Rendah	73,99	Sedang
34	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	883,33	Sangat Tinggi	27,22	Sangat Rendah
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	35,83	Sangat Rendah	70,83	Sedang
36	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	200	Sangat Tinggi	54,68	Rendah
37	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	150	Sangat Tinggi	64,34	Rendah
38	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2600	Sangat Tinggi	99,98	Sangat Tinggi
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,13	Sangat Tinggi	89,48	Tinggi
40	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1004,55	Sangat Tinggi	35,17	Sangat Rendah
41	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1565,25	Sangat Tinggi	99,96	Sangat Tinggi
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85,27	Tinggi	80,77	Tinggi
43	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	95,37	Sangat Tinggi	99,64	Sangat Tinggi
44	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	66,67	Sedang	99,16	Sangat Tinggi
45	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100	Sangat Tinggi	99,98	Sangat Tinggi
46	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	100	Sangat Tinggi	99,98	Sangat Tinggi
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,67	Sangat Tinggi	81,47	Tinggi
48	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	100	Sangat Tinggi	99,74	Sangat Tinggi
49	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	75	Tinggi	94,43	Sangat Tinggi
50	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	25,76	Sangat Rendah	91,21	Sangat Tinggi
	Tingkat Capaian Prioritas Peningkatan Kualitas SDM	**91,56**	**Sangat Tinggi**	**86,25**	**Tinggi**

b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik serta perbaikan kapasitas fiskal daerah

Prioritas ini terdiri dari 23 (Dua puluh tiga) Perangkat Daerah penanggung jawab yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja ;
2. Dinas Pemadam Kebakaran ;
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu ;
5. Inspektorat ;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
8. Badan Pendapatan Daerah ;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan ;
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

11. Sekretariat DPRD ;
12. Sekretariat Daerah ;
13. Kecamatan Bengkalis ;
14. Kecamatan Bantan ;
15. Kecamatan Pinggir ;
16. Kecamatan Siak Kecil ;
17. Kecamatan Rupat ;
18. Kecamatan Rupat Utara ;
19. Kecamatan Bandar Laksmana ;
20. Kecamatan Bathin Solapan ;
21. Kecamatan Talang Muandau.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, Prioritas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 88,45% dengan kategori Tinggi**,** sementara realisasi keuangan mencapai 86,57% yang juga berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Realisasi keuangan yang tinggi juga mengindikasikan bahwa alokasi anggaran telah dimanfaatkan secara cukup optimal untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pada prioritas ini. Secara umum, pelaksanaan prioritas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik telah memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan responsif.

Tabel 2.7 Tingkat Capaian Prioritas Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik

No.	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6
	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73,45	Sedang	98,17	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	75	Tinggi	89,34	Tinggi
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80,95	Tinggi	86,49	Tinggi
4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	54,17	Rendah	86,96	Tinggi
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,86	Sangat Tinggi	92,2	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85,63	Tinggi	93,42	Sangat Tinggi
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90,46	Sangat Tinggi	86,53	Tinggi
8	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	91,33	Sangat Tinggi	95,95	Sangat Tinggi

No.	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
9	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100	Sangat Tinggi	92,01	Sangat Tinggi
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152,74	Sangat Tinggi	86,27	Tinggi
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0	Sangat Rendah	100	Sangat Tinggi
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100	Sangat Tinggi	62,66	Rendah
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,61	Sangat Tinggi	78,82	Tinggi
14	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100	Sangat Tinggi	58,05	Rendah
15	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100	Sangat Tinggi	99,88	Sangat Tinggi
16	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	163,89	Sangat Tinggi	97,02	Sangat Tinggi
17	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	269,4	Sangat Tinggi	88,64	Tinggi
18	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	75	Tinggi	55,57	Rendah
	SEKRETARIAT DAERAH		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95,58	Sangat Tinggi	84,3	Tinggi
20	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	74,17	Sedang	169,49	Sangat Tinggi
21	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100	Sangat Tinggi	161,48	Sangat Tinggi
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	100	Sangat Tinggi	81,23	Tinggi
	SEKRETARIAT DPRD		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,67	Sangat Tinggi	94,78	Sangat Tinggi
24	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	102,7	Sangat Tinggi	89,92	Tinggi
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95	Sangat Tinggi	93,37	Sangat Tinggi
26	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	75	Tinggi	98,46	Sangat Tinggi
27	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	Sangat Tinggi	96,9	Sangat Tinggi
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	124,72	Sangat Tinggi	92,99	Sangat Tinggi
29	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	96,67	Sangat Tinggi	54,22	Rendah
30	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	Sangat Tinggi	78,48	Tinggi
	BADAN PENDAPATAN DAERAH		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114,87	Sangat Tinggi	79,17	Tinggi
32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	132,22	Sangat Tinggi	92,04	Sangat Tinggi
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76,77	Tinggi	87,34	Tinggi
34	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	829,89	Sangat Tinggi	78,49	Tinggi
35	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	600	Sangat Tinggi	73,1	Sedang
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	631,7	Sangat Tinggi	82,45	Tinggi
37	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	77,78	Tinggi	76,43	Tinggi
	INSPEKTORAT DAERAH		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84,42	Tinggi	81,75	Tinggi

No.	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	Sangat Tinggi	95,91	Sangat Tinggi
40	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100	Sangat Tinggi	89,68	Tinggi
	KECAMATAN BENGKALIS		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83,33	Tinggi	91,56	Sangat Tinggi
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Sangat Tinggi	96,21	Sangat Tinggi
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	Sangat Tinggi	97,25	Sangat Tinggi
44	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
45	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33,33	Sangat Rendah	100	Sangat Tinggi
46	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
	KECAMATAN BANTAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75,3	Tinggi	92,32	Sangat Tinggi
48	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105,56	Sangat Tinggi	92,36	Sangat Tinggi
49	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	Sangat Tinggi	100,03	Sangat Tinggi
50	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50	Rendah	26,7	Sangat Rendah
51	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66,67	Sedang	100	Sangat Tinggi
52	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
	KECAMATAN BUKIT BATU		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57,19	Rendah	156,74	Sangat Tinggi
54	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35	Sangat Rendah	88,1	Tinggi
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34,58	Sangat Rendah	87,74	Tinggi
56	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	Sangat Rendah	60,15	Rendah
57	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16,67	Sangat Rendah	95,99	Sangat Tinggi
58	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
	KECAMATAN SIAK KECIL		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76,67	Tinggi	93,58	Sangat Tinggi
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77,08	Tinggi	27,25	Sangat Rendah
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85,29	Tinggi	22,39	Sangat Rendah
62	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41,67	Sangat Rendah	16,72	Sangat Rendah
63	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45	Sangat Rendah	89,97	Tinggi
64	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96,92	Sangat Tinggi	84,56	Tinggi
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87,5	Tinggi	75,46	Tinggi
67	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	Sangat Tinggi	93,55	Sangat Tinggi
68	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	91,67	Sangat Tinggi	60,8	Rendah
69	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59,24	Rendah	89,79	Tinggi
70	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
	KECAMATAN RUPAT		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,55	Sangat Tinggi	94,48	Sangat Tinggi

No.	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
73	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79,26	Tinggi	83,66	Tinggi
74	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39,58	Sangat Rendah	99,82	Sangat Tinggi
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66,67	Sedang	100	Sangat Tinggi
76	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
	KECAMATAN RUPAT UTARA		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95	Sangat Tinggi	81,2	Tinggi
78	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
79	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	Sangat Tinggi	99,94	Sangat Tinggi
80	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	Sangat Tinggi	89,5	Tinggi
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66,67	Sedang	98,23	Sangat Tinggi
82	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66,67	Sedang	76,05	Tinggi
	KECAMATAN MANDAU		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97,91	Sangat Tinggi	92,52	Sangat Tinggi
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
85	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96,14	Sangat Tinggi	97,26	Sangat Tinggi
86	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	Sangat Tinggi	90,53	Sangat Tinggi
87	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50,17	Rendah	99,96	Sangat Tinggi
88	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
	KECAMATAN PINGGIR		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	222,22	Sangat Tinggi	92,24	Sangat Tinggi
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	266,67	Sangat Tinggi	95,64	Sangat Tinggi
91	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	Sangat Tinggi	98,85	Sangat Tinggi
92	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	Sangat Tinggi	81,67	Tinggi
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	Sangat Tinggi	98,9	Sangat Tinggi
94	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,3	Sangat Tinggi	79,23	Tinggi
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66,67	Sedang	100	Sangat Tinggi
97	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75	Tinggi	94,52	Sangat Tinggi
98	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50	Rendah	52,45	Rendah
99	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	Sangat Tinggi	77,1	Tinggi
100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50	Rendah	40,41	Sangat Rendah
	KECAMATAN TALANG MUANDAU		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83,82	Tinggi	79,87	Tinggi
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70	Sedang	55,63	Rendah
103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78,25	Tinggi	94,18	Sangat Tinggi
104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	400	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	148	Sangat Tinggi	162,66	Sangat Tinggi

No.	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	250	Sangat Tinggi	49,45	Sangat Rendah
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
107	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89,31	Tinggi	82,62	Tinggi
108	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	66,67	Sedang	97,8	Sangat Tinggi
109	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	97,08	Sangat Tinggi	99,88	Sangat Tinggi
110	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	9,09	Sangat Rendah	83,76	Tinggi
111	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	33,33	Sangat Rendah	67,95	Sedang
112	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	25	Sangat Rendah	88,29	Tinggi
	Tingkat Capaian Prioritas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**88,45**	**Tinggi**	**86,57**	**Tinggi**

c. Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif

Prioritas ini terdiri dari 7 (Tujuh) Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Ketahanan Pangan ;
2. Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah ;
3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Kepemudaaan dan Olahraga ;
4. Dinas Perikanan ;
5. Dinas Perkebunan ;
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ;
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025**,** Prioritas Peningkatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 91,22% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi keuangan hanya mencapai 62,07% dengan kategori Rendah. Tingginya capaian kinerja menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan UMKM, sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, serta ekonomi kreatif. Di sisi lain, rendahnya realisasi keuangan mengindikasikan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal akibat berbagai kendala pelaksanaan kegiatan, efisiensi belanja, atau adanya program yang tidak terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian output dan outcome pembangunan ekonomi tetap dapat diwujudkan meskipun tingkat penyerapan anggaran relatif rendah. Secara umum, prioritas ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkalis, namun perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada tahun berikutnya.

Tabel 2.8

Tingkat Capaian Prioritas Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif

No.	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6
	DINAS KETAHANAN PANGAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,46	Sangat Tinggi	79,74	Tinggi
53	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
54	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	80	Tinggi	94,69	Sangat Tinggi
55	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	58,33	Rendah	50,93	Rendah
56	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100	Sangat Tinggi	94,1	Sangat Tinggi
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101,91	Sangat Tinggi	84,59	Tinggi
87	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50	Rendah	72,01	Sedang
88	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
89	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12,5	Sangat Rendah	38,62	Sangat Rendah
90	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
97	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	36,04	Sangat Rendah	73,99	Sedang
98	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	883,33	Sangat Tinggi	27,22	Sangat Rendah
99	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	35,83	Sangat Rendah	70,83	Sedang
100	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	200	Sangat Tinggi	54,68	Rendah
101	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	150	Sangat Tinggi	64,34	Rendah
102	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2600	Sangat Tinggi	99,98	Sangat Tinggi
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,13	Sangat Tinggi	89,48	Tinggi
104	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1004,55	Sangat Tinggi	35,17	Sangat Rendah
105	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1565,25	Sangat Tinggi	99,96	Sangat Tinggi
	DINAS PERIKANAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101,19	Sangat Tinggi	74,7	Sedang
112	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	133,33	Sangat Tinggi	64,96	Rendah
113	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	166,67	Sangat Tinggi	99,1	Sangat Tinggi
114	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100	Sangat Tinggi	99,72	Sangat Tinggi
115	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	100	Sangat Tinggi	95,11	Sangat Tinggi
	DINAS PERKEBUNAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87,08	Tinggi	87,09	Tinggi
117	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	66,67	Sedang	36,52	Sangat Rendah
118	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	105,36	Sangat Tinggi	49,11	Sangat Rendah

119	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	46,3	Sangat Rendah	61,06	Rendah
120	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100	Sangat Tinggi	68,81	Sedang
121	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	68,33	Sedang	43,79	Sangat Rendah
	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
122	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	100	Sangat Tinggi	45,26	Sangat Rendah
123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96,51	Sangat Tinggi	94,58	Sangat Tinggi
124	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	76,79	Tinggi	85,21	Tinggi
125	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	102,08	Sangat Tinggi	40,39	Sangat Rendah
126	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	90	Sangat Tinggi	92,27	Sangat Tinggi
127	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100	Sangat Tinggi	99,01	Sangat Tinggi
128	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100	Sangat Tinggi	84,35	Tinggi
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29,42	Sangat Rendah	84,94	Tinggi
130	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	122,22	Sangat Tinggi	67,34	Sedang
131	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	86,67	Tinggi	26,54	Sangat Rendah
132	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	47,22	Sangat Rendah	6,2	Sangat Rendah
133	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	125	Sangat Tinggi	32,18	Sangat Rendah
134	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	16,67	Sangat Rendah	16,11	Sangat Rendah
135	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	50	Rendah	46,23	Sangat Rendah
	Tingkat Capaian Prioritas Daya Saing Ekonomi dan Ekonomi Kreatif	**91,22**	**Sangat Tinggi**	**62,07**	**Rendah**

d. Penyediaan Infrastruktur yang Mantap dan Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan

Prioritas ini terdiri dari 4 (Empat) Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
2. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan ;
3. Dinas Lingkungan Hidup ;
4. Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, Prioritas Penyediaan Infrastruktur yang Mantap dan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 91,55% dengan kategori Sangat Tinggi**,** sedangkan realisasi keuangan mencapai 82,99% dengan kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur serta pengembangan wilayah telah berjalan dengan efektif dan mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik. Tingginya capaian kinerja mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, pelayanan transportasi, penataan ruang, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, realisasi keuangan yang berada pada kategori tinggi menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara cukup optimal untuk mendukung

pencapaian sasaran pembangunan pada prioritas ini. Secara umum, prioritas penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah berkelanjutan telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.9

Tingkat Capaian Prioritas Penyediaan Infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan

No.	Uraian Program	Capaian Kinerja dan Anggaran			
		Kinerja	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53,99	Rendah	94,25	Sangat Tinggi
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	137,09	Sangat Tinggi	47,65	Sangat Rendah
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	86	Tinggi	84,57	Tinggi
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	50	Rendah	69,97	Sedang
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	108,33	Sangat Tinggi	95,04	Sangat Tinggi
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	104	Sangat Tinggi	73,54	Sedang
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	257,5	Sangat Tinggi	88,58	Tinggi
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	42,33	Sangat Rendah	86,9	Tinggi
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	79,17	Tinggi	92,4	Sangat Tinggi
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	61,75	Rendah	87,41	Tinggi
	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82,08	Tinggi	84,55	Tinggi
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100	Sangat Tinggi	99,37	Sangat Tinggi
20	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	50	Rendah	71,59	Sedang
21	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	77,95	Tinggi	91	Sangat Tinggi
22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100	Sangat Tinggi	56,66	Rendah
23	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	150	Sangat Tinggi	57,23	Rendah
24	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	8700	Sangat Tinggi	87,04	Tinggi
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80,73	Tinggi	94,15	Sangat Tinggi
58	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100	Sangat Tinggi	99,9	Sangat Tinggi
59	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100	Sangat Tinggi	62,83	Rendah
60	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100	Sangat Tinggi	92,67	Sangat Tinggi
61	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	66,67	Sedang	99,65	Sangat Tinggi
62	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100	Sangat Tinggi	99,93	Sangat Tinggi
63	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100	Sangat Tinggi	77,92	Tinggi
64	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100	Sangat Tinggi	96,36	Sangat Tinggi

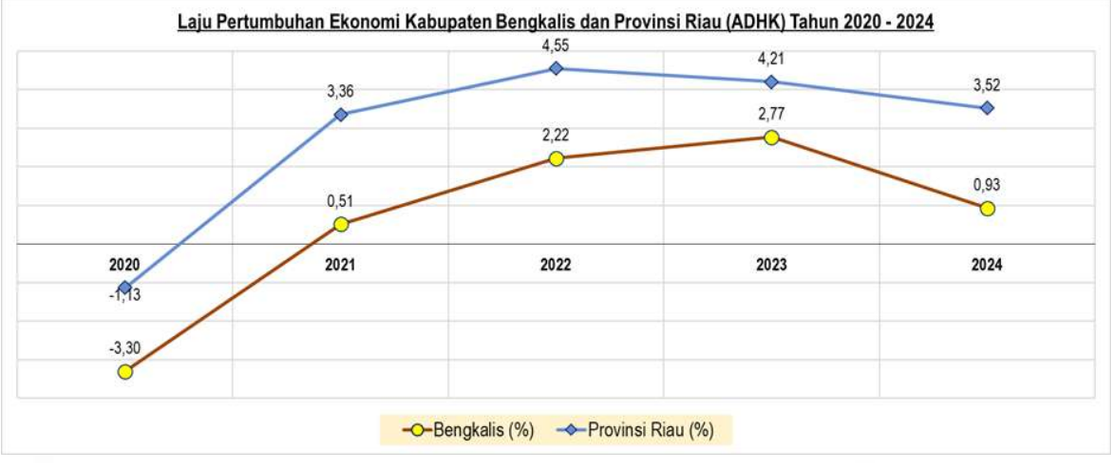
	DINAS PERHUBUNGAN		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Sangat Tinggi	82,11	Tinggi
78	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100	Sangat Tinggi	74,47	Sedang
79	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100	Sangat Tinggi	75,87	Tinggi
	Tingkat Capaian Prioritas Penyediaan Infrastruktur berkelanjutan	**91,55**	**Sangat Tinggi**	**82,99**	**Tinggi**

E. Capaian Kinerja Pembangunan

Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Riau, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir timur Sumatera. Letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka menjadikan Bengkalis sebagai kawasan yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, jasa pelabuhan, dan konektivitas antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis didukung oleh sejumlah sektor unggulan yang terus dikembangkan dan menjadi pilar utama pembangunan daerah.

Sektor unggulan yang berperan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit dan karet, menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan. Di sisi lain, kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan dan kelautan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya tambak, sebagai sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir. Sektor minyak dan gas bumi, terutama di wilayah Duri, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah serta menjadi penggerak sektor penunjang lainnya.

Selain itu, sektor perdagangan dan jasa berkembang pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan wilayah perkotaan. Industri pengolahan juga mulai menunjukkan peran penting, terutama dalam pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang memberikan nilai tambah ekonomi. Kombinasi dari seluruh sektor unggulan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki struktur ekonomi yang cukup kuat dan berpotensi untuk tumbuh secara berkelanjuta. Selama kurun waktu 2020 -2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis seperti terlihat pada grafik berikut:



Gambar -1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Termasuk Minyak Bumi Dan Gas dengan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Data pada Grafik III. 1 diatas memmperlihatkan bahwa Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika pemulihan yang belum stabil pasca pandemi. Tahun 2020 menjadi titik terendah dengan kontraksi sebesar -3,30%, menandakan

dampak signifikan dari gangguan aktivitas ekonomi akibat COVID-19. Pada tahun 2021, perekonomian Bengkalis mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 0,51%, meskipun masih sangat terbatas. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing dengan pertumbuhan sebesar 2,22% dan 2,77%. Namun, laju pertumbuhan kembali melambat menjadi hanya 0,93% di tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Bengkalis masih menghadapi tantangan dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan jangka panjang.

No.	INDIKATOR	Satuan	Capaian 2025	Target Rakortek Makro (Hasil Pembahasan)
1	2	3		8
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,93	2,49 - 3,06
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta/tahun	292,06	309,15 - 313,44
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Persen	14,55	13,99 - 13,87
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,08	4,75 - 5,43
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,32	4,80 - 5,32
6	Rasio Gini	Persen	0,265	0,226 - 0,231
7	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	77,02	78,06 - 78,32
8	Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	16,67	20,37
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	77,09	73,92

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 tercatat sebesar 2,93 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah masih mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh aktivitas sektor-sektor unggulan daerah, terutama sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan, serta sektor jasa lainnya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan yang relatif moderat mengindikasikan perlunya upaya peningkatan investasi, penguatan sektor UMKM, dan diversifikasi ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2025 sebesar 5,32 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia kerja yang belum memperoleh pekerjaan meskipun aktif mencari

kerja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

c. Indeks Gini Rasio

Nilai Indeks Gini Rasio sebesar 0,265 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkalis berada pada kategori rendah. Capaian ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat relatif merata. Kondisi tersebut perlu terus dipertahankan melalui berbagai program pembangunan yang inklusif, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah guna mencegah meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi.

d. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 tercatat sebesar 6,08 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas tingkat kemiskinan. Ke depan, diperlukan intervensi yang lebih terarah melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 mencapai 77,02, yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia berada pada kategori tinggi. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak masyarakat. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan daya beli masyarakat.

f. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2025 mencapai 16,67 persen. Capaian ini menunjukkan adanya kontribusi daerah dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan upaya mitigasi perubahan iklim. Berbagai program pengelolaan lingkungan

hidup, efisiensi energi, pengendalian pencemaran, serta pelestarian kawasan hijau menjadi faktor yang mendukung pencapaian tersebut. Ke depan, diperlukan penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan capaian ini.

KABUPATEN
BENGKALIS

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT

LAPORAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1 Faktor Pendorong

Beberapa faktor pendorong perangkat daerah dalam pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan administrasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan
2. SOP yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan
3. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran melakukan pengendalian langsung terhadap realisasi pencapaian fisik dan keuangan terhadap masing-masing KPA/PPTK secara rutin sehingga secara signifikan mendorong kinerja bawahan dalam pencapaian target kegiatan
4. Adanya evaluasi rencana kerja perangkat daerah per triwulan
5. Adanya dukungan APBD dan APBN dalam pelaksanaan kegiatan
6. Tersedianya sumberdaya lahan dan Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

3.2 Faktor Penghambat

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat perangkat daerah dalam pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025 terjadi beberapa permasalahan keuangan terutama lebih besarnya belanja pemerintah dibandingkan pendapatan menyebabkan terjadinya defisit anggaran, sehingga banyak program/kegiatan/sub kegiatan yang dirasionalisasi.
2. Adanya situasi pemerintah daerah tidak dapat membayar kewajiban keuangan kepada pihak ketiga dan pegawai pada waktu yang seharusnya pada tahun 2024 karena kendala keuangan (defisit anggaran) sehingga anggaran tahun 2025 juga dialokasikan untuk pembayaran tunda bayar pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Dan terdapat juga kegiatan tahun anggaran 2025 yang menjadi tunda bayar.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.
4. Pengawasan yang kurang efektif dalam proses pencapaian target kinerja.

KABUPATEN
BENGKALIS

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

LAPORAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



BAB IV
Kesimpulan & Rekomendasi Tindak Lanjut

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja Prioritas Pembangunan Provinsi Riau dalam RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 secara keseluruhan sebesar 86,87% dan capaian anggaran sebesar 74,36% dengan kriteria tingkat capaian kinerja sedang dan capain anggarannya rendah, untuk capaian anggaran yang tidak signifikan dengan capaian kinerja dapat disebabkan oleh adanya kegiatan pada Perubahan APBD tidak dapat terlaksana secara maksimal dan adanya tunda bayar yang disebabkan adanya defisit anggaran.

B. Rekomendasi

1. Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah yang dilakukan secara rutin dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam upaya pengendalian pencapaian kinerja.
2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Bappeda dan BPKAD dalam proses perencanaan dan penganggaran.
3. Melakukan review ulang terhadap target output kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan anggaran tersedia dan dilakukan penyesuaian pada RKPD Perubahan atau pada anggaran berikutnya.
4. Kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.
5. Rencana kerja harus disesuaikan dengan rencana aksi
6. Sub kegiatan yang capaian kinerja dan anggaran 0 agar dipertimbangkan lagi pada perencanaan tahun berikutnya dengan berpedoman pada pencapaian target renstra.
7. Pelaksanaan sub kegiatan agar mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebijakan yang telah di tetapkan.

LAMPIRAN II

Matriks Rencana Kerja

dan Pendanaan Daerah

Kabupaten Bengkalis

Tahun 2027

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. BENGKALIS
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Dinas Pendidikan						**668.995.773.883,00**								**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**668.995.773.883,00**								**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**668.995.773.883,00**								**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**581.530.443.883,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***581.529.443.883,00***								***0,00***	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						772.030.000,00						-		0,00	
		-						772.030.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	475.030.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	297.000.000,00							3 Laporan	0,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						475.030.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	475.030.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						297.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	11 Laporan	297.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						566.148.805.688,00						-		0,00	
		-						566.148.805.688,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.000.000,00							12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	566.080.805.688,00							12 Orang/bulan	0,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						566.080.805.688,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	6537/12 Orang/bulan	566.080.805.688,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD					12 Orang/bulan	0,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						68.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						762.340.386,00						-		0,00	
		-						762.340.386,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	512.340.386,00							500 Orang	0,00	
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						250.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						512.340.386,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	512.340.386,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.492.990.009,00						-		0,00	
		-						1.492.990.009,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	187.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.155.995.000,00							4 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	149.995.009,00							9 Paket	0,00	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						149.995.009,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	8 Paket	149.995.009,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.155.995.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	9 Laporan	1.155.995.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						187.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	187.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.781.627.800,00						-		0,00	
		-						11.781.627.800,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	876.317.000,00							4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.905.310.800,00							12 Laporan	0,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						876.317.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	8 Laporan	876.317.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10.905.310.800,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.905.310.800,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						572.650.000,00						-		0,00	
		-						572.650.000,00						-		0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit		115 Unit	115 Unit	73.850.000,00							Unit	0,00	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						73.850.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit		115 Unit	65 Unit	73.850.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Unit	0,00	Dinas Pendidikan
		-						572.650.000,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	496.800.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.000.000,00							-	0,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						496.800.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	13 Unit	496.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	1.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	1.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**87.265.330.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***85.484.940.000,00***								***0,00***	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						41.553.310.000,00						-		0,00	
		-						41.553.310.000,00						-		0,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	500.000.000,00							1000 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	12000 Buku		12000 Buku	12000 Buku	431.187.755,00							12000 Buku	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.000,00							4 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	247.165.315,00							2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	5 Paket	2.581.333.793,00							5 Paket	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.000,00							100 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	750 Orang		750 Orang	750 Orang	750.000.000,00							750 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3876 Orang		3876 Orang	3876 Orang	19.141.320.000,00							3876 Orang	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	5 Paket	581.415.185,00							5 Paket	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	35 Paket		35 Paket	35 Paket	1.458.022.835,00							35 Paket	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	10.000,00							10 Ruang	0,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	712 Peserta Didik		712 Peserta Didik	712 Peserta Didik	3.722.577.876,00							712 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	75 Orang		75 Orang	75 Orang	10.000,00							75 Orang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang		20 Ruang	20 Ruang	10.000,00							20 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang		15 Ruang	15 Ruang	10.000,00							15 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	60 Ruang		60 Ruang	60 Ruang	2.531.657.755,00							60 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang		30 Ruang	30 Ruang	3.409.328.650,00							30 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		5 Ruang	5 Ruang	10.000,00							5 Ruang	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.000,00							7 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	35 Unit		35 Unit	35 Unit	2.374.001.117,00							35 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit		30 Unit	30 Unit	220.010.000,00							30 Unit	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	360 Satuan Pendidikan		360 Satuan Pendidikan	360 Satuan Pendidikan	815.380.924,00							360 Satuan Pendidikan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	748.214.465,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.941.564.330,00							500 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70 Orang		70 Orang	70 Orang	100.000.000,00							70 Orang	0,00	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						748.214.465,00			-	-	-			0,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	748.214.465,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang		20 Ruang	14 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang		10 Ruang	4 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.374.001.117,00			-	-	-			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	35 Unit		35 Unit	12 Unit	2.374.001.117,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		5 Unit	10 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang		15 Ruang	12 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		5 Ruang	6 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	7 Unit		7 Unit	12 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						2.581.333.793,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	7 Paket	2.581.333.793,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						1.458.022.835,00			-	-	-			0,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	35 Paket		35 Paket	5 Paket	1.458.022.835,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.941.564.330,00			-	-	-			0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	345 Peserta Didik	1.941.564.330,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						19.141.320.000,00			-	-	-			0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3876 Orang		3876 Orang	2929 Orang	19.141.320.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3876 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						750.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	750 Orang		750 Orang	145 Orang	750.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					750 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70 Orang		70 Orang	35 Orang	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang		100 Orang	460 Orang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						10.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	75 Orang		75 Orang	35 Orang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					75 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	173 Dokumen	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						247.165.315,00			-	-	-			0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	247.165.315,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Kegiatan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						431.187.755,00			-	-	-			0,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	12000 Buku		12000 Buku	1250 Buku	431.187.755,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12000 Buku	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						581.415.185,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	1000 Paket	581.415.185,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						2.531.657.755,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	60 Ruang		60 Ruang	25 Ruang	2.531.657.755,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						220.010.000,00			-	-	-			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit		30 Unit	1 Unit	220.010.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						815.380.924,00			-	-	-			0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	360 Satuan Pendidikan		360 Satuan Pendidikan	367 Satuan Pendidikan	815.380.924,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					360 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						3.409.328.650,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang		30 Ruang	20 Ruang	3.409.328.650,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						3.722.577.876,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	712 Peserta Didik		712 Peserta Didik	1221 Peserta Didik	3.722.577.876,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					712 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						500.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1 Paket	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						32.770.560.000,00						-		0,00	
		-						32.770.560.000,00						-		0,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket		7 Paket	7 Paket	500.000.000,00							7 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 Buku		5000 Buku	5000 Buku	50.000.000,00							5000 Buku	0,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	10.000,00							4 Ruang	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.500.000.000,00							4 Paket	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	750 Orang		750 Orang	750 Orang	1.000.000,00							750 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1999 Orang		1999 Orang	1999 Orang	11.699.400.000,00							1999 Orang	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.000,00							5 Paket	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.050.000.000,00							4 Paket	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	0,00							4 Ruang	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	10.000,00							10 Ruang	0,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	250.000.000,00							500 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	116 Satuan Pendidikan		116 Satuan Pendidikan	116 Satuan Pendidikan	328.589.177,00							116 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang		8 Ruang	8 Ruang	10.000,00							8 Ruang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang		17 Ruang	17 Ruang	10.000,00							17 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang		25 Ruang	25 Ruang	5.745.000.000,00							25 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang		35 Ruang	35 Ruang	1.195.010.000,00							35 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	490.010.000,00							4 Ruang	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit		8 Unit	8 Unit	10.000,00							8 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit		25 Unit	25 Unit	2.390.000.000,00							25 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit		30 Unit	30 Unit	10.000,00							30 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan		116 Satuan Pendidikan	116 Satuan Pendidikan	221.410.823,00							116 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik		1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	250.000.000,00							1500 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang		75 Orang	75 Orang	100.000.000,00							75 Orang	0,00	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang		8 Ruang	0 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00			-	-	-			0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang		4 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Bengkalis	-					4 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium						490.010.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang		4 Ruang	1 Ruang	490.010.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.390.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit		25 Unit	15 Unit	2.390.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						1.195.010.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang		35 Ruang	8 Ruang	1.195.010.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang		10 Ruang	4 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	1 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		5 Unit	2 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit		30 Unit	2 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						8.500.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket		4 Paket	6 Paket	8.500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						1.050.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket		4 Paket	1 Paket	1.050.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						250.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	450 Peserta Didik	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						250.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik		1500 Peserta Didik	121 Peserta Didik	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1500 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						11.699.400.000,00			-	-	-			0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1999 Orang		1999 Orang	1585 Orang	11.699.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1999 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	750 Orang		750 Orang	100 Orang	1.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					750 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						221.410.823,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan		116 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	221.410.823,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					116 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang		75 Orang	35 Orang	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					75 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						328.589.177,00			-	-	-			0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	116 Satuan Pendidikan		116 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	328.589.177,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					116 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						5.745.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang		25 Ruang	8 Ruang	5.745.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 Buku		5000 Buku	100 Buku	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5000 Buku	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	1 Paket	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang		17 Ruang	1 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					17 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						500.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket		7 Paket	1 Paket	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						11.797.250.000,00						-		0,00	
		-						11.797.250.000,00						-		0,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	15 Paket		15 Paket	15 Paket	10.000,00							15 Paket	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00							4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000,00							6 Paket	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000,00							10 Unit	0,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	420 Satuan Pendidikan		420 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	50.000.000,00							420 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang		500 Orang	500 Orang	275.000.000,00							500 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2049 Orang		2049 Orang	2049 Orang	9.414.600.000,00							2049 Orang	0,00	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000,00							6 Paket	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000,00							3 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1956 Peserta Didik		1956 Peserta Didik	1956 Peserta Didik	10.000,00							1956 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	200 Satuan Pendidikan		200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	200.000.000,00							200 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta didik		1500 Peserta didik	1500 Peserta didik	150.000.000,00							1500 Peserta didik	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang		15 Ruang	15 Ruang	10.000,00							15 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	215.010.000,00							2 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		6 Ruang	6 Ruang	382.510.000,00							6 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	380.010.000,00							2 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang		5 Ruang	5 Ruang	10.000,00							5 Ruang	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit		8 Unit	8 Unit	380.010.000,00							8 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit		8 Unit	8 Unit	10.000,00							8 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	10.000,00							8 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00							50 Orang	0,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						380.010.000,00			-	-	-			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit		8 Unit	2 Unit	380.010.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	6 Paket		6 Paket	1 Paket	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	6 Paket		6 Paket	1 Paket	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Paket	0,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1956 Peserta Didik		1956 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1956 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						9.414.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2049 Orang		2049 Orang	1906 Orang	9.414.600.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2049 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						275.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang		500 Orang	97 Orang	275.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	420 Satuan Pendidikan		420 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					420 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	50 Orang		50 Orang	35 Orang	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						250.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	150 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang		15 Ruang	2 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						382.510.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		6 Ruang	2 Ruang	382.510.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						150.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta didik		1500 Peserta didik	50 Peserta didik	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1500 Peserta didik	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang		5 Ruang	5 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	1 Paket	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit		8 Unit	3 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	15 Paket		15 Paket	1 Paket	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Paket	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						200.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	200 Satuan Pendidikan		200 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					200 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						215.010.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	215.010.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						380.010.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	380.010.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1.144.210.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						1.144.210.000,00						-		0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	150.000.000,00							200 Dokumen	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	326 Orang		326 Orang	326 Orang	994.200.000,00							326 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	10.000,00							300 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						994.200.000,00			-	-	-			0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	326 Orang		326 Orang	384 Orang	994.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					326 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						150.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Dokumen		200 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					200 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	350 Peserta Didik	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					300 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan
		-						41.553.310.000,00						-		0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	10.000,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-		-	-	10.000,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	10.000,00							-	0,00	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	10 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						10.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-		-	5 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
		-						32.770.560.000,00						-		0,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	-		-	-	10.000,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-		-	-	10.000,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	10.000,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	10.000,00							-	0,00	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	0 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	-		-	2 Unit	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						10.000,00			-	-	-			0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	10.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pendidikan
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**200.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan						***200.000.000,00***								***0,00***	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						200.000.000,00						-		0,00	
		-						200.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	200.000.000,00							2 Orang	0,00	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						200.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	2 Orang		2 Orang	121 Orang	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Orang	0,00	Dinas Pendidikan
		Dinas Kesehatan						**352.642.144.208,00**								**239.957.609.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**352.642.144.208,00**								**239.957.609.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**352.642.144.208,00**								**239.957.609.676,00**	
4.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**480.637.816.231,00**								**490.185.933.047,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***200.926.529.670,00***								***185.841.332.573,00***	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						821.776.580,00						-		945.144.385,00	
		-						821.776.580,00						-		945.144.385,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	281.776.580,00							5 Dokumen	210.553.160,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	540.000.000,00							12 Laporan	734.591.225,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						71.776.580,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			72.776.580,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	71.776.580,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	72.776.580,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						200.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			274.591.225,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	274.591.225,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						268.964.092.922,00						-		297.786.539.835,00	
		-						268.964.092.922,00						-		297.786.539.835,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	188.571.277,00							12 Laporan	188.571.277,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1035 Orang/bulan		1035 Orang/bulan	1035 Orang/bulan	268.775.521.645,00							1035 Orang/bulan	297.597.968.558,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						145.805.521.041,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			162.330.967.894,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1035 Orang/bulan		1035 Orang/bulan	1190 Orang/bulan	145.805.521.041,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					1035 Orang/bulan	162.330.967.894,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						188.571.277,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			188.571.277,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	188.571.277,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	188.571.277,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						275.000.000,00						-		275.000.000,00	
		-						275.000.000,00						-		275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00							12 Laporan	275.000.000,00	
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						275.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			275.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	275.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						319.999.948,00						-		229.999.948,00	
		-						319.999.948,00						-		229.999.948,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100.000.000,00							20 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	219.999.948,00							150 Orang	219.999.948,00	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						219.999.948,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			219.999.948,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang		150 Orang	50 Orang	219.999.948,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Orang	219.999.948,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Orang	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.469.198.949,00						-		3.088.998.957,00	
		-						3.469.198.949,00						-		3.088.998.957,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	95.000.000,00							38 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	1.162.320.000,00							400 Laporan	1.163.552.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	370.000.000,00							1 Paket	531.980.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00							1 Paket	211.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.540.467.099,00							2 Paket	891.913.922,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.325.998.877,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			725.998.877,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.325.998.877,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	725.998.877,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			359.980.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	359.980.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						80.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	38 Dokumen		38 Dokumen	80 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					38 Dokumen	80.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						950.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			950.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	950.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					400 Laporan	950.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.679.564.173,00						-		32.989.556.926,00	
		-						31.679.564.173,00						-		32.989.556.926,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.067.708.543,00							12 Laporan	6.154.768.218,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.536.855.630,00							12 Laporan	26.752.288.708,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.500.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.348.288.820,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	1.348.288.820,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12.919.500.670,00			-	-	-			13.536.210.188,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.919.500.670,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	13.536.210.188,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.164.062.382,00						-		5.151.585.637,00	
		-						5.164.062.382,00						-		5.151.585.637,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	1.306.040.000,00							45 Unit	2.481.040.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.754.667.996,00							2 Unit	989.495.637,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.106.040.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.106.040.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	1.106.040.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					45 Unit	1.106.040.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						950.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			544.495.637,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	950.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	544.495.637,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						169.844.121.277,00						-		149.619.107.359,00	
		-						169.844.121.277,00						-		149.619.107.359,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja		22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	169.844.121.277,00							22 Unit Kerja	149.619.107.359,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						36.184.121.277,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			3.618.412.127,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja		22 Unit Kerja	20 Unit Kerja	36.184.121.277,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan dari BLUD					22 Unit Kerja	3.618.412.127,00	Dinas Kesehatan
5.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**191.842.809.985,00**								**99.113.783.768,00**	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***147.484.614.538,00***								***42.366.277.103,00***	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						81.763.291.957,00						-		72.670.517.945,00	
		-						81.763.291.957,00						-		72.670.517.945,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		25 Unit	25 Unit	1.421.094.700,00							25 Unit	1.537.891.492,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	30.522.644.480,00							25 Unit	34.319.908.928,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	8 Unit		8 Unit	8 Unit	70.000.000,00							8 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit		4 Unit	4 Unit	70.000.000,00							4 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 Paket		150 Paket	150 Paket	28.331.552.777,00							150 Paket	22.062.717.525,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit		4 Unit	4 Unit	70.000.000,00							4 Unit	1.500.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	70.000.000,00							3 Unit	3.750.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00							1 Unit	1.200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	25 Unit		25 Unit	25 Unit	20.208.000.000,00							25 Unit	4.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						1.000.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.200.000.000,00	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						70.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			2.000.000.000,00	
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	8 Unit		8 Unit	9 Unit	70.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						70.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			3.750.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	5 Unit	70.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	3.750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						70.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.500.000.000,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit		4 Unit	3 Unit	70.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						70.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit		4 Unit	8 Unit	70.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	1.600.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						20.208.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			4.700.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	25 Unit		25 Unit	10 Unit	20.208.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Unit	4.700.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						10.350.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			8.600.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	1 Unit	10.350.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Unit	8.600.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						121.094.700,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			200.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		25 Unit	3 Unit	121.094.700,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						8.000.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			548.009.470,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 Paket		150 Paket	50 Paket	8.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					150 Paket	548.009.470,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						109.950.518.028,00						-		25.693.265.823,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						109.950.518.028,00						-		25.693.265.823,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	139000 Orang		139000 Orang	139000 Orang	93.000.000,00							139000 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59955 Orang		59955 Orang	59955 Orang	93.000.000,00							59955 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11741 Orang		11741 Orang	11741 Orang	93.000.000,00							11741 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.702.502.450,00							12 Dokumen	10.070.250.245,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	43.000.000,00							3 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.000.000,00							2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	543.000.000,00							2 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	43.000.000,00							3 Dokumen	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	43.000.000,00							3 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.093.864.516,00							2 Dokumen	1.743.864.516,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.774.152.872,00							1 Dokumen	3.774.152.872,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2 Unit	117.998.190,00							2 Unit	474.998.190,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12328 Orang		12328 Orang	12328 Orang	93.000.000,00							12328 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12915 Orang		12915 Orang	12915 Orang	93.000.000,00							12915 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	653 Orang		653 Orang	653 Orang	43.000.000,00							653 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1643 Orang		1643 Orang	1643 Orang	43.000.000,00							1643 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14367 Orang		14367 Orang	14367 Orang	93.000.000,00							14367 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8872 Orang		10323 Orang	8872 Orang	93.000.000,00							8872 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3974 Orang		3974 Orang	3974 Orang	43.000.000,00							3974 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1108 Orang		1108 Orang	1108 Orang	93.000.000,00							1108 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17218 Orang		Orang	15563 Orang	43.000.000,00							17218 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103312 Orang		103312 Orang	103312 Orang	43.000.000,00							103312 Orang	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54011 Orang		54011 Orang	54011 Orang	43.000.000,00							54011 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441032 Orang		441032 Orang	441032 Orang	83.000.000,00							441032 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	43.000.000,00							6 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan		1 Tatanan	1 Tatanan	43.000.000,00							1 Tatanan	200.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						93.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12915 Orang		12915 Orang	12915 Orang	93.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					12915 Orang	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						93.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			30.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12328 Orang		12328 Orang	13493 Orang	93.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					12328 Orang	30.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						93.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11741 Orang		11741 Orang	12850 Orang	93.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					11741 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						93.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59955 Orang		59955 Orang	62499 Orang	93.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					59955 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						93.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	139000 Orang		139000 Orang	121469 Orang	93.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					139000 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						83.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441032 Orang		441032 Orang	432664 Orang	83.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					441032 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54011 Orang		54011 Orang	46153 Orang	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					54011 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103312 Orang		103312 Orang	94859 Orang	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					103312 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17218 Orang		Orang	15809 Orang	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					17218 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						93.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1108 Orang		1108 Orang	1018 Orang	93.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1108 Orang	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						93.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8872 Orang		10323 Orang	7654 Orang	93.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8872 Orang	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						93.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14367 Orang		14367 Orang	14367 Orang	93.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					14367 Orang	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	2 Dokumen		2 Dokumen	6 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						543.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			600.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	543.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			150.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	20 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang		6 Orang	10 Orang	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						100.702.502.450,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			10.070.250.245,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	100.702.502.450,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					12 Dokumen	10.070.250.245,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.774.152.872,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			3.774.152.872,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.774.152.872,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	3.774.152.872,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						2.093.864.516,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.743.864.516,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.093.864.516,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	1.743.864.516,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			400.000.000,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	20 Unit	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1643 Orang		1643 Orang	1575 Orang	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1643 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	653 Orang		653 Orang	98 Orang	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					653 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			300.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3974 Orang		3974 Orang	3974 Orang	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3974 Orang	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			200.000.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan		1 Tatanan	2 Tatanan	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Tatanan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						129.000.000,00						-		750.000.000,00	
		-						129.000.000,00						-		750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.000.000,00							2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	43.000.000,00							8 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	43.000.000,00							8 Unit	250.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	8 Unit		8 Unit	7 Unit	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	8 Unit		8 Unit	7 Unit	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
		-						109.950.518.028,00						-		25.693.265.823,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	300.000.000,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	103.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit dengue	-		-	-	543.000.000,00							-	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit zoonosis	-		-	-	43.000.000,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	43.000.000,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	43.000.000,00							-	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0051	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit dengue						543.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit dengue	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit dengue	-		-	12 Laporan	543.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0052	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit Zoonosis						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit Zoonosis	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit zoonosis	-		-	12 Laporan	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	250.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	1 Paket	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						300.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						103.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	103.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
6.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**11.049.160.000,00**								**13.120.656.000,00**	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan						***43.000.000,00***								***400.000.000,00***	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						86.000.000,00						-		500.000.000,00	
		-						86.000.000,00						-		500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	250.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						10.920.160.000,00						-		12.370.656.000,00	
		-						10.920.160.000,00						-		12.370.656.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00							1 Dokumen	250.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						43.000.000,00						-		250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						43.000.000,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		150 Orang	150 Orang	43.000.000,00							150 Orang	250.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		150 Orang	150 Orang	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
		-						10.920.160.000,00						-		12.370.656.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	10.877.160.000,00							-	12.120.656.000,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			150.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	75 Orang	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
7.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**172.000.000,00**								**1.200.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman						***43.000.000,00***								***600.000.000,00***	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						43.000.000,00						-		250.000.000,00	
		-						43.000.000,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	43.000.000,00							18 Dokumen	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18 Dokumen		18 Dokumen	20 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					18 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						43.000.000,00						-		350.000.000,00	
		-						43.000.000,00						-		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.000.000,00							2 Dokumen	350.000.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2 Dokumen		2 Dokumen	20 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						43.000.000,00						-		350.000.000,00	
		-						43.000.000,00						-		350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.000.000,00						2 Dokumen	350.000.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						43.000.000,00						-		250.000.000,00	
		-						43.000.000,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	43.000.000,00							50 Unit	250.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit		50 Unit	20 Unit	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
8.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**215.000.000,00**								**1.300.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***43.000.000,00***								***800.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						86.000.000,00						-		550.000.000,00	
		-						86.000.000,00						-		550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	43.000.000,00							12 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	174656 Unit		174656 Unit	174656 Unit	43.000.000,00							174656 Unit	350.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	
		Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	174656 Unit		174656 Unit	2 Unit	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					174656 Unit	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						86.000.000,00						-		500.000.000,00	
		-						86.000.000,00						-		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	43.000.000,00							12 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	12 Keluarga		12 Keluarga	12 Keluarga	43.000.000,00							12 Keluarga	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	12 Keluarga		12 Keluarga	174656 Keluarga	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Keluarga	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						43.000.000,00						-		250.000.000,00	
		-						43.000.000,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	43.000.000,00							12 Dokumen	250.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						43.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis						**167.422.403.560,00**								**184.164.643.917,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**167.422.403.560,00**								**184.164.643.917,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**167.422.403.560,00**								**184.164.643.917,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
9.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**480.637.816.231,00**								**490.185.933.047,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***146.131.246.303,00***								***160.744.370.934,00***	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						821.776.580,00						-		945.144.385,00	
		-						821.776.580,00						-		945.144.385,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	281.776.580,00							5 Dokumen	210.553.160,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						60.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			66.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	66.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						268.964.092.922,00						-		297.786.539.835,00	
		-						268.964.092.922,00						-		297.786.539.835,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1035 Orang/bulan		1035 Orang/bulan	1035 Orang/bulan	268.775.521.645,00							1035 Orang/bulan	297.597.968.558,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						72.446.232.083,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			79.690.855.291,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1035 Orang/bulan		1035 Orang/bulan	640 Orang/bulan	72.446.232.083,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1035 Orang/bulan	79.690.855.291,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.469.198.949,00						-		3.088.998.957,00	
		-						3.469.198.949,00						-		3.088.998.957,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	1.162.320.000,00							400 Laporan	1.163.552.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	370.000.000,00							1 Paket	531.980.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00							1 Paket	211.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.680.000,00							1 Paket	24.948.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.540.467.099,00							2 Paket	891.913.922,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	168.731.850,00							1 Paket	175.605.035,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						22.680.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			24.948.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.680.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	24.948.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.468.222,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			15.915.045,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	14.468.222,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	15.915.045,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.731.850,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			20.605.035,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.731.850,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	20.605.035,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	22.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			11.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	11.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.320.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			13.552.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		400 Laporan	2 Laporan	12.320.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					400 Laporan	13.552.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.679.564.173,00						-		32.989.556.926,00	
		-						31.679.564.173,00						-		32.989.556.926,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.067.708.543,00							12 Laporan	6.154.768.218,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.536.855.630,00							12 Laporan	26.752.288.708,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00							12 Laporan	82.500.000,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						75.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			82.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	82.500.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.699.078.548,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.868.986.403,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	1.699.078.548,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	1.868.986.403,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.987.235.600,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			5.485.959.160,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	5 Laporan	4.987.235.600,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	5.485.959.160,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.164.062.382,00						-		5.151.585.637,00	
		-						5.164.062.382,00						-		5.151.585.637,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	635.500.000,00							10 Unit	694.050.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	367.854.386,00							3 Unit	397.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.754.667.996,00							2 Unit	989.495.637,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						385.500.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			424.050.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	14 Unit	385.500.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	424.050.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						270.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			297.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	4 Unit	270.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Unit	297.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	55.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						169.844.121.277,00						-		149.619.107.359,00	
		-						169.844.121.277,00						-		149.619.107.359,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja		22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	169.844.121.277,00							22 Unit Kerja	149.619.107.359,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						66.060.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			72.666.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja		22 Unit Kerja	1 Unit Kerja	66.060.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					22 Unit Kerja	72.666.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
10.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**191.842.809.985,00**								**99.113.783.768,00**	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***14.954.197.257,00***								***16.449.616.983,00***	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						81.763.291.957,00						-		72.670.517.945,00	
		-						81.763.291.957,00						-		72.670.517.945,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		25 Unit	25 Unit	1.421.094.700,00							25 Unit	1.537.891.492,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	30.522.644.480,00							25 Unit	34.319.908.928,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 Paket		150 Paket	150 Paket	28.331.552.777,00							150 Paket	22.062.717.525,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						4.972.644.480,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			5.469.908.928,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	11 Unit	4.972.644.480,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Unit	5.469.908.928,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						650.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			715.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		25 Unit	5 Unit	650.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Unit	715.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						9.331.552.777,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			10.264.708.055,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 Paket		150 Paket	70 Paket	9.331.552.777,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Paket	10.264.708.055,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
11.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**11.049.160.000,00**								**13.120.656.000,00**	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan						***6.336.960.000,00***								***6.970.656.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						10.920.160.000,00						-		12.370.656.000,00	
		-						10.920.160.000,00						-		12.370.656.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	10.877.160.000,00							-	12.120.656.000,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						6.336.960.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			6.970.656.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	262 Orang	6.336.960.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Kelapapati || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	6.970.656.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
		Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau						**158.027.572.262,00**								**175.323.452.960,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**158.027.572.262,00**								**175.323.452.960,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**158.027.572.262,00**								**175.323.452.960,00**	
12.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**480.637.816.231,00**								**490.185.933.047,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***128.230.372.262,00***								***139.773.452.960,00***	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						821.776.580,00						-		945.144.385,00	
		-						821.776.580,00						-		945.144.385,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	540.000.000,00							12 Laporan	734.591.225,00	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						140.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	7 Laporan	140.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	160.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						268.964.092.922,00						-		297.786.539.835,00	
		-						268.964.092.922,00						-		297.786.539.835,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1035 Orang/bulan		1035 Orang/bulan	1035 Orang/bulan	268.775.521.645,00							1035 Orang/bulan	297.597.968.558,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						50.523.768.521,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			55.576.145.373,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1035 Orang/bulan		1035 Orang/bulan	396 Orang/bulan	50.523.768.521,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					1035 Orang/bulan	55.576.145.373,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.679.564.173,00						-		32.989.556.926,00	
		-						31.679.564.173,00						-		32.989.556.926,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.067.708.543,00							12 Laporan	6.154.768.218,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.536.855.630,00							12 Laporan	26.752.288.708,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.388.629.995,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			2.902.492.995,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	2.388.629.995,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	2.902.492.995,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.630.119.360,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			7.730.119.360,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	7.630.119.360,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	7.730.119.360,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.164.062.382,00						-		5.151.585.637,00	
		-						5.164.062.382,00						-		5.151.585.637,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.100.000.000,00							2 Unit	590.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	635.500.000,00							10 Unit	694.050.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	367.854.386,00							3 Unit	397.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			270.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	15 Unit	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	270.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						97.854.386,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	50 Unit	97.854.386,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Unit	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						169.844.121.277,00						-		149.619.107.359,00	
		-						169.844.121.277,00						-		149.619.107.359,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja		22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	169.844.121.277,00							22 Unit Kerja	149.619.107.359,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						67.100.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			72.834.695.232,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja		22 Unit Kerja	1 Unit Kerja	67.100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan dari BLUD					22 Unit Kerja	72.834.695.232,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
13.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**191.842.809.985,00**								**99.113.783.768,00**	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***25.500.000.000,00***								***31.050.000.000,00***	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						81.763.291.957,00						-		72.670.517.945,00	
		-						81.763.291.957,00						-		72.670.517.945,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		25 Unit	25 Unit	1.421.094.700,00							25 Unit	1.537.891.492,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	30.522.644.480,00							25 Unit	34.319.908.928,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 Paket		150 Paket	150 Paket	28.331.552.777,00							150 Paket	22.062.717.525,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						15.000.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			20.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	50 Unit	15.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Unit	20.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		25 Unit	50 Unit	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Unit	550.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						10.000.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			10.500.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 Paket		150 Paket	4 Paket	10.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Paket	10.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
14.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**11.049.160.000,00**								**13.120.656.000,00**	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan						***4.297.200.000,00***								***4.500.000.000,00***	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						10.920.160.000,00						-		12.370.656.000,00	
		-						10.920.160.000,00						-		12.370.656.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	10.877.160.000,00							-	12.120.656.000,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						4.297.200.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			4.500.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	270 Orang	4.297.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	4.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
		UPT BK RSUD Pulau Rupat						**5.824.666.186,00**								**5.474.666.262,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.824.666.186,00**								**5.474.666.262,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.824.666.186,00**								**5.474.666.262,00**	
15.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**480.637.816.231,00**								**490.185.933.047,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***3.449.667.996,00***								***3.286.776.580,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						821.776.580,00						-		945.144.385,00	
		-						821.776.580,00						-		945.144.385,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	281.776.580,00							5 Dokumen	210.553.160,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	540.000.000,00							12 Laporan	734.591.225,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			71.776.580,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	71.776.580,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						200.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			300.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	300.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.469.198.949,00						-		3.088.998.957,00	
		-						3.469.198.949,00						-		3.088.998.957,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	95.000.000,00							38 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	1.162.320.000,00							400 Laporan	1.163.552.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	370.000.000,00							1 Paket	531.980.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.540.467.099,00							2 Paket	891.913.922,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	168.731.850,00							1 Paket	175.605.035,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	150.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						150.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			155.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	155.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						250.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	150.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	38 Dokumen		38 Dokumen	40 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					38 Dokumen	10.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		400 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					400 Laporan	200.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00						-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100.000.000,00							6 Unit	100.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	100.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.679.564.173,00						-		32.989.556.926,00	
		-						31.679.564.173,00						-		32.989.556.926,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.067.708.543,00							12 Laporan	6.154.768.218,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						480.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	480.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	35.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.164.062.382,00						-		5.151.585.637,00	
		-						5.164.062.382,00						-		5.151.585.637,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.100.000.000,00							2 Unit	590.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	1.306.040.000,00							45 Unit	2.481.040.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.754.667.996,00							2 Unit	989.495.637,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.375.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit		45 Unit	3 Unit	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					45 Unit	1.375.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			390.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	390.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						754.667.996,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			390.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	754.667.996,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	390.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						169.844.121.277,00						-		149.619.107.359,00	
		-						169.844.121.277,00						-		149.619.107.359,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja		22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	169.844.121.277,00							22 Unit Kerja	149.619.107.359,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						500.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			500.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja		22 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan dari BLUD					22 Unit Kerja	500.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
16.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**191.842.809.985,00**								**99.113.783.768,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.424.998.190,00***								***1.147.889.682,00***	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						81.763.291.957,00						-		72.670.517.945,00	
		-						81.763.291.957,00						-		72.670.517.945,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		25 Unit	25 Unit	1.421.094.700,00							25 Unit	1.537.891.492,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	30.522.644.480,00							25 Unit	34.319.908.928,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 Paket		150 Paket	150 Paket	28.331.552.777,00							150 Paket	22.062.717.525,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						200.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			250.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Unit	250.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						150.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			72.891.492,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		25 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Unit	72.891.492,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.000.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			750.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 Paket		150 Paket	50 Paket	1.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Paket	750.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						109.950.518.028,00						-		25.693.265.823,00	
		-						109.950.518.028,00						-		25.693.265.823,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2 Unit	117.998.190,00							2 Unit	474.998.190,00	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						74.998.190,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			74.998.190,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	1 Unit	74.998.190,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	74.998.190,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
17.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**11.049.160.000,00**								**13.120.656.000,00**	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan						***200.000.000,00***								***500.000.000,00***	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						10.920.160.000,00						-		12.370.656.000,00	
		-						10.920.160.000,00						-		12.370.656.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	10.877.160.000,00							-	12.120.656.000,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						200.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			500.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	15 Orang	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	500.000.000,00	UPT BK RSUD Pulau Rupat
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						**188.063.641.785,00**								**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**188.063.641.785,00**								**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**188.063.641.785,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
18.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.168.852.029,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***25.018.852.029,00***								***0,00***	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						200.000.000,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00 Dokumen		100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	200.000.000,00							100.00 Dokumen	0,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00 Dokumen		100.00 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100.00 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.145.584.601,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						13.145.584.601,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	13.145.584.601,00							85 Orang/bulan	0,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.145.584.601,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		85 Orang/bulan	144 Orang/bulan	13.145.584.601,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					85 Orang/bulan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						150.000.000,00						-		0,00	
		-						150.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						150.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.301.984.560,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						2.301.984.560,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							10 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	1.500.000.000,00							100 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	67.595.000,00							777 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	182.265.293,00							18 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		6 Paket	6 Paket	12.323.639,00							6 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	519.800.628,00							35 Paket	0,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.323.639,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		6 Paket	0 Paket	12.323.639,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Paket	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						519.800.628,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	0 Paket	519.800.628,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Paket	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						67.595.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	0 Paket	67.595.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					777 Paket	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						182.265.293,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	0 Paket	182.265.293,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					18 Paket	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						20.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	0 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		-						616.345.045,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0 Unit	0 Unit	150.000.000,00							15 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						150.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0 Unit	0 Unit	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.189.474.640,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						5.189.474.640,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	500.000.000,00							24 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	4.689.474.640,00							24 Laporan	0,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						500.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					24 Laporan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.689.474.640,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	63 Laporan	4.689.474.640,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					24 Laporan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.565.463.183,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						3.565.463.183,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	1.268.165.770,00							15 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	80.000.000,00							30 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.217.297.413,00							1 Unit	0,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	0 Unit	80.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.268.165.770,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	0 Unit	1.268.165.770,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.217.297.413,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	2.217.297.413,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						616.345.045,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						616.345.045,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	466.345.045,00							-	0,00	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						466.345.045,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	466.345.045,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**27.623.500.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***26.623.500.000,00***								***0,00***	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						25.723.500.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
		-						25.723.500.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	220.000.000,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM		1 KM	1 KM	2.422.500.000,00							1 KM	0,00	
			Panjang Breakwater yang Dibangun	0.8 KM		0.8 KM	0.8 KM	0,00							0.8 KM	0,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	20 KM		10 KM	10 KM	1.000.000.000,00							20 KM	0,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	20 KM		20 KM	20 KM	21.231.000.000,00							20 KM	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai						21.231.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	20 KM		20 KM	0 KM	21.231.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						2.422.500.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM		1 KM	0 KM	2.422.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater						0,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0.8 KM		0.8 KM	0,5 KM	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					0.8 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						200.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir						1.000.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	20 KM		10 KM	0 KM	1.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir						220.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	2 Unit		2 Unit	0 Unit	220.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku						600.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0132	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.900.000.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
		-						1.900.000.000,00						Perangkat Daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM		1 KM	1 KM	500.000.000,00							1 KM	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	6 KM		6 KM	6 KM	1.000.000.000,00							6 KM	0,00	
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa						1.000.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	6 KM		6 KM	0 KM	1.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						500.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM		1 KM	0 KM	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						400.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**11.381.060.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						***11.381.060.000,00***								***0,00***	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						11.381.060.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
		-						11.381.060.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR		600 SR	700 SR	10.000.000.000,00							800 SR	0,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1.381.060.000,00							5 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						1.381.060.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit		5 Unit	3 Unit	1.381.060.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						10.000.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR		600 SR	400 SR	10.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					800 SR	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**400.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya layanan persampahan regional						***400.000.000,00***								***0,00***	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00						Perangkat Daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						400.000.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00							10 Unit	0,00	
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						400.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	10 Unit		10 Unit	2 Unit	400.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**462.860.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						***462.860.000,00***								***0,00***	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						462.860.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
		-						462.860.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	462.860.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						462.860.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	2 Unit	462.860.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**665.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan						***665.000.000,00***								***0,00***	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						665.000.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
		-						665.000.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00							1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500 M		500 M	500 M	365.000.000,00							500 M	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						365.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500 M		500 M	0 M	365.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 M	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						300.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**27.550.854.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung						***27.550.854.000,00***								***0,00***	
		-						27.550.854.000,00						Perangkat Daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	146.352.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	582.102.000,00							30 Dokumen	0,00	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						146.352.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	146.352.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						582.102.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 Dokumen		30 Dokumen	70 Dokumen	582.102.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				30 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						27.550.854.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
		-						27.550.854.000,00						Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	25.800.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	1.022.400.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						1.022.400.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	4 Bangunan Gedung	1.022.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						25.800.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	17 Bangunan Gedung	25.800.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**92.701.190.756,00**								**0,00**	
		Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman						***92.701.190.756,00***								***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						92.701.190.756,00						Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang nyaman dan aman		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	16 Dokumen		12 Dokumen	16 Dokumen	791.200.000,00							16 Dokumen	0,00	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	10 Jembatan		5 Jembatan	10 Jembatan	750.000.000,00							10 Jembatan	0,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM		1311.961 KM	1311.961 KM	950.000.000,00							1311.961 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	65 KM		20 KM	65 KM	14.399.990.756,00							65 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	709.284 KM		689.084 KM	693.384 KM	41.510.000.000,00							699.084 KM	0,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	30 Meter		30 Meter	30 Meter	5.930.000.000,00							30 Meter	0,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						791.200.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	16 Dokumen		12 Dokumen	7 Dokumen	791.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						16 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						950.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM		1311.961 KM	1311.961 KM	950.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						1311.961 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						14.399.990.756,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	65 KM		20 KM	0 KM	14.399.990.756,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						65 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						41.510.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	709.284 KM		689.084 KM	3,4 KM	41.510.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					699.084 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan						750.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	10 Jembatan		5 Jembatan	0 Jembatan	750.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Jembatan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						5.930.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	30 Meter		30 Meter	35 Meter	5.930.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						92.701.190.756,00						Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang nyaman dan aman		0,00	
		-						92.701.190.756,00						Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang nyaman dan aman		0,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	-	25.000.000.000,00							-	0,00	
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	-	1.150.000.000,00							-	0,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	-		-	-	2.220.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						0,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	0 KM	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						25.000.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	0 KM	25.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan						0,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	-		-	0 Meter	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan						2.220.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	-		-	7 Meter	2.220.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan						1.150.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	0 Meter	1.150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**913.241.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi						***913.241.000,00***								***0,00***	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						651.261.000,00						Masyarakat pada Bidang Pekerjaan Umum		0,00	
		-						651.261.000,00						Masyarakat pada Bidang Pekerjaan Umum		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	269.555.000,00							200 Orang	0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 Orang		20 Orang	20 Orang	381.706.000,00							20 Orang	0,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						269.555.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	200 Orang		200 Orang	0 Orang	269.555.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					200 Orang	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						381.706.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 Orang		20 Orang	0 Orang	381.706.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Orang	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						98.796.000,00						Masyarakat pada Bidang Pekerjaan Umum		0,00	
		-						98.796.000,00						Masyarakat pada Bidang Pekerjaan Umum		0,00	
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang		10 Orang	10 Orang	98.796.000,00							10 Orang	0,00	
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI						98.796.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang		10 Orang	0 Orang	98.796.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Orang	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						163.184.000,00						Masyarakat pada Bidang Pekerjaan Umum		0,00	
		-						163.184.000,00						Masyarakat pada Bidang Pekerjaan Umum		0,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	80 Paket Pekerjaan		80 Paket Pekerjaan	80 Paket Pekerjaan	163.184.000,00							80 Paket Pekerjaan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						163.184.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	80 Paket Pekerjaan		80 Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan	163.184.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket Pekerjaan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**1.197.084.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						***1.197.084.000,00***								***0,00***	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						394.250.000,00						Masyarakat		0,00	
		-						394.250.000,00						Masyarakat		0,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	394.250.000,00							1 Dokumen	0,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						394.250.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			0,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	394.250.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						802.834.000,00						Masyarakat		0,00	
		-						802.834.000,00						Masyarakat		0,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	30 Layanan		30 Layanan	20 Layanan	441.784.000,00							20 Layanan	0,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	361.050.000,00							1 Sistem Informasi	0,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						441.784.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			0,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	30 Layanan		30 Layanan	0 Layanan	441.784.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Layanan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						361.050.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	361.050.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Sistem Informasi	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan						**172.924.765.087,00**								**117.814.155.991,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**172.674.765.087,00**								**117.414.155.991,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**172.674.765.087,00**								**117.414.155.991,00**	
28.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.360.765.087,00**								**14.160.541.617,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***14.210.765.087,00***								***13.581.541.617,00***	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		698.000.000,00	
		-						300.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		698.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00							2 Dokumen	349.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00							5 Laporan	349.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			349.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	349.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			349.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	349.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.466.873.470,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		8.500.000.000,00	
		-						8.466.873.470,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		8.500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	8.466.873.470,00							60 Orang/bulan	8.500.000.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.466.873.470,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	68 Orang/bulan	8.466.873.470,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Orang/bulan	8.500.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						400.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		500.000.000,00	
		-						400.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00							1 Laporan	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						400.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.250.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		2.335.000.000,00	
		-						2.250.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		2.335.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen	150.000.000,00							35 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	1.500.000.000,00							500 Laporan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket		800 Paket	800 Paket	100.000.000,00							800 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	150.000.000,00							10 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00							1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00							1 Paket	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	30.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	75.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket		800 Paket	200 Paket	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					800 Paket	30.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						150.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Paket	50.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						150.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 Laporan	2.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.163.891.617,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		1.111.891.617,00	
		-						1.163.891.617,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		1.111.891.617,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00							3 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	851.891.617,00							2 Laporan	851.891.617,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00							8 Laporan	10.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Laporan	10.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						300.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	250.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						851.891.617,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			851.891.617,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	36 Laporan	851.891.617,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	851.891.617,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.880.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		615.650.000,00	
		-						1.880.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		615.650.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100.000.000,00							3 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	350.000.000,00							6 Unit	265.650.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	350.000.000,00							5 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	930.000.000,00							4 Unit	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	150.000.000,00							7 Unit	50.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						350.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	350.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	200.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			265.650.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	7 Unit	350.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	265.650.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						930.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	930.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	50.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						900.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		400.000.000,00	
		-						900.000.000,00						Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		400.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	900.000.000,00							-	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						900.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	900.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	400.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
29.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**1.000.000.000,00**								**1.850.000.000,00**	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						***700.000.000,00***								***1.250.000.000,00***	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						150.000.000,00						korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00						korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00							1 Dokumen	150.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						150.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						550.000.000,00						Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						550.000.000,00						Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.200.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah		Unit Rumah	5 Unit Rumah	250.000.000,00							5 Unit Rumah	600.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah		20 Unit Rumah	10 Unit Rumah	300.000.000,00							10 Unit Rumah	600.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						300.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			600.000.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah		20 Unit Rumah	5 Unit Rumah	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit Rumah	600.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						250.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			600.000.000,00	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah		Unit Rumah	2 Unit Rumah	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit Rumah	600.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						300.000.000,00						korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		500.000.000,00	
		-						300.000.000,00						korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00							1 Laporan	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						300.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
30.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**1.350.000.000,00**								**2.250.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						***1.150.000.000,00***								***1.850.000.000,00***	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						350.000.000,00						Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		350.000.000,00	
		-						350.000.000,00						Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00							1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Rumah Tangga		60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	150.000.000,00							60 Rumah Tangga	150.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						200.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			200.000.000,00	
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah						150.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			150.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Rumah Tangga		60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Rumah Tangga	150.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.000.000.000,00						Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.900.000.000,00	
		-						1.000.000.000,00						Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00							1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00							1 Laporan	200.000.000,00	
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha		1 Ha	1 Ha	700.000.000,00							1 Ha	1.500.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						100.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						200.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						700.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha		1 Ha	1 Ha	700.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Ha	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
31.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**5.634.000.000,00**								**3.700.000.000,00**	
		Terpenuhinya rumah layak huni di kawasan permukiman kumuh dan berkurangnya kawasan permukiman kumuh						***5.534.000.000,00***								***2.100.000.000,00***	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						5.634.000.000,00						kawasan permukiman kumuh		3.700.000.000,00	
		-						5.634.000.000,00						kawasan permukiman kumuh		3.700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	150.000.000,00							1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	25 Orang		Orang	25 Orang	100.000.000,00							25 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	25 Orang		Orang	25 Orang	100.000.000,00							25 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.795.000.000,00							10 Unit	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 Unit Rumah		40 Unit Rumah	20 Unit Rumah	3.489.000.000,00							20 Unit Rumah	1.500.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						3.489.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 Unit Rumah		40 Unit Rumah	72 Unit Rumah	3.489.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Unit Rumah	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						1.795.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			1.500.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit		10 Unit	16 Unit	1.795.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						150.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						100.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			100.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	25 Orang		Orang	25 Orang	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Orang	100.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.04.2.01.0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						100.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	25 Orang		Orang	25 Orang	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Orang	100.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
32.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**149.330.000.000,00**								**95.453.614.374,00**	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman						***149.080.000.000,00***								***95.253.614.374,00***	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						149.330.000.000,00						Meningkatnya pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang berkualitas		95.453.614.374,00	
		-						149.330.000.000,00						Meningkatnya pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang berkualitas		95.453.614.374,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00							1 Dokumen	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00							1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00							1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	11 Lokasi		11 Lokasi	11 Lokasi	136.330.000.000,00							11 Lokasi	84.553.614.374,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	11 Lokasi		11 Lokasi	11 Lokasi	12.000.000.000,00							11 Lokasi	10.000.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						500.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			500.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						250.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						250.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						12.000.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			10.000.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	11 Lokasi		11 Lokasi	11 Lokasi	12.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Lokasi	10.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						136.330.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			84.553.614.374,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	11 Lokasi		11 Lokasi	11 Lokasi	136.330.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Lokasi	84.553.614.374,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**250.000.000,00**								**400.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**250.000.000,00**								**400.000.000,00**	
33.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**100.000.000,00**								**250.000.000,00**	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan						***50.000.000,00***								***250.000.000,00***	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						Lokasi Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		250.000.000,00	
		-						100.000.000,00						Lokasi Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		250.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara		3 Berita Acara	3 Berita Acara	50.000.000,00							3 Berita Acara	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			150.000.000,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara		3 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Berita Acara	150.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			100.000.000,00	
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
34.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**150.000.000,00**								**150.000.000,00**	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan melalui mediasi	-		-	33 %	150.000.000,00							-	150.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00						Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00						Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	150.000.000,00							1 Laporan	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.						150.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**15.682.869.921,00**								**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.682.869.921,00**								**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.682.869.921,00**								**0,00**	
35.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.773.369.921,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***13.733.369.921,00***								***0,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						95.000.000,00						-		0,00	
		-						95.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00							4 Laporan	0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	-					1 Dokumen	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.829.527.651,00						-		0,00	
		-						10.829.527.651,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	10.829.527.651,00							45 Orang/bulan	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.829.527.651,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	185 Orang/bulan	10.829.527.651,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					45 Orang/bulan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						75.000.000,00						-		0,00	
		-						75.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						75.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.766.950,00						-		0,00	
		-						385.766.950,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.283.862,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	19.024.172,00							9 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	23.000.000,00							16 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82 Paket		82 Paket	82 Paket	17.458.916,00							82 Paket	0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						23.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	23.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Paket	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.458.916,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82 Paket		82 Paket	82 Paket	17.458.916,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					82 Paket	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.283.862,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	650 Paket	26.283.862,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.024.172,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	19.024.172,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Paket	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.735.230.320,00						-		0,00	
		-						1.735.230.320,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	187.250.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.535.980.320,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						187.250.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	187.250.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.535.980.320,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.535.980.320,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						652.845.000,00						-		0,00	
		-						652.845.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	319.195.000,00							11 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	271.890.000,00							6 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		20 Unit	25 Unit	21.760.000,00							25 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		5 Unit	1 Unit	40.000.000,00							1 Unit	0,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						271.890.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	271.890.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						319.195.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	12 Unit	319.195.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Unit	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.760.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		20 Unit	12 Unit	21.760.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Unit	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		5 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**1.909.500.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						***1.559.500.000,00***								***0,00***	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						725.000.000,00						-		0,00	
		-						725.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	475.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	250.000.000,00							1000 Orang	0,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						250.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Orang	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						475.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	475.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		-						730.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00							0 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	480.000.000,00							0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	50.000.000,00							100 Keluarga	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan		1 laporan	1 laporan	0,00							1 laporan	0,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00							100 Orang	0,00	
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	500 Orang	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Orang	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Keluarga	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						150.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					0 Dokumen	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan		1 laporan	1 laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 laporan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						480.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	480.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					0 Dokumen	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						354.500.000,00						-		0,00	
		-						354.500.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00							4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang		50 Orang	50 Orang	150.000.000,00							50 Orang	0,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang		200 Orang	200 Orang	54.500.000,00							200 Orang	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00							2 Laporan	0,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						150.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						54.500.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang		200 Orang	200 Orang	54.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					200 Orang	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						150.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang		50 Orang	100 Orang	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00							1 Kegiatan	0,00	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Kegiatan	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						730.000.000,00						-		0,00	
		-						730.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	55 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						**19.285.356.595,00**								**20.173.052.297,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.285.356.595,00**								**20.173.052.297,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**19.285.356.595,00**								**20.173.052.297,00**	
37.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.625.258.175,00**								**18.796.348.297,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***17.625.258.175,00***								***18.796.348.297,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.579.878,00						-		20.000.000,00	
		-						17.579.878,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	17.579.878,00							6 Dokumen	20.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.579.878,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	17.579.878,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.914.902.718,00						-		16.919.902.718,00	
		-						15.914.902.718,00						-		16.919.902.718,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00							Laporan	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang/bulan		136 Orang/bulan	136 Orang/bulan	15.894.902.718,00							Orang/bulan	16.894.902.718,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.894.902.718,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			16.894.902.718,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang/bulan		136 Orang/bulan	263 Orang/bulan	15.894.902.718,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Orang/bulan	16.894.902.718,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Laporan	25.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						369.002.169,00						-		404.402.169,00	
		-						369.002.169,00						-		404.402.169,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	34.200.000,00							19 Dokumen	35.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	166.838.000,00							1 Laporan	167.838.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	50.000.000,00							5 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		21 Paket	15 Paket	55.129.847,00							15 Paket	61.129.847,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	20.085.135,00							10 Paket	21.085.135,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	32.749.187,00							50 Paket	35.749.187,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.085.135,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			21.085.135,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	20.085.135,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Paket	21.085.135,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.749.187,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			35.749.187,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	32.749.187,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Paket	35.749.187,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			65.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Paket	65.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55.129.847,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			61.129.847,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		21 Paket	15 Paket	55.129.847,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Paket	61.129.847,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						34.200.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			35.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	34.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					19 Dokumen	35.200.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						166.838.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			167.838.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	166.838.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	167.838.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						487.243.410,00						-		542.043.410,00	
		-						487.243.410,00						-		542.043.410,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00							1 Laporan	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	277.260.160,00							1 Laporan	281.060.160,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.983.250,00							1 Laporan	10.983.250,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.983.250,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.983.250,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.983.250,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	10.983.250,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						277.260.160,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			281.060.160,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	277.260.160,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	281.060.160,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						836.530.000,00						-		910.000.000,00	
		-						836.530.000,00						-		910.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	532.850.000,00							20 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	120.860.000,00							6 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	77.930.000,00							1 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	104.890.000,00							2 Unit	150.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						120.860.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	120.860.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	180.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						532.850.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	532.850.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Unit	500.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						77.930.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	77.930.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	80.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						104.890.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	104.890.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	150.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		-						369.002.169,00						-		404.402.169,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00							-	18.400.000,00	
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			18.400.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	18.400.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
38.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**1.660.098.420,00**								**1.376.704.000,00**	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran						***1.660.098.420,00***								***1.376.704.000,00***	
		-						1.531.828.420,00						-		1.228.434.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang		10 Orang	20 Orang	47.434.000,00							20 Orang	58.434.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.325.780,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.034.068.640,00							1 Laporan	1.050.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.034.068.640,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.050.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.034.068.640,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	1.050.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						40.325.780,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.325.780,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						47.434.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			58.434.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang		10 Orang	9 Orang	47.434.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Orang	58.434.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						58.270.000,00						-		68.270.000,00	
		-						58.270.000,00						-		68.270.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	58.270.000,00							1 Dokumen	68.270.000,00	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						58.270.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			68.270.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	58.270.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	68.270.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						70.000.000,00						-		80.000.000,00	
		-						70.000.000,00						-		80.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	70.000.000,00							1000 Orang	80.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						70.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang		1000 Orang	500 Orang	70.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Orang	80.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.531.828.420,00						-		1.228.434.000,00	
		-						1.531.828.420,00						-		1.228.434.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	-	410.000.000,00							-	70.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						410.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	10 Unit	410.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	70.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Satuan Polisi Pamong Praja						**25.947.041.035,00**								**25.667.041.770,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.947.041.035,00**								**25.667.041.770,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**25.947.041.035,00**								**25.667.041.770,00**	
39.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.169.599.195,00**								**25.014.599.930,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***25.169.599.195,00***								***25.014.599.930,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.681.620,00						-		15.681.551,00	
		-						15.681.620,00						-		15.681.551,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.681.620,00							4 Dokumen	15.681.551,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.681.620,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			15.681.551,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.681.620,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	15.681.551,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.275.846.269,00						-		23.275.846.269,00	
		-						23.275.846.269,00						-		23.275.846.269,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan		96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	23.275.846.269,00							96 Orang/bulan	23.275.846.269,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.275.846.269,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			23.275.846.269,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan		96 Orang/bulan	392 Orang/bulan	23.275.846.269,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					96 Orang/bulan	23.275.846.269,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						265.961.476,00						-		110.962.280,00	
		-						265.961.476,00						-		110.962.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	154.999.196,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.700.000,00							2 Paket	25.700.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2 Paket	Paket	36.790.201,00							Paket	36.790.201,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.622,00							1 Paket	15.000.622,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	33.471.457,00							2 Paket	33.471.457,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.622,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			15.000.622,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.622,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	15.000.622,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33.471.457,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			33.471.457,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	33.471.457,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	33.471.457,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.700.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			25.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	25.700.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	25.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						36.790.201,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			36.790.201,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2 Paket	2 Paket	36.790.201,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Paket	36.790.201,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						154.999.196,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	154.999.196,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.423.640.150,00						-		1.423.640.150,00	
		-						1.423.640.150,00						-		1.423.640.150,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.600.700,00							12 Laporan	125.600.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.295.103.200,00							4 Laporan	1.295.103.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.936.250,00							1 Laporan	2.936.250,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.936.250,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.936.250,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.936.250,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	2.936.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.600.700,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			125.600.700,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.600.700,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	125.600.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.295.103.200,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.295.103.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	6 Laporan	1.295.103.200,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	1.295.103.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						188.469.680,00						-		188.469.680,00	
		-						188.469.680,00						-		188.469.680,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	156.799.680,00							7 Unit	156.799.680,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		40 Unit	Unit	31.670.000,00							30 Unit	31.670.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						156.799.680,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			156.799.680,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	156.799.680,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	156.799.680,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						31.670.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			31.670.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		40 Unit	14 Unit	31.670.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Unit	31.670.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
40.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**777.441.840,00**								**652.441.840,00**	
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum						***652.441.840,00***								***652.441.840,00***	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						627.447.854,00						-		627.447.854,00	
		-						627.447.854,00						-		627.447.854,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	6 Orang		6 Orang	6 Orang	17.048.000,00							6 Orang	17.048.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00							1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	25 laporan		25 laporan	25 laporan	125.000.000,00							25 laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	5 Orang		4 Orang	4 Orang	7.970.014,00							5 Orang	7.970.014,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	6 Unit		5 Unit	5 Unit	77.429.840,00							5 Unit	77.429.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						400.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			400.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan						7.970.014,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			7.970.014,00	
		meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	5 Orang		4 Orang	4 Orang	7.970.014,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Orang	7.970.014,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						17.048.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			17.048.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	6 Orang		6 Orang	6 Orang	17.048.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Orang	17.048.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						125.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			125.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	25 laporan		25 laporan	2 laporan	125.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 laporan	125.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						77.429.840,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			77.429.840,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	6 Unit		5 Unit	4 Unit	77.429.840,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	77.429.840,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						149.993.986,00						-		24.993.986,00	
		-						149.993.986,00						-		24.993.986,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan		12 laporan	12 laporan	24.993.986,00							12 laporan	24.993.986,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00							2 Laporan	0,00	
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						24.993.986,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			24.993.986,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan		12 laporan	12 laporan	24.993.986,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 laporan	24.993.986,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						125.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Dinas Sosial						**49.388.603.190,00**								**50.270.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**49.388.603.190,00**								**50.270.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**49.388.603.190,00**								**50.270.000.000,00**	
41.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.756.503.450,00**								**13.670.000.000,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***11.756.503.450,00***								***13.300.000.000,00***	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						48.000.000,00						-		255.000.000,00	
		-						48.000.000,00						-		255.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00							2 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	23.000.000,00							5 Laporan	135.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			120.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			135.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	23.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	135.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.369.519.606,00						-		8.950.000.000,00	
		-						8.369.519.606,00						-		8.950.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 Orang/bulan		720 Orang/bulan	720 Orang/bulan	8.369.519.606,00							720 Orang/bulan	8.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.369.519.606,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			8.950.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 Orang/bulan		720 Orang/bulan	972 Orang/bulan	8.369.519.606,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					720 Orang/bulan	8.950.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						406.000.000,00						-		1.070.000.000,00	
		-						406.000.000,00						-		1.070.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Laporan		400 Laporan	350 Laporan	265.000.000,00							350 Laporan	550.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00							12 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.000.000,00							12 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.000.000,00							12 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	85.000.000,00							12 Paket	250.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Paket	50.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						85.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Paket	250.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Paket	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Paket	120.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						265.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Laporan		400 Laporan	200 Laporan	265.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					350 Laporan	550.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.618.164.720,00						-		2.795.000.000,00	
		-						2.618.164.720,00						-		2.795.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00							12 Laporan	230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.423.164.720,00							12 Laporan	2.565.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						195.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			230.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	230.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.423.164.720,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			2.565.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.423.164.720,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	2.565.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						314.819.124,00						-		600.000.000,00	
		-						314.819.124,00						-		600.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		50 Unit	25 Unit	250.000.000,00							25 Unit	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit		140 Unit	145 Unit	64.819.124,00							150 Unit	250.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		50 Unit	50 Unit	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Unit	350.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						64.819.124,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit		140 Unit	90 Unit	64.819.124,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Unit	250.000.000,00	Dinas Sosial
42.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**200.000.000,00**								**350.000.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial						***200.000.000,00***								***350.000.000,00***	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00						-		350.000.000,00	
		-						200.000.000,00						-		350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga		4 Lembaga	55 Lembaga	200.000.000,00							5 Lembaga	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						200.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			350.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga		4 Lembaga	1 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Lembaga	350.000.000,00	Dinas Sosial
43.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**500.000.000,00**								**1.000.000.000,00**	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial						***500.000.000,00***								***750.000.000,00***	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						500.000.000,00						-		750.000.000,00	
		-						500.000.000,00						-		750.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang		6 Orang	7 Orang	289.800.000,00							7 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		30 Orang	50 Orang	35.200.000,00							50 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		60 Orang	50 Orang	175.000.000,00							50 Orang	250.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						175.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		60 Orang	20 Orang	175.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						35.200.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		30 Orang	9 Orang	35.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						289.800.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang		6 Orang	15 Orang	289.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Orang	350.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						0,00						-		250.000.000,00	
		-						0,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		110 Orang	80 Orang	0,00							90 Orang	250.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu						0,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			250.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		110 Orang	25 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					90 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
44.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**36.932.099.740,00**								**35.250.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial						***36.932.099.740,00***								***35.250.000.000,00***	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						36.932.099.740,00						-		35.250.000.000,00	
		-						36.932.099.740,00						-		35.250.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		65 Orang	50 Orang	1.321.000.000,00							70 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18830 Orang		18530 Orang	18830 Orang	35.611.099.740,00							18830 Orang	35.000.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						1.321.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			250.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		65 Orang	115 Orang	1.321.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						35.611.099.740,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			35.000.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18830 Orang		18530 Orang	18245 Orang	35.611.099.740,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					18830 Orang	35.000.000.000,00	Dinas Sosial
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						**19.698.701.454,00**								**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.556.415.281,00**								**0,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**19.556.415.281,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
45.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.035.301.454,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***13.035.301.454,00***								***0,00***	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72.648.435,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						72.648.435,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	72.648.435,00							2 Dokumen	0,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						72.648.435,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	72.648.435,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.072.551.702,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						10.072.551.702,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	10.072.551.702,00							81 Orang/bulan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.072.551.702,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		81 Orang/bulan	43 Orang/bulan	10.072.551.702,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Orang/bulan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						852.152.132,00						-		0,00	
		-						852.152.132,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	650.628.783,00							600 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	24.940.000,00							2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	65.328.846,00							2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.374.158,00							2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	90.880.345,00							2 Paket	0,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.374.158,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.374.158,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						90.880.345,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	90.880.345,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.940.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	24.940.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						65.328.846,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	65.328.846,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						650.628.783,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	650.628.783,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					600 Laporan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						0,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36 Unit		36 Unit	36 Unit	0,00							36 Unit	0,00	
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36 Unit		36 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					36 Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.735.757.185,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						1.735.757.185,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	910.210.560,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	640.546.625,00							12 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						640.546.625,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	250 Laporan	640.546.625,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						185.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						910.210.560,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	910.210.560,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						302.192.000,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						302.192.000,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	30.000.000,00							6 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		14 Unit	14 Unit	195.892.000,00							15 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	41.300.000,00							20 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	35.000.000,00							4 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						195.892.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		14 Unit	14 Unit	195.892.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41.300.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	40 Unit	41.300.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						6 Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						35.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						4 Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**1.389.715.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja						***1.389.715.000,00***								***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						1.325.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						1.325.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	0,00							5 Lembaga	0,00	
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga		5 Lembaga	0 Lembaga	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Lembaga	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						64.715.000,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						64.715.000,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	64.715.000,00							10 Lembaga	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						64.715.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga		10 Lembaga	15 Lembaga	64.715.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Lembaga	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						0,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						0,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan		5 Perusahaan	5 Perusahaan	0,00							5 Perusahaan	0,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan		5 Perusahaan	0 Perusahaan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Perusahaan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		-						1.325.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	1.325.000.000,00							-	0,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						1.325.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	180 Orang	1.325.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
47.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**142.559.602,00**								**0,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						***142.559.602,00***								***0,00***	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						142.559.602,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						142.559.602,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang		2000 Orang	2500 Orang	30.000.000,00							2500 Orang	0,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang		50 Orang	250 Orang	112.559.602,00							250 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang		2000 Orang	2000 Orang	30.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2500 Orang	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						112.559.602,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang		50 Orang	60 Orang	112.559.602,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					250 Orang	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**4.988.839.225,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi						***4.988.839.225,00***								***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						67.240.492,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						67.240.492,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	27 Perusahaan		20 Perusahaan	22 Perusahaan	17.240.492,00							24 Perusahaan	0,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	20 Perusahaan		10 Perusahaan	15 Perusahaan	0,00							15 Perusahaan	0,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						17.240.492,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	27 Perusahaan		20 Perusahaan	20 Perusahaan	17.240.492,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					24 Perusahaan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	20 Perusahaan		10 Perusahaan	0 Perusahaan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Perusahaan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						4.921.598.733,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						4.921.598.733,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	38.200.000,00							1 Lembaga	0,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	35 Perkara		25 Perkara	30 Perkara	25.000.000,00							30 Perkara	0,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara		25 Perkara	30 Perkara	0,00							30 Perkara	0,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	34000 Orang		34000 Orang	34000 Orang	4.858.398.733,00							34000 Orang	0,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara		25 Perkara	0 Perkara	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Perkara	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	35 Perkara		25 Perkara	26 Perkara	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Perkara	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						38.200.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	38.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Lembaga	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						4.858.398.733,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	34000 Orang		34000 Orang	24000 Orang	4.858.398.733,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					34000 Orang	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**142.286.173,00**								**0,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**142.286.173,00**								**0,00**	
49.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**0,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi						***0,00***								***0,00***	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						0,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						0,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
50.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**64.999.208,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi						***64.999.208,00***								***0,00***	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						64.999.208,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						64.999.208,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	64.999.208,00							20 Orang	0,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	0,00							1 Lokasi	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi						64.999.208,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	16 Orang	64.999.208,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Orang	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi		1 Lokasi	0 Lokasi	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Lokasi	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
51.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**77.286.965,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi						***77.286.965,00***								***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						77.286.965,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						77.286.965,00						Masyarakat Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman		1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	77.286.965,00							1 Satuan Permukiman	0,00	
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						77.286.965,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman		1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	77.286.965,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Satuan Permukiman	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**11.595.397.205,00**								**12.172.907.205,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.595.397.205,00**								**12.172.907.205,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**11.595.397.205,00**								**12.172.907.205,00**	
52.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.188.487.205,00**								**8.188.487.205,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***8.188.487.205,00***								***8.188.487.205,00***	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.591.538.335,00						-		6.591.538.335,00	
		-						6.591.538.335,00						-		6.591.538.335,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.591.538.335,00							50 Orang/bulan	6.591.538.335,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.591.538.335,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			6.591.538.335,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.591.538.335,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					50 Orang/bulan	6.591.538.335,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						342.902.470,00						-		342.902.470,00	
		-						342.902.470,00						-		342.902.470,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	74.702.470,00							2 Laporan	74.702.470,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.000.000,00							1 Paket	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	54.000.000,00							2 Paket	54.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.200.000,00							2 Paket	10.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	180.000.000,00							3 Paket	180.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.200.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.200.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	10.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	10.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						180.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			180.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	180.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	24.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						54.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			54.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	54.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	54.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						74.702.470,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			74.702.470,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	74.702.470,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	74.702.470,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.089.766.400,00						-		1.089.766.400,00	
		-						1.089.766.400,00						-		1.089.766.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	168.720.000,00							1 Laporan	168.720.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	921.046.400,00							1 Laporan	921.046.400,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						168.720.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			168.720.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	168.720.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	168.720.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						921.046.400,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			921.046.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	921.046.400,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	921.046.400,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						164.280.000,00						-		164.280.000,00	
		-						164.280.000,00						-		164.280.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	25.800.000,00							7 Unit	25.800.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	138.480.000,00							6 Unit	138.480.000,00	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						138.480.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			138.480.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	138.480.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	138.480.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.800.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			25.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	5 Unit	25.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	25.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
53.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**1.083.000.000,00**								**1.083.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***1.083.000.000,00***								***1.083.000.000,00***	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						583.000.000,00						-		583.000.000,00	
		-						583.000.000,00						-		583.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	-	583.000.000,00							-	583.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						583.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			583.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	1 Laporan	583.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	583.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						500.000.000,00						-		500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						500.000.000,00						-		500.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	500.000.000,00							-	500.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	5 Lembaga	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
54.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**946.400.000,00**								**946.400.000,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***946.400.000,00***								***946.400.000,00***	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						90.000.000,00						-		90.000.000,00	
		-						90.000.000,00						-		90.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	55.000.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	35.000.000,00							-	35.000.000,00	
	2.08.03.2.01.0008	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						35.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						55.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	1 Kegiatan	55.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	55.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						333.400.000,00						-		333.400.000,00	
		-						333.400.000,00						-		333.400.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	200.000.000,00							-	200.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	66.800.000,00							-	66.800.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	46.000.000,00							-	46.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	-	15.600.000,00							-	15.600.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	40 Orang	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						66.800.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			66.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	40 Orang	66.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	66.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						46.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			46.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	10 Orang	46.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	46.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						5.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.600.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			15.600.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	8 Orang	15.600.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	15.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						523.000.000,00						-		523.000.000,00	
		-						523.000.000,00						-		523.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	523.000.000,00							-	523.000.000,00	
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						523.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			523.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lembaga	523.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	523.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
55.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**1.377.510.000,00**								**1.955.020.000,00**	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak						***1.377.510.000,00***								***977.510.000,00***	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00						-		977.510.000,00	
		-						400.000.000,00						-		977.510.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	400.000.000,00							-	977.510.000,00	
	2.08.07.2.01.0015	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						400.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			977.510.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	3 Laporan	400.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	977.510.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						977.510.000,00						-		977.510.000,00	
		-						977.510.000,00						-		977.510.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	977.510.000,00							-	977.510.000,00	
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						977.510.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			977.510.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	110 Orang	977.510.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	977.510.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	50 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Dinas Ketahanan Pangan						**7.623.976.089,00**								**9.469.515.303,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.623.976.089,00**								**9.469.515.303,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**7.623.976.089,00**								**9.469.515.303,00**	
56.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.323.976.089,00**								**8.816.315.303,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***7.323.976.089,00***								***8.816.315.303,00***	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.064.813.104,00						-		7.109.298.215,00	
		-						6.064.813.104,00						-		7.109.298.215,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	6.064.813.104,00							32 Orang/bulan	7.109.298.215,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.064.813.104,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			7.109.298.215,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	37 Orang/bulan	6.064.813.104,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Kota Bengkalis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					32 Orang/bulan	7.109.298.215,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						200.000.000,00						asn		450.000.000,00	
		-						200.000.000,00						asn		450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00							3 Dokumen	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	200.000.000,00							200 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	46 Paket	0,00							46 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	0,00							10 Paket	50.000.000,00	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	12 Paket	0,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Kota Bengkalis || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					46 Paket	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Kota Bengkalis || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Paket	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Kota Bengkalis || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275 Laporan		200 Laporan	65 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					200 Laporan	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						706.965.020,00						Bangunan Kantor		857.017.088,00	
		-						706.965.020,00						Bangunan Kantor		857.017.088,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	146.606.000,00							4 Laporan	178.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	424.014.240,00							1 Laporan	508.817.088,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						146.606.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			178.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	146.606.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Kota Bengkalis || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	178.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						424.014.240,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			508.817.088,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan Laporan	424.014.240,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Kota Bengkalis || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	508.817.088,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						352.197.965,00						asn		400.000.000,00	
		-						352.197.965,00						asn		400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	212.039.800,00							5 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	3 Unit	140.158.165,00							3 Unit	150.000.000,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						212.039.800,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	212.039.800,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Kota Bengkalis || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						140.158.165,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	4 Unit	140.158.165,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Kota Bengkalis || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						3 Unit	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
		-						706.965.020,00						Bangunan Kantor		857.017.088,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	136.344.780,00							-	170.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						136.344.780,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	136.344.780,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Kota Bengkalis || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						-	170.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
57.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**120.000.000,00**								**325.000.000,00**	
		Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat						***40.000.000,00***								***325.000.000,00***	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						80.000.000,00						-		275.000.000,00	
		-						80.000.000,00						-		275.000.000,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00							1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	40.000.000,00							1 laporan	125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						40.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			125.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 laporan	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						40.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			150.000.000,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
		-						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	-		-	-	40.000.000,00							-	50.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						40.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			50.000.000,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	-		-	4 Ton	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
58.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**80.000.000,00**								**150.000.000,00**	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						***80.000.000,00***								***150.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		150.000.000,00	
		-						80.000.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00							1 Laporan	150.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						80.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			150.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
59.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**100.000.000,00**								**178.200.000,00**	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						***100.000.000,00***								***178.200.000,00***	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		178.200.000,00	
		-						100.000.000,00						-		178.200.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	178.200.000,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			178.200.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	178.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Dinas Lingkungan Hidup						**49.001.163.107,00**								**54.356.273.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**49.001.163.107,00**								**54.356.273.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**49.001.163.107,00**								**54.356.273.250,00**	
60.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.122.311.690,00**								**23.445.481.912,00**	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup						***20.082.311.690,00***								***23.365.481.912,00***	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						304.850.374,00						-		585.000.000,00	
		-						304.850.374,00						-		585.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	165.000.000,00							8 Dokumen	225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.918.649,00							4 Laporan	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	79.931.725,00							16 Laporan	200.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						165.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			225.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	165.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						59.918.649,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			160.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.918.649,00	Kab. Bengkalis	-					4 Laporan	160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						79.931.725,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	79.931.725,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Laporan	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.070.093.030,00						-		11.100.000.000,00	
		-						11.070.093.030,00						-		11.100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan		51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	11.070.093.030,00							51 Orang/bulan	11.100.000.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.070.093.030,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			11.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan		51 Orang/bulan	53 Orang/bulan	11.070.093.030,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					51 Orang/bulan	11.100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						40.000.000,00						-		60.000.000,00	
		-						40.000.000,00						-		60.000.000,00	
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							1 Dokumen	30.000.000,00	
	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah						20.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			30.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						20.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.394.336.287,00						-		1.620.000.000,00	
		-						1.394.336.287,00						-		1.620.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00							12 Dokumen	180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.052.228,00							12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	178.279.500,00							12 Paket	135.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	104.943.808,00							4 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00							4 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	105.060.751,00							4 Paket	130.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			55.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	55.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						105.060.751,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			130.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	105.060.751,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	130.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						178.279.500,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			135.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	178.279.500,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Paket	135.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						104.943.808,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	104.943.808,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						811.052.228,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	811.052.228,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						175.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			180.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	180.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200.000.000,00						-		270.000.000,00	
		-						200.000.000,00						-		270.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	15 Unit	200.000.000,00							15 Unit	270.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			270.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	15 Unit	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Unit	270.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.547.709.719,00						-		1.647.291.823,00	
		-						1.547.709.719,00						-		1.647.291.823,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	405.003.123,00							12 Laporan	410.003.123,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.142.706.596,00							12 Laporan	1.237.288.700,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						405.003.123,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			410.003.123,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	405.003.123,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	410.003.123,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.142.706.596,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			1.237.288.700,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.142.706.596,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	1.237.288.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.565.322.280,00						-		8.163.190.089,00	
		-						5.565.322.280,00						-		8.163.190.089,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit		72 Unit	72 Unit	5.126.466.280,00							72 Unit	7.763.190.089,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	334.260.000,00							11 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	40.000.000,00							14 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	64.596.000,00							5 Unit	50.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						334.260.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	334.260.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Unit	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.126.466.280,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			7.763.190.089,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit		72 Unit	72 Unit	5.126.466.280,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					72 Unit	7.763.190.089,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					14 Unit	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						64.596.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	64.596.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
61.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**69.194.000,00**								**80.000.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP						***69.194.000,00***								***80.000.000,00***	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						69.194.000,00						-		80.000.000,00	
		-						69.194.000,00						-		80.000.000,00	
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen		Dokumen	Dokumen	69.194.000,00							Dokumen	80.000.000,00	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota						69.194.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			80.000.000,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	69.194.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Dokumen	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
62.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**370.503.196,00**								**2.320.000.000,00**	
		Menurunya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup						***320.503.196,00***								***2.320.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						324.909.556,00						-		1.120.000.000,00	
		-						324.909.556,00						-		1.120.000.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	69.974.836,00							1 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00							1 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	134.934.720,00							1 Dokumen	190.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00							1 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00							1 Dokumen	550.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						134.934.720,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			190.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	134.934.720,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	190.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						69.974.836,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			160.000.000,00	
		Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	69.974.836,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut						25.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			125.000.000,00	
		Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	125.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						25.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			95.000.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	95.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						70.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			550.000.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						45.593.640,00						-		1.200.000.000,00	
		-						45.593.640,00						-		1.200.000.000,00	
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00							1 Kegiatan	950.000.000,00	
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.593.640,00							1 Kegiatan	250.000.000,00	
	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi						20.593.640,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			250.000.000,00	
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.593.640,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Kegiatan	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi						25.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			950.000.000,00	
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Kegiatan	950.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
63.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**6.235.231.052,00**								**6.858.754.157,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						***6.235.231.052,00***								***6.858.754.157,00***	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						6.235.231.052,00						-		6.858.754.157,00	
		-						6.235.231.052,00						-		6.858.754.157,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Ha		50 Ha	50 Ha	6.235.231.052,00							50 Ha	6.858.754.157,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						6.235.231.052,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			6.858.754.157,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Ha		50 Ha	60 Ha	6.235.231.052,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Ha	6.858.754.157,00	Dinas Lingkungan Hidup
64.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**117.082.360,00**								**360.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang di terbitkan						***117.082.360,00***								***360.000.000,00***	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						117.082.360,00						-		360.000.000,00	
		-						117.082.360,00						-		360.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha		20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	50.000.000,00							20 Badan Usaha	110.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	67.082.360,00							12 Dokumen	250.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						67.082.360,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			250.000.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	67.082.360,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						50.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			110.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha		20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Badan Usaha	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
65.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**159.670.896,00**								**306.133.181,00**	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup						***159.670.896,00***								***306.133.181,00***	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						159.670.896,00						-		306.133.181,00	
		-						159.670.896,00						-		306.133.181,00	
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Sanksi		2 Sanksi	2 Sanksi	50.415.448,00							2 Sanksi	75.000.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	12 Pengaduan		12 Pengaduan	12 Pengaduan	35.000.000,00							12 Pengaduan	110.000.000,00	
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Perkara		4 Perkara	4 Perkara	74.255.448,00							4 Perkara	121.133.181,00	
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						74.255.448,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			121.133.181,00	
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Perkara		4 Perkara	4 Perkara	74.255.448,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Perkara	121.133.181,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						35.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	12 Pengaduan		12 Pengaduan	12 Pengaduan	35.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Pengaduan	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						50.415.448,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			75.000.000,00	
		Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Sanksi		2 Sanksi	4 Sanksi	50.415.448,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Sanksi	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
66.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**21.927.169.913,00**								**20.985.904.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola persampahan						***21.927.169.913,00***								***20.985.904.000,00***	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						21.927.169.913,00						-		20.985.904.000,00	
		-						21.927.169.913,00						-		20.985.904.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							1 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	87.044.000,00							1 Dokumen	120.000.000,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	84000 Ton		84000 Ton	84000 Ton	18.630.172.065,00							84000 Ton	20.285.904.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit		6 Unit	2 Unit	3.189.953.848,00							2 Unit	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						20.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			80.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						3.189.953.848,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit		6 Unit	7 Unit	3.189.953.848,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota						87.044.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			120.000.000,00	
		Tersusunnya laporan pemantauaan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	87.044.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						18.630.172.065,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			20.285.904.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	84000 Ton		84000 Ton	84000 Ton	18.630.172.065,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					84000 Ton	20.285.904.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**19.460.665.502,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.460.665.502,00**								**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**19.460.665.502,00**								**0,00**	
67.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.160.665.502,00**								**0,00**	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / Kota di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						***19.110.665.502,00***								***0,00***	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00							5 Dokumen	0,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.621.432.224,00						-		0,00	
		-						12.621.432.224,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	12.621.432.224,00							70 Orang/bulan	0,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.621.432.224,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		70 Orang/bulan	200 Orang/bulan	12.621.432.224,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					70 Orang/bulan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00						-		0,00	
		-						70.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang		36 Orang	36 Orang	70.000.000,00							36 Orang	0,00	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						70.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang		36 Orang	20 Orang	70.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					36 Orang	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.327.253.838,00						-		0,00	
		-						2.327.253.838,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	662.773.838,00							150 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	80.000.000,00							2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	200.000.000,00							20 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.000.000,00							4 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.284.480.000,00							2 Paket	0,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.284.480.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.284.480.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					2 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						80.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	80.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					2 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						662.773.838,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	200 Laporan	662.773.838,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						323.750.000,00						-		0,00	
		-						323.750.000,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67 Unit		67 Unit	67 Unit	50.000.000,00							67 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		40 Unit	40 Unit	273.750.000,00							40 Unit	0,00	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67 Unit		67 Unit	50 Unit	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					67 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						273.750.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		40 Unit	50 Unit	273.750.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.168.023.440,00						-		0,00	
		-						3.168.023.440,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan		14 Laporan	13 Laporan	455.000.000,00							13 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	2.713.023.440,00							6 Laporan	0,00	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						455.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan		14 Laporan	12 Laporan	455.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					13 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.713.023.440,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	2.713.023.440,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						600.206.000,00						-		0,00	
		-						600.206.000,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	0,00							12 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	250.479.000,00							20 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	199.372.000,00							6 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	150.355.000,00							100 Unit	0,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						199.372.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	199.372.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.479.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	5 Unit	250.479.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	3 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.355.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	150.355.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
68.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**100.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***100.000.000,00***								***0,00***	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	100.000.000,00							11 Laporan	0,00	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	0,00							11 Dokumen	0,00	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	11 Dokumen		11 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
69.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**75.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatanya kualitas layanan pencatatan sipil						***75.000.000,00***								***0,00***	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00							1 Paket	0,00	
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	8 Paket	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						75.000.000,00						-		0,00	
		-						75.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	75.000.000,00							11 Laporan	0,00	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						75.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	75.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
70.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**75.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						***75.000.000,00***								***0,00***	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						75.000.000,00						-		0,00	
		-						75.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						75.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
71.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**50.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan						***50.000.000,00***								***0,00***	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa						**30.579.927.460,00**								**32.040.122.558,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.579.927.460,00**								**32.040.122.558,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**30.579.927.460,00**								**32.040.122.558,00**	
72.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**22.357.227.860,00**								**23.201.422.958,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***22.357.227.860,00***								***21.951.422.958,00***	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.450.000,00						-		250.000.000,00	
		-						115.450.000,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	115.450.000,00							5 Dokumen	250.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						115.450.000,00			-	-	-			250.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	115.450.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	250.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.734.797.598,00						-		17.734.797.598,00	
		-						17.734.797.598,00						-		17.734.797.598,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	17.734.797.598,00							55 Orang/bulan	17.734.797.598,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.734.797.598,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			17.734.797.598,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	80 Orang/bulan	17.734.797.598,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					55 Orang/bulan	17.734.797.598,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.268.694.600,00						-		2.099.890.227,00	
		-						1.268.694.600,00						-		2.099.890.227,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	32.000.000,00							2 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	138.525.000,00							12 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00							12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket		300 Paket	300 Paket	150.000.000,00							300 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket		150 Paket	150 Paket	149.899.715,00							150 Paket	149.899.715,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	79.990.512,00							60 Paket	79.990.512,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	218.279.373,00							90 Paket	350.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						79.990.512,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			79.990.512,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	80 Paket	79.990.512,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Paket	79.990.512,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						218.279.373,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			350.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	150 Paket	218.279.373,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					90 Paket	350.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket		300 Paket	800 Paket	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					300 Paket	250.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						149.899.715,00			-	-	-			149.899.715,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket		150 Paket	100 Paket	149.899.715,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Paket	149.899.715,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						32.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	35 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	70.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	100 Laporan	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						138.525.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	138.525.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	200.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						885.550.000,00						-		1.000.000.000,00	
		-						885.550.000,00						-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	885.550.000,00							1 Unit	1.000.000.000,00	
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						885.550.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	885.550.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.336.393.330,00						-		1.336.393.330,00	
		-						1.336.393.330,00						-		1.336.393.330,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	189.996.400,00							12 Laporan	189.996.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.046.400.000,00							12 Laporan	1.046.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99.996.930,00							12 Laporan	99.996.930,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						99.996.930,00			-	-	-			99.996.930,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1000 Laporan	99.996.930,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	99.996.930,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						189.996.400,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			189.996.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	189.996.400,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	189.996.400,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.046.400.000,00			-	-	-			1.046.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.046.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	1.046.400.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.016.342.332,00						-		780.341.803,00	
		-						1.016.342.332,00						-		780.341.803,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	260.988.384,00							1 Unit	149.987.855,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	39.986.300,00							9 Unit	39.986.300,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	350.627.648,00							11 Unit	390.627.648,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	364.740.000,00							1 Unit	199.740.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						350.627.648,00			-	-	-			390.627.648,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	9 Unit	350.627.648,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Unit	390.627.648,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.986.300,00			-	-	-			39.986.300,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	39.986.300,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Unit	39.986.300,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						260.988.384,00			-	-	-			149.987.855,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	50 Unit	260.988.384,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	149.987.855,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						364.740.000,00			-	-	-			199.740.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	70 Unit	364.740.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	199.740.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
73.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**3.965.200.000,00**								**4.425.200.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa						***3.965.200.000,00***								***4.425.200.000,00***	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						3.965.200.000,00						-		4.425.200.000,00	
		-						3.965.200.000,00						-		4.425.200.000,00	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	136 Desa		136 Desa	136 Desa	23.400.000,00							136 Desa	23.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.029.900.000,00							1 Dokumen	182.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	319.800.000,00							12 Dokumen	319.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	489.625.000,00							9 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00							1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	136 Dokumen		136 Dokumen	136 Dokumen	862.975.000,00							136 Dokumen	1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	999.500.000,00							1 Laporan	1.500.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						862.975.000,00			-	-	-			1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	136 Dokumen		136 Dokumen	136 Dokumen	862.975.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					136 Dokumen	1.200.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						489.625.000,00			-	-	-			700.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	9 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	489.625.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Dokumen	700.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						319.800.000,00			-	-	-			319.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	319.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	319.800.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa						1.029.900.000,00			-	-	-			182.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	11 Dokumen	1.029.900.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	182.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						240.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						999.500.000,00			-	-	-			1.500.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	136 Laporan	999.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	1.500.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						23.400.000,00			-	-	-			23.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	136 Desa		136 Desa	0 Desa	23.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					136 Desa	23.400.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
74.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**4.257.499.600,00**								**4.413.499.600,00**	
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan						***4.257.499.600,00***								***4.413.499.600,00***	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						4.257.499.600,00						-		4.413.499.600,00	
		-						4.257.499.600,00						-		4.413.499.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	136 Dokumen		136 Dokumen	136 Dokumen	3.857.499.600,00							136 Dokumen	3.857.499.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	300.000.000,00							11 Dokumen	56.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00							1 Lembaga	500.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga		1 Lembaga	136 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Lembaga	500.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						3.857.499.600,00			-	-	-			3.857.499.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	136 Dokumen		136 Dokumen	1 Dokumen	3.857.499.600,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					136 Dokumen	3.857.499.600,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						300.000.000,00			-	-	-			56.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	11 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Dokumen	56.000.000,00	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**10.736.701.243,00**								**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.736.701.243,00**								**0,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**10.736.701.243,00**								**0,00**	
75.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.336.701.243,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***10.336.701.243,00***								***0,00***	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.021.567.695,00						-		0,00	
		-						7.021.567.695,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	7.021.567.695,00							40 Orang/bulan	0,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.021.567.695,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		39 Orang/bulan	35 Orang/bulan	7.021.567.695,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Orang/bulan	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						468.345.718,00						-		0,00	
		-						468.345.718,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan		350 Laporan	350 Laporan	305.715.000,00							350 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Paket		2000 Paket	2000 Paket	36.600.000,00							2000 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	28.976.066,00							30 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	19.993.404,00							30 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	67.061.248,00							60 Paket	0,00	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						19.993.404,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	19.993.404,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Paket	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						67.061.248,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	20 Paket	67.061.248,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Paket	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						36.600.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Paket		2000 Paket	1000 Paket	36.600.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2000 Paket	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						28.976.066,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	28.976.066,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Paket	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						305.715.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan		350 Laporan	200 Laporan	305.715.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					350 Laporan	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.608.226.830,00						-		0,00	
		-						2.608.226.830,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	198.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.398.787.200,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.439.630,00							1 Laporan	0,00	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.439.630,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.439.630,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						198.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	198.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.398.787.200,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	86 Laporan	2.398.787.200,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						238.561.000,00						-		0,00	
		-						238.561.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	202.820.000,00							8 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.741.000,00							1 Unit	0,00	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						202.820.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	9 Unit	202.820.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						35.741.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	24 Unit	35.741.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
76.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**100.000.000,00**								**0,00**	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						***100.000.000,00***								***0,00***	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Tersedianya laporan tahunan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	2.14.02.2.01.0039	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Tersedianya laporan tahunan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	12 Laporan / Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
77.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**100.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana						***50.000.000,00***								***0,00***	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2736 Orang		2736 Orang	2736 Orang	50.000.000,00							2736 Orang	0,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2736 Orang		2736 Orang	3065 Orang	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2736 Orang	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	45 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
78.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**200.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)						***100.000.000,00***								***0,00***	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	66 Keluarga		66 Keluarga	66 Keluarga	100.000.000,00							66 Keluarga	0,00	
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	66 Keluarga		66 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					66 Keluarga	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	979 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	-					-	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Dinas Perhubungan						**109.186.675.525,00**								**118.137.123.561,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**109.186.675.525,00**								**118.137.123.561,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**109.186.675.525,00**								**118.137.123.561,00**	
79.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**30.688.524.318,00**								**33.514.910.634,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***30.688.524.318,00***								***32.962.170.634,00***	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						161.758.915,00						-		371.725.273,00	
		-						161.758.915,00						-		371.725.273,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	74.906.915,00							2 Dokumen	189.257.073,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	86.852.000,00							4 Laporan	182.468.200,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						74.906.915,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			189.257.073,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	74.906.915,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	189.257.073,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						86.852.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			182.468.200,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	86.852.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	182.468.200,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.545.297.032,00						-		17.545.297.032,00	
		-						17.545.297.032,00						-		17.545.297.032,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan		107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	17.545.297.032,00							107 Orang/bulan	17.545.297.032,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.545.297.032,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			17.545.297.032,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan		107 Orang/bulan	104 Orang/bulan	17.545.297.032,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					107 Orang/bulan	17.545.297.032,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						82.374.000,00						-		94.730.100,00	
		-						82.374.000,00						-		94.730.100,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	82.374.000,00							12 Dokumen	94.730.100,00	
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						82.374.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			94.730.100,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	82.374.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	94.730.100,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.131.656.418,00						-		3.017.707.375,00	
		-						2.131.656.418,00						-		3.017.707.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	98.000.000,00							12 Dokumen	170.714.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	602.149.000,00							12 Laporan	919.854.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	145.800.000,00							4 Paket	206.350.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	687.689.900,00							4 Paket	853.451.975,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	84.051.312,00							4 Paket	118.902.850,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	513.966.206,00							4 Paket	748.434.550,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						84.051.312,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			118.902.850,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	12 Paket	84.051.312,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	118.902.850,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						513.966.206,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			748.434.550,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	12 Paket	513.966.206,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	748.434.550,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						145.800.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			206.350.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	12 Paket	145.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	206.350.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						687.689.900,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			853.451.975,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	12 Paket	687.689.900,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	853.451.975,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						98.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			170.714.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	98.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	170.714.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						602.149.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			919.854.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	602.149.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	919.854.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.882.721.040,00						-		9.031.590.040,00	
		-						8.882.721.040,00						-		9.031.590.040,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	992.460.000,00							12 Laporan	1.141.329.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.890.261.040,00							12 Laporan	7.890.261.040,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						992.460.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			1.141.329.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	992.460.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	1.141.329.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.890.261.040,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			7.890.261.040,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.890.261.040,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	7.890.261.040,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.884.716.913,00						-		3.453.860.814,00	
		-						1.884.716.913,00						-		3.453.860.814,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	552.740.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	900.856.913,00							30 Unit	1.654.068.314,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	533.750.000,00							6 Unit	694.312.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500 Unit		500 Unit	500 Unit	250.110.000,00							500 Unit	552.740.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						533.750.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			694.312.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	533.750.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	694.312.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						900.856.913,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			1.654.068.314,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	25 Unit	900.856.913,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Unit	1.654.068.314,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			552.740.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	552.740.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.110.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			552.740.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500 Unit		500 Unit	220 Unit	250.110.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 Unit	552.740.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
80.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**49.557.644.207,00**								**42.749.336.700,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						***49.557.644.207,00***								***41.749.336.700,00***	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						43.214.478.207,00						-		37.050.000.000,00	
		-						43.214.478.207,00						-		37.050.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Unit		100 Unit	100 Unit	11.909.948.000,00							100 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit		500 Unit	500 Unit	31.304.530.207,00							500 Unit	35.050.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						11.909.948.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			2.000.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Unit		100 Unit	300 Unit	11.909.948.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						31.304.530.207,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			35.050.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit		500 Unit	300 Unit	31.304.530.207,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 Unit	35.050.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						500.000.000,00						-		500.000.000,00	
		-						500.000.000,00						-		500.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00							1 Unit	500.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						500.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			500.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1.949.748.000,00						-		500.000.000,00	
		-						1.949.748.000,00						-		500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.949.748.000,00							2 Unit	500.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1.949.748.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			500.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit		2 Unit	3 Unit	1.949.748.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						299.972.000,00						-		450.000.000,00	
		-						299.972.000,00						-		450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	299.972.000,00							12 Laporan	450.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						299.972.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			450.000.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	299.972.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	450.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						250.000.000,00						-		500.000.000,00	
		-						250.000.000,00						-		500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00							4 Laporan	500.000.000,00	
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						250.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			500.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	500.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.343.446.000,00						-		3.749.336.700,00	
		-						3.343.446.000,00						-		3.749.336.700,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.343.446.000,00							2 Laporan	3.749.336.700,00	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						3.343.446.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			3.749.336.700,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.343.446.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	3.749.336.700,00	Dinas Perhubungan
81.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**28.940.507.000,00**								**41.872.876.227,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi air						***28.940.507.000,00***								***41.672.876.227,00***	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						23.629.838.000,00						-		35.472.876.227,00	
		-						23.629.838.000,00						-		35.472.876.227,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	15.648.974.000,00							4 Unit	12.000.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	7.980.864.000,00							3 Unit	23.472.876.227,00	
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal						7.980.864.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			23.472.876.227,00	
		Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	2 Unit	7.980.864.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Unit	23.472.876.227,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal						15.648.974.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			12.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	15.648.974.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	12.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						5.181.471.000,00						-		6.200.000.000,00	
		-						5.181.471.000,00						-		6.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	242.519.000,00							4 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.938.952.000,00							2 Unit	6.000.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00							1 Unit	0,00	
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						242.519.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	242.519.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau						0,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau						4.938.952.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			6.000.000.000,00	
		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.938.952.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	6.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal						129.198.000,00						-		200.000.000,00	
		-						129.198.000,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	129.198.000,00							12 Laporan	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.03.2.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal						129.198.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	129.198.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						**17.552.301.804,00**								**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.552.301.804,00**								**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**17.457.301.804,00**								**0,00**	
82.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.658.554.804,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***9.613.554.804,00***								***0,00***	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00						-		0,00	
		-						25.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.775.000.000,00						-		0,00	
		-						6.775.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00							3 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.750.000.000,00							40 Orang/bulan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.750.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	56 Orang/bulan	6.750.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Orang/bulan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						25.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		0,00	
		-						10.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		0 Orang	10 Orang	10.000.000,00							15 Orang	0,00	
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		0 Orang	1 Orang	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Orang	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						585.745.144,00						-		0,00	
		-						585.745.144,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	100.754.283,00							120 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 Paket		1500 Paket	1500 Paket	101.500.000,00							1500 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	210.694.980,00							35 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	70.261.380,00							50 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	45 Paket	102.534.501,00							45 Paket	0,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						70.261.380,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	45 Paket	70.261.380,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Paket	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						102.534.501,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	40 Paket	102.534.501,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					45 Paket	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						101.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 Paket		1500 Paket	1500 Paket	101.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1500 Paket	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						210.694.980,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	45 Paket	210.694.980,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Paket	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.754.283,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		110 Laporan	25 Laporan	100.754.283,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.000.000,00						-		0,00	
		-						25.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	5.000.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	4 Unit	10.000.000,00							5 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	0,00	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.577.039.660,00						-		0,00	
		-						1.577.039.660,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	223.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.354.039.660,00							1 Laporan	0,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						223.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	223.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.354.039.660,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.354.039.660,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						660.770.000,00						-		0,00	
		-						660.770.000,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	102.580.000,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	233.400.000,00							6 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	274.790.000,00							7 Unit	0,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						233.400.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	233.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						102.580.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	102.580.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						274.790.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	274.790.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
83.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.171.520.000,00**								**0,00**	
		Menigkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***1.151.520.000,00***								***0,00***	
		-						1.171.520.000,00						-		0,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						1.000.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.171.520.000,00						-		0,00	
		-						1.171.520.000,00						-		0,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	131.520.000,00							-	0,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						131.520.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	1 Rekomendasi	131.520.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	100 Konten	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
84.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**6.627.227.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika						***6.627.227.000,00***								***0,00***	
		-						6.627.227.000,00						-		0,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						6.627.227.000,00						-		0,00	
		-						6.627.227.000,00						-		0,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	126.467.387,00							-	0,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	341.094.613,00							-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	6.000.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	149.665.000,00							-	0,00	
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						6.000.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	47 Titik	6.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						126.467.387,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	126.467.387,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						341.094.613,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	1 Layanan	341.094.613,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						149.665.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	47 Titik	149.665.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**60.000.000,00**								**0,00**	
85.	**2.20.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.000.000,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang Akurat, Mutakhir dan Dapat Diakses untuk Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Kebijakan Publik						***20.000.000,00***								***0,00***	
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00						-		0,00	
		-						20.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4500 Data		3650 Data	3750 Data	20.000.000,00							3900 Data	0,00	
	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4500 Data		3650 Data	3750 Data	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3900 Data	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
86.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**40.000.000,00**								**0,00**	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)						***20.000.000,00***								***0,00***	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-		0,00	
		-						40.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70 %		30 %	40 %	20.000.000,00							50 %	0,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70 %		30 %	40 %	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 %	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**35.000.000,00**								**0,00**	
87.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**35.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah						***35.000.000,00***								***0,00***	
		-						35.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00						-		0,00	
		-						35.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						25.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						**12.568.338.347,00**								**11.838.338.347,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.568.338.347,00**								**11.838.338.347,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**12.568.338.347,00**								**11.838.338.347,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
88.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.153.338.347,00**								**9.153.338.347,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***9.153.338.347,00***								***9.153.338.347,00***	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.800.000,00						-		8.800.000,00	
		-						8.800.000,00						-		8.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	8.800.000,00							6 Dokumen	8.800.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.800.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			8.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	8.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Dokumen	8.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.638.159.718,00						-		6.638.159.718,00	
		-						6.638.159.718,00						-		6.638.159.718,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.638.159.718,00							50 Orang/bulan	6.638.159.718,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.638.159.718,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			6.638.159.718,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	53 Orang/bulan	6.638.159.718,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					50 Orang/bulan	6.638.159.718,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						748.765.829,00						-		748.765.829,00	
		-						748.765.829,00						-		748.765.829,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00							1 Dokumen	52.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287 Laporan		287 Laporan	287 Laporan	426.715.829,00							287 Laporan	426.715.829,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3000 Paket		3000 Paket	3000 Paket	120.000.000,00							3000 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	30.050.000,00							30 Paket	30.050.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00							1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	100.000.000,00							35 Paket	100.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Paket	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			120.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3000 Paket		3000 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3000 Paket	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.050.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			30.050.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	30.050.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Paket	30.050.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						52.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			52.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	52.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						426.715.829,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			426.715.829,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287 Laporan		287 Laporan	1 Laporan	426.715.829,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					287 Laporan	426.715.829,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						55.000.000,00						-		55.000.000,00	
		-						55.000.000,00						-		55.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	55.000.000,00							10 Unit	55.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						55.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			55.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	1 Unit	55.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	55.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.321.032.800,00						-		1.321.032.800,00	
		-						1.321.032.800,00						-		1.321.032.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	162.000.000,00							1 Laporan	162.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan		49 Laporan	49 Laporan	1.159.032.800,00							49 Laporan	1.159.032.800,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						162.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			162.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	162.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	162.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.159.032.800,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			1.159.032.800,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan		49 Laporan	1 Laporan	1.159.032.800,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					49 Laporan	1.159.032.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						381.580.000,00						-		381.580.000,00	
		-						381.580.000,00						-		381.580.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	311.580.000,00							1 Unit	311.580.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00							1 Unit	70.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						311.580.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			311.580.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	24 Unit	311.580.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	311.580.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						70.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	96 Unit	70.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	70.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
89.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**280.000.000,00**								**280.000.000,00**	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						***280.000.000,00***								***280.000.000,00***	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						280.000.000,00						-		280.000.000,00	
		-						280.000.000,00						-		280.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha		50 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100.000.000,00							40 Unit Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	40 Unit Usaha		50 Unit Usaha	40 Unit Usaha	180.000.000,00							40 Unit Usaha	180.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						100.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			100.000.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Unit Usaha	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						180.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			180.000.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	40 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	180.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Unit Usaha	180.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
90.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**80.000.000,00**								**80.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						***80.000.000,00***								***80.000.000,00***	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		80.000.000,00	
		-						80.000.000,00						-		80.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha		40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	80.000.000,00							40 Unit Usaha	80.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						80.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			80.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha		40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	80.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Unit Usaha	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
91.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**390.000.000,00**								**390.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian						***390.000.000,00***								***390.000.000,00***	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						390.000.000,00						-		390.000.000,00	
		-						390.000.000,00						-		390.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang		40 Orang	50 Orang	390.000.000,00							50 Orang	390.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						390.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			390.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang		40 Orang	50 Orang	390.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	390.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
92.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**100.000.000,00**								**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya produktivitas koperasi						***100.000.000,00***								***100.000.000,00***	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100.000.000,00							50 Unit Usaha	100.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						100.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			100.000.000,00	
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Unit Usaha	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
93.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**2.310.000.000,00**								**1.580.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						***2.310.000.000,00***								***1.580.000.000,00***	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						2.310.000.000,00						-		1.580.000.000,00	
		-						2.310.000.000,00						-		1.580.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	75.000.000,00							-	75.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	1.335.000.000,00							-	1.335.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	170.000.000,00							-	170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	730.000.000,00							-	0,00	
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						1.335.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			1.335.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	80 Orang	1.335.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	1.335.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						75.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			75.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	75.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.2.01.0025	Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM						730.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	14 Unit Usaha	730.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						170.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			170.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	100 Unit Usaha	170.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	170.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
94.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**255.000.000,00**								**255.000.000,00**	
		Meningkatnya daya saing UMKM						***255.000.000,00***								***255.000.000,00***	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						255.000.000,00						-		255.000.000,00	
		-						255.000.000,00						-		255.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	-		-	-	255.000.000,00							-	255.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0017	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Riset dan Inovasi Produk						255.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			255.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk bagi UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	-		-	80 Unit Usaha	255.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	255.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**13.590.061.417,00**								**14.949.067.559,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.590.061.417,00**								**14.949.067.559,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**13.590.061.417,00**								**14.949.067.559,00**	
95.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.590.061.417,00**								**13.849.067.559,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***12.590.061.417,00***								***13.849.067.559,00***	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						78.478.531,00						-		86.326.384,00	
		-						78.478.531,00						-		86.326.384,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	43.370.717,00							4 Dokumen	47.707.789,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	35.107.814,00							6 Laporan	38.618.595,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.370.717,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			47.707.789,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	43.370.717,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	47.707.789,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.107.814,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			38.618.595,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	35.107.814,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Laporan	38.618.595,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.908.790.049,00						-		10.899.669.054,00	
		-						9.908.790.049,00						-		10.899.669.054,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	37.500.000,00							6 Laporan	41.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	9.871.290.049,00							1 Orang/bulan	10.858.419.054,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.871.290.049,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.858.419.054,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	60 / 12 Orang/bulan	9.871.290.049,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Orang/bulan	10.858.419.054,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						37.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			41.250.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan		6 Laporan	5 Laporan	37.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Laporan	41.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						785.316.567,00						-		863.848.224,00	
		-						785.316.567,00						-		863.848.224,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	15.000.000,00							30 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	299.307.000,00							250 Laporan	329.237.700,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	110.500.000,00							10 Paket	121.550.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	30.065.804,00							10 Paket	33.072.384,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	40.311.816,00							20 Paket	44.342.998,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket		65 Paket	65 Paket	290.131.947,00							65 Paket	319.145.142,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						40.311.816,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			44.342.998,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	8 Paket	40.311.816,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	44.342.998,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						290.131.947,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			319.145.142,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket		65 Paket	50 Paket	290.131.947,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					65 Paket	319.145.142,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						110.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			121.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	8 Paket	110.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Paket	121.550.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.065.804,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			33.072.384,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	5 Paket	30.065.804,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Paket	33.072.384,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			16.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	16.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						299.307.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			329.237.700,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	299.307.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					250 Laporan	329.237.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.632.476.270,00						-		1.795.723.897,00	
		-						1.632.476.270,00						-		1.795.723.897,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	712.000.000,00							12 Laporan	783.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	911.902.420,00							10 Laporan	1.003.092.662,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3200 Laporan		3200 Laporan	3200 Laporan	8.573.850,00							3200 Laporan	9.431.235,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.573.850,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			9.431.235,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3200 Laporan		3200 Laporan	2 Laporan	8.573.850,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3200 Laporan	9.431.235,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						712.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			783.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	712.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	783.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						911.902.420,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.003.092.662,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	20 Laporan	911.902.420,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Laporan	1.003.092.662,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						185.000.000,00						-		203.500.000,00	
		-						185.000.000,00						-		203.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		9 Unit	9 Unit	120.000.000,00							9 Unit	132.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	65.000.000,00							7 Unit	71.500.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						120.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			132.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		9 Unit	2 Unit	120.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Unit	132.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						65.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			71.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	100 Unit	65.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	71.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
96.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**410.000.000,00**								**451.000.000,00**	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi						***410.000.000,00***								***451.000.000,00***	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						410.000.000,00						-		451.000.000,00	
		-						410.000.000,00						-		451.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	140.000.000,00							-	154.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-		-	-	40.000.000,00							-	44.000.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	230.000.000,00							-	253.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0005	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						40.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			44.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-		-	20 UMKM	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	44.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						230.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			253.000.000,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	230.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	253.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						140.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			154.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	154.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
97.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**150.000.000,00**								**165.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						***150.000.000,00***								***165.000.000,00***	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00						-		165.000.000,00	
		-						150.000.000,00						-		165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00							3 Dokumen	165.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			165.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	165.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
98.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**130.000.000,00**								**143.000.000,00**	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko						***130.000.000,00***								***143.000.000,00***	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						130.000.000,00						-		143.000.000,00	
		-						130.000.000,00						-		143.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	130.000.000,00							-	143.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						130.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			143.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	100 Kegiatan Usaha	130.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	143.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
99.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**310.000.000,00**								**341.000.000,00**	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal						***310.000.000,00***								***341.000.000,00***	
		-						310.000.000,00						-		341.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	26 Kegiatan Usaha		26 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	180.000.000,00						26 Kegiatan Usaha	198.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	403 Pelaku Usaha		403 Pelaku Usaha	403 Pelaku Usaha	70.000.000,00							403 Pelaku Usaha	77.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						70.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			77.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	403 Pelaku Usaha		403 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	70.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					403 Pelaku Usaha	77.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						180.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			198.000.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	26 Kegiatan Usaha		26 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	180.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					26 Kegiatan Usaha	198.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						310.000.000,00						-		341.000.000,00	
		-						310.000.000,00						-		341.000.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	60.000.000,00							-	66.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						60.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			66.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	20 Kegiatan Usaha	60.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	66.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga						**30.242.361.596,92**								**42.324.469.871,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28.142.361.596,92**								**39.674.469.871,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**23.907.361.596,92**								**35.144.469.871,00**	
100.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.937.827.246,92**								**19.144.469.871,00**	
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah	-		-	100 %	16.742.827.246,92							-	18.044.469.871,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00						Dokumen		350.000.000,00	
		-						80.000.000,00						Dokumen		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00							5 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00							10 Laporan	100.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.613.569.605,92						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.760.167.951,00	
		-						9.613.569.605,92						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.760.167.951,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		68 Orang/bulan	70 Orang/bulan	9.613.569.605,92							72 Orang/bulan	9.760.167.951,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.613.569.605,92			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			9.760.167.951,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		68 Orang/bulan	90 Orang/bulan	9.613.569.605,92	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					72 Orang/bulan	9.760.167.951,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						494.255.721,00						Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.970.000.000,00	
		-						494.255.721,00						Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.970.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	10.000.000,00							30 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.000.000,00							12 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan		300 Laporan	300 Laporan	200.255.721,00							300 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	100.000.000,00							20 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	50.000.000,00							20 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	20.000.000,00							20 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	100.000.000,00							20 Paket	250.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	150.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	250.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	300.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	250.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			120.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.255.721,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			750.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan		300 Laporan	120 Laporan	200.255.721,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					300 Laporan	750.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						14.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			150.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.579.301.920,00						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.614.301.920,00	
		-						6.579.301.920,00						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.614.301.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	395.000.000,00							12 Laporan	420.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.169.301.920,00							12 Laporan	6.169.301.920,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00							12 Laporan	25.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	25.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						395.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			420.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	395.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	420.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.169.301.920,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			6.169.301.920,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.169.301.920,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	6.169.301.920,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.700.000,00						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		450.000.000,00	
		-						170.700.000,00						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		450.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00							2 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	125.700.000,00							3 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.000.000,00							5 Unit	100.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						125.700.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	8 Unit	125.700.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Unit	250.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	10 Unit	30.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
101.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**850.000.000,00**								**5.250.000.000,00**	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan						***800.000.000,00***								***4.250.000.000,00***	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						550.000.000,00						Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda		3.750.000.000,00	
		-						550.000.000,00						Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda		3.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	-	100.000.000,00							-	500.000.000,00	
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	-	50.000.000,00							-	500.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	50.000.000,00							-	500.000.000,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	130.000.000,00							-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	20.000.000,00							-	400.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	200.000.000,00							-	850.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0017	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota						20.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	400.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	4 Orang	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	500.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						200.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	30 Orang	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	850.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						130.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	30 Orang	130.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0022	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota						50.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			500.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	15 Orang	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	500.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota						100.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	500.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00						Organisasi Kepemudaan		1.500.000.000,00	
		-						300.000.000,00						Organisasi Kepemudaan		1.500.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	300.000.000,00							-	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						300.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	1.500.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
102.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**5.269.534.350,00**								**8.750.000.000,00**	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga						***5.269.534.350,00***								***5.250.000.000,00***	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.475.000.000,00						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan		100.000.000,00	
		-						1.475.000.000,00						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan		100.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	1.475.000.000,00							-	100.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						1.475.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	10 Unit	1.475.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		1.000.000.000,00	
		-						500.000.000,00						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		1.000.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	300.000.000,00							-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	200.000.000,00							-	500.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						200.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	100 Orang	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	500.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						300.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	2 Kegiatan	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	500.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						1.339.534.350,00						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi		4.000.000.000,00	
		-						1.339.534.350,00						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi		4.000.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	809.534.350,00							-	1.000.000.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	530.000.000,00							-	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						809.534.350,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	80 Orang	809.534.350,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						530.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			3.000.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	200 Orang	530.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	3.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						1.450.000.000,00						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		3.000.000.000,00	
		-						1.450.000.000,00						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		3.000.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	1.450.000.000,00							-	3.000.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						1.450.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			3.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	4 Kerja Sama	1.450.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	3.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						505.000.000,00						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						505.000.000,00						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		650.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	250.000.000,00							-	350.000.000,00	
			Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	255.000.000,00							-	300.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0011	Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota						250.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			350.000.000,00	
		Terlaksana Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	7 Lembaga	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	350.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat						255.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			300.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	200 Orang	255.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	300.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
103.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**850.000.000,00**								**2.000.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan						***800.000.000,00***								***2.000.000.000,00***	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						850.000.000,00						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		2.000.000.000,00	
		-						850.000.000,00						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		2.000.000.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	750.000.000,00							1 Organisasi	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						750.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	750.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Organisasi	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		-						850.000.000,00						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		2.000.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	-	50.000.000,00							-	400.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	50.000.000,00							-	600.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0011	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah						50.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	400.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.04.2.01.0012	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah						50.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			600.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	600.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**4.235.000.000,00**								**4.530.000.000,00**	
104.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**2.450.000.000,00**								**3.430.000.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan						***1.700.000.000,00***								***1.430.000.000,00***	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						750.000.000,00						Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						750.000.000,00						Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		1.000.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek		3 Objek	2 Objek	750.000.000,00							2 Objek	1.000.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						750.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek		3 Objek	4 Objek	750.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Objek	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						790.000.000,00						Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		1.230.000.000,00	
		-						790.000.000,00						Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		1.230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00							3 Laporan	230.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek		4 Objek	4 Objek	750.000.000,00							4 Objek	1.000.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						750.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek		4 Objek	3 Objek	750.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Objek	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						40.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			230.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	230.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						910.000.000,00						Pembinaan Lembaga Adat		1.200.000.000,00	
		-						910.000.000,00						Pembinaan Lembaga Adat		1.200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	110.000.000,00							1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Orang		1 Orang	1 Orang	800.000.000,00							1 Orang	1.000.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						800.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Orang		1 Orang	1 Orang	800.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						110.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
105.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**1.735.000.000,00**								**1.000.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah						***1.735.000.000,00***								***1.000.000.000,00***	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.735.000.000,00						Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah		1.000.000.000,00	
		-						1.735.000.000,00						Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah		1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.735.000.000,00							4 Unit	1.000.000.000,00	
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						1.735.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	4 Unit		4 Unit	2 Unit	1.735.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
106.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**50.000.000,00**								**100.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola museum						***50.000.000,00***								***100.000.000,00***	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						50.000.000,00						Pengelolaan Museum		100.000.000,00	
		-						50.000.000,00						Pengelolaan Museum		100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	100.000.000,00	
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						50.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.100.000.000,00**								**2.650.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**2.100.000.000,00**								**2.650.000.000,00**	
107.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**1.050.000.000,00**								**1.200.000.000,00**	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						***1.050.000.000,00***								***1.100.000.000,00***	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						20.000.000,00						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata		100.000.000,00	
		-						20.000.000,00						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14 Unit		14 Unit	14 Unit	20.000.000,00							14 Unit	100.000.000,00	
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						20.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14 Unit		14 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					14 Unit	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1.030.000.000,00						Destinasi Pariwisata		1.100.000.000,00	
		-						1.030.000.000,00						Destinasi Pariwisata		1.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00							3 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11 Laporan		Laporan	11 Laporan	30.000.000,00							11 Laporan	100.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						30.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11 Laporan		Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
108.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**960.000.000,00**								**1.250.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata						***960.000.000,00***								***1.150.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						960.000.000,00						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik		1.250.000.000,00	
		-						960.000.000,00						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik		1.250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00							2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00							2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	850.000.000,00							2 Kegiatan	1.000.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						10.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						60.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						40.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						850.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	850.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
109.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**90.000.000,00**								**200.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						***90.000.000,00***								***100.000.000,00***	
		-						90.000.000,00						Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11 Laporan		Laporan	11 Laporan	40.000.000,00							11 Laporan	100.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						40.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11 Laporan		Laporan	6 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						90.000.000,00						Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		200.000.000,00	
		-						90.000.000,00						Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		200.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk pengembangan Ekonomi kreatif	-		-	-	50.000.000,00							-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.05.2.01.0013	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif						50.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			100.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk pengembangan Ekonomi kreatif	-		-	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	100.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**11.928.484.136,00**								**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.928.484.136,00**								**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**11.828.484.136,00**								**0,00**	
110.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.628.484.136,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***11.628.484.136,00***								***0,00***	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.552.484,00						-		0,00	
		-						30.552.484,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.284.000,00							3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		6 Laporan	3 Laporan	15.268.484,00							2 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.284.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.284.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.268.484,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	15.268.484,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.942.014.936,00						-		0,00	
		-						8.942.014.936,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	8.942.014.936,00							60 Orang/bulan	0,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.942.014.936,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	8.942.014.936,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Orang/bulan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						381.504.709,00						-		0,00	
		-						381.504.709,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	240.867.000,00							100 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	19.000.000,00							50 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	28.447.120,00							50 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		20 Paket	50 Paket	10.114.299,00							50 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	83.076.290,00							50 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.114.299,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		20 Paket	50 Paket	10.114.299,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Paket	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						83.076.290,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	83.076.290,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Paket	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	19.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Paket	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						28.447.120,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	28.447.120,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Paket	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						240.867.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	240.867.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.095.228.766,00						-		0,00	
		-						2.095.228.766,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	199.000.000,00							6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan		65 Laporan	65 Laporan	1.892.987.146,00							65 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.241.620,00							5 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.241.620,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.241.620,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						199.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	199.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Laporan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.892.987.146,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan		65 Laporan	4 Laporan	1.892.987.146,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					65 Laporan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						179.183.241,00						-		0,00	
		-						179.183.241,00						-		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit		22 Unit	22 Unit	22.396.473,00							22 Unit	0,00	
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						22.396.473,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit		22 Unit	22 Unit	22.396.473,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					22 Unit	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		-						179.183.241,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	156.786.768,00							-	0,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						156.786.768,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	20 Unit	156.786.768,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
111.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**133.334.300,00**								**0,00**	
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan						***133.334.300,00***								***0,00***	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						125.504.300,00						-		0,00	
		-						125.504.300,00						-		0,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar		1000 Eksemplar	800 Eksemplar	0,00							1000 Eksemplar	0,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	8 Perpustakaan		8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	0,00							8 Perpustakaan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	66.664.300,00							8 Layanan	0,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 Perpustakaan		7 Perpustakaan	7 Perpustakaan	28.527.000,00							7 Perpustakaan	0,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	7 Perpustakaan		7 Perpustakaan	7 Perpustakaan	30.313.000,00							7 Perpustakaan	0,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang		30 Orang	30 Orang	0,00							30 Orang	0,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						28.527.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 Perpustakaan		7 Perpustakaan	8 Perpustakaan	28.527.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Perpustakaan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.313.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	7 Perpustakaan		7 Perpustakaan	8 Perpustakaan	30.313.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Perpustakaan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						66.664.300,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	66.664.300,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Layanan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang		30 Orang	30 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Orang	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar		1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Eksemplar	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	8 Perpustakaan		8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Perpustakaan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7.830.000,00						-		0,00	
		-						7.830.000,00						-		0,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	4 Orang		4 Orang	4 Orang	0,00							4 Orang	0,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Perpustakaan		20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	7.830.000,00							20 Perpustakaan	0,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	8 Lokus		8 Lokus	8 Lokus	0,00							8 Lokus	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	9 Orang		9 Orang	9 Orang	0,00							9 Orang	0,00	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	4 Orang		4 Orang	2 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	-					4 Orang	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						7.830.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Perpustakaan		20 Perpustakaan	6 Perpustakaan	7.830.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Perpustakaan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	9 Orang		9 Orang	12 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Orang	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	8 Lokus		8 Lokus	2 Lokus	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Lokus	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
112.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**66.665.700,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno						***66.665.700,00***								***0,00***	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						66.665.700,00						-		0,00	
		-						66.665.700,00						-		0,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang		10 Orang	10 Orang	66.665.700,00							10 Orang	0,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						66.665.700,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang		10 Orang	12 Orang	66.665.700,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Orang	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**100.000.000,00**								**0,00**	
113.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**100.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						***100.000.000,00***								***0,00***	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						74.000.000,00						-		0,00	
		-						74.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	55.000.000,00							46 Laporan	0,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas		1 Berkas	1 Berkas	19.000.000,00							1 Berkas	0,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						19.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas		1 Berkas	2 Berkas	19.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Berkas	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						55.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	55.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					46 Laporan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						26.000.000,00						-		0,00	
		-						26.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna		10 Pengguna	10 Pengguna	26.000.000,00							10 Pengguna	0,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						26.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna		10 Pengguna	46 Pengguna	26.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Pengguna	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Dinas Perikanan						**14.509.565.697,00**								**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**14.509.565.697,00**								**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**14.509.565.697,00**								**0,00**	
114.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.042.167.232,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***11.992.167.232,00***								***0,00***	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						161.362.699,00						-		0,00	
		-						161.362.699,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	61.362.699,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00							2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						61.362.699,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	61.362.699,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.365.480.929,00						-		0,00	
		-						10.365.480.929,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		52 Orang/bulan	60 Orang/bulan	10.365.480.929,00							60 Orang/bulan	0,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.365.480.929,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		52 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.365.480.929,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Orang/bulan	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						449.541.363,00						-		0,00	
		-						449.541.363,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen	38.000.000,00							35 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.624.144,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	233.125.000,00							2 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00							2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	55.322.479,00							3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.349.740,00							2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	62.120.000,00							2 Paket	0,00	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.349.740,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.349.740,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	0,00	Dinas Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.120.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	62.120.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55.322.479,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	55.322.479,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						38.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen		35 Dokumen	40 Dokumen	38.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						233.125.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	233.125.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						35.624.144,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	35.624.144,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		2 Unit	5 Unit	0,00							5 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00							10 Unit	0,00	
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						885.782.241,00						-		0,00	
		-						885.782.241,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	240.000.000,00							3 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	624.641.241,00							2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00							2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.141.000,00							1 Laporan	0,00	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						21.141.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.141.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						240.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	0,00	Dinas Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						624.641.241,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	624.641.241,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180.000.000,00						-		0,00	
		-						180.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000.000,00							4 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	80.000.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	50.000.000,00							10 Unit	0,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	0,00	Dinas Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	0,00	Dinas Perikanan
115.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**1.308.872.289,00**								**0,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						***1.308.872.289,00***								***0,00***	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						200.718.801,00						-		0,00	
		-						200.718.801,00						-		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.718.801,00							1 Dokumen	0,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						200.718.801,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.718.801,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.108.153.488,00						-		0,00	
		-						1.108.153.488,00						-		0,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	25 Kelompok		15 Kelompok	20 Kelompok	20.255.264,00							20 Kelompok	0,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang		40 Orang	50 Orang	22.898.224,00							50 Orang	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	700 Unit		500 Unit	550 Unit	1.065.000.000,00							600 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						22.898.224,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang		40 Orang	50 Orang	22.898.224,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						20.255.264,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	25 Kelompok		15 Kelompok	25 Kelompok	20.255.264,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Kelompok	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil						1.065.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	700 Unit		500 Unit	500 Unit	1.065.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					600 Unit	0,00	Dinas Perikanan
116.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**907.503.808,00**								**0,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***907.503.808,00***								***0,00***	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok		6 Kelompok	7 Kelompok	0,00							8 Kelompok	0,00	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						0,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok		6 Kelompok	10 Kelompok	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Kelompok	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						907.503.808,00						-		0,00	
		-						907.503.808,00						-		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		6 Unit	7 Unit	0,00							8 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit		16 Unit	17 Unit	857.503.808,00							18 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		6 Unit	5 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						857.503.808,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit		16 Unit	15 Unit	857.503.808,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					18 Unit	0,00	Dinas Perikanan
117.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**251.022.368,00**								**0,00**	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat						***251.022.368,00***								***0,00***	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						25.511.184,00						-		0,00	
		-						25.511.184,00						-		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.511.184,00							1 Dokumen	0,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						25.511.184,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.511.184,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						75.511.184,00						-		0,00	
		-						75.511.184,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha		3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	75.511.184,00						3 Unit Usaha	0,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						75.511.184,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha		3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	75.511.184,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Unit Usaha	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						150.000.000,00						-		0,00	
		-						150.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	150.000.000,00							5 Pelaku Usaha	0,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1000 Ton		1000 Ton	1000 Ton	0,00							1000 Ton	0,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1000 Ton		1000 Ton	1000 Ton	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Ton	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perikanan
		Dinas Perkebunan						**14.202.597.654,00**								**9.952.516.899,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**14.202.597.654,00**								**9.952.516.899,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**14.202.597.654,00**								**9.952.516.899,00**	
118.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.537.600.782,00**								**9.952.516.899,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***9.537.600.782,00***								***9.952.516.899,00***	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.194.785,00						-		0,00	
		-						30.194.785,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	19.857.300,00							6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10.337.485,00							5 Laporan	0,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						19.857.300,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	19.857.300,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Dokumen	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.337.485,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10.337.485,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.136.701.853,00						-		8.543.536.586,00	
		-						8.136.701.853,00						-		8.543.536.586,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	8.136.701.853,00							80 Orang/bulan	8.543.536.586,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.136.701.853,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.543.536.586,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		80 Orang/bulan	60 Orang/bulan	8.136.701.853,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					80 Orang/bulan	8.543.536.586,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						250.400.253,00						-		176.646.033,00	
		-						250.400.253,00						-		176.646.033,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00							1 Dokumen	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.200.000,00							1 Dokumen	12.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.808.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	31.500.000,00							3 Paket	34.650.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	17.566.033,00							9 Paket	19.321.582,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.736.745,00							4 Paket	9.610.420,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	70.589.475,00							16 Paket	77.644.031,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.736.745,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			9.610.420,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.736.745,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	9.610.420,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.589.475,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			77.644.031,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	70.589.475,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Paket	77.644.031,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						31.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			34.650.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	31.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	34.650.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.566.033,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			19.321.582,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	2 Paket	17.566.033,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Paket	19.321.582,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						21.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			23.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	23.100.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.808.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.808.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						11.200.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			12.320.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	12.320.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						852.869.891,00						-		938.156.880,00	
		-						852.869.891,00						-		938.156.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	91.999.700,00							1 Laporan	101.199.670,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	752.235.941,00							12 Laporan	827.459.535,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.634.250,00							1 Laporan	9.497.675,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.634.250,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			9.497.675,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.634.250,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	9.497.675,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						91.999.700,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			101.199.670,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	91.999.700,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	101.199.670,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						752.235.941,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			827.459.535,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	752.235.941,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	827.459.535,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						267.434.000,00						-		294.177.400,00	
		-						267.434.000,00						-		294.177.400,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	112.420.000,00							8 Unit	123.662.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		7 Unit	8 Unit	114.494.000,00							8 Unit	125.943.400,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit		114 Unit	114 Unit	40.520.000,00							114 Unit	44.572.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						114.494.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			125.943.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		7 Unit	3 Unit	114.494.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	125.943.400,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						112.420.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			123.662.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	3 Unit	112.420.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	123.662.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.520.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			44.572.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit		114 Unit	18 Unit	40.520.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					114 Unit	44.572.000,00	Dinas Perkebunan
119.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**45.000.900,00**								**0,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan						***45.000.900,00***								***0,00***	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						45.000.900,00						-		0,00	
		-						45.000.900,00						-		0,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	45.000.900,00							3 Laporan	0,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						45.000.900,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	45.000.900,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Perkebunan
120.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**4.530.103.029,00**								**0,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan						***4.530.103.029,00***								***0,00***	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00							3 Laporan	0,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						4.530.103.029,00						-		0,00	
		-						4.530.103.029,00						-		0,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	51 Unit		54 Unit	50 Unit	2.015.100.000,00							50 Unit	0,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	38 Unit		42 Unit	42 Unit	1.985.000.308,00							38 Unit	0,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	530.002.721,00							2 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						2.015.100.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	51 Unit		54 Unit	38 Unit	2.015.100.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Unit	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						530.002.721,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	5 Unit	530.002.721,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						1.985.000.308,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	38 Unit		42 Unit	20 Unit	1.985.000.308,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					38 Unit	0,00	Dinas Perkebunan
121.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**44.892.593,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan						***44.892.593,00***								***0,00***	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						44.892.593,00						-		0,00	
		-						44.892.593,00						-		0,00	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	90 Ha		110 Ha	105 Ha	22.392.593,00							95 Ha	0,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2674.96 Ha		3928.00 Ha	3615.01 Ha	22.500.000,00							3301.66 Ha	0,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						22.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2674.96 Ha		3928.00 Ha	3615,01 Ha	22.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3301.66 Ha	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						22.392.593,00			-	-	Penataan Lingkungan Hidup, khususnya pada Kawasan Pesisir			0,00	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	90 Ha		110 Ha	105 Ha	22.392.593,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					95 Ha	0,00	Dinas Perkebunan
122.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**0,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha perkebunan						***0,00***								***0,00***	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00							2 Dokumen	0,00	
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Dinas Perkebunan
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Dinas Perkebunan
123.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**45.000.350,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh peternakan dan perkebunan						***45.000.350,00***								***0,00***	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						45.000.350,00						-		0,00	
		-						45.000.350,00						-		0,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Dinas Perkebunan
		-						45.000.350,00						-		0,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	45.000.350,00							-	0,00	
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						45.000.350,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	1 Unit	45.000.350,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Dinas Perkebunan
		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan						**23.068.927.810,00**								**17.169.445.654,50**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.000.000,00**								**33.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**30.000.000,00**								**33.000.000,00**	
124.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**30.000.000,00**								**33.000.000,00**	
		Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat						***30.000.000,00***								***33.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						30.000.000,00						-		33.000.000,00	
		-						30.000.000,00						-		33.000.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00							1 Laporan	33.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						30.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			33.000.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	33.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**23.038.927.810,00**								**17.136.445.654,50**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**23.038.927.810,00**								**17.136.445.654,50**	
125.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.413.927.810,00**								**16.894.445.654,50**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***16.413.927.810,00***								***16.894.445.654,50***	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.942.330.838,00						-		13.942.330.838,00	
		-						13.942.330.838,00						-		13.942.330.838,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	13.942.330.838,00							14 Orang/bulan	13.942.330.838,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.942.330.838,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			13.942.330.838,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	13.942.330.838,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Orang/bulan	13.942.330.838,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						522.902.812,00						-		952.181.856,50	
		-						522.902.812,00						-		952.181.856,50	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.600.000,00							1 Dokumen	27.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.828.000,00							1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	39.460.397,00							3 Paket	43.406.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	55.978.370,00							4 Paket	61.576.207,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 Paket		64 Paket	64 Paket	291.036.045,00							64 Paket	320.139.649,50	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						291.036.045,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			320.139.649,50	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 Paket		64 Paket	6 Paket	291.036.045,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					64 Paket	320.139.649,50	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.460.397,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			43.406.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	39.460.397,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	43.406.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55.978.370,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			61.576.207,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	55.978.370,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	61.576.207,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						74.600.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			27.060.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.600.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	27.060.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						61.828.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.828.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.640.638.160,00						-		1.661.143.960,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						1.640.638.160,00						-		1.661.143.960,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.095.400,00							1 Laporan	225.601.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.435.542.760,00							1 Laporan	1.435.542.760,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						205.095.400,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			225.601.200,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.095.400,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	225.601.200,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.435.542.760,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.435.542.760,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.435.542.760,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	1.435.542.760,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						308.056.000,00						-		338.789.000,00	
		-						308.056.000,00						-		338.789.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	188.376.000,00							11 Unit	207.141.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	99.660.000,00							50 Unit	109.626.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit		23 Unit	23 Unit	20.020.000,00							23 Unit	22.022.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						188.376.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			207.141.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	13 Unit	188.376.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Unit	207.141.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						99.660.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			109.626.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	99.660.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Unit	109.626.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.020.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			22.022.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit		23 Unit	23 Unit	20.020.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					23 Unit	22.022.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
126.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**3.260.000.000,00**								**121.000.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan dan pertanian						***3.260.000.000,00***								***121.000.000,00***	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						620.000.000,00						-		77.000.000,00	
		-						620.000.000,00						-		77.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	620.000.000,00							1 Laporan	77.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						620.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			77.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	620.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	77.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-		44.000.000,00	
		-						40.000.000,00						-		44.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00							11 Dokumen	44.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						40.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			44.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Dokumen	44.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						2.600.000.000,00						-		0,00	
		-						2.600.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	420 Ekor		420 Ekor	420 Ekor	2.600.000.000,00							420 Ekor	0,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						2.600.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			0,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	420 Ekor		420 Ekor	25 Ekor	2.600.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					420 Ekor	0,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
127.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**3.155.000.000,00**								**55.000.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan dan pertanian						***3.155.000.000,00***								***27.500.000,00***	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						3.155.000.000,00						-		55.000.000,00	
		-						3.155.000.000,00						-		55.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	2.880.000.000,00							1 Unit	27.500.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	275.000.000,00							2 Unit	27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						2.880.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			27.500.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		1 Unit	10 Unit	2.880.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	27.500.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						275.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			27.500.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		1 Unit	2 Unit	275.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	27.500.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
128.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**210.000.000,00**								**66.000.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						***210.000.000,00***								***66.000.000,00***	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						210.000.000,00						-		66.000.000,00	
		-						210.000.000,00						-		66.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00							12 Laporan	66.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						210.000.000,00			-	-	Pemberdayaan Ekonomi Inklusi khususnya pada daerah terpencil, tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan			66.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	66.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian						**23.505.248.160,00**								**18.589.799.895,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**23.505.248.160,00**								**18.589.799.895,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**22.571.248.160,00**								**17.589.799.895,00**	
129.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.351.248.160,00**								**16.929.799.895,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***16.351.248.160,00***								***16.929.799.895,00***	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						94.204.010,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		103.624.411,00	
		-						94.204.010,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		103.624.411,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.000.000,00							1 Berita Acara	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	89.204.010,00							1 Laporan	98.124.411,00	
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						89.204.010,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			98.124.411,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	89.204.010,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	98.124.411,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.500.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Berita Acara	5.500.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.724.259.033,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		10.000.000.000,00	
		-						9.724.259.033,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		10.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	9.724.259.033,00							65 Orang/bulan	10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.724.259.033,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	57 Orang/bulan	9.724.259.033,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					65 Orang/bulan	10.000.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.256.957.440,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		1.256.957.440,00	
		-						1.256.957.440,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		1.256.957.440,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.256.957.440,00							1 Dokumen	1.256.957.440,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1.256.957.440,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.256.957.440,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.256.957.440,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	1.256.957.440,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						652.136.877,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		717.350.564,00	
		-						652.136.877,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		717.350.564,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	261.574.000,00							1 Laporan	287.731.400,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.275.000,00							1 Paket	47.602.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	151.859.804,00							1 Paket	167.045.784,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	15.000.000,00							20 Paket	16.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	180.428.073,00							20 Paket	198.470.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			16.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	10 Paket	15.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	16.500.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						180.428.073,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			198.470.880,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	25 Paket	180.428.073,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	198.470.880,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						43.275.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			47.602.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	100 Paket	43.275.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	47.602.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						151.859.804,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			167.045.784,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	35 Paket	151.859.804,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	167.045.784,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						261.574.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			287.731.400,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	57 Laporan	261.574.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	287.731.400,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	55.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.423.532.960,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		2.643.532.960,00	
		-						2.423.532.960,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		2.643.532.960,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	660.000.000,00							1 Laporan	880.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.763.532.960,00							1 Laporan	1.763.532.960,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						660.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			880.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	660.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	880.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.763.532.960,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.763.532.960,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.763.532.960,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	1.763.532.960,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.150.157.840,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		2.153.334.520,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						2.150.157.840,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		2.153.334.520,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	173.500.000,00							10 Unit	190.850.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	49.550.000,00							15 Unit	54.505.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	1.927.107.840,00							6 Unit	1.907.979.520,00	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						173.500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			190.850.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	11 Unit	173.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	190.850.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						49.550.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			54.505.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	25 Unit	49.550.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Unit	54.505.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.927.107.840,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.907.979.520,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	8 Unit	1.927.107.840,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	1.907.979.520,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
130.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**6.220.000.000,00**								**660.000.000,00**	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha						***6.220.000.000,00***								***660.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						6.220.000.000,00						Pedagang		660.000.000,00	
		-						6.220.000.000,00						Pedagang		660.000.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit		3 Unit	4 Unit	6.220.000.000,00							5 Unit	660.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						6.220.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			660.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit		3 Unit	1 Unit	6.220.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	660.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**934.000.000,00**								**1.000.000.000,00**	
131.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**934.000.000,00**								**1.000.000.000,00**	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri						***934.000.000,00***								***1.000.000.000,00***	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						934.000.000,00						Pelaku Usaha		1.000.000.000,00	
		-						934.000.000,00						Pelaku Usaha		1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	934.000.000,00							3 Dokumen	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						934.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			1.000.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	934.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Sekretariat Daerah						**1.853.163.029,00**								**1.900.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.853.163.029,00**								**1.900.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.853.163.029,00**								**1.900.000.000,00**	
132.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**22.132.683.029,00**								**25.610.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						***1.853.163.029,00***								***1.900.000.000,00***	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						20.482.683.029,00						-		20.700.000.000,00	
		-						20.482.683.029,00						-		20.700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.853.163.029,00							1 Dokumen	1.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						1.853.163.029,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			1.900.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.853.163.029,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	1.900.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Bagian Umum						**82.925.746.650,00**								**68.041.585.329,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**82.925.746.650,00**								**68.041.585.329,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**82.925.746.650,00**								**68.041.585.329,00**	
133.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**85.725.746.650,00**								**72.541.585.329,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***82.830.746.650,00***								***54.241.585.329,00***	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						33.267.830.463,00						-		33.317.830.463,00	
		-						33.267.830.463,00						-		33.317.830.463,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/bulan		216 Orang/bulan	216 Orang/bulan	33.117.830.463,00							216 Orang/bulan	33.117.830.463,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						33.117.830.463,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			33.117.830.463,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/bulan		216 Orang/bulan	405 Orang/bulan	33.117.830.463,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					216 Orang/bulan	33.117.830.463,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						438.200.000,00						-		500.000.000,00	
		-						438.200.000,00						-		500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128 Orang		91 Orang	101 Orang	230.000.000,00							109 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	208.200.000,00							9 Paket	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						208.200.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	208.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Paket	200.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						230.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128 Orang		91 Orang	27 Orang	230.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					109 Orang	300.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						16.932.659.850,00						-		10.600.000.000,00	
		-						16.932.659.850,00						-		10.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	4.198.886.312,00							11 Laporan	4.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.240.000.000,00							3 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	7 Paket	3.965.645.000,00							7 Paket	4.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.069.142.372,00							3 Paket	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	330.000.000,00							3 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	876.598.316,00							4 Paket	900.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	252.387.850,00							5 Paket	300.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						330.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			400.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	12 Paket	330.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	400.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						876.598.316,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	12 Paket	876.598.316,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	900.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						252.387.850,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	15 Paket	252.387.850,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Paket	300.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.965.645.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.000.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	5 Paket	3.965.645.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Paket	4.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.069.142.372,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.069.142.372,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	1.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.198.886.312,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	4.198.886.312,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Laporan	4.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6.240.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 item Laporan	6.240.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.810.000.000,00						-		3.000.000.000,00	
		-						3.810.000.000,00						-		3.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit		75 Unit	75 Unit	395.000.000,00							75 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	3.000.000.000,00							9 Unit	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	415.000.000,00							4 Unit	1.000.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						395.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit		75 Unit	75 Unit	395.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					75 Unit	1.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Unit	1.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						415.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	415.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	1.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.449.453.740,00						-		15.020.000.000,00	
		-						14.449.453.740,00						-		15.020.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.571.000.000,00							4 Laporan	4.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	10.867.883.240,00							9 Laporan	11.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 Laporan		4000 Laporan	4000 Laporan	10.570.500,00							4000 Laporan	20.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.570.500,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 Laporan		4000 Laporan	4000 Laporan	10.570.500,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4000 Laporan	20.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.571.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.571.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	4.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10.867.883.240,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	10.867.883.240,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Laporan	11.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.431.751.273,00						-		4.000.000.000,00	
		-						12.431.751.273,00						-		4.000.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	176 Unit		176 Unit	176 Unit	1.855.000.000,00							176 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit		75 Unit	75 Unit	2.810.941.273,00							75 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit		75 Unit	75 Unit	2.720.000.000,00							75 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.663.560.000,00							5 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.382.250.000,00							5 Unit	1.000.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.720.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit		75 Unit	75 Unit	2.720.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					75 Unit	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.810.941.273,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit		75 Unit	75 Unit	2.810.941.273,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					75 Unit	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.855.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	176 Unit		176 Unit	175 Unit	1.855.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					176 Unit	1.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.663.560.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	50 Unit	2.663.560.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	2.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.382.250.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	45 Unit	2.382.250.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	1.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.360.851.324,00						-		1.403.754.866,00	
		-						1.360.851.324,00						-		1.403.754.866,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	747.068.436,00							2 Orang/Bulan	782.371.978,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	171.382.888,00							Orang/Bulan	171.382.888,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	200.000.000,00							2 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	19 Paket		19 Paket	19 Paket	242.400.000,00							19 Paket	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						171.382.888,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			171.382.888,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	171.382.888,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Orang/Bulan	171.382.888,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						242.400.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	19 Paket		19 Paket	2 Paket	242.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					19 Paket	200.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Orang	250.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						747.068.436,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			782.371.978,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	747.068.436,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Orang/Bulan	782.371.978,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						385.000.000,00						-		400.000.000,00	
		-						385.000.000,00						-		400.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	195.000.000,00							4 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	95.000.000,00							3 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	95.000.000,00							3 Paket	100.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						195.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	195.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	200.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						95.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	95.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	100.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						95.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	95.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	100.000.000,00	Bagian Umum
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						**1.600.000.000,00**								**3.000.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.600.000.000,00**								**3.000.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.600.000.000,00**								**3.000.000.000,00**	
134.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**85.725.746.650,00**								**72.541.585.329,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***1.600.000.000,00***								***1.000.000.000,00***	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1.600.000.000,00						-		3.000.000.000,00	
		-						1.600.000.000,00						-		3.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	549.960.000,00							1 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	483.260.000,00							1 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	566.780.000,00							1 Laporan	1.000.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						549.960.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	549.960.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	1.000.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						483.260.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	483.260.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					1 Laporan	1.000.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						566.780.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	566.780.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	1.000.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						**700.000.000,00**								**780.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**700.000.000,00**								**780.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**700.000.000,00**								**780.000.000,00**	
135.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.850.000.000,00**								**2.145.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						***450.000.000,00***								***500.000.000,00***	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						700.000.000,00						-		780.000.000,00	
		-						700.000.000,00						-		780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00							1 Dokumen	280.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00							1 Dokumen	220.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		200 Orang	300 Orang	250.000.000,00							300 Orang	280.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						200.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			220.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	220.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						250.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	280.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						250.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			280.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		200 Orang	30 Orang	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					300 Orang	280.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Bagian Administrasi Pembangunan						**300.000.000,00**								**560.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**300.000.000,00**								**560.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**300.000.000,00**								**560.000.000,00**	
136.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.850.000.000,00**								**2.145.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						***300.000.000,00***								***560.000.000,00***	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						300.000.000,00						-		560.000.000,00	
		-						300.000.000,00						-		560.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00							1 Dokumen	165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00							12 Laporan	185.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	110.000.000,00							11 Laporan	210.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						65.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			165.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	165.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						110.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			210.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	110.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Laporan	210.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						125.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			185.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	185.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
		Bagian Tata Pemerintahan						**700.000.000,00**								**3.260.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**500.000.000,00**								**2.410.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**500.000.000,00**								**2.410.000.000,00**	
137.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**22.132.683.029,00**								**25.610.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						***350.000.000,00***								***2.410.000.000,00***	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						500.000.000,00						-		2.410.000.000,00	
		-						500.000.000,00						-		2.410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00							3 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00							1 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00							2 Dokumen	660.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			750.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	750.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			660.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	660.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	1.000.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**200.000.000,00**								**850.000.000,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**200.000.000,00**								**850.000.000,00**	
138.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						**200.000.000,00**								**850.000.000,00**	
			-	-		-	-	200.000.000,00							-	850.000.000,00	
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan						200.000.000,00						-		850.000.000,00	
		-						200.000.000,00						-		850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	-		-	-	50.000.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00							1 Dokumen	700.000.000,00	
	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan SinkronisasiPemanfaatan Kawasan Perbatasan						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	150.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			700.000.000,00	
		Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	700.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
		Bagian Kesejahteraan Rakyat						**18.629.520.000,00**								**18.800.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**18.629.520.000,00**								**18.800.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**18.629.520.000,00**								**18.800.000.000,00**	
139.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**22.132.683.029,00**								**25.610.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						***18.629.520.000,00***								***18.800.000.000,00***	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						20.482.683.029,00						-		20.700.000.000,00	
		-						20.482.683.029,00						-		20.700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.801.008.850,00							1 Dokumen	5.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.828.511.150,00						1 Dokumen	12.900.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						5.801.008.850,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			5.900.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.801.008.850,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	5.900.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						12.828.511.150,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			12.900.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.828.511.150,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	12.900.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Bagian Sumber Daya Alam						**150.000.000,00**								**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**150.000.000,00**								**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**150.000.000,00**								**0,00**	
140.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.850.000.000,00**								**2.145.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						***50.000.000,00***								***0,00***	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						150.000.000,00						-		0,00	
		-						150.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Bagian Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Bagian Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Bagian Sumber Daya Alam
		Bagian Kerjasama						**150.000.000,00**								**1.300.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**150.000.000,00**								**1.300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**150.000.000,00**								**1.300.000.000,00**	
141.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**22.132.683.029,00**								**25.610.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						***150.000.000,00***								***800.000.000,00***	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						150.000.000,00						-		1.300.000.000,00	
		-						150.000.000,00						-		1.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00							2 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00							2 Laporan	500.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						90.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	500.000.000,00	Bagian Kerjasama
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	300.000.000,00	Bagian Kerjasama
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						60.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			500.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	500.000.000,00	Bagian Kerjasama
		Bagian Perekonomian						**700.000.000,00**								**805.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**700.000.000,00**								**805.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**700.000.000,00**								**805.000.000,00**	
142.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.850.000.000,00**								**2.145.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						***500.000.000,00***								***575.000.000,00***	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						700.000.000,00						-		805.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						700.000.000,00						-		805.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00							1 Dokumen	97.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00							1 Dokumen	172.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	200.000.000,00							1 Dokumen	230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00							1 Dokumen	74.750.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00							5 Laporan	230.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			230.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	230.000.000,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			230.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	230.000.000,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						65.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			74.750.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	74.750.000,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						85.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			97.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	97.750.000,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			172.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	172.500.000,00	Bagian Perekonomian
		Bagian Organisasi						**700.000.000,00**								**700.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**700.000.000,00**								**700.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**700.000.000,00**								**700.000.000,00**	
143.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**85.725.746.650,00**								**72.541.585.329,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***500.000.000,00***								***450.000.000,00***	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						700.000.000,00						-		700.000.000,00	
		-						700.000.000,00						-		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00							1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00							1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00							3 Laporan	250.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	200.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	250.000.000,00	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						300.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	250.000.000,00	Bagian Organisasi
		Bagian Perencanaan dan Keuangan						**500.000.000,00**								**800.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**500.000.000,00**								**800.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**500.000.000,00**								**800.000.000,00**	
144.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**85.725.746.650,00**								**72.541.585.329,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***400.000.000,00***								***650.000.000,00***	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350.000.000,00						-		600.000.000,00	
		-						350.000.000,00						-		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00							4 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00							1 Laporan	150.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						250.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			450.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	450.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	150.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						33.267.830.463,00						-		33.317.830.463,00	
		-						33.267.830.463,00						-		33.317.830.463,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00							1 Laporan	50.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	150.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	50.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Bagian Hukum						**1.000.000.000,00**								**1.200.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.000.000.000,00**								**1.200.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.000.000.000,00**								**1.200.000.000,00**	
145.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**22.132.683.029,00**								**25.610.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						***1.000.000.000,00***								***1.000.000.000,00***	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.000.000.000,00						-		1.200.000.000,00	
		-						1.000.000.000,00						-		1.200.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus		5 Kasus	5 Kasus	739.500.000,00							5 Kasus	800.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	171.000.000,00							30 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	89.500.000,00							30 Dokumen	200.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						171.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	171.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	200.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						739.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			800.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus		5 Kasus	5 Kasus	739.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Kasus	800.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						89.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	89.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	200.000.000,00	Bagian Hukum
		Sekretariat DPRD						**103.928.002.655,00**								**122.330.316.724,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**103.928.002.655,00**								**122.330.316.724,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**103.928.002.655,00**								**122.330.316.724,00**	
146.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**58.801.844.670,00**								**68.975.200.088,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***58.551.844.670,00***								***68.975.200.088,00***	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						314.712.215,00						-		582.357.300,00	
		-						314.712.215,00						-		582.357.300,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.025.390,00							1 Dokumen	85.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	149.046.111,00							5 Dokumen	241.688.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.375.554,00							1 Dokumen	86.622.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	30.851.400,00							3 Laporan	94.282.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	83.413.760,00							2 Laporan	74.065.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						149.046.111,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			241.688.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	149.046.111,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	241.688.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						27.025.390,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			85.700.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.025.390,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	85.700.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						24.375.554,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			86.622.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.375.554,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	86.622.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.851.400,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			94.282.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	30.851.400,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	94.282.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						83.413.760,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			74.065.300,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	83.413.760,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	74.065.300,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.587.130.636,00						-		10.971.238.153,00	
		-						8.587.130.636,00						-		10.971.238.153,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00							1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan		62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	8.507.130.636,00							62 Orang/bulan	10.771.238.153,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.507.130.636,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.771.238.153,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan		62 Orang/bulan	81 Orang/bulan	8.507.130.636,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					62 Orang/bulan	10.771.238.153,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						80.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	54 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						150.000.000,00						-		1.674.000.000,00	
		-						150.000.000,00						-		1.674.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	150.000.000,00							60 Dokumen	1.674.000.000,00	
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.674.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Dokumen	1.674.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00						-		779.364.000,00	
		-						100.000.000,00						-		779.364.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang		72 Orang	72 Orang	100.000.000,00							72 Orang	779.364.000,00	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			779.364.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang		72 Orang	10 Orang	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					72 Orang	779.364.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.872.410.952,00						-		8.469.625.000,00	
		-						4.872.410.952,00						-		8.469.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen		300 Dokumen	300 Dokumen	450.000.000,00							300 Dokumen	867.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	350.000.000,00							200 Laporan	966.617.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.569.600.000,00							13 Paket	6.154.585.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	200.000.000,00							4 Paket	203.689.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	142.464.648,00							1 Paket	143.734.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	160.346.304,00							3 Paket	134.000.000,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						142.464.648,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			143.734.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	142.464.648,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	143.734.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						160.346.304,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			134.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	160.346.304,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	134.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.569.600.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			6.154.585.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	3.569.600.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					13 Paket	6.154.585.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			203.689.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	203.689.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						450.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			867.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen		300 Dokumen	300 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					300 Dokumen	867.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						350.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			966.617.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	350.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					200 Laporan	966.617.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						500.000.000,00						-		658.112.000,00	
		-						500.000.000,00						-		658.112.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		22 Unit	20 Unit	100.000.000,00							16 Unit	226.778.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit		25 Unit	21 Unit	400.000.000,00							18 Unit	431.334.000,00	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			226.778.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		22 Unit	30 Unit	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Unit	226.778.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			431.334.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit		25 Unit	25 Unit	400.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					18 Unit	431.334.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.607.112.495,00						-		6.398.268.691,00	
		-						5.607.112.495,00						-		6.398.268.691,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.138.800.000,00							24 Laporan	1.919.055.251,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.446.713.440,00							12 Laporan	4.446.713.440,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250 Laporan		1250 Laporan	1250 Laporan	21.599.055,00							1250 Laporan	32.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						21.599.055,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			32.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250 Laporan		1250 Laporan	1 Laporan	21.599.055,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1250 Laporan	32.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.138.800.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.919.055.251,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.138.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					24 Laporan	1.919.055.251,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.446.713.440,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.446.713.440,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	203 Laporan	4.446.713.440,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	4.446.713.440,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.717.321.870,00						-		3.202.749.637,00	
		-						2.717.321.870,00						-		3.202.749.637,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.000.000,00							6 Unit	174.953.637,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	600.000.000,00							21 Unit	983.636.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		6 Unit	6 Unit	264.112.924,00							7 Unit	286.530.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	120 Unit		110 Unit	110 Unit	65.000.000,00							120 Unit	36.170.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	438.208.946,00							7 Unit	845.760.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		2 Unit	4 Unit	1.200.000.000,00							4 Unit	875.700.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						264.112.924,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			286.530.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		6 Unit	5 Unit	264.112.924,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	286.530.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						600.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			983.636.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	18 Unit	600.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					21 Unit	983.636.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						65.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			36.170.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120 Unit		110 Unit	60 Unit	65.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Unit	36.170.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						438.208.946,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			845.760.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	438.208.946,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	845.760.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			174.953.637,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	174.953.637,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			875.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		2 Unit	6 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	875.700.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						34.215.755.252,00						-		34.330.796.307,00	
		-						34.215.755.252,00						-		34.330.796.307,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	33.181.430.252,00							45 Orang/Bulan	33.184.946.307,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	101.250.000,00							45 Orang	135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	5 Paket	933.075.000,00							5 Paket	1.010.850.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						33.181.430.252,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			33.184.946.307,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	33.181.430.252,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					45 Orang/Bulan	33.184.946.307,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						933.075.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.010.850.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	7 Paket	933.075.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Paket	1.010.850.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						101.250.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			135.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	101.250.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					45 Orang	135.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						1.737.401.250,00						-		1.908.689.000,00	
		-						1.737.401.250,00						-		1.908.689.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	1.737.401.250,00							12 Paket	1.908.689.000,00	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						1.737.401.250,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.908.689.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	7 Paket	1.737.401.250,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Paket	1.908.689.000,00	Sekretariat DPRD
147.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**45.126.157.985,00**								**53.355.116.636,00**	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan						***45.126.157.985,00***								***53.355.116.636,00***	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2.451.769.577,00						-		2.684.905.732,00	
		-						2.451.769.577,00						-		2.684.905.732,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.747.538.732,00							8 Dokumen	1.900.538.732,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	22 Dokumen		12 Dokumen	22 Dokumen	475.380.618,00							22 Dokumen	509.373.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	165.848.833,00							2 Dokumen	184.494.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	34.991.269,00							3 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.010.125,00							2 Dokumen	40.500.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						475.380.618,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			509.373.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	22 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	475.380.618,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					22 Dokumen	509.373.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						1.747.538.732,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.900.538.732,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	6 Dokumen	1.747.538.732,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Dokumen	1.900.538.732,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						34.991.269,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen		3 Dokumen	6 Dokumen	34.991.269,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						165.848.833,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			184.494.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	165.848.833,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	184.494.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						28.010.125,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			40.500.000,00	
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.010.125,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	40.500.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.137.795.490,00						-		1.854.230.200,00	
		-						1.137.795.490,00						-		1.854.230.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	420.268.278,00							1 Dokumen	643.921.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	289.943.734,00							1 Dokumen	409.915.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	205.553.300,00							2 Dokumen	430.042.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	222.030.178,00							2 Dokumen	370.351.300,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						205.553.300,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			430.042.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	205.553.300,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	430.042.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						222.030.178,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			370.351.300,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	222.030.178,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	370.351.300,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						420.268.278,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			643.921.900,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	420.268.278,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	643.921.900,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						289.943.734,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			409.915.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	289.943.734,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	409.915.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						12.557.647.623,00						-		15.124.807.000,00	
		-						12.557.647.623,00						-		15.124.807.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	2.028.307.025,00							35 Laporan	2.689.012.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	70 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	2.819.551.947,00							70 Laporan	3.167.984.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	70 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	2.321.364.449,00							70 Laporan	2.545.897.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	1.885.592.025,00							35 Laporan	2.846.196.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	70 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	3.502.832.177,00							70 Laporan	3.875.718.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						2.819.551.947,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.167.984.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	70 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	2.819.551.947,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Laporan	3.167.984.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						2.028.307.025,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.689.012.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	2.028.307.025,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Laporan	2.689.012.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						3.502.832.177,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.875.718.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	70 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	3.502.832.177,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Laporan	3.875.718.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						2.321.364.449,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.545.897.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	70 Laporan		70 Laporan	35 Laporan	2.321.364.449,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Laporan	2.545.897.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						1.885.592.025,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.846.196.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	1.885.592.025,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Laporan	2.846.196.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						6.350.734.127,00						-		8.090.645.736,00	
		-						6.350.734.127,00						-		8.090.645.736,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	1.582.380.000,00							22 Dokumen	2.799.053.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	541.179.400,00							3 Dokumen	560.828.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	400 Dokumen		400 Dokumen	400 Dokumen	1.602.836.636,00							400 Dokumen	1.802.836.636,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	345.498.091,00							1 Dokumen	360.828.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang		27 Orang	27 Orang	1.728.000.000,00							27 Orang	1.728.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang		7 Orang	7 Orang	550.840.000,00							7 Orang	839.100.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						1.582.380.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.799.053.100,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	22 Dokumen		22 Dokumen	24 Dokumen	1.582.380.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					22 Dokumen	2.799.053.100,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						1.728.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.728.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang		27 Orang	27 Orang	1.728.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Orang	1.728.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						550.840.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			839.100.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang		7 Orang	7 Orang	550.840.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Orang	839.100.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						541.179.400,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			560.828.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	541.179.400,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	560.828.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						345.498.091,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			360.828.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	345.498.091,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	360.828.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						1.602.836.636,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.802.836.636,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	400 Dokumen		400 Dokumen	400 Dokumen	1.602.836.636,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					400 Dokumen	1.802.836.636,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						17.448.574.461,00						-		18.959.207.968,00	
		-						17.448.574.461,00						-		18.959.207.968,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	14.223.574.364,00							21 Dokumen	14.007.200.488,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	99.630.000,00							45 Dokumen	826.807.400,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4500 Orang		4500 Orang	4500 Orang	3.125.370.097,00							4500 Orang	4.125.200.080,00	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						99.630.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			826.807.400,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	99.630.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					45 Dokumen	826.807.400,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						14.223.574.364,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			14.007.200.488,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	14.223.574.364,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					21 Dokumen	14.007.200.488,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						3.125.370.097,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.125.200.080,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4500 Orang		4500 Orang	33750 Orang	3.125.370.097,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4500 Orang	4.125.200.080,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						236.022.000,00						-		385.158.000,00	
		-						236.022.000,00						-		385.158.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	236.022.000,00							1 Laporan	385.158.000,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						236.022.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			385.158.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	236.022.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	385.158.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						4.943.614.707,00						-		6.256.162.000,00	
		-						4.943.614.707,00						-		6.256.162.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	640.418.000,00							24 Dokumen	734.878.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	514.825.248,00							1 Dokumen	1.008.944.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	288 Dokumen		288 Dokumen	288 Dokumen	3.788.371.459,00							288 Dokumen	4.512.340.000,00	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						640.418.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			734.878.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	640.418.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					24 Dokumen	734.878.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						3.788.371.459,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.512.340.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	288 Dokumen		288 Dokumen	288 Dokumen	3.788.371.459,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					288 Dokumen	4.512.340.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus						514.825.248,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.008.944.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	514.825.248,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	1.008.944.000,00	Sekretariat DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						**17.039.325.474,00**								**17.665.194.308,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**17.039.325.474,00**								**17.665.194.308,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**17.039.325.474,00**								**17.665.194.308,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
148.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.446.561.214,00**								**13.799.080.680,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***13.446.561.214,00***								***13.799.080.680,00***	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						307.773.710,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		283.594.551,00	
		-						307.773.710,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		283.594.551,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	307.773.710,00							2 Dokumen	283.594.551,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						307.773.710,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			283.594.551,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	307.773.710,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	283.594.551,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.029.529.833,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		9.229.529.833,00	
		-						9.029.529.833,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		9.229.529.833,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	9.029.529.833,00							50 Orang/bulan	9.229.529.833,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.029.529.833,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			9.229.529.833,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	60 Orang/bulan	9.029.529.833,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					50 Orang/bulan	9.229.529.833,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.085.491.711,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		2.294.403.246,00	
		-						2.085.491.711,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		2.294.403.246,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	54.000.000,00							21 Dokumen	56.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	207.868.000,00							4 Dokumen	234.466.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	663.207.000,00							100 Laporan	712.003.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	458.060.000,00							1 Paket	512.700.356,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	112.759.185,00							1 Paket	118.397.144,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.369.447,00							1 Paket	48.687.919,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	543.228.079,00							1 Paket	611.448.627,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						46.369.447,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			48.687.919,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.369.447,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	48.687.919,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						543.228.079,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			611.448.627,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	543.228.079,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	611.448.627,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						458.060.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			512.700.356,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	458.060.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	512.700.356,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						112.759.185,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			118.397.144,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	112.759.185,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	118.397.144,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						54.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			56.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					21 Dokumen	56.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						663.207.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			712.003.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	663.207.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	712.003.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						207.868.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			234.466.200,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	207.868.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	234.466.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00						-		110.000.000,00	
		-						150.000.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	150.000.000,00							8 Unit	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			110.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	5 Unit	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.192.408.960,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		1.216.878.200,00	
		-						1.192.408.960,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		1.216.878.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	372.994.000,00							1 Laporan	391.643.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	819.414.960,00							1 Laporan	825.234.500,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						372.994.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			391.643.700,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	372.994.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	391.643.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						819.414.960,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			825.234.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	819.414.960,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	825.234.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						681.357.000,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		664.674.850,00	
		-						681.357.000,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		664.674.850,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	261.785.000,00							7 Unit	274.874.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	13 Unit	211.885.000,00							13 Unit	222.479.250,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	207.687.000,00							1 Unit	167.321.350,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						261.785.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			274.874.250,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	261.785.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	274.874.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						211.885.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			222.479.250,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	13 Unit	211.885.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					13 Unit	222.479.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						207.687.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			167.321.350,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	207.687.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	167.321.350,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
149.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.692.764.260,00**								**1.671.141.584,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						***1.692.764.260,00***								***1.671.141.584,00***	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						1.006.260.260,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		1.055.312.384,00	
		-						1.006.260.260,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		1.055.312.384,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	48 Berita Acara		48 Berita Acara	48 Berita Acara	39.325.704,00							48 Berita Acara	41.291.989,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	8.112.852,00							1 Berita Acara	8.518.495,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	164.583.704,00							1 Berita Acara	172.812.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	534.714.000,00							1 Dokumen	561.449.700,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	121.384.000,00							1 Dokumen	127.453.200,00	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	11 Usulan		11 Usulan	11 Usulan	138.140.000,00							11 Usulan	143.787.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						121.384.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			127.453.200,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	121.384.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	127.453.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						8.112.852,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.518.495,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	8.112.852,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Berita Acara	8.518.495,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						39.325.704,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			41.291.989,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	48 Berita Acara		48 Berita Acara	1 Berita Acara	39.325.704,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					48 Berita Acara	41.291.989,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						164.583.704,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			172.812.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	164.583.704,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Berita Acara	172.812.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						138.140.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			143.787.000,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	11 Usulan		11 Usulan	11 Usulan	138.140.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Usulan	143.787.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						534.714.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			561.449.700,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	534.714.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	561.449.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						686.504.000,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		615.829.200,00	
		-						686.504.000,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		615.829.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	686.504.000,00							1 Laporan	615.829.200,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						686.504.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			615.829.200,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	686.504.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	615.829.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						0,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						0,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						0,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
150.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.900.000.000,00**								**2.194.972.044,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidng pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidangperekonomian dan SDA						***1.575.000.000,00***								***1.894.972.044,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						650.000.000,00						-		844.972.044,00	
		-						650.000.000,00						-		844.972.044,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00							1 Laporan	497.166.525,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00							1 Laporan	347.805.519,00	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						325.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			347.805.519,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	347.805.519,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						325.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			497.166.525,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	497.166.525,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						650.000.000,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		700.000.000,00	
		-						650.000.000,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00							1 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	370.000.000,00							1 Laporan	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						280.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						0,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	-					1 Laporan	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						370.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			400.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	370.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						600.000.000,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		650.000.000,00	
		-						600.000.000,00						Bappeda Kabupaten Bengkalis		650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00							1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00							1 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00							1 Laporan	200.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			150.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						350.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			300.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						150.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			200.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						**547.476.023.079,00**								**126.235.548.785,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**547.476.023.079,00**								**126.235.548.785,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**547.476.023.079,00**								**126.235.548.785,00**	
151.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.347.260.855,00**								**26.535.579.238,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***25.147.260.855,00***								***26.335.579.238,00***	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.023.574.334,00						-		17.000.000.000,00	
		-						15.023.574.334,00						-		17.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	15.023.574.334,00							60 Orang/bulan	17.000.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.023.574.334,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			17.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	140 Orang/bulan	15.023.574.334,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Orang/bulan	17.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						176.140.000,00						-		176.140.000,00	
		-						176.140.000,00						-		176.140.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang		97 Orang	102 Orang	176.140.000,00							103 Orang	176.140.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						176.140.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			176.140.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang		97 Orang	20 Orang	176.140.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					103 Orang	176.140.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.166.209.922,00						-		3.378.102.639,00	
		-						4.166.209.922,00						-		3.378.102.639,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.600.000,00							1 Dokumen	63.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.150.000.000,00							1 Laporan	2.150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00							1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	875.674.758,00							1 Paket	87.567.475,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	876.935.164,00							2 Paket	876.935.164,00	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						876.935.164,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			876.935.164,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	876.935.164,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	876.935.164,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						875.674.758,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			87.567.475,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	875.674.758,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	87.567.475,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						63.600.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			63.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.600.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	63.600.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.150.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	2.150.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.648.602.401,00						-		1.648.602.401,00	
		-						1.648.602.401,00						-		1.648.602.401,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		200 Unit	3 Unit	95.768.688,00							3 Unit	95.768.688,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit		7 Unit	11 Unit	850.000.000,00							11 Unit	850.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit		35 Unit	38 Unit	702.833.713,00							383 Unit	702.833.713,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						850.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			850.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit		7 Unit	1 Unit	850.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Unit	850.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						95.768.688,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			95.768.688,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		200 Unit	36 Unit	95.768.688,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Unit	95.768.688,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						702.833.713,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			702.833.713,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit		35 Unit	56 Unit	702.833.713,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					383 Unit	702.833.713,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.637.334.700,00						-		2.637.334.700,00	
		-						2.637.334.700,00						-		2.637.334.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	752.428.300,00							1 Laporan	752.428.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.884.906.400,00							1 Laporan	1.884.906.400,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						752.428.300,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			752.428.300,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	752.428.300,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	752.428.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.884.906.400,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.884.906.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.884.906.400,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	1.884.906.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.695.399.498,00						-		1.695.399.498,00	
		-						1.695.399.498,00						-		1.695.399.498,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		12 Unit	18 Unit	578.350.000,00							18 Unit	578.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		11 Unit	12 Unit	700.000.000,00							12 Unit	700.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	217.049.498,00							1 Unit	217.049.498,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						700.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		11 Unit	56 Unit	700.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Unit	700.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						578.350.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			578.350.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		12 Unit	38 Unit	578.350.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					18 Unit	578.350.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						217.049.498,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			217.049.498,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	217.049.498,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	217.049.498,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
152.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**521.078.762.224,00**								**98.649.969.547,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan						***516.928.792.677,00***								***94.500.000.000,00***	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						1.500.000.000,00						-		1.500.000.000,00	
		-						1.500.000.000,00						-		1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00						2 Dokumen	1.500.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						1.500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.500.000.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	1.500.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						515.428.792.677,00						-		93.000.000.000,00	
		-						515.428.792.677,00						-		93.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	495.428.792.677,00							1 Laporan	68.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000.000,00							1 Laporan	25.000.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						495.428.792.677,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			68.000.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	495.428.792.677,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	68.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						20.000.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			25.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	25.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola anggaran						***2.649.993.853,00***								***2.649.993.853,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						2.649.993.853,00						-		2.649.993.853,00	
		-						2.649.993.853,00						-		2.649.993.853,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	298.049.645,00							3 Dokumen	298.049.645,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.351.944.208,00							1 Dokumen	2.351.944.208,00	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						2.351.944.208,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.351.944.208,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.351.944.208,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	2.351.944.208,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						298.049.645,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			298.049.645,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	298.049.645,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	298.049.645,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan						***1.499.975.694,00***								***1.499.975.694,00***	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						1.499.975.694,00						-		1.499.975.694,00	
		-						1.499.975.694,00						-		1.499.975.694,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	422.923.965,00							1 Dokumen	422.923.965,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111.284.000,00							1 Dokumen	111.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	219.215.710,00							1 Dokumen	219.215.710,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	206.763.584,00							1 Dokumen	206.763.584,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	271.780.290,00							4 Dokumen	271.780.290,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	268.008.145,00							1 Laporan	268.008.145,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						422.923.965,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			422.923.965,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	422.923.965,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	422.923.965,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						271.780.290,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			271.780.290,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	271.780.290,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	271.780.290,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						206.763.584,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			206.763.584,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	206.763.584,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	206.763.584,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						111.284.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			111.284.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111.284.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	111.284.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						219.215.710,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			219.215.710,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	219.215.710,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	219.215.710,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						268.008.145,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			268.008.145,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	268.008.145,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	268.008.145,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
153.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**1.050.000.000,00**								**1.050.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah						***1.050.000.000,00***								***1.050.000.000,00***	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.050.000.000,00						-		1.050.000.000,00	
		-						1.050.000.000,00						-		1.050.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00							1 Laporan	260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	265.000.000,00							1 Laporan	265.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00							1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00							1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00							1 Dokumen	175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						175.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			175.000.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	175.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						260.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			260.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	260.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						265.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			265.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	265.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Desa Senggoro || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	265.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	150.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Pendapatan Daerah						**41.005.043.505,00**								**45.267.360.146,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**41.005.043.505,00**								**45.267.360.146,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**41.005.043.505,00**								**45.267.360.146,00**	
154.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**39.155.043.505,00**								**41.367.360.146,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***37.955.043.505,00***								***38.017.360.146,00***	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						116.184.079,00						Badan Pendapatan Daerah		600.000.000,00	
		-						116.184.079,00						Badan Pendapatan Daerah		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	38.629.660,00							6 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	22.196.971,00							3 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	55.357.448,00							17 Laporan	200.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						38.629.660,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	38.629.660,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					6 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						22.196.971,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	22.196.971,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					3 Laporan	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.357.448,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	16 Laporan	55.357.448,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					17 Laporan	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29.467.360.146,00						ASN Badan Pendapatan Daerah		31.467.360.146,00	
		-						29.467.360.146,00						ASN Badan Pendapatan Daerah		31.467.360.146,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	29.467.360.146,00							100 Orang/bulan	31.467.360.146,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						29.467.360.146,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			31.467.360.146,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	91 Orang/bulan	29.467.360.146,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Orang/bulan	31.467.360.146,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						120.000.000,00						ASN Badan Pendapatan Daerah		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						120.000.000,00						ASN Badan Pendapatan Daerah		200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		10 Orang	20 Orang	120.000.000,00							20 Orang	200.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						120.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		10 Orang	65 Orang	120.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					20 Orang	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.070.000.574,00						Badan Pendapatan Daerah		2.700.000.000,00	
		-						3.070.000.574,00						Badan Pendapatan Daerah		2.700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00							4 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	75.000.000,00							24 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.715.000.574,00							12 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00							12 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	350.000.000,00							4 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	275.000.000,00							4 Paket	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	425.000.000,00							4 Paket	550.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						275.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	275.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						425.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			550.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	425.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					4 Paket	550.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Paket	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						350.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			400.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	350.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						80.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	35 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					4 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.715.000.574,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			850.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.715.000.574,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	850.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						75.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					24 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.000.000.000,00						-		1.250.000.000,00	
		-						1.000.000.000,00						-		1.250.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		Unit	6 Unit	500.000.000,00							7 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Unit	5 Unit	500.000.000,00							5 Unit	650.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			600.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		Unit	7 Unit	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					7 Unit	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			650.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Unit	10 Unit	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					5 Unit	650.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.331.498.706,00						Badan Pendapatan Daerah		2.550.000.000,00	
		-						2.331.498.706,00						Badan Pendapatan Daerah		2.550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00							12 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.631.498.706,00							12 Laporan	1.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						700.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	Kab. Bengkalis	-					12 Laporan	800.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.631.498.706,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1500 Laporan	1.631.498.706,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	1.750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.050.000.000,00						Badan Pendapatan Daerah		2.600.000.000,00	
		-						3.050.000.000,00						Badan Pendapatan Daerah		2.600.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	1.200.000.000,00							9 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	350.000.000,00							8 Unit	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	350.000.000,00							6 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	350 Unit		350 Unit	350 Unit	250.000.000,00							350 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	900.000.000,00							9 Unit	500.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						350.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			600.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	350.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	9 Unit	350.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						250.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	350 Unit		350 Unit	391 Unit	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					350 Unit	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.200.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Unit	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						900.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	5 Unit	900.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Unit	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
155.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**1.850.000.000,00**								**3.900.000.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***1.050.000.000,00***								***1.000.000.000,00***	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.850.000.000,00						Badan Pendapatan Daerah		3.900.000.000,00	
		-						1.850.000.000,00						Badan Pendapatan Daerah		3.900.000.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	200.000.000,00							19 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00							6 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00							1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00							6 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00							3 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00							1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00							1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00							5 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	200.000.000,00							12 Layanan	350.000.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 Obyek Pajak		2500 Obyek Pajak	2500 Obyek Pajak	250.000.000,00							2500 Obyek Pajak	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00							2 Unit	350.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					6 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			350.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					6 Dokumen	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					5 Laporan	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			350.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					2 Unit	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						200.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			350.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	100% Laporan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					1 Laporan	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	100% Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					1 Laporan	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						250.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			450.000.000,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 Obyek Pajak		2500 Obyek Pajak	2500 Obyek Pajak	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					2500 Obyek Pajak	450.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						200.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			350.000.000,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					12 Layanan	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						200.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	19 Dokumen		19 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					19 Dokumen	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						280.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					1 Dokumen	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						20.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						150.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	PENDAPATAN TRANSFER					3 Laporan	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						**13.464.550.345,00**								**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.464.550.345,00**								**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**12.464.550.345,00**								**0,00**	
156.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.464.550.345,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***11.464.550.345,00***								***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00						Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		0,00	
		-						0,00						Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00							4 Dokumen	0,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.861.383.691,00						-		0,00	
		-						9.861.383.691,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		56 Orang/bulan	60 Orang/bulan	9.861.383.691,00							60 Orang/bulan	0,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.861.383.691,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		56 Orang/bulan	58 Orang/bulan	9.861.383.691,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Orang/bulan	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	60 Orang		50 Orang	60 Orang	0,00							60 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		35 Orang	40 Orang	0,00							40 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang		120 Orang	120 Orang	0,00							120 Orang	0,00	
	5.03.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	60 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Orang	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang		120 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Orang	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		35 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Orang	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						463.513.754,00						-		0,00	
		-						463.513.754,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	0,00							16 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		100 Laporan	110 Laporan	212.298.160,00							110 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1770 Paket		1770 Paket	1770 Paket	45.000.000,00							1770 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		17 Paket	20 Paket	67.881.473,00							20 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	14.954.569,00							8 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	105 Paket		105 Paket	105 Paket	113.379.552,00							105 Paket	0,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.954.569,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	9 Paket	14.954.569,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Paket	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						113.379.552,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	105 Paket		105 Paket	105 Paket	113.379.552,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					105 Paket	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						45.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1770 Paket		1770 Paket	1890 Paket	45.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1770 Paket	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						67.881.473,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		17 Paket	19 Paket	67.881.473,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen		16 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						212.298.160,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		100 Laporan	36 Laporan	212.298.160,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					110 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						956.013.800,00						-		0,00	
		-						956.013.800,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	286.525.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	669.488.800,00							12 Laporan	0,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						286.525.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	286.525.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						669.488.800,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	32 Laporan	669.488.800,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						183.639.100,00						-		0,00	
		-						183.639.100,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	130.400.000,00							9 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	53.239.100,00							100 Unit	0,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						130.400.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	130.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Unit	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						53.239.100,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	81 Unit	53.239.100,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Unit	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
157.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**1.000.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian						***1.000.000.000,00***								***0,00***	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						0,00						Masyarakat dan ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						0,00						Masyarakat dan ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300 Dokumen		300 Dokumen	300 Dokumen	0,00							300 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	8000 Dokumen		7500 Dokumen	7800 Dokumen	0,00							7900 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	7 Lembaga		7 Lembaga	7 Lembaga	0,00							7 Lembaga	0,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300 Dokumen		300 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					300 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	7 Lembaga		7 Lembaga	0 Lembaga	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Lembaga	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	8000 Dokumen		7500 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7900 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						0,00						ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						0,00						ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1800 Dokumen		1800 Dokumen	1800 Dokumen	0,00							1800 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	800 Dokumen		800 Dokumen	800 Dokumen	0,00							800 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen		1500 Dokumen	800 Dokumen	0,00							800 Dokumen	0,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1800 Dokumen		1800 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1800 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen		1500 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					800 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	800 Dokumen		800 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					800 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						1.000.000.000,00						ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						1.000.000.000,00						ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	0,00							200 Orang	0,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	28 Orang		28 Orang	28 Orang	1.000.000.000,00							28 Orang	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						1.000.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	28 Orang		28 Orang	8 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					28 Orang	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	200 Orang		200 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					200 Orang	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						0,00						ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						0,00						ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	0,00							500 Orang	0,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	0,00							15 Orang	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	0,00							100 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	0,00							3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	0,00							17 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	0,00							15 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dokumen		100 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang		500 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 Orang	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang		15 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Orang	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan		15 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						0,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	17 Dokumen		17 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					17 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.000.000.000,00**								**0,00**	
158.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**1.000.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional						***1.000.000.000,00***								***0,00***	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						1.000.000.000,00						ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
		-						1.000.000.000,00						ASN Kabupaten Bengkalis		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	706 Laporan		1235 Laporan	706 Laporan	1.000.000.000,00							706 Laporan	0,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						1.000.000.000,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	706 Laporan		1235 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					706 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Badan Riset dan Inovasi Daerah						**6.183.561.809,00**								**6.701.368.209,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.183.561.809,00**								**6.701.368.209,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**6.183.561.809,00**								**6.701.368.209,00**	
159.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.633.561.809,00**								**5.991.368.209,00**	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah						***5.563.561.809,00***								***5.831.368.209,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	0,00							6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00							4 Laporan	0,00	
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.619.484.340,00						-		4.619.468.209,00	
		-						4.619.484.340,00						-		4.619.468.209,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.619.484.340,00							35 Orang/bulan	4.619.468.209,00	
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.619.484.340,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.619.468.209,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	51 Orang/bulan	4.619.484.340,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					35 Orang/bulan	4.619.468.209,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						120.000.000,00						-		280.000.000,00	
		-						120.000.000,00						-		280.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan		120 Laporan	160 Laporan	50.000.000,00							170 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket		125 Paket	150 Paket	10.000.000,00							175 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket		20 Paket	35 Paket	0,00							35 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	50.000.000,00							50 Paket	100.000.000,00	
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket		20 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					35 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Paket	100.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket		125 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					175 Paket	30.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	50.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan		120 Laporan	50 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Laporan	100.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						804.077.469,00						-		811.900.000,00	
		-						804.077.469,00						-		811.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	152.903.869,00							1 Laporan	156.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Laporan		32 Laporan	32 Laporan	651.173.600,00							32 Laporan	655.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						152.903.869,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			156.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	152.903.869,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	156.900.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						651.173.600,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			655.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Laporan		32 Laporan	13 Laporan	651.173.600,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					32 Laporan	655.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000,00						-		280.000.000,00	
		-						90.000.000,00						-		280.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	80.000.000,00							5 Unit	160.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	60.000.000,00	
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	7 Unit	80.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	160.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		1 Unit	50 Unit	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	60.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		-						90.000.000,00						-		280.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00							-	60.000.000,00	
	5.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	30 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	60.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
160.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**200.000.000,00**								**260.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan						***200.000.000,00***								***260.000.000,00***	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	0 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	0 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		-						0,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	0,00	
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						200.000.000,00						-		260.000.000,00	
		-						200.000.000,00						-		260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00							1 Laporan	260.000.000,00	
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			260.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	260.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		-						0,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-		-	-	0,00							-	0,00	
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-		-	1 Rekomendasi	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	-		-	-	0,00							-	0,00	
	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-		-	-	0,00							-	0,00	
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
161.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**350.000.000,00**								**450.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan						***350.000.000,00***								***450.000.000,00***	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						350.000.000,00						-		450.000.000,00	
		-						350.000.000,00						-		450.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00							1 Laporan	300.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						250.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	300.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	-	0,00							-	0,00	
	5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		-						350.000.000,00						-		450.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	-		-	-	100.000.000,00							-	150.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	150.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Inspektorat Daerah						**15.141.205.931,01**								**38.325.995.149,92**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.141.205.931,01**								**38.325.995.149,92**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**15.141.205.931,01**								**38.325.995.149,92**	
162.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.041.205.931,01**								**36.225.995.149,92**	
		Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah						***12.241.205.931,01***								***35.425.995.149,92***	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.000.000,00						-		55.000.000,00	
		-						55.000.000,00						-		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	55.000.000,00							4 Dokumen	55.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						55.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			55.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Dokumen	55.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.083.906.043,92						-		9.083.906.043,92	
		-						9.083.906.043,92						-		9.083.906.043,92	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00							1 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan		44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	8.973.906.043,92							44 Orang/bulan	8.973.906.043,92	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.973.906.043,92			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.973.906.043,92	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan		44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	8.973.906.043,92	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					44 Orang/bulan	8.973.906.043,92	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						110.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	110.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	110.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						242.076.577,00						-		242.076.577,00	
		-						242.076.577,00						-		242.076.577,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang		45 Orang	45 Orang	242.076.577,00							45 Orang	242.076.577,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						242.076.577,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			242.076.577,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang		45 Orang	35 Orang	242.076.577,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					45 Orang	242.076.577,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.513.189.790,09						-		24.697.979.009,00	
		-						1.513.189.790,09						-		24.697.979.009,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	800.000.000,00							150 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 Paket		1500 Paket	1500 Paket	311.000.000,00							1500 Paket	311.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		Paket	20 Paket	168.000.000,00							20 Paket	168.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	234.189.790,09							60 Paket	23.418.979.009,00	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						234.189.790,09			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			23.418.979.009,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	234.189.790,09	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Paket	23.418.979.009,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						311.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			311.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 Paket		1500 Paket	900 Paket	311.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1500 Paket	311.000.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						168.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			168.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		Paket	10 Paket	168.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Paket	168.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						800.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	120 Laporan	800.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Laporan	800.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						285.000.000,00						-		285.000.000,00	
		-						285.000.000,00						-		285.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	2 Unit	204.000.000,00							1 Unit	204.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit		20 Unit	15 Unit	81.000.000,00							18 Unit	81.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						204.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			204.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	4 Unit	204.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	204.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						81.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			81.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit		20 Unit	9 Unit	81.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					18 Unit	81.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						537.309.520,00						-		537.309.520,00	
		-						537.309.520,00						-		537.309.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	190.671.600,00							2 Laporan	190.671.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	346.637.920,00							2 Laporan	346.637.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						190.671.600,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			190.671.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	190.671.600,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	190.671.600,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						346.637.920,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			346.637.920,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	16 Laporan	346.637.920,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	346.637.920,00	Inspektorat Daerah
		-						1.324.724.000,00						-		1.324.724.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	800.000.000,00							1 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	380.224.000,00							9 Unit	380.224.000,00	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						380.224.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			380.224.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	380.224.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Unit	380.224.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						800.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			800.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	800.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.324.724.000,00						-		1.324.724.000,00	
		-						1.324.724.000,00						-		1.324.724.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	144.500.000,00							-	144.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						144.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			144.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	10 Unit	144.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	144.500.000,00	Inspektorat Daerah
163.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**2.100.000.000,00**								**2.100.000.000,00**	
		Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan						***1.800.000.000,00***								***1.800.000.000,00***	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.800.000.000,00						-		1.800.000.000,00	
		-						1.800.000.000,00						-		1.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	300.000.000,00							11 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	800.000.000,00							25 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	700.000.000,00							25 Laporan	700.000.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						800.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	25 Laporan		25 Laporan	50 Laporan	800.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Laporan	800.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						700.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			700.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 Laporan		25 Laporan	35 Laporan	700.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Laporan	700.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						300.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Laporan	300.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						300.000.000,00						-		300.000.000,00	
		-						300.000.000,00						-		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	300.000.000,00							10 Laporan	300.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						300.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	300.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Laporan	300.000.000,00	Inspektorat Daerah
		Kecamatan Bengkalis						**16.312.780.259,00**								**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**16.312.780.259,00**								**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**16.312.780.259,00**								**0,00**	
164.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.432.349.486,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***9.416.724.486,00***								***0,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						56.777.000,00						-		0,00	
		-						56.777.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	29.702.000,00							3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	11.450.000,00							8 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.625.000,00							2 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.702.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	29.702.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11.450.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	11.450.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.625.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.625.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.350.541.727,00						-		0,00	
		-						7.350.541.727,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	15.625.000,00							15 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.334.916.727,00							55 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.334.916.727,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	65 Orang/bulan	7.334.916.727,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					55 Orang/bulan	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						15.625.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	15.625.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						574.029.575,00						-		0,00	
		-						574.029.575,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	280.855.000,00							100 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	104.350.000,00							3 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	114.890.372,00							7 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	12.630.893,00							17 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	61.303.310,00							30 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.630.893,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	12.630.893,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					17 Paket	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						61.303.310,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	61.303.310,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Paket	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						104.350.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	104.350.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						114.890.372,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	3 Paket	114.890.372,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Paket	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						280.855.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	280.855.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						34.000.000,00						-		0,00	
		-						34.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	14.000.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00							3 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						14.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	14.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Unit	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						974.589.484,00						-		0,00	
		-						974.589.484,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	254.006.124,00							100 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan		49 Laporan	49 Laporan	720.583.360,00							49 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						254.006.124,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	3 Laporan	254.006.124,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						720.583.360,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan		49 Laporan	4 Laporan	720.583.360,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					49 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
		-						442.411.700,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	165.740.000,00							12 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						165.740.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	20 Unit	165.740.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Unit	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						442.411.700,00						-		0,00	
		-						442.411.700,00						-		0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	53.410.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	223.261.700,00							-	0,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						53.410.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	55 Unit	53.410.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						223.261.700,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	223.261.700,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	0,00	Kecamatan Bengkalis
165.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.630.134.270,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***1.630.134.270,00***								***0,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						800.000.000,00						-		0,00	
		-						800.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	800.000.000,00							8 Dokumen	0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						800.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen		8 Dokumen	7 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Dokumen	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						233.323.331,00						-		0,00	
		-						233.323.331,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	233.323.331,00							2 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						233.323.331,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	233.323.331,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bengkalis || Kelurahan Damon || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						30.887.596,00						-		0,00	
		-						30.887.596,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	30.887.596,00							200 Dokumen	0,00	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						30.887.596,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	200 Dokumen		200 Dokumen	1 Dokumen	30.887.596,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					200 Dokumen	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						565.923.343,00						-		0,00	
		-						565.923.343,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	565.923.343,00							1 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						565.923.343,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	565.923.343,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
166.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.169.471.104,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***5.169.471.104,00***								***0,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						428.957.316,00						-		0,00	
		-						428.957.316,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	428.957.316,00							1 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						428.957.316,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	428.957.316,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4.619.400.000,00						-		0,00	
		-						4.619.400.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	4.019.400.000,00							3 Pokmas / Ormas	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	600.000.000,00							3 Unit	0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						600.000.000,00			-	-	Penguatan Konektivitas dan Peningkatan Layanan Infrastruktur			0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	6 Unit	600.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Unit	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						4.019.400.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	4.019.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Pokmas / Ormas	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						121.113.788,00						-		0,00	
		-						121.113.788,00						-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	121.113.788,00							1 Keluarga	0,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						121.113.788,00			-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Vokasi dan Kesehatan)			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1 Keluarga		1 Keluarga	310 Keluarga	121.113.788,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Keluarga	0,00	Kecamatan Bengkalis
167.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**45.975.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***45.975.000,00***								***0,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						18.850.000,00						-		0,00	
		-						18.850.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.850.000,00							1 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						18.850.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.850.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						27.125.000,00						-		0,00	
		-						27.125.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.125.000,00							1 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						27.125.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.125.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Kecamatan Bengkalis
168.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**34.850.399,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***34.850.399,00***								***0,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						34.850.399,00						-		0,00	
		-						34.850.399,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.819.540,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.030.859,00							1 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						15.030.859,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.030.859,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Kecamatan Bengkalis
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						19.819.540,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.819.540,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Kecamatan Bengkalis
		Kecamatan Bantan						**7.068.358.577,00**								**8.305.047.702,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.068.358.577,00**								**8.305.047.702,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.068.358.577,00**								**8.305.047.702,00**	
169.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.865.558.577,00**								**5.599.047.702,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***4.851.558.577,00***								***5.379.047.702,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.421.446,00						-		140.000.000,00	
		-						24.421.446,00						-		140.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	14.421.446,00							2 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	10.000.000,00							25 Laporan	20.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.421.446,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			120.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	14.421.446,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	120.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.575.891.691,00						-		3.785.447.702,00	
		-						3.575.891.691,00						-		3.785.447.702,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.575.891.691,00							27 Orang/bulan	3.785.447.702,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.575.891.691,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.785.447.702,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		27 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.575.891.691,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					27 Orang/bulan	3.785.447.702,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						341.200.000,00						-		547.000.000,00	
		-						341.200.000,00						-		547.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	7.200.000,00							10 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	115.000.000,00							250 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	80.000.000,00							3 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.000.000,00							1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00							4 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	120.000.000,00							5 Paket	150.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	15.000.000,00	Kecamatan Bantan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						120.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	120.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						80.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	80.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.200.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Dokumen	7.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						115.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	115.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					250 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						-		140.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		140.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	14.000.000,00							8 Unit	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	36.000.000,00							7 Unit	70.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						14.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			70.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	11 Unit	14.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Unit	70.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			70.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	5 Unit	36.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	70.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						662.445.440,00						-		661.600.000,00	
		-						662.445.440,00						-		661.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	79.500.000,00							2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	582.945.440,00							2 Laporan	561.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						79.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	79.500.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						582.945.440,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			561.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	26 Laporan	582.945.440,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	561.600.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						211.600.000,00						-		325.000.000,00	
		-						211.600.000,00						-		325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	196.600.000,00							4 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	15.000.000,00							7 Unit	75.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						196.600.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	5 Unit	196.600.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	250.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	15.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Bantan
170.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**965.000.000,00**								**890.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***965.000.000,00***								***890.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						965.000.000,00						-		890.000.000,00	
		-						965.000.000,00						-		890.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	930.000.000,00							6 Dokumen	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	35.000.000,00							23 Laporan	40.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						35.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					23 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						930.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			850.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	930.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Dokumen	850.000.000,00	Kecamatan Bantan
171.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**711.800.000,00**								**1.250.000.000,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***711.800.000,00***								***1.250.000.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						550.400.000,00						-		950.000.000,00	
		-						550.400.000,00						-		950.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	550.400.000,00							4 Laporan	950.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						550.400.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			950.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	550.400.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	950.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						161.400.000,00						-		300.000.000,00	
		-						161.400.000,00						-		300.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	40 Keluarga		40 Keluarga	40 Keluarga	161.400.000,00							40 Keluarga	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						161.400.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	40 Keluarga		40 Keluarga	30 Keluarga	161.400.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Keluarga	300.000.000,00	Kecamatan Bantan
172.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**105.000.000,00**								**115.000.000,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***105.000.000,00***								***115.000.000,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						70.000.000,00						-		80.000.000,00	
		-						70.000.000,00						-		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00							3 Laporan	80.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						70.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			80.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	80.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						35.000.000,00						-		35.000.000,00	
		-						35.000.000,00						-		35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	35.000.000,00							23 Laporan	35.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						35.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					23 Laporan	35.000.000,00	Kecamatan Bantan
173.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**381.000.000,00**								**401.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***381.000.000,00***								***401.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						381.000.000,00						-		401.000.000,00	
		-						381.000.000,00						-		401.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	31.000.000,00							23 Dokumen	51.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32 Orang		32 Orang	32 Orang	350.000.000,00							32 Orang	350.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						350.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32 Orang		32 Orang	32 Orang	350.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					32 Orang	350.000.000,00	Kecamatan Bantan
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						31.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			51.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	31.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					23 Dokumen	51.000.000,00	Kecamatan Bantan
174.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**40.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***40.000.000,00***								***50.000.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
		-						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	40.000.000,00							23 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						40.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Bantan || Desa Selat Baru || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					23 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Bantan
		Kecamatan Bukit Batu						**8.840.431.482,00**								**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.840.431.482,00**								**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**8.840.431.482,00**								**0,00**	
175.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.439.383.038,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***6.439.383.038,00***								***0,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00						-		0,00	
		-						25.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.242.478,00						-		0,00	
		-						4.605.242.478,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.605.242.478,00							35 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.605.242.478,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.605.242.478,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					35 Orang/bulan	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						652.297.000,00						-		0,00	
		-						652.297.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen		17 Dokumen	20 Dokumen	98.000.000,00							20 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	293.297.000,00							210 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5600 Paket		4850 Paket	5000 Paket	96.000.000,00							5200 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		10 Paket	10 Paket	55.000.000,00							10 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		15 Paket	10 Paket	35.000.000,00							10 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket		14 Paket	15 Paket	75.000.000,00							15 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		15 Paket	10 Paket	35.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Paket	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket		14 Paket	15 Paket	75.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Paket	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						96.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5600 Paket		4850 Paket	5000 Paket	96.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5200 Paket	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		10 Paket	10 Paket	55.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Paket	0,00	Kecamatan Bukit Batu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						98.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen		17 Dokumen	20 Dokumen	98.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Dokumen	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						293.297.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	293.297.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					210 Laporan	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.000.000,00						-		0,00	
		-						145.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		5 Unit	5 Unit	60.000.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		4 Unit	4 Unit	85.000.000,00							4 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						60.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						85.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		4 Unit	4 Unit	85.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						841.878.640,00						-		0,00	
		-						841.878.640,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	173.000.000,00							4 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	668.878.640,00							2 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						173.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	173.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						668.878.640,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	668.878.640,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169.964.920,00						-		0,00	
		-						169.964.920,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	82.227.056,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.737.864,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.000.000,00							1 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						47.737.864,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.737.864,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						82.227.056,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	82.227.056,00	Kab. Bengkalis	-					2 Unit	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	0,00	Kecamatan Bukit Batu
176.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**869.010.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***869.010.000,00***								***0,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						833.000.000,00						-		0,00	
		-						833.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	800.000.000,00							8 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	33.000.000,00							2 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						33.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	33.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						800.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Dokumen	0,00	Kecamatan Bukit Batu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						36.010.000,00						-		0,00	
		-						36.010.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	36.010.000,00							3 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						36.010.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	36.010.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	0,00	Kecamatan Bukit Batu
177.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.460.623.444,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.260.623.444,00***								***0,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.100.623.444,00						-		0,00	
		-						1.100.623.444,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.100.623.444,00							4 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.100.623.444,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.100.623.444,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						160.000.000,00						-		0,00	
		-						160.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	160.000.000,00							10 Keluarga	0,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						160.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	160.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Keluarga	0,00	Kecamatan Bukit Batu
178.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**23.900.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***23.900.000,00***								***0,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00							3 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						23.900.000,00						-		0,00	
		-						23.900.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.900.000,00							2 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						23.900.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	23.900.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Kecamatan Bukit Batu
179.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**225.515.000,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***225.515.000,00***								***0,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						225.515.000,00						-		0,00	
		-						225.515.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.515.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	200.000.000,00							1000 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Orang	0,00	Kecamatan Bukit Batu
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						25.515.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.515.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Kecamatan Bukit Batu
180.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**22.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***22.000.000,00***								***0,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						22.000.000,00						-		0,00	
		-						22.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						22.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Kecamatan Bukit Batu
		Kelurahan Sungai Pakning						**1.200.000.000,00**								**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.200.000.000,00**								**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.200.000.000,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
181.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.460.623.444,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.200.000.000,00***								***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.200.000.000,00						-		0,00	
		-						1.200.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.200.000.000,00							4 Pokmas / Ormas	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00							5 Unit	0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Kelurahan Sungai Pakning
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Pokmas / Ormas	0,00	Kelurahan Sungai Pakning
		Kecamatan Siak Kecil						**8.182.601.415,00**								**9.315.938.785,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.182.601.415,00**								**9.315.938.785,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**8.182.601.415,00**								**9.315.938.785,00**	
182.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.836.124.940,00**								**6.538.920.652,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***5.816.124.940,00***								***6.478.920.652,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00						-		60.000.000,00	
		-						25.000.000,00						-		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00							3 Dokumen	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00							3 Laporan	20.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.754.059.900,00						-		4.950.211.000,00	
		-						4.754.059.900,00						-		4.950.211.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.754.059.900,00							34 Orang/bulan	4.950.211.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.754.059.900,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.950.211.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.754.059.900,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					34 Orang/bulan	4.950.211.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.500.000,00						-		20.000.000,00	
		-						5.500.000,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.500.000,00							1 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						5.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.565.040,00						-		338.709.652,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						173.565.040,00						-		338.709.652,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.000.000,00							2 Dokumen	28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00							2 Dokumen	60.709.652,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	54.000.000,00							25 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00							3 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		3 Paket	4 Paket	30.000.000,00							4 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	44 Paket	30.565.040,00							44 Paket	40.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.565.040,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	5 Paket	30.565.040,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					44 Paket	40.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	55.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		3 Paket	4 Paket	30.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	35.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						24.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			28.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	28.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						54.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		20 Laporan	6 Laporan	54.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						15.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			60.709.652,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	60.709.652,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						690.000.000,00						-		818.000.000,00	
		-						690.000.000,00						-		818.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00							2 Laporan	218.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00							1 Laporan	600.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			218.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	218.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						600.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			600.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	600.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						188.000.000,00						-		352.000.000,00	
		-						188.000.000,00						-		352.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	180.000.000,00							2 Unit	180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	8.000.000,00							6 Unit	172.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	3 Unit	180.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			172.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	31 Unit	8.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	172.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
183.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.771.476.475,00**								**2.065.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***1.771.476.475,00***								***2.065.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						715.000.000,00						-		865.000.000,00	
		-						715.000.000,00						-		865.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00							12 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00							6 Laporan	65.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						15.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			65.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Laporan	65.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						700.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			800.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	10 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	800.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.056.476.475,00						-		1.200.000.000,00	
		-						1.056.476.475,00						-		1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.056.476.475,00							3 Laporan	1.200.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.056.476.475,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.056.476.475,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	1.200.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
184.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**200.000.000,00**								**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***200.000.000,00***								***200.000.000,00***	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						200.000.000,00						-		200.000.000,00	
		-						200.000.000,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga		25 Keluarga	25 Keluarga	200.000.000,00							25 Keluarga	200.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga		25 Keluarga	25 Keluarga	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Keluarga	200.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
185.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**100.000.000,00**								**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***100.000.000,00***								***200.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						100.000.000,00						-		200.000.000,00	
		-						100.000.000,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00							7 Laporan	200.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan		7 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
186.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**235.000.000,00**								**267.683.335,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***235.000.000,00***								***267.683.335,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						235.000.000,00						-		267.683.335,00	
		-						235.000.000,00						-		267.683.335,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	25.000.000,00							7 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Orang		1 Orang	1 Orang	210.000.000,00							1 Orang	237.683.335,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						210.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			237.683.335,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Orang		1 Orang	100 Orang	210.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Orang	237.683.335,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						25.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			30.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
187.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**40.000.000,00**								**44.334.798,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***20.000.000,00***								***44.334.798,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						40.000.000,00						-		44.334.798,00	
		-						40.000.000,00						-		44.334.798,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00							7 Dokumen	24.334.798,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00							7 Dokumen	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen		7 Dokumen	17 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Dokumen	20.000.000,00	Kecamatan Siak Kecil
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			24.334.798,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7 Dokumen		7 Dokumen	17 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Dokumen	24.334.798,00	Kecamatan Siak Kecil
		Kecamatan Bandar Laksamana						**7.055.168.237,00**								**7.055.168.237,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.055.168.237,00**								**7.055.168.237,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.055.168.237,00**								**7.055.168.237,00**	
188.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.854.856.073,00**								**4.854.856.073,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***4.854.856.073,00***								***4.854.856.073,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.000.000,00						-		35.000.000,00	
		-						35.000.000,00						-		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00							3 Dokumen	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			35.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	35.000.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.305.019.760,00						-		3.305.019.760,00	
		-						3.305.019.760,00						-		3.305.019.760,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.305.019.760,00							12 Orang/bulan	3.305.019.760,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.305.019.760,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.305.019.760,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.305.019.760,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Orang/bulan	3.305.019.760,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						496.590.673,00						-		496.590.673,00	
		-						496.590.673,00						-		496.590.673,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.800.000,00							2 Dokumen	28.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.417.098,00							2 Laporan	143.417.098,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	112.500.000,00							3 Paket	112.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00							1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	40.000.000,00							11 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	44 Paket	111.873.575,00							44 Paket	111.873.575,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						40.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			40.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	10 Paket	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Paket	40.000.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						111.873.575,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			111.873.575,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	35 Paket	111.873.575,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					44 Paket	111.873.575,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						112.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			112.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	112.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	112.500.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	60.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	60.000.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						28.800.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			28.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	28.800.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						143.417.098,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			143.417.098,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	143.417.098,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	143.417.098,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.145.640,00						-		639.145.640,00	
		-						639.145.640,00						-		639.145.640,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00							1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	519.145.640,00							1 Laporan	519.145.640,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						120.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						519.145.640,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			519.145.640,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	519.145.640,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	519.145.640,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						379.100.000,00						-		379.100.000,00	
		-						379.100.000,00						-		379.100.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	346.600.000,00							4 Unit	346.600.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit		31 Unit	31 Unit	32.500.000,00							31 Unit	32.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						346.600.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			346.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	346.600.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	346.600.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						32.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			32.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit		31 Unit	15 Unit	32.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					31 Unit	32.500.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
189.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**299.574.402,00**								**299.574.402,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***299.574.402,00***								***299.574.402,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						219.074.402,00						-		219.074.402,00	
		-						219.074.402,00						-		219.074.402,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	191.000.000,00							12 Dokumen	191.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	28.074.402,00							6 Laporan	28.074.402,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						28.074.402,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			28.074.402,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		6 Laporan	7 Laporan	28.074.402,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Laporan	28.074.402,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						191.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			191.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	15 Dokumen	191.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	191.000.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						80.500.000,00						-		80.500.000,00	
		-						80.500.000,00						-		80.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	80.500.000,00							3 Laporan	80.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						80.500.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			80.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	80.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	80.500.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
190.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.366.760.500,00**								**1.366.760.500,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.366.760.500,00***								***1.366.760.500,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.140.912.164,00						-		1.140.912.164,00	
		-						1.140.912.164,00						-		1.140.912.164,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.140.912.164,00							6 Laporan	1.140.912.164,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.140.912.164,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.140.912.164,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	3 Laporan	1.140.912.164,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Laporan	1.140.912.164,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						225.848.336,00						-		225.848.336,00	
		-						225.848.336,00						-		225.848.336,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga		25 Keluarga	25 Keluarga	225.848.336,00							25 Keluarga	225.848.336,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						225.848.336,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			225.848.336,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga		25 Keluarga	25 Keluarga	225.848.336,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					25 Keluarga	225.848.336,00	Kecamatan Bandar Laksamana
191.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**123.110.000,00**								**123.110.000,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***123.110.000,00***								***123.110.000,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						97.050.000,00						-		97.050.000,00	
		-						97.050.000,00						-		97.050.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	97.050.000,00							3 Laporan	97.050.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						97.050.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			97.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	97.050.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	97.050.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						26.060.000,00						-		26.060.000,00	
		-						26.060.000,00						-		26.060.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	26.060.000,00							7 Laporan	26.060.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						26.060.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			26.060.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan		7 Laporan	12 Laporan	26.060.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Laporan	26.060.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
192.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**410.867.262,00**								**410.867.262,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***410.867.262,00***								***410.867.262,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						410.867.262,00						-		410.867.262,00	
		-						410.867.262,00						-		410.867.262,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	59.400.000,00							7 Dokumen	59.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		70 Orang	Orang	351.467.262,00							Orang	351.467.262,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						351.467.262,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			351.467.262,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		70 Orang	70 Orang	351.467.262,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Orang	351.467.262,00	Kecamatan Bandar Laksamana
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						59.400.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			59.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	2 Dokumen	59.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Dokumen	59.400.000,00	Kecamatan Bandar Laksamana
		Kecamatan Rupat						**15.996.382.343,00**								**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.996.382.343,00**								**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.996.382.343,00**								**0,00**	
193.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.500.423.557,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***7.500.423.557,00***								***0,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						134.472.037,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		0,00	
		-						134.472.037,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	49.260.000,00							7 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	85.212.037,00							7 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						49.260.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	3 Dokumen	49.260.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						85.212.037,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	85.212.037,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.936.610.710,00						-		0,00	
		-						4.936.610.710,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		6 Laporan	6 Laporan	21.760.000,00							6 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		44 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.914.850.710,00							46 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.914.850.710,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		44 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.914.850.710,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					46 Orang/bulan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						21.760.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		6 Laporan	16 Laporan	21.760.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						420.330.428,00						-		0,00	
		-						420.330.428,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen		7 Dokumen	8 Dokumen	24.900.000,00							9 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242 Laporan		165 Laporan	182 Laporan	307.214.000,00							200 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19327 Paket		13200 Paket	14520 Paket	53.690.000,00							15972 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		33 Paket	36 Paket	20.150.000,00							40 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	209 Paket		143 Paket	157 Paket	14.376.428,00							173 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.376.428,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	209 Paket		143 Paket	130 Paket	14.376.428,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					173 Paket	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						53.690.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19327 Paket		13200 Paket	12000 Paket	53.690.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15972 Paket	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.150.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		33 Paket	30 Paket	20.150.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						24.900.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen		7 Dokumen	6 Dokumen	24.900.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						307.214.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242 Laporan		165 Laporan	150 Laporan	307.214.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					200 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.588.783.760,00						-		0,00	
		-						1.588.783.760,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17 Laporan		13 Laporan	14 Laporan	171.894.000,00							15 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.416.889.760,00							12 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan		550 Laporan	600 Laporan	0,00							650 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan		550 Laporan	200 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					650 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						171.894.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17 Laporan		13 Laporan	12 Laporan	171.894.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.416.889.760,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.416.889.760,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						420.226.622,00						-		0,00	
		-						420.226.622,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		3 Unit	4 Unit	163.787.813,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	151.455.214,00							10 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		11 Unit	12 Unit	104.983.595,00							13 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						151.455.214,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	9 Unit	151.455.214,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	0,00	Kecamatan Rupat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						163.787.813,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		3 Unit	1 Unit	163.787.813,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						104.983.595,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		11 Unit	10 Unit	104.983.595,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					13 Unit	0,00	Kecamatan Rupat
194.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**864.924.115,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***864.924.115,00***								***0,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						747.989.115,00						-		0,00	
		-						747.989.115,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	715.841.595,00							3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.147.520,00							1 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						32.147.520,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.147.520,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						715.841.595,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	10 Dokumen	715.841.595,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						116.935.000,00						-		0,00	
		-						116.935.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	116.935.000,00							5 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						116.935.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	116.935.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
195.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**7.110.678.255,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***7.071.854.989,00***								***0,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						452.050.000,00						-		0,00	
		-						452.050.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	452.050.000,00							7 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						452.050.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	452.050.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.339.400.000,00						-		0,00	
		-						6.339.400.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	4.339.400.000,00							7 Pokmas / Ormas	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit		30 Unit	32 Unit	2.000.000.000,00							34 Unit	0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.000.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit		30 Unit	30 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					34 Unit	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						4.339.400.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4.339.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Pokmas / Ormas	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						319.228.255,00						-		0,00	
		-						319.228.255,00						-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	76.496.678,00							30 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	184.496.678,00							30 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	19.411.633,00							30 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	19.411.633,00							30 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	19.411.633,00							30 Keluarga	0,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						19.411.633,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	19.411.633,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Keluarga	0,00	Kecamatan Rupat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri						76.496.678,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	76.496.678,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Keluarga	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						184.496.678,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	184.496.678,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Keluarga	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						19.411.633,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	19.411.633,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Keluarga	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						19.411.633,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	19.411.633,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Keluarga	0,00	Kecamatan Rupat
196.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**86.020.180,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***86.020.180,00***								***0,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						58.500.180,00						-		0,00	
		-						58.500.180,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	58.500.180,00							5 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						58.500.180,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan		3 Laporan	15 Laporan	58.500.180,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						27.520.000,00						-		0,00	
		-						27.520.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	27.520.000,00							16 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						27.520.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	27.520.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat
197.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**387.796.236,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***387.796.236,00***								***0,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						387.796.236,00						-		0,00	
		-						387.796.236,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	98.472.240,00							16 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang		50 Orang	50 Orang	109.499.740,00							50 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang		100 Orang	100 Orang	179.824.256,00							100 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						109.499.740,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang		50 Orang	50 Orang	109.499.740,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						179.824.256,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang		100 Orang	100 Orang	179.824.256,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Orang	0,00	Kecamatan Rupat
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						98.472.240,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	98.472.240,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat
198.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**46.540.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***46.540.000,00***								***0,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						46.540.000,00						-		0,00	
		-						46.540.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.520.000,00							12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	28.020.000,00							12 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						28.020.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	28.020.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						18.520.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.520.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat
		Kecamatan Rupat Utara						**7.551.546.251,00**								**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.551.546.251,00**								**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.551.546.251,00**								**0,00**	
199.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.144.959.149,00**								**0,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***5.054.959.149,00***								***0,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						94.012.940,00						Masyarakat, Instansi Terkait, Pemerintah Desa		0,00	
		-						94.012.940,00						Masyarakat, Instansi Terkait, Pemerintah Desa		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	64.228.776,00							6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	29.784.164,00							3 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						64.228.776,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	64.228.776,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						29.784.164,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	29.784.164,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.481.469.182,00						Masyarakat, Instansi Terkait		0,00	
		-						3.481.469.182,00						Masyarakat, Instansi Terkait		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00							12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.446.469.182,00							26 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.446.469.182,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.446.469.182,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					26 Orang/bulan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						35.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						669.066.007,00						Masyarakat, Instansi Terkait		0,00	
		-						669.066.007,00						Masyarakat, Instansi Terkait		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Dokumen		156 Dokumen	156 Dokumen	16.800.000,00							156 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	10.000.000,00							13 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334 Laporan		336 Laporan	342 Laporan	402.881.352,00							342 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	90.000.000,00							4 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	43.213.222,00							7 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	11.339.246,00							15 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		49 Paket	50 Paket	54.832.187,00							50 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.339.246,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	14 Paket	11.339.246,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					15 Paket	0,00	Kecamatan Rupat Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						54.832.187,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		49 Paket	51 Paket	54.832.187,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Paket	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						90.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3200 Paket	90.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Paket	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						43.213.222,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	9 Paket	43.213.222,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Paket	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						16.800.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Dokumen		156 Dokumen	156 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					156 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						40.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						402.881.352,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334 Laporan		336 Laporan	350 Laporan	402.881.352,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					342 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen		13 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					13 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						707.411.020,00						Masyarakat, Instansi Terkait		0,00	
		-						707.411.020,00						Masyarakat, Instansi Terkait		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	71.000.500,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	636.410.520,00							12 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						71.000.500,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	71.000.500,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						636.410.520,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	13 Laporan	636.410.520,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.000.000,00						Masyarakat, Instansi Terkait		0,00	
		-						193.000.000,00						Masyarakat, Instansi Terkait		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		5 Unit	12 Unit	90.000.000,00							14 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit		38 Unit	40 Unit	103.000.000,00							44 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		5 Unit	5 Unit	90.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					14 Unit	0,00	Kecamatan Rupat Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						103.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit		38 Unit	37 Unit	103.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					44 Unit	0,00	Kecamatan Rupat Utara
200.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**54.069.652,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***54.069.652,00***								***0,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						54.069.652,00						Masyarakat, Instansi terkait, Pemerintah Desa		0,00	
		-						54.069.652,00						Masyarakat, Instansi terkait, Pemerintah Desa		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	54.069.652,00							2 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						54.069.652,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	9 Laporan	54.069.652,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
201.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.327.245.545,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.327.245.545,00***								***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.116.585.545,00						Masyarakat, Instansi Terkait, Pemerintah Desa		0,00	
		-						1.116.585.545,00						Masyarakat, Instansi Terkait, Pemerintah Desa		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.098.885.545,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.700.000,00							8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						17.700.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.700.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.098.885.545,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	17 Laporan	1.098.885.545,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						210.660.000,00						Masyarakat, Instansi Terkait, Pemerintah Desa		0,00	
		-						210.660.000,00						Masyarakat, Instansi Terkait, Pemerintah Desa		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 Keluarga		80 Keluarga	80 Keluarga	210.660.000,00							80 Keluarga	0,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						210.660.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 Keluarga		80 Keluarga	160 Keluarga	210.660.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Keluarga	0,00	Kecamatan Rupat Utara
202.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**127.214.820,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***127.214.820,00***								***0,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						96.564.820,00						Masyarakat, Instansi terkait		0,00	
		-						96.564.820,00						Masyarakat, Instansi terkait		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.289.820,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	64.275.000,00							1 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						32.289.820,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	32.289.820,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						64.275.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	64.275.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						30.650.000,00						Masyarakat, Instansi terkait		0,00	
		-						30.650.000,00						Masyarakat, Instansi terkait		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.650.000,00							1 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						30.650.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	30.650.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	0,00	Kecamatan Rupat Utara
203.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**811.495.505,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***811.495.505,00***								***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						811.495.505,00						Masyarakat, Instansi terkait, Pemerintah Desa		0,00	
		-						811.495.505,00						Masyarakat, Instansi terkait, Pemerintah Desa		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.412.680,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	330.850.688,00							1000 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	458.232.137,00							1000 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						458.232.137,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	458.232.137,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Orang	0,00	Kecamatan Rupat Utara
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						330.850.688,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	330.850.688,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Orang	0,00	Kecamatan Rupat Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						22.412.680,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.412.680,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat Utara
204.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**86.561.580,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***86.561.580,00***								***0,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						86.561.580,00						Masyarakat, Instansi terkait, Pemerintah Desa		0,00	
		-						86.561.580,00						Masyarakat, Instansi terkait, Pemerintah Desa		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	35.369.340,00							16 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	51.192.240,00							8 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						51.192.240,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	51.192.240,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						35.369.340,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	8 Dokumen	35.369.340,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Dokumen	0,00	Kecamatan Rupat Utara
		Kecamatan Mandau						**23.917.125.433,00**								**26.163.659.606,70**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**23.917.125.433,00**								**26.163.659.606,70**	
	7.01	**KECAMATAN**						**23.917.125.433,00**								**26.163.659.606,70**	
205.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***18.426.050.087,00***								***20.123.476.727,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						312.486.283,00						-		343.734.911,00	
		-						312.486.283,00						-		343.734.911,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	138.021.960,00							10 Dokumen	151.824.156,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	174.464.323,00							20 Laporan	191.910.755,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	0,00							10 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						138.021.960,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			151.824.156,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	6 Dokumen	138.021.960,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Dokumen	151.824.156,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						174.464.323,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			191.910.755,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		20 Laporan	6 Laporan	174.464.323,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Laporan	191.910.755,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Laporan	0,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.896.508.902,00						-		13.086.159.791,50	
		-						11.896.508.902,00						-		13.086.159.791,50	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	69.264.605,00							5 Laporan	76.191.065,50	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	11.827.244.297,00							76 Orang/bulan	13.009.968.726,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.827.244.297,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			13.009.968.726,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	11.827.244.297,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					76 Orang/bulan	13.009.968.726,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						69.264.605,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			76.191.065,50	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	7 Laporan	69.264.605,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	76.191.065,50	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.913.665,00						-		40.605.031,50	
		-						36.913.665,00						-		40.605.031,50	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	36.913.665,00							12 Dokumen	40.605.031,50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						36.913.665,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			40.605.031,50	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	36.913.665,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	40.605.031,50	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	161.610.000,00							5 Dokumen	177.771.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						80.668.029,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			88.734.831,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	80.668.029,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	88.734.831,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						402.511.807,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			442.762.987,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	402.511.807,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	442.762.987,00	Kecamatan Mandau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						488.435.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			537.278.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	488.435.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	537.278.500,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						355.146.554,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			390.661.209,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	355.146.554,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	390.661.209,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						30.620.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			33.682.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	30.620.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	33.682.000,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						794.676.412,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			728.965.688,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	794.676.412,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	728.965.688,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						161.610.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			177.771.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	161.610.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	177.771.000,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	0,00							20 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	0,00							50 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Unit	0,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	15 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Unit	0,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.562.100.000,00							2 Laporan	1.718.310.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250 Laporan		1250 Laporan	1250 Laporan	29.162.835,00							1250 Laporan	32.079.118,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						29.162.835,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			32.079.118,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250 Laporan		1250 Laporan	1250 Laporan	29.162.835,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1250 Laporan	32.079.118,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						560.085.600,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			616.094.160,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	11 Laporan	560.085.600,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	616.094.160,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.562.100.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.718.310.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.562.100.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	1.718.310.000,00	Kecamatan Mandau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						576.748.000,00			-	-	-			634.422.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	15 Unit	576.748.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	634.422.800,00	Kecamatan Mandau
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.138.377.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.252.214.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	15 Unit	1.138.377.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	1.252.214.700,00	Kecamatan Mandau
206.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**627.471.769,00**								**690.218.945,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***627.471.769,00***								***690.218.945,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						599.969.089,00						-		659.965.997,00	
		-						599.969.089,00						-		659.965.997,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	500.000.000,00							8 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	99.969.089,00							250 Laporan	109.965.997,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						99.969.089,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			109.965.997,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	99.969.089,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					250 Laporan	109.965.997,00	Kecamatan Mandau
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			550.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					8 Dokumen	550.000.000,00	Kecamatan Mandau
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						27.502.680,00						-		30.252.948,00	
		-						27.502.680,00						-		30.252.948,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	27.502.680,00							9 Laporan	30.252.948,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						27.502.680,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			30.252.948,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	27.502.680,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Laporan	30.252.948,00	Kecamatan Mandau
207.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***3.258.698.180,00***								***3.584.567.998,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.026.264.180,00						-		3.328.890.598,00	
		-						3.026.264.180,00						-		3.328.890.598,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.026.264.180,00							5 Laporan	3.328.890.598,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.026.264.180,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.328.890.598,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.026.264.180,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	3.328.890.598,00	Kecamatan Mandau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	0,00							9 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Laporan	0,00	Kecamatan Mandau
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00							1000 Keluarga	1.467.877.400,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						232.434.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			255.677.400,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	232.434.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	255.677.400,00	Kecamatan Mandau
208.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**756.250.000,00**								**831.875.000,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***756.250.000,00***								***831.875.000,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						500.000.000,00						-		550.000.000,00	
		-						500.000.000,00						-		550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	500.000.000,00							24 Laporan	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			550.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan		24 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					24 Laporan	550.000.000,00	Kecamatan Mandau
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						256.250.000,00						-		281.875.000,00	
		-						256.250.000,00						-		281.875.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	256.250.000,00							48 Laporan	281.875.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						256.250.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			281.875.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48 Laporan		48 Laporan	11 Laporan	256.250.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					48 Laporan	281.875.000,00	Kecamatan Mandau
209.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***824.762.667,00***								***907.238.933,70***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	99.775.000,00							12 Dokumen	109.752.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						724.987.667,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			797.486.433,70	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	724.987.667,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	797.486.433,70	Kecamatan Mandau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						99.775.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			109.752.500,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	99.775.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	109.752.500,00	Kecamatan Mandau
210.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**23.892.730,00**								**26.282.003,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***23.892.730,00***								***26.282.003,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.892.730,00						-		26.282.003,00	
		-						23.892.730,00						-		26.282.003,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	23.892.730,00							11 Dokumen	26.282.003,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						23.892.730,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			26.282.003,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	23.892.730,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Dokumen	26.282.003,00	Kecamatan Mandau
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	0,00	Kecamatan Mandau
		Kelurahan Babussalam						**1.559.333.632,00**								**1.715.266.994,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.559.333.632,00**								**1.715.266.994,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.559.333.632,00**								**1.715.266.994,00**	
211.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***46.753.632,00***								***51.428.994,00***	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.008.394,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.409.233,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	4.008.394,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	4.409.233,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.896.583,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.386.241,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	4.896.583,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	5.386.241,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.995.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.494.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	4.995.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	5.494.500,00	Kelurahan Babussalam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.895,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.200.984,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	2.000.895,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	2.200.984,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.640.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.904.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	2.640.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	2.904.000,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.183.360,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.201.696,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	10.183.360,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	11.201.696,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.999.400,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.999.340,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	9.999.400,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	10.999.340,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	14 Unit	5.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	5.500.000,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.030.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.333.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	4 Unit	3.030.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	3.333.000,00	Kelurahan Babussalam
212.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.462.580.000,00***								***1.608.838.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	900 Lembaga Kemasyarakatan	90.145.000,00							900 Lembaga Kemasyarakatan	99.159.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	81 Pokmas / Ormas	13.239.000.000,00							81 Pokmas / Ormas	14.562.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00							27 Unit	2.750.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						6.980.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			7.678.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	6.980.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					900 Lembaga Kemasyarakatan	7.678.000,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	8 Unit	0,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Unit	0,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.337.600.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.471.360.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	1.337.600.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Pokmas / Ormas	1.471.360.000,00	Kelurahan Babussalam
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00							1000 Keluarga	1.467.877.400,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						118.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			129.800.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	118.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	129.800.000,00	Kelurahan Babussalam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
213.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***50.000.000,00***								***55.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	50.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Babussalam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	55.000.000,00	Kelurahan Babussalam
		Kelurahan Batang Serosa						**1.148.259.719,00**								**1.263.085.689,20**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.148.259.719,00**								**1.263.085.689,20**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.148.259.719,00**								**1.263.085.689,20**	
214.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***46.059.719,00***								***50.665.689,20***	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.983.693,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.382.062,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	3.983.693,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	4.382.062,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.037.709,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.541.479,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	5.037.709,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	5.541.479,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.300.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	3.300.000,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.045,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.300.049,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	3.000.045,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	3.300.049,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.640.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.904.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	2.640.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	2.904.000,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.178.272,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.196.099,20	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	10.178.272,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	11.196.099,20	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.350.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.285.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	9.350.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	10.285.000,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	14 Unit	5.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	5.500.000,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.870.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.257.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	4 Unit	3.870.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	4.257.000,00	Kelurahan Batang Serosa
215.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.047.200.000,00***								***1.151.920.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	900 Lembaga Kemasyarakatan	90.145.000,00							900 Lembaga Kemasyarakatan	99.159.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	81 Pokmas / Ormas	13.239.000.000,00							81 Pokmas / Ormas	14.562.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00							27 Unit	2.750.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						6.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			6.600.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					900 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	8 Unit	0,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Unit	0,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						918.200.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.010.020.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	918.200.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Pokmas / Ormas	1.010.020.000,00	Kelurahan Batang Serosa
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00						1000 Keluarga	1.467.877.400,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						123.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			135.300.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	123.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	135.300.000,00	Kelurahan Batang Serosa
216.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***55.000.000,00***								***60.500.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						55.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			60.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	55.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Batang Serosa || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	60.500.000,00	Kelurahan Batang Serosa
		Kelurahan Air Jamban						**3.269.601.630,00**								**3.596.561.792,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.269.601.630,00**								**3.596.561.792,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.269.601.630,00**								**3.596.561.792,00**	
217.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***99.421.630,00***								***109.363.792,00***	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.323.661,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.356.027,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	10.323.661,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	11.356.027,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.296.444,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			14.626.088,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	13.296.444,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	14.626.088,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.100.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			22.110.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	20.100.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	22.110.000,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.043.025,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.847.327,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	8.043.025,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	8.847.327,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.700.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.970.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	2.700.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	2.970.000,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.999.400,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			16.499.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	14.999.400,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	16.499.340,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.999.100,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			16.499.010,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	14.999.100,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	16.499.010,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	14 Unit	5.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	5.500.000,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.960.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.956.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	4 Unit	9.960.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	10.956.000,00	Kelurahan Air Jamban
218.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***3.075.180.000,00***								***3.382.698.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	900 Lembaga Kemasyarakatan	90.145.000,00							900 Lembaga Kemasyarakatan	99.159.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	81 Pokmas / Ormas	13.239.000.000,00							81 Pokmas / Ormas	14.562.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00							27 Unit	2.750.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						18.180.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			19.998.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	18.180.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					900 Lembaga Kemasyarakatan	19.998.000,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			550.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	8 Unit	500.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Unit	550.000.000,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.429.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.671.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	2.429.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Pokmas / Ormas	2.671.900.000,00	Kelurahan Air Jamban
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00							1000 Keluarga	1.467.877.400,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						128.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			140.800.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	128.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	140.800.000,00	Kelurahan Air Jamban
219.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***95.000.000,00***								***104.500.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						95.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			104.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	95.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Air Jamban || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	104.500.000,00	Kelurahan Air Jamban
		Kelurahan Balik Alam						**1.405.888.451,00**								**1.546.477.294,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.405.888.451,00**								**1.546.477.294,50**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.405.888.451,00**								**1.546.477.294,50**	
220.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***51.073.451,00***								***56.180.794,50***	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.008.394,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.409.233,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	4.008.394,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	4.409.233,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.998.406,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.498.246,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	4.998.406,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	5.498.246,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.995.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.494.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	4.995.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	5.494.500,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.999.335,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.299.268,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	2.999.335,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	3.299.268,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.640.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.904.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	2.640.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	2.904.000,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.187.085,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.205.793,50	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	10.187.085,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	11.205.793,50	Kelurahan Balik Alam
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.185.231,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			13.403.754,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	12.185.231,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	13.403.754,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	14 Unit	5.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	5.500.000,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.060.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.466.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	4 Unit	4.060.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	4.466.000,00	Kelurahan Balik Alam
221.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.299.815.000,00***								***1.429.796.500,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	900 Lembaga Kemasyarakatan	90.145.000,00							900 Lembaga Kemasyarakatan	99.159.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	81 Pokmas / Ormas	13.239.000.000,00							81 Pokmas / Ormas	14.562.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00							27 Unit	2.750.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8.015.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.816.500,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	8.015.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					900 Lembaga Kemasyarakatan	8.816.500,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	8 Unit	0,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Unit	0,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.173.800.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.291.180.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	1.173.800.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Pokmas / Ormas	1.291.180.000,00	Kelurahan Balik Alam
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00							1000 Keluarga	1.467.877.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						118.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			129.800.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	118.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	129.800.000,00	Kelurahan Balik Alam
222.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***55.000.000,00***								***60.500.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						55.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			60.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	55.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Balik Alam || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	60.500.000,00	Kelurahan Balik Alam
		Kelurahan Duri Timur						**1.848.584.279,00**								**2.023.242.706,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.848.584.279,00**								**2.023.242.706,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.848.584.279,00**								**2.023.242.706,00**	
223.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***76.399.279,00***								***73.839.206,00***	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.998.676,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			9.898.543,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	8.998.676,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	9.898.543,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.300.783,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.130.861,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	10.300.783,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	1.130.861,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.050.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.055.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	10.050.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	11.055.000,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.004.010,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			6.604.411,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	6.004.010,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	6.604.411,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.700.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.970.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	2.700.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	2.970.000,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.185.910,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.204.501,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	10.185.910,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	11.204.501,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.199.900,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			14.519.890,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	13.199.900,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	14.519.890,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	14 Unit	5.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	5.500.000,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.960.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.956.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	4 Unit	9.960.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	10.956.000,00	Kelurahan Duri Timur
224.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.702.185.000,00***								***1.872.403.500,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	900 Lembaga Kemasyarakatan	90.145.000,00							900 Lembaga Kemasyarakatan	99.159.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	81 Pokmas / Ormas	13.239.000.000,00							81 Pokmas / Ormas	14.562.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00							27 Unit	2.750.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.985.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			12.083.500,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	10.985.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					900 Lembaga Kemasyarakatan	12.083.500,00	Kelurahan Duri Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			550.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	8 Unit	500.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Unit	550.000.000,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.068.200.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.175.020.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	1.068.200.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Pokmas / Ormas	1.175.020.000,00	Kelurahan Duri Timur
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00							1000 Keluarga	1.467.877.400,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						123.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			135.300.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	123.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	135.300.000,00	Kelurahan Duri Timur
225.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***70.000.000,00***								***77.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						70.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			77.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	70.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Timur || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	77.000.000,00	Kelurahan Duri Timur
		Kelurahan Talang Mandi						**2.505.878.394,00**								**2.756.466.233,10**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.505.878.394,00**								**2.756.466.233,10**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.505.878.394,00**								**2.756.466.233,10**	
226.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***90.083.394,00***								***99.091.733,10***	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.323.661,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.356.027,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	10.323.661,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	11.356.027,00	Kelurahan Talang Mandi
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.994.512,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			19.793.963,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	17.994.512,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	19.793.963,00	Kelurahan Talang Mandi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			13.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	12.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	13.200.000,00	Kelurahan Talang Mandi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.999.800,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.499.780,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	4.999.800,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	5.499.780,00	Kelurahan Talang Mandi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.700.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.970.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	2.700.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	2.970.000,00	Kelurahan Talang Mandi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.185.421,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.203.963,10	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	10.185.421,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	11.203.963,10	Kelurahan Talang Mandi
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.870.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.757.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	18.870.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	20.757.000,00	Kelurahan Talang Mandi
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	14 Unit	5.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	5.500.000,00	Kelurahan Talang Mandi
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.010.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.811.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	4 Unit	8.010.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	8.811.000,00	Kelurahan Talang Mandi
227.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***2.330.795.000,00***								***2.563.874.500,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	900 Lembaga Kemasyarakatan	90.145.000,00							900 Lembaga Kemasyarakatan	99.159.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	81 Pokmas / Ormas	13.239.000.000,00							81 Pokmas / Ormas	14.562.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00							27 Unit	2.750.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						11.995.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			13.194.500,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	11.995.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					900 Lembaga Kemasyarakatan	13.194.500,00	Kelurahan Talang Mandi
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			550.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	8 Unit	500.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Unit	550.000.000,00	Kelurahan Talang Mandi
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.695.800.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.865.380.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	1.695.800.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Pokmas / Ormas	1.865.380.000,00	Kelurahan Talang Mandi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00							1000 Keluarga	1.467.877.400,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						123.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			135.300.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	123.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	135.300.000,00	Kelurahan Talang Mandi
228.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***85.000.000,00***								***93.500.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						85.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			93.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	85.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Talang Mandi || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	93.500.000,00	Kelurahan Talang Mandi
		Kelurahan Gajah Sakti						**1.601.394.502,00**								**1.761.533.951,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.601.394.502,00**								**1.761.533.951,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.601.394.502,00**								**1.761.533.951,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
229.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***65.399.502,00***								***71.939.451,00***	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.985.380,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			7.683.918,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	6.985.380,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	7.683.918,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.299.075,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.328.982,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	10.299.075,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	11.328.982,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.995.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.794.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	7.995.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	8.794.500,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.062.130,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.468.343,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	4.062.130,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	4.468.343,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.700.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.970.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	2.700.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	2.970.000,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.130.910,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.144.001,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	10.130.910,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	11.144.001,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.297.007,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.326.707,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	10.297.007,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	11.326.707,00	Kelurahan Gajah Sakti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	14 Unit	5.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	5.500.000,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.930.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.723.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	4 Unit	7.930.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	8.723.000,00	Kelurahan Gajah Sakti
230.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.475.995.000,00***								***1.623.594.500,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	900 Lembaga Kemasyarakatan	90.145.000,00							900 Lembaga Kemasyarakatan	99.159.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	81 Pokmas / Ormas	13.239.000.000,00							81 Pokmas / Ormas	14.562.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00							27 Unit	2.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						6.995.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			7.694.500,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	6.995.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					900 Lembaga Kemasyarakatan	7.694.500,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	8 Unit	0,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Unit	0,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.346.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.480.600.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	1.346.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Pokmas / Ormas	1.480.600.000,00	Kelurahan Gajah Sakti
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00							1000 Keluarga	1.467.877.400,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						123.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			135.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	123.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	135.300.000,00	Kelurahan Gajah Sakti
231.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***60.000.000,00***								***66.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						60.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			66.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	60.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Gajah Sakti || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	66.000.000,00	Kelurahan Gajah Sakti
		Kelurahan Pematang Pudu						**2.671.938.531,00**								**2.939.132.383,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.671.938.531,00**								**2.939.132.383,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.671.938.531,00**								**2.939.132.383,00**	
232.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***125.943.531,00***								***138.537.883,00***	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.323.661,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.356.027,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	10.323.661,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	11.356.027,00	Kelurahan Pematang Pudu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.989.625,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			14.288.587,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	12.989.625,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	14.288.587,00	Kelurahan Pematang Pudu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.050.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			44.055.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	40.050.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	44.055.000,00	Kelurahan Pematang Pudu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.990.135,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			8.789.148,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	7.990.135,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	8.789.148,00	Kelurahan Pematang Pudu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.700.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.970.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	2.700.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	2.970.000,00	Kelurahan Pematang Pudu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.995.910,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			16.495.501,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	14.995.910,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	16.495.501,00	Kelurahan Pematang Pudu
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.934.200,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			21.927.620,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	19.934.200,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	21.927.620,00	Kelurahan Pematang Pudu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.000.000,00			-	-	-			7.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	14 Unit	7.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	7.700.000,00	Kelurahan Pematang Pudu
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.960.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			10.956.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	4 Unit	9.960.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	10.956.000,00	Kelurahan Pematang Pudu
233.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***2.450.995.000,00***								***2.696.094.500,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	900 Lembaga Kemasyarakatan	90.145.000,00							900 Lembaga Kemasyarakatan	99.159.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	81 Pokmas / Ormas	13.239.000.000,00							81 Pokmas / Ormas	14.562.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00							27 Unit	2.750.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						14.995.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			16.494.500,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	14.995.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					900 Lembaga Kemasyarakatan	16.494.500,00	Kelurahan Pematang Pudu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			550.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	8 Unit	500.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Unit	550.000.000,00	Kelurahan Pematang Pudu
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.808.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.988.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	1.808.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Pokmas / Ormas	1.988.800.000,00	Kelurahan Pematang Pudu
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00							1000 Keluarga	1.467.877.400,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						128.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			140.800.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	128.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	140.800.000,00	Kelurahan Pematang Pudu
234.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***95.000.000,00***								***104.500.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						95.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			104.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	95.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Pematang Pudu || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	104.500.000,00	Kelurahan Pematang Pudu
		Kelurahan Duri Barat						**2.186.869.731,00**								**2.405.556.703,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.186.869.731,00**								**2.405.556.703,50**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.186.869.731,00**								**2.405.556.703,50**	
235.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.077.653.956,00**								**20.830.040.973,30**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***50.469.731,00***								***55.516.703,50***	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
		-						2.737.000.733,00						-		2.855.322.430,30	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	54.680.000,00							30 Dokumen	60.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	895.909.765,00							120 Laporan	840.322.376,30	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	596.615.000,00							40 Paket	656.276.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	397.247.029,00							80 Paket	436.971.729,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	143.607.242,00							170 Paket	157.967.963,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	410 Paket	487.331.697,00							410 Paket	525.864.862,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.983.693,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.382.062,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	170 Paket		170 Paket	17 Paket	3.983.693,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					170 Paket	4.382.062,00	Kelurahan Duri Barat
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.006.753,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.507.428,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	410 Paket		410 Paket	17 Paket	5.006.753,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					410 Paket	5.507.428,00	Kelurahan Duri Barat
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.995.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.494.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	4 Paket	4.995.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Paket	5.494.500,00	Kelurahan Duri Barat
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.001.100,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.301.210,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	7 Paket	3.001.100,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					80 Paket	3.301.210,00	Kelurahan Duri Barat
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.640.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.904.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	2.640.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					30 Dokumen	2.904.000,00	Kelurahan Duri Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.187.085,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.205.793,50	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	250 Laporan	10.187.085,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					120 Laporan	11.205.793,50	Kelurahan Duri Barat
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
		-						2.271.969.373,00						-		2.499.166.309,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	680.706.538,00							100 Laporan	748.777.191,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.786.100,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			12.964.710,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	11.786.100,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					100 Laporan	12.964.710,00	Kelurahan Duri Barat
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
		-						1.822.775.000,00						-		2.005.052.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	623.748.000,00							60 Unit	686.122.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit	1.199.027.000,00							70 Unit	1.318.929.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	14 Unit	5.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					60 Unit	5.500.000,00	Kelurahan Duri Barat
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.870.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			4.257.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	4 Unit	3.870.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					70 Unit	4.257.000,00	Kelurahan Duri Barat
236.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.189.843.180,00**								**22.208.827.498,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***2.086.400.000,00***								***2.295.040.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
		-						15.829.145.000,00						-		17.412.059.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	900 Lembaga Kemasyarakatan	90.145.000,00							900 Lembaga Kemasyarakatan	99.159.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	81 Pokmas / Ormas	13.239.000.000,00							81 Pokmas / Ormas	14.562.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00							27 Unit	2.750.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						6.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			6.600.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	900 Lembaga Kemasyarakatan		900 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					900 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000,00	Kelurahan Duri Barat
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						500.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			550.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		27 Unit	8 Unit	500.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					27 Unit	550.000.000,00	Kelurahan Duri Barat
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.462.400.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.608.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas / Ormas		81 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	1.462.400.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					81 Pokmas / Ormas	1.608.640.000,00	Kelurahan Duri Barat
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
		-						1.334.434.000,00						-		1.467.877.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.334.434.000,00							1000 Keluarga	1.467.877.400,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						118.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			129.800.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1000 Keluarga		1000 Keluarga	100 Keluarga	118.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Keluarga	129.800.000,00	Kelurahan Duri Barat
237.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.439.762.667,00**								**1.583.738.933,70**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***50.000.000,00***								***55.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
		-						1.439.762.667,00						-		1.583.738.933,70	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.339.987.667,00							50 Orang	1.473.986.433,70	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	3 Orang	50.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Mandau || Kelurahan Duri Barat || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	55.000.000,00	Kelurahan Duri Barat
		Kecamatan Pinggir						**15.404.102.366,00**								**16.172.307.480,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.404.102.366,00**								**16.172.307.480,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.404.102.366,00**								**16.172.307.480,00**	
238.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.847.276.926,00**								**9.287.640.769,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***8.787.276.926,00***								***9.225.640.769,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						120.000.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		124.000.000,00	
		-						120.000.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		124.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00							2 Dokumen	62.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00							3 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						60.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			62.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	62.000.000,00	Kecamatan Pinggir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						60.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			62.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	62.000.000,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.303.924.243,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		6.619.120.455,00	
		-						6.303.924.243,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		6.619.120.455,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6.303.924.243,00							34 Orang/bulan	6.619.120.455,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.303.924.243,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			6.619.120.455,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6.303.924.243,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					34 Orang/bulan	6.619.120.455,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		0,00	
		-						0,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	0,00							6 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Orang	0,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.122.752.234,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		1.178.889.844,00	
		-						1.122.752.234,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		1.178.889.844,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	117.940.480,00							1 Dokumen	123.837.504,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	651.236.605,00							12 Laporan	683.798.435,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	130.000.000,00							2 Paket	136.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	111.577.794,00							2 Paket	117.156.683,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	49.997.355,00							2 Paket	52.497.222,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.000.000,00							1 Paket	65.100.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						49.997.355,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			52.497.222,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	49.997.355,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	52.497.222,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			65.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	62.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Paket	65.100.000,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						130.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			136.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	130.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	136.500.000,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						111.577.794,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			117.156.683,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	111.577.794,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	117.156.683,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						651.236.605,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			683.798.435,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	651.236.605,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	683.798.435,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						117.940.480,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			123.837.504,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	117.940.480,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	123.837.504,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.431.407,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		30.902.977,00	
		-						29.431.407,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		30.902.977,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	29.431.407,00							2 Unit	30.902.977,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						29.431.407,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			30.902.977,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	29.431.407,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	30.902.977,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						873.209.470,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		916.869.943,00	
		-						873.209.470,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		916.869.943,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	136.552.000,00							2 Laporan	143.379.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	693.493.760,00							1 Laporan	728.168.448,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.163.710,00							1 Laporan	45.321.895,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						43.163.710,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			45.321.895,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.163.710,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	45.321.895,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						136.552.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			143.379.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	136.552.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	143.379.600,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						693.493.760,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			728.168.448,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	693.493.760,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	728.168.448,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						397.959.572,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		417.857.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						397.959.572,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		417.857.550,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	138.139.572,00							5 Unit	145.046.550,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	259.820.000,00							1 Unit	272.811.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						138.139.572,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			145.046.550,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	138.139.572,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	145.046.550,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						259.820.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			272.811.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	259.820.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	272.811.000,00	Kecamatan Pinggir
239.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**632.123.277,00**								**663.729.440,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***632.123.277,00***								***663.729.440,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						594.197.837,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		623.907.728,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						594.197.837,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		623.907.728,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	565.098.123,00							1 Dokumen	593.353.029,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.099.714,00							1 Laporan	30.554.699,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						29.099.714,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			30.554.699,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.099.714,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	30.554.699,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						565.098.123,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			593.353.029,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	565.098.123,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	593.353.029,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						37.925.440,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		39.821.712,00	
		-						37.925.440,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		39.821.712,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.925.440,00							1 Laporan	39.821.712,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						37.925.440,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			39.821.712,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.925.440,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	39.821.712,00	Kecamatan Pinggir
240.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.449.400.000,00**								**5.721.870.000,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***5.449.400.000,00***								***5.721.870.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.462.400.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		1.535.520.000,00	
		-						1.462.400.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		1.535.520.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.462.400.000,00							4 Laporan	1.535.520.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.462.400.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.535.520.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.462.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	1.535.520.000,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.470.929.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		3.644.475.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						3.470.929.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		3.644.475.450,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.855.000,00							2 Lembaga Kemasyarakatan	11.397.750,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.585.674.000,00							2 Pokmas / Ormas	2.714.957.700,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	874.400.000,00							2 Unit	918.120.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.855.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			11.397.750,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.855.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Lembaga Kemasyarakatan	11.397.750,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						874.400.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			918.120.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	874.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Unit	918.120.000,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.585.674.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.714.957.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.585.674.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Pokmas / Ormas	2.714.957.700,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						516.071.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		541.874.550,00	
		-						516.071.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		541.874.550,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2 Keluarga		2 Keluarga	2 Keluarga	516.071.000,00							2 Keluarga	541.874.550,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						516.071.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			541.874.550,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2 Keluarga		2 Keluarga	2 Keluarga	516.071.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Keluarga	541.874.550,00	Kecamatan Pinggir
241.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**43.500.000,00**								**45.675.000,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***43.500.000,00***								***45.675.000,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.500.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		7.875.000,00	
		-						7.500.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		7.875.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00							2 Laporan	7.875.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						7.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			7.875.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	7.875.000,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						36.000.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		37.800.000,00	
		-						36.000.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		37.800.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00							1 Laporan	37.800.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						36.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			37.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	36.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	37.800.000,00	Kecamatan Pinggir
242.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**405.802.163,00**								**426.092.271,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***405.802.163,00***								***426.092.271,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						405.802.163,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		426.092.271,00	
		-						405.802.163,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		426.092.271,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	86.400.000,00							2 Dokumen	90.720.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	319.402.163,00							50 Orang	335.372.271,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						319.402.163,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			335.372.271,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		50 Orang	50 Orang	319.402.163,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	335.372.271,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						86.400.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			90.720.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	86.400.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	90.720.000,00	Kecamatan Pinggir
243.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**26.000.000,00**								**27.300.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***26.000.000,00***								***27.300.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						26.000.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		27.300.000,00	
		-						26.000.000,00						Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Desa		27.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00							1 Dokumen	7.350.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00							1 Dokumen	19.950.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						19.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			19.950.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	19.950.000,00	Kecamatan Pinggir
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						7.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			7.350.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	7.350.000,00	Kecamatan Pinggir
		Kecamatan Bathin Solapan						**7.674.634.575,00**								**7.421.157.965,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.674.634.575,00**								**7.421.157.965,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.674.634.575,00**								**7.421.157.965,00**	
244.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.796.833.071,00**								**3.334.285.413,00**	
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***4.796.833.071,00***								***3.184.285.413,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						77.702.000,00						-		322.538.000,00	
		-						77.702.000,00						-		322.538.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	67.702.000,00							2 Dokumen	282.538.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00							2 Laporan	40.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						67.702.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			282.538.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	67.702.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	282.538.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			40.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.954.309.677,00						-		22.100.000,00	
		-						2.954.309.677,00						-		22.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		17 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.934.109.677,00							19 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.934.109.677,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		17 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.934.109.677,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					19 Orang/bulan	0,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						430.923.981,00						-		1.290.000.000,00	
		-						430.923.981,00						-		1.290.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00							12 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 Laporan		480 Laporan	480 Laporan	266.186.000,00							480 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00							Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	37.050.000,00							2 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	57.687.981,00							2 Paket	130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.687.981,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			130.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	57.687.981,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	130.000.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			160.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Paket	160.000.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						37.050.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	37.050.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						266.186.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			750.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 Laporan		480 Laporan	450 Laporan	266.186.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					480 Laporan	750.000.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.223.897.413,00						-		1.299.647.413,00	
		-						1.223.897.413,00						-		1.299.647.413,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.750.000,00							12 Laporan	300.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	999.147.413,00							12 Laporan	999.147.413,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						224.750.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.750.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	300.500.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						999.147.413,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			999.147.413,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	999.147.413,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	999.147.413,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						110.000.000,00						-		400.000.000,00	
		-						110.000.000,00						-		400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	65.000.000,00							5 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00							1 Unit	150.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	250.000.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						45.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
		-						2.954.309.677,00						-		22.100.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	20.200.000,00							-	22.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						20.200.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			22.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	4 Laporan	20.200.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					-	22.100.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
245.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**48.420.000,00**								**50.240.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***48.420.000,00***								***50.240.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						48.420.000,00						-		50.240.000,00	
		-						48.420.000,00						-		50.240.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.420.000,00							1 Laporan	50.240.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						48.420.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.240.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.420.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	50.240.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
246.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.720.680.000,00**								**1.995.960.000,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***1.720.680.000,00***								***1.995.960.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.635.680.000,00						-		1.550.630.000,00	
		-						1.635.680.000,00						-		1.550.630.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.635.680.000,00							2 Laporan	1.550.630.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.635.680.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.550.630.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.635.680.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	1.550.630.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						85.000.000,00						-		445.330.000,00	
		-						85.000.000,00						-		445.330.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	450 Keluarga		350 Keluarga	400 Keluarga	85.000.000,00							400 Keluarga	445.330.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						85.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			445.330.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	450 Keluarga		350 Keluarga	400 Keluarga	85.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					400 Keluarga	445.330.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
247.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**252.040.000,00**								**366.975.000,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***252.040.000,00***								***366.975.000,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						201.900.000,00						-		227.780.000,00	
		-						201.900.000,00						-		227.780.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	201.900.000,00							12 Laporan	227.780.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						201.900.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			227.780.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	201.900.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	227.780.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						50.140.000,00						-		139.195.000,00	
		-						50.140.000,00						-		139.195.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.140.000,00							12 Laporan	139.195.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						50.140.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			139.195.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.140.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	139.195.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
248.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**824.117.684,00**								**1.613.322.552,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***824.117.684,00***								***1.613.322.552,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						824.117.684,00						-		1.613.322.552,00	
		-						824.117.684,00						-		1.613.322.552,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.300.000,00							12 Dokumen	140.778.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	450 Orang		450 Orang	450 Orang	438.896.180,00							450 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang		300 Orang	360 Orang	334.921.504,00							361 Orang	472.544.552,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						438.896.180,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	450 Orang		450 Orang	450 Orang	438.896.180,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					450 Orang	1.000.000.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						334.921.504,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			472.544.552,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang		300 Orang	300 Orang	334.921.504,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					361 Orang	472.544.552,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.300.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			140.778.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.300.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	140.778.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
249.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**32.543.820,00**								**60.375.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***32.543.820,00***								***60.375.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						32.543.820,00						-		60.375.000,00	
		-						32.543.820,00						-		60.375.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	13.199.820,00							13 Dokumen	35.001.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	19.344.000,00							13 Dokumen	25.374.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						19.344.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			25.374.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	19.344.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					13 Dokumen	25.374.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						13.199.820,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			35.001.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	13.199.820,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					13 Dokumen	35.001.000,00	Kecamatan Bathin Solapan
		Kecamatan Talang Muandau						**7.446.389.573,00**								**7.226.509.590,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.446.389.573,00**								**7.226.509.590,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.446.389.573,00**								**7.226.509.590,00**	
250.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.166.539.573,00**								**5.920.179.590,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah						***5.166.539.573,00***								***5.270.179.590,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00						Pemerintah Kecamatan, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten		70.000.000,00	
		-						70.000.000,00						Pemerintah Kecamatan, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten		70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	70.000.000,00							5 Dokumen	70.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						70.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			70.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	70.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.431.949.173,00						Pemerintah Kecamatan (ASN)		3.431.949.173,00	
		-						3.431.949.173,00						Pemerintah Kecamatan (ASN)		3.431.949.173,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		17 Orang/bulan	19 Orang/bulan	3.431.949.173,00							19 Orang/bulan	3.431.949.173,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.431.949.173,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			3.431.949.173,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		17 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.431.949.173,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					19 Orang/bulan	3.431.949.173,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						454.008.083,00						Pemerintah Kecamatan, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten		500.000.000,00	
		-						454.008.083,00						Pemerintah Kecamatan, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00							12 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan		450 Laporan	450 Laporan	300.000.000,00							450 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	55.000.000,00							3 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.000.000,00							3 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	16.274.600,00							5 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	38.333.483,00							2 Paket	50.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.274.600,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	16.274.600,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						38.333.483,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	6 Paket	38.333.483,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	55.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	60.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Paket	40.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						14.400.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	14.400.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Dokumen	20.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan		450 Laporan	200 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					450 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						Pemerintah Kecamatan		700.000.000,00	
		-						0,00						Pemerintah Kecamatan		700.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		5 Unit	6 Unit	0,00							4 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		24 Unit	20 Unit	0,00							20 Unit	300.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		24 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			400.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Unit	400.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						738.232.317,00						Pemerintah Kecamatan		768.230.417,00	
		-						738.232.317,00						Pemerintah Kecamatan		768.230.417,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.001.900,00							12 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	618.230.417,00							12 Laporan	618.230.417,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						120.001.900,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.001.900,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						618.230.417,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			618.230.417,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	618.230.417,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Laporan	618.230.417,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						472.350.000,00						Pemerintah Kecamatan		450.000.000,00	
		-						472.350.000,00						Pemerintah Kecamatan		450.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	180.000.000,00							5 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	252.950.000,00							12 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit		40 Unit	40 Unit	39.400.000,00							40 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						252.950.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	11 Unit	252.950.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					12 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						180.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	4 Unit	180.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						39.400.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit		40 Unit	40 Unit	39.400.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					40 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
251.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**631.905.000,00**								**95.330.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan						***631.905.000,00***								***95.330.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						307.830.000,00						Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		45.330.000,00	
		-						307.830.000,00						Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		45.330.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	275.500.000,00							5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.330.000,00							1 Laporan	45.330.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						32.330.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			45.330.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.330.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Laporan	45.330.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						275.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	275.500.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	0,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						324.075.000,00						Pemerintah Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		50.000.000,00	
		-						324.075.000,00						Pemerintah Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	324.075.000,00							2 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						324.075.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			50.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	324.075.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
252.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**870.200.000,00**								**338.000.000,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						***870.200.000,00***								***338.000.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						703.000.000,00						Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		138.000.000,00	
		-						703.000.000,00						Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		138.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	703.000.000,00							4 Laporan	138.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						703.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			138.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	703.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	138.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						167.200.000,00						PKK Kecamatan, PKK Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan		200.000.000,00	
		-						167.200.000,00						PKK Kecamatan, PKK Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan		200.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	200 Keluarga		150 Keluarga	150 Keluarga	167.200.000,00							150 Keluarga	200.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						167.200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			200.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	200 Keluarga		150 Keluarga	100 Keluarga	167.200.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Keluarga	200.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
253.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**194.320.000,00**								**198.000.000,00**	
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan						***194.320.000,00***								***198.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						138.000.000,00						Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		138.000.000,00	
		-						138.000.000,00						Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		138.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	138.000.000,00							3 Laporan	138.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						138.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			138.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	138.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Laporan	138.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						56.320.000,00						Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		60.000.000,00	
		-						56.320.000,00						Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	56.320.000,00							4 Laporan	60.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						56.320.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	56.320.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					4 Laporan	60.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
254.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**522.425.000,00**								**600.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan						***522.425.000,00***								***600.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						522.425.000,00						-		600.000.000,00	
		-						522.425.000,00						-		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	122.000.000,00							3 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1050 Orang		1025 Orang	1025 Orang	400.425.000,00							1025 Orang	450.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						400.425.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			450.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1050 Orang		1025 Orang	800 Orang	400.425.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1025 Orang	450.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						122.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	122.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
255.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**61.000.000,00**								**75.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan						***61.000.000,00***								***75.000.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						61.000.000,00						Pemerintah Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		75.000.000,00	
		-						61.000.000,00						Pemerintah Desa, Masyarakat, Instansi Vertikal dan Perangkat Kecamatan		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00							2 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	36.000.000,00							9 Dokumen	45.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						36.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			45.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen		9 Dokumen	2 Dokumen	36.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						9 Dokumen	45.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						25.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Riau || Kab. Bengkalis || Kecamatan Talang Muandau || Desa Beringin || 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					2 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Talang Muandau
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**17.924.027.532,00**								**18.412.010.843,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**17.924.027.532,00**								**18.412.010.843,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**17.924.027.532,00**								**18.412.010.843,00**	
256.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.703.228.421,00**								**8.391.211.732,00**	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						***7.703.228.421,00***								***8.391.211.732,00***	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00						-		100.000.000,00	
		-						150.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00							5 Dokumen	100.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.824.820.817,00						-		5.824.820.817,00	
		-						5.824.820.817,00						-		5.824.820.817,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		35 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.824.820.817,00							38 Orang/bulan	5.824.820.817,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.824.820.817,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.824.820.817,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.824.820.817,00	Kab. Bengkalis	Dana Alokasi Umum (DAU)					38 Orang/bulan	5.824.820.817,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						846.805.104,00						-		1.134.437.507,00	
		-						846.805.104,00						-		1.134.437.507,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen		15 Dokumen	16 Dokumen	24.000.000,00							16 Dokumen	24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		450 Laporan	500 Laporan	471.537.800,00							500 Laporan	694.407.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3150 Paket		2920 Paket	3000 Paket	96.600.000,00							3050 Paket	108.600.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket		12 Paket	16 Paket	98.038.880,00							16 Paket	109.565.306,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		12 Paket	18 Paket	41.249.885,00							18 Paket	51.249.885,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket		80 Paket	85 Paket	115.378.539,00							88 Paket	126.615.316,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						41.249.885,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			51.249.885,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		12 Paket	12 Paket	41.249.885,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					18 Paket	51.249.885,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						115.378.539,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			126.615.316,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket		80 Paket	75 Paket	115.378.539,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					88 Paket	126.615.316,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						96.600.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			108.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3150 Paket		2920 Paket	2000 Paket	96.600.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					3050 Paket	108.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						98.038.880,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			109.565.306,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket		12 Paket	15 Paket	98.038.880,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Paket	109.565.306,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						24.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			24.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					16 Dokumen	24.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						471.537.800,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			694.407.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		450 Laporan	300 Laporan	471.537.800,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					500 Laporan	694.407.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		270.765.272,00	
		-						0,00						-		270.765.272,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		2 Unit	7 Unit	0,00							10 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		4 Unit	9 Unit	0,00							10 Unit	270.765.272,00	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			270.765.272,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		4 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					10 Unit	270.765.272,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						523.101.500,00						-		604.127.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						523.101.500,00						-		604.127.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	103.637.000,00							5 Laporan	116.275.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	413.592.000,00							9 Laporan	478.456.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	1000 Laporan	5.872.500,00							1000 Laporan	9.396.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.872.500,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			9.396.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	12 Laporan	5.872.500,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1000 Laporan	9.396.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						103.637.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			116.275.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	12 Laporan	103.637.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					5 Laporan	116.275.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						413.592.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			478.456.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	12 Laporan	413.592.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					9 Laporan	478.456.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.501.000,00						-		457.061.136,00	
		-						358.501.000,00						-		457.061.136,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	254.210.000,00							7 Unit	332.770.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		8 Unit	15 Unit	104.291.000,00							20 Unit	124.291.136,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		5 Unit	7 Unit	0,00							6 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						254.210.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			332.770.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	254.210.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					7 Unit	332.770.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						104.291.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			124.291.136,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		8 Unit	10 Unit	104.291.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					20 Unit	124.291.136,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6 Unit	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
257.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**2.580.000.000,00**								**2.580.000.000,00**	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan						***2.580.000.000,00***								***2.580.000.000,00***	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						2.580.000.000,00						-		2.580.000.000,00	
		-						2.580.000.000,00						-		2.580.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00							50 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang		100 Orang	100 Orang	280.000.000,00							150 Orang	280.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	75 Orang		75 Orang	75 Orang	2.200.000.000,00							75 Orang	2.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						280.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			280.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang		100 Orang	100 Orang	280.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Orang	280.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang		50 Orang	30 Orang	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						2.200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			2.200.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	75 Orang		75 Orang	75 Orang	2.200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					75 Orang	2.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
258.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**5.961.428.000,00**								**5.961.428.000,00**	
		Meningkatnya etika dan budaya politik						***5.961.428.000,00***								***5.961.428.000,00***	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						5.961.428.000,00						-	5.961.428.000,00	
		-						5.961.428.000,00						-	5.961.428.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	100.000.000,00							11 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	5.861.428.000,00							50 Orang	5.861.428.000,00	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						5.861.428.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			5.861.428.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	5.861.428.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	5.861.428.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan		11 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					11 Laporan	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
259.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**150.000.000,00**								**150.000.000,00**	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						***150.000.000,00***								***150.000.000,00***	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						150.000.000,00						-		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00						-		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	150.000.000,00							50 Orang	150.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						150.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					50 Orang	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
260.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**220.000.000,00**								**120.000.000,00**	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat						***220.000.000,00***								***120.000.000,00***	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						220.000.000,00						-		120.000.000,00	
		-						220.000.000,00						-		120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang		80 Orang	150 Orang	200.000.000,00							150 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang		30 Orang	150 Orang	20.000.000,00							150 Orang	20.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						20.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang		30 Orang	50 Orang	20.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Orang	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						200.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang		80 Orang	50 Orang	200.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					150 Orang	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
261.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**1.309.371.111,00**								**1.209.371.111,00**	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikakan						***1.309.371.111,00***								***1.209.371.111,00***	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.309.371.111,00						-		1.209.371.111,00	
		-						1.309.371.111,00						-		1.209.371.111,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.209.371.111,00							1 Dokumen	1.209.371.111,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	52 Orang		52 Orang	52 Orang	100.000.000,00							52 Orang	0,00	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						100.000.000,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	52 Orang		52 Orang	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					52 Orang	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						1.209.371.111,00			-	-	Reformasi Birokrasi (Tata Kelola dan Kinerja Aparatur)			1.209.371.111,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.209.371.111,00	Kab. Bengkalis	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					1 Dokumen	1.209.371.111,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H							**3.260.173.371.307,93**								**1.737.595.695.581,42**	